

2014

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

ENDURANCE FOR THE LONG HAUL AHEAD



DAFTAR ISI

CONTENTS



ENDURANCE FOR THE LONG HAUL AHEAD	1	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	76	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	140
DAYA TAHAN UNTUK MELANGKAH KE DEPAN		MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS		Corporate Social Responsibility	
PROFIL PERUSAHAAN	4	TINJAUAN KONDISI UMUM DAN PROSPEK USAHA	76	MANAJEMEN RISIKO	140
CORPORATE PROFILE		Review on General Condition and Prospect		Risk Management	
INFORMASI UMUM PERUSAHAAN	4	KONDISI MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA	76	PEDOMAN GCG	140
Corporate Information		Global and Domestic Macroeconomic Conditions		GCG Guidelines	
SEKILAS PERUSAHAAN	5	KONDISI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA	78	Sistem <i>Whistleblowing</i>	142
Company in Brief		Conditions of The Mining Industry in Indonesia		Whistleblowing System	
VISI, MISI, DAN FILOSOFI PERUSAHAAN	6	TINJAUAN BISNIS	80	PERKARA HUKUM	143
Corporate Vision, Mission and Philosophy		Business Review		Legal Cases	
BISNIS KAMI	7	SEGMENT BATU BARA	80	LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	144
Our Business		Coal Segment		CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT	
AREA OPERASIONAL	8	SEGMENT NON BATU BARA-MINERALS	84	KEGIATAN CSR BUMI	146
Operation Areas		Non-Coal Mineral Segments		BUMI CSR Activities	
JANGKAUAN PASAR	9	SEGMENT NON BATU BARA-MINYAK DAN GAS	86	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS	159
Market Distribution		Non-Coal Segment : Oil and Gas		Social Responsibility and Community Development	
STRUKTUR ORGANISASI	10	TINJAUAN KINERJA KEUANGAN	88	TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN	170
Organization Structure		Financial Performance Review		Environmental Responsibility	
STRUKTUR PERSEROAN	12	LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	100	TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	184
Company Structure		CORPORATE GOVERNANCE REPORT		Responsibility to Employees and Occupational Health and Safety	
ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI	14	PENDAHULUAN	100	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN	191
Subsidiaries and Associations		Introduction		Responsibility to Consumers	
JEJAK LANGKAH	16	TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	100	DATA PERUSAHAAN	193
Milestones		The Objectives and Implementation of Corporate Governance		CORPORATE DATA	
PERISTIWA PENTING	18	PEDOMAN, STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA	102	PROFIL DEWAN KOMISARIS	194
Events Highlights		Guidance, Structure, Policies, and Implementation of Corporate Governance		Board of Commissioners' Profiles	
PENGHARGAAN & SERTIFIKASI	20	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	102	PROFIL DIREKSI	198
Awards & Certifications		General Meeting of Shareholders (GMS)		Board of Directors' Profiles	
IKHTISAR KEUANGAN	24	DEWAN KOMISARIS	108	PROFIL KOMITE AUDIT	202
Financial Highlights		Board of Commissioners		Audit Committee Profiles	
IKHTISAR SAHAM	26	DIREKSI	114	ALAMAT PERUSAHAAN	203
Stock Highlights		Board of Directors		Corporate Address	
LAPORAN MANAJEMEN	30	KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOMISARIS	119	LAPORAN KEUANGAN	205
MANAGEMENT REPORT		Board of Commissioners Committees		KONSOLIDASIAN	
LAPORAN DEWAN KOMISARIS	30	KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI	123	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
Report from the Board of Commissioners		Committees under the Board of Directors			
LAPORAN DIREKSI	34	SEKRETARIS PERUSAHAAN	126		
Report from the Board of Directors		Corporate Secretary			
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	40	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL	131		
Statement of Responsibility for the 2014 Annual Report		Internal Control System			
TINJAUAN FUNGSIONAL	42	AUDIT INTERNAL	133		
FUNCTIONAL REVIEW		Internal Audit			
TINJAUAN RENCANA DAN STRATEGI	42	AUDIT EKSTERNAL	140		
Plan and Strategy Overview		External Auditor			
SUMBER DAYA MANUSIA	46				
Human Resources					
TEKNOLOGI INFORMASI	56				
Information Technology					
ASPEK PEMASARAN	60				
Marketing Aspects					
MANAJEMEN RISIKO	64				
Risk Management					



ENDURANCE FOR THE LONG HAUL AHEAD

DAYA TAHAN UNTUK MELANGKAH KE DEPAN

Sebagaimana di tahun 2013, industri pertambangan batu bara di Indonesia pada tahun 2014 masih mengalami saat-saat sulit. Kondisi rendahnya harga batu bara yang dipicu oleh lemahnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor batu bara tetap menjadi tantangan bagi pertumbuhan bisnis para pemain di sektor ini, tidak terkecuali BUMI. Namun demikian, dalam jangka panjang, BUMI tetap menaruh keyakinan akan prospek industri batu bara nasional, termasuk sebagai sumber energi primer yang akan semakin diandalkan dalam memasok kebutuhan energi. Melalui upaya-upaya BUMI sepanjang tahun 2014 dalam melanjutkan dan mempertajam program-program kerja yang telah dirintis di tahun sebelumnya di bidang operasional, organisasi maupun keuangan, BUMI kini memiliki daya tahan yang diperlukan untuk melangkah mengantisipasi prospek yang lebih cerah dalam jangka panjang ke depan.

Indonesia's coal mining industry in 2014, just like it was in 2013, continued to experience difficult times. Low coal prices due among others to weak demands from coal importing countries notably China continued to hamper growth of industry players, including BUMI. However, BUMI is confident of long-term prospects in the national coal industry, as coal will be relied more as a primary energy source for the country's energy needs. Through consistent efforts throughout 2014 in continuing to pursue and enhance strategic initiatives through work programs in operations, organization and improved operating performance compared with the previous year, BUMI has succeeded in building its resilience and readiness in anticipation of brighter prospects in the medium term.

Sepanjang tahun 2014 industri pertambangan masih mengalami tekanan, dan komoditas pertambangan masih berkulat di kisaran harga yang rendah. Di tengah situasi seperti ini, perusahaan tambang butuh strategi tepat untuk mempertahankan usahanya.

PENINGKATAN PENJUALAN BATU BARA
INCREASE IN COAL SALES

3.25 %

PENINGKATAN JUMLAH BATU BARA YANG DITAMBANG
INCREASE IN COAL MINED

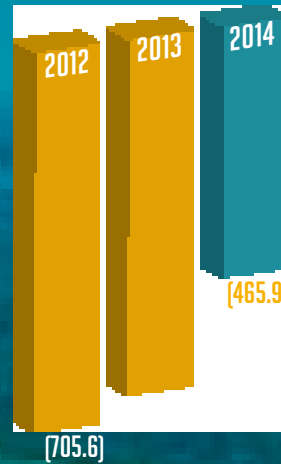
5.32 %



Throughout 2014, the mining industry was still under acute pressure, and mining commodities struggling a sharply in low price environment. In such circumstances, mining companies need the enlightened strategy to maintain their business.

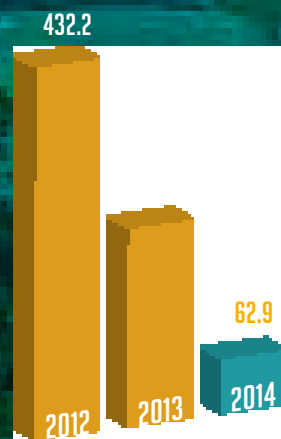
LABA (RUGI) BERSIH NET INCOME (LOSS)

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



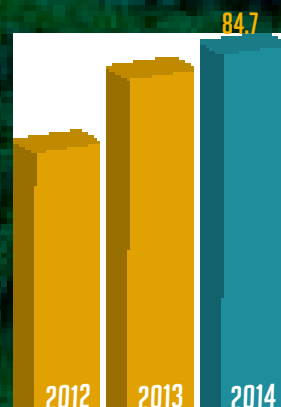
LABA USAHA OPERATING INCOME

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



PENJUALAN BATU BARA COAL SALES

dalam juta ton in million tons





PROFIL PERUSAHAAN CORPORATE PROFILE

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN CORPORATE INFORMATION

Nama Perseroan Name of Company	PT Bumi Resources Tbk	
Bidang Usaha Line of Business	Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Batu Bara dan Mineral Oil, Natural Gas, Coal Mining and Mineral Industry	
Modal Dasar Authorized Capital	Rp 38,750,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	Rp 10,386,700,000,000	
Alamat Kantor Head Office	PT Bumi Resources Tbk Bakrie Tower, 12 th Floor Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia	Tel. +62 21 5794 2080 Fax. +62 21 5794 2070 Email : info@bumiresources.com www.bumiresources.com



SEKILAS PERUSAHAAN COMPANY IN BRIEF

Sejarah BUMI diawali dengan pendirian PT Bumi Modern, pada tanggal 26 Juni 1973. PT Bumi Modern pada awalnya bergerak dalam bidang industri perhotelan dan pariwisata. Pada tahun 1990, BUMI melakukan penawaran saham perdana dan kemudian pada tahun 1998, BUMI bertransformasi untuk memasuki industri minyak, gas alam dan pertambangan. Segera setelah transformasi, BUMI tumbuh pesat dan sekitar tahun 2000, BUMI melakukan ekspansi usaha dengan menggali kekayaan alam Indonesia, antara lain batu bara dan barang tambang lainnya.

BUMI kini tercatat sebagai salah satu eksportir batu bara termal terbesar di dunia. Selain itu, BUMI juga memiliki portofolio usaha bahan tambang lainnya, dan dengan dukungan pembiayaan yang kuat, BUMI juga memainkan peran sebagai investor strategis.

Seiring berkembangnya produksi, beroperasinya tambang baru, dan terbukanya nilai bagi pelanggan, pemegang saham dan pemangku kepentingan, BUMI akan terus maju dengan semangat *discovery* melalui pertumbuhan produksi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

The history of BUMI began with the establishment of PT Bumi Modern on 26 June 1973. PT Bumi Modern, initially, engaged in the hospitality and tourism. Following the initial public offering in 1990, BUMI transformed into a company engaging in oil, natural gas and mining in 1998. After transformation, BUMI grew rapidly and in 2000, BUMI expanded its business exploring the wealth of Indonesia, among others coal and other mining commodities.

Today, BUMI is acknowledged as the largest thermal coal exporter in the world. BUMI also developed other mining ventures, and supported by strong financing efforts, BUMI also plays the role of strategic investor.

In line with the development of production, operation of new mines, and continued values for customers, shareholders and stakeholders, with a discovery spirit BUMI continues to move forward through its production growth and sustainability.

VISI, MISI, DAN FILOSOFI PERUSAHAAN

CORPORATE VISION, MISSION, AND PHILOSOPHY

VISI VISION

Menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan.

To be a world-class, global operator within the energy and mining sectors.

MISI MISSION

Menjaga kesinambungan usaha dan daya saing Perseroan dalam menghadapi persaingan terbuka di masa mendatang dengan tujuan untuk:

- Meningkatkan hasil investasi dan nilai yang optimal bagi para pemegang saham
- Memperbaiki kesejahteraan para karyawan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi pertambangan
- Menjaga kelestarian lingkungan pada seluruh wilayah operasi pertambangan

Achieving sustainability and global competitiveness to:

- Increase return on investment and enhance value for shareholders
- Improve the welfare of our employee
- Enhance public prosperity around our mine sites
- Sustainably preserve the environment

FILOSOFI PHILOSOPHY

Langkah-langkah BUMI berpedoman pada tiga prinsip dasar:

- Bagaimana cara terbaik untuk menciptakan nilai.
- Bagaimana cara terbaik untuk mencapai kemakmuran.
- Bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan pelbagai peluang.

BUMI's action are guided by three underlying principles:

- How best to create value
- How best to create prosperity
- How best to find opportunities

BISNIS KAMI OUR BUSINESS

Perseroan merampungkan proyek tambang untuk meningkatkan rantai suplai batu bara, melengkapi conveyor tambahan dengan sensor canggih untuk melacak aliran dari tambang ke terminal laut. Nilai tinggi diperoleh dari menjalin kedekatan hubungan dengan pelanggan, melakukan tindakan cepat atas semua masukan pelanggan, demi membangun jaringan global terpadu yang Perseroan miliki saat ini. Hasil ditentukan dengan memenuhi spesifikasi dan memastikan bahwa tenaga kerja mampu diberdayakan untuk melakukan pekerjaan secara aman, efisien dan menguntungkan.

Perseroan telah menjalankan suatu program efisiensi baru untuk meningkatkan kapasitas tambang seraya melakukan penghematan atas semua biaya, pada saat tekanan global memaksa produsen batu bara berkualitas tinggi memberikan nilai yang lebih. Melalui rencana memonetisasi aset-aset mineral yang bernilai, diharapkan Perseroan dapat fokus dalam mengembangkan aset inti sehingga mampu membangun kompetensi dan mengawasi permintaan global, tren ekonomi, dan geopolitik.

The Company completed major capacity projects to enhancing optimize the coal supply chain, by adding a number of conveyors with advanced sensors to maximize flow from the mines to the ocean terminals. High value is placed on customer relationship, with assured speedy execution of all customer contracts-to build the enviable integrated global network we have today. Results are driven by meeting specifications and ensuring that the workforce is empowered to do the job safely, efficiently, and economically.

Major new efficiency program has boosted mine capacity whilst rationalizing all costs, at a time when global pressures are forcing high quality coal producers to deliver even more value at lower costs. With valuable mineral properties selected for disposal, focus on core mineral interests can proceed at pace, building competencies and keeping a close watch on unfolding global demand, economic and geo-political trends.



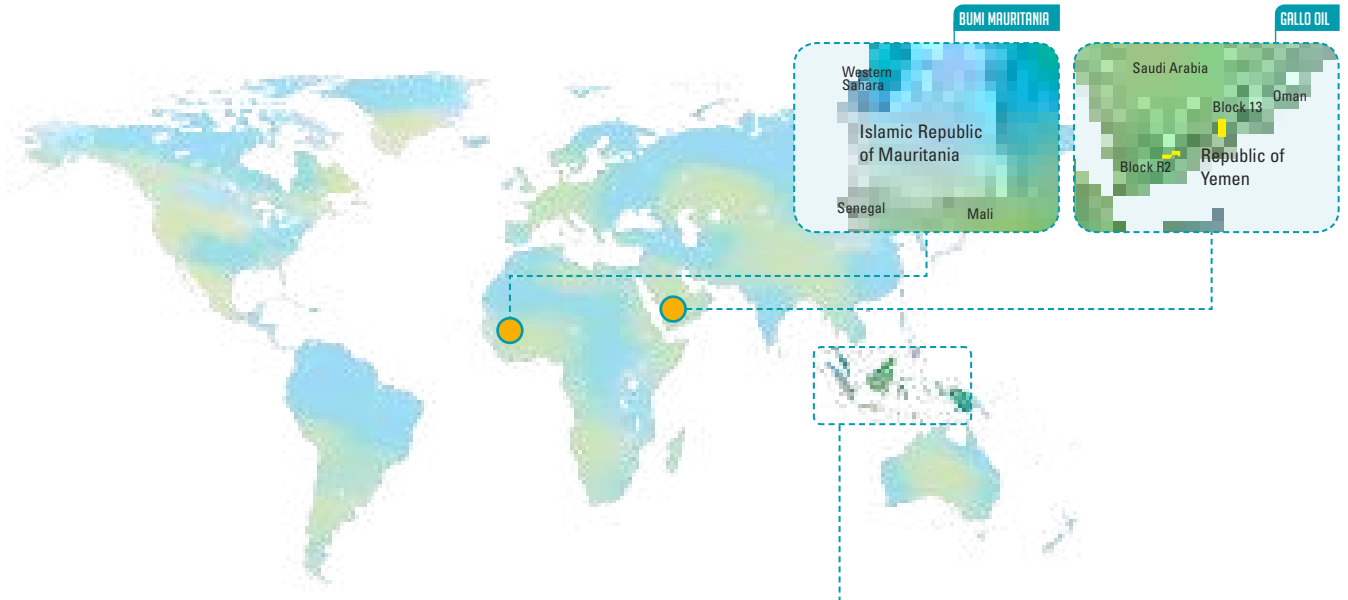
Direksi BUMI menerapkan strategi pertumbuhan untuk meningkatkan aset, mendongkrak produksi dan melaksanakan pendekatan manajemen yang terfokus. Melalui penerapan strategi yang dilakukan secara konsisten dan dengan pendekatan berbasis risiko ini, BUMI akan mampu mengirimkan lebih banyak batu bara ke pasar global dan memproduksi aset tambang mineral yang dimilikinya dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat.

Potensi BUMI untuk menjadi penambang berkelas dunia telah terbukti dengan berkembangnya aset Perseroan bagi pemegang saham, tersedianya lapangan pekerjaan, terciptanya peluang yang ada di sekitar lokasi pertambangan dan terpeliharanya lingkungan dengan keberhasilan dalam program reboisasi hutan. Misi ini menyeimbangkan prioritas yang ada di Perseroan dan menjadikan BUMI menjadi perusahaan pertambangan yang diakui di dunia.

BUMI's Board of Directors is following a growth strategy to expand its mining properties, to ramp up production, and to execute a focused management approach. By doing these, consistently and within a risk based framework, BUMI has and aims to deliver more coal to global markets and bring its many minerals properties into production to satisfy increasing global demand.

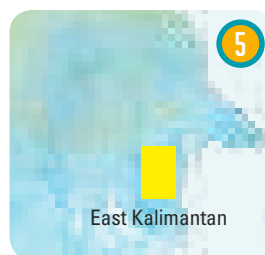
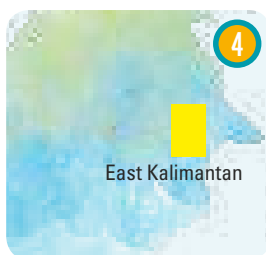
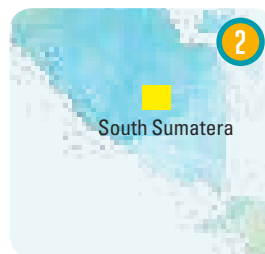
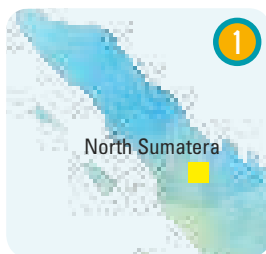
The potential to be a major global miner is visible in the value already created and sought to be unlocked for its stakeholders, the jobs already provided, the opportunities existing around the mining sites, and the care for the environment that BUMI priorities through its renewal of its natural habitat. These missions have balanced the priorities of the Company, and turned BUMI into an environment conscious, globally-recognized leading mining company.

AREA OPERASIONAL OPERATION AREAS

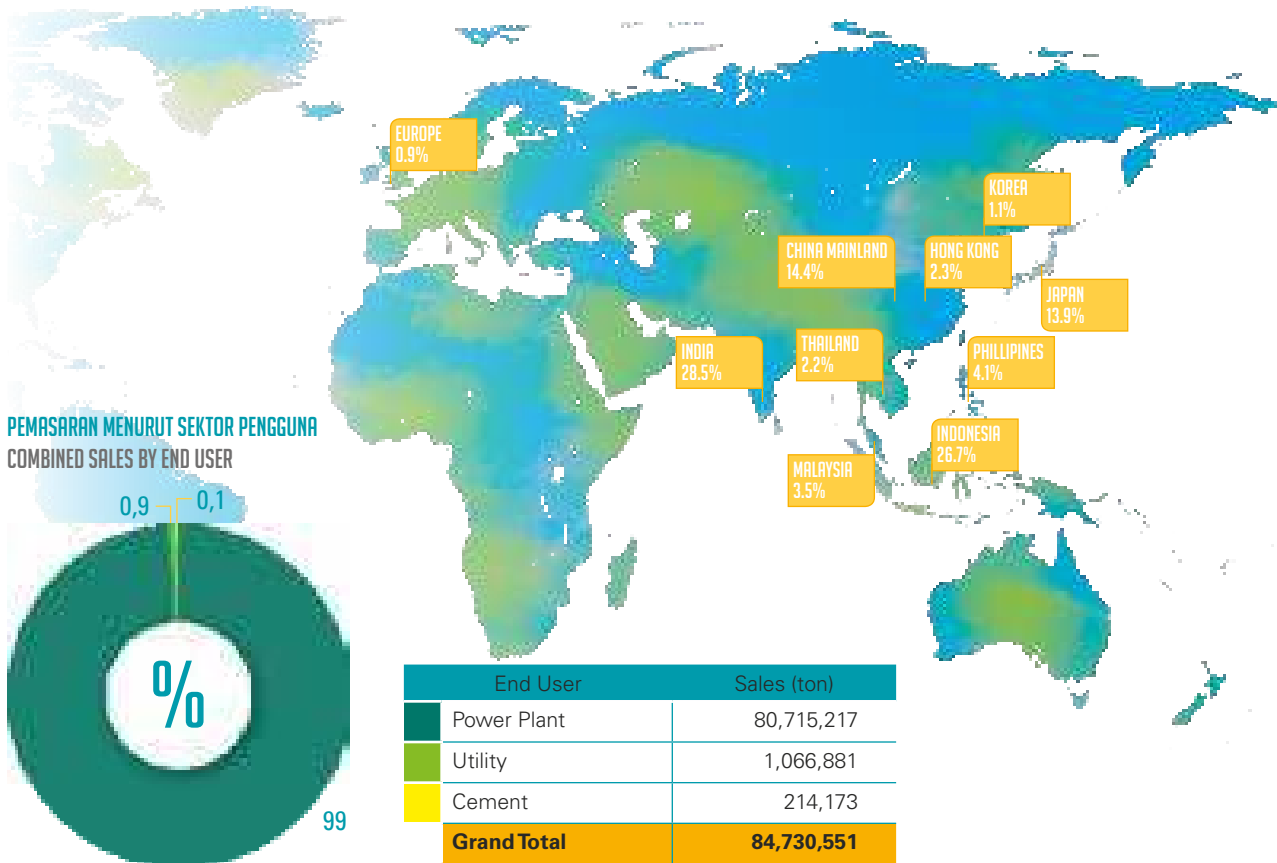


BUMI memiliki area operasional yang tersebar luas mulai dari Sumatera Utara (Dairi Prima Mineral & Pendopo Energi Batu Bara), Sulawesi (Gorontalo Minerals & Citra Palu Minerals), Kalimantan (Kaltim Prima Coal, Arutmin Indonesia & Fajar Bumi Sakti), Republik Yaman (Gallo Oil), dan Republik Islam Mauritania (Bumi Mauritania).

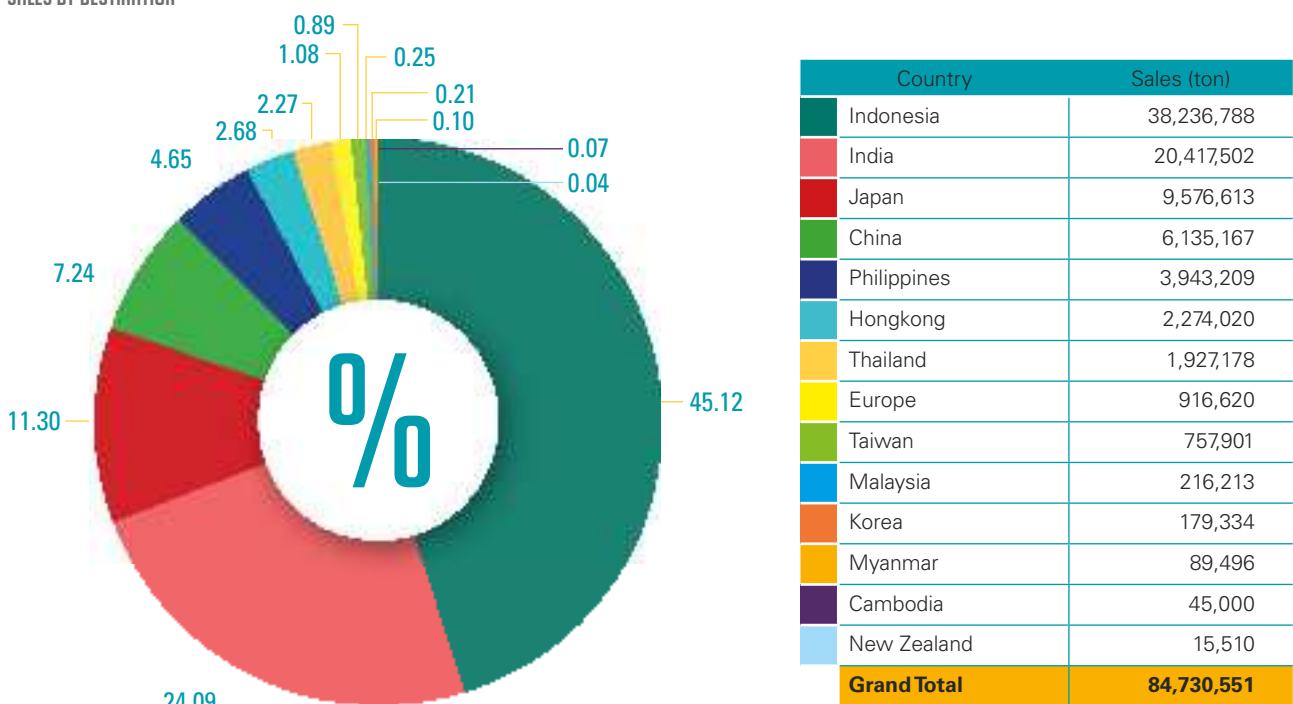
BUMI's widespread operational areas range from North Sumatra (Dairi Prima Mineral & Pendopo Energi Batu Bara), Sulawesi (Gorontalo Minerals & Citra Palu Minerals), Kalimantan (Kaltim Prima Coal, Arutmin Indonesia & Fajar Bumi Sakti), the Republic of Yemen (Gallo Oil) and the Islamic Republic of Mauritania (Bumi Mauritania).



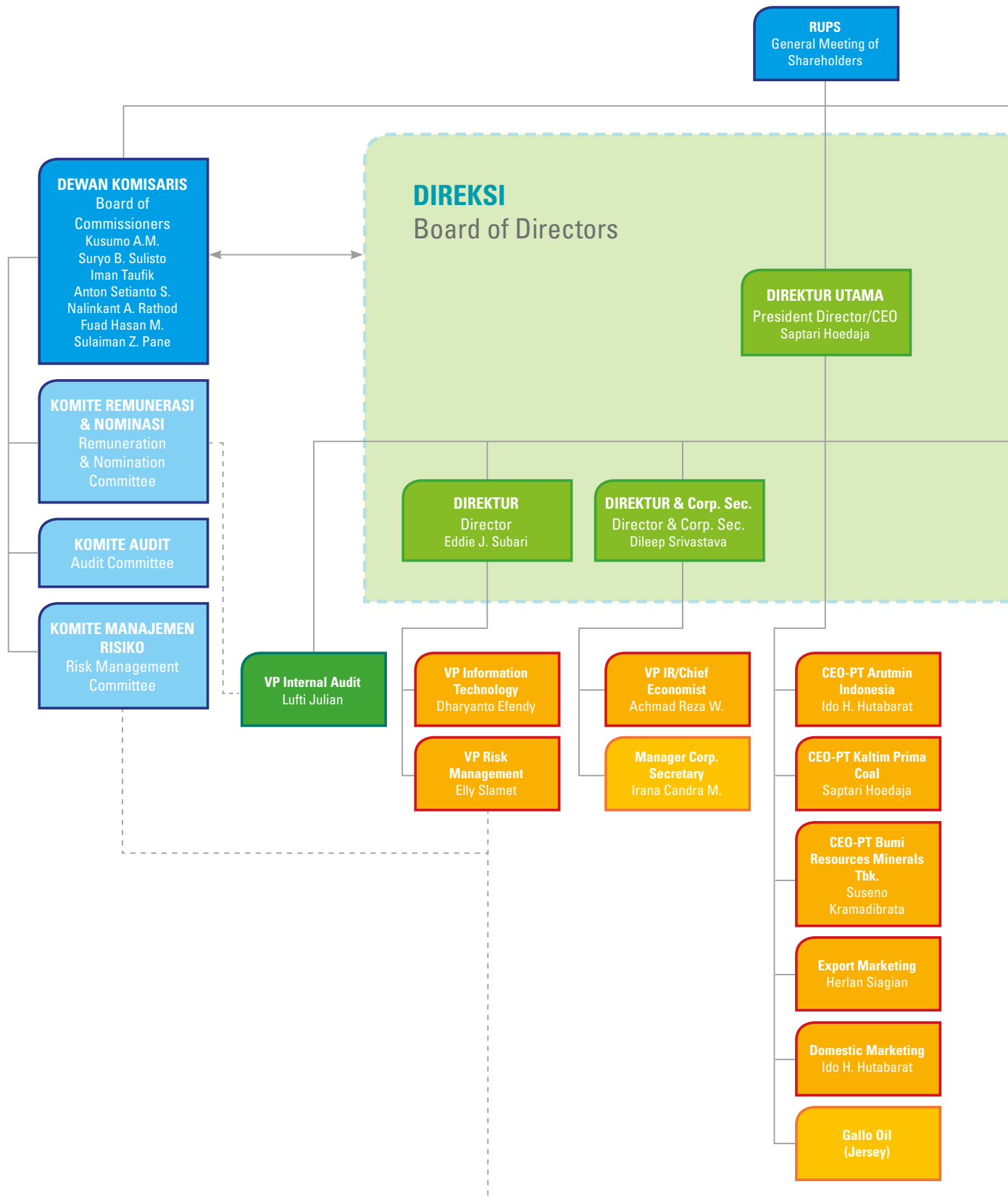
JANGKAUAN PASAR MARKET DISTRIBUTION

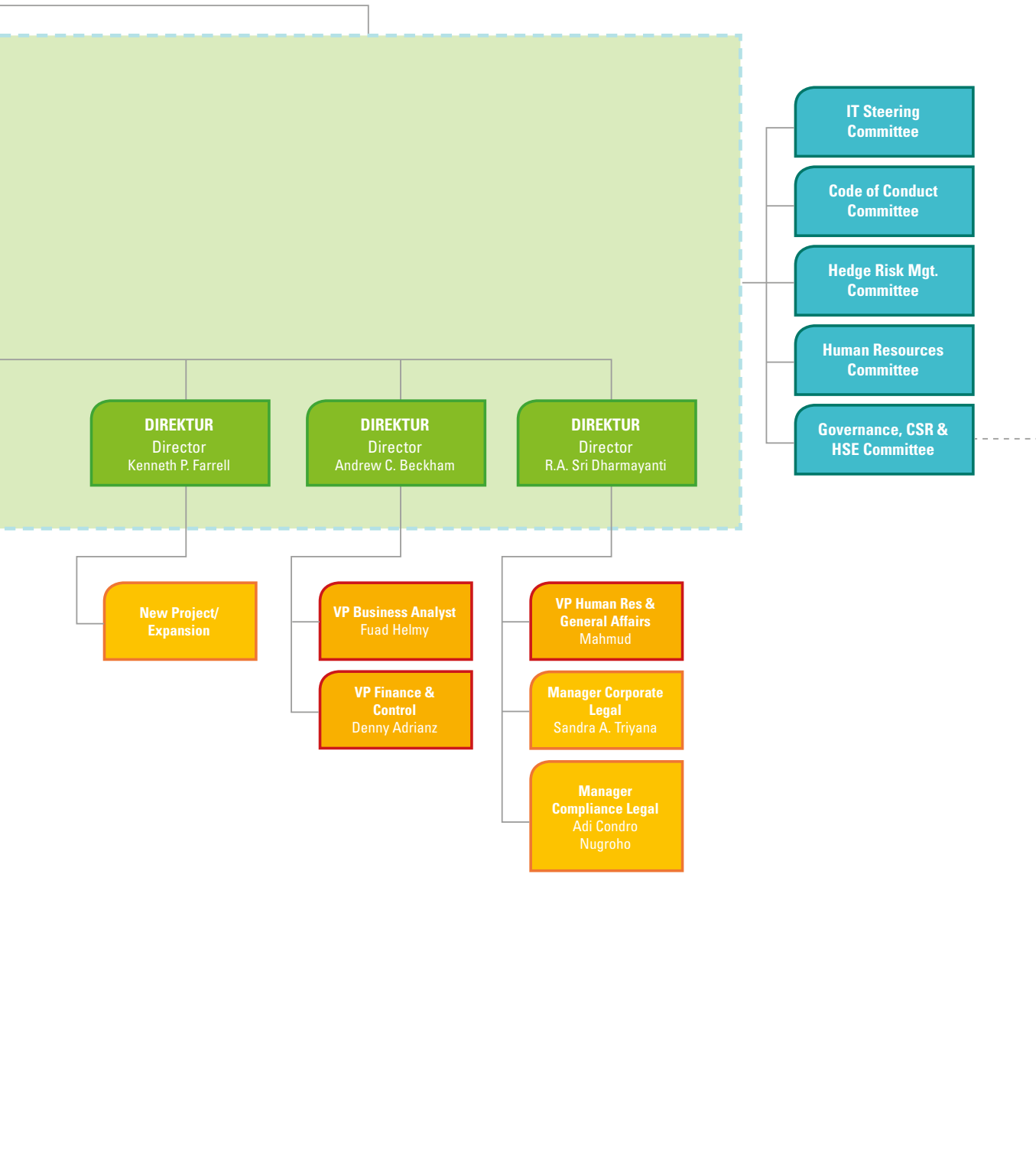


PENJUALAN BERDASARKAN NEGARA TUJUAN SALES BY DESTINATION

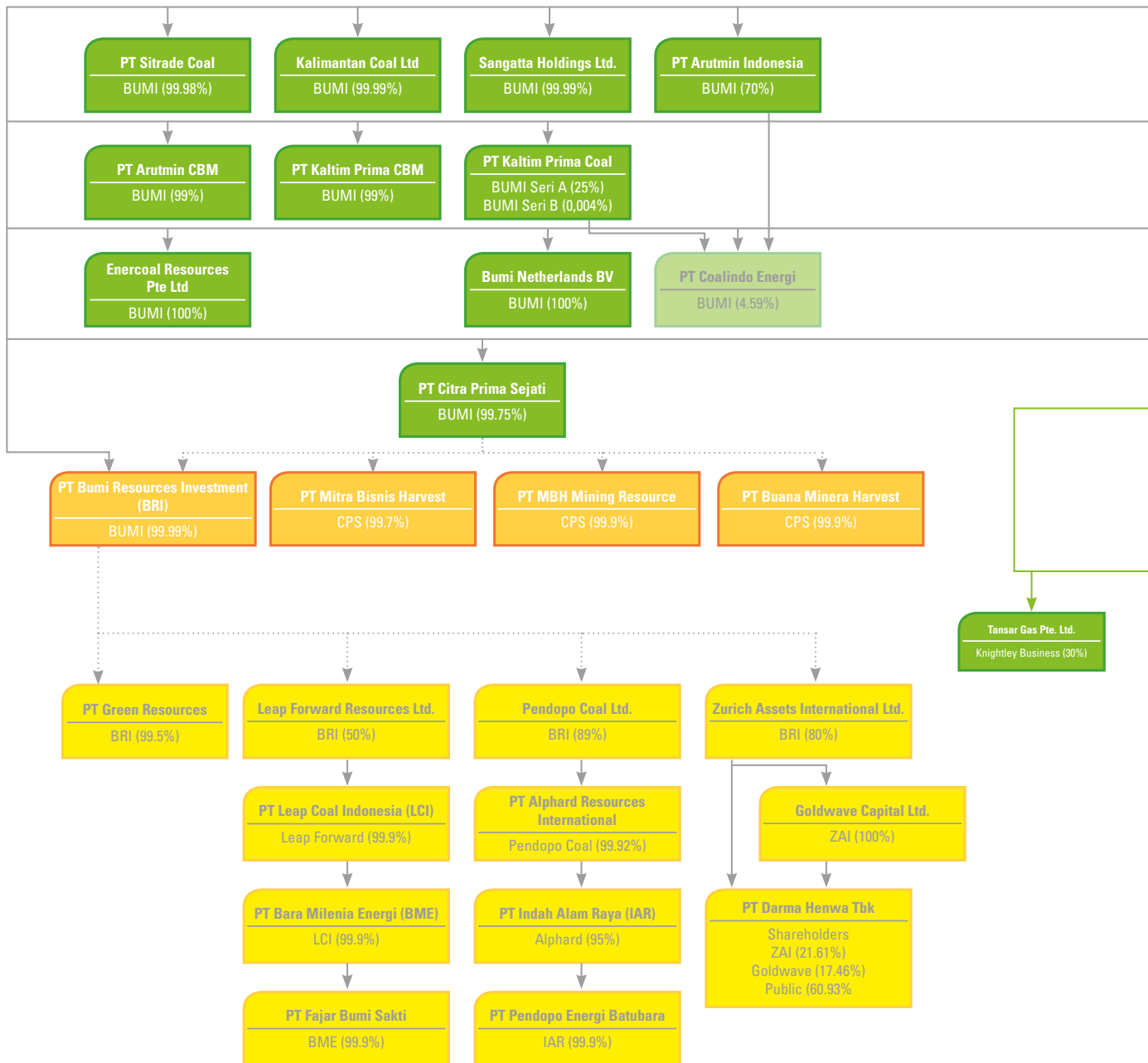


STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

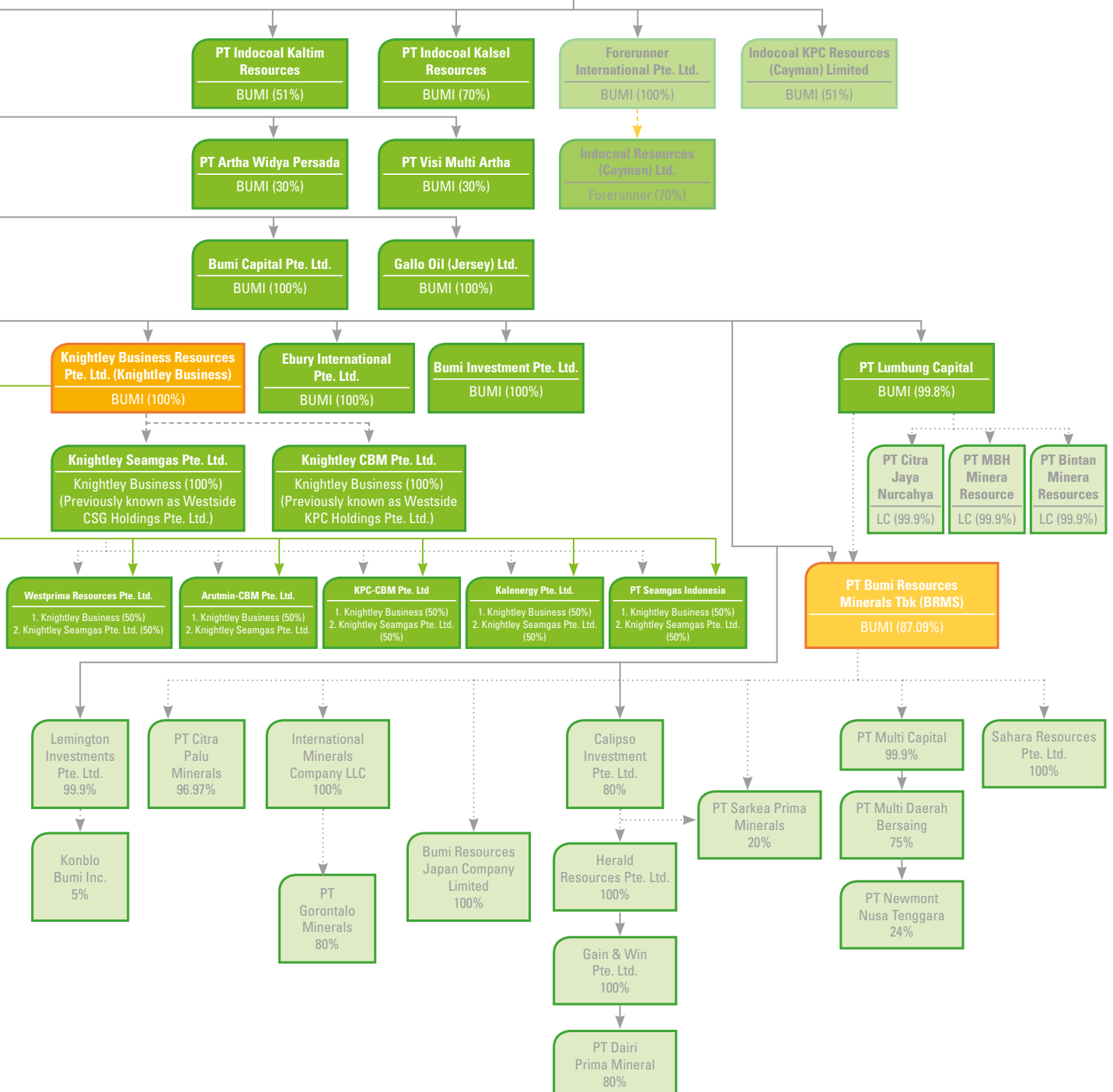




STRUKTUR PERSEROAN COMPANY STRUCTURE



PT BUMI Resources Tbk (BUMI)



ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI SUBSIDIARIES AND ASSOCIATIONS

BUMI memiliki kepemilikan langsung di 24 anak perusahaan, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut:

BUMI owns direct ownership towards 24 subsidiary companies, as follows:

No.	Nama Perusahaan Company Name	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage(%)	Status
1	PT Sitrade Coal	99.98	Aktif Active
2	Kalimantan Coal Ltd	99.99	Aktif Active
3	Sangatta Holdings Ltd	99.99	Aktif Active
4	PT Arutmin Indonesia	70.00	Aktif Active
5	PT Indocoal Kaltim Resources	70.00	Aktif Active
6	PT Indocoal Kalsel Resources	70.00	Aktif Active
7	Forerunner International Pte. Ltd.	100.00	Aktif Active
8	PT Arutmin CBM	99.00	Aktif Active
9	PT Kaltim Prima CBM	99.00	Aktif Active
10	PT Kaltim Prima Coal	13.60	Aktif Active
11	PT Artha Widya Persada	30.00	Aktif Active
12	PT Visi Multi Artha	30.00	Aktif Active
13	Enercoal Resources Pte. Ltd.	100.00	Aktif Active
14	Bumi Netherlands BV	100.00	Aktif Active
15	PT Coalindo Energi	4.59	Aktif Active
16	Bumi Capital Pte. Ltd.	100.00	Aktif Active
17	Gallo Oil (Jersey) Ltd.	100.00	Aktif Active
18	Mountain Netherlands Investment BV	99.90	Aktif Active
19	PT Citra Prima Sejati (CPS)	99.75	Aktif Active
20	Knightley Business Resources Pte Ltd (Knightley Business)	100.00	Aktif Active
21	Ebury International Pte. Ltd.	100.00	Aktif Active
22	Bumi Investment Pte. Ltd.	100.00	Aktif Active
23	PT Lumbang Capital	99.80	Aktif Active
24	PT Bumi Resources Minerals Tbk	87.09	Aktif Active
25	PT Bumi Resources Investment (BRI)	99.99	Aktif Active
26	PT Citra Palu Minerals	3.03	Aktif Active

LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL CAPITAL MARKETS SUPPORTING INSTITUTIONS

Akuntan Publik **Public Accountant**

Tjiendradjaja & Handoko Tomo
Registered Public Accountant
Jl. Sisingamangaraja No. 26, 2nd Floor
Jakarta 12120
Indonesia
Tel. +62 21 720 2605
Fax. +62 21 7278 8954
www.mazars.co.id

Biro Administrasi Efek **Share Registrar & Settlement Agent**

PT Ficomindo Buana Registrar
Mayapada Tower, 10th Floor, Suite 2B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Indonesia
Tel. +62 21 521 2316
Fax. +62 21 521 2320

JEJAK LANGKAH MILESTONES

1973

Tahun awal pendirian perusahaan, didirikan dengan nama PT Bumi Modern, bergerak di bidang industri perhotelan dan pariwisata.

The Company was established by the name of PT Bumi Modern, engaging in the hospitality and tourism industry.

1990

BUMI melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (Kini telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia).

BUMI conducted Initial Public Offering of Shares listed on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (Currently merged and become Indonesian Stock Exchange).

2001

Di bulan November, Perseroan mengakuisisi 80% saham PT Arutmin Indonesia (AI), produsen batu bara terbesar keempat di Indonesia.

In November, the Company acquired an 80% stake in PT Arutmin Indonesia (AI), the fourth largest coal producer in Indonesia.

2003

Di bulan Oktober, Perseroan membeli 100% saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), produsen batu bara terbesar di Indonesia, setelah mengakuisisi Sangatta Holdings Ltd (SHL) dan Kalimantan Coal Ltd. (KCL).

In October, the Company purchased 100% shares of PT Kaltim Prima Coal (KPC), the largest coal producer in Indonesia, after acquiring Sangatta Holdings Ltd. (SHL) and Kalimantan Coal Ltd. (KCL).

2006

Perseroan melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari total saham yang dikeluarkan.

The Company bought back a maximum of 10% of the total issued shares.

1970

1997

PT Bakrie Capital Indonesia mengambil alih 58,15% saham Perseroan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

PT Bakrie Capital Indonesia took over the Company's 58.15% shares of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

1998

Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 31 Agustus, diputuskan untuk mengubah bisnis utama Perseroan dari bidang perhotelan dan pariwisata menjadi bidang minyak, gas alam, dan pertambangan.

Through the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 31 August, it was decided to change the Company's main business from hospitality and tourism into oil, natural gas, and mining.

2000

Perseroan mengakuisisi saham Gallo Oil (Jersey) Ltd. sebesar 97,5%. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-21041 HT.01.04.-TH 2000 tertanggal 20 September, nama Perseroan berubah dari PT Bumi Modern Tbk menjadi PT Bumi Resources Tbk.

The Company acquired 97.5% of the shares of Gallo Oil (Jersey) Ltd. Based on Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C-21 041-TH HT.01.04. 2000 dated 20 September 2000, the Company changed the name from PT Bumi Modern Tbk to PT Bumi Resources Tbk.

2004

Perseroan mengakuisisi 19,99% saham Arutmin, sehingga meningkatkan kepemilikannya menjadi 99,99%.

The Company acquired a 19.99% stake in Arutmin, thereby increasing its ownership to 99.99%.

2005

Perseroan telah berhasil menyelesaikan seluruh proses divestasi saham KPC sebagaimana disyaratkan dalam pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Setelah selesainya proses divestasi tersebut maka kepemilikan saham KPC menjadi sebagai berikut: SHL dan KCL yang merupakan unit usaha Perseroan masing-masing 24,5% dan 13,6% dimiliki secara langsung oleh Perseroan serta 32,4% dimiliki oleh PT Sitrade Coal, yang merupakan unit usaha Perseroan.

The Company successfully completed the entire process of divestment of KPC shares as required under article 26 of the Coal Contract of Work (CCOW). After completion of the divestment process, the KPC shares are as follows: SHL and KCL, the Company's business units, respectively 24.5% and 13.6% owned directly by the Company and 32.4% owned by PT Sitrade Coal, being a Company's business unit.

2007

30% kepemilikan BUMI di Arutmin dan KPC dijual kepada Tata Power India. Pada bulan Juni dan Oktober diterbitkan dua obligasi konversi senilai total US\$ 450 juta dimana mengalami kelebihan permintaan 3 sampai 4 kali.

30% ownership in Arutmin and KPC sold to Tata Power of India. In June and in October issued two convertible bonds worth a total of US\$ 450 million, which was oversubscribed 3 to 4 times.

2008

Setelah melalui proses yang cukup panjang, BUMI akhirnya dapat memiliki Herald Resources Ltd Australia dengan nilai AU\$ 552 juta. Operasi tambang seng, timah, dan emas ini berlokasi di Sumatera Utara.

After going through a long process, BUMI finally purchased Herald Resources Ltd of Australia at a value of AU\$ 552 million. This mining operation, located in North Sumatra, has zinc, lead and, gold.

2010

Dilaksanakannya transaksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 24 Juni.

Execution of capital increase without pre-emptive rights as approve in the EGMS of 24 June.

2013

Melalui RUPS Tahunan dan Luar Biasa tanggal 28 Juni, diputuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pada tanggal 26 Juni, Perseroan menyelenggarakan acara syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-40.

Through the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders on 28 June, it was decided the change in composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company

On 26 June, the Company held a celebration event for 40th Anniversary

2000

2009

China Investment Corporation (CIC) menanamkan modal di BUMI sebesar US\$ 1,9 miliar dalam bentuk instrumen utang, terdiri dari US\$ 600 juta yang dibayarkan kembali di tahun 2013, US\$ 600 juta di tahun 2014, dan sisanya US\$ 700 juta di tahun 2015. Investasi ini memiliki 12% cash coupon per tahun dengan total IRR sebesar 19%, dimana seluruh sisanya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Dana ini digunakan untuk restrukturisasi utang dan belanja modal.

China Investment Corporation (CIC) provided US\$1.9 billion in debt instruments, consisting of US\$ 600 million to be paid back in 2013, US\$ 600 million in 2014, and the remaining US\$ 700 million in 2015. These investments have a cash coupon of 12% per year with a total IRR of 19%, with the principle paid at maturity. These funds were used for debt restructuring and capital expenditure.

2011

Perseroan melakukan pembayaran cicilan Tranche A sebesar US\$ 600 juta kepada China Investment Corporation (CIC) yang seharusnya jatuh tempo pada 30 September 2013, dibayarkan hampir 2 (dua) tahun lebih awal berdasarkan kesepakatan bersama.

The Company has made repayment of the Tranche A of US\$ 600 million of the China Investment Corporation (CIC) debt, which would have matured on 30 September 2013, paid almost 2 (two) years earlier based upon mutual agreement.

2012

Melalui RUPSLB tanggal 21 Mei, diputuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Through the EGMS on 21 May, it was decided the change in composition of members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

2010

2020

2014

Pemegang saham menyetujui Penawaran Umum Terbatas IV dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2014 - dengan menerbitkan hingga 32.198.770.000 saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 250 per saham, atau senilai Rp 8.049.692.500.000. Sejumlah 15.853.620.427 lembar saham diambil bagian dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2014.

Shareholders approved Rights Issue IV in Extraordinary General Meeting held on June 30, 2014 - to issue up to 32,198,770,000 common shares Series B of nominal value of Rp 100 per share at an offer price Rp 250 per share valued at Rp 8,049,692,500,000. 15,853,620,427 shares were subscribed and issued on 7 October 2014.

PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS



9 JANUARI JANUARY

Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia

Blood donation, in cooperation with the Indonesian Red Cross



10 JANUARI JANUARY

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta.

The Company's Second Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Balai Kartini, Jakarta.



12 MARET MARCH

CSR Peduli Untuk Negeri. Bantuan Banjir Jakarta SD-SMP 2 Kampung Melayu, Jakarta

CSR "Peduli Untuk Negeri": Jakarta Flood Relief for SD-SMP 2 Kampung Melayu



3 APRIL APRIL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta.

The Company's Third Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Balai Kartini, Jakarta.



3-4 APRIL APRIL

BUMI meraih penghargaan untuk Best Community Program (Bronze) dalam acara The 6th Annual Global CSR Summit Awards

BUMI won the award for Best Community Program (Bronze) DURING the 6th Annual Global CSR Summit Awards



29 APRIL APRIL

CSR BUMI: Penanaman Mangrove di Pulau Harapan

CSR BUMI: Planting Mangrove at Pulau Harapan.



10 JUNI JUNE

Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia

Blood donation, in cooperation with the Indonesian Red Cross



30 JUNI JUNE

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders held at Gran Melia Hotel, Jakarta.



27 AGUSTUS AUGUST

Survey Penanaman Mangrove untuk laporan ke Direksi

Mangrove Planting survey to be reported to the Board of Directors



6 OKTOBER OCTOBER

Paparan Publik Insidental di Avara Lounge & Function Hall, Epiwalk Rasuna Epicentrum, Jakarta

Incidental Public Expose at Avara Lounge & Function Hall, Epiwalk Epicentrum, Jakarta



15 OKTOBER OCTOBER

Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia

Blood donation, in cooperation with the Indonesian Red Cross



26 NOVEMBER NOVEMBER

Paparan Publik Tahunan Perseroan 2014 di Avara Lounge & Function Hall, Epiwalk Rasuna Epicentrum, Jakarta

2014 Annual Public Exposure at Avara Lounge & Function Hall, Epiwalk Epicentrum, Jakarta

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI AWARDS & CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN UNTUK BUMI AWARDS FOR BUMI



PT BUMI Resources Tbk.

Best Community Program Award

BUMI meraih peringkat tiga untuk kategori the Best Community Program Award dalam Annual Global CSR Summit and Awards 2014 ke-6, Bali 3 April 2014.

Best Community Program Award

BUMI ranks third for the category of Best Community Program Award in the 6th Annual Global CSR Summit and Awards 2014, Bali 3 April 2014.

PENGHARGAAN UNTUK ARUTMIN AWARDS FOR ARUTMIN



1. Predikat Platinum untuk Pengembangan Kelompok Simpan Pinjam di Kalangan Perempuan Lembaga Keuangan Desa Pandansari, Asam-asam dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
2. Predikat Platinum untuk Pengembangan Kelompok Simpan Pinjam di Kalangan Perempuan Lembaga Keuangan Desa Mekarsari, Kintap. dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
3. Penghargaan Utama Pengelolaan Keselamatan Pertambangan PT Arutmin Indonesia NPLCT dari Kementerian ESDM.
4. Penghargaan Kecelakaan Nihil PT Arutmin Indonesia NPLCT dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI.
5. Sertifikat dan Bendera Emas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI.

SERTIFIKASI

1. ISO 14001:2004 by SGS untuk KPC.
2. ISO 14001 certified and audited by Sucofindo untuk Arutmin.



1. Platinum Predicate for the Development of Savings and Loans Group for Women - Financial Institution of Pandansari Village, Asam-Asam from the Coordinating Ministry for People's Welfare.
2. Platinum Predicate for the Development of Savings and Loans Group for Women - Financial Institution of Mekarsari Village, Kintap, from the Coordinating Ministry for People's Welfare.
3. First Prize for Mining Safety Management for PT Arutmin Indonesia NPLCT from the Ministry of Energy and Mineral Resources.
4. Zero Accident Award for PT Arutmin Indonesia NPLCT from the Ministry of Manpower and Transmigration.
5. Certificate and Golden Flag for Management System of Occupational Health and Safety from the Ministry of Manpower and Transmigration.

CERTIFICATIONS

1. ISO 14001: 2004 by SGS for the KPC.
2. ISO 14001 certified and audited by Sucofindo for Arutmin.



PENGHARGAAN UNTUK KPC AWARDS FOR KPC



1. Peringkat ketiga Community Program Award untuk Program Desa Mandiri dalam 6th Annual Global CSR Summit and Awards – 2014 (3 April, 2014).
 2. Perusahaan Baik dalam Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Indonesia Social Responsibility Award 2014 – LaThoffi School of CSR
 3. Indonesia Green Award 2014 untuk kategori: Penyelamatan Sumber Daya Air, Mengembangkan dan Menggunakan Energi Baru dan Terbarukan, Mengembangkan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan Pengolahan Sampah Terpadu.
 4. Penghargaan dari Bupati Kutai Timur atas Partisipasi dalam Program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH).
 5. PEEN (Penghargaan Efisiensi Energi Nasional) 2014 kategori manajemen energi di industri dan bangunan untuk Fuel Efficiency Project PART 4 sebagai bagian dari implementasi budaya kerja yang kompetitif dalam meningkatkan sikap operator dan *supervisor* dalam mendukung gerakan konservasi energi di KPC.
 6. Penghargaan Platinum untuk Program Konservasi Energi dalam rangka Mitigasi Perubahan Iklim dalam Indonesian CSR Award 2014
 7. Penghargaan Platinum untuk Program Pengembangan Batik Lokal Wakaroros dalam Indonesian CSR Award 2014
1. Rank third in Community Program Award for the Program of “Desa Mandiri” during the 6th Annual Global CSR Summit and Awards – 2014 (April 3rd, 2014).
 2. Named as “Good Corporate” in BUMDes Program in the Indonesia Social Responsibility Award 2014 – LaThoffi School of CSR.
 3. Indonesia Green Award 2014 for the category of: Water Resources Saving, Development and Use of New and Renewable Energy, Biodiversity Development, Integrated Waste Processing Development.
 4. Award from the East Kutai Regent on Participation in Development of Livable Home Program (PRLH).
 5. 2014 PEEN (National Energy Efficiency Award) in the category of energy management for industry and building on Fuel Efficiency Project PART 4 as part of the implementation of a competitive work culture in improving the attitude of operators and supervisors in support of energy conservation movement in KPC.
 6. Platinum Award for Energy Conservation Program in order Mitigation of Climate Change in Indonesian CSR Award 2014.
 7. Platinum Award for Program Development of Local Batik Wakaroros in Indonesian CSR Award 2014



8. Penghargaan Platinum untuk Program Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka Mengelola Usaha Pelayanan Listrik Desa di Kecamatan Rantau Pulung, Kutai Timur dalam Indonesian CSR Award 2014
 9. Penghargaan Gold untuk Program Rumah Kemas Olsabara dalam Indonesian CSR Award 2014
 10. Penghargaan Gold untuk Program Senyum dan Harapan dalam Indonesian CSR Award 2014
 11. Penghargaan Gold untuk Program Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta dalam Indonesian CSR Award 2014
 12. Penghargaan Silver untuk Program Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang untuk Wisata Alam dan Peternakan Sapi dalam Indonesian CSR Award 2014
 13. Penghargaan Silver untuk Program Meretas Warna Meraih Asa dalam Indonesian CSR Award 2014
 14. Penghargaan Silver untuk Program Pelatihan Pra Purna Bhakti bagi Karyawan PT.KPC yang akan menjalani Masa Persiapan Pensiun dalam Indonesian CSR Award 2014
 15. Penghargaan Citra Abdi Kesehatan dari Gubernur Propinsi Kalimantan Timur kepada PT.KPC sebagai Perusahaan Peduli Kesehatan
 16. Best Sustainability Report 2013 Category Mining and Metal dalam Sustainability Reporting Award 2014
8. Platinum Award for Strengthening Program for BUMDes - Village Electricity Management Services in the District Rantau Pulung, East Kutai in the Indonesian CSR Award 2014.
 9. Gold Award for Packaging Houses Program "Olsabara" in Indonesian CSR Award 2014
 10. Gold Award for Program Smile and Hope in Indonesian CSR Award 2014
 11. Gold Award for the Program of District General Hospital Development in Sangatta in Indonesian CSR Award 2014.
 12. Silver Award for Post-Mining Land Use Program for Nature Tourism and Cattle Farming in Indonesian CSR Award 2014.
 13. Silver Award for "Program Meretas Warna Meraih Asa" in Indonesian CSR Award 2014
 14. Silver Award for Pre-Retirement Training Program for Employees of KPC who will undergo Retirement Preparation Period in the Indonesian CSR Award 2014.
 15. "Citra Abdi Kesehatan" Award from the Governor of East Kalimantan to KPC as a Company with Health Care Awareness
 16. Best Sustainability Report 2013 for the Category of Mining and Metal in the Sustainability Reporting Award 2014

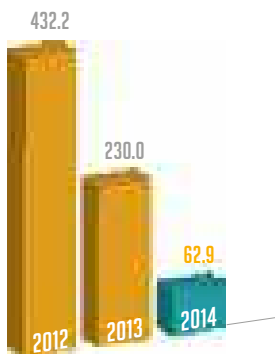
IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Uraian	2014	2013	2012	Description
Penjualan	2,786,067,095	3,547,424,427	3,775,518,192	Revenue
Laba Bruto	487,459,338	686,204,150	983,903,447	Gross Profit
Laba Usaha	62,956,465	230,047,115	432,277,042	Operating Income
EBITDA	245,099,755	623,831,874	824,031,413	EBITDA
Beban Lain-lain - Neto	(372,974,885)	(975,286,028)	(1,047,842,674)	Other Expenses - Net
Rugi Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(310,018,420)	(745,238,913)	(615,565,632)	Loss Before Income Tax Benefit (Expense)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(155,886,244)	85,135,436	(90,060,406)	Income Tax Benefit (Expense) - Net
Rugi Neto	(465,904,664)	(660,103,477)	(705,626,038)	Net Loss
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Dasar (Dalam Ribuan Saham)	25,314,621,723	20,300,187,393	20,300,187,393	Weighted Average Number Of Ordinary Shares (In Thousand Shares)
Laba (Rugi) per Saham (AS\$ per 1.000 saham)	(15.33)	(30.00)	(32.82)	Earning (Loss) per Share (US\$ per 1,000 shares)
Aktiva Lancar	2,346,891,707	1,944,236,777	2,263,210,808	Current Assets
Jumlah Aktiva	6,500,528,918	7,003,908,115	7,354,327,207	Total Assets
Kewajiban Lancar	6,798,673,348	4,719,914,333	2,559,443,581	Current Liabilities
Jumlah Kewajiban	7,233,570,276	7,306,867,650	6,962,177,504	Total Liabilities
Ekuitas	(733,041,358)	(302,959,535)	392,149,703	Stockholder's Equity
Nilai Buku per Saham	-	(14.92)	19.32	Book Value per Share
Modal Kerja Bersih	(4,451,781,641)	(2,775,677,556)	(296,232,773)	Net Working Capital
Rasio (%)				Ratio (%)
Laba Terhadap Aktiva	-7.2%	-9.4%	-9.6%	Return on Assets
Laba Terhadap Ekuitas	-63.6%	-217.9%	-179.9%	Return on Equity
Rasio Lancar	34.5%	41.2%	88.4%	Current Ratio
Utang Terhadap Total Aktiva	63.9%	59.4%	50.5%	Debts to Total Assets
Utang Terhadap Ekuitas	-566.3%	-1374.2%	947.1%	Debts to Equity
Marjin Laba Kotor	17.5%	19.3%	26.1%	Gross Margin
Marjin Laba Usaha	2.3%	6.5%	11.4%	Operating Margin
Marjin Laba Bersih	-16.7%	-18.6%	-18.7%	Net Margin
Nilai Tukar Penutup Pada Akhir Tahun (Rp/US\$)	12,346	12,120	9,670	Year End Closing Exchange Rate (Rp/US\$)
Nilai Tukar Rata-Rata Dalam Setahun (Rp/US\$)	11,878	12,189	8,779	Average Annual Exchange Rate (Rp/US\$)

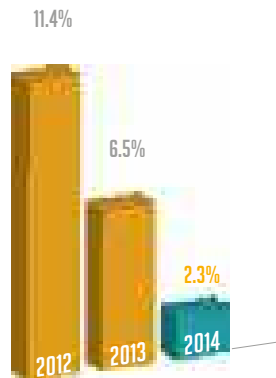
LABA USAHA
OPERATING INCOME

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



MARJIN LABA USAHA
OPERATING MARGIN

dalam % in %



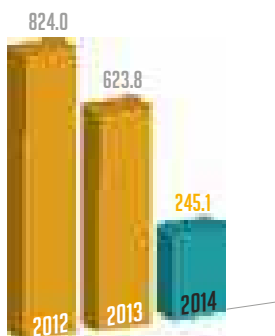
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
INCOME (LOSS) BEFORE TAX

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



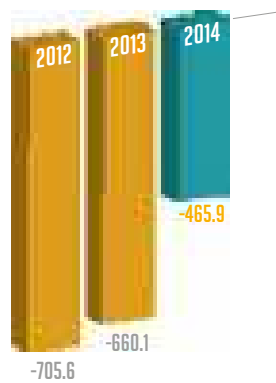
EBITDA
EBITDA

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



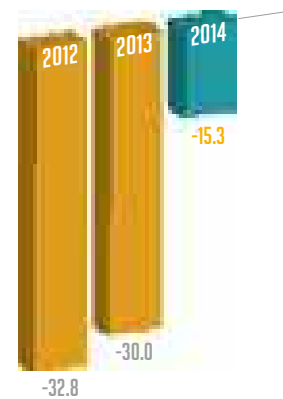
LABA (RUGI) BERSIH
NET INCOME (LOSS)

dalam juta Dolar AS in million US Dollar



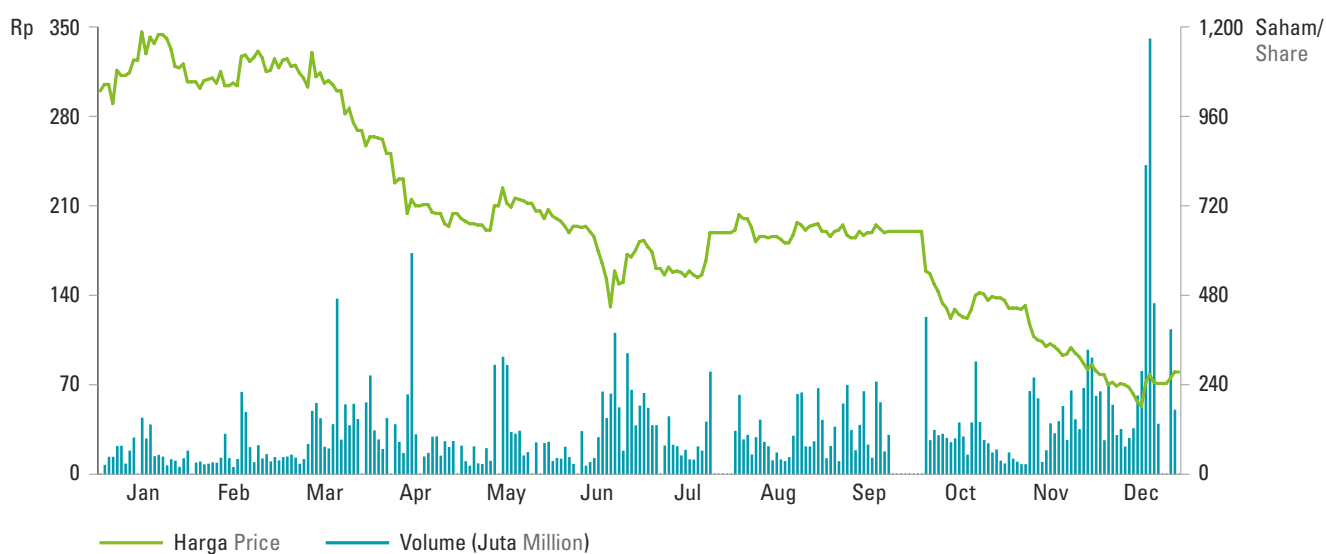
LABA (RUGI) PER SAHAM
EARNING PER SHARE

dalam Dolar AS per 1.000 saham
in US Dollar per 1,000 share



IKHTISAR SAHAM STOCK HIGHLIGHTS

LABA USAHA OPERATING INCOME



PERKEMBANGAN HARGA SAHAM PER TRIWULAN 2013-2014 QUARTERLY SHARE PRICE PERFORMANCE 2013-2014

Periode	Tertinggi Highest	Terendah Low	Penutupan Close	Period
Triwulan I, 2012	2,375	2,300	2,350	1 st Quarter, 2012
Triwulan II, 2012	1,120	1,090	1,110	2 nd Quarter, 2012
Triwulan III, 2012	750	720	730	3 rd Quarter, 2012
Triwulan IV, 2012	600	600	600	4 th Quarter, 2012
Triwulan I, 2013	690	690	690	1 st Quarter, 2013
Triwulan II, 2013	550	530	550	2 nd Quarter, 2013
Triwulan III, 2013	480	455	455	3 rd Quarter, 2013
Triwulan IV, 2013	300	300	300	4 th Quarter, 2013
Triwulan I, 2014	269	269	269	1 st Quarter, 2014
Triwulan II, 2014	184	170	170	2 nd Quarter, 2014
Triwulan III, 2014	190	190	190	3 rd Quarter, 2014
Triwulan IV, 2014	80	80	80	4 th Quarter, 2014

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM SHARE LISTING CHRONOLOGY

Keterangan Description	Rasio Perbandingan Comparison Ratio	Jumlah Saham Yang Ditawarkan Number of Shares Offered	Nominal Per Saham Nominal per Share	Jumlah Nominal (Rp) Total Nominal (Rp)	Jumlah Saham Total Shares	Tanggal Pencatatan Listing Date	Bursa Regulator
IPO Rp.4,500,-		10,000,000	1,000	10,000,000,000	10,000,000	30-07-90	BE Indonesia
Company Listing		25,000,000	1,000	25,000,000,000	35,000,000	18-03-91	BE Indonesia
Right Issue 1	(7 : 2)	10,000,000	1,000	10,000,000,000	45,000,000	30-06-93	BEJ dan BES
Stock Split	(1 : 2)	45,000,000	500	22,500,000,000	90,000,000	29-09-97	BEJ dan BES
Saham Bonus	(10 : 12)	108,000,000	500	54,000,000,000	198,000,000	30-09-97	BEJ dan BES
Right Issue 2	(1 : 3)	594,000,000	500	297,000,000,000	792,000,000	24-11-97	BEJ dan BES
Right Issue 3	(2 : 47)	18,612,000,000	500	9,306,000,000,000	19,404,000,000	26-05-00	BEJ dan BES
Non Pre-Emptive Right		1,369,400,000	500	684,700,000,000	20,773,400,000	05-10-10	BEI
Rights Issue 4	(20:31)	15,853,620,427	100	1,585,362,042,700	36,627,020,427	07-10-14	BEI

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS BY THE COMPANY

Keterangan Description	Tahun Buku Fiscal Year	Dividen Per Saham (Rp) Dividends Per Share (Rp)	Jumlah Saham Total Share	Cum Date	Ex Date	Rec Date	Tanggal Pembayaran Payment Date
Dividen Tunai Cash Dividend	1991	50.00	35,000,000				
Dividen Tunai Cash Dividend	1992	50.00	35,000,000				
Dividen Tunai Cash Dividend	1993	50.00	45,000,000				
Dividen Tunai Cash Dividend	1998	5.00	792,000,000				
Dividen Interim Interim Dividend	2000	1.00	19,404,000,000			13-07-00	17-07-00
Dividen Final Final Dividend	2002	2.50	19,404,000,000	13-08-03	14-08-03	19-08-03	02-09-03
Dividen Interim Interim Dividend	2005	5.00	19,404,000,000	09-08-05	10-08-05	12-08-05	18-08-05
Dividen Final Final Dividend	2005	10.00	19,404,000,000	12-06-06	13-06-06	15-06-06	19-06-06
Dividen Final Final Dividend	2006	16.00	19,404,000,000	13-06-07	14-06-07	18-06-07	21-06-07

PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS BY THE COMPANY

Keterangan Description	Tahun Buku Fiscal Year	Dividen Per Saham (Rp) Dividends Per Share (Rp)	Jumlah Saham Total Share	Cum Date	Ex Date	Rec Date	Tanggal Pembayaran Payment Date
Dividen Interim 1 Interim Dividend 1	2007	33.00	19,404,000,000	22-06-07	25-06-07	27-06-07	02-07-07
Dividen Interim 2 Interim Dividend 2	2007	33.00	19,404,000,000	28-08-07	29-08-07	31-08-07	05-09-07
Dividen Final Final Dividend	2007	45.00	19,404,000,000	28-07-08	29-07-08	01-08-08	07-08-08
Dividen Final Final Dividend	2008	50.60	19,404,000,000	29-07-09	30-07-09	03-08-09	18-08-08
Dividen Final Final Dividend	2009	27.68	19,404,000,000	28-07-10	29-07-10	02-08-10	16-08-10
Dividen Final Final Dividend	2010	41.78	20,773,400,000	27-07-11	28-07-11	01-08-11	15-08-11
Dividen Final Final Dividend	2011	14.31	20,773,400,000	19-06-12	20-06-12	22-06-12	06-07-12

Rasio Pembayaran Dividen

Dividend Payout Ratio

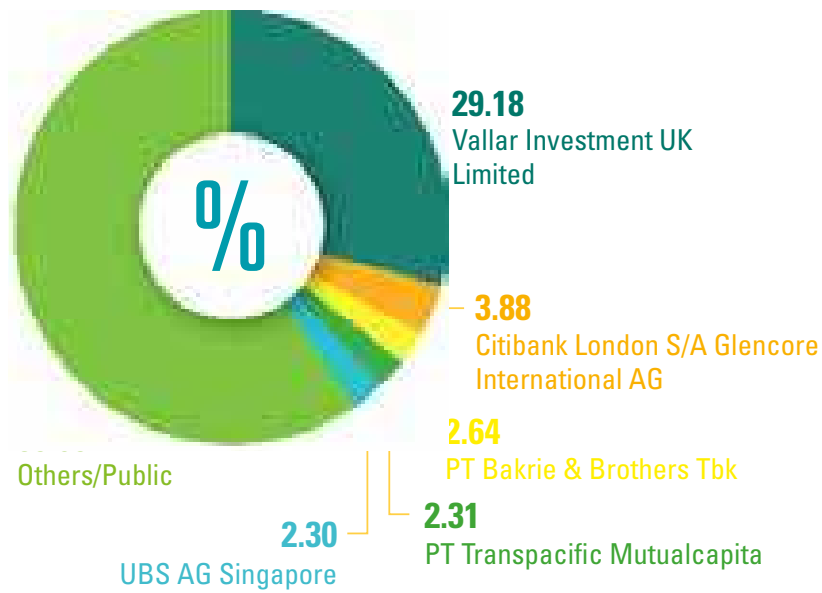
Perseroan membagikan dividen maximum 30% dari laba bersih Perseroan bergantung pada Persetujuan Pemegang Saham.

The Company distributes dividends maximum 30% of the net profit of the Company depends on the approval of Shareholders.

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2014
TABLE OF SHARE OWNERSHIP PER 31 DECEMBER 2014

No.	Nama Investor Investors' Names	Nama Pemegang Rekening Names of Account Holder	Jumlah Total Shares	%
1.	JPMCB-VALLAR INVESTMENT UK LIMITED- 2157804768	BUT DEUTSCHE BANK AG	6,061,699,637.00	29.18
2.	CITIBANK LONDON S/A GLENCORE INTERNATIONAL AG	CITIBANK, N. A	806,594,512.00	3.88
3.	PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk-MC RtMJ	SINARMAS SEKURITAS, PT	548,587,988.00	2.64
4.	PT.TRANSPACIFIC MUTUALCAPITA	SINARMAS SEKURITAS, PT	479,011,500.00	2.31
5.	UBS AG SINGAPORE NON-TREATY OMNIBUS ACCOUNT-2091144090	BUT DEUTSCHE BANK AG	478,710,351.00	2.30
6.	PUBLIC		12,398,796,012.00	59.69
			20,773,400,000.00	100.00

KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2014
SHARE OWNERSHIP AS OF DECEMBER 31, 2014



INFORMASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Vallar Investment:

Merupakan perusahaan yang berbasis di London, Inggris.

Vallar didirikan pada bulan Juli 2010 melalui Penawaran Saham Perdana (IPO), dengan interest pada aset-aset terbesar batu bara di Indonesia dengan aktivitas utama eksplorasi, menambang, dan memproses batu bara.

INFORMATION OF CONTROLLING SHAREHOLDERS

Vallar Investment:

A company based in London, United Kingdom.

Vallar was established in July 2010 through Initial Public Offering (IPO), with interest in the largest coal producing assets in Indonesia with primary activity is to explore, mine, and process coal.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi Perseroan telah menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Perseroan. Dari sisi operasional hal ini telah terbukti dengan keberhasilan BUMI meningkatkan efisiensinya secara signifikan.

Board of Commissioners considers that the Board of Directors has drawn up appropriate measures to address various challenges faced by the Company. From the operational side, this has been proven by the success of BUMI in significantly improving its efficiency.

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Memasuki tahun 2015, secara umum industri pertambangan masih mengalami tekanan. Harga-harga komoditas pertambangan, seperti minyak, batu bara, nikel dan lain-lain, masih berkutat di kisaran harga yang rendah. Harga minyak bahkan sempat mencapai titik terendah dalam enam tahun terakhir.

Harga jual batu bara di pasar dunia juga belum dapat bergerak naik bahkan cenderung menurun. Hal ini terutama karena adanya kelebihan pasokan dan menurunnya permintaan dari China, yang merupakan salah satu negara importir batu bara terbesar di dunia, dan salah satu negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia, selain India dan Jepang.

Di tengah situasi seperti ini tentunya tidak mudah bagi perusahaan tambang untuk mempertahankan usahanya. Terbukti dari banyaknya perusahaan tambang yang terpaksa menghentikan operasinya.

Berkaca pada kenyataan di atas, kami Dewan Komisaris sangat menghargai kerja keras dan kegigihan dari Direksi dan Manajemen perusahaan dalam mengatasi tantangan tersebut.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi Perseroan telah menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Dari sisi operasional, BUMI terbukti mampu meningkatkan efisiensinya secara signifikan, terutama segmen batu bara, yang terbukti dari penurunan *striping ratio*, maupun biaya kas produksi. Bila tingkat efisiensi ini dapat terus dipertahankan ketika perekonomian dunia pulih sepenuhnya dan industri pertambangan batu bara kembali menemukan momentumnya, maka kami yakin Perseroan akan mampu memacu kembali pertumbuhannya.

Di sisi lain, BUMI terus berupaya meningkatkan penjualan dengan melakukan pendekatan pada pelanggan-pelanggan yang mempunyai reputasi tinggi. Pendekatan yang dilakukan oleh BUMI kepada pelanggan, kami lihat cukup efektif untuk menjaga harga jual batu bara BUMI pada tingkat yang wajar.

Dari sisi keuangan, kami melihat bahwa Direksi terus berupaya untuk menjaga keseimbangan arus kas perusahaan dan mengarahkannya ke posisi yang lebih sehat. Dalam pandangan kami, langkah Direksi untuk menjadwalkan ulang pembayaran utang perusahaan, atau dalam kasus yang berbeda dengan mengkonversinya menjadi penyertaan saham, telah membuktikan kematangan pengalaman Direksi sebagai nahkoda perusahaan. Kami percaya bila semuanya berjalan dengan baik, maka BUMI akan kembali mendapatkan struktur pendanaan yang sehat dan kuat.

Dear Shareholders,

Entering 2015, the mining industry in general is still under pressure. The prices of mining commodities, such as oil, coal, nickel and others, are still struggling in the lower price range. Oil prices had even reached the lowest point in the last six years.

Global coal selling price is still unable to rise any higher, in fact it continues to go downward. This is mainly due to the oversupply and the declining demand from China, one of the largest coal importers in the world, and one of our main coal export destinations, in addition to India and Japan.

Against this circumstances, maintaining the operational of mining companies is certainly a tough undertaking, as evident by the large amount of mining company forced to cease its operation.

Pondering upon the above facts, the Board of Commissioners very much appreciates the hard work and persistence of the Board of Directors and Management of the Company in overcoming these challenges.

Review on BOD Performance

BOC considers that the Board of Directors has drawn up appropriate measures to address the various challenges. Operation wise, BUMI is proven able to improve efficiency significantly, especially on coal segment, as evident from the decline in *striping ratio*, or cash cost of production. If we are able to maintain such level of efficiency, then upon the full recovery of the world economy, and the coal mining industry regained its momentum, we strongly believe that the Company will be able to again spur its growth.

On the other hand, BUMI seeks to continue to increase its sales by approaching reputable customers. In our opinion, the approach taken by BUMI is quite effective to maintain the selling price of BUMI coal at a reasonable rate.

Regarding financial performance, we see that the Board of Directors continues to strive to maintain the balance of the Company's cash flow and to direct it to a more healthy position. In our view, BOD's initiative to reschedule debt settlement, or in different cases by converting them into shares of stock, is an evidence of BOD's solid experience as the helmsman of the Company. We believe that if all goes well, then BUMI will again have a healthy and strong financial structure.

Bila melihat perolehan laba pada tahun 2014, kami percaya bahwa strategi yang diambil oleh Direksi adalah strategi yang tepat di tengah situasi aktual yang dialami Perseroan. Bila pada tahun sebelumnya Perseroan mencatat rugi bersih sebesar USD 609,0 juta, pada tahun 2014 Perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar USD 388,0 juta (Januari – Desember 2014). Ini menjadi catatan positif bagi BUMI dan tentunya dapat menguatkan optimisme pemegang saham, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal lain yang juga menentukan masa depan Perseroan adalah kuatnya komitmen BUMI terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi mampu menjaga komitmen tersebut dan tidak melakukan kompromi walaupun tengah menghadapi tantangan besar. Konsistensi BUMI dalam menjalankan salah satu asas GCG, yakni keterbukaan, terbukti dari kepatuhannya terhadap peraturan, termasuk yang mengatur kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan auditan, laporan tahunan, dan laporan-laporan lain yang disyaratkan oleh regulator. Tentunya hal ini akan membantu menghilangkan bias sentimen dalam proses evaluasi saham dan mengembalikan kepercayaan pasar pada BUMI. Ke depannya, hal ini akan menjadi landasan yang kuat bagi kesinambungan usaha Perseroan.

Prospek Usaha

Masih lemahnya perekonomian dunia diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2015. Akan tetapi kami optimis, walaupun pemulihan ekonomi belum akan terjadi dalam waktu dekat, namun upaya-upaya ke arah sana mulai terlihat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Para analis juga menunjukkan nada-nada yang optimis atas perekonomian Indonesia. Walaupun masih tumbuh dalam level yang moderat, yakni 5,5 hingga 5,8%, belum setinggi yang diharapkan, namun perekonomian Indonesia dinilai masih cukup solid untuk menghadapi fluktuasi perekonomian dunia. Adanya rencana Pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif, tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BUMI yang diselenggarakan tanggal 30 Juni 2014, telah ditetapkan bahwa komisaris yang menjabat pada saat berlangsungnya RUPS tersebut diangkat kembali dan melanjutkan tugasnya sebagai Dewan Komisaris. Dengan demikian tidak terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2014.

When we see the result of 2014, we understand that the Board of Directors has adopted the right strategy regarding the situation experienced by the Company. In the previous year, the Company recorded a net loss of USD 609.0 million, now in 2014, the Company managed to record a net loss of USD 388.0 million (January - December 2014). It is a positive note for BUMI and can certainly will strengthen the optimism of shareholders, employees and other stakeholders.

BUMI's strong commitment to the application of the principles of good corporate governance within the company also determine the future of the Company. BOC considers that the Board of Directors is able to keep that commitment and not to compromise despite facing great challenges. BUMI consistency in performing one of the principles of good corporate governance, namely openness, is evidenced by its adherence to the rules, including one that require the Company to submit audited financial statements, annual reports, and other reports required by the regulator. It would abate biased sentiments in share valuation process and would return market trust towards BUMI. Going forward, this will be a strong foundation for the Company's business continuity.

Business Prospect

Global economic slowdown is predicted to continue in 2015. However, we are still optimistic, despite that the economic recovery might not happen in the near future, but the recovery efforts in that direction began surfacing, both domestically and abroad.

The analysts also speak in optimistic tones over Indonesian economy. Although it still grow in a moderate level of 5.5 to 5.8%, not as high as what have been expected before, but it is still considered solid enough to cope with fluctuations in the world economy. The government plans to spur the development of infrastructure and productive sectors which certainly can boost economic growth in the future.

Changes in Board of Commissioners

BUMI's General Meeting of Shareholders held on June 30, 2014, reached the decision that the commissioners who served at the time of the AGM are reappointed and may resume their duties as the Board of Commissioners. Accordingly, no changes in the composition of the Board of Commissioners occurred in 2014.

Penutup

Pada kesempatan ini, iijinkan saya mewakili Dewan Komisaris untuk mengungkapkan penghargaan kami terhadap keberhasilan yang ditunjukkan oleh Direksi dan Manajemen BUMI, dalam membawa Perseroan melewati tantangan berat tahun 2014.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan BUMI atas loyalitas dan kerja kerasnya sepanjang tahun 2014.

Dewan Komisaris juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya kepada kami.

Dan akhirnya, kepada para pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kerja samanya. Tentunya kami berharap hal yang baik ini dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Closing Mark

On this occasion, please allow me to represent the Board of Commissioners to express our appreciation to the success shown by the Board of Directors and the Management of BUMI, in bringing the Company passed a tough challenge in 2014.

We also wish to thank all employees of BUMI for their loyalty and hard work throughout 2014.

The Board of Commissioners would like to also thank the shareholders for their trust and support bestowed upon us.

And finally, to our customers, business partners and other stakeholders, we also wish to thank you for your cooperation. Obviously we hope that this good thing can be continued in the coming years.

On behalf of the Board of Commissioners
PT Bumi Resources, Tbk



Kusumo A. Martoredjo

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Terlepas dari beratnya tantangan yang dihadapi BUMI pada tahun 2014, Perseroan berhasil mempertahankan fundamental operasional yang cukup kuat. Perseroan juga terus meningkatkan upaya dalam melakukan optimisasi biaya dan efisiensi.

In 2014, irrespectively from the challenges we have to deal with, the Company managed to maintain a fairly strong operational fundamentals. The Company also strengthened its efforts in optimizing costs and efficiency.

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Tahun 2014 yang ditandai dengan masih lesunya perekonomian dunia telah membawa dampak yang luas ke berbagai sektor industri, termasuk industri pertambangan. Hal ini tercermin dari penurunan harga di hampir semua komoditas pertambangan. Untuk batu bara, penurunan harga yang dimulai pada tahun 2011, terus berlangsung hingga tahun 2014.

Seperti halnya dengan perusahaan lain yang bergerak di sektor pertambangan, Perseroan pun tidak terkecuali mengalami dampak dari kondisi tersebut. Perseroan menyikapi kondisi yang kurang menguntungkan ini dengan melakukan pembenahan internal, baik dari sisi operasional maupun finansial. Perseroan juga terus berupaya mencari berbagai peluang bisnis lain di sektor energi dan mineral lainnya, yang dapat menjadi alternatif usaha untuk menunjang kelangsungan usaha Perseroan di masa depan.

Kinerja Operasional

Terlepas dari beratnya tantangan yang dihadapi BUMI pada tahun 2014, Perseroan berhasil mempertahankan fundamental operasional yang cukup kuat, yang dibuktikan dengan hal-hal berikut:

- Pengupasan lapisan tanah penutup (OB) turun sebesar 15,82% menjadi 579,3 mbcm (dari 688,1 mbcm pada tahun 2013), karena menurunnya nisbah kupas.
- Nisbah kupas (*strip ratio*) dapat diturunkan secara tajam sebesar 20,07% menjadi 6,9 (dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 8,6).
- Batu bara yang ditambang meningkat sebesar 5,32% menjadi 84,4 juta ton (dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 80,2 juta ton)
- Penjualan batu bara meningkat sebesar 3,25% menjadi 84,7 juta ton (dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 82,0 juta ton)
- Biaya produksi berkurang sebesar 17% menjadi 34,6 dolar AS/ton batu bara yang ditambang (dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 40,5 dolar AS/ton batu bara yang ditambang).
- Inventori batu bara berkurang sebesar 20,95% menjadi 4,3 juta ton (dari 5,5 juta ton di tahun 2013)

Perseroan mampu mempertahankan kinerja operasionalnya, namun demikian harga jual rata-rata batu bara BUMI pada tahun 2014 turun sebesar 17,49%, dari USD 63,8/ton di tahun 2013, menjadi menjadi USD 52,7/ton (selama periode Januari-Desember 2014) sebagai akibat turunnya indeks yang mencerminkan adanya dinamika perubahan permintaan dan persediaan batu bara dunia. Adanya tren penurunan harga yang masih berlanjut hingga kini membuat Perseroan harus meningkatkan upayanya dalam mengoptimisasikan biaya dan efisiensi. Perseroan juga terus berupaya memaksimalkan harga penjualan yang sejalan dengan indeks harga pasar.

Dear Shareholders,

In 2014, the coal industry continued to face tough challenges. The sluggish world economy has taken its toll on various sectors of industry, including the mining industry. This is reflected in the decrease of prices of virtually all commodities. Particularly for coal, the declining trend of prices, which started in 2011, has continued through 2014.

As with other companies engaged in the mining sector, the Company cannot avoid the impact of such conditions. The Company addressed these unfavorable conditions by conducting a series of reforms, internally, on the operational and financial sides. It also continued to look for various other business opportunities, both in the energy sector as well as in other mineral mining sectors, that could be the alternative solution to support the Company's business continuity in the future.

Operational Performance

In 2014, irrespective of the challenges we have to deal with, the Company managed to maintain a fairly strong operational fundamentals, as evidenced by the following facts:

- Stripping of overburden (OB) decreased by 15.82% to 579.3 mbcm (from 688.1 mbcm in 2013), due to the lower strip ratio.
- Stripping ratios reduced significantly by 20.07% to 6.9 (compared to the same period last year at 8.6).
- Coal Mined increased by 5.32% to 84.4 million tonnes (compared to the same period last out of 80.2 million tons)
- Coal sales increased by 3.25% to 84.7 million tonnes (compared to the same period last year amounted to 82.0 million tons).
- Production Cash Cost reduced by 17% to USD 34.6/ton of coal mined (compared with USD 40.5/ton of coal mined in 2013.)
- Coal inventory reduced by 20.95% to 4.3 million tons (from 5.5 million tons in 2013).

The Company managed to maintain its operational performance, however the average selling price of BUMI coal in 2014 fell by 17.49%, from USD 63.8/ton in 2013, to USD 52.7/ton (during the period of January-December 2014), mainly due to the drop in coal indices that reflect the dynamic of global coal demand and supply. With the downward trend in coal prices continuing, the Company is left with no choice but to strengthen its effort in optimizing costs and efficiencies. In addition, the Company also continues to seek to maximize its sales price, in line with the market price index.

Sejak tahun 2013, Perseroan telah berupaya untuk mengatasi adanya tren perubahan harga dengan mengantisipasi dan meraih berbagai peluang perbaikan operasional yang mungkin terjadi dalam jangka pendek. Kebijakan ini tetap dilanjutkan di tahun 2014, dimana BUMI merealisasikan berbagai program kerja yang diarahkan untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan efisiensi operasional dalam rangka mengatasi tren penurunan indeks harga batu bara dengan melakukan perbaikan pola penambangan dan perencanaan aksi penambangan di KPC dan Arutmin.

Untuk menjaga efisiensi operasionalnya, melalui berbagai rencana aksi penambangannya, BUMI berhasil menekan rasio pengupasan secara signifikan dari 8,6 turun menjadi 6,9. Biaya kas produksi untuk periode Januari-Desember 2014 tercatat sebesar USD 34,6/ton batu bara yang ditambang, atau turun sebesar 17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar USD 40,5/ton batu bara yang ditambang.

Sementara itu jumlah batu bara yang ditambang untuk periode Januari – Desember 2014 tercatat meningkat sebesar 5,32% menjadi 84,4 juta ton, sementara di periode yang sama tahun lalu tercatat sebesar 80,2 juta ton.

Peningkatan produksi ini diikuti pula dengan peningkatan penjualan batu bara sebesar 3,25% dari 82,0 juta ton menjadi 84,7 juta ton, untuk periode yang sama. Keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan penjualan batu bara terutama disebabkan oleh infrastruktur kelas dunia serta kebijakan BUMI yang secara konsisten menerapkan pola penjualan kepada pelanggan yang memiliki komitmen. Mayoritas pelanggan batu bara BUMI adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pembangkitan energi, pengolahan semen, dan produksi besi baja. Hanya sebagian kecil dari total produksi BUMI yang dilepas di pasar *spot*.

Sementara itu, segmen non-batu bara juga menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan sepanjang tahun 2014. Secara operasional, Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menerima izin ekspor pada bulan September 2014 dan diharapkan akan segera kembali pada tingkat produktivitas tertingginya. Dairi Prima Mineral, saat ini telah memasuki tahap konstruksi dan Perseroan melakukan pengkinian Studi Kelayakan dan rencana penambangan di Kabupaten Dairi sebesar 5,9 juta ton untuk 14% Zinc, 8,8% Timah hitam. Studi Kelayakan Gorontalo Minerals untuk proyek tambang tembaga Sungai Mak telah selesai dilakukan dan telah dinyatakan diterima oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan demikian, Perseroan kini memiliki cadangan sebesar sebesar 105 juta ton untuk 0,70% Tembaga, 0,33 g/t Emas, 1,62 g/t Perak dengan total sumber daya sebesar 292 juta ton untuk 0,50% Tembaga, 0,47 g/t Emas. Saat ini Gorontalo Minerals sedang dalam tahap penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Citra Palu berada pada tahap penyelesaian Studi Kelayakan, dan diharapkan akan selesai pada tahun 2015 dengan dilengkapi dengan pernyataan sumber daya berdasarkan JORC.

Since 2013, the Company has sought to overcome the volatile trend of prices and to anticipate and seize opportunities in improving its operations in the short term. We continued this policy in 2014, as a number of operating programs aimed to maintain competitiveness, improve operating efficiency, and manage the decline in profit margin per tons of coal sold were realized. These included among others, improvement in mining practices and mine planning in KPC and Arutmin.

To maintain our operational efficiency, mine planning was able to significantly lower the stripping ratio, from 8.6 down to 6.9. Production Cash Cost for the period January – December 2014 stood at USD 34.6/ton of coal mined, or a decrease of 17% compared to the same period in the previous year, amounting to USD 40.5/ton of coal mined.

The amount of coal mined for the period January - December 2014 recorded an increase of 5.32% to 84.4 million tonnes, while in the same period last year was recorded at 80.2 million tons.

The increase in production lead to an increase in coal sales by 3.25% from 82.0 million tons to 84.7 million tons, for the same period. The Company's success in increasing sales of coal is mainly caused by the BUMI's world class infrastructure and policy to consistently apply long-term sales contracts with highly reputable consumers. The majority of BUMI coal customers are engaged in the power generation, cement manufacturing, and iron and steel manufacturing sectors. Only a small portion of the total production of BUMI sold on the spot market.

Meanwhile, the non-coal segment also showed quite encouraging accomplishments throughout 2014. Operationally, Newmont Nusa Tenggara (NNT) has received an export license as of September 2014 and is expected to promptly return to full productivity in 2015-2016. Dairi Prima Mineral is currently in the construction phase and the Company has passed the feasibility study update stage and has constructed a mine plan in the Dairi district for producing as much as 5.9 million tons, consisting of 14% zinc and 8.8% lead. The Gorontalo Minerals Feasibility Study for the copper mining project in Sungai Mak has been completed and has also been accepted by the Ministry of Energy and Mineral Resources, and therefore the Company could record reserves of 105 million tonnes of 0.70% copper, 0.33 g/t gold, and 1.62 g/t silver, as well as total resources of 292 million tonnes of 0.50% copper, 0.47 g/t gold. Gorontalo Minerals is currently in the preparation phase of an Environmental Impact Assessment (EIA). Citra Palu is at the completion of the Feasibility Study phase, and this is expected to be completed in 2015, fully equipped with a JORC resource statement.

Kinerja Keuangan

Berkat berbagai upaya yang dijalankan oleh BUMI dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya serta volume penjualannya, pada tahun 2014 BUMI mencatat rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pengendali sebesar USD 388,0 juta (data Jan-Des 2014), menurun sebesar USD 221,0 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat rugi bersih sebesar USD 609,0 juta dolar.

BUMI juga terus berupaya menurunkan beban utangnya, antara lain dengan melakukan penerbitan saham baru (rights issue) senilai USD 314 juta. Saat ini, BUMI tengah berada dalam proses penyelesaian utang dan restrukturisasi melalui moratorium resmi di Singapura dan Amerika Serikat guna menurunkan utang ke tingkat yang lebih sehat dan wajar secepat mungkin. BUMI memfokuskan upayanya untuk memperbaiki arus kas Perseroan dan pada tahun 2015 mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Tata Kelola Perusahaan

BUMI percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, BUMI berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari kepatuhan BUMI pada berbagai peraturan di Indonesia.

Sepanjang tahun 2014, Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG di seluruh perusahaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan jalan memperkuat fungsi pengawasan melalui Internal Audit, penerapan sistem Speak Up, serta meningkatkan kualitas manajemen risiko dalam berbagai tindakan korporasi, baik yang terkait dengan investasi maupun kegiatan operasional.

BUMI telah memiliki kelengkapan struktur yang dapat mendukung pelaksanaan GCG, yang mendapat dukungan kesungguhan dari seluruh karyawan Perseroan. Itu sebabnya BUMI mendorong manajemen dan seluruh karyawan untuk memegang teguh etika bisnis yang baik dalam setiap kegiatan perusahaan. Kami yakin bahwa semua itu akan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kepada perusahaan, sehingga akan sangat membantu Perseroan dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa depan.

Selama bertahun-tahun BUMI telah membuktikan komitmennya yang tinggi dalam menjunjung tinggi prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Financial Performance

Various efforts undertaken by BUMI in improving its operational efficiency, and increasing its sales volume, in 2014, has led to a net loss attributable to controlling shareholders of USD 388.0 million (Jan-Dec 2014), decreased by USD 221.0 million compared to the same period last year, which recorded a net loss of USD 609.0 million dollars.

BUMI also continued to pursue debt reduction, through its rights issue of USD 314 million. Currently, the BUMI is in the middle of debt settlement process and debt restructuring process through legal means in Singapore and the United States, in order to reduce its debt to a level that is more healthy and reasonable as soon as possible. BUMI was fully focused on these in order to improve its cash flow, and in 2015 those efforts began to show encouraging results.

Corporate Governance

BUMI believes that the implementation of good corporate governance is critical to the success of the Company in adding value for stakeholders. That is why, BUMI is committed to apply GCG to a high standard and in accordance with best practices in Indonesia. This is also reflected from BUMI's compliance to regulations in Indonesia.

Throughout 2014, the Company continues to improve the quality of GCG implementation throughout the company. It is partly done by strengthening the supervision function through the Internal Audit, implementing Speak Up system, as well as improving the quality of risk management in various corporate actions, either in relation to investment or operational activities.

BUMI has established a complete structure to support the implementation of GCG. But without earnest support from all employees, it will be rendered useless. Therefore BUMI encourages the management and all employees to adhere to good business ethics in every activity of the company. We believe that all this will increase the confidence of all stakeholders to the company, and will really help the Company in the face of the challenges faced today and in the future.

Over the years, BUMI has demonstrated its high commitment in upholding the basic principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya, BUMI telah menyelesaikan beberapa program perbaikan terkait aplikasi Teknologi Informasi, dan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3). BUMI mengembangkan sistem informasi SDM yang dapat memfasilitasi pengelolaan administrasi, pengawasan, dan pembuatan laporan terkait kegiatan SDM.

Dengan dukungan sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, BUMI dan seluruh anak perusahaannya berusaha untuk berkontribusi pada realisasi efisiensi operasional yang optimal. Perseroan selalu mendukung penuh upaya untuk mencapai target melalui pengembangan dan perbaikan sistem manajemen serta pelaksanaan program yang akan menjamin tercapainya tujuan jangka panjang.

Perubahan Komposisi Direksi

Tidak terjadi perubahan komposisi Direksi pada tahun 2104. Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini berkomitmen untuk melanjutkan tugasnya dalam upaya perbaikan perusahaan yang signifikan.

Prospek Usaha Tahun 2015

Melihat perkembangan ekonomi, sosial dan politik dunia saat ini, kami memperkirakan bahwa kondisi perekonomian global tahun 2015 masih belum akan pulih sepenuhnya dan tetap dipenuhi dengan ketidakpastian. Tiongkok menunjukkan tren penurunan pada indikator makroekonominya, walaupun Amerika Serikat (AS) dan India menunjukkan yang sebaliknya. Hal ini membuat para pengamat menjadi lebih berhati-hati dalam mengungkapkan prediksi dan proyeksinya.

Namun demikian, kami optimis bahwa perekonomian domestik masih cukup solid untuk tumbuh di tengah situasi dunia yang tidak pasti. Para analis memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5,5% hingga 5,8%.

Pemerintah Indonesia saat ini telah memulai proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019. PLTU mulut tambang yang menggunakan bahan bakar batu bara merupakan salah satu pilihan yang diperhitungkan Pemerintah. Kami yakin dengan adanya rencana ini pasar batu bara dalam negeri dapat meningkat signifikan.

Human Resources

In seeking to improve its human resources, BUMI has completed several improvement programs related to IT applications, and Occupational Health, Safety and Environmental (K3). BUMI has developed an HR information system to facilitate the administrative management, to oversee, and to report HR-related activities.

Supported by a system that has been tailored to the needs, BUMI and its subsidiaries strive to contribute to the realization of optimal operational efficiency. BUMI also fully supports the efforts of achieving targets through the development and improvement of management systems, and through implementation of programs designed to ensure the achievement of our long-term goals.

Change in BOD Composition

There was no change in the composition of the Board of Directors in 2104. All the current members of the Board of Directors is committed to continue our hard work through various business improvement efforts.

Business Prospect in 2015

Upon seeing the development of economic, social and the political world today, we expect that in 2015 the global economy will not be fully recovered yet and will still be filled with uncertainty. China has showed a downward trend in its macro-economic indicators, while the United States (US) and India showed the opposite. These circumstances have driven the observers to be more cautious in expressing predictions and forecast.

Nevertheless, we are optimistic that our economy is solid enough to grow in the midst of uncertainty. Analysts expect Indonesia's economic growth rate to stand at 5.5 to 5.8%.

Currently, the Indonesian government has initiated the 35,000 MW power plant project in accordance with the National Medium Term Development Plan 2015 - 2019. The mine mouth power plant that uses coal fuel is one option that is taken into account by the Government. We are confident that with this plan the domestic coal market may increase significantly.

Mengutip pernyataan dari lembaga riset Moody's, harga batu bara dunia terlihat belum akan kembali pada tahun 2015. Selain karena minimnya permintaan dari Tiongkok sebagai importir terbesar batu bara dunia, juga karena adanya kelebihan penawaran akibat tingginya produksi batu bara dari Indonesia dan Australia.

Penutup

Akhirnya, ijinakan saya mewakili seluruh anggota Direksi lainnya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, semua karyawan, serta para kontraktor dan mitra kerja, yang telah mendukung dan memberi kontribusi positif bagi jalannya Perseroan. Berkat dukungan semua pihak, BUMI mampu mengelola tantangan besar dan berbagai masalah secara terstruktur.

Semua itu membuat kami percaya penuh bahwa bila nanti pasar batu bara kembali menunjukkan tren yang membaik, BUMI telah siap untuk dapat memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang ada. Dengan kerja sama semua pihak, BUMI akan terus melangkah maju dan memperkuat posisi kepemimpinannya di sektor batu bara dan mulai membangun posisi di sektor mineral dan logam.

Quoting a statement from Moody's research, coal prices are expected to remain weak in 2015. In addition to the lack of demand from China as a major importer of coal, also due to excess supply of coal coming from Indonesia and Australia.

Closing

Finally, please allow me on behalf of my fellow Directors to express my sincere gratitude to all shareholders, the Board of Commissioners, employees, contractors and partners for their support and contribution in charting the course of the Company. This has enabled BUMI to manage major challenges and problems in a structured manner.

These make us more confident that later when the prices of coal rebound, BUMI is ready to best seize opportunities. With the cooperation of all parties, BUMI will continue to move forward and strengthen its position in the coal sector as a leader and establish its presence in the mineral and metals sector.

On behalf of Directors
PT Bumi Resources, Tbk



Saptari Hoedaja
Presiden Direktur
President Director

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2014

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FOR THE 2014 ANNUAL REPORT

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014 PT Bumi Resources Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Bumi Resources Tbk tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2015

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Kusumo A. Martoredjo

Presiden Komisaris & Komisaris Independen
President Commissioner & Independent Commissioner



Suryo B. Sulisto

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Iman Taufik

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Fuad Hasan Masyhur

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Nalinkant A. Rathod

Komisaris
Commissioner



Anton Setianto Soedarsono

Komisaris
Commissioner



Sulaiman Zuhdi Pane

Komisaris
Commissioner

Statement by Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding Responsibility for 2014 Annual Report of PT Bumi Resources Tbk

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2014 Annual Report of PT Bumi Resources Tbk have been presented in their entirety, and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report.

This statement is duly made in all integrity.

Jakarta, 30 April 2015

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS



Saptari Hoedaja
Presiden Direktur
President Director



Eddie J. Subari
Direktur
Director



Kenneth P. Farrell
Direktur
Director



Dileep Srivastava
Direktur & Sekretaris Perusahaan
Director & Corporate Secretary



Andrew C. Beckham
Direktur
Director



R. A. Sri Dharmayanti
Direktur
Director



TINJAUAN FUNGSIONAL FUNCTIONAL REVIEW

TINJAUAN RENCANA DAN STRATEGI PLAN AND STRATEGY OVERVIEW

Di tengah situasi ekonomi global maupun nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, BUMI menyusun rencana bisnisnya dengan menekankan pada pemanfaatan setiap peluang pengembangan usaha secara bijak dengan penuh kehati-hatian dan cermat.

Strategi Perusahaan Secara Umum

Secara umum, strategi usaha BUMI untuk tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pada bisnis inti.
BUMI memfokuskan usahanya untuk memperoleh hasil yang optimal melalui pemanfaatan cadangan yang dimilikinya. BUMI meningkatkan kompetensinya pada bisnis

As the global and national economy has not yet fully recovered, BUMI has developed its business plan with emphasis on judicious utilization of opportunities for business development exercising prudence and due care.

General Strategy

In general, BUMI's strategy in 2014 can be described as follow:

1. Focus on core business
BUMI focuses efforts to optimize results through proper utilization of its reserves. BUMI improves its competences in its core business to ensure a stable and safe operations.

Di tengah situasi ekonomi global maupun nasional yang belum sepenuhnya pulih dari krisis, BUMI menyusun rencana bisnisnya dengan menekankan pada pemanfaatan setiap peluang pengembangan usaha dengan penuh kehati-hatian dan bijaksana.

As the global and national economy has not yet fully recovered, BUMI develops its business plan with emphasis on the utilization of any opportunity for business development with a prudent and wise decision.

inti untuk memastikan operasional yang stabil dan aman. Kegiatan eksplorasi juga tetap dilanjutkan secara lebih berhati-hati untuk menjamin profitabilitas jangka panjang. BUMI juga melakukan maksimalisasi output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan tingkat biaya.

2. Mengejar pertumbuhan usaha.
BUMI terus berupaya mengejar pertumbuhan melalui proyek-proyek yang lebih solid, serta peningkatan kualitas dan nilai cadangan yang ada saat ini.
3. Mempertahankan keuangan yang sehat
BUMI berupaya menjaga arus kas yang sehat melalui berbagai cara, seperti negosiasi kontrak dan negosiasi penyelesaian utang perusahaan. BUMI terus berupaya menjaga ketersediaan dana, baik dari perbankan, mitra strategis, atau sumber pendanaan lainnya, untuk memastikan kemampuan BUMI dalam memenuhi kewajibannya, serta mendanai pertumbuhan masa depan.

BUMI continuously carries out its exploration activity carefully to secure a long-term profitability. BUMI also optimizes output to increase revenues and reduce costs.

2. Pursue business growth
BUMI continues to pursue growth through solid development projects, and by improving the quality and value of existing reserves.
3. Maintain healthy financials
BUMI seeks to maintain a healthy cash flow through various means, such as negotiating contract terms and proactive debt management. BUMI strives to maintain availability of funds, from banks, strategic partners, or from any other funding source, to ensure that BUMI is able to meet its obligations, and to fund future growth.

Strategi Pengembangan Usaha

Dengan memperhatikan prediksi kondisi eksternal selama beberapa tahun ke depan, BUMI menekankan pada strategi pertumbuhan terencana dan menyusun strategi pengembangan masing-masing segmen sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mewujudkan potensi sumberdaya yang dimiliki, membangun kesiapan infrastruktur pendukung dan menciptakan peluang untuk memberi manfaat optimal sesuai dengan kekuatan Perseroan dan mengelola risiko. BUMI juga akan melakukan pengembangan bisnis dari anak-anak perusahaannya seperti yang saat ini sedang berjalan di PT Pendopo Energi Batubara.

Sasaran Jangka Pendek & Menengah

Dalam jangka menengah, dengan perencanaan yang berhati-hati, BUMI akan mewujudkan potensi bisnis yang ada dan mendorong proyek pengembangan lain memasuki tahap *commissioning*. Bila melihat kondisi terkini, maka strategi pengembangan Perseroan dapat dikelompokkan ke dalam dua segmen usaha, yakni energi dan mineral dasar.

Business Development Strategy

Taking into consideration prediction of external conditions for the next few years, BUMI places emphasis on a planned growth model and develops strategies for each segment in accordance with sector conditions. Such steps are carried out by realizing potential of its resources, building supporting infrastructure and creating opportunities to optimize benefits in line with the strengths of the Company and managing risk. BUMI also will conduct business development of its subsidiaries such as it is now in PT Pendopo Energi Batubara.

Short & Medium Term Goals

Over the medium term, BUMI carefully plans to realize potential from its existing business and convert other development projects to enter commissioning stage. When considering the current conditions, the development strategy of the Company can be grouped into two business segments, namely energy and basic minerals.

Untuk segmen energi, batu bara memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan posisi di industri sebagai produsen terbesar batu bara di Indonesia dan sekaligus pemasok terbesar di pasar domestik dan internasional, BUMI bertekad meningkatkan kinerja penambangan batu bara. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor energi dan transportasi, Perseroan berupaya untuk mengembangkan proyek gas dan energi dalam jangka menengah.

Untuk segmen mineral, Perseroan memfokuskan upaya pada pengembangan aset logam, antara lain Seng, Timbal, Tembaga dan Emas untuk memasuki tahap produksi. Selain itu, regulasi yang harus dipatuhi juga telah dipahami untuk memberi nilai tambah melalui proses lanjutan.

Untuk menjaga dan memperkuat kondisi finansial di saat-saat yang penuh tantangan beberapa tahun terakhir ini, BUMI berupaya meningkatkan likuiditas dan sustainabilitas finansial melalui berbagai sinergi korporasi sesuai dengan yang direncanakan.

In the energy segment, coal presents attractive potential to be developed further. As the largest producer of coal in Indonesia and the largest supplier to the domestic and international markets, BUMI is determined to improve performance from its coal mining activities. Given the growth in the energy and transportation sector the Company seeks to develop its gas and energy projects over the medium term.

In the minerals segment, the Company is focused on developing its metal assets, such as Zinc, Lead, Copper and Gold, and moving them into construction stage. Cognizance has been taken of regulation to add value through additional processing.

Maintain and strengthen financial conditions amidst challenging times over recent years, BUMI aims to improve liquidity and financial sustainability through a number of synergistic corporate actions that are envisaged.



SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Untuk meningkatkan kinerja karyawan, BUMI berusaha mengembangkan kompetensi karyawan dan membangun hubungan kerja yang harmonis di tengah lingkungan kerja yang kondusif.

In order to boost employee performance, BUMI strives to develop competent employees and establish harmonious work relationship and favorable work environment.

A. PENGELOLAAN SDM BUMI

Tujuan pengelolaan sumber daya manusia dalam jangka panjang adalah untuk memaksimalkan kompetensi SDM dalam mendukung kegiatan usaha yang berlangsung secara efektif dan efisien. Kondisi pasar di tahun 2014 masih belum kondusif, yang ditandai dengan masih rendahnya *demand* dan harga jual batu bara, membuat BUMI menjalankan upaya efisiensi operasional secara maksimal di berbagai lini kegiatannya, termasuk pengelolaan SDM.

Sehubungan dengan situasi bisnis dan harga komoditas batu bara yang kurang bagus, BUMI melakukan berbagai upaya penghematan dalam berbagai hal seperti terkait dengan rekrutmen, training dan fasilitas ke karyawan. Hal ini dilakukan agar operasional perusahaan tetap bertahan dalam situasi sulit. Selain itu, BUMI tidak banyak melakukan perubahan *benefits* karyawan karena sedang berupaya melakukan penghematan dalam berbagai bidang.

Dengan total SDM di Bumi *group* sebanyak 30.000 karyawan, baik karyawan langsung maupun kontraktor dan sub-kontraktor, upaya efisiensi BUMI terutama diarahkan pada peningkatan kompetensi, penerapan manajemen kinerja dan pemberian paket remunerasi yang kompetitif dengan standar industri sejenis. Perencanaan SDM dikaitkan langsung dengan kebutuhan lapangan, sesuai dengan proyeksi kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi pasar dan tingkat persaingan.

A. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The purpose of human resources development in the long term is to maximize employees' competence in order to ensure effective and efficient business activities. Market condition in 2014, which remained unfavorable marked by decrease of demand volumes and declining coal price, prompted operational efficiency efforts in all activities including human resources management.

Against the backdrop of current business situation and unfavourable coal prices, BUMI undertook various efficiency efforts related to recruitment, training and employment facilities, aiming at maintaining the Company's operational throughout the challenging situation. Aside from those undertakings, there is not many changes made by BUMI on the employee benefit due to efficiency in many sectors.

For BUMI, with human resources totalling to 30,000 people that comprised of employees, contractors, and sub-contractors, efficiency efforts were focused on recruitment cost, training and development, and compensation and benefits which enable the company to stay on par with industry peers. Manpower planning was directly linked to site requirements in accordance with projected activities that were planned according to production target, market forecasts and competition.



Infrastruktur SDM

Dalam rangka meningkatkan produktivitas SDM, BUMI telah memperbaiki berbagai infrastruktur pendukung seperti pengembangan fitur IT, praktik Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), pengelolaan sistem informasi SDM untuk administrasi, *monitoring* dan pelaporan. Dengan dukungan *customized system* ini, anak perusahaan dan kontraktor dapat berkontribusi untuk mewujudkan efisiensi operasional yang optimal.

Kantor pusat juga mendukung sepenuhnya upaya tersebut dengan mengembangkan dan memperbaiki seluruh tatanan pengelolaan dan implementasi program-program yang dapat memastikan pencapaian tujuan jangka panjang.

Rekrutmen

Selama tahun 2014, Bumi tidak melakukan penambahan jumlah karyawan secara signifikan, melainkan hanya mengisi penggantian karyawan yang keluar. Kebutuhan rekrutmen di Bumi dilakukan melalui iklan di dalam *website* Bumi dan melalui *media online* seperti Jobs DB untuk mendapatkan calon kandidat potensial.

Proses penerimaan karyawan di Bumi tidak membedakan calon/pelamar yang memiliki latar belakang budaya, agama, suku atau universitas tertentu. Bumi selalu menjaga keseimbangan kesempatan di tiap divisi. Selain itu, di dalam iklan lowongan kami juga tidak pernah mencantumkan preferensi gender maupun usia untuk memberikan kesempatan yang setara bagi para pelamar.

Human Resources Infrastructure

To enhance human resources capability, BUMI has completed some improvement especially in IT application, and Health, Safety, and Environment HSE) practices, human resources information system which can facilitate administration management, monitoring, and report generation. With the support of the customized system, subsidiaries and contractors strives to contribute to the realization of optimum operational efficiency.

The head office was also in full support to the achievement of the target through development and improvement in management system as well as implementation of programs that would ensure the achievement of long term goals.

Recruitment

During 2014, BUMI did not significantly increase the number of employees, only fill up the vacancy due to employee resignation. BUMI recruitment is conducted by placing vacancy ad at its website and through online media such as Jobs DB in order to get potential candidates.

In the recruitment process, Bumi does not distinguish candidates/applicants with certain cultural background, religion, ethnicity or particular university. Bumi always keep the balance of opportunities in each division. Moreover, in our advertising of vacancy we also never include gender and age preferences, to provide equal opportunities for the applicants.



Pengembangan Kompetensi

Program-program kunci di bidang pengembangan kompetensi SDM pada tahun 2014 dalam kaitannya dengan ekspansi dan peningkatan target produksi di BUMI adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Program *training* ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menyusun materi pelatihan yang berbasis kompetensi.

2. Pelatihan Penyusunan RSKKNI Bidang Manajemen SDM
Pelatihan ini dilakukan untuk membantu menyiapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.

Salah satu program pelatihan penting di tahun 2014 adalah program Sertifikasi Asesor Kompetensi Manajemen SDM. Program *training* ini dilakukan untuk menciptakan calon Asesor kompetensi di bidang manajemen SDM sehingga bisa melaksanakan asesmen sesuai dengan SKKNI yang sudah diterbitkan oleh BNSP.

Manajemen Kinerja

Untuk memastikan peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kinerja dan internalisasi nilai perusahaan, BUMI telah mengembangkan sistem untuk merekrut dan mengembangkan *talent* terbaik, meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir bagi karyawan, dan mempertahankan karyawan. Dengan pendekatan sistematis, BUMI menerapkan penilaian kinerja, paket remunerasi berbasis kinerja dan mengembangkan budaya kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.

Strategi Remunerasi

Selain inisiatif di atas, BUMI juga menjaga agar paket remunerasi yang diberikannya tetap kompetitif dengan menetapkan standar gaji dan tunjangan yang setara dengan kompetitor. Paket remunerasi berbasis kinerja dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Kompensasi langsung dan tidak langsung dirancang untuk mengoptimalkan retensi dan keterlibatan karyawan yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Mengelola Hubungan Kerja

BUMI berupaya menciptakan hubungan kerja yang harmonis, tempat kerja yang kondusif yang memungkinkan seluruh SDM memberikan kinerja terbaik sesuai kompetensi yang dimiliki dan mencegah timbulnya perselisihan industrial dan keluhan dari karyawan. Manajemen berupaya menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawan melalui beragam kegiatan formal maupun informal. Untuk menjaga dan meningkatkan integritas, BUMI mengembangkan *Speak Up System*, sebuah sistem pelaporan pelanggaran dengan disertai bukti, yang menjamin kerahasiaan si pelapor. Selain itu, BUMI juga menjalankan komunikasi dengan karyawan melalui *town hall meeting* antara manajemen dan karyawan untuk menyalurkan informasi dan memastikan komunikasi dua arah.

Competence Development

Key programs in BUMI's HR competency development in 2014 in connection with the expansion and improvement of its production targets is as follows:

1. Technical Assistance on the Preparation of Competency-Based Training Program

This training program is done to improve the skills of participants in preparing the competency-based training materials.

2. Training on Preparation of RSKKNI for HR Management
The training is done to help prepare the Draft of Indonesian National Working Competency Standard (RSKKNI) in the field of Human Resource Management.

One of the important training programs conducted in 2014 is the program of HR Management Competency Assessor Certification. This training program is aimed at preparing candidate for Competency Assessor in the field of human resource management to carry out the assessment in accordance with SKKNI published by BNSP.

Performance Management

In order to ensure operational efficiency, performance management, and internalization of company values, BUMI continues to apply system to effectively recruit and nurture the best talents, expand employees' competencies, career development, and employee retention. Through systematic approach, BUMI applied performance appraisal system, performance-based remuneration, and developed performance oriented working culture.

Remuneration Strategy

Aside from the above initiatives, BUMI also maintain competitive remuneration package by making sure that salary and benefits standards is on par with relevant industry peers. Performance-based remuneration package is implemented to boost employee productivity and to improve employee retention. Direct and indirect compensation is designed to optimize employee retention and employee engagement which later will contribute to the achievement of company objectives.

Managing Employee Relations

BUMI strives to establish harmonious working relationship and favorable work environment that would enable all employees to deliver their best performances within their competency and avoid industrial disputes and employee grievances. The management is committed to create good communications with employees through formal and informal programs. To maintain and develop integrity, BUMI provides *Speak Up System* that warrants the confidentiality of anyone who lodges reports with supporting evidences. In addition, BUMI realized communication program through town hall meeting between management and employees to channel information and ensure two-way communication.

Program Strategis tahun 2015

1. Pengembangan kemampuan *supervisory* bagi level Superintendent ke atas.
2. Mendorong kinerja karyawan dengan melaksanakan Achievement Motivation Training bagi karyawan
3. Melakukan pembaruan Peraturan Perusahaan (PP) yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Maret 2015 dengan melakukan perbaikan dari sisi kebijakan dan benefit bagi karyawan.
4. Melengkapi Kebijakan SDM untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan pengelolaan HR di perusahaan.

B. PENGELOLAAN SDM KPC

Rekrutmen

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terlatih, baik untuk level staf maupun non staf, saat ini lebih banyak mengambil dari internal KPC. Sedangkan tenaga kerja profesional sebagian diambil dari dari berbagai universitas di Indonesia yang sudah melakukan kerja sama dengan KPC, seperti ITB, UGM, UPN, ITS, UNSRI, UNMUL, TRISAKTI, UNIBRAW. Sebagian lagi diambil dari seluruh Indonesia dengan memasang iklan lowongan kerja di media massa dan situs pencari kerja, serta bekerja sama dengan *headhunter* dan penyalur/penyedia tenaga kerja lokal maupun nasional.

Dalam penerimaan karyawan lokal, KPC menerapkan *scoring system*, khususnya non-staf dengan pengalaman nol, sebagai metode seleksi awal. *Scoring system* mengkategorikan kandidat berdasarkan tempat lahir, asal sekolah, SD, SLTP, SLTA, kandidat dengan skor tertinggi mendapatkan prioritas pertama untuk mengikuti seleksi lebih lanjut.

Remunerasi

1. Melakukan proses *Annual Salary Review* 2014, sebagai bagian dari "*Retention Program*".
2. Tetap melakukan survei pasar secara berkelanjutan, untuk memastikan paket *remuneration* yang ada di KPC tetap kompetitif diantara perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis.
3. Tetap melanjutkan program *Housing Ownership Program* (HOP) bagi karyawan, sebagai salah satu upaya "*Retention Program*".

Tabel total remunerasi tahun 2014

	2014	2013	Kenaikan Increase
USD	159,255,464	167,302,098	-8,046,634
Percent of Operating Cost	7.0%	7.1%	-0.2%

Strategic Program in 2015

1. Development of the *supervisory* capabilities for Superintendent level upwards.
2. Encourage employee performance by implementing Achievement Motivation Training for employees
3. Update Company Regulation (PP) which expired on March 31, 2015 by improving the policies and benefits for employees.
4. Complete HR policy to provide guidance for the implementation of HR management in the company.

B. HR MANAGEMENT AT KPC

Recruitment

To meet the need for skilled labor, both for the level of staff and non-staff, KPC looks to fill the vacancy from within. While part of professionals were recruited directly from various universities in Indonesia, which has entered into collaboration with KPC, such as ITB, UGM, UPN, ITS, UNSRI, UNMUL, TRISAKTI, UB. Some others were recruited by placing job vacancy advertisements in the mass media and job search sites in the internet, as well as working with *headhunters* and provider of local and national labor.

In hiring local employees, KPC applies *scoring system*, in particular for the non-staff level with no experience, as the initial selection method. The *scoring system* categorizes candidates based on place of birth, school, elementary, junior high, high school, the candidate with the highest score get the priority to enter further selection process.

Remuneration

1. Conduct Annual Salary Review in 2014, as part of "*Retention Program*".
2. Continue conducting market surveys on an ongoing basis, to ensure the remuneration package in KPC remain competitive among similar companies.
3. Continue conducting the *Housing Ownership Program* (HOP) for employees, as part of "*Retention Program*".

Table total remuneration in 2014

	2014	2013	Kenaikan Increase
USD	159,255,464	167,302,098	-8,046,634
Percent of Operating Cost	7.0%	7.1%	-0.2%

Inisiatif Peningkatan SDM

1. Penanaman Budaya Kinerja Unggul Melalui Program Pemeliharaan Kinerja Unggul (P2KU)

Bekerja sama dengan Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong sejak tahun 2013, KPC menyelenggarakan Program Pemeliharaan Kinerja Unggul (P2KU), yang dilakukan melalui penerapan ritual positif dalam *shift* kerja, pelatihan penyegaran di *site* KPC, pelatihan lanjutan untuk para supervisi, komunikasi melalui Buletin Kinerja Unggul, penyelenggaraan lomba Yel dan Hanmars, serta kunjungan dan temu pelatih serta alumni PKU di *site* KPC.

2. Sistem Manajemen Kinerja

- Sistem manajemen kinerja *Balanced Scorecard* (BSC) sudah diterapkan di Divisi Sumber Daya Manusia, *Mining Operations*, dan *Mining Support*, untuk tingkat *Superintendent* sampai *General Manager*.
- Proyek SMK (Sistem Manajemen Kinerja) menyediakan infrastruktur manajemen kinerja untuk tingkat Operator sampai *Supervisor*. Sistem ini sudah digulirkan di Divisi *Mining Operations* dan *Mining Support*.

3. Internalisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Program internalisasi visi, misi, dan nilai KPC dilanjutkan antara lain dengan pelaksanaan value talk yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu pada masing-masing unit kerja (divisi, departmen dan seksi), pemasangan spanduk, penayangan *spot* siaran di Radio Gema Wana Prima, dan pelaksanaan permainan visi-misi-nilai dalam kegiatan outbound training.

4. Program Pascasarjana di Site KPC

Sebagai bagian dari program retensi karyawan berkinerja tinggi, Program Pascasarjana di Site KPC Angkatan 2 telah diterapkan, yaitu bekerja sama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Program yang dimulai pada awal 2013 dengan jumlah peserta 40 karyawan ini telah menyelesaikan semua sesi kuliah pada November 2014.

Program Pengembangan Kompetensi

1. Pengembangan Sistem Kompetensi KPC

Hingga akhir 2014, sebanyak 91% unit kompetensi teknis telah dirumuskan. Alesco HRM System terus dikembangkan sehingga mampu memberikan *output* yang semakin baik dan akan mulai diimplementasikan di divisi. Sistem kompetensi juga telah mulai diterapkan ke dalam sistem pelatihan dan promosi karyawan.

2. Pemantauan Inisiatif Pengembangan

Pemantauan-tengah-tahun (*mid-year review*) dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pengembangan Individu (Individual Development Plan/IDP) karyawan level *Supervisor* ke atas telah dilakukan pada bulan Agustus 2014. Hasil pemantauan ini menjadi umpan-balik bagi para atasan untuk peningkatan pelaksanaan IDP.

HR Improvement Initiative

1. Fostering Excellent Performance Culture through Excellent Performance Maintenance Program (P2KU)

Working closely with the 1st Infantry Division of KOSTRAD Cilodong since 2013, KPC hold Excellent Performance Maintenance Program (P2KU), by applying positive rituals in working shift, on-site refresher training, advanced training for the supervision, communication via "Buletin Kinerja Unggul", organizing competitions of Yel and Marching, as well as visits and meeting coaches and alumni of PKU at KPC site.

2. Performance Management System

- Performance management system using Balanced Scorecard (BSC) has been applied in the Division of Human Resources, Mining Operations and Mining Support, from the level of the Superintendent upwards to the General Manager.
- SMK (Performance Management System) Project provides the infrastructure for performance management form Operator level to Supervisor. This system has been rolled out in the Division of Mining Operations and Mining Support.

3. Internalization of Vision, Mission and Corporate Values

The internalization of KPC vision, mission, and values is continued with the implementation of value talk, which held regularly every week on each unit (division, department and section), placing banners, placing radio commercial spot broadcasted by Gema Wana Prima Radio, and implementing the games of vision-mission-values in outbound training activities.

4. KPC's On-Site Postgraduate Education

As part of retention program for high performing employee, the Post Graduate School Batch 2 at KPC Site was conducted in cooperation with the School of Business and Management of ITB. The program began in early 2013 with number of participants of 40 employees, who have completed all course sessions in November 2014. 4.

Competency Development Program

1. Competence System Development at KPC

By the end of 2014, as many as 91% of technical competency units have been formulated. Alesco HRM System continues to be developed so as to provide better output and will be implemented in each division. Competency system has been applied into employees training and promotion system.

2. Review on Development Initiatives

Mid-year review on the implementation of the Individual Development Plan (IDP) for Supervisor level upwards was conducted in August 2014. The output from this monitoring can be of feedback for the employers to increase the implementation of the IDP.

3. **Peninjauan Kompetensi 2014 dan Penyusunan Rencana Pengembangan Individu 2015**

Pada akhir tahun 2014, peninjauan kompetensi serta penyusunan rencana pengembangan individual karyawan level *Supervisor* ke atas telah dilakukan secara online oleh masing-masing atasan langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* kompetensi dan menentukan prioritas pengembangan karyawan selama setahun ke depan. Secara keseluruhan, 95% (1.009 dari 1.062) karyawan level *Supervisor* ke atas telah ditinjau kompetensinya dan telah disusun rencana pengembangan individualnya oleh masing-masing atasan langsung.

4. **Sertifikasi Kompetensi**

Pada tahun 2014, 33 karyawan mendapat sertifikasi kompetensi nasional dari LSP-Perhapi yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Juni 2014 di Tempat Uji Kompetensi PT KPC.

Secara keseluruhan, hingga akhir 2014, 186 karyawan telah mendapatkan sertifikasi nasional di bidang Operasi Penambangan, Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Manajemen Perawatan Peralatan Tambang, Geologi/Eksplorasi, Pengolahan Hasil Tambang, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3. **Competency Review 2014 and Individual Development Plan 2015**

At the end of 2014, competence review and preparation of individual development plan for Supervisor level upward has been done online by the respective direct supervisor. Competency review program was conducted in order to identify competence gap and determine employees' development priority for the next one year. In overall, the competence of 95% (1,009 out of 1,062) of employees from the Supervisor level upwards have been reviewed and individual development plan has been drawn up by the respective direct supervisor.

4. **Competency Certification**

In 2014, 33 employees received national competency certificate from LSP-Perhapi, held on 6 to 8 June 2014 in KPC Competency Test Venue.

Overall, by the end of 2014, 186 employees have earned national certification in the field of Mining Operations, Long-Term and Short-Term Open Pit Mine-Planning, Maintenance of Mining Equipment, and Geology/Exploration, Processing of Mining Product, as well as the Occupational Health and Safety.

Tabel Karyawan - Training Hour

Table of Employee - Training Hour

	2014	2013	Kenaikan Increase
Participants	71,098	75,626	-5.99%
Hours	255,504	660,729	-61.33%

Program-program pelatihan penting pada tahun 2014 antara lain adalah:

Important training programs in 2014 include:

1. **Pelatihan Penyegaran PKU**

Selama tahun 2014 KPC bekerja sama dengan Divisi Infanteri 1 KOSTRAD telah melakukan Pelatihan Penyegaran PKU (PKU Refresher Training) sebanyak 5 angkatan dengan jumlah peserta 1.485 karyawan. Pelatihan penyegaran PKU ini diikuti tidak hanya oleh karyawan alumni PKU tetapi juga karyawan non-alumni PKU. Tujuan program ini adalah untuk mengingatkan kembali nilai-nilai pembelajaran yang diperoleh dari program PKU di Kostrad Cilodong, seperti nilai keunggulan, kepatuhan dan loyalitas kepada pimpinan, kebersamaan (semangat korsa), dan lain-lain. Pelatihan Penyegaran PKU diselenggarakan dalam 1 hari, difasilitasi oleh pelatih Kostrad dan juga oleh pelatih dan manajemen lini (HR, MOD, MSD, CPHD, MDD).

1. **PKU Refresher Training**

During 2014, KPC worked closely with the 1st Infantry Division of KOSTRAD conducted PKU Refresher Training for 5 batches with number of participants of 1,485 employees. PKU refresher training was attended by alumni and non-alumni of PKU. The purpose of this program is to recall the values of the lessons learned during PKU program in KOSTRAD Cilodong, such as the value of excellence, obedience and loyalty to the leaders, togetherness (esprit de corps), and others. PKU Refresher Training was held in one day, facilitated by trainers from KOSTRAD and also by coaches and line management (HR, MOD, MSD, CPHD, MDD).

2. **Outbound/Team Building Training**

Untuk meningkatkan kohesivitas dan semangat kerja tim, Outbound/Team Building Training dijalankan sebanyak 12 sesi dengan 341 peserta.

2. **Outbound/Team Building Training**

To improve the cohesiveness and teamwork spirit, Outbound /Team Building Training is conducted in 12 sessions with 341 participants.

3. **Pelatihan Pemeliharaan Kinerja Unggul untuk Supervisor dan Superintendent**

Untuk memperkuat dampak dari program PKU, *supervisor* dan *superintendent* lini yang telah mengikuti PKU di Cilodong juga dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan dalam mengelola SDM. Sebanyak 6 sesi pelatihan ini telah dijalankan, diikuti oleh 140 *supervisor* dan *superintendent*.

3. **Excellent Performance Maintenance Training for Supervisors and Superintendent**

To strengthen the impact of PKU program, lines supervisors and superintendents who attended PKU in Cilodong were also equipped with the knowledge and leadership skills in managing human resources. A total of 6 training sessions have been completed, attended by 140 supervisors and superintendents.

Rencana Program Pelatihan tahun 2015

1. **Pelatihan *Coaching* Kinerja dan Mentoring untuk *Supervisor*, Superintendent dan Manager**
Untuk meningkatkan keterampilan para pimpinan lini dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja karyawan, pelatihan *Coaching* Kinerja dan Mentoring akan diberikan kepada para *supervisor*, superintendent dan manager.
2. **Pelatihan Karyawan Unggul 1 (Grade B-C)**
Untuk semakin memperkuat dampak dari P2KU, para karyawan Grade B dan C akan diikuti Pelatihan Karyawan Unggul 1. Pelatihan ini berfokus pada pengembangan sikap kerja positif dan unggul, dengan mengadopsi 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif, terutama Kebiasaan 1 sampai 3: Menjadi Pribadi yang Proaktif, Mulai dengan Tujuan Akhir dan Dahulukan yang Utama. Pelatihan ini ditargetkan diselenggarakan sebanyak 20 *batch* di sepanjang tahun 2015, dengan jumlah peserta sekitar 400 karyawan Grade B dan C.
3. **Pelatihan *Supervisor* Unggul 1 (Grade D ke Atas)**
Serupa dengan Pelatihan Karyawan Unggul 1, pelatihan ini berfokus pada pengembangan sikap kerja positif dan unggul, namun dengan peserta karyawan Grade D ke atas. Sebanyak 10 *batch* direncanakan sepanjang tahun 2015, dengan total peserta sekitar 200 karyawan level *supervisor*.
4. **Pelatihan Pembekalan bagi *Supervisor* Baru**
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap karyawan dalam menjalankan tugas atau peran baru sebagai *supervisor* secara efektif.
5. **Kelas-kelas Pelatihan Internal KPC**
Kelas-kelas pelatihan internal yang terkait dengan pengembangan kompetensi-kompetensi inti dan manajerial di KPC tersedia untuk seluruh karyawan. Pelatihan difasilitasi oleh staf HR dan juga narasumber dari divisi-divisi di luar HR untuk topik-topik spesifik seperti Budgeting & Cost Control Awareness (bekerja sama dengan Departemen Business Analysis), Kontrak Jasa Pertambangan (bekerjasama dengan Divisi Legal), Internal Control (bekerja sama dengan Departemen Internal Audit), Water Management, dll.

Program Strategis tahun 2015

1. **Program Absensi *Fingerprint* :**
Program absensi *fingerprint* ini akan terintegrasi dengan sistem Alesco (Payroll), sehingga tingkat kehadiran karyawan dapat dikontrol secara sistematis, dan hal ini akan meningkatkan efektivitas jam kerja karyawan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi.

Training Plan for 2015

1. **Training on Performance Coaching and Mentoring for Supervisor, Superintendent and Manager**
To upgrade the skills of lines leader to develop competency and improve employee performance, training on Performance Coaching and Mentoring will be given to the supervisor, superintendent and manager.
2. **Training for Excellent Employee 1 (Grade B-C)**
To further strengthen the impact of P2KU, the employees of Grade B and C will be included in the Training for Excellent Employee 1. This training focuses on developing positive attitude and excellent work, by adopting the 7 Habits of Highly Effective People, especially Habit 1 to 3: Being Proactive Person, Begin With the End and First Things First. This training is targeted to be held as much as 20 batches throughout 2015, with the number of participants approximately 400 employees of Grade B and C.
3. **Training for Excellent Supervisor 1 (Grade D Upward)**
Similar to Excellent Employee Training 1, this training focuses on the development of positive and excellent attitude at work, but with participants of Grade D upwards. A total of 10 batches are planned to be conducted throughout 2015, with a total number of approximately 200 employees of supervisor level.
4. **Preparatory Training for New Supervisors**
This training aims to improve the completeness of competency required by every employee in effectively performing their task or new role as supervisor.
5. **KPC Internal Training Classes**
Internal training classes related to the development of core competency and managerial in KPC are available to all employees. The training was facilitated by HR staff and resources from divisions outside HR, regarding specific topics such as Budgeting & Cost Control Awareness (in collaboration with the Department of Business Analysis), Mining Services Contract (in collaboration with the Legal Division), Internal Control (in collaboration with Department of Internal Audit), Water Management, etc.

Strategic Program In 2015

1. **Fingerprint Attendance Program:**
This program will be integrated with Alesco system (Payroll), so that the level of attendance can be controlled systematically, and increase the effectiveness of the employees working hours, which in turn will also increase productivity.

2. **Pengenalan Terkait Dengan Pola Hidup dan Lingkungan yang Lebih Baik**
Sebagai sarana untuk mencapai kehidupan dan lingkungan yang lebih baik, sebagai salah satu cara untuk tetap dapat menjaga kesehatan dan kebugaran, agar karyawan tetap dapat produktif.
 3. **Melanjutkan Program Pemeliharaan Kinerja Unggul**
Berbagai kegiatan pemeliharaan kinerja unggul akan terus dilakukan dan dimantapkan melalui pelatihan penyegaran di site KPC untuk karyawan dan *supervisor*, pemantauan pelaksanaan ritual di lapangan, komunikasi melalui media BuletinKU, temu pelatih dan alumni, evaluasi perubahan perilaku secara berkala, serta pembentukan forum komunikasi superintendent dan manager untuk mendiskusikan implementasi pemeliharaan kinerja unggul (Komite P2KU), serta kegiatan-kegiatan lainnya.
 4. **Melanjutkan program-program retensi, antara lain:**
 - (1) Program Pascasarjana on-Site, bekerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung.
 - (2) *Dual Career Ladder System* untuk level staf.
 5. Memperkuat penanaman visi, misi serta nilai-nilai KPC melalui program "*Value in Action*"; pelatihan, media komunikasi dan sosialisasi lainnya.
 6. Melanjutkan implementasi sistem kompetensi dengan memantau rencana pengembangan karyawan secara berkala serta penyelenggaraan asesmen kompetensi.
 7. Memantau penerapan sistem manajemen kinerja *Balanced Scorecard* untuk HR, MSD dan MOD melalui kegiatan *review* dan *coaching* kinerja rutin, serta meneruskan pengembangan sistem manajemen kinerja untuk *supervisor* ke bawah di semua divisi.
 8. Terus memonitor praktik remunerasi di perusahaan lain sekelas KPC untuk memastikan paket remunerasi yang ada masih kompetitif.
2. **Introduction of Better Lifestyle and Environment**
As a means to achieve better life and environment, and to maintain health and fitness, so that employees remain productive.
 3. **Continuing Excellent Performance Maintenance Program**
Various activities to maintain excellent performance will be continued and be strengthened through refresher training at KPC site for employees and supervisor, monitoring the rituals implementation on site, communication through BulletinKu, coaches and alumni gathering, evaluation of behavior change on periodical basis, and establish communication forum for superintendent and manager to discuss the implementation of excellent performance maintenance program (P2KU Committee), as well as other activities.
 4. **Continuing retention programs, among others:**
 - (1) On-Site Post Graduate Program, in collaboration with the School of Business and Management of ITB.
 - (2) Dual Career Ladder System for the staff level.
 5. Strengthen the internalization of KPC vision, mission and values through "Value in Action" program, training, communications media, and other means of socialization.
 6. Continue the implementation of competency system, by monitoring employee development plan on a regular basis, as well as the implementation of competency assessment.
 7. Monitor the implementation of the Balanced Scorecard performance management system for HR, MSD and MOD through regular performance reviews and coaching, as well as the continuing development of performance management system for supervisors downwards in all divisions.
 8. Continue to monitor the remuneration practices in other companies of the same class with KPC, to ensure that existing remuneration package is competitive.

C. PENGELOLAAN SDM ARUTMIN

Rekrutmen

Sesuai strategi perencanaan SDM pada tahun 2014, Arutmin tidak melakukan penambahan karyawan khususnya pada posisi-posisi baru. Perseroan hanya melakukan proses rekrutmen untuk mengganti beberapa posisi yang ditinggalkan pemangku jabatan sebelumnya, baik karena mengundurkan diri atau karena pensiun. Proses rekrutmen tersebut hanya dilakukan jika posisi tersebut benar-benar dibutuhkan.

Tahun 2014, Arutmin masih melakukan strategi rekrutmen langsung menuju ke target yang dituju dengan bekerja sama dengan *career development center* dari beberapa kampus besar seperti: ITB, UI, UGM, UPN, UniBraw, UNLAM dan strategi referal dari karyawan yang ada.

C. MANAGEMENT HR AT ARUTMIN

Recruitment

Corresponding with its human resource development strategy in 2014, Arutmin did not increase its employees, particularly for new positions. The Company only recruit to staffed the vacant position left by the previous office holders, either because of resignation or retirement. The recruitment process is only performed whenever the position is deemed necessary.

In 2014, Arutmin still recruiting directly to the intended target, in collaboration with the career development center of several major campus such as: ITB, UI, UGM, UPN, UB, UNLAM, and referrals by existing employees.

Dengan kebutuhan akan posisi Non-staf yang cukup tinggi, Arutmin juga bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan dan kampus lokal, seperti SMKN 5 BJM, SMK YPT, SMK 2 Desember Pelaihari, Poltek Banjarmasin, ATPN Banjarbaru, Poltek Tanah Laut, dan Poltek Kotabaru.

Selain itu, Arutmin memberikan informasi lowongan kerja di situs jaringan profesional LinkedIn dan web Perusahaan.

Perusahaan memberikan kesempatan untuk semua pihak yang memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk melamar pada posisi yang dibuka tanpa melihat faktor Agama, Jenis Kelamin dan yang lainnya. Pelamar yang memenuhi standard kompetensi dan sesuai dengan yang disyaratkan berhak untuk mengikuti proses seleksi sebagai karyawan PT Arutmin Indonesia.

With such a high demand for non-staff positions, Arutmin also cooperate with vocational schools and local campus, such as SMK 5 BJM, SMK YPT, SMK 2 Desember Pelaihari, Polytechnic Banjarmasin, ATPN Banjarbaru, Polytechnic Tanah Laut, and the Polytechnic Kotabaru.

In addition, Arutmin also provides information about job vacancies on the professional networking site of LinkedIn and the Company's web.

The company provides opportunity for all who have the requisite competencies to apply for the open positions, regardless of religion, gender and others. Applicants who meet the standard of competence and other requirements are entitled to participate in the selection process as employees of PT Arutmin Indonesia.

Penambahan Manpower di AI hingga Desember 2014

	2014	2013	Diff.
Nasional / National	517	648	-131
Ekspatriat / Expatriate	2	5	-3

Additional Manpower at AI up to December 2014

Penambahan Manpower di Kontraktor AI hingga Desember 2014

	2014	2013	Diff.
Nasional / National	5,306	8,480	-3,174
Ekspatriat / Expatriate	3	12	-9

Additional Manpower at AI up to December 2014

Remunerasi

Tahun 2014, HR telah berhasil mengimplementasikan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk keikutsertaan Perusahaan dalam Program BPJS Kesehatan ditandai dengan telah dimilikinya Virtual ID Perusahaan dan telah terdaftarnya karyawan dalam program BPJS Kesehatan.

Remuneration

In 2014, HR has implemented the provision from National Social Security Law, by including the Company into BPJS Health Program, marked by obtaining Virtual ID and enrolment of employees at BPJS Health program.

	2014	2013	Kenaikan Increase
USD	19,724,771.00	19,821,189.66	-0.5%

Program Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung program perusahaan dalam mengontrol biaya, pengembangan yang dilakukan menitikberatkan pada *low-cost high-impact* program. Banyak posisi *engineer* dan managerial yang dirotasi untuk pengembangan (*rotation for development*), pelaksana tugas (*acting assignment*) khususnya dari operasi tambang yang beraktifitas rendah ke operasi tambang yang beraktifitas tinggi. Selain itu banyak dilakukan *Job Enrichment* untuk posisi yang ditinggalkan dengan mengoptimalkan personel yang ada.

Beberapa pelatihan utama yang telah dilakukan selama tahun 2014 dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif perusahaan dalam penghematan biaya. Diantaranya seperti Pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai perundangan yang berlaku dan juga pelatihan yang dilaksanakan secara internal.

Competency Development Program

To support the Company in controlling costs, the competency development program is focused on low-cost high-impact programs. Many engineers and managerial positions are rotated for development, acting assignment, especially from low activity mining operations to high activity one. In addition, Job Enrichment is applied for many vacant position by optimizing existing personnel.

Some of the key training program carried out in 2014 were aimed to support the Company's initiatives in cost savings. Among others is the mandatory training required by the government in accordance with prevailing rules, as well as internal training.

Selama 2015 kita akan melanjutkan strategi yang telah dilakukan selama 2014, khususnya untuk Pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai perundangan yang berlaku dan juga pelatihan yang dilaksanakan secara internal.

In 2015, we will continue the same strategy carried out in 2014, particularly for mandatory training required by the government in accordance with prevailing rules, as well as internal training.

Tabel Karyawan

Table Training Hour

	2014	2013	Kenaikan Increase
Participants	321	632	-49.21 %
Hours	4,949	14,799	-66.56%

Program Strategis tahun 2015

Selama tahun 2015, SDM akan terus mendukung program perusahaan dalam mengontrol biaya, khususnya fokus dalam Program Efisiensi. Program efisiensi yang dilakukan meliputi seluruh aspek fungsi SDM mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta strategi remunerasi yang kompetitif namun ramah biaya di masa turunnya harga batu bara dunia.

Salah satu agenda penting yang akan dilaksanakan pada 2015 adalah menyukseskan negosiasi dengan Serikat Pekerja untuk Perjanjian Kerja Bersama periode 2015 - 2017.

AI juga berencana untuk menghubungkan penilaian performance kerja karyawan (PMS) kepada pencapaian target produksi tahun 2015

Strategic Program In 2015

In 2015, HR will continue to support the Company's initiative in controlling costs, particularly by focusing on efficiency program. The efficiency programs cover all aspects of HR function from recruitment, training and development, as well as competitive remuneration strategy yet "cost friendly" given the low coal prices .

One of the important agenda to be implemented in 2015 is to enter into negotiation with the Union over the Collective Labour Agreement for the period of 2015-2017.

AI also plans to link employee performance appraisal (PMS) with the achievement of production targets in 2015

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY

Menjaga kualitas operasional TI dengan anggaran yang ketat membutuhkan kreativitas tinggi dalam memilih tindakan yang tepat dan mempertimbangkan alternatif solusi.

Maintaining operational IT services under a very tight budget requires creativity in selecting appropriate actions and considering alternative solutions.

TEKNOLOGI INFORMASI

Menjaga kualitas operasional TI dengan anggaran yang ketat membutuhkan kreativitas tinggi dalam memilih tindakan yang tepat dan mempertimbangkan alternatif solusi.

Kegiatan operasional Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2014 pada dasarnya tidak berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan adanya pengetatan anggaran, tentunya ada banyak hal yang harus dilakukan dengan cara berbeda. Memilih proyek mana yang akan dilanjutkan kini harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati, dalam hal biaya dan manfaat. Efisiensi menjadi kata kunci dalam setiap tindakan yang diambil oleh Divisi Teknologi Informasi. Terlepas dari tantangan berat pada tahun 2014, banyak kegiatan penting yang dilakukan Divisi Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan operasional Perusahaan.

KEGIATAN OPERASIONAL

Sebagian besar proyek yang dikerjakan Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2014 adalah melanjutkan proyek yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Termasuk di antaranya sistem absensi *finger print*, penyediaan jaringan telekomunikasi, dan pemasangan menara telekomunikasi.

KPC telah menyelesaikan instalasi perangkat *finger print* di beberapa lokasi utama untuk mendukung pelaksanaan sistem absensi yang terintegrasi. Sekitar seratus perangkat *finger print* telah dipasang di kantor KPC di Sangatta dan Bengalon.

INFORMATION TECHNOLOGY

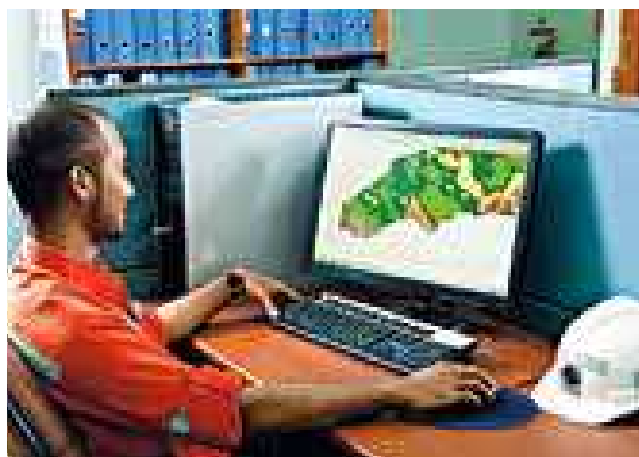
Maintaining operational IT services under a very tight budget requires creativity in selecting appropriate actions and considering alternative solutions.

The operational activities of the Information Technology Division in 2014 were similar to the previous years. However, tight budget conditions in 2014 made them very different. The way a project was selected to proceed was subject to very careful consideration of the cost and benefits. Efficiency became common a word in all actions. Regardless of the tough year, many important activities were carried out to meet the operational needs of the Company.

OPERATIONAL ACTIVITIES

Most Information Technology projects in 2014 were continuing the projects initiated in the previous year. The projects included *finger print* attendance systems, provision of telecommunication network, and installation of telecommunication towers.

KPC completed the installation of *finger print* devices in major locations in order to support the implementation of integrated attendance systems. Nearly one hundred *finger print* devices were installed at KPC offices in Sangatta and Bengalon mining areas.



Perubahan lokasi tambang membutuhkan pemasangan menara telekomunikasi untuk meningkatkan *coverage* komunikasi radio untuk kegiatan penambangan di site KPC Sangatta. Radio Repeater di site KPC Bintang dan menara telekomunikasi di KPC Pit J telah dipasang pada bulan Januari 2014, untuk meningkatkan *coverage* radio dan pengiriman sinyal di South Pinang. Menara telekomunikasi di situs KPC Far-Utara telah diinstal ulang pada bulan Juli 2014, sedangkan menara di KPC Inul East selesai dipasang pada bulan September 2014. Sementara itu, *redundant network ring* telah dipasang pada bulan Desember 2014. Upaya ini adalah untuk memastikan ketersediaan dan kehandalan jaringan komunikasi di seluruh wilayah pertambangan KPC.

Beberapa proyek telah diselesaikan di area pertambangan Arutmin di Kalimantan Selatan. Peningkatan *bandwidth* dari 1 hingga 2 Mbps di Kintap selesai dikerjakan pada bulan April 2014. Pada bulan yang sama, penyediaan jaringan *back-up* nirkabel untuk PLC juga selesai dilaksanakan.

Beberapa aplikasi yang dikembangkan untuk Teknologi Informasi user di Arutmin, seperti *Cargo System* selesai dilaksanakan pada bulan Januari 2014, *Travel Request System* selesai pada bulan Agustus 2014, dan sistem untuk perekrutan dan psikotes selesai pada Agustus 2014.

Dalam rangka memenuhi sistem hak cipta Microsoft, perjanjian lisensi dengan Microsoft Indonesia melalui *reseller* telah dilaksanakan bulan Februari 2014. Kontrak layanan lain, baik untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak telah diperbaharui pada tahun 2014.

The change of mining areas required telecommunication towers to improve the coverage of radio communications for mining activities at KPC Sangata site. The radio repeater at KPC Bintang site was installed in January 2014, and telecommunication tower at KPC Pit J was also completely installed in January 2014 to improve the radio and dispatch system coverage at South Pinang. A telecommunication tower at KPC Far-North site was re-installed in July 2014, whereas the tower at KPC Inul East was installed completely in September 2014. A redundant network ring was completely installed in December 2014. This effort was to ensure to the availability and reliability communication network across the KPC mining area.

At Arutmin a few projects were completed. The upgrading of communication link bandwidth from 1 to 2 Mbps for Kintap office was completed in April 2014. In the same month the provision of back-up wireless network for PLC was also completed.

Some applications were developed for Arutmin users, such as Cargo system completed in January 2014, Travel Request system completed in August 2014, and Recruitment and Psychological Test system also completed in August 2014.

In order to comply with the Microsoft copyright systems, the licensing agreement with Microsoft Indonesia through its large account reseller was made in February 2014. Other service contracts both for hardware maintenance support and software support were renewed in 2014.

STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai fungsi yang tersentralisasi, Divisi Teknologi Informasi menyediakan layanan Teknologi Informasi untuk Bumi Resources dan anak-anak perusahaannya.

Per 31 Desember 2014, struktur Divisi Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Divisi Teknologi Informasi terdiri dari (3) departemen, yakni:

- *IT Infrastructure Support*,
- *Application Support*, dan
- *System Compliance*

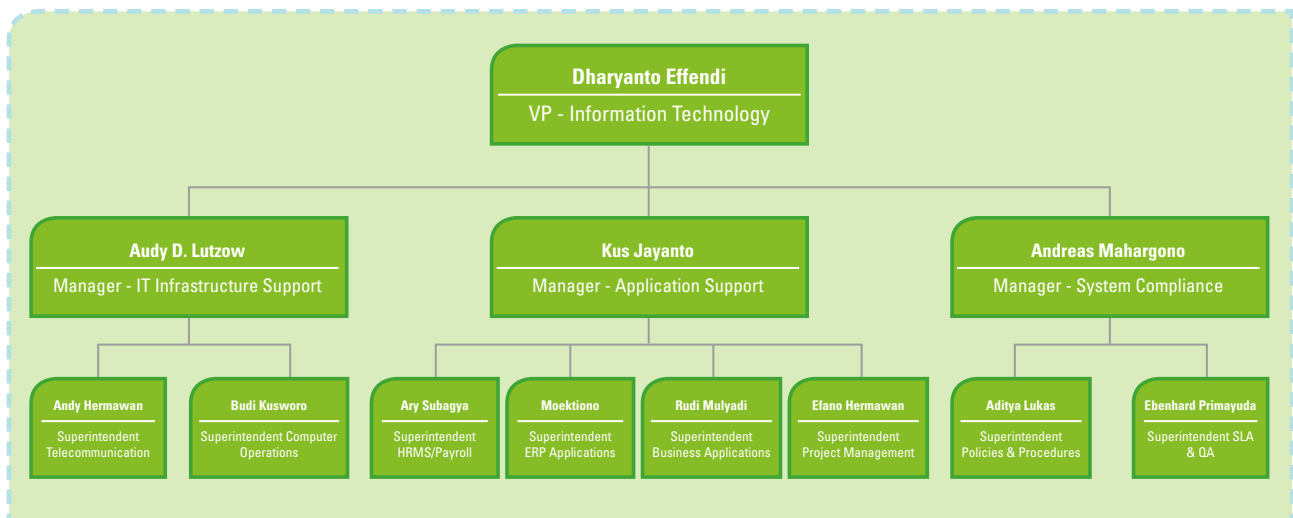
ORGANIZATION STRUCTURE

As a centralized function, the Information Technology Division provides related information and technology services to Bumi Resources and its subsidiaries.

As per 31 December 2014, the Information Technology Division organization structure is set out below:

The Information Technology Division consists of three (3) departments:

- *IT Infrastructure Support*,
- *Application Support*, and
- *System Compliance*



Departemen *Infrastructure Support* bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan keandalan semua perangkat komunikasi dan komputasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Lingkup kerja Departemen ini meliputi area *network*, baik yang meluas maupun lokal, sistem komunikasi radio, sistem telepon, *data center*, komputer pribadi dan perangkat pendukungnya, dan lingkungan operasi standar. *IT Infrastructure Support* menyediakan layanan pemeliharaan rutin untuk semua perangkat, dan memastikan adanya rencana kontinjensi untuk meminimalkan gangguan.

The IT Infrastructure Support Department is responsible for ensuring the availability and reliability of all communication and computing systems, both hardware and software. The scope of work includes wide and local area networks, radio communication systems, telephone systems, data center, personal computers and their peripherals, and standard operating environment. IT Infrastructure Support provides regular preventive maintenance of all devices, and ensures that contingency plans are in place to minimize disruptions.

Departemen *Application Support* mengelola semua sistem informasi yang digunakan oleh Perseroan, termasuk Enterprise Resource Planning (“ERP”), Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (“HRMS”), Sistem Pasokan batu bara, Sistem Manajemen Keuangan, Manajemen Proyek, dan aplikasi berbasis web. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk menanggapi kebutuhan sistem informasi dan memastikan ketersediaannya sesuai kebutuhan.

Departemen *Systems Compliance* memastikan bahwa infrastruktur TI dan sistem informasi BUMI telah diimplementasikan dan dikelola sesuai dengan arsitektur yang telah disepakati, dan bahwa layanan TI yang diberikan sesuai dengan *service level agreement*. Departemen ini juga mengeluarkan dan mengelola Prosedur dan Kebijakan TI, mengelola kontrak layanan TI, mengelola risiko TI, dan menyelenggarakan audit TI secara rutin.

The Application Support Department manages all information systems used by the Company, including Enterprise Resource Planning (“ERP”) applications, Human Resource Management Systems (“HRMS”), Coal Supply Chain Systems, Financial Management Systems, Project Management, and web-based applications. Application Support is also responsible to respond to the business requirements for information systems and ensure that they are available as required.

The Systems Compliance Department ensures that IT infrastructure and information systems are implemented and managed according to the agreed architecture, and that IT services are delivered in accordance with service level agreements. System Compliance also issues and manages the implementation of IT Policies and Procedures, administers IT service contracts, manages IT risks, and organizes regular IT audits.

ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS

Komposisi negara tujuan ekspor di tahun 2014 secara umum tidak mengalami perubahan, dengan India tetap menjadi tujuan ekspor terbesar diikuti Tiongkok dan Jepang. Walaupun terjadi penurunan secara signifikan pada total volume penjualan ke India, Tiongkok dan Jepang namun penjualan ke tiga negara tersebut masih merupakan bagian mayoritas, yakni 77,71%.

The composition of export destination countries in 2014 was remained unchanged, with India remained the largest export destination followed by China and Japan. Despite a significant decrease in the total volume of sales to India, China and Japan, the three countries were still hold the majority, ie 77.71%.

Distribusi Penjualan

Volume penjualan total BUMI pada tahun 2014 tercatat sebesar 84,73 juta ton, meningkat 3,34% bila dibandingkan volume penjualan tahun 2013, yang tercatat sebesar 81,99 juta ton. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penjualan dalam negeri yang meningkat dari 21,90 juta ton tahun 2013 menjadi 38,24 juta ton di tahun 2014. Sementara itu kontribusi penjualan di pasar dalam negeri terhadap total penjualan Perseroan pada tahun 2014 tercatat sebesar 45,13%, setelah sebelumnya kontribusi penjualan di pasar luar negeri juga menurun dari 73,29% di tahun 2013 menjadi 54,87% di tahun 2014.

Pada tahun 2014, pasar ekspor turun signifikan sebesar 22,64% dari 60,10 juta ton menjadi 46,49 juta ton, terutama karena masih rendahnya permintaan pasar global sebagai imbas masih lemahnya kondisi perekonomian global.

Komposisi negara tujuan ekspor di tahun 2014 secara umum tidak mengalami perubahan, dengan India tetap menjadi tujuan ekspor terbesar (43,91%) diikuti Tiongkok (20,60%) dan Jepang (13,19%). Jumlah penjualan ke Tiongkok menurun drastis sebesar 48,03%. Jumlah penjualan ke India dan Jepang dan juga menurun, masing-masing sebesar 12,55% dan 16,18%. Walaupun menurun secara signifikan, namun ekspor ke tiga negara tersebut masih merupakan mayoritas, yakni 77,71%.

Sales Distribution

BUMI's total sales volume in 2014 stood at 84.73 million tonnes, representing an increase of 3.34% from 81.99 million tonnes in 2013. The growth of sales volume was mainly derived from the increase in domestic sales volume, from 21.90 million tonnes in 2013 to 38.24 million tonnes in 2014. The contribution of domestic sales in 2014 was recorded at 45.13%, while in the previous year was 26.71%. Hence, export market dropped from 73.29% in 2013 to 54.87% in 2014.

In 2014, our exports dropped significantly by 22.64% from 60.10 million tons to 46.49 million tons, mainly due to the low demand of global markets impacted by the weak global economic conditions.

The composition of export destination countries in 2014 was remained unchanged, with India remaining the largest export destination (43.91%) followed by China (20.60%) and Japan (13.19%). Total sales to China plummeted by 48.03%. Total sales to India and Japan, and also decreased, respectively by 12.55% and 16.18%. Although decreased significantly, but exports to the three countries were still the majority, ie 77.71%.



Rincian perkembangan pasar batu bara Perseroan menurut tujuan adalah sebagai berikut:

Details of the Company's coal market development by destination are as follows:

Tujuan Destinasion	Penjualan Sales (ton) 2014	Penjualan Sales (ton) 2013	Perubahan Change %
India	20,417,502	23,348,163	-12.55
Japan	9,576,613	11,425,964	-16.18
China	6,135,167	11,805,042	-48.03
Philippines	3,943,209	3,385,335	16.48
Hongkong	2,274,020	1,887,661	20.47
Thailand	1,927,178	1,820,723	5.85
Europe	916,620	776,995	17.97
Taiwan	757,901	1,826,930	-58.51
Malaysia	216,213	2,892,586	-92.52
Korea	179,334	877,120	-79.55
Others	150,010	53,479	180.50
Grand Total	46,493,763	60,099,998	-22.64

Berdasarkan pola penjualannya, batu bara Perseroan dipasarkan dilakukan melalui kontrak-kontrak jangka panjang dengan para mitra bisnis utama, sisanya melalui pasar spot. Mayoritas penjualan batu bara Perseroan di tahun 2014 diperuntukkan sebagai bahan bakar PLTU.

Strategi Pemasaran

Untuk menjamin berlangsungnya peningkatan penjualan di masa-masa mendatang di tengah persaingan, potensi peningkatan permintaan di pasar ekspor maupun di dalam negeri dan perubahan tujuan ekspor sesuai kondisi ekonomi masing-masing negara, Perseroan menyusun strategi pemasaran, meliputi:

By its sales pattern, the Company's coal sales were done through long-term contracts with primary business partners, and the remaining were sold through spot market. Nearly all of the Company's coal sales in 2014 were utilized for the needs of coal power plants.

Marketing Strategy

To ensure the continuity of sales growth in the future amid the rigorous competition, potential for demand increase in global and domestic markets, and changes of export destinations following the economic developments of each country, the Company has formulated the following marketing strategy:

1. Pembukaan Pasar Baru

Perseroan berupaya membuka pasar-pasar potensial baru, selain tetap memperhatikan pasar yang sudah ada. Pasar potensial tersebut diidentifikasi melalui riset pasar, difokuskan pada negara-negara kawasan Asia yang memiliki pertumbuhan perekonomian cukup tinggi, tapi dikenal tidak memiliki cadangan sumber daya batu bara yang berlimpah. Jepang, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Filipina merupakan contoh-contoh negara-negara kawasan Asia dengan pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Malaysia, Filipina, dan Vietnam merupakan contoh negara-negara dengan potensi pasar yang menjanjikan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi cadangan batu baranya. Sementara Tiongkok, India, dan Jepang, merupakan negara-negara maju di kawasan Asia yang akan tetap mendominasi permintaan batu bara di masa mendatang.

2. Komitmen Jaminan Kualitas Produk

BUMI berkomitmen untuk selalu memberikan jaminan kesesuaian kualitas batu bara yang diterima konsumen dengan kontrak yang disepakati. Jaminan kualitas dikontrol melalui penerapan manajemen mutu yang melibatkan pelaksanaan proses analisis sesuai system terakreditasi. BUMI berupaya menjaga kualitas produk untuk menjaga tingkat kepercayaan konsumen dan menjamin kerja sama bisnis bersifat saling menguntungkan dalam jangka panjang.

3. Pelayanan Pelanggan

BUMI senantiasa mengutamakan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen demi memenuhi komitmen layanan terbaik kepada para pelanggan. Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen melalui komunikasi yang terus menerus sebagai bagian dari komitmen pelayanan Perseroan.

4. Membangun Pengertian Bersama untuk Menjalin Hubungan Bisnis Jangka Panjang

BUMI mengedepankan saling pengertian dan menjaga komitmen hubungan bisnis berdasarkan prinsip saling menguntungkan dalam jangka panjang. Prinsip saling mengerti dimaksud adalah kesamaan pandangan pada hubungan bisnis jangka panjang dengan memperhitungkan keberlanjutan usaha pelanggan, kelancaran pembayaran yang memungkinkan masing-masing pihak mampu beroperasi dengan baik, keberlanjutan rantai pasokan maupun kelancaran operasional di tambang yang telah dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Perseroan.

Di lain pihak, Perseroan juga mempertimbangkan kelancaran implementasi kontrak-kontrak jangka panjang yang mengikat kedua belah pihak, termasuk ketetapan harga yang ditinjau secara periodik sesuai dengan perkembangan pasar.

Untuk menjamin keberlangsungan kerja sama bisnis dalam jangka panjang, BUMI menjalin kerjasama dengan mitra-mitra utama bereputasi internasional, baik yang bergerak dalam bidang usaha pembangkitan listrik sebagai pengguna langsung maupun kelompok-kelompok usaha multinasional yang memiliki unit pembangkit sekaligus bergerak di bidang perdagangan (*trading*).

1. Opening New Markets

The Company put efforts to open new potential markets, in addition to maintaining the existing markets. Potential markets were identified through market research focused on Asian countries with robust economic growth, yet are not equipped with sufficient coal resources. Japan, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, and the Philippines are some of the Asian countries with significant economic growth. Malaysia, the Philippines, and Vietnam are promising markets considering their economic potential and coal reserves. Meanwhile, China, India, and Japan are Asia's developed countries that would continue to contribute significantly to coal demands in the future.

2. Commitment to Product Quality Assurance

BUMI is dedicated to assure the quality of coal received by the customers with agreed contracts. Quality Assurance is controlled through quality management that establishes analysis process according to accredited system. BUMI maintains its product quality to nurture the trust of the customers and to foster mutually benefiting long-term business relationships.

3. Customer Service

BUMI upholds transparency and responsibility principles in its services to the customers to realize service excellence commitment. The Company's fast response to the various inquiries and complaints from customers through on-going communications is part of its service commitment.

4. Building Mutual Understanding Towards Long- Standing Business Relationship

BUMI promotes mutual understanding and safeguards its business commitment and is founded on the principle of long-term mutual benefits. Understanding refers to aligned views on long-standing business relationships by taking into consideration customers' business continuity, timely payments that would enable both parties to operate seamlessly, continuity of supply chain, and reliability of mining operations that are under the best care of the Company.

On the other hand, the Company also considers the smooth implementation of long-term agreements that bind both parties, including price that is periodically reviewed in accordance with market conditions.

To ensure the continuance of business engagements in the long term, BUMI enters into agreements with internationally reputable key partners that operate in electricity generation business as end consumer as well as multinational business groups that manage power plants and operate in trading business.

Strategi Penjualan

BUMI berupaya menjual batu bara ke pasar domestik maupun ekspor dengan harga yang memberikan tingkat pengembalian terbaik. BUMI merealisasikan penjualan batu bara terutama dalam bentuk kontrak-kontrak pasokan ke pembeli langsung dengan pendekatan *B to B* dalam jangka panjang, sekalipun tidak meninggalkan pasar spot. Harga penjualan selalu mengacu pada harga pasar batu bara *thermal* internasional maupun standar harga yang disepakati bersama.

Pangsa Pasar

BUMI saat ini merupakan salah satu perusahaan tambang dengan pangsa pasar global yang substansial dan merupakan pemasok utama di pasar domestik. Jumlah pasokan untuk pasar domestik dengan di tahun 2014 tercatat mencapai 32,2 juta ton, dengan demikian BUMI merupakan pemasok terbesar di Indonesia. Bila melihat kebutuhan batu bara Indonesia pada tahun 2014 yang berkisar 100 juta ton, maka BUMI menguasai lebih dari 30% pangsa pasar batu bara dalam negeri.

Saat ini Pemerintah masih terus mematangkan rencana pendirian PLTU mulut tambang untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebesar 35.000 megawatt (MW) pada 2019. Bila rencana ini terealisasi maka BUMI memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasar domestik secara substansial.

Sales Method

BUMI distributes its coal products to domestic and foreign markets at prices that would provide competitive return. BUMI's coal sales are mainly executed under supply contracts to end-consumers with long-term B-to-B approach, whilst maintaining its presence in the spot market. Sales price refers to international coal thermal market as well as agreed price base.

Market Share

Today, BUMI is one of the mining companies with a substantial global market share and is the major supplier for domestic market. Total supply for domestic market in 2014 reached 32.2 million tons, thus the BUMI is one of the largest suppliers in Indonesia. Given that domestic needs of coal in 2014 were around 100 million tonnes, then BUMI's market share was more than 30%.

Currently, the Government continues to finalize the plan for the establishment of mine mouth power plant to meet the electricity needs of 35,000 megawatts (MW) by 2019. If this plan is realized then BUMI has a chance to increase its domestic market share substantially.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Tujuan utama dari pendekatan manajemen risiko di BUMI adalah untuk memastikan bahwa Perseroan melakukan kajian risiko secara menyeluruh atas setiap kegiatan Perseroan sesuai dengan delegasi dan tanggung jawab wewenang yang telah ditetapkan guna tercapainya kepentingan Perseroan secara keseluruhan.

The main objectives of BUMI's risk management approach is to make sure that the Company assesses risk in a cohesive way along clearly established lines of authority and accountability, with each Company's activity pursuing the interest of the enterprises as a whole.

PENGUNGKAPAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, kemajuan teknologi, arus globalisasi, kecepatan siklus produk, dan berbagai perubahan lainnya telah meningkatkan risiko yang dihadapi Perseroan selama dekade terakhir. Seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi Perseroan dan adanya ekspektasi yang tinggi atas keterlibatan Direksi setiap saat dalam pengelolaan perusahaan, Direksi BUMI dituntut untuk terus meningkatkan perannya dalam pengawasan manajemen risiko yang menyeluruh.

Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bisnis dan strategi organisasi setiap harinya dan BUMI percaya bahwa identifikasi dan manajemen risiko adalah hal penting untuk mencapai tujuan dalam menciptakan nilai jangka panjang pemegang saham.

Tujuan utama dari pendekatan manajemen risiko di BUMI adalah untuk memastikan bahwa Perseroan melakukan kajian risiko secara menyeluruh atas setiap kegiatan Perseroan sesuai dengan delegasi dan tanggung jawab wewenang yang telah ditetapkan guna tercapainya kepentingan Perseroan secara keseluruhan.

Tahun ini, tantangan ekonomi dan penurunan pasar batu bara belum juga membaik dan masih tetap menjadi risiko utama bisnis BUMI. Penurunan harga batu bara berdampak pada operasional BUMI dan laporan keuangan secara langsung dan tidak langsung. Selain itu, Perseroan memiliki tingkat utang yang tinggi yang mana sebagian dari utang tersebut jatuh tempo pada 2014. Rasio utang yang tinggi dalam pembukuan BUMI dapat membuat usaha pembiayaan kembali untuk menutupi pokok dan bunga pinjaman menjadi lebih sulit. Pendapatan yang rendah yang disebabkan karena penurunan harga batu bara telah mengakibatkan menurunnya kemampuan membayar utang.

THE DISCLOSURE OF RISK MANAGEMENT PRACTICES

The complexity of business transactions, advances in technology, globalization, the speed of the product cycle, and overall the pace of change has increased the number and complexity of the risks faced by the organization over the past decade. In line with the increasing challenges and high expectations on the involvement of the Board of Directors at any time in the management of the company, BUMI's BOD is required to continuously improve its role in the overall risk management oversight.

Risk is a part that is stand in the business and strategy of the organization every day. And BUMI believes that the identification and management of risk is central to achieving the corporate purpose of creating long-term shareholder value.

The main objectives of BUMI's risk management approach is to make sure that the Company assesses risk in a cohesive way along clearly established lines of authority and accountability, with each Company's activity pursuing the interest of the enterprises as a whole.

This year, the challenges of economic and coal market downturns have not yet receded and still pose as a major risk for BUMI's business. Drop in coal price has impacted BUMI's operations and financial statements directly and indirectly. In addition, the Company has high debt level which some portion of debts are due to pay in 2014. High total debt in BUMI's book may make refinancing effort to cover principles and interests are more difficult. Lower revenue stream due to decrease in coal prices effects debt servicing capabilities.



Jatuhnya harga batu bara telah mengakibatkan penurunan yang signifikan pada pendapatan Perseroan, tingginya rasio utang terhadap modal dan kas yang lemah rendahnya cadangan kas yang tersedia. Ketidakmampuan untuk membayar tagihan yang jatuh tempo dan kewajiban lainnya dapat dikenakan denda atau bahkan gugatan hukum atau gangguan pada operasi Perseroan.

Untuk memitigasi risiko yang terjadi karena kondisi diatas, kami telah mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebagaimana beberapa contoh yang dijabarkan dalam paragraf-paragraf berikut.

BUMI secara ketat memonitor perkiraan harga batu bara guna melakukan evaluasi *pit* atas perkiraan nilai ekonomi, anggaran maupun arus kas. Perusahaan memproduksi berbagai jenis batu bara. Berbagai kualitas batu bara dicampur dari berbagai pit guna menghasilkan jenis batu bara yang paling maksimal keuntungannya tergantung pada kondisi dan perkembangan pasar. Kami menargetkan pembeli dan tujuan penjualan yang berkualitas/utama guna menghasilkan keuntungan terbaik. Kami mengembangkan hubungan jangka panjang dan melakukan kontrak jangka panjang dengan pengguna akhir agar menghasilkan harga yang stabil. Kami memonitor pasar batu bara secara ketat, posisi penjualan dan risiko harga dan bila memungkinkan menetapkan harga optimum.

Untuk mengurangi jumlah beban bunga, kami juga akan mengurangi jumlah utang dengan divestasi aset batu bara kami. Kami menerapkan inisiatif efisiensi operasional dengan menugaskan konsultan untuk meninjau dan memberikan saran untuk perbaikan proses produksi batu bara.

Berkenaan dengan tingginya tingkat utang dan risiko kurangnya likuiditas, pada 25 November 2014, BUMI menegaskan bahwa anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Singapura yaitu Bumi Capital Pte. Ltd (penerbit USD 300 juta 12% Guaranteed Senior Secured Notes), Bumi Investment Pte. Ltd (penerbit USD 700 juta 10,75% Guaranteed Senior Secured Notes), dan Enercoal Resources Pte. Ltd (penerbit USD 375 juta 9,25% Obligasi Konversi Dijamin), telah mengajukan permohonan pada 24 November 2014 di Singapura untuk memulai proses peradilan formal berdasarkan Pasal 210 dari Singapore Companies Act sebagai bagian dari upaya yang terus menerus untuk merestrukturisasi kewajiban utang Perseroan.

Drop in coal prices have made significant decrease in Company's income, high leverage of the capital structure, and tight cash flow and a low cash reserve available for spending. In ability to pay due invoices and other obligations may incur penalty or even lawsuit or disruption of the operations.

To mitigate the risks arising because of the above condition, we have taken necessary steps for examples as described in the following paragraphs.

BUMI closely monitors the price forecasts for evaluation of pit economics, budgeting and cash flow forecasts. We produce a wide range of brands of coals. Coal qualities are actively blended from the different pits to produce brands that maximise returns depending on market conditions and developments. We target blue chip buyers and destinations that provide the best returns. We develop long term relationships and enter into long term contracts with end users to provide stable coal pricing. We closely monitor the coal market, unsold position and coal price risk exposure and where possible lock in optimum pricing.

To reduce the amount of interest expenses, we will also decreasing the amount of debt by divestment of our coal assets. We implemented operational efficiency initiatives i.e. assigned a consultant to review and provide suggestions for improvements in the coal production processes.

In regards to the high level debts and illiquidity risks, in 25 November 2014, BUMI confirmed that its wholly owned subsidiaries in Singapore that are Bumi Capital Pte. Ltd. (issuer of USD 300 million 12% Guaranteed Senior Secured Notes), Bumi Investment Pte. Ltd. (issuer of USD 700 million 10.75% Guaranteed Senior Secured Notes), and Enercoal Resources Pte. Ltd. (issuer of USD 375 million 9.25% Guaranteed Convertible Bond), have filed an application on 24 November 2014 in Singapore to initiate a formal court process under Section 210 of the Singapore Companies Act as part of on-going effort to restructure the Company's debt obligations.

Sebagai langkah awal dalam Proses Pengadilan Bagian 210, anak perusahaan Singapura telah berusaha dan memperoleh moratorium enam bulan terhadap tindakan hukum dan penegakan hukum, untuk memfasilitasi diskusi dengan para pemegang surat berharga dan pemegang obligasi dan melanjutkan upaya restrukturisasi.

Selain itu, Perseroan juga menginformasikan bahwa anak perusahaan telah mengajukan permohonan pengakuan dari proses pengadilan Singapura di Amerika Serikat di bawah Bab 15 yaitu Kode Kepailitan A.S. Pengajuan ini oleh Perusahaan dan anak perusahaan nya diharapkan untuk memastikan bahwa proses pengadilan Singapura dapat terus berjalan tanpa risiko litigasi di Amerika Serikat, dan tidak diantisipasi untuk berdampak pada bisnis Perusahaan atau operasi.

Untuk memitigasi risiko terhadap menurunnya reputasi Perusahaan yang disebabkan oleh berbagai berita spekulatif di media, kami membina hubungan yang baik dengan pers dan media guna membangun respon yang cepat tanggap bila timbul berita spekulatif.

FILOSOFI RISIKO

Filosofi risiko merupakan falsafah dasar Perseroan dalam hal manajemen risiko yang didasari oleh visi dan misi Perseroan, rencana strategis, tujuan, dan akan mengarahkan semua kegiatan yang berhubungan dengan proses manajemen risiko Perseroan.

Berikut adalah filosofi risiko BUMI: "PT Bumi Resources Tbk.– adalah operator kelas dunia yang potensial dan bergerak di sektor pertambangan dan energi dan beroperasi secara global – mengakui dibutuhkannya suatu komitmen untuk melindungi bisnis tersebut, termasuk sumber daya manusia, sumber daya fisik dan finansial dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja Manajemen Risiko Korporat (ERM) yang proaktif dan berkelanjutan, guna mendukung mempertahankan tingkat pertumbuhan dalam lingkungan yang terkontrol untuk meningkatkan nilai para pemangku kepentingan."

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Didirikan pada tahun 2008, ERM di BUMI secara konsisten terus melangkah maju dari sekedar sebuah proyek yang dikelola oleh sebuah *focal-point team* menjadi sebuah divisi yang mapan sejak 2010 yang telah melakukan banyak sosialisasi dan peningkatan yang berkesinambungan. Tujuan dari ERM di BUMI adalah untuk memungkinkan Perseroan mengenali dan mengelola risiko-risiko nya dengan membangun sebuah sistem pengawasan dan pengelolaan risiko yang kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan praktik pengelolaan risiko Perseroan dan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya.

Pembentukan Divisi Manajemen Risiko memberikan struktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktik terbaik manajemen risiko secara konsisten di BUMI. Sejak pembentukannya, Divisi Manajemen Risiko tetap melanjutkan proses integrasi tersebut dan memperkuat koordinasi penanganan risiko di

As an initial step in the Section 210 Court Process, the Singapore subsidiaries have sought and obtained a moratorium of six months against legal and enforcement action, to facilitate discussions with note-holders and bondholders and continue with the restructuring efforts.

Furthermore, the Company also informed that its subsidiaries have applied for recognition of the Singapore proceedings in the United States under Chapter 15 of the U.S. Bankruptcy Code. This application by the Company and its subsidiaries is intended to ensure that Singapore court process can continue unimpeded without risk of litigation in the US, and is not anticipated to have any impact on the Company's business or operations.

To mitigate the risk of reputational damage caused by the speculative news, we established good relationship with the press and media in order to build speedy responsiveness when speculative news arises.

RISK PHILOSOPHY

Risk philosophy expresses the fundamental belief of the Company's attitude towards the management of risk, which is set by considering Company's vision, mission, strategic plan, objectives, and directing all activities within Company's risk management process.

BUMI's agreed risk philosophy is: "PT BUMI Resources Tbk. - a potential world-class operator within the energy and mining sectors, with global operations - recognizes the commitment needed to protect its business, including the human, physical and financial resources by establishing a pro-active and continuous Enterprise Risk Management (ERM) framework in support of maintaining its growth in a controllable environment in order to enhance stakeholders' values".

RISK MANAGEMENT DIVISION

Established in 2008, ERM in BUMI has been consistently advancing from just a project managed by a focal-point team into an established division since 2010 and has been doing many continuous socialisation and improvements. The objective of ERM in BUMI is to enable the Company to recognize and manage risks by establishing a sound system of risk oversight and management and in turn will enhance the Company's risk governance practices and improve the Company's ability in achieving its vision, mission and strategic objectives.

The establishment of the Risk Management Division has provided the necessary structure to consistently conduct risk management best practices in BUMI. Since its inception, Risk Management Division has continued the risk management integration process and strengthened the risk mitigation coordination across the

seluruh kelompok usaha. Setelah mendapatkan sosialisasi dan kampanye kesadaran ERM selama 3 tahun, divisi dan unit usaha telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi di bidang proses-proses manajemen risiko sekaligus menyadari peran mereka dalam proses tersebut.

group. Having experienced 6 years of ERM implementation, BUMI's divisions and business units have acquired sufficient knowledge and experience on risk management processes and their respective roles in the processes.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari dibuatnya kerangka manajemen risiko adalah:

1. Untuk menjabarkan prinsip dan konsep manajemen risiko yang berguna sebagai petunjuk dasar bagi semua tingkatan karyawan dalam menerapkan, menilai, dan mengembangkan efektivitas manajemen risiko korporat di BUMI.
2. Untuk memberikan arahan bagi proses dan aktivitas manajemen risiko BUMI sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan.

Di bawah ini adalah diagram kerangka kerja manajemen risiko:



RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The objectives to provide the risk management framework are:

1. To define the risk management principles and concepts which will serve as the basic guidance for all levels of personnel in implementing, evaluating, and enhancing the effectiveness of BUMI's ERM.
2. To provide direction for BUMI risk management processes and activities such that it is able to support achievement of the company's vision, mission and objective.

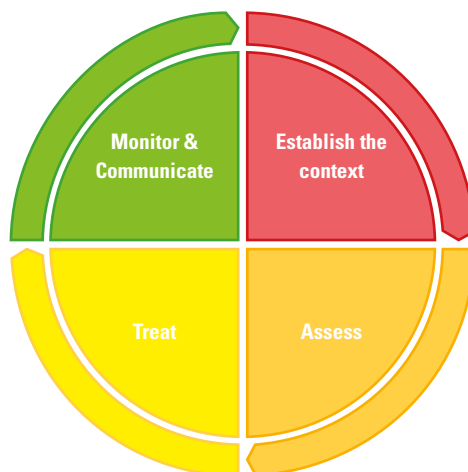
Below is the risk management framework diagram:

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko terdiri dari 4 (empat) langkah utama sebagaimana digambarkan di bawah ini:

RISK MANAGEMENT PROCESSES

Risk management process comprises of four key steps as described in the chart below:



PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Dengan menetapkan konteks manajemen risiko berarti sebuah organisasi telah menjelaskan dengan nyata tentang tujuan pengelolaan risiko, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan risiko dan menentukan ruang lingkup dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya. Setelah tujuan strategis dan usaha ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mencermati kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi tujuan strategis harus diidentifikasi. Sebelum proses identifikasi itu dilakukan, organisasi harus melakukan usaha-usaha yang formal dan tersendiri dalam menetapkan konteks dimana mereka akan mencapai tujuan tersebut.

Sesuai dengan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko, para pengambil keputusan di setiap jenjang organisasi harus mempertimbangkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tugas mereka. Agar hal ini dapat terwujud, mereka harus memahami risiko yang ada di unit usaha atau divisi yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga risiko yang dihadapi oleh unit usaha atau divisi yang lain dan organisasi secara keseluruhan.

PENGAJIAN RISIKO

Pengkajian risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan penilaian risiko yang didasarkan atas dampak dan kemungkinan atau frekuensi kejadian.

Hasil analisa ini dapat membantu pihak manajemen dalam mempelajari tiga hal:

1. Mengenali risiko yang teridentifikasi yang dapat mempengaruhi tujuan strategis Perseroan.
2. Memahami tingkat keparahan risiko.
3. Menyempurnakan strategi usaha dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

PERLAKUAN RISIKO

Perlakuan risiko bertujuan untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan, mengurangi, menerima, atau mengalihkan risiko yang teridentifikasi sehingga risiko tersebut masih dalam batas yang dapat ditoleransi oleh BUMI.

Pengembangan rencana tindakan dapat membantu identifikasi, pemantauan, dan pelaporan status dari kontrol manajemen risiko dan kegiatan perlakuan yang terkait dengan setiap risiko. Selain itu, perumusan rencana tindakan membantu pengarahannya sumber daya kepada risiko-risiko yang kritis dan penting.

Implementasi yang efektif dari perlakuan risiko mensyaratkan agar Perseroan membangun kemampuan dalam eksekusi strategi dan rencana tindakan. Pengembangan kemampuan ini juga akan membantu dalam menghilangkan kontrol risiko yang tumpang tindih dan tidak penting.

ESTABLISH THE RISK MANAGEMENT CONTEXT

By establishing the context, the organization articulates its objectives, defines the external and internal parameters to be taken into account when managing risk, and sets the scope and risk criteria for the remaining process. Once business or strategic objectives are established, events that may have influence on the strategic objectives should be identified. Before that identification process is conducted, organizations should make a formal, dedicated effort to establish a context in which they seek to achieve their objectives.

Good practice suggests that decision makers at all levels should consider risk management as a n integral part of their job. For that to occur, they must be aware of the risks their business unit or division face as well as the risks that confront other business units or divisions and the organization as a whole.

ASSESS RISK

Risk assessment involves identifying risks, analyzing risks and evaluating risks based on consequence or impact and likelihood or frequency.

This step helps management in three area:

1. Recognize the identified risks that may influence the Company's strategic objectives,
2. Understand the severity of the risks.
3. Refine business strategy and to allocate resources efficiently.

RISKS TREATMENT

Risk treatment deal with deciding on what action can be taken to eliminate, reduce, accept, or transfer the identified risk such that the amount of risk is still within the tolerable level accepted by BUMI.

Development of an action plan will help identify, monitor and report on the status of risk management controls & treatment initiatives related to each risk. In addition, action plan formulation helps to redirect resources to key/ critical risks.

Effective implementation of the risk treatment requires the Company to build capabilities which will enable strategy and action plan execution. Capabilities development will also assist in eliminating redundant & unnecessary risk controls.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RISIKO

Pemantauan dan pelaporan risiko adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat mengenai risiko yang ada sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Manfaat pelaksanaan pemantauan dan pelaporan risiko adalah untuk mendapatkan pengertian atas sifat dan cakupan dari risiko terkini, mencegah terjadinya kejadian risiko, dan untuk menganalisa kerugian yang pernah terjadi di masa lalu.

Tujuan utama pemantauan dan pelaporan risiko adalah untuk memotivasi para risk owner untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan mitigasi risiko dengan menjadikan proses tersebut bagian penting dari aktivitas harian mereka.

KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2014

Aktivitas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko selama 2014 antara lain:

- Membuat pengungkapan atas praktik manajemen risiko untuk dimasukkan dalam laporan keuangan BUMI setiap kuartal serta dalam Laporan Tahunan 2014.
- Melakukan evaluasi risiko di divisi BUMI dan unit usahanya tiap kuartal.
- Melakukan kajian atas rencana tindakan mitigasi risiko tiap kuartal.
- Menerbitkan memorandum Risk Profile, Risk Map and Risks That Matter selama tahun 2014 dengan menerbitkan memorandum No. 005/BR-RMD/V/14 tanggal 6 Mei 2014 untuk Q1 dan No. 008/BR-RMD/VIII/14 tanggal 12 September 2014 untuk Q2 dan No.012/BR-RMD/XI/14 tanggal 17 November 2014 untuk Q3 serta No.002/BR-RMD/I/15 tanggal 27 Januari 2015 untuk Q4.
- Menyenggarakan 2 (dua) rapat dengan Komite Manajemen Risiko:

MONITOR AND COMMUNICATE RISKS

Risk monitoring & communication are activities to obtain current and accurate information about risk thereby enabling better decision making.

Benefits of performing risk monitoring and communication are to obtain an understanding of the nature and scope of current risks, to prevent risk events from actually occurring, and to analyze historical losses.

Risk monitoring and communication have the main goal to motivate risk owners to take responsibility for risk management by making it a key part of their normal day to day activities.

RISK MANAGEMENT ACTIVITIES IN 2014

Amongst the activities conducted by the Risk Management Division in 2013 were as follows:

- Developed risk management disclosures in BUMI's quarterly financial statements and Annual Report 2014.
- Conducted risk assessments in BUMI's divisions and its business units quarterly.
- Reviewed risk mitigation action plans implementation quarterly.
- Released memorandums on Risk Profile, Risk Map and Risks That Matter in 2014 by the issuance of memorandums No. 005/BR-RMD/V/14 dated 6 May 2014 for Q1 and No. 008/BR-RMD/VIII/14 dated 12 September 2014 for Q2 and No.012/BR-RMD/XI/14 dated 17 November 2014 for Q3 also No.002/BR-RMD/I/15 dated 27 January 2015 for Q4 .
- Conducted 2 (two) meetings with Risk Management Committee

Tanggal Date	Rapat Meeting	Agenda
22 Januari 2014 January 22, 2014	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbarui Aktivitas Manajemen Risiko di BUMI pada bulan Juni – Desember 2013 • Memperbarui Risiko di BUMI per Desember 2013 • Risks That Matter per Desember 2013 • Rencana selanjutnya dan Tantangan • Tujuan Strategis BUMI di tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Update on Risk Management Activities in BUMI June – December 2013 • Update on BUMI's Risks as of December 2013 • Risks That Matter as of December 2013 • Future Plans and Challenges • BUMI's Strategic Objectives 2014
28 Agustus 2014 August 28, 2014	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbarui Aktivitas Manajemen Risiko di BUMI pada bulan Januari – Juni 2014 • Tujuan Strategis BUMI di tahun 2014 • Memperbarui Risiko di BUMI's per Juni 2014 (Draft) <ul style="list-style-type: none"> • Update on Risk Management Activities in BUMI January – June 2014 • BUMI's Strategic Objectives 2014 • Update on BUMI's Risks as of June 2014 (Draft)

MENGHADAPI TANTANGAN YANG DIHADAPI SELAMA PELAKSANAAN EVALUASI RISIKO PADA TAHUN 2014

Terkait dengan kondisi keuangan Perseroan saat ini, penerapan Manajemen Risiko menghadapi beberapa tantangan sehingga beberapa rencana/proyek Divisi Manajemen Risiko tidak dapat dilaksanakan dan peringkat risiko kurang mencerminkan besarnya risiko yang sebenarnya di BUMI dan oleh karena itu kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen.

Di antara tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Petunjuk yang kurang jelas dari Direksi mengenai tujuan strategis dan Rencana Aksi Korporasi BUMI.
- Divisi Manajemen Risiko tidak dilibatkan dalam aksi korporasi strategis.
- Tantangan Keuangan yang memberikan dampak:
 - Tunggakan faktur pemasok.
 - Ditundanya proyek.
 - Pengunduran diri staf tanpa penggantian.

INISIATIF UTAMA DI TAHUN 2015

Selain melaksanakan proses manajemen risiko rutin sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, di bawah ini adalah kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama tahun 2015:

- Membuat pengungkapan manajemen risiko untuk Laporan Tahunan 2014.
- Melakukan kajian atas rencana tindakan mitigasi risiko tiap kuartal.
- Memperbarui Risk Criteria 2015
- Terlibat dalam proyek-proyek yang signifikan untuk melakukan kajian risiko yang menyeluruh guna penyelesaian proyek terkait.
- Memonitor secara ketat dalam hal terjadinya perubahan tujuan stratejik BUMI.

CHALLENGES FACING DURING THE RISK ASSESSMENT IMPLEMENTATION IN 2014

In regards to the current Company's financial condition, the implementation of Risk Management are facing several challenges that resulting some of Risk Management Division's plans/projects could not be carried out and the risk rating would not reflect the true magnitude of the risk in BUMI and therefore will not reliable as management's decision making.

Amongst of those challenges are as follows:

- Unclear guidance from the Board of Directors regarding BUMI's strategic objectives and Corporate Action Plans
- Risk Management Division does not involve in strategic corporate actions.
- Financial Challenges that gives impact:
 - Unpaid supplier invoices
 - Postponed on projects
 - Resignation of staff without replacement

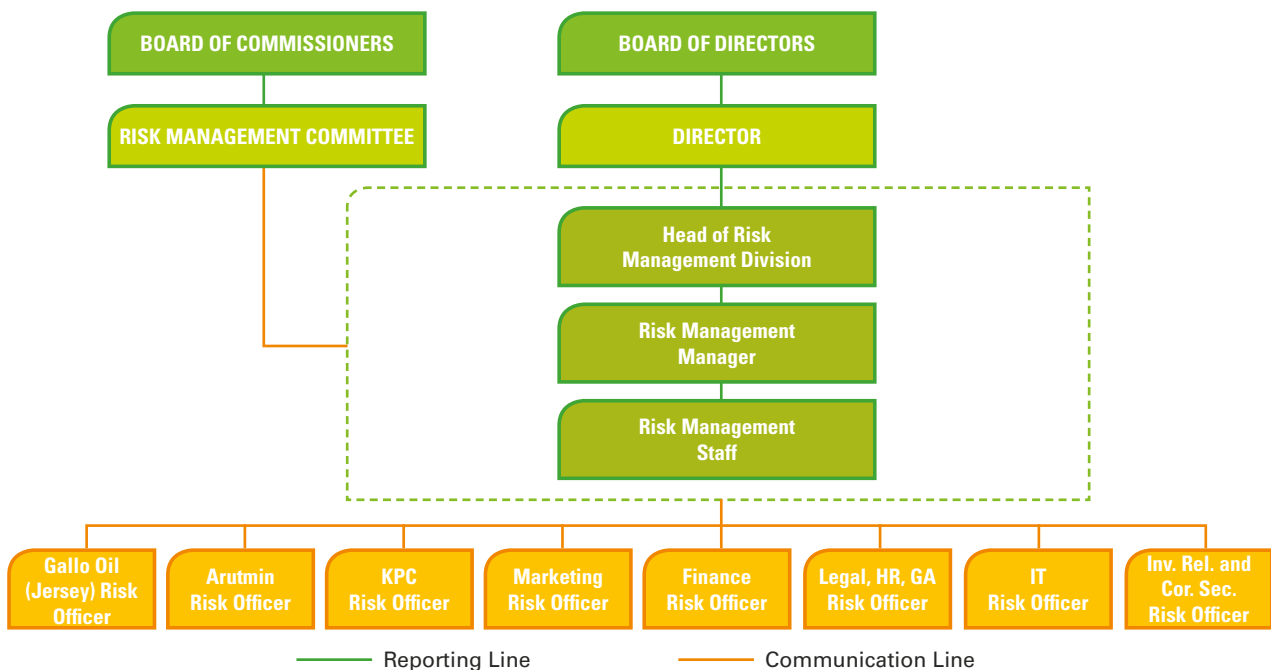
MAIN INITIATIVES IN 2015

Other than conducting the routine risk management process as stipulated in Risk Management Policy and Procedures, the following main initiatives will be carried out in 2015:

- Develop risk management disclosure for insertion in the Annual Report 2014.
- Conduct Risk Assessment and review risk mitigation plans quarterly.
- Update Risk Criteria 2015.
- Involved in significant projects to provide thorough risk assessment for the completion of the projects.
- Monitor closely any changes of BUMI's strategic objectives.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Berikut adalah struktur manajemen risiko BUMI:



RISK MANAGEMENT STRUCTURE

Below is BUMI risk management structure.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk tanggal 15 Maret 2007 oleh Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko mencakup sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan rekomendasi atas kebijakan manajemen risiko perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- Mengkaji dan memastikan bahwa kerangka manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan usaha BUMI.
- Memastikan bahwa Presiden Direktur dan Direktur Manajemen Risiko menunjukkan kepemimpinan dan arahan praktik manajemen risiko dan secara proaktif meningkatkan kemampuan manajemen risiko Perseroan.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengelolaan risiko strategis perusahaan.
- Mengkaji rekomendasi atas keputusan strategis BUMI serta memberikan usulan kepada Direksi menyangkut risiko-risiko apa saja yang dapat timbul dan memberikan rekomendasi atas batas toleransi serta rencana mitigasi risiko untuk masing-masing risiko strategis perusahaan.
- Mengkaji efektivitas kinerja dan penerapan manajemen risiko Perseroan termasuk profil risiko dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih berada dalam batas toleransi risiko perusahaan.
- Memberikan usulan dan rekomendasi kepada Direksi dalam meningkatkan kinerja dan penerapan manajemen risiko Perseroan.
- Melapor ke Dewan Komisaris mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko di BUMI termasuk hasil dari penanganan/penerapan rencana mitigasi risiko utama.
- Bila diperlukan, menghadiri pertemuan *ad-hoc* dengan Direksi untuk mendiskusikan hal-hal penting yang memerlukan perhatian khusus.

KEANGGOTAAN

Anggota Komite Risk Manajemen sejak 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal dibuatnya laporan ini adalah sebagai berikut:

- Nalinkant A. Rathod sebagai Ketua Komite
- Kanaka Puradiredja sebagai Anggota

Nalinkant A. Rathod

Nalinkant A. Rathod merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Untuk paparan lengkap mengenai profil Nalinkant A. Rathod dapat dilihat di masing-masing Curriculum Vitae yang terdapat di halaman 198 Laporan Tahunan ini.

Kanaka Puradiredja

Anggota

Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung. Berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai Akuntan Publik. Mantan Managing Partner dan Chairman KPMG Indonesia dan mantan Senior Partner KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Komite Audit Indonesia, Anggota Dewan Kehormatan Profesional in Risk Management Association dan Wakil Ketua Dewan Pengurus Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia. Sebelumnya pernah

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee was established on 15 March 2007 by the Board of Commissioners with the following roles and responsibilities:

- Provide guidance and recommendations on risk management policies defined by the Board of Directors.
- Review and ensure that the Company possesses a risk management framework that fits with the business requirements.
- Ensure that the President Director and Risk Management Director provide leadership and direction for the Company's risk management practices and proactively enhance the Company's risk management capabilities.
- Provide recommendation to the Board of Directors on the management of BUMI's strategic risks.
- Review recommendations on BUMI's strategic decisions and provide suggestions to the Board of Directors regarding the possible risks that could occur including recommendations on the tolerable risk levels and risk treatments/action plans for the respective strategies.
- Review the effectiveness of Company's risk management performance and implementation including risk profile and provide recommendations to the Board of Directors to ensure those risks are within the Company's tolerable risk levels.
- Provide suggestions and recommendations to Board of Directors on the enhancement of Company's risk management performance and implementation.
- Report to the Board of Commissioners on the effectiveness of risk management implementation at BUMI including the results of risk treatments/action plans implementation of key risks to the Board of Commissioners.
- If necessary, attend ad-hoc meetings with the Board of Directors to discuss significant risks requiring immediate attention.

MEMBERSHIP

Members of the Risk Management Committee as at 31 December 2009 and at the date of this report are:

- Mr. Nalinkant A. Rathod as Chairman
- Mr. Kanaka Puradiredja as Member.

Nalinkant A. Rathod

Mr. Nalinkant A. Rathod is member of the Board of Commissioners, please refer to page 198 of this Annual Report for the Curriculum Vitae of Mr. Nalinkant A. Rathod.

Kanaka Puradiredja

Member

Graduated from the Economic Faculty majoring in Accountancy at Padjadjaran University, Bandung. 30 (thirty) years in public accounting practices. Former Managing Partner and Chairman of KPMG Indonesia. Former Senior Partner of Kanaka Puradiredja, Suhartono, Public Accounting Firm.

Currently, he is Chairman of Honorary Board of Indonesian Institute of Audit Committee, member of Honorary Board of Professionals in Risk Management Association and Vice Chairman of Indonesian Institute of Commissioners and Directors.

menjadi Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias dan anggota Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia serta anggota atau pernah menjadi anggota Komite Audit di berbagai perusahaan Publik.

Formerly, he was the Chairman of Honorary Board of Indonesian Institute of Accountants Chairman of Executive Board of Indonesia Institute of Audit Committee, member of Supervisory Board of Aceh-Nias Rehabilitation and Reconstruction Agency and Executive Board of Indonesian International Transparency. He is a former member and member of Audit Committees in various public listed companies.

KRITERIA RISIKO

Kriteria risiko digunakan sebagai bagian tolok ukur dalam pengambilan keputusan di BUMI untuk menentukan apakah sebuah risiko dapat diterima, ditolerir atau tidak dapat diterima.

RISK CRITERIA

Risk criteria is used as part of a decision-making yardstick by BUMI to determine whether a risk is acceptable, tolerable or unacceptable.

Menentukan kriteria risiko umum yang diakui oleh semua personil yang ada di BUMI akan menciptakan penilaian risiko yang seragam dan konsisten terhadap risiko-risiko yang ada di seluruh bagian Perseroan. Terdapat 2 (dua) tipe kriteria risiko, yakni:

Defining common risk criteria that is acknowledged by all personnel in BUMI will lead to similar and consistent risk assessment of risks across the Company. There are 2 types of risk criteria:

1. Kriteria berdasarkan akibat yang ditimbulkan (*Consequence*)
2. Kriteria berdasarkan kemungkinan terjadinya (*Likelihood*)

1. Consequence Criteria
2. Likelihood Criteria

Kriteria berdasarkan akibat yang ditimbulkan di BUMI terdiri dari 13 macam, yakni sebagai berikut:

Impact criteria at BUMI consists of 13 items as follows:

Dampak Impact	Ukuran Measurement
Keuangan Financial	Nilai uang dari kehilangan secara aktual, kesempatan maupun potensi Money value of actual, opportunity or potential loss
Tujuan Strategis Strategic goal	Persentase deviasi pencapaian tujuan strategis Deviation in percentage of realization of strategic goal
Efisiensi Efficiency	Proyeksi operating EBITDA terhadap total penjualan batu bara Projected operating EBITDA against total coal sales
Penghentian operasi Operational stoppage	Kemungkinan jumlah hari penghentian operasi Potential days of stoppage
Kesalahan penaksiran geologis Geological estimation errors	Persentase deviasi dari penaksiran total cadangan (dalam metrik ton) menurut ukuran baku JORC Percentage of deviation from estimated total reserve in metric ton according to JORC standards
Keterlambatan penyelesaian proyek Time over run on project delivery	Kemungkinan jumlah hari keterlambatan proyek Potential days of project tardiness
Turnover pegawai Employee turnover	Persentase turnover Percentage of turnover
Hubungan Industrial Industrial relations	Aksi ketidakpuasan pegawai Employee dissatisfaction action
Kesehatan dan Keselamatan Health and Safety	Kematian dan tingkat keparahan cedera kerja Fatality and injury severity
Lingkungan Environment	Skala kerusakan lingkungan dan pelanggaran ukuran baku lingkungan Environmental scale of damage and breach of environmental standard
Reputasi Reputation	Skala luasnya pencemaran reputasi Scale of reputational damage propagation
Regulasi Regulation	Peringatan maupun pembatasan kegiatan usaha oleh regulator Warning and activity limitation imposed by regulator
Legal Legal	Litigasi dan pengaduan Legal litigation and complaint

Kriteria dampak di atas memiliki 5 tingkat keparahan: sangat rendah, rendah, medium, tinggi, dan sangat tinggi.

The Impact criteria above has 5 levels of severity: very low, low, medium, high and very high.

Tingkat kemungkinan kejadian (*likelihood*) dapat diukur dengan terminologi umum seperti:

The level of possibility (*likelihood*) can be measured by using general terminologies such as:

Likelihood	Arti Meaning
Sangat Tinggi Very High	Hampir pasti terjadi Almost Certain
Tinggi High	Besar kemungkinan terjadi Likely
Menengah Medium	Mungkin terjadi Possible
Rendah Low	Kecil kemungkinan terjadi Unlikely
Sangat Rendah Very Low	Hampir pasti tidak terjadi Rare

PROFIL RISIKO DAN RISKS THAT MATTER

Setiap bagian risiko dimasukkan ke dalam risk map berdasarkan probabilitas kejadian dengan dampaknya. Nilai untuk risiko yang telah ditentukan digunakan untuk menentukan tingkatan signifikansi risiko terhadap Perseroan serta prioritas untuk penanggulangan dan pengelolaan risiko. Risiko-risiko di setiap tingkatan/kategori perlu untuk dimitigasi untuk menghindari perpindahan/peningkatan mereka ke tingkatan/kategori yang lebih tinggi serta untuk menurunkan tingkatan dari risiko itu sendiri.

RISK PROFILE AND RISKS THAT MATTER

Each risk in the risk register is plotted on the risk map based on its likelihood and its impact. The score for the given risk is used to determine the level of risk significance to the Company as well as prioritization for risk treatment and management. Risks in each level/category need to be mitigated to avoid moving these to the higher level/category as well as to decrease the risk level itself.

Tingkat Keparahan Level of Severity	Uraian Descriptions
Signifikan Significant	<p>Risiko Signifikan dianggap sebagai risiko yang paling diprioritaskan untuk ditanggulangi. Risiko di area ini dimasukkan ke dalam area Management Enhance Priorities dimana perhatian yang cepat dan ketat dari manajemen senior dibutuhkan. Status terkini dan perkembangan aksi penanggulangan risiko tersebut harus dimonitor dalam periode yang relatif pendek</p> <p>Significant risks are considered as the most prioritized for risk treatment. Risks in this area are put into the Management Enhance Priorities Area where immediate and close attention from senior management is needed. Their recent status and the mitigation action developments need to be monitored on relatively short periodical basis.</p>
Tinggi High	<p>Risiko Tinggi ditempatkan dalam area <i>Internal Audit Focus/Cautious</i> dimana rencana mitigasi risiko dikembangkan agar risiko dapat berpindah ke tingkat keparahan yang lebih rendah</p> <p>High risks are put into the Internal Audit Focus/Cautious Area where the risk mitigation plans should be developed to make the risks move into the lower level of severity.</p>
Menengah Medium	<p>Risiko Menengah dianggap sebagai risiko yang lebih dapat diserap dampaknya dibanding Risiko Tinggi namun mereka tetap ditempatkan dalam area yang sama yaitu area <i>Internal Audit Focus/Cautious</i>. Rencana mitigasi risiko harus dikembangkan dengan memperhatikan agar risiko tidak berpindah ke tingkat keparahan yang lebih tinggi</p> <p>Medium risks are considered as more containable risks than the high risks but they are also put into the same Internal Audit Focus/Cautious Area. The risk mitigation plans should be developed to avoid the risks move into the higher level of severity.</p>
Rendah Low	<p>Risiko Rendah ditempatkan pada area Monitoring dimana status mereka saat ini dianggap sebagai status ideal bagi bisnis dan operasi Perseroan. Pengawasan secara teratur terhadap risiko ini tetap diperlukan untuk mencegah risiko-risiko tersebut tidak berpindah ke tingkat keparahan yang lebih tinggi</p> <p>Low risks are put into Monitoring Area where their current status are considered as ideal for the Company's business and operations. Regular monitoring of risks in this area is still required to prevent these risks from entering the higher level of severity.</p>

Berdasarkan penilaian risiko pada Q4 tahun 2014 keseluruhan risk profile BUMI terdiri dari 38 risiko dengan rincian 10 risiko signifikan, 11 risiko tinggi, 9 risiko menengah, dan 8 risiko rendah. Berdasarkan kategori, risiko-risiko tersebut terdiri dari 8 risiko keuangan, 25 risiko operasional, 3 risiko kepatuhan dan 2 risiko strategis.

38 risiko tersebut yang terdapat dalam daftar risiko diatas relatif cukup banyak dan akan sulit bagi manajemen senior untuk memonitor semua risiko tersebut dalam waktu bersamaan. Karena itu untuk membantu senior manajemen BUMI dalam mengawasi risik-risiko utama di BUMI, telah diidentifikasi 6 risiko utama yang dijabarkan dalam paragraf berikut di bawah ini.

Risks That Matter Dan Rencana Aksi Mitigasi

BUMI telah mengidentifikasi beberapa Risks that Matter dan telah menyiapkan dan melaksanakan mitigasi risiko atas risiko-risiko tersebut.

Penurunan Harga Penjualan di Bawah Rencana

Harga batu bara terus menunjukkan kecenderungan penurunan harga karena berkurangnya permintaan sebagai akibat dari melemahnya ekonomi global dan kebijakan mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap di beberapa negara. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan yang lebih rendah dari yang sudah dianggarkan. Untuk mengelola risiko ini, Perusahaan melakukan strategi pengurangan biaya produksi dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik.

Sengketa Lahan Kompensasi di Bangalon dtan Sangatta

Banyak daerah yang akan dikompensasi terletak di dekat akses publik (jalan). Kondisi ini telah meningkatkan ekspektasi pemilik tanah pada harga tanah yang jauh lebih tinggi dari harga anggaran KPC untuk ganti rugi tanah. Untuk mengurangi risiko ini, Divisi External Affairs dan Sustainable Development menerapkan pendekatan koordinasi yang lebih baik kepada pemilik lahan dan pemerintah.

Based on the risk assessment in Q4-2014, the overall risk profile in BUMI consists of 38 risks with the breakdown of 10 significant risks, 11 high risks, 9 medium risks and 8 low risks. Based on risk categories, the risks consist of 8 financial risks, 25 operational risks, 3 compliance risks and 2 strategic risks.

The 38 risks in the risk register is quite a big number and will be difficult to be monitored all at once at all time by senior management. Therefore, to assist BUMI's senior management in conducting the oversights of key risks in BUMI, the top 6 risks have been identified as Risks that Matter, which are described in the following paragraphs.

Risks That Matter and Their Mitigation Action Plans

BUMI has identified several Risks that Matter and has prepared and conducted mitigation plans of these risks.

Drops in Sale Price Below The Plan

The coals prices have been showing downward trend due to decrease in demand caused as a consequence of weakening global economy and phasing-out coal policy from several countries. This may lead to reduced revenue from the budget. To mitigate this risk, the Company initiates production cost reduction strategy and develop a better marketing strategy.

Dispute in Land Compensation at Bangalon and Sangatta

Many area to be compensated are located near public access (road). This condition has raised the land owner's expectation on the the price of the land which is much higher than KPC's budget price for land compensation. To mitigate this risk, External Affairs and Sustainable Development Division implemented better coordination approach to land owners and local government.

Kurangnya Likuiditas, Ancaman Kasus Hukum karena Ketidakmampuan Membayar Utang, Penyedia Layanan dan Pemasok, dan Ketidakmampuan Membayar Utang karena Tingginya Tingkat Rasio Utang di Bumi serta Aliran Pendapatan yang Lebih Rendah karena Penurunan Harga Batu bara

Peningkatan biaya bunga ditambah dengan penurunan harga batu bara menimbulkan batasan yang cukup signifikan dalam ketersediaan kas. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan operasional dan kesulitan dalam mengeksekusi inisiatif Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko ini dengan mencari dan memperoleh moratorium enam bulan terhadap tindakan hukum dan penegakan hukum, untuk memfasilitasi diskusi dengan pemegang surat berharga dan obligasi dan melanjutkan upaya restrukturisasi.

Untuk mengurangi jumlah beban bunga, kami juga akan mengurangi jumlah utang dengan divestasi aset batu bara kami. Kami menerapkan inisiatif efisiensi operasional dengan menugaskan konsultan untuk meninjau dan memberikan saran untuk perbaikan proses produksi batu bara.

Berita Spekulatif tentang Bumi yang Tidak Ditanggapi dalam Waktu yang Tepat

Berita spekulatif tentang BUMI yang tidak ditanggapi secara tepat dan dalam waktu yang tepat dapat menurunkan kepercayaan investor atau calon investor yang dapat berakibat pada hilangnya kesempatan berinvestasi. Berita spekulatif tentang BUMI sering bermunculan dan berkelanjutan sepanjang tahun 2014. Untuk memitigasi risiko ini, Investor Relations membangun hubungan yang baik dengan pers dan media agar dapat merespon dengan baik pada saat berita spekulatif muncul di media.

Perusahaan juga melakukan koordinasi dengan Kelompok Usaha Bakrie agar mempunyai strategi hubungan yang lebih kuat dan solid dengan media dan publik. Saat ini, hubungan dengan media dan Kelompok Usaha Bakrie terjalin dengan baik, namun demikian berita spekulatif sulit untuk di perkirakan, meskipun tingkat terjadinya saat ini sudah lebih berkurang.

Liquidity, Legal Cases Threatening due to Inability to Service Debts, Service Providers and Suppliers, and Inability to Service Debts due to High Debt Level and Leverage in Bumi and Lower Revenue Stream due to Decrease in Coal Prices

Increased debt and interest cost coupled with decreased in coal price has provided significant constraint in cash availability. This may lead to tardiness in operational activities and difficulties in executing corporate initiatives. The Company mitigates this risk by sought and obtained a moratorium of six months against legal and enforcement action, to facilitate discussions with note-holders and bondholders and continue with the restructuring efforts.

To reduce the amount of interest expenses, we also decreased the amount of debt by divestment of our coal assets. We implemented operational efficiency initiatives i.e. assigned a consultant to review and provide suggestions for improvements in the coal production processes.

Speculative News about Bumi may Not Be Countered in Timely Manner

Speculative news about BUMI that is not countered properly in timely manner may decrease confidence from investors or prospect investors therefore represent losing investment opportunity. Speculative news has been spreading frequently and continuously during 2014. To mitigate this risk, Investor Relations has established good relationship with the press and media in order to build good responsiveness when speculative news arises.

The Company also conducted coordination within Bakrie Group in order to have stronger and more solid media and public relations strategy. Currently, the relationships with the media and with Bakrie Group are still good but the speculative news remains hard to predict, although currently the level has been lower.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

TINJAUAN KONDISI UMUM DAN PROSPEK USAHA REVIEW ON GENERAL CONDITION AND PROSPECT

1. KONDISI MAKRO EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi global dan domestik tahun 2014 ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya diproyeksikan oleh berbagai lembaga. Lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank harus menurunkan proyeksi mereka atas pertumbuhan ekonomi global. IMF, dalam World Economic Outlook yang diterbitkannya pada tahun tersebut tercatat melakukan empat kali koreksi pertumbuhan ekonomi global, mencerminkan tingginya fluktuasi perekonomian dunia pada tahun 2014.

1. GLOBAL AND DOMESTIC MACROECONOMIC CONDITIONS

The domestic and global economic growth in 2014 fell below what was initially projected by many institutions. International institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank were forced to lower their forecast for global economic growth. The IMF, In its World Economic Outlook publication during the year has revised its projection on global economic growth four times, a reflection of a volatile nature of the the 2014 global economy.

Perkembangan perekonomian dunia tersebut telah menyebabkan kenaikan harga pada beberapa komoditas primer dunia. Namun demikian, ekspor Indonesia pada tahun 2014 tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sebagai akibat dari lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan dampak temporer dari implementasi UU Minerba.

The development of the world economy has led to a rise in the prices of primary commodities. However, Indonesia's exports in 2014 did not show a significant increase, resulted from the slow growth in the world economy and the temporary impact of the implementation of the new Mining Law. This is evident from the weak performance of Indonesia's commodity exports, such as coal and minerals.

Bank Indonesia sendiri pada awalnya cukup optimis dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni pada kisaran 5,8-6,2%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,65%, sementara World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat mencapai angka yang lebih tinggi, yakni 3,70%. Perbaikan perekonomian beberapa negara besar, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, China dan India, diperkirakan terus berlanjut sepanjang 2014 dan dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, hingga triwulan pertama tahun 2014 berakhir, akselerasi pemulihan ekonomi dunia tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya.

Lemahnya pertumbuhan ekonomi global mendorong moderasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga lebih rendah dari perkiraan semula. Sebagai akibatnya, Bank Indonesia pada Maret 2014 melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, turun menjadi 5,5-5,9%, dan tak lama kemudian kembali melakukan koreksi, turun dalam kisaran 5,1-5,5%.

Ekspor Indonesia pada tahun 2014 tidak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sebagai akibat dari lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan dampak temporer dari implementasi UU Minerba. Hal ini terlihat dari lemahnya kinerja ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia, seperti batu bara dan mineral. Sementara itu, harga minyak dunia menurun drastis sehingga berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi fiskal, neraca pembayaran, maupun pertumbuhan ekonomi.

Initially, Bank Indonesia was quite optimistic in estimates of growth for the country's economy with a range of 5.8% to 6.2%. The IMF's forecast, projected a global economic growth of 3.65%, while the World Bank estimated that it could reach as high as 3.70%. Economic recovery in some major countries, like the United States (US), Japan, China and India, was originally expected to continue throughout 2014 and therefore encourage economic growth in Indonesia. However, up to the end of the first quarter of 2014, the acceleration of the world economic recovery was not as strong as previously thought.

The slow world economic growth has led to a moderation of economic growth in Indonesia, where the growth in household consumption was also lower than expected. As a result, in March 2014, Bank Indonesia revised down its projection on Indonesia's economic growth in 2014, to 5.5% to 5.9%, and shortly after in May 2014, had to revise again, down to 5.1% to 5.5%.

Indonesia's exports in 2014 did not show a significant increase, due to the slow growth in the world economy and the temporary impact of the implementation of the new Mining Law. This was evident from the weak performance of Indonesia's commodity exports, such as coal and minerals. Meanwhile, the world's oil prices fell significantly, and this brought a positive impact on the economy of Indonesia, from the fiscal side, the balance of payments, as well as the economic growth.

2. KONDISI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Indonesia memiliki profil pertambangan yang luar biasa dan menduduki peringkat enam besar dunia dalam hal kepemilikan bahan-bahan tambang. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk potensi batu bara, peringkat kedua untuk produksi timah, peringkat kedua untuk produksi tembaga, peringkat keenam untuk produksi emas.

Akan tetapi, meski Indonesia kaya dengan bahan-bahan tambang, semua kekayaan alam itu belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan di Indonesia tidak hanya di area hilir, namun juga di area hulu, atau eksplorasi.

Prospek Pertambangan Batu Bara

Ada 4 faktor utama yang menentukan masa depan batu bara termal global.

1. Lambatnya pertumbuhan konsumsi di Cina;
2. Fokus global saat ini pada "Hijau" Energi;
3. Peningkatan perlindungan dan dorongan produksi batu bara dalam negeri di India dan China;
4. Jumlah komitmen ekspor batu bara termal kapasitas berorientasi.

Konsumsi batu bara termal diperkirakan akan tumbuh pada laju yang stabil selama 10 tahun berikutnya, yakni sekitar 3% per tahun, lebih lambat dari 10 tahun terakhir.

Pertumbuhan *demand* batu bara termal China akan berkurang seiring pergeseran bauran energinya ke arah yang lebih "hijau".

Pasokan dalam negeri di India dan China, yang didukung oleh pemerintah mereka, akan menurunkan kebutuhan impor batu bara termal. Hal ini juga akan mempengaruhi seluruh perdagangan batu bara antar negara, dimana hanya akan mengalami pertumbuhan yang moderat karena perubahan profil perdagangan di Asia akibat kebijakan dan rencana di atas.

Kapasitas ekspor batu bara termal merupakan faktor utama dimana Australia dan Indonesia memiliki potensi untuk meningkat hingga 200MT dari angka tahun 2014 dan karena itu jumlah pasokan dapat meningkat secara signifikan di masa depan.

Harga batu bara telah mengalami koreksi yang signifikan, dan kecil kemungkinan untuk kembali ke angka tertinggi seperti sebelumnya untuk jangka waktu yang cukup lama bila mengingat faktor yang disebutkan di atas.

2. CONDITIONS OF THE MINING INDUSTRY IN INDONESIA

Indonesia has a tremendous mining profile and is ranked in the world's top six in terms of ownership of mineral resources. Based on data from the US Geological Survey (USGS) in 2014, Indonesia was ranked third for the production of coal, second for the production of tin, second for the production of copper, and sixth for gold production.

However, despite being rich in mineral deposits, Indonesia has not been able to optimally manage its natural wealth. Indonesia's mining industry faces challenges not only in the downstream area, but also in the upstream, or exploration area.

Prospect of Coal Mining

There are 4 major factors that will shape the future of the global thermal coal sector.

1. The slower consumption growth in China;
2. The current global focus on "Green" Energy;
3. Increased protection and encouragement of domestic coal production in India and China;
4. The amount of committed thermal coal export oriented capacities.

Thermal coal consumption is expected to grow at a steady pace over the next 10 years at approximately 3% per year, slower than the last 10 years.

China's Demand growth in thermal coal will reduce as it shifts its energy mix to more "greener" energy.

The domestic supply in India and China, supported by their respective governments, will moderate the import requirement for Thermal coal. This will also influence the overall sea borne trade, which will see only a small amount of growth as the trade profile in Asia changes due to the above policies and plans.

The Export capacity for thermal coal is a major factor with Australia and Indonesia having the potential to increase by a further 200MT from 2014 numbers and therefore total supply could significantly increase in the future.

Prices have had a significant correction, with current projections muted and unlikely to return to previous highs for a significant period given the factors mentioned above.

Tentu saja bila harga tetap bertahan pada kisaran yang rendah, maka beberapa kapasitas dan beberapa tambang tidak akan ekonomis lagi sehingga dapat menyebabkan berkurangnya pasokan. Hal ini diperkirakan akan memakan waktu 12 bulan sebelum dampaknya benar-benar terlihat. Dalam berbagai skenario, terlihat bahwa situasi kelebihan pasokan lebih mungkin terjadi dan pemulihan harga secara penuh kecil kemungkinan bisa terjadi.

Oleh sebab itu, perusahaan tambang perlu mengupayakan pencapaian biaya murah di perusahaan dan di tambang. Akan terjadi perubahan model bisnis di pertambangan, pengurangan tingkat utang perusahaan agar dapat menyesuaikan kewajibannya dengan tingkatan harga yang baru, profil aset akan diseimbangkan melalui akuisisi dan divestasi. Berbagai pilihan baru akan dipertimbangkan, seperti batu bara untuk bahan kimia, integrasi hilir ke pusat pembangkit listrik melalui Pembangkit Listrik Independen mulut tambang.

Naturally if these low prices continue, some capacity and even some mines will be not be economically viable and therefore there could be some reduced supply. However this is expected to take another 12 months before material impact is seen. In many scenarios, the over supply situation is likely to dominate and a full price recovery is unlikely.

Mining companies will therefore need to pursue low cost initiatives at the company and at the mine level. There will be a revision of many business models at the mine level, a deleveraging at the company level to ensure debt can be serviced at the new price regime and a rebalancing of asset profiles through acquisitions and divestments. New options will also be looked at, such as Coal to chemicals, downstream integration into power through mine mouth IPP.

TINJAUAN BISNIS

BUSINESS REVIEW

1. SEGMENT BATU BARA

a. PT Kaltim Prima Coal

Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B), Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada KPC untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan pemasaran batu bara di wilayah seluas 90.938 hektar di Sangatta dan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.

Lokasi Tambang Sangatta terletak dekat dengan pelabuhan Tanjung Bara, dan dihubungkan dengan *overland conveyor* (OLC) sepanjang 13 kilometer. Jalur OLC kedua dan peningkatan fasilitas pemuatan tongkang telah dibangun untuk mendukung rencana peningkatan produksi di masa depan.

Tambang Bengalon juga berlokasi dekat dengan pantai dan dihubungkan dengan fasilitas pelabuhan melalui jalan sepanjang 22 kilometer. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan memberikan keuntungan bagi KPC, berupa biaya transportasi yang rendah dari lokasi tambang ke lokasi pelabuhan.

KPC memproduksi tiga jenis batu bara:

- Prima, batu bara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur menengah dengan kelembaban rendah.
- Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat kelembaban yang lebih tinggi.
- Melawan, batu bara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah, serta tingkat kelembaban yang tinggi.

Di tahun 2014, total produksi batu bara KPC (siap jual) dari tambang Sangatta dan Bengalon mencapai 52,4 juta ton, turun 2,03% dari sebesar 53,5 juta ton di tahun 2013.

Tabel 1. Produksi Batu bara KPC Tahun 2014

Keterangan Description	Sangatta		Bengalon		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Stripping Overburden (Million BCM)	436.1	475.3	71.5	77.8	507.5	553.1
Stripping Ratio	9.86	11.12	8.45	11.09	9.63	11.11
Coal Mined (Million Ton)	44.2	42.8	8.5	7.0	52.7	49.8
Coal Production (Million Ton)	43.9	45.5	8.4	7.9	52.4	53.5

1. COAL SEGMENT

a. PT Kaltim Prima Coal

Based on Coal Contract of Work (CCOW), the government of Indonesia granted authorization to PT Kaltim Prima Coal (KPC) to carry out exploration, production and marketing of coal in area of 90,938 hectares in Sangatta and Bengalon of East Kutai Regency, East Kalimantan Province.

KPC's Sangatta mine is close to the port facilities at Tanjung Bara, which is linked to the mine by an overland conveyor of approximately 13 kilometers in length. Second OLC line and Barge Loading Facility Extension have been built to support plans to increase the production capacity in the future.

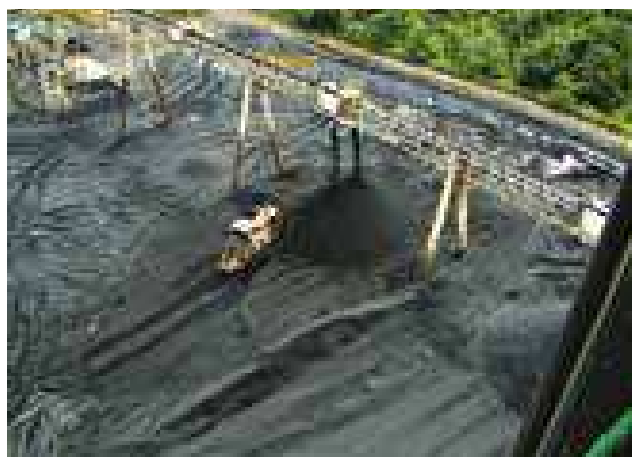
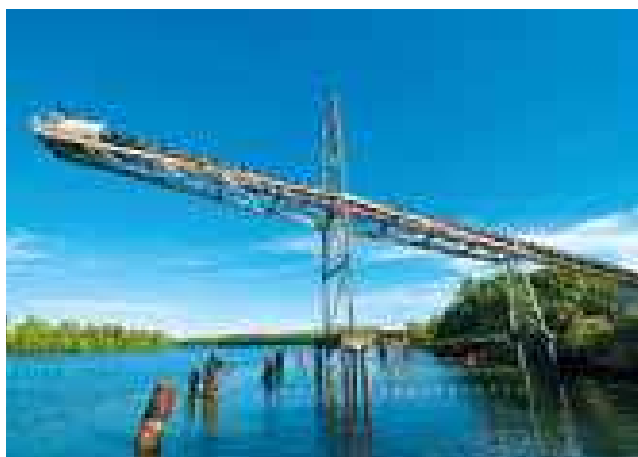
The Bengalon mine is also close to the coast and is linked to port facilities by a 22 kilometers haul road. The close proximity of all the mines to the ports provides KPC with the advantage of lower costs mine to port transportation.

KPC produces three grades of coal:

- Prima: high quality coal with high calorie content, very low ash, medium sulphur, and low moisture
- Pinang: has lower energy compared to Prima but with higher moisture content
- Melawan: sub-bituminous coal with low sulphur and ash, and high moisture content

KPC's total production of coal (saleable form) in 2014 from Sangatta and Bengalon reached 52.4 million ton, down 2.03% from 53.5 million ton in 2013.

Table 1. KPC's 2014 Coal Production



Tabel 2. Sumber Daya dan Cadangan Batu bara KPC Tahun 2014

Table 2. KPC's 2014 Coal Resources and Coal Reserves

Lokasi Location	Sumber daya Batu bara (juta ton) Coal Resources (in million tons)	Cadangan Batu bara (juta ton) Coal Reserves (in million tons)
	eo March 2013	eo March 2013
Sangatta	7,747	957
Bengalon	1,560	242
Total	9,307	1,199

b. PT Arutmin Indonesia

PT Arutmin Indonesia (AI) beroperasi di area konsesi seluas 59.261 hektar di Block 6 Kalimantan, yang mencakup sejumlah area sempit di sebelah tenggara Kalimantan dan ujung utara Pulau Laut.

Arutmin mengelola 6 tambang batu bara terbuka (*open cut*): Senakin, Satui, Mulia, Batulicin, Asam-asam, dan Kintap. Seluruh tambang memiliki lokasi strategis tidak jauh dari fasilitas pelabuhan milik Arutmin – North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) yang terletak di pesisir utara Pulau Laut.

Tambang Senakin memproduksi batu bara bituminous. Batu bara tersebut dipecah, dipisahkan dan kemudian dicuci untuk mengurangi kandungan abunya dan meningkatkan harga jualnya.

Tambang Satui memproduksi batu bara bituminous yang harus dipecah namun tidak perlu dicuci karena memiliki kandungan abu yang rendah.

Tambang Mulia, Asam Asam and Kintap memproduksi batu bara ecocoal (sub-bituminous) yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap di dalam dan luar negeri. Batu bara tersebut memiliki kandungan belerang dan abu yang sangat rendah sehingga dikategorikan sebagai batu bara ramah lingkungan.

b. PT Arutmin Indonesia

PT Arutmin Indonesia (AI) operates in a 59,261 hectares concession area of Kalimantan Block 6, covering narrow strips of land in the southeast of Kalimantan and the northern tip of neighboring island Pulau Laut.

Arutmin operates 6 open cut coal mines: Senakin, Satui, Mulia, Batulicin, Asam-asam and Kintap, all strategically located near Arutmin's port facility – North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) in the north shore of Pulau Laut.

Senakin mine produces bituminous coal. Senakin coal is crushed and, apart from a small portion, washed to lower the ash content and heighten marketability.

Satui mine produces bituminous coal that requires crushing but does not require washing due to its low ash content.

Mulia, Asam Asam and Kintap mines produce eco-coals mainly used as fuel for domestic and foreign steam-energy power stations. The mines produce sub-bituminous coal with extremely low ash and sulphur contents and therefore are environmentally friendly.

Tambang Batulicin terdiri dari area Ata, Mereh, Saring, Mangkalapi dan Sarongga. Batu bara tambang Ata memiliki kandungan abu yang rendah serta belerang dan CV yang tinggi, sedangkan batu bara dari tambang Mereh dan Saring memiliki kandungan abu yang tinggi, tetapi dengan kadar belerang dan CV menengah. Batu bara dari tambang Mereh dipecah, dipisahkan dan kemudian dicuci untuk mengurangi kandungan abunya dan meningkatkan harga jualnya. Batu bara tambang Sarongga memiliki kandungan abu, belerang dan CV yang rendah. Batu bara tambang Sarongga dipecah dan banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap. Sejak bulan Oktober tahun 2013, tambang Ata, Mereh, Saring, dan Mangkalapi mulai memasuki masa mine-out.

Pada tahun 2014, total produksi batu bara di tambang Arutmin mencapai 31,8 juta ton, meningkat 7,5% dari produksi 29,6 juta ton di tahun sebelumnya.

Batulicin mine consists of Ata, Mereh, Saring, Mangkalapi and Sarongga deposits. Ata coal is characterized by low ash, high sulphur, high CV, while the coal from Mereh and Saring coal is characterized by high ash, low sulphur, and medium CV. Mereh coal is crushed and, apart from a small portion, washed to lower the ash content and heighten marketability. Sarongga coal is characterized by low ash, low sulphur and low CV. Sarongga coal is crushed and mainly used as fuel in coal-fired power stations. Ata, Mereh, Saring, Mangkalapi mine have started mine-out period since October 2013.

In 2014, Arutmin's total coal mined reached 31.8 million tons, which increased 7.5% from 29.6 million tons in 2013.

Produksi Batu bara Arutmin tahun 2014

Arutmin's 2014 Coal Production

Keterangan Description	Senakin		Satui		Batulicin		Mulia		Asam Asam		Kintap		Total	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Stripping Overburden (Million Bcm)	0	24.2	0	19.8	6.1	14.4	25.9	15.6	18.2	31.6	21.6	29.4	71.8	135.1
Stripping Ratio (Bcm/Ton)	0	12.7	0	12.9	0.8	2.5	3.2	4.1	2.4	3.7	2.6	3.6	2.3	4.6
Batu bara di Tambang (juta ton) / Coal Mined (million ton)	0	1.9	0	1.5	7.7	5.8	8.1	3.8	7.7	8.5	8.4	8.2	31.8	29.6
Produksi Batu bara (juta ton) / Coal Production (million ton)	0.5	1.0	0.1	1.7	7.3	5.9	8.1	3.7	7.7	8.5	8.5	8.1	32.2	28.8
Penjualan Batu bara (juta ton) / Coal Sales (million ton)	0.5	1.1	0.2	2.0	7.3	5.9	8.1	3.7	7.6	8.4	8.6	7.8	32.4	28.8

Cadangan Batu bara Arutmin 2014

Arutmin's 2014 Coal Reserve

Lokasi Location	Sumber daya Batu bara (juta ton) Coal Resources (in million tons)			Cadangan Batu bara (juta ton) Coal Reserves (in million tons)		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
Senakin	392	392	392	11	11	11
Satui	262	262	262	47	47	47
Batulicin	174	174	174	16	16	16
Mulia	697	697	697	41	41	41
Asam Asam	321	321	321	203	203	203
Sarongga	328	328	328	72	72	72
Undeveloped	203	203	203	7	7	7
Total	2,377	2,377	2,377	397	397	397

Note: Angka berdasarkan Laporan Sumber Daya dan Cadangan 2012 / Figure is based on Resource and Reserve Statements of 2012.

PT Fajar Bumi Sakti

Fajar Bumi Sakti (FBS) mengelola area konsesi seluas 8.250,5 hektar dengan cadangan batu bara berkalori 4.000-6.150 kkal (GAR) sebesar 335 juta ton. Saat ini terdapat dua area penambangan: Loa Ulung (open pit) dan Tabang, keduanya berada di Kalimantan Timur.

Operasional pertambangan terbuka milik FBS di Loa Ulung berada di area sebesar 984,5 hektar, sementara proyek satunya di Tabang yang dimiliki oleh dua konsesi independen bernama PT Guruh Putra Bersama dan PT Ade Putra Tanrajeng. Proyek Tabang seluas 7.266 hektar mengandung 321 juta ton cadangan dengan 4.000 kkal (GAR) batu bara.

Pada bulan Oktober 2014, fasilitas pemuatan batu bara telah beroperasi dengan kapasitas 400 ton per jam, dan dapat mendukung produksi hingga 180.000 ton per bulan. Perseroan telah menandatangani perjanjian *Forward selling* dengan beberapa pembeli. PT Guruh Putra Bersama telah mulai memproduksi sejak Juli 2013.

PT Pendopo Energi Batu bara

PT Pendopo Energi Batubara (PEB) didirikan tahun 1995 dan telah memiliki Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang ketiga dengan Pemerintah Republik Indonesia. Lokasi tambang PEB adalah di Muara Enim dan PALI, Sumatera Selatan, 140 km barat daya Palembang, yang dapat diakses melalui jalan provinsi, Sungai Musi/Lematang dan dilintasi jalan khusus batu bara milik pihak ke-3 (tiga) sepanjang ± 116 km yang menghubungkan Lahat dengan pelabuhan batu bara di Sungai Musi.

PEB memiliki konsesi seluas 17.840 hektar dengan ijin operasi selama 30 tahun, sejak 5 Mei 2009 sampai 4 Mei 2039. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh konsultan pertambangan independen dengan metode JORC, PEB memiliki sumber daya batu bara yang potensial sebesar 2,3 miliar ton dan 1,3 miliar ton cadangan batu bara. *Feasibility study* dan izin produksi dengan kapasitas 7,6 juta ton pertahun telah diperoleh sejak 2006, sesuai surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu bara No. 360/48/DPP/2006.

PEB mendapatkan izin operasi/produksi pada tahun 2009 untuk 30 tahun, sesuai dengan surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 325.K/30/DJB/2009, 1 Juli 2009 dan perubahannya dengan No. 686.K/30/DJB/2011, 30 Maret 2011.

Sumber daya batu bara Pendopo dikategorikan sebagai batu bara muda, memiliki kandungan kelembaban (IM) 16,4%-27% dengan total kelembaban (TM) antara 55%-60%, kandungan abu 4%-8%, kandungan sulfur rendah (< 0,2%) dan kandungan kalori 2.400 kkal/kg (GAR).

Dengan mempertimbangkan karakteristik kualitas batu bara di Pendopo, PEB telah bekerja sama dengan para mitra strategis untuk mengembangkan industri-industri nilai tambah batu bara kalori rendah, yang meliputi: PLTU Mulut Tambang, Coal Upgrading dan Coal Gasification/Liquefaction, serta Pendopo clean coal town bekerja sama dengan JCoal.

PT Fajar Bumi Sakti

Fajar Bumi Sakti (FBS) manages a total concession area of 8,250.5 hectares with total coal reserves of 335 million tonnes of 4,000-6,150 kkal (GAR) coal. Currently there are two mining areas: Loa Ulung (open pit) and Tabang, both in East Kalimantan.

FBS's operational open pit mine at Loa Ulung sits on an area of 984.5 hectares, while the other project in Tabang acquired by two independent concessions under the name of PT Guruh Putra Bersama and PT Ade Putra Tanrajeng has a total area of 7,266 hectares. Tabang Project area contains 321 million tons of minable reserves of 4,000 kkal (GAR) coal.

At October 2014, early coal loading facility has been operational with capacity of 400 ton per hour that enables the production up to 180,000 ton per month. Forward selling agreements have also been established with several buyers. PT Guruh Putra Bersama has started the production since July 2013.

PT Pendopo Energi Batu bara

PT Pendopo Energi Batubara (PEB), established in 1995, has entered into the third Coal Contract of Work (CCOW) with the Government of Indonesia. The location of PEB mining is in Muara Enim and PALI, South Sumatera, 140 km southwest of Palembang, which can be accessed through the provincial road, Musi/Lematang River and crossed by specific road for coal of the third party along the ± 116 km that connects Lahat with coal ports in the Musi River.

PEB has a concession area of 17,840 hectares with a 30-year operating permit, from 5 May 2009 to 4 May 2039. Based on studies conducted by an independent mining consultant with JORC method, PEB owns a potential coal resources of 2,3 billion tonnes and 1,3 billion tonnes coal reserves. The mine has conducted a feasibility study and a production permit was obtained for 7.6 million tonnes capacity since 2006, in accordance with the letter of Director of Business Development of Mineral and Coal No. 360/48/DPP/2006.

PEB was granted the operation/production permits in 2009 for 30 years, in accordance with the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, No. 325.K/30/DJB/2009, 1 July 2009 and its amendments No. 686.K/30/DJB / 2011, 30 March 2011.

Pendopo's coal resources is classified as young coal, with a moisture content (IM) of 16.4%-27% and total moisture (TM) between 55%- 60%, with 4%-8% ash, low sulfur of (<0, 2%) and calorie content of 2,400 kkal/kg (GAR).

Taking into account the characteristics of the Pendopo's coal quality, PEB has teamed up with the strategic partners to develop value-added industries of low grade coal, which includes: Mine Mouth Power Plant, Coal Upgrading and Coal Gasification/Liquefaction, as well as Pendopo's clean coal town in collaboration with JCoal.

Untuk proyek PLTU mulut Tambang, saat ini PEB sedang menjajaki kerja sama secara intensif dengan mitra strategis guna mengikuti proyek PLTU Mulut tambang tersebut melalui mekanisme pemilihan langsung dan penunjukan langsung sesuai dengan Permen ESDM No. 3 Tahun 2015.

Untuk proyek Coal Upgrading dan Coal Gasification, saat ini PEB bersama mitra strategis dari Jepang dan Korea sedang pada tahap studi lebih lanjut secara lebih komprehensif agar proyek-proyek tersebut dapat dibangun secara komersial.

2. SEGMENT NON-BATU BARA: MINERALS

PT Bumi Resources Minerals Tbk

Keputusan BUMI di tahun 2010 untuk menggabungkan semua aset pertambangan mineral non-batu bara dan membentuk PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) mencerminkan strategi yang berfokus pada pengembangan semua aset ini hingga berproduksi. BRMS tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2010 dan saat ini berada di bawah manajemen independen yang berfokus pada pengembangan aset-aset ini hingga produksi. BUMI memiliki 87% kepemilikan di BRMS.

Kepemilikan BRMS, terdiri dari:

- Newmont Nusa Tenggara: Tembaga dan Emas (perusahaan asosiasi yang sudah berproduksi)
- Dairi Prima Mineral: Seng dan Timah Hitam (dalam tahap konstruksi)
- Gorontalo Minerals: Emas dan Tembaga (dalam tahap penyusunan AMDAL)
- Citra Palu Minerals: Emas dan Molibdenum (dalam tahap eksplorasi)
- Bumi Resources Japan: Jasa Pemasaran

PT Newmont Nusa Tenggara

Newmont Nusa Tenggara (NNT) Batu Hijau merupakan tambang skala besar, tambang tembaga dan emas terbuka yang terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara. BRMS saat ini memiliki 18% kepemilikan efektif di NNT.

Batu Hijau adalah salah satu dari tiga tambang di dunia yang mengandung tonase bijih lebih dari 1 miliar ton dan kadar emas lebih tinggi dari 0,2 gram/ton. Proyek Batu Hijau memiliki 6,5 miliar pound cadangan tembaga dan 6,9 juta oz cadangan emas dengan umur cadangan 9 tahun untuk emas dan 12 tahun untuk tembaga berdasarkan produksi tahunan tertinggi di tahun 2010. Kegiatan penambangan di NNT kini telah memasuki fase ke-6.

Dalam Kontrak Karya NNT, terdapat prospek tembaga dan emas lainnya di lokasi Elang dan Rinti di luar proyek Batu Hijau. Cadangan tembaga dan emas di Elang diperkirakan lebih besar dari Batu Hijau.

For Mine Mouth Power Plant Project, PEB is (establishing/ approach) cooperation with Strategic partner intensively in order to follow this PLN's Mine Mouth Power Plant project through direct selection and direct appointment under ESDM Minister Decree No. 03 Year 2015.

For Coal Upgrading and Coal Gasification, PEB together with its strategic partners from Japan and Korea are on comprehensive feasibility study in purpose to implements these projects commercially.

2. NON-COAL SEGMENT: MINERALS

PT Bumi Resources Minerals Tbk

The decision in 2010 to consolidate all non-coal mining assets of BUMI under PT Bumi Resources Minerals (BRMS) reflected a focused strategy on bringing these assets into production. BRMS was listed on the Indonesia Stock Exchange in December 2010 and is currently under independent management focusing on bringing these assets into production. BUMI holds 87% interest in BRMS.

BRMS interest, consists of:

- Newmont Nusa Tenggara : Copper and Gold (associated company already in production)
- Dairi Prima Mineral : Zinc and lead (in construction stage)
- Gorontalo Minerals : Copper and Gold (in the environmental impact analysis (AMDAL) stage)
- Citra Palu Minerals : Gold and Molybdenum (in the exploration stage)
- Bumi Resources Japan : Marketing Services

PT Newmont Nusa Tenggara

Newmont Nusa Tenggara's (NNT) Batu Hijau project is a large scale, open pit copper and gold mine located in Sumbawa, Nusa Tenggara. BRMS currently owns 18% effective interest in NNT which includes the producing Batu Hijau project as well as the prospective Elang and Rinti sites.

Batu Hijau is one of only three mines in the world with total ore tonnage in excess of 1 billion tonnes and gold grades higher than 0.2 gram/tonne. The Batu Hijau project has 6.5 billion lbs of copper and 6.9 million oz of gold reserves with the reserve life of 9 years for gold and 12 years for copper based on the peak production rate in 2010. The NNT mining activities have now entered phase 6.

Within the NNT's Contract of Works, there are other copper and gold prospects from the Elang and Rinti sites, in addition to the Batu Hijau project. Elang's copper and gold deposits are estimated to be larger than Batu Hijau's copper and gold deposits.

PT Dairi Prima Mineral

BRMS memiliki 80% saham PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang merupakan proyek seng dan timah hitam di Sumatera Utara. Jumlah keseluruhan cadangan dan sumber daya meningkat masing-masing sebesar 104% dan 25% berdasarkan estimasi JORC yang telah diselesaikan oleh CSA Global pada bulan Oktober 2010 dan Mining Plus Pty Ltd. pada bulan Februari 2011. Cadangan total terdiri dari 11 juta ton bijih dari lokasi Anjing Hitam dan Lae Jahe, yang memiliki umur tambang lebih dari 15 tahun.

Kandungan seng yang dimiliki konsesi ini adalah salah satu yang bermutu terbaik di dunia (11,5% Zn; 6,8%Pb; 7,5 Ag/t). Total sumber daya bijih di lokasi Anjing Hitam, Lae Jahe, dan Base Camp (termasuk jumlah cadangan) mencapai 25 juta ton.

Terdapat beberapa kemajuan berarti yang dicapai dalam upaya untuk memulai tahap produksi komersial. Pada bulan Mei 2011, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 28/2011 yang mengizinkan penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung di Indonesia. Pada bulan November 2011, DPM memperoleh Izin Prinsip untuk pertambangan bawah tanah melalui konsesi yang dimilikinya. Di bulan Juli 2012, DPM mendapatkan izin pinjam pakai penambangan bawah tanah untuk konsesi seng dan timah hitamnya.

Tanggal 22 Oktober 2013, DPM menandatangani Perjanjian Kerja sama Strategis dengan China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd (NFC), yang dilanjutkan dengan penandatanganan Engineering, Procurement & Construction ("EPC") Contract pada bulan April 2014 untuk mengembangkan dan memproduksi cadangan seng dan timah hitam di kawasan Anjing Hitam. Sebagaimana yang dilaporkan pada bulan Oktober tahun lalu, NFC akan menangani 85% pendanaan untuk pengembangan proyek ini.

PT Gorontalo Minerals

BRMS memiliki 80% kepemilikan di Gorontalo Minerals (GM), yang merupakan konsesi tembaga dan emas. Gorontalo Minerals memiliki hak Kontrak Karya atas konsesi penambangan seluas 36.070 hektar yang terletak di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.

Pada bulan September 2012, BRMS melaporkan estimasi sumber daya berdasarkan standar JORC sebesar 292 juta ton bijih (0,5% CU; 0,47 g/ton) dari konsesi tembaga dan emas di Gorontalo Minerals.

Pada bulan Maret 2014, GM telah menandatangani MoU dengan PT Nusantara Smelting untuk mengembangkan peluang dalam memasok konsentrat tembaga dengan fasilitas yang akan dikembangkan oleh Nusantara Smelting.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2014, BRMS mengumumkan bahwa GM telah menyelesaikan proses konsultasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penyusunan AMDAL, khususnya yang terkait dengan pertambangan di Sungai Mak. Hal ini merupakan kelanjutan dari Studi Kelayakan untuk lokasi tambang Sungai Mak yang telah disetujui Pemerintah pada 21 Agustus 2014.

PT Dairi Prima Mineral

BRMS owns 80% shares of PT Dairi Prima Mineral (DPM) which is a zinc and lead project in North Sumatra. The total reserves and resources have increased by 104% and 25% respectively based on JORC estimates completed by CSA Global in October 2010 and Mining Plus Pty Ltd. in February 2011. The total reserves consist of 11 million tonnes ore from Anjing Hitam and Lae Jahe sites, which translate into a mine life of more than 15 years.

The concession has one of the highest grades of zinc deposits in the world (11.5% Zn; 6.8% Pb; 7.5 Ag g/t). The total resources size from Anjing Hitam, Lae Jahe, and Base Camp sites (including reserves size) reached 25 million tonnes of ore.

Notable progress was achieved in the effort to commence the first production. In May 2011, the Presidential Decree No 28/year 2011 was issued which allows underground mining under protected forest areas in Indonesia. In November 2011, the Company obtained an In- Principle Approval for underground mining for its concession. The Company obtained the permit in July 2012 for the underground mining of its zinc and lead concession.

DPM entered into an Agreement of Strategic Cooperation with China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd (NFC) in 22 October 2013. This was followed by the signing of an Engineering, Procurement & Construction ("EPC") Contract in April 2014 to develop and monetize zinc and lead reserves in Anjing Hitam. As reported in October of last year, NFC will assist to arrange 85% of the funding required to develop Dairi's zinc and lead project.

PT Gorontalo Minerals

BRMS owns 80% interest in Gorontalo Minerals (GM), a copper and gold concession. GM has a Contract of Works rights to a 36,070 hectares mining concession located in the Bone Bolango Regency in the province of Gorontalo.

BRMS reported the JORC standardized resource estimates of 292 million tonnes of ores (0.5% CU; 0.47 g/ton Au) from its Gorontalo Minerals copper and gold concession in September 2012.

In March 2014, GM has signed a MoU with PT Nusantara Smelting to explore opportunities to supply copper concentrate to the facilities to be developed by Nusantara Smelting.

Furthermore on the 18th of December 2014, BRMS announced that GM has completed a public consultation as a part of an environmental impact analysis (AMDAL) which is related to the Sungai Mak mine site in particular. Such public consultation is the follow up of the Feasibility Study done on the Sungai Mak site that was approved by the Government on the 21st of August 2014.

PT Citra Palu Minerals

Citra Palu Minerals (CPM), saat ini tengah menyelesaikan studi kelayakan dilokasi tambang Poboya, yang mencakup studi metalurgi, geoteknik, dan geohidrologi, yang diharapkan akan selesai dan diajukan untuk persetujuan lebih lanjut oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada semester 1 tahun 2015.

Estimasi sumber daya JORC akan segera diselesaikan untuk prospek emas Poboya. CPM memiliki Kontrak Karya untuk konsesi pertambangan dari lahan seluas 138.889 hektar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, Indonesia.

Bumi Resources Japan Co. Ltd.

Bumi Resources Japan adalah kantor pemasaran yang menghubungkan BRMS dengan pelanggan dari berbagai macam produk batu bara dan non-batu bara. BRMS saat ini memiliki kepemilikan efektif 100% di Bumi Japan.

3. SEGMENT NON-BATU BARA: MINYAK DAN GAS

Gallo Oil (Jersey) Ltd.

Sejak 1997, BUMI mengoperasikan dua konsesi eksplorasi minyak dan gas bumi di Republik Yemen dalam bentuk perjanjian bagi hasil (Production Sharing Agreement) dengan Ministry of Oil and Mineral (MOM), yaitu Blok R2 dan Blok 13. Kedua blok tersebut dioperasikan oleh Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo Oil).

a. Blok R2

Blok R2 berada di wilayah Al Maber Timur, propinsi Hadramaut. Di blok ini Gallo Oil memiliki saham pengoperasian 50%. Dalam paparan geologi, Blok R2 terletak di kawasan ketinggian Jahi dengan batuan *basement* berarah utama WNW-ESE, yang memisahkan dua cekungan utama berumur Jurasik yang bernama cekungan Al Ain dan Wadi Saar di sebelah Utara dan cekungan Wadi Hajar di sebelah Selatan-Barat Daya. Setelah pengembalian sebagian daerah operasi yang pertama kali, Gallo Oil saat ini masih mengoperasikan daerah seluas 2.139 kilometer persegi, yaitu daerah yang masih potensial. Di blok ini Gallo Oil telah membor enam sumur eksplorasi.

Empat sumur di antaranya mengindikasikan potensi *hydrocarbon* yang menjanjikan. Tetapi dari hasil tes produksi mengindikasikan bahwa *hydrocarbon* di sumur-sumur tersebut tidak komersial. Namun Gallo Oil masih optimis untuk menemukan *hydrocarbon* komersial di blok ini. Optimisme ini didasarkan pada studi internal lebih lanjut yang meliputi analisa *log* sumur, analisa *cutting*, dan hasil analisa laboratorium dari sumur-sumur yang telah dibor.

PT Citra Palu Minerals

Citra Palu Minerals (CPM), is currently finalizing the feasibility studies in the Poboya mine site. Such studies include metallurgy, geotechnical, and geohydrology studies, which is expected to be completed and submitted for further approval by the Ministry of Energy and Mineral Resources in the 1st semester of 2015.

JORC resources estimation for Poboya gold prospect is soon to be completed. CPM has a Contract of Work for a mining concession of 138,889 hectares in Central Sulawesi and South Sulawesi, Indonesia

Bumi Resources Japan Co. Ltd.

Bumi Resources Japan is a marketing office liaising with customers on a wide range of coal and non-coal products. BRMS currently owns a 100% effective interest in Bumi Japan.

3. NON-COAL SEGMENT : OIL AND GAS

Gallo Oil (Jersey) Ltd.

Since 1997, the Company operates two oil and gas exploration concessions in Yemen through Production Sharing Agreement (PSA) with the Ministry of Oil and Mineral (MOM) of the Republic of Yemen. The two concessions, namely Block R2 and Block 13, are operated by Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo Oil).

a. Block R2

Block R2 is located in East Al Maber area, Hadramaut territory. In this block Gallo Oil has 50% operating shares. From the geological point of view, Block R2 lies on Jahi high, a main WNW-ESE trending basement high that separates two major Jurassic rift basins namely Wadi Al Ain and Wadi Saar to the North and the Wadi Hajar basin to the South-Southwest. After its first relinquishment, Gallo Oil retains the area that covers 2,139 square kilometers, the area that has hydrocarbon potential. In this block Gallo Oil has drilled six exploration wells.

Four of them indicated promising hydrocarbon potentials. But the test results indicated that the hydrocarbon in these wells were non-commercial. However, Gallo Oil is still optimistic to find commercial hydrocarbon in this block. Gallo Oil's optimism is based on the follow-up of internal study of data from well log analysis, cutting analysis, seismic inversion analysis and the results of laboratory analysis of the wells drilled.

Dalam menganalisa data-data tersebut di atas, Gallo Oil menggabungkannya dengan konsep eksplorasi baru, yaitu metoda *sequence seismic stratigraphy* dengan memakai data *seismic* inversi, dengan target utama formasi Qishn Clastic reservoir dan *fracture basement* sebagai target kedua. Gallo Oil berencana membor satu sumur eksplorasi.

b. Blok 13

Blok 13 yang terletak di wilayah Wadi Al Armah, propinsi Al Mahara, Gallo Oil memiliki saham pengoperasian 100%. Konsesi Blok 13, secara geologi terletak pada cekungan Jeza. Setelah pengembalian sebagian daerah operasi yang pertama, Gallo Oil saat ini mengoperasikan daerah seluas 5.563 kilometer persegi. Di blok ini Gallo Oil telah membor tiga sumur eksplorasi, yaitu sumur Al Rizq#1, Al Bakarath#1, dan Al Rizq#1A/B ST (*sidetrack*). Dari pemboran ketiga sumur tersebut, dua sumur diantaranya, yaitu sumur Al Rizq#1 dan Al Rizq#1A/B ST menunjukkan adanya cadangan gas yang signifikan dengan tekanan dan temperatur tinggi (HPHT). Dari hasil pemboran miring sumur Al Rizq#1A/B ST terbukti bahwa pola penyebaran lapisan reservoir gas mencapai radius satu kilometer secara terus menerus. Hasil ini membuat Perseroan bertambah yakin adanya cadangan gas yang besar di blok ini.

Sebagai tindak lanjut prospek gas tersebut Gallo Oil melakukan studi Geologi dan Geofisika mengenai *fracture* reservoir dengan menggunakan data-data *tectonic regional, structure, logs, seismic, gravity and magnetic* sehingga dapat memahami terjadinya *natural fracture* pada batuan yang mengandung gas tersebut. Studi lanjutan ini difokuskan pada formasi *Shuqro* dan lapisan *basement* dimana gas tersebut ditemukan.

Perseroan akan melanjutkan usaha eksplorasi ini dengan melakukan pemboran beberapa sumur baru dan melakukan studi G&G lebih lanjut untuk memastikan besarnya prospek gas tersebut dan dapat segera memproduksinya.

Following analyzes of those data, Gallo Oil has come up with a new exploration concept that is called *sequence seismic stratigraphy* method by using seismic inversion data to further explore the Block R-2, with the Qishn Clastic reservoir as a main target as well as basement fracture formations as a secondary target. Gallo Oil plans to drill one exploration well.

b. Block 13

Block 13 is located in Wadi Al Armah area, Al Mahara territory, and Gallo Oil has acquired 100% operating shares. Geologically, Block 13 concessions are located in the Jeza basin. After its first relinquishment, Gallo Oil retains the area that covers 5,563 square kilometers. In this block Gallo Oil has drilled three exploration wells, namely: Al Rizq#1, Al Barakat#1, and Al Rizq#1A/B sidetrack. From the three wells drilled, two wells; Al Rizq#1 and Al Rizq#1A/B sidetrack indicated the presence of significant gas with high pressure and high temperature (HPHT). From the result of side tracked drilling of Al Rizq#1A/B well, it proved that the prospect gas reservoir reached a radius of one kilometer continuously. This encouraging result leads the Company to believe that there is a huge gas accumulation beneath in the block.

As a follow up of the gas prospect, Gallo Oil conducts Geological and Geophysical (G&G) detailed study related to fracture reservoir by utilizing regional tectonic, structure, logs, seismic, gravity and magnetic data in order to understand the development of natural fracture that contains gas. The detailed study is focused on Shuqro Formation and basement layers where the gas is found and trapped.

The Company will continue its exploration effort by drilling more wells and conducting a G&G advanced study to delineate the gas prospect and put it into production soon.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE REVIEW

Berdasarkan indeks Global Coal Newcastle, harga rata-rata batu bara internasional pada tahun 2014 tercatat pada kisaran USD70,95 atau mengalami penurunan sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kelebihan pasokan batu bara yang masih berlanjut hingga kini. Selain itu, masih rendahnya tingkat permintaan dalam negeri China dan serta melemahnya mata uang negara-negara eksportir utama batu bara terhadap dolar AS, juga merupakan faktor di balik melemahnya harga batu bara internasional. Para pelaku pasar memperkirakan bahwa kondisi pasar batu bara dunia masih akan menantang di 2015.

Impor batu bara China menurun selama 2014 akibat kelebihan pasokan di negara tersebut. Selain itu, Pemerintah China juga menerbitkan beberapa kebijakan yang membatasi impor batu bara, seperti aturan pajak impor untuk batu bara termal sebesar enam persen dan mengenai pengendalian kualitas.

Di sisi lain, impor batu bara dari India masih kuat di 2014 dan diperkirakan masih akan tumbuh di 2015 karena tingginya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap, serta adanya gangguan pasokan batu bara dalam negeri.

Di dalam negeri, permintaan batu bara untuk kebutuhan domestik mengalami pertumbuhan sepanjang tahun, meski tidak sesuai harapan Pemerintah akibat tertundanya pembangunan beberapa pembangkit listrik bertenaga batu bara. Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan batu bara di masa yang akan datang cukup menjanjikan mengingat rencana pemerintah Indonesia untuk membangun beberapa pembangkit listrik tenaga uap baru.

Untuk dapat mengatasi tantangan tersebut, Perseroan telah mengambil kebijakan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan volume produksi dan penjualan agar biaya marginal per ton batu bara tetap kompetitif. Dengan menurunkan biaya produksi per ton batu bara, selain dapat meningkatkan daya saing di pasar, Perseroan juga mampu mengkompensasi penurunan harga batu bara dunia.

BUMI berhasil meningkatkan produksi batu bara dan menurunkan rasio pengupasan sesuai dengan rencana jangka panjangnya. Peningkatan produksi batu bara terjadi di KPC maupun Arutmin, sedangkan penurunan volume pemindahan tanah terjadi di Arutmin. Penurunan volume pemindahan tanah di Arutmin hingga sebesar 47%, terjadi karena terhentinya kegiatan salah satu kontraktor sehubungan dengan terjadinya perselisihan yang saat ini sudah dalam proses pengadilan. Penurunan kegiatan pemindahan tanah penutup tersebut berkontribusi signifikan terhadap penurunan biaya produksi per ton batu bara dari USD918,6/ton menjadi USD 716/ton karena rasio pengupasan rendah di tambang-tambang yang beroperasi.

Based on the Global Coal Newcastle Index, the average international coal price in 2014 stood at around USD70.95 or a decreased by 17% compared to the previous year. This is mainly due to an oversupply of coal which still continues until now. In addition, the low level of domestic demand in China as well as the weakening of currencies in major coal exporting countries against the US dollar, are other reasons behind the weakening of international coal prices. Market participants estimate that the world's coal market conditions will continue to be challenging in 2015.

China's coal imports declined in 2014 due to excess supply in the country. In addition, the Chinese government has also issued policies that restrict imports of coal, such as a six percent tax on imported thermal coal as well as more stringent quality control.

On the other hand, coal imports from India are still strong in 2014 and are estimated to grow in 2015 due to the high utilization of coal fired power plants, and the disruption of domestic coal supplies.

Domestic demand for coal grew throughout the year, although not as strong as expected due to delays in the construction of some of the government coal fired power plants. Nevertheless, coal demand growth in the future is promising given that the Indonesian government plans to build several new coal fired power plants.

In order to overcome these challenges, the Company has adopted a policy to continually improve its operational efficiency, and increase the volume of production and sales as its marginal cost per tonne of coal remained competitively low. With lower production costs per ton of coal, in addition to increasing its competitiveness in the market, the Company is able to offset some of the losses due to the decline in the world's coal prices.

BUMI successfully increased its coal production and reduced its strip ratio in line with its long term plan. Both KPC and Arutmin have increased their coal production, but the Arutmin mines experienced a decline in its overburden removal. Arutmin posted a 47% decreased in overburden removal volume due to the stoppage of one of its contracting activities due a dispute which now is still in court process. This decline made a significant contribution to the decrease of production cost per ton, which fell from US\$31.1/ton to US\$ 22.5 /ton due to the lower strip ratios at the operating mines.



Data Fisik

Physical Data

		2014	2013	%Var
KPC				
Pemindahan Tanah Overburden	mbcm	507.5	553.1	-8.23%
Rasio Pengupasan Strip Ratio	bcm/t mined	9.6	10.9	-11.82%
Volume Batu bara Ditambang Coal Mined	mt	52.6	50.6	4.08%
Coal Conveyed (port)	mt	52.4	53.5	-2.08%
Penjualan Batu bara Coal Sales	mt	52.4	53.1	-1.49%
FOB Prices	\$/t sold	66.2	75.3	-12.06%
Persediaan Batu bara Coal Stocks	mt	3.0	3.8	-20.80%
Cash Cost	\$/t	41.9	46.0	10.00%
Arutmin				
Pemindahan Tanah Overburden	mbcm	71.8	135.1	-46.88%
Rasio Pengupasan Strip Ratio	bcm/t mined	2.3	4.6	-50.56%
Volume Batu bara Ditambang Coal Mined	mt	31.8	29.6	7.44%
Coal Conveyed (port)	mt	32.2	28.6	12.42%
Penjualan Batu bara Coal Sales	mt	32.3	28.8	11.98%
FOB Prices	\$/t sold	30.7	42.7	-28.12%
Persediaan Batu bara Coal Stocks	mt	1.3	1.7	-21.30%
Cash Cost	\$/t	22.5	31.1	38.00%
Gabungan / Combined (KPC + Arutmin)				
Pemindahan Tanah Overburden	mbcm	579.3	688.1	-15.82%
Rasio Pengupasan Strip Ratio	bcm/t mined	6.9	8.6	-20.07%
Volume Batu bara Ditambang Coal Mined	mt	84.4	80.2	5.32%
Coal Conveyed (port)	mt	84.6	82.1	2.98%
Penjualan Batu bara Coal Sales	mt	84.7	82.0	3.25%
FOB Prices	\$/t	52.7	63.8	-17.49%
Persediaan Batu bara Coal Stocks	mt	4.3	5.5	-20.95%
Cash Cost	\$/t	34.6	40.5	17.00%

Biaya gabungan per ton batu bara yang ditambang turun dari USD40,5/ton menjadi USD34,6/ ton pada tahun 2014 karena peningkatan efisiensi, harga bahan bakar dan rasio pengupasan (seperti disebutkan di atas) yang lebih rendah pada KPC dan Arutmin. Namun hal ini tidak cukup untuk mengimbangi turunnya harga jual dari USD63,8/ton untuk USD 52,7/ton.

Karena adanya penurunan harga dan margin, maka Perseroan melakukan pengurangan belanja modal yang tidak esensial dan melakukan re-negosiasi kontrak dengan kontraktor dan pemasok.

Berikut ini adalah pembahasan dan analisis kinerja keuangan BUMI yang mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan.

Combined costs per tonne mined fell from USD40.5/ton to US\$34.6/ton in 2014 due to the improved efficiencies, lower fuel prices and lower strip ratio's (as mentioned above) at both KPC and Arutmin. However this was not sufficient to offset the realised sales price fall from USD63.8/ton to USD52.7/ton.

Due to the drop in prices and margins, expenditure was cut on all non essential capital expenditures and re-negotiations of contracts with contractors and suppliers was undertaken.

The following discussion and analysis on financial performance refers to the Company's Consolidated Financial Statements for years ended 31 December 2014 and 2013, audited by Public Accountant Firm Y. Santosa & Rekan.

A. NERACA

1. Aset (Dalam US\$)

Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change	Komposisi Composition 2014	Komposisi Composition 2013
Aset Lancar Current Assets	2,346,891,707	1,944,236,777	402,654,930	36.1%	27.8%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	4,153,637,211	5,059,671,338	(906,034,127)	63.9%	72.2%
Jumlah Aset Total Assets	6,500,528,918	7,003,908,115	(503,379,197)	100.0%	100.0%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	6,798,673,348	4,719,914,333	2,078,759,015	94.0%	64.6%
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	434,896,928	2,586,953,317	(2,152,056,389)	6.0%	35.4%
Jumlah Kewajiban Total Liabilities	7,233,570,276	7,306,867,650	(73,297,374)	100.0%	100.0%
Ekuitas Stockholders' equity	(733,041,358)	(302,959,535)	(430,081,823)	-	-

Aset

Total aset tahun 2014 turun 7,19%, dari USD 7.004 juta pada tahun 2013 menjadi USD 6.500 juta pada tahun 2014. Penurunan total assets ini terutama disebabkan oleh:

- Penjualan saham 19% KPC ke CIC (restrukturisasi utang)
- Penurunan nilai aset Eksplorasi dan Evaluasi (karena harga batu bara dan situasi politik di Yaman).

A. BALANCE SHEETS

1. Assets (In USD)

Assets

Total assets in 2014 decreased by 7.19%, from USD 7,004 million in 2013 to USD 6,500 million in 2014. The decrease in total assets is mainly attributed to:

- KPC sale of 19% to CIC (loan restructuring)
- Impairment for Exploration and Evaluation Assets (due to coal prices and the political situation in Yemen).

Aset Lancar

Aset Lancar pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 20,7%, dari USD 1.944 juta pada tahun 2013 menjadi USD 2.346 juta pada tahun 2014. Penurunan Aset saat ini terutama disebabkan oleh:

- Penjualan 19% saham KPC ke CIC (restrukturisasi kredit)
- Penyelesaian investasi jangka pendek *recapital*.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 17,9%, dari USD 5.060 juta pada tahun 2013 menjadi USD 4.153 juta pada tahun 2014. Penurunan Aset tidak lancar terutama disebabkan oleh:

- Penjualan 19% saham KPC ke CIC (restrukturisasi utang)
- Penurunan nilai aset Eksplorasi dan Evaluasi (karena harga batu bara dan situasi politik di Yaman).

2. Liabilitas

Restrukturisasi kewajiban Perseroan merupakan program prioritas bagi Manajemen, selain peningkatan efisiensi operasional. Restrukturisasi kewajiban ditujukan untuk menjaga likuiditas seraya memastikan bahwa BUMI akan tetap memiliki kapabilitas untuk mendukung pengembangan usaha.

Kewajiban pada tahun 2014 mengalami penurunan 2,11%, dari USD 7.307 juta pada tahun 2013 menjadi USD 7.233 juta pada tahun 2014. Penurunan kewajiban terutama disebabkan:

- restrukturisasi utang CIC (lihat di atas)
- penyelesaian *Right Issue*

Liabilitas Jangka Pendek (Dalam US\$)

Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change	Komposisi Composition 2014	Komposisi Composition 2013
Pinjaman Jangka Pendek Short Term Loans	193,897,249	195,894,107	(1,996,858)	2.9%	4.2%
Utang Usaha - Pihak Ketiga Trade Payables -Third Parties	593,176,351	173,663,160	419,513,191	8.7%	3.7%
Utang Usaha - Pihak Berelasi Trade Payables - Related Parties	91,172,585	75,913,920	15,258,665	1.3%	1.6%
Utang lain-lain - Pihak Ketiga Other Payables - Third Parties	309,483,194	147,178,079	162,305,115	4.6%	3.1%
Utang kepada Pemerintah Indonesia Due To Government Of Indonesia	728,211,623	1,012,028,374	(283,816,751)	10.7%	21.4%
Beban Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	447,918,459	419,751,892	28,166,567	6.6%	8.9%
Utang Pajak Taxes Payable	316,947,063	170,353,901	146,593,162	4.7%	3.6%

Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Setahun**Current Maturities of Long-Term Liabilities**

Pinjaman Jangka Panjang Long - Term Loans	3,582,418,484	1,563,525,493	2,018,892,991	52.7%	33.1%
Utang Sewa Pembiayaan Finance Lease Payables	41,775,754	53,491,476	(11,715,722)	0.6%	1.1%

Current Assets

Current Assets in 2014 decreased by 20.7%, from USD 1,944 million in 2013 to USD 2,346 million in 2014. The decrease in current Assets is mainly attributed to

- KPC sale of 19% to CIC (loan restructuring)
- Settlement of Re-capital short-term investment

Non Current Assets

Non current Assets in 2014 decreased by 17,9%, from USD 5,060 million in 2013 to USD 4.153 million in 2014. The decrease in non current Assets is mainly attributed to:

- KPC sale of 19% to CIC (loan restructuring)
- Impairment for Exploration and Evaluation Assets (due to coal prices and the political situation in Yemen).

2. Liabilities

The Company's liabilities restructuring program is a priority program of the Management, and part of the improvement in operational efficiency. Liabilities restructuring was aimed to maintain liquidity and ensure BUMI's capacity in supporting business development.

Liabilities in 2014 decreased by 2.11%, from USD 7,307 million in 2013 to USD 7,233 million in 2014. The decrease in liabilities is mainly attributed to:

- CIC loan restructuring (see above)
- Rights issue settlement

Current Liabilities (In USD)

Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change	Komposisi Composition 2014	Komposisi Composition 2013
Taksiran Liabilitas Restorasi dan Rehabilitasi Estimated Liability For Restoration And Rehabilitation	14,425,071	11,233,325	3,191,746	0.2%	0.2%
Premi Penebusan Accrued Redemption Premium	-	434,852,158	(434,852,158)	0%	9.2%
Obligasi Konversi Convertible Bonds	375,000,000	371,835,409	3,164,591	5.5%	7.9%
Liabilitas yang secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas an yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual Liabilities Directly Associated With Disposal Group Classified As Held For Sale	104,247,515	90,193,039	14,054,476	1.5%	1.9%
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	6,798,673,348	4,719,914,333	2,078,759,015	100.0%	100.0%

Kewajiban Lancar pada tahun 2014 meningkat sebesar 44,04%, dari USD 4.720 juta pada tahun 2013 menjadi USD6.799 juta pada tahun 2014. Kenaikan kewajiban saat ini terutama disebabkan Moratorium Utang dan Restrukturisasi utang jangka panjang, dari liabilitas jangka pendek menjadi liabilitas jangka panjang.

BUMI mencatat kewajiban dalam Surat Utang Jangka Menengah, Obligasi Konversi, dan Pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari sejumlah kreditur. Setiap pinjaman memiliki syarat pembayaran yang berbeda, dengan tingkat suku bunga bervariasi dari LIBOR + 5% sampai 7% serta 12% per tahun.

Jumlah kewajiban dengan bunga, terdiri dari pinjaman, surat utang, dan obligasi konversi pada 2013 adalah USD 3.595,7 juta. Sejumlah USD 1.563,5 juta akan jatuh tempo pada tahun 2014. Karena masih berlanjutnya tren penurunan harga batu bara, maka Perseroan perlu melakukan Moratorium Utang Perusahaan Moratorium, yang disampaikan kepada Pengadilan Singapura pada November 2014.

Untuk mengurangi beban bunga dan kewajiban pokok, manajemen BUMI telah berusaha mengkonversinya menjadi penyertaan di anak perusahaan atau di BUMI sendiri. Situasi komoditas global saat ini tidak mendukung dilakukannya penyelesaian melalui *refinancing*.

Pada bulan Juli 2014, BUMI mencapai kesepakatan dengan CIC untuk mengkonversi utang sejumlah USD 950 juta menjadi saham di KPC sebanyak 19%. Saat ini tengah dibahas upaya untuk mengkonversi utang lainnya menjadi ekuitas, baik dari CIC maupun kreditor lainnya.

Current Liabilities in 2014 increased by 44.04%, from USD4,720 million in 2013 to USD6,799 million in 2014. The increase in current liabilities is mainly attributed to the Debt Moratorium and Restructuring of long term debt, from non current liabilities to current liabilities.

BUMI recorded liabilities in Medium Term Notes, Convertible Bonds, and long term Loans obtained from a number of creditors. Each of the loans has different payment terms, with varied interest rates of LIBOR + 5% to 7% as well as 12% per annum interest rate.

Total liabilities with interest, consisting of loans, notes, and convertible bond as of 2013 was US\$3,595.7 million. A portion amounting to US\$1,563.5 million reached its maturity date in 2014. Due to continuing downward trend in coal prices, there was the need for the Company's Debt Moratorium, which was submitted to the Singapore Courts in November 2014.

To reduce interest expenses and principal liabilities, BUMI's management has attempted to reduce its liabilities by converting them to equity in its subsidiaries or BUMI itself. The global commodity situation was not favorable to a settlement through *refinancing*.

In July 2014, BUMI reached an agreement with CIC to convert USD 950 million of debt to 19% of KPC. Additional debt to equity conversions with CIC and other lenders are currently being discussed.

Liabilitas Jangka Panjang

Kewajiban Tidak Lancar pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 83,19%, dari USD 2.587 juta pada tahun 2013 menjadi USD 434,8 juta pada tahun 2014, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Penurunan kewajiban tidak lancar ini terutama disebabkan oleh:

- Reklasifikasi utang jangka panjang untuk liabilitas jangka pendek (lihat di atas).
- Penjualan 19% saham KPC ke CIC (restrukturisasi kredit).

Dalam pengelolaan kewajiban jangka panjang, BUMI konsisten pada upaya menurunkan beban bunga secara keseluruhan. Mengingat kondisi usaha dalam jangka pendek yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, BUMI berupaya keras untuk mengurangi porsi pinjaman berefek bunga dan merealisasikan program konversi pinjaman menjadi ekuitas sehingga Perseroan memiliki partner strategis yang diyakini dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang. Restrukturisasi dengan *refinancing* kewajiban bersama CIC diharapkan dapat diintensifkan dan diterapkan bagi penyelesaian pinjaman berefek bunga yang lain, sehingga beban bunga di masa mendatang dapat dikelola pada level yang paling memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Non Current Liabilities

Non Current Liabilities in 2014 decreased by 83.19%, from USD 2,587 million in 2013 to USD 434.8 million in 2014, as shown in the table below. The decrease in non-current liabilities is mainly attributed to:

- Due to reclassification of long-term debt to current liabilities (see above).
- KPC sale of 19% to CIC (loan restructuring)

In managing non current liabilities, BUMI's efforts were consistently directed at reducing the total interest expense. Considering the short term business condition that has not shown positive signs, BUMI strived to reduce loans with interest and realize the program to convert loans into equity, enabling the Company to engage in strategic partnership, which would support business development in the long term. Refinancing and restructuring with CIC is expected to be intensified and applied for other loans with interest. Therefore, future interest expense may be managed at a level that would have a positive impact on the Company's financial performance.

Liabilitas Jangka Panjang (Dalam US\$)

Non Current Liabilities (In USD)

Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change	Komposisi Composition 2014	Komposisi Composition 2013
Utang Pihak Berelasi Due To Related Parties	67,815,582	78,568,187	(10,752,605)	15.6%	3.0%
Liabilitas Pajak Tangguhan-Neto Deferred Tax Liabilities Net	76,390,366	103,072,761	(26,682,395)	17.6%	4.0%
Liabilitas Imbalan Pasti Pascakerja Post-Employment Benefit Liabilities	31,093,312	32,997,064	(1,903,752)	7.1%	1.3%

Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Long Term Liabilities-Net of Current Maturities

Pinjaman Jangka Panjang Long Term Loans	191,768	2,032,136,710	(2,031,944,942)	0.04%	78.6%
Utang Sewa Pembiayaan Finance Lease Payables	82,475,998	134,796,912	(52,320,914)	18.96%	5.2%
Taksiran Liabilitas Restorasi dan Rehabilitasi Estimated Liability for Restoration and Rehabilitation	176,929,902	205,381,683	(28,451,781)	40.68%	7.9%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	434,896,928	2,586,953,317	(2,152,056,389)	100.0%	100.0%

Modal saham meningkat sebesar 9,3% dan tambahan modal disetor menurun 23,5% karena Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas bulan September 2014. Adanya Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas pada Entitas Pengendalian Bersama sebesar USD306,8 juta Bersama Entitas disebabkan karena penyelesaian utang perusahaan dengan Recapital sebagai bagian dari restrukturisasi kredit CIC.

The Capital stock increased by 9.3% and the Additional Paid-in Capital decreased by 23.5% due to the Company's rights issue in September 2014. The USD306.8 million shown in the Difference in The Change In Equity Transaction In Jointly Controlled Entities, was due to the Company's settlement with Recapital as part of the CIC loan restructuring.

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(Dalam US\$)

Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change
Pendapatan Revenues	2,786,067,095	3,547,424,427	-21.5%
Beban Pokok Pendapatan Cost Of Revenues	2,298,607,757	2,861,220,277	19.7%
Laba Bruto Gross Profit	487,459,338	686,204,150	-29.0%
Beban Usaha Operating Expenses			
Penjualan Selling	220,463,479	263,291,275	16.3%
Umum dan Adminstrasi General And Administrative	204,039,394	192,865,760	-5.8%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	424,502,873	456,157,035	7.0%
Laba Usaha Operating Income	62,956,465	230,047,115	-72.6%
Penghasilan (Beban Lain-Lain) Other Income (Expenses)			
Penghasilan Bunga Interest Income	59,325,906	56,942,150	4.2%
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expenses and Finance Charges	(864,160,519)	(660,954,644)	-30.7%
Rugi Selisih Kurs-Neto Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net	127,098,786	(136,806,919)	192.9%
Rugi atas transaksi derivatif Loss On Derivative Transactions - Net	3,446,501	(100,782,434)	103.4%
Rugi Neto Penjualan atas Entitas Anak Gain (Loss) on Sale of Investment In a Subsidiary	949,520,959	(50,429,227)	1,983.0%
Bagian atas Rugi Neto Entitas Asosiasi Equity in Net Loss of Associates	(43,921,039)	(40,340,672)	-10.3%
Penghapusbukuan Aset Asset Write-off	-	(26,443,282)	100.0%
Penurunan Nilai Impairment Losses	(238,456,830)	-	-100.0%
Beban Amortisasi Amortization Expenses	(54,304,695)	(27,545,179)	-97.1%
Klaim Claims	(195,153,606)	(30,748,622)	-534.7%
Denda dan Koreksi Pajak Tax Penalties and Corrections	(120,308,938)	(29,882,415)	-302.6%
Lain-Lain Neto Others - Net	10,831,592	71,705,216	-85.0%
Jumlah Beban Lain-lain - Neto Other Income (Expenses) - Net	(372,974,885)	(975,286,028)	61.8%
Rugi sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Loss before Income Tax Benefit (Expense)	(310,018,420)	(745,238,913)	58.4%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto Income Tax Benefit (Expense) - Net	(155,886,244)	85,135,436	-283.1%
Rugi Neto Net Loss	(465,904,664)	(660,103,477)	29.4%
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain Other Comprehensive Income (Loss)			

B. STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

(In USD)

(Dalam US\$)	(In USD)		
Keterangan Description	2014	2013	Perubahan Change
Kenaikan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Increase In Fair Value of Available - for-Sale Financial Assets	-	5,793,835	-100.0%
Penyelesaian Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual Settlement of Available - for-Sale Financial Assets	-	(38,664,561)	100.0%
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Differences due to Financial Statements Translation	(1,988,061)	(2,135,013)	6.9%
Pendapatan (Beban) Komprehensif lain Other Comprehensive Income (Loss)	(1,988,061)	(35,005,739)	94.3%
Rugi Komprehensif neto Net Comprehensive Loss	(467,892,725)	(695,109,216)	32.7%
Rugi Neto yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Loss Attributable to:			
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	(387,988,157)	(609,013,918)	36.3%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	(77,916,507)	(51,089,559)	52.5%
Total	(465,904,664)	(660,103,477)	29.4%
Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham Dasar (dalam lembar saham) Weighted Average Number of Ordinary Shares/Diluted Shares (Full Amount)	25,314,621,723	20,300,187,393	24.7%
Laba (Rugi) per Saham (US\$ per 1.000 saham) Basic/Diluted Loss (USD Per 1,000 Shares)	(15.33)	(30)	48.9%
EBITDA	245,099,755	623,831,874	-60.7%

Pendapatan

Pendapatan dari penjualan turun 21,5% kendati BUMI berhasil meningkatkan volume penjualan sebesar 3,25%. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh rendahnya harga batu bara dan berkurangnya kepemilikan di KPC, dari 65% menjadi 51%. Realisasi harga batu bara turun dari USD 63,8/ton pada 2013, menjadi USD 52,7/ton pada tahun 2014.

Beban pokok pendapatan turun 19,7% karena turunnya rasio pengupasan, turunnya biaya bahan bakar serta peningkatan efisiensi di tambang. Peningkatan efisiensi ini termasuk peningkatan Efisiensi Peralatan Operasional, seperti pengurangan waktu siklus dan peningkatan utilisasi. Hal ini adalah bagian dari Proyek Membara, sebuah program yang diperkenalkan di KPC oleh McKinsey Consultants.

EBITDA

Berbagai upaya yang dilakukan di bidang operasional membuat BUMI di tahun 2014 membukukan EBITDA sebesar USD 245,1 juta, turun 60,7% dari USD 623,8 juta di tahun 2013. Penurunan terutama disebabkan oleh pelemahan rata-rata harga batu bara.

Beban Lain-lain

Secara keseluruhan, BUMI mencatat penurunan 61,8% pada beban lain-lain, dari USD 975,3 juta di tahun 2013 menjadi USD 373.0 juta.

Revenues

Revenue from sales decreased by 21.5%, although sales volume increased by 3.25%. The revenue decrease was due to lower coal prices and the reduced ownership in KPC, from 65% to 51%. Realized prices fell from USD 63.8/ton in 2013, to USD 52.7/ton in 2014.

Cost of revenues decreased by 19.7% due to lower strip ratios, reduced fuel costs and efficiency improvements at the mines. The efficiency improvements included increases in Operational Equipment Efficiencies such as reduced cycle times and increased utilization. These were part of Project Membara, a program introduced at KPC by McKinsey Consultants.

EBITDA

With initiatives taken in operations, BUMI's 2014 EBITDA was recorded at USD 245.1 million, down by 60.7% from USD 623.8 million. The decrease was mainly driven by the low coal prices.

Other Expenses

Overall, BUMI recorded a total of USD 373.0 million of other expenses, down by 61.8% from USD 975.3 million in 2013.

Komponen utama dari beban lain-lain adalah:

- Laba dari penjualan 19% saham KPC (USD949,5 juta)
- Beban bunga dan beban keuangan (USD 864,1 juta)
- Kerugian akibat penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi (USD 238,4 juta)

The major component of other expenses were:

- Profit from sale of KPC 19% (USD949.5 million)
- Interest expenses and finance charges (USD 864.1 million)
- Impairment loss on exploration and evaluation assets (USD 238.4 million)

C. ARUS KAS

BUMI mencatat neraca kas positif pada tahun 2014, sebesar USD 32,5 juta, seperti tampak pada tabel di bawah, dengan penjelasan sebagai berikut.

C. CASH FLOWS

BUMI recorded a positive cash balance in 2014, amounted to USD 32.5 million as shown in the table below and with the following analysis.

Keterangan (Dalam USD)	2014	2013	Perubahan Change	Description (In USD)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	61,065,639	29,290,917	108.5%	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(14,733,764)	112,716,624	-113.1%	Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(58,588,885)	(139,997,400)	141.9%	Cash Flows from Financing Activities
Efek Perubahan Nilai Kurs pada Kas	(773,175)	(1,612,661)	52.1%	Effect of Exchange Rate Changes on Cash
Kenaikan (Penurunan) Kas Neto	(13,030,185)	397,480	-3,378.2%	Net Increase (Decrease) in Cash
Kas pada Awal Tahun	45,553,173	45,155,693	0.9%	Cash at Beginning of Year
Kas pada Akhir Tahun	32,522,998	45,553,173	-28.6%	Cash at End of Year

Perseroan memperoleh arus kas masuk bersih dari kegiatan operasi. Pada tahun 2014, Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meningkat 108,5%, karena turunnya pengeluaran untuk pemasok, serta beban bunga dan beban pembiayaan. Di sisi lain, Kas Bersih dari Aktivitas Investasi menurun 113,1%, karena rendahnya kegiatan investasi yang. Arus kas dari aktivitas pendanaan berkurang karena menurunnya jumlah pinjaman dan *refinancing* yang dilakukan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

The Company earned net cash flows from operating activities. In 2014, Net Cash from Operating Activities increase by 108.5%, due to reduction in payments to suppliers and interest and finance charges. On the other hand, Net Cash from Investment Activities decreased by 113.1%, due to low investment activities. Cash flow from financing activities reduced as less borrowing and refinancing was undertaken in 2014 compared to 2013.

Hasil operasional ini kemudian digunakan untuk membayar kewajiban para pemasok, karyawan dan lain-lain, membayar pajak dan kewajiban kepada pemerintah serta membayar bunga dan beban keuangan. Total kas neto dari kegiatan operasi adalah sebesar USD 61,1 juta.

The operating income was used for payments to suppliers, employees, and others; payments of taxes and obligations to government, as well as payments of interest and finance charges. In total, the net cash flows from operating activities amounted to USD 61.1 million.

Dari kegiatan investasi, BUMI menerima pengembalian biaya proyek pengembangan usaha, penerimaan wesel tagih dan penurunan piutang pihak berelasi. Penerimaan kas tersebut digunakan untuk membeli aset tetap dan pembayaran asset eksplorasi dan evaluasi serta pinjaman kepada pihak ketiga. Total BUMI mencatatkan arus kas negatif dari kegiatan investasi sebesar USD 14,7 juta.

From its investing activities, BUMI received a refund from business development project costs, proceeds, from settlement of notes receivables and decrease in receivable from related parties. The cash flows were used for the acquisition of fixed assets; payment of exploration and evaluation assets; and loans to third parties. BUMI recorded a total negative cash flow from investing activities amounted to USD 14.7 million

Dari sisi pendanaan, BUMI memperoleh kas dari pinjaman-pinjaman yang baru diterima sebesar USD 61,8 juta dan penarikan kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD36,3 juta. Penerimaan kas dari aktivitas pendanaan diimbangi dengan pembayaran atas pinjaman sebesar USD 36,4 juta, pembayaran atas utang sewa pembiayaan sebesar USD 87,1 juta dan pembayaran kewajiban terhadap pihak berelasi senilai USD 33,3 juta. Dengan demikian BUMI mencatat penurunan kas

In terms of financing, BUMI received cash inflows from current loans amounted to USD 61.8 million, and additional cash withdrawal from previously restricted bank accounts amounting to USD36.3 million. This was offset by the payment of loans amounting to USD 36.4 million, payment of leasing amounting to USD 87.1 million, and payment of due to related parties amounted to USD 33.3 million. Thus BUMI recorded less cash

bersih dari aktivitas pendanaan sebesar USD 58,6 juta. Secara keseluruhan, BUMI mencatat penurunan arus kas bersih sebesar USD 13.0 juta.

D. KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Terkait harga batu bara yang masih rendah dan beban utang terkini, BUMI tengah bernegosiasi dengan kreditor untuk mengurangi beban utang ke tingkat berkelanjutan, sebagai bagian dari Moratorium Pengadilan Singapura. Kesepakatan ini harus tercapai pada tahun 2015 untuk menjaga kemampuan BUMI membayar utang.

E. STRUKTUR PERMODALAN

(Dalam US\$)

Keterangan Description	2014	Komposisi Composition 2014
Liabilitas Liabilities	7,233,570,276	111.3%
Ekuitas Equity (Capital Deficiency) – Net	(733,041,358)	-11.3%
Jumlah Modal Total Liabilities And Equity (Capital Deficiency)	6,500,528,918	100.0%

F. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada tanggal 21 Mei 2015, BUMI melalui anak perusahaannya, Bumi Capital, Bumi Investasi dan Enercoal, mengajukan perpanjangan moratorium lima bulan kepada Pengadilan Tinggi Singapura, yang telah diberikan sebelumnya berdasarkan Singapore Companies Act, Section 210 (10). Moratorium tersebut diberikan pada tanggal 24 November 2014 dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei 2015. Pengadilan mengabulkan permintaan tersebut dan memperpanjang moratorium dari 24 Mei 2015 hingga 24 Oktober 2015. Perpanjangan moratorium ini akan membantu restrukturisasi utang yang sedang berlangsung di Perseroan dan anak perusahaannya.

G. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan penjelasan Prospektus pada saat proses Go Public BUMI memiliki kebijakan pembagian dividen. Realisasi pembagian dividen setiap tahun operasional ditetapkan dalam RUPS untuk tahun buku bersangkutan. Adapun kebijakan umum mengenai pembagian dividen laba usaha mencakup:

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Laba bersih tersebut akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasinya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.

Sejak tahun 2005, BUMI konsisten membagikan dividen hasil operasional tahun buku bersangkutan. Terakhir kali BUMI membagikan dividen adalah pada bulan Juli 2012 untuk tahun buku 2011 sebesar Rp14,31 per saham.

used for financing activities amounting to USD 58.6 million. In overall, BUMI recorded a decrease in nett cash flow of USD 13.0 million.

D. SOLVENCY

Due to the continuing low coal prices and it's current debt burden, BUMI is in negotiations with it's lenders to reduced it's debt to sustainable levels, as part of the Singapore Courts Moratorium. It is imperative that an agreement is reached in 2015 in order for BUMI to remain solvent.

E. CAPITAL STRUCTURE

(In USD)

F. EVENTS SUBSEQUENT TO REPORTING PERIOD

On May 21, 2015, the Company through its subsidiaries Bumi Capital, Bumi Investment and Enercoal applied to the Singapore High Court for a five-month extension of the moratorium previously granted under Section 210 (10) of the Singapore Companies Act. The moratorium, originally granted on 24 November 2014, was due to expire on 24 May 2015. The Court granted the orders sought and extended the moratorium from 24 May 2015 to 24 October 2015. The extension to the moratorium will facilitate the ongoing debt restructuring efforts of the Company and its subsidiaries.

G. DIVIDEND POLICY

As stated in the Prospectus issued during the initial public offering, BUMI has set dividend policy. Realization of dividend payout of each operating year shall be established during GMS of the relevant fiscal year. The general policy regarding dividend distribution includes:

1. The Company's net income of a fiscal year as stated in the balance and profit/loss statements ratified by the Annual General Meeting of Shareholders is appropriated according to the resolutions of the meeting.
2. Net income shall be utilized for reserves, dividends, and others, which percentage will be set each year by GMS.

Since 2005, BUMI consistently distributes dividends from its income of the relevant fiscal year. BUMI's last dividend payout was in July 2012 for the fiscal year 2011 of Rp14.31 per share.

H. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

1. Jumlah dana yang diperoleh.

Jumlah saham dari PUT = 15.853.620.427 @ Rp 250 per lembar saham

2. Dana LPO

Hasil:

- Konversi pinjaman dari CIC menjadi penyertaan 6.900.000.000 saham
- Konversi pinjaman dari Castleford menjadi penyertaan 6.900.000.000 saham
- Modal Kerja 2.053.620.427 saham

3. Tanggal RUPS untuk Persetujuan Perubahan Dana LPO (30 Juni 2014)

I. INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, RESTRUKTURISASI HUTANG / MODAL.

• Investasi

Perseroan tidak melakukan investasi selama periode pelaporan

• Ekspansi

Pembahasan tentang ekspansi melalui investasi disajikan dalam bagian "Strategi Bisnis"; sedangkan penggabungan perusahaan baru disajikan dalam bagian "Anak Perusahaan" dan "Profil Perusahaan".

• Divestasi

Pembahasan divestasi dapat dilihat di bagian "Beban lain".

• Merger Perusahaan

Perseroan tidak melakukan merger selama periode pelaporan

• Akuisisi

Perseroan tidak melakukan akuisisi selama periode pelaporan

J. TRANSAKSI PENTING YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA.

H. THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS REALIZATION FUNDS

1. Total funds acquired.

Total shares from Rights Issue = 15,853,620,427 @ Rp 250 per share

2. LPO Proceeds

Proceeds:

- CIC loan debt to equity conversion 6,900,000,000 shares
- Castleford debt to equity conversion 6,900,000,000 shares
- Working Capital 2,053,620,427 shares

3. Date of GMS Approval on LPO Proceeds Amendment (June 30, 2014)

I. INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING.

• Investments

There was no investments that took place during the reporting period

• Expansion

Discussion on expansion through investments is presented in "Business Strategy" section, while incorporation of new company is presented in "Subsidiary" and "Company Profile" sections.

• Divestments

Discussion on divestments is available under "Other Expenses" section.

• Company Merger

There was no merger that took place during the reporting period.

• Acquisition

There was no acquisition that took place during the reporting period

J. MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES.

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Relasi Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, IndoCoal Resources (Cayman) Limited, PT IndoCoal Kalsel Resources, dan/and PT IndoCoal Kaltim Resources	Entitas pengendalian bersama/ Jointly controlled entities	Piutang/utang akibat efek metode konsolidasian proporsional/ Receivables/payables due to the effect of proportionate consolidation method
PT Petromine Energy Trading	Perusahaan afiliasi/Affiliate	Pembelian bahan bakar/Purchases of fuel

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Relasi Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Energi Mega Persada Tbk, PT Bakrie Capital Indonesia	Perusahaan afiliasi/Affiliate	Beban-belan tertentu perusahaan afiliasi/entitas asosiasi/entitas induk yang dibayar di muka oleh Kelompok Usaha/ Certain expenses paid in advance by the Group in behalf of affiliates/parent
PT Artha Widya Persada dan/ PT Visi Multi Artha	Entitas asosiasi/Associates	
Darma Henwa Tbk	Entitas asosiasi/Associate	Uang muka untuk alat berat dan modal kerja dan utang untuk kontraktor pertambangan/ Advances for acquisitions of heavy machinery and working capital and payables as mining contractor
Citra Kusuma Perdana	Perusahaan afiliasi/affiliate	Biaya jasa untuk penggunaan aset tertentu dari afiliasi/ Service fees for use of certain assets of the affiliate
Dana Pensiun Kaltim Prima Coal	Perusahaan afiliasi/affiliate	Administrasi untuk program pensiun imbalan pasti/ Administration to defined benefit pension plan

K. PERUBAHAN PERATURAN YANG MEMBAWA DAMPAK PENTING TERHADAP PERUSAHAAN

Perseroan akan menggunakan PSAK No. 66 tentang Pengaturan Bersama yang diadopsi dari IFRS 11, efektif sejak 1 Januari 2015. PSAK ini menggantikan PSAK 12 (2009) dan ISAK 12. PSAK ini menghapus opsi untuk mencatat pengendalian bersama entitas menggunakan konsolidasi proporsional. Hal ini berarti bahwa Pendapatan dan Beban dari perusahaan batu bara yang dimiliki Bumi tidak lagi ditampilkan secara detail tetapi hanya satu baris dalam Laporan Keuangan. Hal ini karena kedua perusahaan batu bara tersebut, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin merupakan perusahaan Joint Ventures.

L. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA

Sepanjang tahun 2014 tidak terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang membawa dampak material bagi Perseroan.

M. PROYEKSI BISNIS 2015

Perseroan memperkirakan bahwa tahun 2015 masih merupakan tahun yang menantang karena masih rendahnya harga batu bara. BUMI memfokuskan upayanya pada pengurangan biaya di tingkat operasional dan kantor pusat. Upaya negosiasi restrukturisasi utang BUMI adalah tentunya juga merupakan bagian penting dari proses ini.

BUMI berharap bahwa produksi batu baranya akan terus berkembang dengan jalan memaksimalkan kapasitas infrastruktur dan mengurangi itu beban usaha per ton.

K. CHANGES IN REGULATION THAT HOLDS SIGNIFICANT IMPACT TO THE COMPANY

The Company will use PSAK No. 66 about Joint Arrangement adopted from IFRS 11, effective January 1, 2015. This PSAK replaces PSAK 12 (2009) and ISAK 12. This PSAK removes the option to account for jointly controlled entities using proportionate consolidation. This means that Revenue and Costs from Bumi's coal companies will now no longer be shown in detail but as one line in the Financial Statements. This is because both Coal companies, Kaltim Prima Coal and Arutmin are Joint Ventures.

L. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND ITS IMPACT

Throughout 2014, there was no changes in the accounting policies that have any material impact for the Company.

M. BUSINESS PROJECTIONS 2015

The Company expects 2015 to be a difficult year as the low coal price trend continues. BUMI is focused on cost reduction at both the operational and head office level. Naturally, BUMI's debt restructuring negotiations is a vital part of this process.

BUMI expects its coal operations to continue to expand as it maximizes its infrastructure capacity and further reduces its operating costs per ton.



LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

A. PENDAHULUAN

Tujuan dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang mengarahkan dan mengatur bagaimana usaha dan aktivitas perusahaan harus dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengembangkan nilai jangka panjang dari pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan serta pertanggungjawabannya, dan juga mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak lainnya.

Prinsip-prinsip *Good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif di seluruh BUMI sehingga menghasilkan pandangan dan praktik kerja yang konsisten dalam setiap unit usaha BUMI.

A. INTRODUCTION

The Objectives and Implementation of Corporate Governance

Corporate governance is defined as the processes and structures by which the business and affairs of the company are directed and managed, in order to enhance long-term shareholder value through enhancing corporate performance and accountability, whilst taking into account interest of other stakeholders.

Good corporate governance can be effectively implemented by BUMI by promoting the principles of corporate governance throughout BUMI resulting in a consistent mindset and working practices in each business unit of BUMI.

BUMI berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik, yang juga mencerminkan kepatuhannya pada peraturan di Indonesia. Kami percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam menambah nilai bagi para pemangku kepentingan.

BUMI is committed to implementing standards of good corporate governance. For BUMI, the implementation of good corporate governance is a reflection of compliance and commitment to regulations in Indonesia and we believe that implementing good corporate governance is essential for BUMI to add more value for stakeholders.

Prinsip dari *good corporate governance* BUMI adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparansi)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan secara tepat waktu, jelas, dan konsisten dalam hal kinerja keuangan perusahaan, *corporate governance*, serta kepemilikan perusahaan.

2. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Kejelasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dari pengelola perusahaan serta pengawasan yang dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham.

3. Tanggung Jawab

Kejelasan dan kesesuaian tugas dan fungsi dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

4. Kemandirian (Independensi)

Pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak dalam maupun luar perusahaan.

5. Kewajaran

Memastikan adanya perlindungan dan perlakuan yang adil/ setara terhadap hak-hak pemegang saham, termasuk hak dari pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, serta meyakini kewajaran pelaksanaan kontrak-kontrak yang dibuat dengan penyedia jasa.

BUMI berkomitmen untuk menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik, yang juga mencerminkan kepatuhannya pada peraturan di Indonesia. Kami percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam menambah nilai bagi para pemangku kepentingan.

Tujuan dari penerapan kebijakan *good corporate governance* BUMI adalah untuk:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, pertanggung-jawaban, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing BUMI baik secara nasional maupun internasional, guna menciptakan suatu lingkungan yang mendukung investasi/ penanaman modal.

The principles of good corporate governance for BUMI is as follows:

1. Transparency

Transparency in the decision making processes, timely, clear and consistent disclosure material and relevant information concerning corporate financial performance, corporate governance and corporate ownership.

2. Accountability

Clarifying the conduct and accountability of governance roles and responsibility and monitoring to ensure the alignment of management and shareholder interest.

3. Responsibility

Clarifying and alignment of the roles and responsibility of corporate governance to be in compliance with relevant laws and regulations.

4. Independence

Corporate governance is conducted in a professional manner without conflict of interest and free from any influence or pressure from internal and external parties.

5. Fairness

Ensuring the protection and equal treatment of shareholder rights, including the rights of minority and foreign shareholders and ensuring the enforceability of contracts with resources providers.

BUMI is committed to implementing standards of good corporate governance. For BUMI, the implementation of good corporate governance is a reflection of compliance and commitment to regulations in Indonesia and we believe that implementing good corporate governance is essential for BUMI to add more value for stakeholders.

The objectives of implementing good corporate governance policy set forth in BUMI are:

1. To maximize corporate and shareholder value by enhancing transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in order to strengthen BUMI's competitive position both domestically and internationally and to create a sound environment to support investment.

2. Mendorong manajemen BUMI agar bersikap secara profesional, terbuka, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan mengembangkan kemandirian dari Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat umum pemegang saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar membuat keputusan dan bertindak dengan dilandasi moralitas yang tinggi, sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai pihak-pihak berkepentingan serta perlindungan terhadap lingkungan.

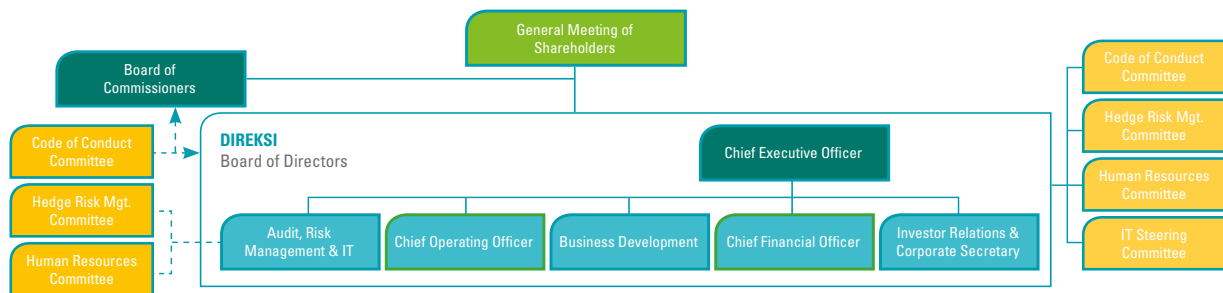
Pedoman, Struktur, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tata Kelola

BUMI telah mempunyai kumpulan kebijakan tata kelola perusahaan yaitu "Cara Kerja Yang Diharapkan Dari Kita" yang merupakan suatu kumpulan kebijakan *corporate governance* yang dibuat, diterapkan dan menjadi pedoman penerapan GCG oleh BUMI dan anak perusahaannya.

Di dalamnya termasuk pengaturan atas kebijakan-kebijakan berikut:

- Visi, Misi, Nilai, dan Pedoman Perilaku.
- Rencana Strategis, Rencana Usaha, Perencanaan Keuangan (Anggaran), dan Pengawasan Kinerja.
- Pemegang saham.
- Dewan Komisaris dan Direksi.
- Sistem Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Audit.
- Pihak-pihak yang berkepentingan.
- Keterbukaan (transparansi) dan Pengungkapan.
- Benturan Kepentingan

Struktur Tata Kelola Perusahaan



BUMI memiliki sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Batasan ini diangkat dan ditentukan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham, sementara persetujuan mereka juga diperlukan dalam mendelegasikan kewenangan ke bawah melalui keputusan atau perubahan Anggaran Dasar.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

2. To encourage the management of BUMI to behave in a professional, transparent and efficient manner as well as optimizing the use of and enhancing the independence of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the general meeting of shareholders.
3. To encourage shareholders, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to make decisions and to act with strict sense of morality in compliance with their social responsibility towards the various stakeholders and the protection of the environment.

Guidance, Structure, Policies, and Implementation of Corporate Governance

BUMI has a set of corporate governance guidelines, namely "The Way We Are Expected to Work". Those policies are developed, adopted and serves as guidelines for BUMI and its subsidiaries.

This includes the following policies:

- Vision, Mission, Value, and Code of Conduct
- Strategic Plan, Business Plan, Budgeting and Performance Monitoring.
- Shareholders
- The Board of Commissioners and Board of Directors
- Risk Management, Internal Control, and Audit Systems
- Stakeholders
- Transparency and Disclosure
- Conflict of Interest

Corporate Governance Structure

Within BUMI, there is an established system for ensuring that accountability and responsibility for decision making is correctly distributed. These limits are initially and finally determined by shareholders. General Meeting of Shareholders' approval is needed to transfer authority down the line by resolutions or changes to the Articles of Association.

B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a meeting attended by the Shareholders who meet with quorum requirements, and called by the Board Directors according to the request of the Boards of Commissioners or Directors or Shareholders who represent 1/10 of all shares, in order to take critical decisions related with the invested capital in the Company and/ or to take decisions on the matters in which the Boards of Directors or Commissioners are not authorized.

Hak Pemegang Saham harus dilindungi agar Pemegang Saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak Pemegang Saham BUMI pada dasarnya meliputi namun tidak terbatas pada:

- Memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan prinsip bahwa Pemegang Saham dengan jenis dan klasifikasi yang sama mempunyai kedudukan yang setara di dalam Perusahaan;
- Menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara berkala, tepat waktu, benar dan teratur;
- Menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Hak-hak Pemegang Saham

Melalui mekanisme RUPS, Pemegang Saham BUMI juga memiliki hak-hak yang meliputi namun tidak terbatas pada:

- Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menentukan sistem remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Menilai kinerja dari Dewan Komisaris dan Direksi;
- Mensahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal;
- Menetapkan laporan tahunan Perusahaan yang sebelumnya telah ditelaah oleh Dewan Komisaris atas kinerja pengurusan Perusahaan yang telah dilaksanakan Direksi selama tahun buku yang lalu;
- Menyetujui rencana usaha dan keuangan Perusahaan;
- Menunjuk auditor eksternal Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Pada tahun 2014, BUMI menyelenggarakan RUPST pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau perwakilannya yang secara keseluruhan mewakili total sebanyak 11.590.601.384 saham atau sebesar 55,80% saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini.

Dalam RUPST ini dikeluarkan beberapa keputusan dan didokumentasikan oleh Notaris Humbert Lie SH, SE, MKn. (Nomor Keputusan 195 Tanggal 30 Juni 2014), yaitu:

Shareholder rights should be protected so that Shareholders may apply its rights under the Articles of Association and applicable laws.

BUMI shareholder rights include, but not limited to, the following:

- Receiving equal treatment based on the principle that the holders of the same type of share has equal position within the Company;
- Attending and exercising voting rights at General Meetings of Shareholders on the basis of one share one vote, entitling its holder to exercise one vote;
- Receiving regular, timely and accurate material information related to the Company;
- Receiving profits from the Company in the form of dividend payments that are paid on the basis of the number of shares owned.

Shareholders Rights

Through the General Meeting of Shareholders mechanism, BUMI's Shareholders also have rights which include, but are not limited to:

- Appointing and terminating members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Determining the remuneration system for members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Evaluating the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Endorsing the financial statements audited by an external auditor;
- Endorsing the Board of Director's annual report which was previously reviewed by the Board of Commissioners on the Board of Director's performance during financial year ago;
- Approving the Company's business and financial plans;
- Appointing an external auditor for the Company.

GMS Implementation

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

In 2014, BUMI conducted its AGMS on 30 June 2014 at Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. The meeting was attended by shareholders or shareholder proxies representing a total of 11,590.601,384 shares carrying valid voting rights, or 55.80% of all shares which has been issued by the Company until the convening of the Meeting.

In this AGMS, several resolutions were passed and documented by Notary Humbert Lie, SH, SE, MKn. (Resolution Number 195 dated 30 June 2014), as follows:

Agenda Pertama:

Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. 2014/T2/03.28.04 Tanggal 28 Maret 2014.
b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Kedua:

Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Agenda Ketiga:

Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dengan keputusan sebagai berikut: Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2014 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat:

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, adalah sebagai berikut:

First Agenda:

Approval of the Report of the Board of Directors Responsibility for the operations of the Company for the year ended December 31, 2013, with following decisions:

1. To approve the Company's Annual Report, key points of which were notified by the Board Directors of the Company and reviewed by Board of Commissioners regarding the conditions and running of the Company for financial year ended on 31 December 2013.
2. a. To approve Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2013, audited by Public Accounting Office Tjiendradjaja & Handoko Tomo with an unqualified opinion as set out in its report No. 2014/T2/03.28.04 of 28 March 2014.
b. To grant full release and discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory activities for financial year ended 31 December 2013 (*acquit et de charge*) so long as and to the extent that their actions are reflected in Annual Report and Financial statements of the Company for financial year ended on 31 December 2013 and not contradictory to laws and regulations.

Second Agenda:

Ratification of the Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2013. The following decisions:

1. To declare that due to the loss experienced by the Company, the Company is unable to distribute dividends to shareholders for financial year ended on 31 December 2013.
2. To grant powers and authority to the Board of Directors of the Company to take any necessary action in relation to the resolutions.

Third Agenda:

Appointment of External Auditor to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2014. With the decision as follows: To approve and grant powers and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant to conduct an audit of the Company's financial statements of the Company for financial year ended 31 December 2014 and/or for certain period throughout 2014, as well as grant powers and authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of public accountant, as well as other requirements for its appointment.

Fourth Agenda:

Determination of the Board of Directors and Board of Commissioners. With the decision as follows:

1. To appoint and reconfirm the composition of Boards of Commissioners and Directors of the Company as described below, with terms of office commencing on the conclusion of this Meeting, as follows:

Dewan Komisaris:

- Kusumo Abujono Martoredjo : Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
- Suryo Bambang Sulisto : Komisaris Independen
- Iman Taufik : Komisaris Independen
- Fuad Hasan Mahsyur : Komisaris Independen
- Nalinkant A. Rathod : Komisaris
- Anton Setianto Soedarsono : Komisaris
- Sulaiman Zuhdi Pane : Komisaris

Direksi:

- Saptari Hoedaja : Presiden Direktur
- Andrew Christopher Beckham : Direktur
- Dileep Srivastava : Direktur
- Kenneth Patrick Farrell : Direktur
- Eddie Juninato Subari : Direktur
- Raden Ajeng Sri Dharmayanti : Direktur

Board of Commissioners

- Kusumo A. Martoredjo : President Commissioner and Independent Commissioner
- Suryo B. Sulisto : Independent Commissioner
- Iman Taufik : Independent Commissioner
- Fuad Hasan Masyhur : Independent Commissioner
- Nalinkant A. Rathod : Commissioner
- Anton S. Soedarsono : Commissioner
- Sulaiman Zuhdi Pane : Commissioner

Directors

- Saptari Hoedaja : President Director
- Andrew Christopher Beckham : Director
- Dileep Srivastava : Director
- Kenneth Patrick Farrell : Director
- Eddie Juninato Subari : Director
- Raden Ajeng Sri Dharmayanti : Director

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
4. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa, dan tunjangan lainnya (bila ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan untuk mendiskusikan dan memutuskan agenda-agenda selain yang telah diuraikan pada RUPST dan sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

Secara individual, Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB. Direksi dan Dewan Komisaris dapat memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB berdasarkan permohonan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara kolektif mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham Perseroan yang secara hukum memiliki hak suara. Permohonan tertulis untuk RUPSLB harus diserahkan dan secara tertulis harus mengindikasikan hal-hal yang perlu didiskusikan serta alasan-alasannya.

Jika Direksi atau Dewan Komisaris gagal menyelenggarakan RUPSLB dalam waktu 30 hari setelah penyampaian permohonan tertulis, pemegang saham yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyelenggarakan rapat atas biaya Perusahaan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri tempat Perusahaan beroperasi.

2. To grant full powers and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either severally or jointly, to perform any acts deemed necessary related to the resolutions as adopted and/or resolved in this Meeting, including but not limited to, stating the appointment of members of the Boards of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed and register the composition of Boards of Commissioners and Directors as mentioned above in Company Register in accordance with applicable law and regulations.
3. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well as distribution of duties and responsibilities of each Director.
4. To approve distribution of authority to the Board of Directors, along with Board of Commissioners to determine honorarium and other allowances (if any), for each Commissioner.

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

An EGMS can be conducted at any time according to the Company's needs, to discuss and decide meeting agenda other than the agenda items elaborated at an AGM and in accordance with prevailing laws and the Articles of Association.

The Board of Directors or the Board of Commissioners is individually duly authorized to convene EGMS. The Board of Directors and Board of Commissioners are required to summon and convene the EGM based on a written request of 1 (one) or more shareholders who collectively represents 1/10 (one tenth) of the Company's total shares that legally possess voting rights. This written request for the EGM must be submitted and shall indicate in writing the matters that need to be discussed as well as their reasons.

If the Board of Directors or Board of Commissioners fails to convene the EGM within 30 days after the written request has been submitted, the respective shareholder has the right to convene the meeting at Company expense subject to the approval of the Judge of a District Court whose jurisdiction covers the domicile of the Company.

Pada tahun 2014, RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Balai Kartini dengan agenda:

- a. Persetujuan untuk pengalihan saham-saham milik Perseroan di dalam PT Kaltim Prima Coal ("KPC") dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan utang Perseroan kepada CIC, dan pembelian saham-saham milik PT Kutai Timur Sejahtera di KPC oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2
- b. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Perubahan struktur modal saham Perseroan dan perubahan serta penegasan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran sehingga tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

Pada tanggal 3 April 2014 bertempat di Balai Kartini, diselenggarakan RUPSLB dengan agenda yang sama seperti RUPSLB tanggal 10 Januari 2014. RUPSLB ini dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan saham-saham milik Perseroan di dalam PT Kaltim Prima Coal ("KPC") dan PT Bumi Resources Minerals Tbk., sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan utang Perseroan kepada CIC dan pembelian saham-saham milik PT Kutai Timur Sejahtera di KPC oleh Perseroan atau anak perusahaan Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 dan juga sesuai dengan keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama tanggal 20 November 2013 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan negosiasi, meneruskan atau tidak meneruskan dan/atau mengambil tindakan yang dianggap baik sehubungan dengan rencana transaksi di atas.
- b. - Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan atau mengagunkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 UUPT.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 UUPT tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

In 2014, an EGMS was held on 10 January 2014 at Balai Kartini Kuningan, Jakarta with the following agenda:

- a. Approve to divert shares owned by the Company in PT Kaltim Prima Coal ("KPC") and PT Bumi Resources Minerals Tbk. as part of a debt-settlement of Company to CIC, and the purchase of shares owned by PT Kutai Timur Sejahtera in KPC by the Company or a subsidiary which will be implemented in accordance with regulation Bapepam-LK No. IX.E.2
- b. Approve the Company's plan to secure or to collateralize and divert most of the assets of the Company as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
- c. Changes in the share capital structure of the Company and Changes of Statements in the Articles of Association of the Company.

Because this EGMS did not meet quorum, decisions taken are not legally binding.

On 3 April 2014 at Balai Kartini, an EGMS was held with the same agenda as the previous EGMS. The meeting was stated legitimate and can take binding decisions, as follows:

- a. Approve to divert shares owned by the Company in PT Kaltim Prima Coal ("KPC") and PT Bumi Resources Minerals Tbk. as part of a debt-settlement of Company to CIC, and the purchase of shares owned by PT Kutai Timur Sejahtera in KPC by the Company or a subsidiary which will be implemented in accordance with regulation Bapepam-LK No. IX.E.2 and also in accordance with the disclosure of information to the shareholders of the Company in order to fulfill the Bapepam-LK No. IX.E.2 dated 20 November 2013 on material transactions and changes in main business activities as well as provide power and authority to the Board of Directors to carry out negotiations, continue or not to continue and / or take any actions deemed necessary in connection with the above transaction.
- b. - Approve the Company's plan to secure or to collateralize and divert most of the assets of the Company as required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies.
- Provides power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to implement the decision of the Company as required by Article 102 of the Company Law as mentioned above, including but not limited to making or request to make all deeds, letters and documents needed, appear before the party / competent authorities, including notaries, apply to parties / authorities to obtain approval or report the matter to the party / competent authority as defined in Regulation applicable legislation.

- c. - Menyetujui rencana Perseroan untuk mengubah struktur modal saham Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:
Modal dasar: Rp38.750.000.000.000,- yang terdiri dari saham Seri A sebanyak 20.773.400.000 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,- dan saham Seri B sebanyak 283.633.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,-
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Rp10.386.700.000.000 yang terdiri dari 20.773.400.000 saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,-
- Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan dan penyempurnaan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan pasal-pasal lainnya dan pernyataan serta penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Peraturan IX.J.1.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan, penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
 - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian putusan Rapat ini termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan bilamana diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan yang diperlukan pada perubahan Anggaran Dasar guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Selanjutnya Perseroan kembali menggelar RUPSLB pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham atau perwakilannya yang secara keseluruhan mewakili total sebanyak 11.696.260.084 saham atau sebesar 56,30% saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat ini.

RUPSLB ini telah menyetujui Agenda Tunggal Rapat sebagai berikut:
"Persetujuan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 ("PUT IV"), termasuk perubahan struktur permodalan sehubungan dengan PUT IV"
Dengan keputusan sebagai berikut:

- c. - Approved the Company's plan to change the capital structure of the Company, so as to be as follows:
Authorized Shares: Rp38,750,000,000,000, - which consists of 20,773,400,000 shares of Series A shares, with a nominal value of each share of Rp500, - and 283,633,000,000 shares of Series B shares with a nominal value of each share of Rp 100, -

The Issued and fully paid Capital:

Rp10,386,700,000,000 consisting of 20,773,400,000 of Series A shares with a nominal value of each share of Rp500, -.

- Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company in connection with additions and improvements to Article 14 paragraph (2), Article 15 paragraph (3), Article 17 paragraph (2) and other articles and statements as well as a reaffirmation of the Articles of Association of the Company in accordance with the provisions UUPT and Regulations IX.J.1.
- To confer power and authority to the Board of Directors to make changes, additions or adjustments as may be necessary to the Articles of Association of the Company which have been decided in this meeting, one way or another without any exceptions.
- To confer power and authorize the substitution rights to the Board of Directors to declare the decisions of the Meeting in a separate deed and perform all acts necessary in the whole or in part the decision of the Meeting, including changes in the Company's Articles of Association and, where necessary, apply for approval for the change of the Company's Articles of Association and inform Company data changes to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and related agencies, including but not limited to make changes and / or additions are necessary on an amendment to the approval of the competent authority.

The Company held another EGMS on 30 June 2014 at Hotel Gran Melia, Rasuna Said Jakarta. The meeting was attended by shareholders or shareholder proxies representing a total of 11,696,260,084 shares carrying valid voting rights, or 56.30% of all shares which had been issued by the Company as at time of convening the Meeting.

In this EGMS has approved the following Single Meeting Agenda:
"Approval of the Company to perform Rights Issue IV to the Shareholders on the issuance of Rights issue in accordance with Bapepam Regulation No. IX.D.1 ("LPO IV"), including changes in the capital structure in connection with the LPO IV"

With the following decisions:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 ("PUT IV") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 32.198.770.000 saham biasa atas nama Seri B dengan nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 8.049.692.500.000,- (delapan triliun empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), termasuk perubahan permodalan sehubungan dengan PUT IV.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT IV.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

C. DEWAN KOMISARIS

Panduan Kerja Untuk Dewan Komisaris/Charter

Sebagai panduan kerja bagi Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, independen, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan, maka melalui Surat Keputusan No. 721/BR-BOC/IX/11, Dewan Komisaris menetapkan suatu Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus yang disusun berdasarkan Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BUMI dan Anak Perusahaan, Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Komisaris Independen yang disusun oleh Task Force KNKG, The UK Corporate Governance Code yang dikeluarkan oleh Financial Reporting Council, Corporate Governance Rules dari New York Stock Exchange, dan Organization for Economic Co-operation and Development Principle of Corporate Governance.

Bab ini menjelaskan secara rinci hal-hal mengenai penunjukan, masa jabatan, dan komposisi, keterbukaan kepemilikan saham, sistem remunerasi, tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, larangan mengambil keuntungan pribadi, program orientasi, program pelatihan kerja dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja ini juga menjelaskan secara spesifik mengenai Komisaris Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah:

1. Membentuk Nilai
 - Memberikan saran dan petunjuk dalam pembentukan nilai, visi, misi, maksud, tujuan, kebijakan, rencana dan rencana keuangan Perusahaan;
 - Mengawasi secara efektif penerapan penyelenggaraan Perusahaan.

1. To approve the Company's plan to conduct Limited Public Offering IV through Rights Issue to the Shareholders in accordance with Rule of Bapepam No.IX.D.1 ("LPO IV") for a maximum of 32,198,770,000 ordinary Series B shares with a face value of Rp100,- apiece, offered at an exercise price of Rp250 apiece, totalling a maximum of Rp8,049,692,500,000 shares including change in capital structure in relation to LPO IV.
2. To approve the grant of powers and authority to the Board of Directors of the Company with the approval of Board of Commissioners of the Company for the issuance of new shares of the Company for the purpose of LPO IV.
3. To approve the grant of powers and authority to the Board of Directors of the Company to perform any acts deemed necessary in relation to LPO IV in accordance with applicable law and regulations, none excluded.

C. BOARD OF COMMISSIONERS

Board Manual

As a Guidelines for the Board of Commissioners to carry out their roles and responsibilities in a transparent, accountable, independent, competent and accountable, through Decision Letter No. 721/BR-BOC/IX/11, the Board of Commissioners endorsed a Board Manual in compliance with Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, Articles of Association BUMI and its subsidiaries, Indonesian Code of Good Corporate Governance, by National Committee for Governance Policy (KNKG), Guidelines for Independent Commissioners, issued by the Task Force of the National Committee for Governance Policy (KNKG), The UK Corporate Governance Code by Financial Reporting Council, Corporate Governance Rules by New York Stock Exchange and Organization for Economic Co-operation and Development Principle of Corporate Governance.

This chapter explains in detail about the independent commissioners including appointment, tenure, and composition, transparency of commissioners, share ownership, remuneration systems, roles and responsibilities, Segregation of Duties for the Commissioners, Prohibition of Private Benefit, Induction/Orientation Program, Continuous Development Program and Performance Evaluation. The Guidelines also specify Independent Commissioners.

Roles and Responsibilities

Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners are:

1. Value Creating
 - Provide advice and guidance in the establishment of the Company's values, vision, mission, purpose, objectives, policies, plans and budgets;
 - Monitor the effectiveness of the implementation of good corporate governance within the Company.

2. Mengelola Dewan Pengurus
 - Mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS dan mengajukan sistem remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - Mengkaji kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan ketaatan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan serta hukum dan ketentuan yang berlaku dan mengawasi penegakan penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan;
 - Memberikan saran kepada Pemegang Saham menyangkut pemberhentian anggota Direksi dan membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan mengkaji risalah rapatnya;
 - Memberikan laporan mengenai tugas dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap pengurusan Perusahaan oleh Direksi selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
3. Memberi Saran
 - Meningkatkan efektivitas manajemen dengan memberikan saran, nasihat dan petunjuk kepada Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan, serta sesuai dengan kebutuhan, maksud dan tujuan Perusahaan.
4. Keputusan Utama atas Masalah Modal dan Keuangan
 - Membuat keputusan dan mengkaji keputusan utama yang mempengaruhi struktur permodalan Perusahaan, alokasi sumber daya dan masalah keuangan lainnya termasuk program diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan, serta divestasi.
5. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
 - Memastikan bahwa Direksi telah mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi Perusahaan dan memastikan terdapat dan berjalannya pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut.
6. Wakil Pemegang Saham
 - Bertindak sebagai wakil dari Pemegang Saham dalam menjaga aktiva Perusahaan guna meyakini bahwa informasi yang layak dan akurat diberikan kepada Pemegang Saham serta melindungi kepentingan pemodal.
7. Pembayaran Dividen
 - Memberikan saran kepada Pemegang Saham mengenai kebijakan pembayaran dividen untuk disetujui dalam RUPS.
8. Keterbukaan
 - Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di Perusahaan dan/atau anak perusahaan, dan perusahaan lain;
 - Mengungkapkan kepada Perusahaan segala kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
9. Kerugian atau Kepailitan Perusahaan
 - Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami Perusahaan, atau ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi untuk kewajiban yang belum dilunasi atas kepailitan Perusahaan, jika kerugian atau kepailitan tersebut diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian Komisaris yang bersangkutan dalam melakukan fungsi pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
2. Managing The Board
 - Nominate the members of the Boards to the shareholder's meetings and propose the remuneration systems of the Board's members based on recommendations from the Boards' Nomination and Remuneration Committees;
 - Appraise the Boards' members performance and compliance with the Company's Articles of Association and other prevailing laws and regulations; Monitor the upholding of the Company's Code of Conduct;
 - Provide suggestions to the shareholders regarding the discharge of a member(s) of the Board of Directors, and establish necessary committees to support the conduct of its duties;
 - Attend the Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, and review the minutes of the Board of Directors meetings.
 - Provide report on the assignment and supervision on the management of the Company by the Board of Directors during the past financial year to the GMS.
3. Provide Advice
 - Increase the effectiveness of management by providing advice and guidance to the Chief Executive Officer and other Board of Directors, in good faith, prudence and responsible for the interests of the Company, and in accordance with the needs, objectives and purposes.
4. Major Decisions on Capital and Financial Matters
 - Make and review major decisions affecting the Company's capitalization structure, resource allocations, and other financial matters including diversification programs, mergers& acquisitions, and divestitures.
5. Risk Management and Internal Control
 - Ensure that the Board of Directors has identified and managed the risks faced by the Company and ensure the existence and working of relevant controls to mitigate these risks.
6. Shareholder Trustee
 - Act as trustees to the shareholders in the preservation of Company's assets to ensure that proper and accurate information is given to the shareholders and protect the interests of public investors.
7. Payment of Dividends
 - Provide suggestion to the shareholders regarding the policy for the payment of dividends to be approved in the General Meeting of Shareholders.
8. Disclosure
 - To report to the Company regarding their and/or their family's share ownership in BUMI and/or Its subsidiaries and other companies.
 - To disclose to the Company all conditions which potentially lead to the conflict of interest.
9. Loss or Bankruptcy of the Company
 - Each member of The Board of Commissioner is personally responsible for the Company's losses participating in joint responsibility with the Directors for the outstanding debt/obligations of the bankruptcy caused by a Commissioner's failures or omissions during his/her performance in oversight functions on the Company's management by the Directors.

- Pertanggungjawaban tersebut dapat dihindari jika Komisaris dapat membuktikan:
 - a. Kerugian atau kepailitan sepenuhnya bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan; dan
 - d. Telah memberikan nasihat sebagaimana mestinya kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian atau kepailitan.

Wewenang

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
4. Dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Kewajiban

Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat dan saran kepada Direksi dalam melaksanakannya.
2. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
3. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Perusahaan.

- The Responsibilities as mentioned above can be avoided if the Commissioners are able to prove that:
 - a. The loses or bankruptcy is totally not a result of his/her failures or omissions ;
 - b. Has been performed the oversight duties with good faith and prudence for the Company's interest as well as according to the Company's purposes and objectives;
 - c. There are no personal interest directly or indirectly towards all management activities performed by the Directors which has caused loses or bankruptcy to the Company; and
 - d. Has provided advise appropriately to the Directors in terms of preventing the loses or bankruptcy.

Authorities

The authority of the Board of Commissioners is as follows:

1. Members of the Board of Commissioners may, either jointly or individually, at anytime during normal business hours of the Company, enter the buildings, yards and premises occupied or controlled by the Company and to examine books, letters, instruments of evidence, to inspect and verify the cash condition and others to inquire into all actions taken by the Board of Directors;
2. Board of Directors and each Director shall provide all useful and necessary explanation and information required by the Board of Commissioners;
3. Commissioner may at anytime suspend a member or members of the Board of Directors as a consequence of their acting in contradiction to the Articles of Association or the applicable laws and notice of suspension shall be given to the relevant members including the grounds of suspension;
4. No later than 30 (thirty) days after the suspension, the Board of Commissioners shall convene General Meeting of Shareholders to decide whether to reinstate or dismiss such Director, meanwhile the suspended Director may be given the opportunity to respond;
5. In the case of suspension of all members of Board of Directors and the Company has no members of the Board of Directors, the Company will be temporarily managed by the Commissioners, in such case, Board of Commissioners may grant interim power to a member or members of the Board of Commissioners at their joint expense.

Duties

The duties of the Board of Commissioners are as follows:

1. Assigned to conduct oversight over the management of the Company made by the Board of Directors as well as giving advice and suggestions to the Directors to implement.
2. Disclose to the Company regarding his/her share ownership and / or that of their their families in the Company and other companies.
3. Obligated to implement and ensure also monitor the effectiveness of good corporate governance practices in the Company.

- Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan Perusahaan yang telah disiapkan serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh RUPS dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris harus terdiri sedemikian rupa dari anggota-anggota yang bertindak secara independen dan kritis guna meningkatkan efektivitas dan keterbukaan atas diskusi.

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 7 anggota yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 6 Komisaris, 3 diantaranya adalah Komisaris Independen.

Berikut adalah susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan:

Kusumo A. Martoredjo	Presiden Komisaris & Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner
Suryo Bambang Sulisto	Komisaris Independen Independent Commissioner
Iman Taufik	Komisaris Independen Independent Commissioner
Fuad Hasan Masyhur	Komisaris Independen Independent Commissioner
Nalinkant A. Rathod	Komisaris Commissioner
Anton Setianto Soedarsono	Komisaris Commissioner
Sulaiman Zuhdi Pane	Komisaris Commissioner

Riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat pada halaman 196-199 Laporan Tahunan ini.

Independensi Dewan Komisaris

Penunjukkan Dewan Komisaris telah memenuhi Keputusan Direktur PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yang menetapkan bahwa Dewan Komisaris minimal harus mempunyai 30% Komisaris Independen dan bahwa anggota Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga apapun dengan anggota Komisaris dan/atau Direktur lainnya.

Saat ini, Perusahaan memiliki 4 orang Komisaris Independen (57%), serta tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga sampai pada derajat kedua.

Board Manual/Program Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 721/BR-BOC/IX/11 tertanggal 15 September 2011, Perusahaan menerbitkan revisi kedua Buku Pedoman Kerja (Board Manual) sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna memastikan efektivitas kerja mereka dan memperkuat sistem pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS.

- Examine and review the Annual Report and sign it.
- Provide opinions and advise to the Annual General Meeting of Shareholders regarding any important issues for management and to take responsibility for his/her duties at the Annual General Meeting of Shareholders.

Composition of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are selected, appointed and endorsed by the General Meeting of Shareholders to serve a 3-year term as stipulated in BUMI's Articles of Association.

The composition of the Board of Commissioners should be such a way that its members act independently and critically in order to increase the effectiveness and transparency of its deliberation.

The Composition of the Board of Commissioners consists of 7 (seven) members, 1 (one) is President Commissioner with 6 (six) Commissioners, 3 (three) of whom are Independent Commissioners.

Below is the composition of the Board of Commissioners:

Background information of each Commissioner is available in page 196-199 of this Annual Report.

Independence of Board of Commissioners

The appointment of the Board of Commissioners has complied with PT Jakarta Stock Exchange Board of Director Decision No.: Kep-305/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 stipulating that a Board of Commissioners must consist of at least 30% Independent Commissioners and that members of the Board of Commissioners must not have any family with other Commissioners and/or Directors.

Currently, BUMI has 4 Independent Commissioners (57%) with no Commissioner having family ties up to the second degree.

Board Manual/Work Programme and the implementation of the Work Programme

Through Decision No. BOC 721 / BR-BOC / IX / 11, dated 15 September 2011, the Company issued a second revision of the Board Manual for the guidance of the Board in carrying out its duties and responsibilities to ensure their effectiveness and strengthen accountability systems of the BOC to the GMS.

Perusahaan menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal mengenai penunjukkan, masa tugas dan komposisi, keterbukaan kepemilikan saham, sistem remunerasi, tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, larangan mengambil keuntungan pribadi, program orientasi, program pelatihan kerja dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja ini juga mengatur secara khusus mengenai Komisaris Independen.

The Company explained in detail on matters concerning the appointment, tenure and composition, transparency of Commissioners' share ownership, remuneration system, roles and responsibilities, division of labor, prohibition of private benefit, orientation programs, job training programs and performance evaluation of the Board of Commissioners. The Guidelines also specifically mention Independent Commissioners.

Rapat, Kehadiran dan Keputusan Rapat

Di tahun 2014, Dewan Komisaris melakukan 3 (tiga) kali Rapat Gabungan dengan agenda dan data kehadiran sebagai berikut:

Joint Meetings, Attendance and Agenda

In 2014, the Board of Commissioners conducted 3 (three) joint meetings with the following agendas and attendances:

No.	Tanggal Date	Agenda	Dewan Komisaris BOC							Direksi BOD					
			KAM	SBS	IT	FHM	NAR	ASS	SZP	SH	ACB	DS	KPF	EJS	RASD
1.	28/08	Kabar terbaru BUMI saat ini, Presentasi Keuangan, IR Presentasi, Hasil Right Issue, Masalah Hukum, Pengumuman Perusahaan BUMI Current Updates, Finance Presentation, IR Presentation, Right Issue Progress, Legal Issues, Company Announcement	v	v	v		v	V		v	v	v		v	v
2.	02/10	Kabar terbaru Right Issue, Tunggalan Utang Right Issue Update, Outstanding Debt	v	v	v			V		v	v	v	v	v	
3.	25/11	Keuangan Perseroan, Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perusahaan (dari KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo - anggota Moores Rowland, k KAP Y. Santosa & Rekan akan menjadi anggota Praxity) Financial of the Company, Appointment of Public Accounting Firm of the Company (from KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo – a member firm of Moores Rowland, to KAP Y. Santosa & Rekan will be a member of Praxity)	v	v	v		v	V	v	v	v	v		v	v
Jumlah Kehadiran Total Attendance			3/3	3/3	3/3	0/3	2/3	3/3	0/3	3/3	3/3	3/3	1/3	3/3	2/3

Keterangan note:

KAM: Kusumo A.M, SBS: Eddie J. Soebari, IT: Iman Taufik, FHM: Fuad Hasan Masyhur, NAR: Nalinkant A. Rathod, ASS: Anton Setianto Soedarsono, SZP: Sulaiman Zuhdi Pane, SH: Saptari Hoedaja, ACB: Andrew C. Beckham, DS: Dileep Srivastava, KPF: Kenneth P. Farrel, EJS: Eddie J. Soebari, RASD: Raden Ajeng Sri Dharmayanti.

Penetapan Remunerasi Komisaris

Sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris ditentukan dan diputuskan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite akan mengkaji kelayakan dari sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Total remunerasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebanyak USD 347.289

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris harus melakukan evaluasi atas kinerjanya, baik kinerja individu maupun efektivitas dari Dewan Komisaris secara kelompok dan proses evaluasi dipimpin oleh Presiden Komisaris secara berkala.

Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengkaji kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Nilai, visi, misi, maksud, tujuan dasar, kebijakan, rencana, dan perencanaan keuangan, serta praktik penyelenggaraan perusahaan yang telah dibuat, diterapkan dan diawasi dengan baik;
- Dewan Komisaris dan komite yang diperlukan untuk membantu Dewan Komisaris telah dibentuk dan dikelola serta beroperasi dengan baik;
- Petunjuk dan saran kepada Presiden Direktur dan/atau anggota Direksi lainnya diberikan dengan memadai, dan efektivitas kinerja dari Direksi dan manajemen meningkat;
- Keputusan penting dalam hal modal dan keuangan dipertimbangkan dengan baik dan dilaksanakan secara layak dan kemungkinan risiko dan kerugian dapat diminimalisasi;
- Kepuasan Pemegang Saham berkaitan dengan perlindungan terhadap aktiva Perusahaan, akurasi informasi, dan pembayaran dividen terpenuhi; dan
- Pelaksanaan rapat secara berkala Dewan Komisaris dan rapat dengan Direksi

Pertanggungjawaban Kinerja Dewan Komisaris

Pertanggungjawaban Kinerja Dewan Komisaris dijabarkan dalam Laporan Pertanggungjawaban selama tahun buku 2013 yang dilakukan dalam RUPS Tahunan tanggal 30 Juni 2014.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sesuai dengan praktik terbaik GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan atas kepemilikan dan setiap saat perubahan kepemilikannya atas saham BUMI, anak perusahaan dan perusahaan lainnya, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung.

Remuneration of the Board of Commissioners

The remuneration system for the Board of Commissioners is determined by the GMS according to the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee, as submitted through the President Commissioner. From time to time, the Committee will evaluate the appropriateness of the remuneration systems for the Boards.

Total remuneration to the Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2014 amounted to USD 347,289.

Performance Evaluation of Board of Commissioners

The Board of Commissioners of BUMI must periodically perform a self-evaluation, covering both the evaluation of individual performance and of the Board's performance as a whole, directly chaired by the President Commissioner.

The Key Performance Indicators for the Board of Commissioners are as follows:

- The Company's values, vision, mission, purpose, basic objectives, policies, plans, and financial plans, as well as good corporate governance practices are in place, implemented, and monitored within good manner.
- The Board of Commissioners and necessary committees are established, managed and operating in a good manner;
- Guidance and advice to the President Director and the other Directors are provided properly and the effectiveness of the Board of Directors and management is significantly increased;
- Major decisions on capital and financial matters are well considered and executed properly and the possibility of loss is minimized;
- The satisfaction of Shareholders relating the protection of the Company's assets, the accuracy of the information and dividend payments are fulfilled; and
- Undertaking regular meetings of the Board of Commissioners as well as meetings with the Board of Directors.

Performance Accountability of the Board of Commissioners

Performance Accountability of the Board of Commissioners is outlined in the Accountability Report for the year 2013, presented in the Annual General Meeting of Shareholders dated 30 June 2014.

Share Ownership of the Board of Commissioners

To meet best practices of GCG, all Commissioners shall report to the Company regarding share ownership and changes in his/her share ownership of BUMI and its Subsidiaries and other companies, whether owned directly or indirectly.

DAFTAR KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN KELUARGA
SPECIAL LIST OF SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND FAMILIES

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepemilikan Saham Pribadi pada Perusahaan Private Stock Ownership of the Company	Kepemilikan Saham Keluarga pada Perusahaan Family Stock Ownership of the Company	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain Stock Ownership at other Companies
Kusumo A. Martoredjo	-	-	-
Suryo Bambang Sulisto	-	-	-
Iman Taufik	-	-	12,668 ¹
Fuad Hasan Masyhur	-	-	-
Nalinkant A. Rathod	-	-	-
Anton Setianto Soedarsono	-	50,600 ²	190,000 ³
Sulaiman Zuhdi Pane	-	-	-

¹ Saham dimiliki oleh istri Iman Taufik

² dan ³ Saham dimiliki oleh istri Anton Setianto Soedarsono

¹ Shares owned by Iman Taufik's wife

² and ³ Shares owned by Anton Setianto Soedarsono's wife

D. DIREKSI

Panduan Kerja untuk Direksi/Charter

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kerangka GCG secara transparan, akuntabel, independen dan kompeten mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus yang disahkan dalam Surat Keputusan No. 721/BR-BOC/IX/11. Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus disusun berdasarkan Undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BUMI dan Anak Perusahaan, Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Komisaris Independen yang disusun oleh Task Force KNKG, The UK Corporate Governance Code yang dikeluarkan oleh Financial Reporting Council, Corporate Governance Rules dari New York Stock Exchange, dan Organization for Economic Co-operation and Development Principle of Corporate Governance.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Direksi BUMI mencakup aspek fungsi, penunjukkan, masa tugas, komposisi, kriteria keanggotaan, Direktur Tidak Terafiliasi, tugas dan tanggung jawab, program pengenalan dan pelatihan, dan evaluasi kinerja dari Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, Direksi bertugas dan bertanggung jawab menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau Keputusan RUPS.

Secara khusus, Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola BUMI untuk mencapai tujuannya. Ikut serta dalam pembentukan unit usaha melalui pengembangan usaha dan penyediaan prasarannya. Dan juga meyakini bahwa aktiva BUMI digunakan secara layak, demi kepentingan BUMI dan para pemegang saham.

D. BOARD OF DIRECTORS

Guidelines for Board of Directors/Charter

The BOD performs its duties and responsibilities in accordance within a GCG framework in a transparent, accountable, independent and competent refer to the Board Manual approved in the Decision Letter No. 721/BR-BOC/IX/11. Board Manual compiled based on Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, Articles of Association of BUMI and Its Subsidiaries, Indonesian Code of Good Corporate Governance issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG), Guidelines for Independent Commissioner, issued by the Task Force of the National Committee for Governance Policy (KNKG), The UK Corporate Governance Code issued by Financial Reporting Council, Corporate Governance Rules from New York Stock Exchange, and Organization for Economic Co-operation and Development Principle of Corporate Governance.

BUMI's Board Manual covers function, appointment, tenure, composition, membership criteria and non-affiliation of the Board, roles and responsibilities, induction/orientation and training programs and performance evaluation of the Board of Directors.

Roles and Responsibilities of Directors

In general, Directors are responsible to run all actions related to the management for the profit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company with good manners and responsibility also to represent the Company both inside and outside court on all matters and events with limitations as set forth in the laws and/or resolution of the General Meeting of Shareholders.

In particular, Directors are responsible to lead and manage BUMI in achieving its objectives, including to be involved in the establishment of entity through new business development, building new infrastructure and ensuring that BUMI assets are properly used, in the best interest of BUMI and all shareholders.

Direksi bertanggung jawab secara kolegal untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam Perusahaan untuk mendapatkan profit dan untuk memastikan keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Terdapat 5 (lima) tanggung jawab utama yang harus dijalankan Direksi dalam fungsi manajemen, sebagai berikut:

1. Manajemen
 - Direktur menetapkan visi Perusahaan, dan nilai-nilai inti serta program jangka panjang dan jangka pendek;
 - Direktur harus mampu mengelola seluruh sumber daya yang tersedia di Perusahaan secara efektif dan efisien;
 - Direktur harus memperhatikan kepentingan wajar setiap pemegang saham;
 - Direktur dapat memberikan wewenang kekuasaan kepada komite yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi, atau karyawan Perusahaan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi;
 - Direktur harus mempunyai pedoman dan piagam sebagai tambahan terhadap efektivitas implementasi tugas-tugas mereka, serta sebagai perangkat penilaian kinerja.
2. Manajemen Risiko
 - Direksi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko Perusahaan yang meliputi seluruh aspek aktivitas Perusahaan;
 - Memastikan bahwa manajemen risiko berjalan dengan baik dan pada tempatnya, Direktur harus membuat fungsi/unit khusus yang bertanggung jawab pada peran manajemen risiko dalam Perusahaan.
3. Pengendalian Internal
 - Direktur mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal Perusahaan yang dapat diandalkan untuk melindungi aset-aset dan kinerja Perusahaan serta untuk memenuhi undang-undang yang berlaku;
 - Memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik dan pada tempatnya, Direktur harus membuat fungsi/unit khusus yang bertanggung jawab pada peran manajemen risiko dalam Perusahaan.
4. Komunikasi
 - Direktur harus memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan para pemegang saham dengan membuat dan menguatkan fungsi Sekretaris Perusahaan, dalam fungsi Sekretaris Perusahaan termasuk juga hubungan investor;
 - Untuk memastikan keefektifan kelancaran komunikasi seperti yang disebutkan di atas, laporan terkait mengenai pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Tanggung Jawab Sosial
 - Direktur harus memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk menjaga tujuan utama Perusahaan, yaitu keberlangsungan bisnis Perusahaan;
 - Direktur harus mempunyai cetak biru yang jelas dan spesifik dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial Perusahaan.

In general, the Directors are collegially responsible to run the management function in the Company to achieve the profit and to ensure the Company's business sustainability.

In the Company's management function by the Board of Directors, there are 5 (five) main responsibilities as follows:

1. Management
 - Directors establish the Company's vision, and core values as well as short and long terms programs;
 - Directors must be eligible to manage all resources available in the Company effectively and efficiently;
 - Directors must take concern in the fair interests of each stakeholder;
 - Directors are enabling to grant its power of attorney to the established committees in order to support the implementation of the Directors' duties, or to the relevant Company's employee(s) to settle any specific tasks, but the ultimate responsibility remains with the Directors;
 - Directors must have guidelines and charter in addition to the effectiveness of their duties implementation, as well as a tool for performance assessment.
2. Risk Management
 - Directors develop and implement the Company's risk management system which cover all activities throughout the Company;
 - To ensure that the risk management is effective and consistently in place, the Board of Directors shall establish a special function/unit responsible for risk management in the Company.
3. Internal Control
 - The Board of Directors develops and implements a reliable internal control system to protect Company assets and performance as well as to meet with prevailing legislation;
 - To ensure that the internal controls are effective and consistently in place, the Board of Directors shall establish a special function/unit responsible for risk management in the Company.
4. Communication
 - Directors shall ensure smooth communication among the Company and its stakeholders through the establishment and empowerment of a corporate secretary function, where this corporate secretary function can also include investor relations;
 - To ensure the effectiveness of smooth communication as mentioned above, relevant reports regarding the implementation of corporate secretary duties is also submitted to the Board of Commissioners.
5. Social Responsibility
 - The Board of Directors shall ensure that the Company fulfils its social responsibilities to maintain the Company's business sustainability as the main purpose;
 - The Board of Directors must have a clear and specific blueprint in implementing the corporate social responsibility.

Wewenang

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian.
2. Mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di bank-bank);
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perusahaan;
 - c. Mengikat Perusahaan sebagai Penjamin;
 - d. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Semua harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 90% (sembilan puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS;
4. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
5. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
6. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Komposisi dan Independensi Direksi

Anggota Direksi dipilih dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris dengan masa tugas 4 (empat) tahun sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar Perusahaan. Komposisi anggota Direksi disusun sedemikian rupa untuk memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang efektif, memadai, kritis dan independen.

Berikut adalah susunan anggota Direksi Perusahaan:

Saptari Hoedaja	Presiden Direktur President Director
Andrew C. Beckham	Direktur Director
Dileep Srivastava	Direktur Director
Kenneth P. Farrell	Direktur Director
Eddie J. Subari	Direktur Director
RA Sri Dharmayanti	Direktur Director

Authorities

The authorities of the Board of Directors are as follows:

1. The Board of Directors may represent the Company both inside and outside court on all matters and events;
2. Binding the Company with other parties and binding the other party with the Company, and taking all reasonable actions both as to the management and control, however with the limitation to:
 - a. To borrow or lend money on account of the Company (excluding to withdraw the Company's funds from banks);
 - b. To purchase, sell or otherwise acquire or dispose of the title to fixed assets and companies and encumber the assets of the Company;
 - c. To bind the Company as Guarantor;
 - d. To establish new enterprises or make equity in another company either domestic or foreign.

All of the above shall be subject to written authorization or deed signed by the Board of Commissioners.
3. Any legal actions to transfer, release or create as debt security more than 90% (ninety percent) of the Company's net assets in one accounting year, either in a single or multiple transactions shall be subject to prior consent of the General Meeting of Shareholders;
4. The President Director has the power and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
5. In the absence or inability to act of the President Director for any reason whatsoever, a member of the Board of Directors appointed in writing by the President Director shall have the power and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
6. Without prejudice to the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors may, for particular purposes, appoint a person or person as its proxy by granting a power of attorney.

Composition and Independence of Board of Directors

The members of the Board of Directors are elected and endorsed by the GMS according to the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee and the Board of Commissioners with a 4 (four) year term of office as stipulated in BUMI's Articles of Association. The composition of the Board of Directors should be such as to allow effective, appropriate, critical and independent action.

Below are the members of the Board of Directors of BUMI:

Susunan anggota Direksi ini juga memenuhi kriteria persyaratan PT Bursa Efek Jakarta yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi No. Kep-305/BEJ/07-2004 yang menyatakan bahwa Perusahaan harus memiliki setidaknya 1 (satu) orang Direktur yang tidak berafiliasi dengan anggota Direksi, pemegang saham pengendali, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Di tahun 2014, terdapat 1 (satu) orang Direktur Non-Afiliasi BUMI.

Selain itu, tidak ada Direksi yang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali lainnya.

Riwayat hidup dari masing-masing anggota Direksi dapat pada halaman 198-201 Laporan Tahunan ini.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2014, Direksi mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan dengan Dewan Komisaris dengan agenda sebagai berikut:

The appointment of Directors met the criteria as required by PT Jakarta Stock Exchange Board of Director Decision No. Kep-305/BEJ/07-2004 which stipulates that the Company must possess at least 1 (one) Director who is not affiliated with other members of the Board of Directors, the controlling shareholders, and or Commissioners. In 2014, there was 1 (one) non affiliated BUMI Director.

In addition, none of the Directors has family relations up to the second degree with other Directors, Commissioners or the controlling stakeholders.

A biography of each member of the Board of Directors is available on page 198-201 of this Annual Report.

Joint Meetings of the Boards of Commissioners and Directors

During 2014, the Board of Directors convened 3 (three) joint meetings with the Board of Commissioners, with the following agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda	Dewan Komisaris BOC							Direksi BOD					
			KAM	SBS	IT	FHM	NAR	ASS	SZP	SH	ACB	DS	KPF	EJS	RASD
1.	28/08	Kabar terbaru BUMI saat ini, Presentasi Keuangan, IR Presentasi, Hasil <i>Right Issue</i> , Masalah Hukum, Pengumuman Perusahaan BUMI Current Updates, Finance Presentation, IR Presentation, Right Issue Progress, Legal Issues, Company Announcement	v	v	v		v	v		v	v	v		v	v
2.	02/10	Kabar terbaru <i>Right Issue</i> , Tunggakan Utang Right Issue Update, Outstanding Debt	v	v	v			V		v	v	v	v	v	

No.	Tanggal Date	Agenda	Dewan Komisaris BOC							Direksi BOD					
			KAM	SBS	IT	FHM	NAR	ASS	SZP	SH	ACB	DS	KPF	EJS	RASD
3.	25/11	Keuangan Perseroan, Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perusahaan (dari KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo - anggota Moores Rowland, k KAP Y. Santosa & Rekan akan menjadi anggota Praxity)													
		Financial issues, Appointment of the Public Company Accounting Firm (from KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo - member Moores Rowland, k KAP Y. Santosa & Partners will become a member of Praxity)	v	v	v		v	v	v	v	v	v		v	v
Jumlah Kehadiran Total Attendance			3/3	3/3	3/3	0/3	2/3	3/3	0/3	3/3	3/3	3/3	1/3	3/3	2/3

Keterangan note:

KAM: Kusumo A.M, SBS: Eddie J. Soebari, IT: Iman Taufik, FHM: Fuad Hasan Masyhur, NAR: Nalinkant A. Rathod, ASS: Anton Setianto Soedarsono, SZP: Sulaiman Zuhdi Pane, SH: Saptari Hoedaja, ACB: Andrew C. Beckham, DS: Dileep Srivastava, KPF: Kenneth P. Farrel, EJS: Eddie J. Soebari, RASD: Raden Ajeng Sri Dharmayanti.

KPI Direksi, Pelaksanaan Assessment Direksi

Penilaian kinerja tahunan dilakukan berdasarkan kriteria KPI yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus. Presiden Direktur dinilai oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dinilai oleh Dewan Komisaris dan Presiden Direktur.

Kriteria evaluasi Direksi mencakup:

- Kriteria Penilaian Individual
- Peningkatan nilai pemegang saham
- Merumuskan strategi Perusahaan, nilai-nilai, visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, rencana dan rencana keuangan, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan
- Sadar risiko
- Menyediakan petunjuk yang jelas kepada manajemen
- Berkontribusi kepada Direksi secara efektif
- Mendedikasikan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik
- Menghargai ide-ide Direktur lain dan manajemen.

Kepemilikan Saham Direksi

Sesuai dengan praktik terbaik GCG, seluruh anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan atas kepemilikan dan setiap saat perubahan kepemilikannya atas saham BUMI, anak perusahaan dan perusahaan lainnya, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung.

Key Performance Indicators and Assessment of the Board of Directors

Annual performance assessments are conducted based on KPI stated in the Board Manual, with the Board of Commissioners doing a self-assessment. The President Director is assessed by the Board of Commissioners and the other Directors are assessed by the Board of Commissioners and President Director.

Evaluation criteria of the Board of Directors covers:

- Individual assessment criteria
- Improve shareholder value
- Formulate Company strategy, values, vision, mission, purpose, objectives, policies, plans, and financial plans, as well as good corporate governance practices.
- Be Risk Aware
- Provide clear directions to management
- Contribute to Board of Director effectiveness
- Dedicate necessary time to perform all tasks well
- Respect for ideas of other Directors and management.

Share Ownership of Directors

To meet best practices of GCG, all Directors shall report share ownership and changes in his/her share ownership of BUMI and its Subsidiaries and other companies, whether owned directly or indirectly.

DAFTAR KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN KELUARGA SPECIAL LIST OF SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AND FAMILIES

Direksi Board of Directors	Kepemilikan Saham Pribadi pada Perusahaan Private Stock Ownership of the Company	Kepemilikan Saham Keluarga pada Perusahaan Family Stock Ownership of the Company	Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain Stock Ownership at other Companies
Saptari Hoedaja	-	-	-
Andrew C. Beckham	-	-	-
Dileep Srivastava	-	-	-
Kenneth P. Farrell	-	-	-
Eddie J. Subari	-	-	-
RA Sri Dharmayanti	-	-	-

Prosedur Penetapan dan Struktur Remunerasi Direksi

Sistem remunerasi untuk Direksi ditentukan dan diputuskan oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan melalui Presiden Komisaris. Dari waktu ke waktu, Komite akan mengkaji kelayakan dari sistem remunerasi untuk Direksi.

Total remunerasi Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebanyak USD 1.865.357.

E. KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOMISARIS

Untuk mendorong terciptanya prinsip-prinsip GCG di dalam Perusahaan, maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite dan memperoleh saran dari penasihat profesional yang independen untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan tugasnya. Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di BUMI, yaitu: Komite Audit BUMI, Komite Audit Kaltim Prima Coal & Arutmin Indonesia, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Manajemen Risiko.

Komite Audit BUMI

Komite Audit merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang berperan membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya, terutama pengawasan atas

- Laporan keuangan yang dipublikasikan
- Pekerjaan Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan
- Kinerja Internal Auditor

Berikut kami sampaikan Laporan kegiatan Komite Audit yang kami laksanakan selama tahun 2014.

Komite Audit Bumi terdiri dari seorang Komisaris Independen yang bertindak selaku Ketua Komite dan dua anggota dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi sebagai berikut:

Ketua : Iman Taufik
Anggota : Mulyadi
Myrnie Zachraini

Informasi tentang latar belakang dari masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada halaman 202 Laporan Tahunan ini.

Remuneration System of the Board of Directors

The remuneration system for the Board of Directors is determined by the GMS according to the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee, as submitted through the President Commissioner. From time to time, the Committee will evaluate the appropriateness of the remuneration systems for the Boards.

Total remuneration paid to the Directors of the Company for the year ended 31 December 2014 amounted to USD 1,865,357

E. BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEES

To promote GCG principles within the Company, the Board of Commissioner may establish committees and seek advice from an independent professional advisor to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties. Committees responsible to the Board of Commissioners at BUMI are: Audit Committee BUMI, Audit Committees Kaltim Prima Coal and Arutmin Indonesia, Remuneration and Nomination Committee and Risk Management Committee.

BUMI Audit Committee

The Audit Committee is the committee established by the Board of Commissioners which assists the Board of Commissioners in performing its oversight role, especially the oversight of:

- Published financial statements
- The work of Public Accountants for audited Financial Statements
- Performance of Internal Auditor.

The following is the report of the Audit Committee's activities performed during 2014.

BUMI's Audit Committee consists of an Independent Commissioner as Chairman and two independent parties with expertise in finance and accounting as follows:

Chairman : Iman Taufik
Members : Mulyadi
Myrnie Zachraini

Background information of each member of Audit Committee is available on page 202 of this Annual Report.

Selama tahun 2014 Komite Audit mengadakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase kehadiran Percentage of Attendance (%)
Iman Taufik	6	75 %
Mulyadi	8	100 %
Myrnie Zachraini	7	87 %

Dalam periode ini Komite Audit menyelenggarakan rapat dengan Manajemen dan berbagai pihak lainnya yang meliputi pokok bahasan sebagai berikut:

1. Membahas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tahun 2013 dan 2014 dengan manajemen kunci yang membawahi keuangan dan akuntansi dan akuntan publik (Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tahun 2014 dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2014)
2. Membahas Laporan Keuangan Konsolidasian triwulanan tahun 2014 dengan manajemen kunci yang membawahi fungsi keuangan dan akuntansi
3. Bersama-sama dengan Komite Manajemen Risiko membahas risiko-risiko operasional dan keuangan serta rencana kerja Unit Manajemen Risiko
4. Membahas kinerja Akuntan Publik bersama manajemen kunci yang membawahi fungsi keuangan dan akuntansi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2014.
5. Membahas rencana audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2014, pelaksanaan dan temuan audit, masalah-masalah yang dihadapi selama audit, serta isu akuntansi dan audit yang signifikan dengan Akuntan Publik.
6. Membahas rencana dan pelaksanaan audit serta temuan-temuannya dengan Audit Internal, termasuk pemantauan tindak lanjut Manajemen atas temuan audit
7. Membahas isu hukum dan perpajakan yang dihadapi Perseroan
8. Memantau secara berkala kinerja operasional dan keuangan tahun 2014
9. Mereview Piagam Komite Audit dan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku

Komite Audit Kaltim Prima Coal & Arutmin Indonesia Tugas dan Tanggung Jawab

Di tahun 2010, Perusahaan membentuk Komite Audit untuk anak perusahaannya, yaitu Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia (AI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris KPC yang telah diperbaharui No. SK178/BOC-COM2.8/V/14 tanggal 8 Mei 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris AI No.153/AI/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Komite Audit KPC dan AI mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan untuk meyakini saldo, transparansi dan integritas dari informasi keuangan yang dipublikasikan.

Komite Audit KPC dan AI melakukan pengkajian atas:

- Efektivitas pengendalian internal pengelolaan keuangan KPC dan AI dan sistem manajemen risiko;
- Efektivitas pelaksanaan fungsi dan kinerja auditor internal;

During 2014, the Audit Committee held eight (8) meetings with the details of attendance of each member as follows:

During this period, the Audit Committee held meetings with management and various other parties including on the following subjects:

1. Discuss the Audited Consolidated Financial Statements in 2013 and 2014 with key management in charge of finance and accounting and public accountants (Discussion of the Audited Consolidated Financial Statements 2014 held after the date of December 31, 2014).
2. Discuss the quarterly Consolidated Financial Statements 2014 with key management in charge of finance and accounting functions.
3. Along with the Risk Management Committee discuss the operational and financial risks and work plan of the Risk Management Unit.
4. Discuss the performance of Public Accountants with key management in charge finance and accounting and recommend to the Board of Commissioners the appointment of a public accountant to audit the Consolidated Financial Statements 2014.
5. Discuss the audit plan on the consolidated financial statements in 2014, implementation and audit findings, and the problems encountered during the audit, as well as accounting and auditing issues significant to the Public Accountants.
6. Discuss the plan and execution of the audit and Internal Audit findings, including follow-up monitoring by management on audit findings.
7. Discuss the legal and tax issues faced by the Company.
8. Monitor the operational and financial performance in 2014 periodically.
9. Review the Audit Committee Charter and ensure compliance with applicable regulations .

Audit Committee of Kaltim Prima Coal & Arutmin Indonesia Roles and Responsibilities

In 2010, the Company established the Audit Committees for its Subsidiaries, Kaltim Prima Coal (KPC) and Arutmin Indonesia (AI) according to Decision Letter of the Board of Commissioners of KPC which has been updated SK178/BOC-COM2.8/V/14 dated 8 May 2014 and Decision Letter of the Board of Commissioners of Arutmin Indonesia AI No.153/AI/V/2014 dated 8 May 2014.

The Audit Committees of KPC and Arutmin Indonesia oversee the financial reporting process to ensure balance, transparency and integrity of published financial information.

The Audit Committees of KPC and AI will also review on the:

- Effectiveness of KPC and AI's internal financial control and risk management systems;
- Effectiveness of the internal audit function;

- Kepatuhan KPC dan AI terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku;
- Pengaturan KPC dan AI agar pegawainya melakukan pelaporan jika terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan, akuntansi, audit atau *whistleblowing*.

- KPC and AI's compliance with the prevailing laws and regulations and its code of conduct;
- KPC and AI's regulation in order its employees reporting in the event of violations in financial reporting, accounting, auditing or whistleblowing.

Komposisi dan Pelaksanaan Rapat

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris KPC yang telah diperbaharui No. SK178/BOC-COM2.8/V/14 tanggal 8 Mei 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris AI No.153/AI/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, komposisi keanggotaan Komite Audit KPC dan AI di tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Composition and Meeting Agenda

According to Decision of the Board of Commissioners of KPC updated in No. SK178 / BOC-COM2.8/V/14 dated 8 May 2014 and the Decision of the Board of Commissioners Arutmin Indonesia 153/AI/V/ 2014 dated 8 May 2014, the composition of the Audit Committee of KPC and AI in 2014 are as follows:

Eddie J. Soebari	Ketua Chairman
Deepak Mahendra	Anggota Member
Elly Slamet	Anggota Member

Pada tahun 2014, Komite Audit KPC dan AI telah melaksanakan 9 kali pertemuan dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

In 2014, the Audit Committees of KPC and AI conducted 7 meetings with the following agenda and attendance:

No.	Tanggal Date	Agenda	Kehadiran Attendance		
			EJS	DM	ES
1.	29/01	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Review • KPC Account • Arutmin Account 	v	v	v
2.	20/02	<ul style="list-style-type: none"> • Arutmin Account 	v	v	v
3.	19/03	<ul style="list-style-type: none"> • KPC Account • Arutmin Account 		v	v
4.	08/05	<ul style="list-style-type: none"> • KPC Account • Arutmin Account • Nomination of Member Audit Committee 	v	v	v
5.	26/05	<ul style="list-style-type: none"> • Arutmin Account 		v	v
6.	06/06	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Activity Review • Audit Plan 	v	v	v
7.	22/07	<ul style="list-style-type: none"> • KPC Account • Arutmin Account 	v	v	
8.	22/10	<ul style="list-style-type: none"> • KPC Account • Arutmin Account • Audit Marketing 	v	v	v
9.	03/12	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit follow up status • Audit Plan 2015 		v	v
JUMLAH KEHADIRAN TOTAL ATTENDANCE			6/9	9/9	8/9

Keterangan Note:

EJS: Eddie J. Soebari, DM: Deepak Mahendra, ES: Elly Slamet.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 187/BR-BOC/III/07, Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk memberikan opini independen dalam rangka memastikan proses nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berjalan sesuai dengan azas GCG.

Remuneration and Nomination Committee

Through Decision Letter of the Board of Commissioners No. 187/ BR-BOC/III/07, the Remuneration and Nomination Committee was established to provide independent opinion in order to ensure that remuneration and nomination processes of the member of the Board of Commissioners and Directors of the Company are in accordance with GCG practices.

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait Remunerasi:

- Menentukan kebijakan remunerasi dan keuntungan
- Menelaah dan menyiapkan rekomendasi tentang remunerasi khusus kepada Direksi
- Menelaah dan membuat remunerasi Dewan Komisaris
- Melakukan studi eksternal sebagai tolok ukur
- Memastikan remunerasi untuk setiap anggota Dewan sesuai dengan praktik terbaik.

Terkait Nominasi :

- Menyiapkan kriteria seleksi
- Memberikan rekomendasi dalam ukuran dan komposisi yang tepat
- Membuat rekomendasi dalam pemindahan dan penunjukkan kandidat.
- Membuat rencana suksesi
- Membuat sistem evaluasi
- Bertindak sebagai fasilitator pada evaluasi kinerja tahunan
- Menyiapkan bahan-bahan yang akan dijabarkan kepada pemangku kepentingan
- Memastikan orientasi dan program induksi yang tepat.

Keanggotaan

Masa jabatan para anggota Komite Audit tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum di Anggaran Dasar dan jika diperlukan hanya dapat ditunjuk kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 3 (tiga) anggota:

- Suryo B. Sulisto – Ketua
- Fuad Hasan Masyhur – Anggota
- Saptari Hoedaja – Anggota

Rapat, Kebijakan, dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan pertemuan pada tanggal 30 Juni 2014 untuk memberikan rekomendasi mengenai masa tugas, jumlah, komposisi, pergantian dan penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Remuneration and Nomination Committee has roles and responsibilities as follows:

Related to Remuneration:

- Determine remuneration and benefit policies
- Review and prepare recommendation for the Board of Directors on the entire specific remuneration
- Review and establish remuneration to the Board of Commissioners
- Perform external study for benchmarking
- Ensuring that the remuneration for board members are in place according to relevant best practice.

Related to Nomination:

- Setting selection criteria
- Provide recommendation in terms of appropriate size and composition
- Making recommendation on the removal and appointment
- Developing succession plan
- Developing evaluation system
- Acting as a facilitator for the annual performance evaluation
- Preparing elaboration on disclosure material to stakeholders
- Ensuring appropriate orientation and induction program.

Membership

The term of office of the members of the Committee should not be more than the term of office of the Board of Commissioners, while members can be re-appointed for 1 (one) term more if deemed necessary, in accordance with Company requirements.

The members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

As of the end of 2014, the Remuneration and Nomination Committee consisted of 3 (three) members:

- Suryo B. Sulisto – Chairman
- Fuad Hasan Masyhur – Member
- Saptari Hoedaja – Member

Meetings, Policy, and Implementation of Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Throughout 2014, the Remuneration and Nomination Committee held a meeting on 30 June 2014 to provide recommendations on future tasks, number, composition, turnover and appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with the duties and responsibilities of the Committee as set out in the Remuneration and Nomination Committee Charter.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 188/BR-BOC/III/07.

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris di bidang manajemen risiko untuk memastikan keberadaan dan keefektifan sistem Manajemen Risiko Korporat di BUMI.

Keanggotaan

Masa jabatan para anggota Komite Manajemen Risiko tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum di Anggaran Dasar dan dapat ditunjuk kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Komite Manajemen Risiko ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Pada akhir tahun 2014, Komite Manajemen Risiko terdiri dari 2 (dua) anggota :

- Nalinkant A. Rathod – Komisaris BUMI sebagai Ketua
- Kanaka Puradiredja – Pihak Independen sebagai anggota

Bersama dengan Komite Audit, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan Rapat dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	22/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Update Risk Management Divisions's activities • BUMI's strategic objectives 2014 • Future plans and Challenges
2.	22/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Update Risk Management Divisions's activities • Update BUMI's risk as of June 2014 • Risks That Matter 2014

Informasi tentang latar belakang dari masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada halaman 71 & 198 Laporan Tahunan ini.

Independensi Anggota Komite Dewan Komisaris

Seleksi dan penunjukkan anggota Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko, telah mematuhi undang-undang yang berlaku, khususnya yang terkait dengan independensi anggota komite, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara anggota Komite, antara anggota komite dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, atau antara anggota Komite dan manajemen eksekutif Perusahaan.

F. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi telah membentuk Komite Hedge Risk Management, Komite Pedoman Perilaku, Komite Sumber Daya Manusia, Komite IT Steering, dan Komite Governance, CSR & HSE untuk memfasilitasi pengelolaan yang efektif, pelaporan dan rekomendasi yang kuat pada sejumlah area utama bisnis.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established by Decision Letter of the Board of Commissioners No. 188/BR-BOC/III/07.

The Risk Management Committee was established by the Board of Commissioners to provide recommendations in the area of risk management to the Board of Commissioners in order to ensure the existence and effectiveness of Enterprise Risk Management systems in BUMI.

Membership

The term of office of the members of Risk Management Committee should not be more than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association, while members can be re-appointed for only 1 (one) subsequent term. The members of the Risk Management Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

As of the end of 2014, the Risk Management Committee consisted of 2 (two) members:

- Nalinkant A. Rathod – BUMI Commissioner as Chairman
- Kanaka Puradiredja – Independent Party as a member.

Together with the Audit Committee, the Risk Management Committee conducted meetings with the following agenda:

Background information of each member of Risk Management Committee is available on page 71 & 198 of this Annual Report.

Independence of Board of Commissioners Committee Members

The selection and appointment of members of the Committees of the Board of Commissioners: the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Risk Management Committee, comply with prevailing legislation, especially related to the independency of Committee members; and there are no family relationships up to the second degree among the Committee members, between the committee members and the members of the Boards Commissioners and Directors, or between the Committee members and the Company's executive management.

F. COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors established the Hedge Risk Management Committee, Code of Conduct Committee, Human Resources Committee, IT Steering Committee and Governance, CSR & HSE Committee in order to facilitate effective management, and strong reporting and recommendations on a number of key business areas.

Komite Hedge Risk Management

Dibentuk pada 29 Januari 2008 dan disahkan pada 19 Juni 2009. Komite Hedge Risk Management dibentuk untuk mengawasi, menganalisa dan memodifikasi kebijakan perlindungan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memantau eksposur risiko yang dihadapi Perusahaan
- Memantau kondisi pasar atas harga minyak dan batu bara yang kritikal terhadap operasi Perusahaan
- Memantau transaksi *hedging* yang sedang berjalan
- Memutuskan perlu tidaknya suatu transaksi *hedging* dengan memperhatikan peraturan, proses, dan instrumen-instrumen yang telah disetujui dalam kebijakan *hedging*

Keanggotaan

Pada akhir tahun 2014, Komite Hedge Risk Management terdiri dari 6 (enam) anggota:

- Peter Ball – Ketua
- Andrew C. Beckam – Anggota
- Ashok Mitra – Anggota
- Sanjay K. Jain – Anggota
- Herlan Siagian – Anggota
- Pratikto – Anggota

Komite Pedoman Perilaku

Melalui Surat Keputusan Direksi No. 658/BR-BOD/VII/08, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk Komite Pedoman Perilaku untuk memastikan Pedoman Perilaku Perusahaan dijalankan secara memadai dan *Speak Up System* beroperasi secara efektif.

Komite Pedoman Perilaku mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mempromosikan penerapan Pedoman Perilaku.
- Menyediakan saran untuk meningkatkan standar etika Perusahaan.
- Mengatur sentralisasi dan penggunaan jasa *outsourcing Speak Up System*.
- Berusaha mengumpulkan/mendapatkan fakta awal yang memadai untuk melakukan penyelidikan yang berarti.
- Mengevaluasi informasi dan data *Speak Up System* yang diterima.
- Menjaga kerahasiaan *Speak Up System*.
- Merujuk laporan pelanggaran Pedoman Perilaku terhadap unit bisnis yang direkomendasikan Divisi Internal Audit atau Komite Audit.
- Mengawasi status investigasi
- Berkonsultasi dengan Divisi Internal Audit atau Komite Audit jika ada keraguan tentang referensi yang diperlukan untuk investigasi.
- Memonitor penyelidikan/investigasi yang dilakukan oleh unit usaha terkait dan memastikan bahwa penyelidikan/investigasi dilakukan secara profesional dan tepat waktu.
- Memberikan tanggapan berdasarkan laporan investigasi kepada Pelapor mengenai hasil penyelidikan/investigasi.

Keanggotaan

Pada akhir tahun 2014, Komite Pedoman Perilaku terdiri atas:

- Mahmud – Ketua
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di anak usaha – Anggota

Hedge Risk Management Committee

The Hedge Risk Management Committee was established on 29 January 2008. Its establishment was endorsed on 19 June 2009. The Hedge Risk Management Committee monitors, reviews and modifies the hedging policy with roles and responsibilities as follows:

- Monitor current risk exposure of the Company
- Monitor current market situation of oil and coal prices, which are critical to the operations of the Company
- Monitor the outstanding hedging position
- Take hedging decision within the broad framework of hedging rules, process and agreed instruments.

Membership

At the end 2014, Hedge Risk Management Committee consist of 6 (six) members:

- Peter Ball – Chairman
- Andrew C. Beckham – Director
- Ashok Mitra – Member
- Sanjay K. Jain – Member
- Herlan Siagian – Member
- Pratikto – member

Code of Conduct Committee

Through Decision Letter of the Board of Directors No. 658/BR-BOD/VII/08, the Board of Directors formed the Code of Conduct Committee to ensure that the Company's Code of Conduct is implemented adequately and the *Speak Up System* operates effectively.

The Code of Conduct Committee's roles and responsibilities are as follows:

- Promote the implementation of the Code of Conduct.
- Provide suggestion to improve the Company's ethical standard.
- Manage the centralization and outsourcing of the *Speak Up System*.
- Strive to gather enough initial facts to allow meaningful investigations.
- Evaluate information and data received under the *Speak Up System*.
- Maintain confidentiality of the *Speak Up System*.
- Refer reports on the Code of Conduct violations to the appropriate business units recommended by Internal Audit or Audit Committee
- Monitor the status of investigations
- Consult with Internal Audit or Audit Committee if there is a doubt about whom a report should be referred to for investigation
- Monitor inquiry / investigation carried out by the relevant business unit and ensure that the inquiry / investigation is done professionally and on time.
- Provide feedback based on the investigation report to the reporter.

Membership

In the end of 2014, the Code of Conduct Committee consisted of 2 (two) members:

- Mahmud – Chairman
- Head of HR Division – Member.

Komite Sumber Daya Manusia

Melalui Surat Keputusan Direksi No. 959/BR-BOD/X/10, Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk meningkatkan efektivitas fungsi sumber daya manusia dalam organisasi dan diharapkan memberikan rekomendasi kepada Direksi secara proaktif mengenai kebijakan sumber daya manusia untuk grup BUMI dan melaporkan kemajuan implementasi beberapa kebijakan kepada Direksi.

Komite Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- Meninjau pengembangan sumber daya manusia
- Menelaah kebijakan remunerasi dan tunjangan serta kesesuaian pelaksanaannya di BUMI dan anak perusahaan
- Menelaah proses seleksi dan perekrutan, remunerasi dan tunjangan serta nominasi dan rencana suksesi pada tingkat manajemen
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal di atas untuk persetujuan Presiden Direktur
- Melakukan tugas dan tanggung jawab lain berkaitan dengan masalah sumber daya manusia BUMI dan anak perusahaan selain yang disebutkan di atas.

Keanggotaan

Pada akhir tahun 2014, Komite Sumber Daya Manusia mempunyai 7 (tujuh) anggota yaitu:

- Eddie J. Soebari – Ketua
- Andrew C. Beckham – Anggota
- Endang Ruchijat – Anggota
- Faisal Firdaus – Anggota
- Kenneth P. Farrell – Anggota
- Yanti Sinaga – Anggota
- Elly Slamet – Anggota
- Mahmud – Anggota

Komite IT Steering

Melalui Surat Keputusan Direksi No. 1192/BR-BOD/XII/10 Komite IT Steering dibentuk untuk memastikan keselarasan inisiatif teknologi informasi dengan tujuan bisnis pada level tertinggi di dalam Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite IT Steering adalah sebagai berikut:

- Menjaga keselarasan strategis antara inisiatif Teknologi Informasi dengan tujuan bisnis
- Memastikan bahwa inisiatif Teknologi Informasi memberikan nilai kepada bisnis
- Pengawasan manajemen risiko
- Pengawasan kinerja manajemen

Keanggotaan

Pada akhir tahun 2014, Komite IT Steering terdiri dari 10 (sepuluh) anggota :

- Eddie J. Soebari – Ketua
- Andrew C. Beckham – Anggota
- Peter Ball – Anggota

Human Resources Committee

Through Decision Letter of the Board of Directors No. 959/BR-BOD/X/10, the Human Resources Committee was established to enhance the effectiveness of the organization in terms of its human resources function and is expected to proactively provide recommendations to the Board of Directors regarding human resources policies for BUMI Group and report the progress of such policies to the Board of Directors.

The Human Resources Committee's roles and responsibilities are as follows:

- To review human resources development.
- To review the remuneration and benefits policies and practice alignment of BUMI and subsidiaries.
- To review the hiring and selection process, remuneration and benefits, and succession planning and nomination at the management level
- To provide recommendations to the Board of Directors relating to the above matters to the President Director for approval
- To perform other duties and responsibilities relating to human resources matters of BUMI and its subsidiaries beyond those mentioned above.

Membership

At the end 2014, the Human Resources Committee consisted of 7 (seven) members:

- Eddie J. Soebari –Chairman
- Andrew C. Beckham – Member
- Endang Ruchijat – Member
- Faisal Firdaus – Member
- Kenneth P. Farrell – Member
- Yanti Sinaga – Member
- Elly Slamet – Member
- Mahmud – Member

IT Steering Committee

Through Decision Letter of the Board of Directors No.1192/BR-BOD/XII/10. the IT Steering Committee was established to maintain strategic alignment of IT initiatives and business objectives at the highest level of the organization.

The roles and responsibilities of the IT Steering Committee are as follows:

- Maintaining strategic alignment of IT initiatives and business objectives
- Ensuring that IT initiatives deliver value to businesses
- Overseeing risk management
- Overseeing performance management.

Membership

At the end 2014, the IT Steering Committee consisted of 10 (ten) members:

- Eddie J. Soebari –Chairman
- Andrew C. Beckham – Member
- Peter Ball – Member

- Endang Ruchijat – Anggota
- Faisal Firdaus – Anggota
- R. Utoro – Anggota
- Sudirman S. Widhy – Member
- Ashok Mitra – Anggota
- Sanjay K. Jain – Anggota
- Elly Slamet – Anggota
- Dharyanto Effendi – Anggota

Komite Governance, CSR & HSE

Melalui Surat Keputusan Direksi No. 989/BR-BOD/XI/11 Komite Governance, CSR dan HSE dibentuk yang mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- Secara aktif mendukung pengembangan berkelanjutan standardisasi GCG, CSR dan HSE yang tinggi sesuai nilai-nilai inti BUMI
- Memastikan proses bisnis Grup BUMI dilakukan dalam kerangka GCG
- Mendorong budaya yang memberikan prioritas kepada CSR dan HSE
- Memastikan kebijakan GCG, CSR dan HSE di seluruh BUMI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik internasional
- Bertanggung jawab terhadap tinjauan dan persetujuan kebijakan-kebijakan dan prosedur BUMI yang terkait dengan GCG, CSR dan HSE.

Keanggotaan

Anggota Komite akan tetap bertugas selama mereka memegang jabatan sebagaimana ditunjukkan dalam paparan Keanggotaan Komite.

Direksi BUMI mempunyai wewenang untuk meninjau komposisi keanggotaan dan efektivitasnya secara keseluruhan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Pada akhir tahun 2012, Komite Governance, CSR dan HSE terdiri dari 6 (enam) anggota :

- Eddie J. Soebari – Ketua
- Dileep Srivastava – Anggota
- Endang Ruchijat – Anggota
- Faisal Firdaus – Anggota
- R. Utoro – Anggota
- Sudirman S. Widhy – Anggota
- Elly Slamet – Anggota

G. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Uraian Fungsi dan Kegiatan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BUMI dijalankan oleh Divisi Investor Relations & Corporate Secretary. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus, Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi untuk:

- Membantu Presiden Direktur mengembangkan efektivitas dari Presiden Direktur, Direksi, dan Dewan Komisaris guna mendukung strategi usaha dan Perusahaan dengan menyediakan dan menjaga hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta Direksi dan manajemen eksekutif;

- Endang Ruchijat – Members
- Faisal Firdaus – Members
- R. Utoro – Members
- Sudirman S. Widhy – Members
- Ashok Mitra – Members
- Sanjay K. Jain – Members
- Elly Slamet – Members
- Dharyanto Effendi – Members

Governance, CSR & HSE Committee

Through Decision Letter of the Board of Directors No. 989/BR-BOD/XI/11 Governance, CSR & HSE Committee was established with the following roles and responsibilities:

- To proactively promote highly standardized GCG, CSR & HSE sustainable development as BUMI's core values
- To ensure that BUMI Group's business processes are conducted within the framework of GCG
- To encourage a culture that recognizes CSR and HSE priorities
- To ensure that the GCG, CSR and HSE policies throughout BUMI are comply with prevailing legislation and international best practices
- To take responsibility for the review and approval of BUMI's policies and procedures with respect to the GCG, CSR & HSE issues.

Membership

The Committee members will remain in office as long as they still hold the position titles as mentioned in the Committee Membership elaboration.

BUMI Directors are authorized to review this membership composition and its effectiveness as a whole, and make an adjustments at anytime as it deems necessary. As of the end of the year 2014, the Governance, CSR & HSE Committee consisted of 6 (six) members:

- Eddie J. Soebari – Chairman
- Dileep Srivastava – Member
- Endang Ruchijat – Member
- Faisal Firdaus – Member
- R. Utoro – Member
- Sudirman S. Widhy – Member
- Elly Slamet – Member

G. CORPORATE SECRETARY

Description of Functions and Activities

The functions of BUMI's Corporate Secretary are coordinated through the Investor Relations & Corporate Secretary Division. Based on Board Manual, the Corporate Secretary has the functions to:

- Assist the President Director to enhance the effectiveness of President Director, the Boards of Directors and Commissioners to support business strategy and corporate objectives by providing and maintaining a liason between the Boards of Directors and Commissioners, and the Shareholders as well as between the Directors and the executive management;

- Mengelola informasi, penjadwalan dan ketentuan-ketentuan; dan
- Menginterpretasikan dan menerapkan peraturan yang mengatur prosedur Perusahaan dan memelihara catatan atas tindakan Perusahaan.

Sampai akhir tahun 2014, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Dileep Srivastava.

Informasi tentang latar belakang dari Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 201 Laporan Tahunan ini.

Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai penghubung dan memelihara hubungan yang baik antara Perusahaan dengan otoritas dan Bursa Efek Indonesia, pemodal, analis, media dan publik;
2. Harus selalu mengikuti semua peraturan yang berkaitan dengan pasar modal dan Bursa Efek Indonesia khususnya hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengambil tindakan yang sesuai dan memberikan saran dan masukan kepada Direksi guna memastikan bahwa Perusahaan telah mentaati Undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, serta hukum dan peraturan lainnya;
3. Membantu pekerjaan kesekretariatan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas mereka dengan mengkoordinasi rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan RUPS dan menyiapkan agenda yang relevan;
4. Mengawasi pengelolaan dokumentasi Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Mengkoordinasi dan menindaklanjuti penugasan komite Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta manajemen senior, termasuk mengorganisir, membuat dan menyimpan risalah rapat;
6. Mempersiapkan dan mengelola, termasuk menyimpan dan memutakhirkan daftar khusus saham yang dimiliki oleh para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan keluarga mereka;
7. Mengkoordinir pembuatan laporan tahunan Perusahaan termasuk di dalamnya laporan pelaksanaan GCG dan Laporan Keberlanjutan;
8. Mengelola, memantau dan melakukan pengkinian terhadap *website* Perusahaan;
9. Bertanggung jawab mempertahankan komunikasi yang baik dan efektif ke publik.

Penyebaran Informasi dan Detail Kontak

Situs Perusahaan www.bumiresources.com dapat digunakan untuk mengunduh informasi terkini dan kinerja Perusahaan. Perusahaan juga dapat dihubungi melalui *website* ini. Termasuk juga profil manajemen dan rincian khusus mengenai visi, organisasi dan milestone Perusahaan.

BUMI berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam pengungkapan informasi Perusahaan untuk memastikan semua investor dan calon investor secara merata dapat mengakses informasi yang kredibel dan relevan. BUMI telah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Regulator untuk melindungi informasi sensitif dan secara efektif menyebarkan informasi perusahaan yang bersangkutan.

- Manage information, scheduling and requirements; and
- Interpret and apply the rules which govern Company procedures and preserve the record of all Company action.

At the end of 2014, Corporate Secretary was Dileep Srivastava.

Background information of Corporate Secretary is available on page 201 of this Annual Report.

Roles and Responsibilities Corporate Secretary

The tasks and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Acts as a liaison and maintains good relationships between the Company and OJK, Indonesia Stock Exchange, investors, analysts, the media and the public;
2. To always comply with all prevailing legislation related to capital markets and Indonesian Stock Exchange, and take relevant actions in order to give suggestions and opinions to the Directors to ensure that the Company has already met relevant Company Law, capital market regulations and other related laws and regulations;
3. To assist in any secretarial jobs to support the Boards of Commissioners and Directors in performing their respective duties by coordinating the Boards of Commissioners and Directors meetings as well as the General Meeting of Shareholders including preparing relevant agendas;
4. To monitor the documentation management of the Boards of Commissioners and Directors;
5. To coordinate and follow up the assignation of the Boards of Commissioners and Directors committees against the members of the Boards of Commissioners and Directors and also senior management teams including to organize, create and record the minutes;
6. To prepare and manage records and updates in the special register of shares owned by members of the Boards of Commissioners and Directors and their families;
7. To coordinate the establishment of the Company's annual report including the good corporate governance implementation and sustainability reports;
8. To manage, monitor and update the Company's website;
9. Responsible for maintaining good and effective communications with the public.

Information Disclosure and Contact Details

The Company's website: www.bumiresources.com can be used to download up-to-date information and performance. The Company can also be reached through this website. Included also are profiles of management and specific details on the Company's vision, organization and milestones.

BUMI is committed to maintaining the highest standard in Corporate Information disclosure to ensure that all investors and prospective investors can equitably access credible and relevant information. BUMI has formulated a policy pertaining to Disclosure of Information to the Public and Regulators to protect sensitive information and effectively disseminate pertinent corporate information.

Pengiriman laporan berkala sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pasar modal dan bursa efek, BUMI selalu cepat dan akurat menerbitkan semua laporan yang relevan. Laporan rutin termasuk Laporan Pengembangan Kegiatan Eksplorasi serta Laporan Keuangan Triwulanan, Semi-Tahunan, dan Tahunan.

Informasi Perusahaan dan laporan yang dikeluarkan oleh Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2014 adalah:

Regular report submissions in compliance with the prevailing laws, capital market and stock exchange regulations, BUMI always promptly and accurately publishes all relevant reports. Regular reports include the Exploration Activities Development Report as well as Quarterly, Semi-Annual, and Annual Financial Statements.

Corporate Information and statements issued by the Company through the Corporate Secretary throughout 2014 were:

Kegiatan Activities	Jumlah Number of Activities
Pertemuan Investor/Paparan Publik Investor Summit / Public Expose	2
Penyampaian Informasi kepada regulator Information disclosure to regulators	18
Siaran Pers Press Releases	9
Pertemuan Individu dengan Analis Individual Meetings with Analysts	39
Laporan Tahunan Annual Report	1
RUPS Tahunan AGM	1
RUPS Luar Biasa EGMs	2
Investor Relations Roadshows	7

Paparan Publik

BUMI menyelenggarakan Paparan Publik Insidental pada 6 Oktober 2014 dan Paparan Publik Tahunannya pada 26 November 2014 di Avara Lounge, Epicentrum Walk, Jakarta, sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta kewajiban perusahaan publik untuk mengadakan paparan publik tahunan.

Paparan Publik Insidental dihadiri eksekutif BUMI Bapak Saptari Hoedaja (Presiden Direktur), Bapak Andrew C. Beckham (Direktur), Bapak Kenneth P. Farrel (Direktur), Bapak Dileep Srivastava (Direktur & Sekretaris Perusahaan) dan Ibu R.A Sri Dharmayanti (Direktur). Diskusi berpusat pada kinerja operasional, kinerja keuangan dan informasi tentang *right issue*.

Agenda utama dari Paparan Publik tahunan untuk mengungkapkan *update* terbaru tentang BUMI dan dihadiri oleh lebih dari 130 peserta dari berbagai daerah, termasuk masyarakat pasar modal, analis dan investor, pengamat, media, masyarakat dan karyawan BUMI. Eksekutif BUMI yang hadir sebagai narasumber adalah Bapak Dileep Srivastava (Direktur & Sekretaris Perusahaan), Bapak Andrew C. Beckham (Direktur) dan Bapak Reza A. Widjaja (VP Hubungan Investor dan Chief Economist).

Public Expose

BUMI conducted an Incidental Public Expose on 6 October 2014 and the Annual Public Expose on 26 November 2014 at Avara Lounge Epicentrum, Jakarta. In compliance with Indonesian Stock Exchange No.1-E on the Obligation to Submit Information, and requiring public limited companies to organize an annual public expose.

At the Incidental Public Expose there were Saptari Hoedaja (President Director), Andrew C. Beckham, Kenneth P. Farrell (Director) and RA Sri Dharmayanti (Director), Dileep Srivastava (Director & Corporate Secretary). Discussion centered on production and financial performance and information on The Company's Rights Issue.

The agenda of Annual Public Expose discussed the Company's information update which was attended by more than 130 participants from various areas, including capital market press, analysts and investors, observers, media, public and BUMI employees. BUMI executives who attended as speakers were Mr. Dileep Srivastava (Director & Company Secretary), Mr. Andrew C. Beckham (Director) and Mr. Reza A. Widjaja (VP Investor Relations and Chief Economist).

Pengungkapan Informasi

Pengungkapan Informasi ke OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Information Disclosure

Information disclosure to FSA and Indonesia Stock Exchange in 2014 were as follows:

No	Tanggal Date	Judul Title
1	2 January 2014	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Bumi Resources, Tbk. ("Perseroan"). Submission of Advertisement the Second Extraordinary General Meeting Shareholders
2	13 January 2014	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan. Results Announcement on the second Extraordinary General Meeting of Shareholders
3	13 January 2014	Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan. Submission of Advertisement of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders
4	13 March 2014	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan Submission of Advertisement the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders
5	4 April 2014	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan Results Announcement on the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders
6	7 April 2014	Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Submission of Advertisement the Extraordinary General Meeting of Shareholders
7	28 April 2014	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Announcement of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
8	5 May 2014	Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Announcement on Delay of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
9	6 May 2014	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Submission of Advertisement Announcements on Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
10	6 May 2014	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Keterbukaan Informasi Perseroan Submission of Advertisement Announcement on Company Information Disclosure
11	20 May 2014	Pemberitahuan Penundaan Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Announcement on Delay Second Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders the Company
12	5 June 2014	Pemberitahuan Penundaan Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Announcement on Delay Third Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
13	13 June 2014	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Submission of Advertisement Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
14	27 June 2014	Penyampaian Bukti Iklan Tambahan/Perbaikan Keterbukaan Informasi Perseroan Submission of Advertising Addition/ Revision Company Information Disclosure
15	1 July 2014	Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa Perseroan Results Announcement Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
16	2 July 2014	Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan. Submission of Advertisement Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
17	6 October 2014	Laporan Hasil Public Expose Insidentil Report of the Incidental Public Expose
18	26 November 2014	Laporan Hasil Public Expose Tahunan Report of the Annual Public Expose

Siaran Pers

Siaran Pers mengenai BUMI sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Press Release

Press Releases of BUMI in 2014:

No	Tanggal Date	Bahasan Topics
1	3-Jun-14	BUMI & Enercoal Menunjuk Deutsche Bank sebagai Agen Solisitasi Tunggal untuk Obligasi Konversi yang akan Jatuh Tempo August 2014 BUMI & Enercoal Appoint Deutsche Bank as Sole Solicitation Agent for August 2014 CB
2	6-Jun-14	Proses Permohonan Persetujuan Obligasi Konversi Bumi Telah Diajukan Secara Resmi – Informasi Terkini BUMI's Formal CB Consent Process Begins - Update
3	11-Jun-14	BUMI Telah Melakukan Pembayaran Kupon atas Obligasi yang Jatuh Tempo pada tahun 2016 BUMI Pays Coupon on Bond Maturities in 2016
4	2-Jul-14	BUMI melepas 19% saham KPC ke CIC sebagai bagian perjanjian penyelesaian utang BUMI transfers 19% stake in KPC to CIC as part of the debt settlement agreement
5	8-Aug-14	BUMI Menegaskan Proses Final Permohonan Persetujuan Perubahan Ketentuan Obligasi Konversi – Informasi Terkini BUMI Confirms Final CB Consent Process – Update
6	22-Aug-14	BUMI Menegaskan Jatuh Tempo Obligasi Konversi Diperpanjang hingga April 2018 – Status yang Terjamin, Tingkat Kupon Obligasi Diturunkan, Segala Kemungkinan Gagal Bayar Telah Diabaikan Bumi Confirms CB Maturity Extended Till April 2018 - Secured Status Coupon Reduced Any Default Waived
7	5-Nov-14	Bumi Investment Pte. Ltd. – Obligasi Senior Bergaransi 2017 dengan Bunga 10,75% Per Tahun – Pembayaran Bunga bulan Oktober 2014 Bumi Investment Pte Ltd - 10.75% PA Guaranteed Senior Secured Notes 2017 - Settlement of Oct'14 Interest
8	21-Nov-14	BUMI Mengadakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat untuk Menjual Saham FBS BUMI Enters Into Conditional Sale & Purchase Agreement to Sell FBS Stake
9	25-Nov-14	Pengadilan Singapura Mengabulkan Upaya Restrukturisasi Utang oleh Bumi Capital-Bumi Investment & Enercoal Resources Undang-undang Perusahaan Singapura Singapore Court Grants Approval to Bumi Capital; Bumi Investment & Enercoal Resources to Facilitate Restructuring

Roadshow Investor Relations

Roadshow Investor Relations sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Roadshow Investor Relations

Investor Relations Roadshows in 2014:

Tanggal Date	Host	Conference	Venue
25 February 2014	UBS	UBS Indonesia Conference 2014	Mandarin Oriental Hotel, Jakarta
26 February 2014	Nomura	Asean All Access	Fullerton Hotel, Singapore
26 - 27 March 2014	Credit Suisse	17th Asian Investment Conference	Conrad Hotel, Hong Kong
1 April 2014	PT Maybank Kim Eng Securities	Invest ASEAN 2014	Singapore
14 July 2014	BUMI	Analyst Meeting (Goldman Sachs, OSK Group & UBS)	Grand Hyatt, Singapore
3 September 2014	Goldman Sachs	Goldman Sachs Future Forward Asean Corporate Day 2014	The Ritz Carlton Millenia, Singapore
31 October 2014	Direktorat Jendral Mineral & Batu bara	Seminar on the Prospects of Indonesia Coal Resources Exploration for 2014	Bali Dynasty Resort, Bali

H. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal BUMI secara keseluruhan.

Sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan mencapai keandalan dan ketepatan informasi keuangan dan operasi, efektivitas dan efisiensi dalam operasi, perlindungan aset fisik, dan kepatuhan pada semua undang-undang, peraturan dan kontrak yang relevan.

Tinjauan atas praktik dan usaha perbaikan pengendalian internal BUMI di tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- **Komponen lingkungan pengendalian:**
BUMI mengedepankan pentingnya penerapan Pedoman Perilaku secara berkelanjutan di seluruh organisasi BUMI untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki integritas yang tinggi dan menerapkan etika dalam semua kegiatan mereka. Pelatihan dan program pengembangan yang terkait telah disediakan kepada karyawan BUMI dan anak perusahaannya untuk memastikan bahwa semua karyawan telah kompeten dan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Direksi dan Dewan Komisaris telah memberikan perhatian dan arahan penuh untuk memastikan lingkungan pengendalian berlaku sebagai suatu landasan yang kuat untuk semua komponen lain dalam pengendalian internal.
- **Komponen penilaian risiko:**
BUMI menunjuk Risk Officer di BUMI dan anak perusahaannya untuk membantu Risk Owner dalam mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan serta melaksanakan dan memantau kegiatan mitigasi. BUMI telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kepada karyawan terkait, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Korporat (Enterprise Risk Management – ERM). Termasuk dalam kebijakan dan prosedur ERM ini adalah Tujuan, Pihak yang bertanggung jawab, Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan Risiko dan Proses Manajemen Risiko (yaitu: identifikasi, evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan risiko).

Setiap kali muncul risiko yang signifikan, risiko ini akan segera dianalisa dan rencana mitigasi yang tepat akan dirancang, diimplementasikan dan dimonitor. Selain itu, penilaian risiko secara keseluruhan dan terperinci telah dilakukan secara teratur di BUMI dan anak perusahaan atas proses bisnis kunci.

Daftar risiko dan peta risiko (*risk map*) BUMI telah ditinjau ulang dan diperbaharui sebagai komitmen yang tinggi dalam menanggapi situasi saat ini dan perubahan lingkungan di BUMI yang dinamis. Hasil ERM ini telah digunakan sebagai dasar untuk memperbarui rencana Risk Based Internal Audit (RBIA) 2014 dan menyusun rencana RBIA 2015. Secara ringkas, proses manajemen risiko telah mencakup proses penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, dan tanggapan atas risiko.

H. INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for the BUMI's overall internal control systems.

The internal control systems are designed with the objectives to achieve reliability and accuracy of financial and operational information, effectiveness and efficiency in operations, safeguarding of assets and compliance with all relevant laws, regulations and contracts.

An overview of BUMI's internal control practices and enhancements in 2014 were as follows:

- **Control environment component:**
BUMI has continuously promoted good Code of Conduct practices over the entire BUMI organization to ensure that its personnel have strong integrity and have implemented the Code of Conduct in all their activities. Relevant training and development programs have been provided to BUMI and subsidiary employees to ensure that all personnel are competent and have been equipped with adequate knowledge and skills in performing their roles and responsibilities. The Board of Directors and the Board of Commissioners have provided full attention and direction to ensure the control environment serves as a strong foundation for all other components of internal control.
- **Risk assessment component:**
BUMI appointed Risk Officers at BUMI and its subsidiaries to assist Risk Owners in identifying, analyzing as well as planning to mitigate risks as well as implementing and monitoring risk mitigation activities. BUMI has formalized and communicated to its relevant employees an Enterprise Risk Management System (ERM) policy and procedure. Included in this ERM policy and procedure are the objectives, responsible parties, risk management organization structure, risk management framework, risk policy and risk management processes (e.g. risk identification, evaluation, and mitigation, monitoring, and reporting).

Any time significant risks have emerged, these risks will be immediately analyzed and suitable mitigation plan will be designed, implemented and monitored. Furthermore, overall and detailed risk assessments have been conducted across BUMI and its subsidiaries over their key business processes on a regular basis.

BUMI's risk registers and risk maps have been continuously reviewed and updated representing strong commitment in responding to current situations and dynamic environmental change of BUMI. These ERM outputs have been used as the basis of updating the Risk Based Internal Audit (RBIA) plan 2014 and develop the RBIA plan for 2015. In summary, the risk management processes have encompassed the processes of objective setting, event identification, risk assessment and risk responses.

- **Komponen kegiatan pengendalian:**
Rencana mitigasi risiko dan kegiatan pengendalian telah ditinjau dan diperbarui di BUMI, KPC, Arutmin dan anak perusahaan lain yang besar. Dokumentasi dan rancangan kegiatan pengendalian telah ditingkatkan sebagai bagian dari penyusunan, *update* dan perbaikan SOP berkelanjutan di BUMI dan anak perusahaannya. SOP ini telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada karyawan terkait dan implementasinya telah ditinjau dan dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan kinerja berkualitas tinggi yang konsisten dalam semua kegiatan pengendalian di BUMI dan anak perusahaannya.
- **Komponen informasi dan komunikasi:**
Manajemen operasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal, baik untuk keuangan maupun operasional, beroperasi secara efektif melalui identifikasi, pencatatan dan komunikasi informasi yang relevan dalam bentuk dan jangka waktu yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Selanjutnya, BUMI telah menerapkan *Speak-Up System* untuk memastikan bahwa semua pelanggaran signifikan atas Pedoman Perilaku akan diselidiki dan ditindaklanjuti secara tepat.
- **Komponen pemantauan:**
Kegiatan pemantauan telah dilakukan melalui pengawasan secara mendalam dan berkelanjutan pada semua tingkatan manajemen di semua divisi di bawah Grup BUMI untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan dan untuk melakukan perbaikannya dengan segera.

Manajemen pada semua tingkatan adalah lini pertama dalam meninjau dan memantau proses dan pengendalian internal untuk area dalam tanggung jawabnya dalam aktivitas operasi keseharian mereka. Manajemen melakukan perbaikan berdasarkan pemantauan tersebut untuk memastikan proses dan pengendalian internal telah berhasil secara efektif dan cukup serta bisa diterapkan dalam mengatasi risiko signifikan. Divisi Audit Internal membantu manajemen dalam bentuk audit atas proses dan praktik pengendalian internal berdasarkan RBIA dan menyediakan solusi perbaikan alternatif sebagaimana disarankan dalam rekomendasi audit internal.

Divisi Audit Internal bekerja sama dengan Komite Audit BUMI (dan juga Komite Audit KPC dan Arutmin) dan fungsi-fungsi lain dalam organisasi BUMI untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian telah dirancang dengan baik untuk mengurangi risiko signifikan sebagaimana diidentifikasi oleh proses manajemen risiko dan beroperasi secara efektif dalam proses bisnis utama pada BUMI dan anak perusahaannya. Hasil audit telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pembahasan telah dilakukan secara rutin dengan Komite Audit pada tingkat induk dan anak perusahaan atas masalah terkait audit internal untuk memastikan bahwa Komite Audit memperoleh cukup informasi untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

- **Control activity component:**
Risk mitigation plans and control activities have been continuously reviewed and updated at BUMI, KPC, Arutmin and other major subsidiaries. Documentation and design of control activities have been enhanced as part of continuous development, update and improvement of existing SOP's at BUMI and its subsidiaries. These SOPs have been communicated and socialized to relevant employees and their implementation has been continuously reviewed and monitored to ensure that all control activities have been implemented within BUMI and its subsidiaries.
- **Information and communication component:**
Operations management has the responsibility to ensure that internal control systems, both for finance and operation, are operating effectively through identifying, capturing and communicating pertinent information in a form and timeframe that enable people to carry out their responsibilities appropriately. In addition, BUMI has implemented the *Speak-up System* to ensure that any significant violation of the Code of Conduct are investigated and followed-up properly.
- **Monitoring component:**
Monitoring activities have been conducted through continuous and close supervision at all managerial levels at all divisions under BUMI Group in order to identify potential deviations which could hinder achievement of the corporate objectives and make necessary corrections immediately.

Managements at all levels are the first line in reviewing and monitoring the processes and internal controls of areas under their responsibilities during their daily operational activities. Management make improvements based on those monitoring to ensure those processes and internal controls are working effectively and are still applicable as well as are adequate to address any significant risks. Internal Audit is assisting management with audits on processes and internal control practices based on the RBIA and providing alternative remedial solutions as suggested in the Internal Audit recommendations.

The Internal Audit Division worked closely with BUMI's Audit Committee (and also the Audit Committees of KPC and Arutmin) and other functions in the BUMI organization to ensure that the control activities have been designed properly to mitigate significant risks as identified by the risk management processes and are operated effectively in key business processes within BUMI and its subsidiaries. The results of the audits have been reported to the Board of Directors and the Board of Commissioners. Discussions have been regularly conducted with the Audit Committees at the holding company level and subsidiary level over internal audit matters to ensure that the Audit Committees were well informed, enabling them to perform their oversight function.

I. INTERNAL AUDIT

Divisi Internal Audit

Divisi Audit Internal menyediakan jasa asuransi dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam memperbaiki operasi BUMI dan membantu manajemen BUMI dalam mencapai sasarannya melalui pendekatan yang sistematis dan terarah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Untuk tujuan ini, Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan bekerja erat dengan Komite Audit secara independen. Kepala Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan, menjalankan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan audit dalam rangka mencapai sasaran Divisi Audit Internal.

Dalam memenuhi tanggung jawab, Auditor Internal BUMI merujuk kepada Kerangka Internasional untuk Praktik Profesional (International Professional Practices Framework) yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), yang termasuk dalamnya adalah Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Divisi Audit Internal juga diatur dalam Piagam Audit Internal BUMI yang disetujui oleh Presiden Direktur, Presiden Komisaris/Komisaris Independen, Ketua Komite Audit/Komisaris Independen, dan Kepala Divisi Audit Internal. Yang dicantumkan dalam Piagam Audit Internal tersebut antara lain adalah misi audit internal, struktur dan posisi, persyaratan independensi, ruang lingkup kerja audit internal, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, persyaratan kompetensi dan perilaku auditor internal, persyaratan untuk mematuhi standar IIA untuk Praktik Profesional Audit Internal, termasuk pedoman etika auditor internal dan kewajiban pelaporan bagi auditor internal.

Semua kegiatan Divisi Audit Internal bebas dari pengaruh komponen apapun di BUMI dalam pemilihan area, metodologi, cakupan, prosedur, frekuensi, waktu pelaksanaan audit dalam rangka memastikan independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas Audit Internal.

Semua Auditor Internal BUMI dilarang:

- Untuk melaksanakan tugas operasional di BUMI termasuk menerapkan rekomendasi audit internal.
- Untuk terlibat dalam transaksi operasional harian.
- Untuk berada di dalam garis tugas (command line) kegiatan operasional, kecuali dalam kegiatan yang berhubungan dengan audit internal.

Divisi Audit Internal memiliki akses penuh ke semua fungsi, catatan, aset fisik dan karyawan BUMI.

I. INTERNAL AUDIT

The Internal Audit Division

The Internal Audit Division provides an independent, objective oriented assurance and consulting service designed to add value and improve BUMI's operations and to help BUMI accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

For this purpose, the Head of Internal Audit Division reports directly to the President Director and works closely with the Audit Committee in a highly independent fashion. Head of Internal Audit Division is accountable to plan, conduct, coordinate, and control audit engagement activities in order to achieve management objectives of the Internal Audit Division.

In fulfilling their responsibilities, BUMI's Internal Auditors refer to the International Professional Practices Framework (IPPF) issued by The Institute of Internal Auditors (IIA), which includes The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit and The Internal Audit Code of Ethics.

Roles, responsibilities and authority of Internal Audit are also arranged in the BUMI's Internal Audit Charter approved by the President Director, the President Commissioner/ Independent Commissioner, the Chairman of Audit Committee/ Independent Commissioner, and the Head of Internal Audit. Included in the Charter are the internal audit mission, structure and position, independence requirement, scope of work, roles and responsibility, authority, auditor's competency and behavior requirements, requirement to comply with IIA's standards for the Professional Practice of Internal Auditing, including internal audit code of ethics and reporting requirements.

All Internal Audit Division activities are free from influence of any components within BUMI in choosing the audit areas, methodologies, scope, procedures, frequency, timing for ensuring independency and objectivity in carrying out the Internal Audit duty.

All BUMI's Internal Auditors are prohibited:

- To carry out operational duties in BUMI including implementing internal audit recommendations.
- To be involved in daily operational transactions.
- To be within the command line of operational activities, except in activities related to internal audit.

The Internal Audit Division has full access to all functions, records, property and personnel of BUMI.

Divisi Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Merancang dan menjalankan rencana audit internal tahunan untuk memastikan sasaran pengendalian internal telah dirancang dan beroperasi secara tepat. Sasaran pengendalian internal ini adalah keandalan dan ketepatan informasi keuangan dan operasi, efektivitas dan efisiensi dalam operasi, perlindungan aset fisik, dan kepatuhan pada semua undang-undang, peraturan dan kontrak yang relevan.
- Menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan praktik tata kelola sesuai dengan kebijakan BUMI, serta menyediakan masukan untuk memperbaiki praktik sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola.
- Menganalisa dan mengevaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasional atas area keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan area penting lainnya.
- Menyediakan rekomendasi obyektif atas proses dan kegiatan yang dievaluasi kepada manajemen dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada secara berkelanjutan.
- Menyediakan dan menjelaskan laporan audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit BUMI dan Komite Audit KPC dan Arutmin.
- Memantau status penerapan rekomendasi audit internal sebelumnya.
- Bekerja erat dengan Komite Audit di BUMI, KPC dan Arutmin dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehubungan dengan kegiatan audit internal serta asurans kualitas atas kegiatan audit internal.
- Melaksanakan audit khusus sesuai kebutuhan manajemen BUMI.
- Berdasarkan permintaan, menyediakan jasa konsultasi untuk membantu manajemen BUMI dalam mencapai target dan sasaran mereka.
- Menyediakan dukungan kepada Code of Conduct Committee dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Pedoman Perilaku melalui *Speak-Up System*.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dirinci dalam Piagam Audit Internal.

Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2014

Selama tahun 2014, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan dengan Manajemen Senior serta Risk Officers BUMI, KPC, dan Arutmin untuk memperbaharui Rencana Risk Based Internal Audit (RBIA) 2014, dan untuk menyiapkan rencana RBIA 2015.
- Mengikuti rapat Komite Audit di BUMI, KPC, dan Arutmin untuk membahas pembaruan pelaksanaan Rencana RBIA 2014 dan penyiapan Rencana RBIA 2015.
- Melaporkan hasil penugasan audit internal kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Memantau pelaksanaan rekomendasi audit internal dengan memberikan pengingat kepada manajemen mengenai tenggat waktu penerapan rekomendasi yang harus mereka penuhi.

The Internal Audit Division has the following roles and responsibilities:

- Designing and carrying out the annual internal audit plan to ensure internal control objectives at BUMI have been designed and operated appropriately. These internal control objectives are reliability and accuracy of financial and operational information, effectiveness and efficiency in operation, safeguarding of assets and compliance with all relevant laws, regulations and contracts.
- Testing and evaluating the internal control systems, risk management and corporate governance practices in accordance with BUMI's policies as well as providing input for enhancing internal control systems, risk management and corporate governance practices.
- Analyzing and evaluating internal controls related to operational effectiveness and efficiency over finance, accounting, operations, human resource, marketing, information technology and other key areas.
- Providing objective recommendations about processes and activities that are being evaluated to management with a view to continuously improving the existing conditions.
- Providing and explaining audit reports to the Board of Directors, the Board of Commissioners, including BUMI's Audit Committee and Audit Committees of KPC and Arutmin.
- Monitoring the implementation status of the previous internal audit recommendations.
- Closely working with the Audit Committees at BUMI, KPC and Arutmin in carrying their oversight functions in relation to internal audit activities as well as quality assurance over the internal audit activities.
- Carrying out special audits as required by BUMI management.
- Upon request, providing consulting services to assist BUMI management in achieving their targets and objectives.
- Providing support to the Code of Conduct Committee in following-up reports on the Code of Conduct violations through the *Speak-Up Systems*.

The roles and responsibilities of Internal Audit are detailed in the Internal Audit Charter.

Activities of the Internal Audit Division in 2014

During 2014, the Internal Audit Division conducted the following activities:

- Met Senior Management as well as Risk Officers of BUMI, KPC and Arutmin in order to update the Risk Based Internal Audit (RBIA) Plan 2014 and to develop the RBIA plan 2015.
- Attended Audit Committee meetings at BUMI, KPC, and Arutmin to discuss updating the implementation of RBIA Plan 2014 and developing RBIA Plan 2015.
- Reported the results of internal audit assignments to the Board of Directors and the Board of Commissioners through the Audit Committees.
- Monitored the implementation status of audit recommendations through sending reminder to management regarding the implementation due date which should be fulfilled.

- Memberikan pelatihan terkait tata kelola dan pengendalian internal secara umum kepada karyawan operasional Arutmin.
- Memberikan pelatihan terkait pengendalian internal atas uang muka kas pada tingkat manajer dan superintenden di Arutmin.
- Memberikan jasa konsultasi terkait prosedur operasi standar pada proses uang muka kas untuk kompensasi tanah dan pemberdayaan komunitas di Arutmin.
- Melakukan re-sosialisasi mengenai tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal kepada Tim Sumber Daya Manusia di KPC.
- Memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai isu terkait kode etik dan tata kelola perusahaan yang baik di KPC.
- Memberikan pelatihan terkait pengendalian internal dan kerangka pengendalian internal untuk karyawan KPC.
- Provided training on corporate governance and general internal control for Arutmin's operational employees.
- Provided training on internal control of cash advance for Arutmin's manager and superintendent levels.
- Provided consulting service on standard operating procedures for the processes of cash advance of land compensation and community development at Arutmin.
- Performed re-communication regarding roles and responsibilities of Internal Audit to the Human Resources Team at KPC.
- Provided recommendations and advises over issues related to ethical codes and good corporate governance at KPC.
- Delivered training on internal control and internal control framework to KPC's employees.

Dalam tahun 2014, Divisi Audit Internal menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana RBIA 2014 sebagai berikut:

In 2014, the Internal Audit Division executed its activities in accordance with the RBIA plan 2014 as follows:

Perusahaan Company	No	Penugasan Audit Internal Internal Audit Assignment
PT Bumi Resources Tbk	1	Audit atas PT Pendopo Energi Batu bara PT Pendopo Energi Batu bara Audit
	2	Audit atas Sistem Speak-Up Speak-Up System Audit
	3	Audit atas Pengadaan dan Kontrak IT IT Procurement and Contract Audit
PT Kaltim Prima Coal	1	Audit atas Pengelolaan Suku Cadang dan Komponen Part and Component Management Audit
	2	Audit Tindak Lanjut atas Aset Tetap Follow-up Audit on Fixed Assets
	3	Audit atas Pemasaran – Harga Batu bara Marketing - Coal Pricing Audit
	4	Audit atas Transshipment Transshipment Audit
	5	Audit atas Biaya Penanganan Pelabuhan Handling Fee Audit
	6	Audit atas Pengelolaan Lingkungan Ban di Pit Audit on Tyre Environment Management at Pit
	7	Audit atas Persediaan Ban Tire Inventory Audit
	8	Audit atas Fasilitas Penanganan Batu bara Coal Handling Facilities Audit
	9	Audit atas Pembangkit Listrik Power Plant Audit
	10	Audit atas Pengelolaan Bonus Kuartalan Management of Quarterly Bonus Audit
	11	Audit (Telaah terbatas) atas Kompensasi Lahan Audit (Desk review) over Land Compensation

Perusahaan Company	No	Penugasan Audit Internal Internal Audit Assignment
PT Arutmin Indonesia	1	Audit atas Pengelolaan Tanah Land Management Audit
	2	Audit atas Akuntansi Umum – Uang Muka General Accounting – Advance Audit
	3	Audit atas Kontrak Kintap - Pama Kintap Contract – Pama Audit
	4	Audit atas Pemasaran – Harga Batu bara Marketing – Coal Pricing Audit
	5	Audit atas Rencana Penambangan Asam-Asam dan Kintap Mine Plan Asam-Asam and Kintap Audit
	6	Audit atas Penutupan Tambang Pit Closure Audit
	7	Audit Tindak Lanjut atas Materi Peledak Follow-up Audit on Explosive Material
	8	Audit atas Proses Kepatuhan Statutory Statutory Compliances Processes Audit
	9	Audit Geoteknik Geotechnics Audit
	10	Audit Pengadaan Procurement Audit

Sehubungan dengan manajemen risiko, Divisi Audit Internal telah memperhitungkan risiko-risiko kunci yang teridentifikasi melalui Enterprise-Wide Risk Management System (ERM) dalam menyusun rencana RBIA 2014 dan 2015, dan secara aktif ikut serta dalam mengawasi penerapan mitigasi risiko/rencana perbaikan ERM dalam pelaksanaan audit berdasarkan rencana RBIA 2014 di divisi terkait di BUMI, KPC dan Arutmin dan anak perusahaan besar lainnya.

Divisi Audit Internal telah mengkomunikasikan rancangan rencana audit internal untuk 2015 kepada komite audit BUMI, KPC dan Arutmin, melaporkan hasil audit pada tahun 2014, dan menyelaraskan dan memasukkan saran-saran dari Komite Audit terkait rencana audit internal 2015 terakhir.

Untuk tahun 2015, Divisi Audit Internal berencana untuk menjalankan kegiatan audit internal yang difokuskan pada area berikut berdasarkan atas rencana RBIA:

In relation to risk management, Internal Audit has considered key risks identified through Enterprise-Wide Risk Management System (ERM) procedures in developing its RBIA plan 2014 and 2015 and actively involved in monitoring implementation of the risk mitigations/ ERM remediation plans during execution of the RBIA plan 2014 over relevant divisions within BUMI, KPC, Arutmin and its other major subsidiaries.

Internal Audit has communicated the draft of internal audit plan for 2015 to the audit committees of BUMI, KPC, and Arutmin, reported the audit results in 2014 as well as aligned and included concerns from the audit committees in the final internal audit plan for 2015.

For the year 2015, Internal Audit plans to carry out internal audit activities focusing on the following areas based on the RBIA plan:

Perusahaan Company	No	Rencana Audit Internal Internal Audit Plan
PT Bumi Resources Tbk	1	Audit atas Komunikasi Perusahaan Corporate Communication Audit
	2	Audit Tindak Lanjut atas Pengelolaan Risiko dan Risk that Matters Follow-up Risk Management and Risk That Matters Audit
	3	Audit atas Sumber Daya Manusia dan Penggajian Human Resources and Payroll Audit
	4	Audit atas Pengelolaan Kas dan Utang Dagang Cash Management and Account Payable Audit
	5	Audit atas Penganggaran Budgeting Audit
	6	Audit atas Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Internal Control over Financial Reporting Audit
	7	Audit Investasi Investment Audit
	8	Jasa Konsultasi Terkait Pengendalian Internal Consulting Services Related to Internal Controls
PT Kaltim Prima Coal	1	Audit atas Pengelolaan Tanah Land Management Audit
	2	Audit atas Pengelolaan Bahan Bakar Fuel Management Audit
	3	Audit atas Sumber Daya Manusia Human Resources Audit
	4	Audit atas Operasi Penambangan di Pit Pit Mining Operation Audit
	5	Audit atas Reklamasi Tanah Land Reclamation Audit
	6	Audit atas Pengelolaan Peledak Explosive Management Audit
	7	Audit atas Pemasaran Marketing Audit
	8	Audit atas Operasi Penjualan Sales Operation Audit
	9	Audit atas Pengelolaan Kontrak Penambangan Mining Contract Management Audit
	10	Audit Tindak Lanjut atas Pengelolaan Ban Follow Up Audit – Tyre Management
	11	Audit Tindak Lanjut atas Pemeliharaan Komponen Follow Up Audit – Component Maintenance
	12	Audit Tindak Lanjut atas Penanganan Batu bara Follow Up Audit – Coal Handling
	13	Audit Tindak Lanjut atas Pengadaan Follow Up Audit – Procurement

Perusahaan Company	No	Rencana Audit Internal Internal Audit Plan
PT Arutmin Indonesia	1	Audit atas Pembayaran Payments Audit
	2	Audit atas Pengelolaan Tanah Asam-Asam Land Management Asam-Asam Audit
	3	Audit atas Administrasi Pajak dan Royalti Tax and Royalty Administration Audit
	4	Audit atas Pemasaran Marketing Audit
	5	Audit atas Rekonsiliasi Batu bara Coal Reconciliations Audit
	6	Audit atas Penutupan Tambang Mine Closure Audit
	7	Audit atas Aset Tetap Fixed Assets Audit
	8	Audit atas Program Pemberdayaan Komunitas Community Development Program Audit
	9	Audit atas Pengelolaan Kontrak Contract Management Audit
	10	Audit Tindak Lanjut atas Uang Muka Follow Up Audit – Advances
	11	Audit Tindak Lanjut atas Demurrage and Despatch Follow up Audit – Demurrage and Despatch
	12	Audit Tindak Lanjut atas Pengelolaan Tanah Kintap Follow up Audit – Land Management Kintap

Untuk memperkuat praktik audit internal yang ada, Divisi Audit Internal akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan auditor internal secara berkelanjutan dengan cara menghadiri pelatihan, konferensi, seminar dan sertifikasi audit internal. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan ini dilakukan baik pada aspek teknis metode audit, pengetahuan industri pertambangan dan pasar modal.

Saat ini, Divisi Audit Internal telah memiliki tiga auditor bersertifikat Certified Internal Auditor (CIA) dan satu auditor bersertifikat Certification in Risk Management Assurance (CRMA) dari the Institute of Internal Auditor dan satu auditor yang memperoleh Sertifikat IV dalam Investigasi Pemerintah dari Layanan Forensik Australia.

Ringkasan profil Bapak Lufti Julian, QIA, CIA, CA sebagai Kepala Divisi Audit Internal BUMI

Bapak Lufti Julian adalah lulusan Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta. Meraih S2 dari Program Bersama Magister Manajemen Universitas Indonesia dan Université de Montpellier II, Perancis.

Beliau berpengalaman lebih dari 23 tahun sebagai Akuntan Publik, Audit Internal serta Akuntansi dan Keuangan: Delapan tahun memimpin fungsi Internal Audit di Group Media Terbesar di Indonesia, dan beberapa tahun sebagai konsultan dan auditor di Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan KAP Drs Santoso Harsokusumo, bagian dari Ernst & Young International.

To strengthen the existing internal audit practices, the Internal Audit Division will continuously develop knowledge and skills of its internal auditors by requiring attendance at internal audit trainings, conferences, seminars and certifications. The knowledge and skills are developed in the areas of audit methodology and techniques, the coal mining industry and capital market knowledge.

Currently, the Internal Audit Division has three auditors who were Certified Internal Auditors (CIA) and one auditor who obtained Certification in Risk Management Assurance (CRMA) from the Institute of Internal Auditors and one auditor who obtained Certificate IV in Government (Investigation) from the Australian Forensics Services.

Brief profile of Mr. Lufti Julian, QIA, CIA, CA as the Head of BUMI's Internal Audit Division

He graduated from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia, Jakarta, majoring in Accounting and holds Joint Program Master Degree from Magister Management University of Indonesia and Université de Montpellier II, France.

He has experience in public accountancy, internal auditing, finance and accounting of more than 23 years: For eight years, he led the internal audit function in the biggest Media Group in Indonesia and for several years as consultant and auditor of Management Institute of Faculty of Economics Universitas Indonesia and Drs. Santoso Harsokusumo Audit Firm, member of Ernst & Young International.

Beliau memiliki dua sertifikasi profesi Internal Audit yaitu:

- Certified Internal Auditor (CIA) yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors, Altamonte Spring, Florida, USA.
- Qualified Internal Auditor (QIA) yang dikeluarkan oleh Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor, Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta, Indonesia.

Beliau diangkat sebagai Kepala Divisi Audit Internal BUMI berdasarkan Surat Keputusan No. 1356/BR-BOD/XII/09 tanggal 31 Desember 2009 mengenai Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Bumi Resources Tbk yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris BUMI.

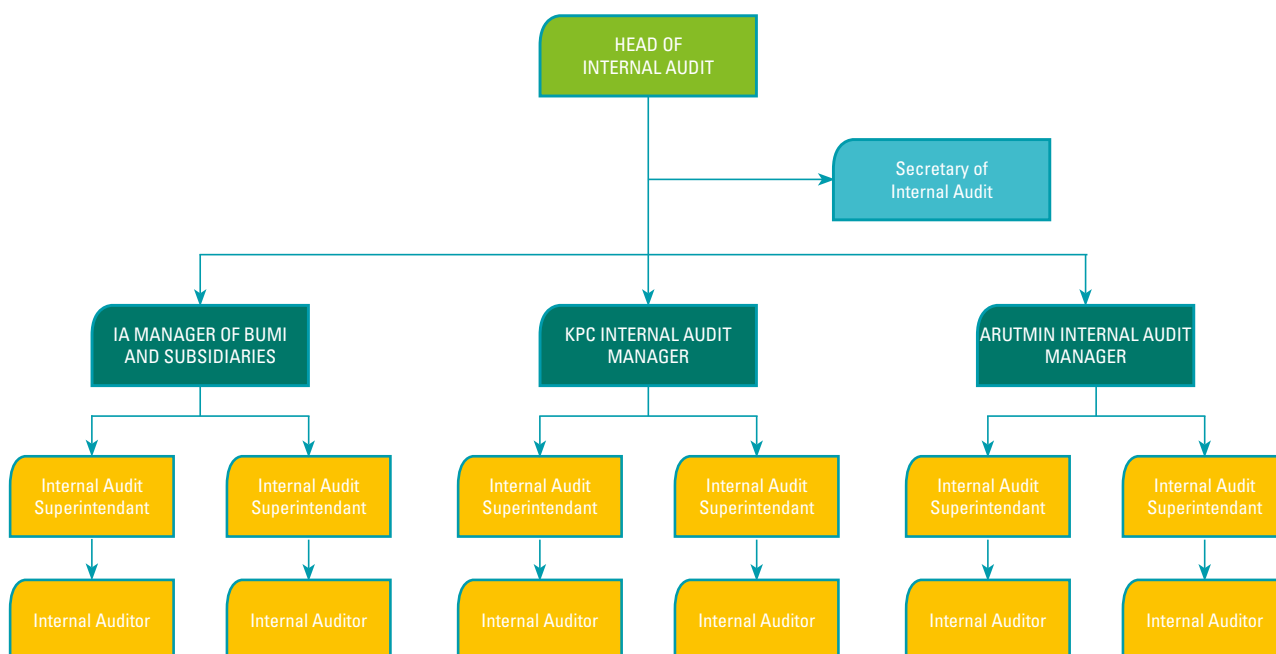
Struktur Organisasi Divisi Audit Internal PT Bumi Resources Tbk dan Anak Perusahaan

He was awarded two professional Internal Auditor certificates:

- Certified Internal Auditor (CIA), issued by The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida, USA.
- Qualified Internal Auditor (QIA), issued by Dewan Sertifikasi Nasional Qualified Internal Auditor, Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta, Indonesia.

He was appointed as the Head of BUMI's Internal Audit Division based on Decision Letter No. 1356/BR-BOD/XII/09 dated 31 December 2009 regarding Appointment of the Head of Internal Audit Unit of PT Bumi Resources Tbk which was approved by BUMI's President Director and President Commissioner.

Organization Structure of PT Bumi Resources Tbk and Its Subsidiaries Internal Audit Division



J. AUDIT EKSTERNAL

Selama 2014, BUMI menunjuk dua (2) Akuntan Publik yaitu: Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo untuk mengaudit laporan keuangan BUMI hingga 30 Agustus 2014 dan Akuntan Publik Y. Sentosa dan Rekan mulai dari September 2014 sampai sekarang dengan total biaya audit sebesar USD 555.000.

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perincian CSR BUMI dan anak perusahaannya akan dijelaskan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan halaman 144 Laporan Tahunan ini.

L. MANAJEMEN RISIKO

Perincian Manajemen Risiko di BUMI akan dijelaskan pada bagian Manajemen Risiko pada halaman 64 Laporan Tahunan ini.

M. PEDOMAN GCG

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG), Perusahaan memiliki beberapa kebijakan yang dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kebijakan tersebut adalah:

Pedoman GCG “Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita”

Perusahaan menetapkan Pedoman GCG “Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita” yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2008 bagi seluruh karyawan BUMI. Pedoman GCG ini menjadi pedoman bagi semua insan BUMI dalam menentukan kebijakan, sistem, prosedur dan aktivitas usaha lainnya.

Dewan Komisaris, Direktur, manajemen dan semua karyawan BUMI mempunyai tugas untuk meyakini bahwa kebijakan yang dijabarkan dalam “Cara Kerja yang Diharapkan Dari Kita” disebarluaskan dan diterapkan guna mencapai tujuan utama Perusahaan, yaitu:

- Mengelola kinerja keuangan guna memaksimalkan kesinambungan nilai pemegang saham;
- Menghasilkan keuntungan, kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua pihak yang terkait dengan usaha Perusahaan;
- Meyakini bahwa perilaku dan hubungan usaha selalu dilakukan secara terbuka, jujur dan etis.

J. EXTERNAL AUDITOR

During 2014, BUMI appointed two (2) Public Accountants which are: The Public Accounting Firm Tjiendradjaja & Handoko Tomo to audit BUMI's financial statements until 30 August 2014 and Public Accountant Y. Sentosa dan Rekan from September 2014 until present, with total expenses of USD 555,000.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Details of CSR disclosures at BUMI and its subsidiaries are described in the Corporate Social Responsibility section, page 144 of this Annual Report.

L. RISK MANAGEMENT

Details of Risk Management disclosure at BUMI and its subsidiaries are described in Risk Management section, page 64 of this Annual Report.

M. GCG GUIDELINES

In the implementation of Corporate Governance (GCG), the Company has established policies as guidelines for all levels of the Company in implemented the principles of good corporate governance. The policies are:

GCG Guidelines “The Way We are Expected to Work”

The Company established GCG Guidelines: “The Way We are Expected to Work” endorsed by the Boards of Commissioners and Directors in 2008 for all BUMI employees. This guideline has become the guidance for all BUMI business units in determining their policies, systems, procedures and other business activities.

The Boards of Commissioners and Directors, as well as management and all BUMI employees, have a role to play in ensuring that the policies set down in “The Way We Are Expected to Work” are appropriately disseminated and applied to achieve BUMI's key corporate objectives which are:

- Manage our financial performance to maximize sustainable value for our Shareholders;
- Generate benefits, opportunities and improved quality of life for all those on whom our business impacts;
- Ensure our business conduct and relationships are always open, honest and ethical.

Pedoman GCG BUMI mengatur antara lain Pengenalan GCG; Visi, Misi, Nilai dan Pedoman Perilaku; Rencana Strategik, Rencana Usaha, Anggaran dan Pengawasan Kinerja; Pemegang Saham; Dewan Komisaris dan Direksi; Sistem Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Audit; Pihak-pihak yang Berkepentingan; Keterbukaan dan Pengungkapan; dan Benturan Kepentingan.

Pedoman GCG dibagikan kepada setiap insan BUMI dan publik juga dapat mengunduhnya melalui situs Perusahaan.

Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus

Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus dibuat sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka guna memastikan efektivitas kerja mereka, memperkuat sistem pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS dan menerapkan implementasi GCG sebagaimana dijabarkan dalam Pedoman GCG "Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita".

BUMI selalu berkomitmen untuk mendukung implementasi GCG dan berusaha untuk mengikuti perkembangan dan perubahan dalam undang-undang dan praktik yang berlaku, oleh karena itu BUMI telah memperbaharui Pedoman Pelaksanaan Kerja Dewan Pengurus versi 2.0 yang diluncurkan pada tahun 2011 dengan penyesuaian terhadap Undang-undang Perseroan terbatas baru, praktik terbaik internasional UK Corporate Governance Code, Pedoman Umum GCG KNKG terbaru dan Pedoman Komisaris Independen KNKG.

Pedoman Perilaku "Cara Kita Melakukan Usaha"

Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku "Cara Kita Melakukan Usaha" yang disusun pada tahun 2006 dan telah direvisi kembali di tahun 2008. Pedoman Perilaku menjabarkan bagaimana Perusahaan melakukan usaha dan menjadi dasar bagi kebijakan dan petunjuk/prosedur lainnya yang berlaku dalam Perusahaan. Pedoman ini juga menjadi panduan bagi semua Dewan Komisaris, Direktur, manajemen dan karyawan dalam hal bagaimana Perusahaan melakukan usahanya secara berkesinambungan, berintegritas, profesional, mengutamakan keunggulan dan keselamatan lingkungan, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Seluruh insan BUMI diwajibkan untuk menandatangani formulir Kepatuhan Perilaku, yang menyatakan bahwa mereka telah membaca dan memahami bahwa Pedoman Perilaku tersebut berlaku bagi mereka dan mempunyai tanggung jawab pribadi untuk mendukung penerapannya.

Sosialisasi Pedoman Perilaku melalui situs Perusahaan, pengecekan tahunan, publikasi, forum diskusi dan pelatihan dilakukan secara berkala.

BUMI GCG Guidelines include Introduction to GCG; Vision, Mission, Value, Code of Conduct, Strategic Plan, Business Plan, Budgeting, Performance Monitoring, Shareholders, The Boards of Commissioners and Directors, Risk Management, Internal Control and Audit, Stakeholders, Transparency and Disclosure and Conflict of Interest.

GCG Guidelines is distributed to all BUMI employees and the public can also download it through the Company's website.

Board Manual

This Board Manual is developed as a comprehensive guideline for the members of the Boards of Commissioners and Directors, and the Corporate Secretary, in conducting their duties and responsibilities to ensure the Board effectiveness, strengthen the accountability of the Boards to the General Meeting of Shareholders (GMS), and implement the corporate governance policies as described in the "The Way We Are Expected to Work".

BUMI has always committed itself to support the implementation of GCG and strive to follow the developments and changes in applicable laws and practices; therefore, BUMI has renewed the Board Manual version 2.0, which was launched in 2011 in compliance to the newest Limited Liability Companies regulation, international best practice UK Corporate Governance Code, the newest Code of Good Corporate Governance KNKG and Guidelines for Independent Commissioners KNKG.

Code of Conduct "The Way we Conduct Business"

The Company has a Code of Conduct, "The Way We Conduct Business" established in 2006 and revised in 2008.

The Code of Conduct details the Way the Company conducts its business and serves as a basis for other policies and guidelines within the Company. It is a reference point for all Commissioners, Directors, management and employees and is part of continuing efforts by the Company to ensure that it conducts its activities with integrity, in an excellent and professional ways and is concerned with safety and the environment and in accordance with all applicable laws and regulations.

All BUMI employees are required to sign a Compliance Form to the Code of Conduct, stating that they have read and understand the Code of Conduct that applies to them and have a personal responsibility to support its implementation.

The Code of Conduct is socialized through the Company's website, annual checks, publications, discussion forums and trainings are conducted regularly.

Mr. SPIRIT sebagai Maskot Budaya Perusahaan

Maskot GCG BUMI, Mr. SPIRIT merepresentasikan Semangat, Profesionalisme, Independen, Rajin, Integritas dan Tanggung Jawab, diperkenalkan sejak tahun 2007 dan merupakan perangkat komunikasi yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai dan etika BUMI yang berhubungan dengan komitmen untuk mengimplementasikan nilai GCG, baik secara internal maupun eksternal dengan pihak pemasok, pelanggan, konsultan dan regulator.

Sistem Whistleblowing

BUMI menetapkan *Speak Up System* (sistem *whistleblowing*) pada tahun 2006 dan telah diperbarui oleh memorandum terbaru yang disetujui pada 28 Februari 2008. *Speak Up System* adalah prosedur yang berlaku bagi seluruh karyawan, manajemen, Direktur, Dewan Komisaris dan pihak terkait BUMI dan anak perusahaan untuk melaporkan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku.

Seseorang dapat melapor melalui *Speak Up System* dengan cara:

- Menelepon atau mengirimkan SMS ke nomor 0818 18 BUMI (0818 18 2864)
- Melengkapi formulir yang dapat diperoleh di tiap unit usaha dan mengirimkannya melalui fax ke nomor 0818 18 BUMI (0818 18 2864) atau PO BOX 2864 (BUMI) JKTM 12700
- Mengirimkan email ke alamat speakup@bumiresources.com
- Melengkapi dan mengirimkan Formulir *Speak Up System* yang dapat diperoleh melalui situs www.bumiresources.com.

BUMI berkomitmen untuk melindungi setiap karyawan yang secara jujur melaporkan terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku dan menjamin kerahasiaan pelapor. Seluruh laporan ke Sistem Pelaporan akan dicatat oleh pihak ketiga.

Mr. SPIRIT as BUMI's GCG Mascot

BUMI's GCG Mascot, Mr. SPIRIT, representing Courage, Professionalism, Independence, Perseverance, Integrity and Responsibility, was introduced in 2007 and is an effective communication tool to disseminate BUMI's values and ethics in relation to its commitment to implement GCG to both internally and with external parties, such as suppliers, customers, consultants, and regulators.

Whistleblowing System

BUMI established its *Speak Up System* (a whistle blowing system) on 2006 and amended by the memorandum on 28 February 2008. The *Speak Up System* is a procedure that should be followed by all BUMI and subsidiary employees, management, Directors, Commissioners, and related parties to report violations/breaches of the Code of Conduct.

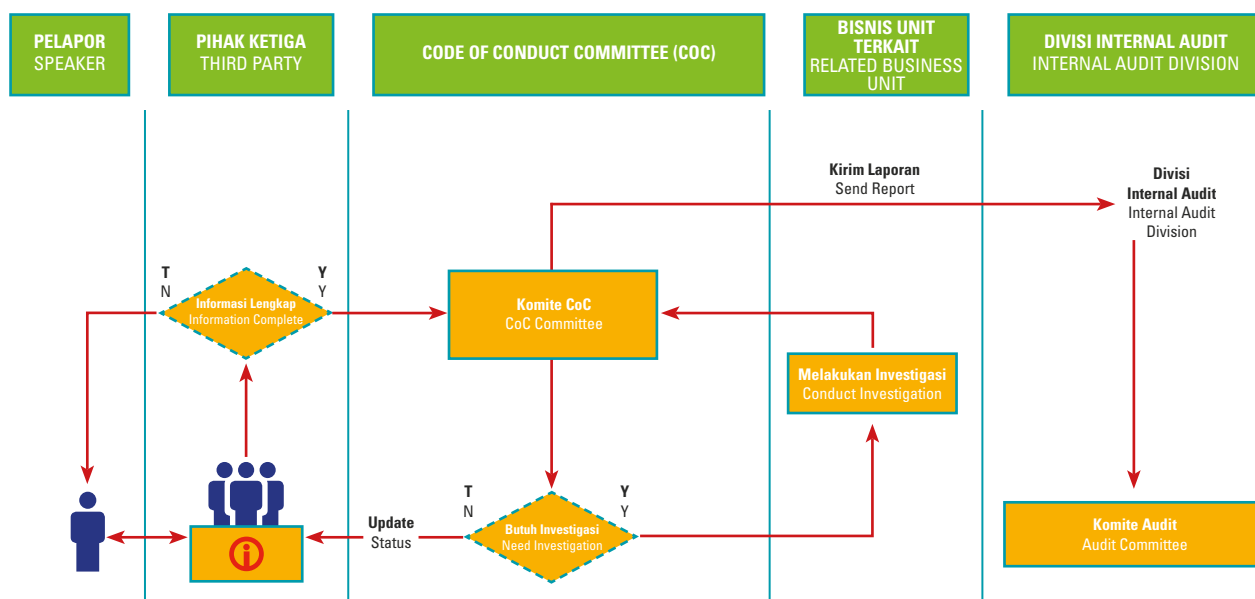
One can report to the *Speak Up System* by:

- Calling or sending a SMS to the phone number 0818 18 BUMI (0818 18 2864)
- Completing and faxing or sending the *Speak Up System Report Form* that can be obtained at each business units to fax number 0818 18 BUMI (0818 18 2864) or POBOX 2864 (BUMI) JKTM 12700
- Sending emails to the following address: speakup@bumiresources.com
- Completing and sending the *Speak Up System Report Form* that can be obtained from the website www.bumiresources.com

BUMI commits to protect any employee that honestly raises ethical concerns and will maintain confidentiality. All reports to the *Speak Up System* will be administered by a third party.

Diagram Speak Up System

Speak Up System Diagram



Perkara Hukum

Perusahaan dan unit usaha menghadapi beberapa kasus hukum yang merupakan kewajiban kontinjen terhadap beberapa klaim dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnisnya dan berbagai penetapan perpajakan tertentu, yang kini masih dalam proses pengadilan atau sedang dalam proses banding.

Informasi rinci mengenai keseluruhan kasus hukum yang dihadapi Perusahaan sepanjang tahun 2014 dapat dilihat dalam Catatan Laporan Keuangan Konsolidasi, sub bagian Kontinjensi di Catatan 212 bagian Laporan Keuangan Auditor dalam Laporan Tahunan ini.

Legal Cases

The Company and its subsidiaries are contingently liable for various claims from third parties arising from the ordinary conduct of business, including tax assessments, result of which is either pending or are being processed by the court.

Detailed information on legal cases faced by the Company is available in Note 212 of the Company's 2014 consolidated financial statements in this Annual Report.



LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

IKHTISAR KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OVERVIEW OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

Mengembangkan Masyarakat yang Mandiri dan Berkelanjutan

Tahun 2014 adalah tahun penuh tantangan bagi Perusahaan. Situasi perekonomian dunia yang masih belum stabil dan berlanjutnya penurunan harga batu bara sangat mempengaruhi operasional Perusahaan. Namun komitmen BUMI dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) terus berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun dan tetap dalam panduan kerangka pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) seperti yang ditetapkan dalam ISO 26000:2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas.

Developing Self-Sustained Society

2014 was a challenging year for the Company. World economic situation is still unstable and the continuing decline in coal prices and affect to business operations. BUMI demonstrates an on-going commitment in social responsibility and environmental awareness in accordance with the strategic plan that has been prepared and fixed in the framework of sustainable development guide (Sustainable Development) as specified in ISO 26000: 2010 and Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Limited Liabilities Company.

Dalam melaksanakan pengelolaan sosial, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan pasca tambang, perusahaan tetap mengacu pada pendekatan 7 subyek inti ISO 26000:2010 khususnya Pelibatan dan Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan dengan tema mengembangkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan (*Developing Self-Sustained Society*).

7 core subjects in ISO 26000:2010 especially Involvement and Community and Environment Development becomes the company's reference in implementing social, environment and post-mining management with the spirit of Developing Self-Sustained Society.

Dalam melaksanakan pengelolaan sosial, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan pasca tambang, perusahaan tetap mengacu pada pendekatan 7 subyek inti ISO 26000:2010 khususnya Pelibatan dan Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan dengan tema mengembangkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan (*Developing Self-Sustained Society*).

Sedangkan kegiatan subyek inti yang lain seperti Organisasi, Ketenagakerjaan, HAM, Pelaksanaan Operasi yang adil, dan Isu Konsumen, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ISO 26000:2010. Keberhasilan kegiatan CSR yang berkelanjutan di BUMI dan unit usaha didukung oleh peranan penting dari karyawan. Untuk itulah kami terus meningkatkan kesejahteraan para karyawan, termasuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Namun untuk diketahui, unit usaha BUMI yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) sejak tahun 2002 telah membuat Laporan Berkelanjutan dengan menggunakan Panduan Laporan Keberlanjutan Internasional Global Reporting Initiative (GRI). Laporan ini diterbitkan setiap tahun dan selalu meraih hasil terbaik di level nasional dan internasional. Selengkapnya nanti akan dibahas dibagian kegiatan CSR dalam buku ini.

Dalam menerapkan program CSR, BUMI memadukan tiga pilar yaitu *Profit*, *Planet* dan *People* dalam strategi Perusahaan.

Ketiga pilar tersebut yang terdiri dari kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan diramu dalam kegiatan CSR dan diimplementasikan di BUMI dan di unit usaha agar dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah positif. Dan satu lagi baik bagi perusahaan maupun masyarakat yang berada di sekitar dan daerah operasi tambang.

Bagaimanapun perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) dengan menggunakan kekayaan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian alam (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*) bersama dengan para pemangku kepentingan.

7 core subjects in ISO 26000:2010 especially Involvement and Community and Environment Development becomes the company's reference in implementing social, environment and post-mining management with the spirit of Developing Self-Sustained Society.

In the mean time, other core subject activities such as organization, labor practice, human rights, fair operation practice and consumer issue will be implemented gradually as per ISO 26000:2010. The success of sustainable CSR activities in BUMI and business unit is part of the important role of the employees, thus we keep improving employee's welfare includes guaranteed their Occupational Safety and Health (OSH)

However, BUMI's business unit namely PT Kaltim Prima Coal (KPC) since 2002 has made Sustainability Report using the International Sustainability Reporting Guidelines of Global Reporting Initiative (GRI). This report is published every year and KPC always achieve the best results at national and international level. More will be discussed part of CSR activities in this book.

In implementing CSR programs, BUMI combines three pillars: Profit, Planet and People in the company strategy.

The third pillar consists of economic interests, social and environmental mixed in CSR activities and implemented in BUMI and its business units in order to provide a positive contribution and added value. And another one, good for the company and the people who were around and the area of the mine operation.

However companies are trying to profit (profit) by using the wealth of natural resources at the same time preserve nature (planet) and to improve the welfare of society (people) together with stakeholders.

Dari tiga pilar pembangunan ini dikembangkan menjadi tujuh program kegiatan CSR yang berkelanjutan dan diimplementasikan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (AI).

Tujuh program itu adalah pengembangan agribisnis, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur serta pelestarian alam dan budaya. Program ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dalam mendukung proses penambangan yang ada di KPC dan AI termasuk melakukan reklamasi pasca tambang dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Kegiatan CSR BUMI

BUMI melaksanakan berbagai kegiatan yang umumnya dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), yang akan dibahas pada bagian ini. Disamping itu juga dijabarkan mengenai kegiatan CSR yang ada di unit usaha seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (AI).

Disamping itu, KPC sudah menerbitkan Laporan Berkelanjutan sejak dari tahun 2002 dan selalu meraih hasil yang terbaik untuk level nasional dan internasional. Prestasi yang membanggakan ini menjadi acuan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan/program CSR. Laporan ini menggunakan Panduan Laporan Keberlanjutan Internasional Global Reporting Initiative (GRI). Laporan tersebut KPC terbitkan setiap tahun sebagai dokumen terpisah yang menyajikan informasi mengenai kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola KPC dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi BUMI ini merupakan perwujudan dan komitmen tinggi dari Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Keberlanjutan yang mencakup *Accountability*, *Transparency* dan *Responsibility*. Untuk lebih lengkapnya mengenai Laporan Keberlanjutan KPC bisa diunduh di www.kpc.co.id

Kegiatan CSR BUMI pada 2014 adalah:

1. Kepedulian terhadap Lingkungan
2. Donor Darah
3. Aksi Sosial Peduli Bakrie
4. CSR International Awards

1. Kepedulian Terhadap Lingkungan

Dilaksanakan pada 29 April 2014 di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, kegiatan kepedulian lingkungan ini bertepatan 2500 Mangrove Tree Planting Project. Direksi, manajemen dan karyawan BUMI groups berpartisipasi dalam acara ini dengan melibatkan Kemangteer (komunitas peduli terhadap mangrove) serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam merawat dan menjaga perkembangan bibit mangrove tersebut.

BUMI melakukan kunjungan *monitoring & evaluation (monev)* ke Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada 27 Agustus 2014 bersama dengan perwakilan dari Kemangteer. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penanaman 2.500 bibit mangrove pada April lalu.

These three pillars expanded into seven CSR programs for community development by PT Kaltim Prima Coal (KPC) and PT Arutmin Indonesia (AI)

The seven programs are development of agribusiness, small and medium enterprise, capacity improvement of government institutional and society, health, education and training, infrastructure, nature and culture preservation. These are the sustainable activities to support mining process in KPC and AI including post- mining reclamation and local community empowerment.

BUMI CSR Activities

BUMI was conducted various CSR activities, which will be discussed in this section. Besides, it also elaborated on CSR activities in business units such as PT Kaltim Prima Coal (KPC) and PT Arutmin Indonesia (AI).

In addition, KPC has published Sustainability Report since from 2002 and always achieve the best results for the national and international levels. The achievements are a reference by BUMI to implementing CSR programs. This report uses the International Sustainability Reporting Guidelines of Global Reporting Initiative (GRI). KPC published the sustainability report annually as a separate document that provides information on the performance of economic, social, environmental, and governance of KPC in the context of sustainable development.

Further, this is a manifestation of the Company and commitment to the principles of sustainability that includes Accountability, Transparency and Responsibility. For more details about KPC Sustainability Report can be downloaded in www.kpc.co.id.

BUMI CSR activities in 2014 are:

1. Environmental Awareness
2. Blood Donation
3. Aksi Sosial Peduli Bakrie
4. CSR International Awards

1. Environmental awareness

The program was conducted on 29 April 2014 in Pari Island, Kepulauan Seribu Jakarta. This activity carrying the theme "2500 Mangrove Tree Planting Project" was attended by the Board of Directors, management and employees of BUMI Group, assisted by a group of volunteers concerned with the mangrove (Kemangteer) and local communities involved in taking care of, and maintaining the growth of mangrove seedlings .

BUMI was conducted a monitoring and evaluation activity (monev) to Pari Island, Kepulauan Seribu Jakarta on 27 August 2014, accompanied by representatives of Kemangteer. This activity was a follow-up to the 2,500 Mangrove Tree Planting Project on 29 April 2014 conducted by Directors and employees of BUMI Group.

Kunjungan ke Pulau Pari akan dilaksanakan secara berkala untuk memantau perkembangan tanaman mangrove yang merupakan salah satu *pilot project* dari CSR BUMI dalam pemanfaatan mangrove dan pengembangan masyarakat berbasis lingkungan dan ekonomi. Kegiatan ini merupakan komitmen manajemen BUMI dalam kegiatan CSR di wilayah Jakarta dan oleh seluruh karyawan lintas divisi dan group.

2. Donor Darah

Kegiatan Internal CSR BUMI lainnya adalah Donor Darah, yang merupakan partisipasi aktif dari karyawan BUMI dan unit usaha serta rutin dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yaitu:

- a. Donor Darah ke-4 pada tanggal 9 Januari 2014 dengan target 100 kantong darah.
Peserta: 126 orang
Lolos: 92 kantong darah.
- b. Donor Darah ke-5 pada tanggal 10 Juni 2014 dengan target 100 kantong darah.
Peserta: 97 orang
Lolos: 62 kantong darah.
- c. Donor Darah ke-6 pada tanggal 15 Oktober 2014 dengan target 100 kantong darah.
Peserta: 143 orang
Lolos: 96 kantong darah.

Kegiatan ini terbuka bagi karyawan dari perusahaan Bakrie lainnya dan juga untuk umum.

3. Aksi Sosial Peduli Bakrie

BUMI terlibat dalam kegiatan Aksi Sosial Peduli Untuk Negeri yang dilaksanakan pada 12 Maret 2014 dalam rangka membantu korban banjir di Jakarta. Pihak yang mendapat bantuan pada aksi sosial ini adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Perguruan Rakyat 2, Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri Jakarta Selatan. BUMI beserta unit usahanya memberikan lemari, rak buku, perlengkapan alat tulis, alat-alat kebersihan dan tempat penampungan air. Sekitar 200 orang karyawan yang merupakan perwakilan dari 20 kelompok usaha Bakrie lainnya juga terlibat dalam kegiatan ini. Total sumbangan yang terkumpul adalah senilai Rp 102.265.000,-.

4. CSR International Awards

Sepanjang 2014, BUMI berpartisipasi dalam dua kegiatan CSR international awards, yaitu:

- a. The 6th Annual Global CSR Summit & Awards 2014, Nusa Dua, Bali 3rd- 4th April 2014.

BUMI meraih Best of Third - Bronze untuk kategori Best Community Program Award dengan judul Desa Mandiri, Self-Reliant Village. Disamping itu, BUMI juga menjadi salah satu *guest speaker* yang diwakili oleh Ricco Surya, CSR Manager dalam acara The 6th Annual Global CSR Summit yang berjudul Developing Self-Sustained Society.

- b. Ethical Corporation Award 2014, London 11 Juni 2014.
BUMI menjadi *Finalist* untuk kategori Most Effective Domestic Community Investment dengan judul Desa Mandiri, Self-Reliant Village.

A visit to Pari Island will be conducted periodically to monitor the growth of the mangrove plants, being one of the pilot projects of BUMI CSR in the utilization and development of environment and economy-based community. This activity is a commitment of BUMI management in implement of CSR activities in Jakarta, and would certainly be supported by all employees across divisions and groups.

2. Blood Donation

Internal CSR activity of BUMI is blood donation. This activity, carried out regularly, at least 3 times a year, involves active participation of employees BUMI and groups, namely:

- a. 4th Blood Donation on 9 January 2014 with a target of 100 units of blood.
Participants: 126
Succeed: 92 bags of blood.
- b. 5th Blood Donation on 10 June 2014 with a target of 100 units of blood.
Participants: 97
Succeed: 62 bags of blood.
- c. 6th Blood Donation on 15 October 2014 with a target of 100 units of blood.
Participants: 143
Succeed: 96 bags of blood.

This activity is also open for employees of other Bakrie companies and the general public.

3. Social Activity Peduli Bakrie

BUMI was involved in Aksi Sosial Bakrie Project carrying the theme "Aksi Sosial Peduli Untuk Negeri." This activity was held on March 12, 2014 in order to help victims of flooding in Jakarta. Parties who receive assistance in social action are the Elementary and Junior High School Perguruan Rakyat 2, Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, South Jakarta. BUMI along with its business units provide cabinets, bookcases, stationery supplies, hygiene kits and water reservoirs. Approximately 200 employees who are representatives of 20 other Bakrie group is also involved in this activity. Total donations collected is worth USD 8,522.08 (1US=12,000IDR)

4. CSR International Awards

In 2014, BUMI participated in two international awards CSR activities, namely:

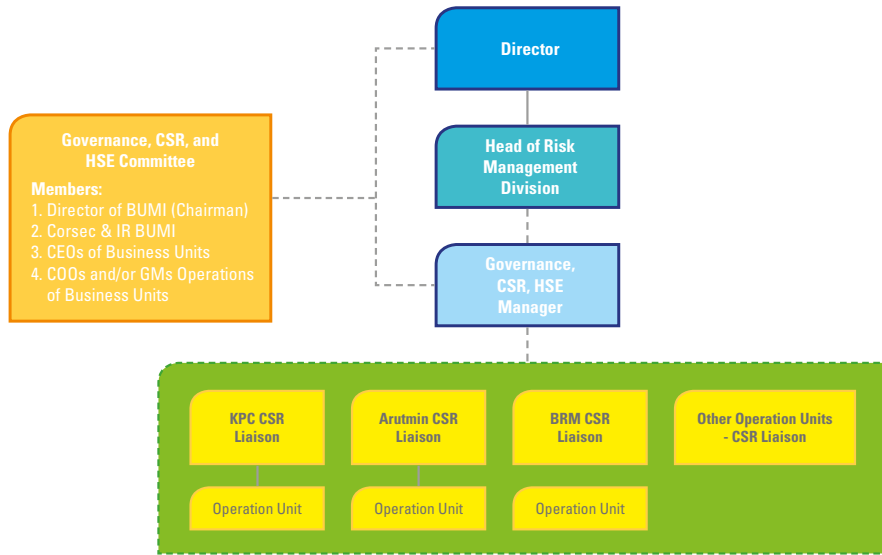
- a. The 6th Annual Global CSR Summit & Awards 2014, Nusa Dua, Bali 3rd- 4th April 2014.

BUMI won Best of Third for Best Community Program Award by the title of Self-Reliant Village. Besides, BUMI also be one of the guest speakers represented by Ricco Surya, CSR Manager of the event The 6th Annual Global CSR Summit and entitled Developing Self-Sustained Society.

- b. Ethical Corporation Award 2014, London 11st June 2014.
BUMI received as one of the Finalist in the category of Most Effective Community Domestic Investment by title of Self-Reliant Village.

BUMI secara konsisten dan berkelanjutan akan terus melakukan kegiatan dan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan semboyan yang telah ditetapkan, yaitu mengembangkan masyarakat mandiri yang berkelanjutan.

Struktur Organisasi CSR di BUMI



Gambar 1. Struktur Organisasi CSR di BUMI

Saat ini, Governance, CSR & HSE Department berada di bawah Divisi Risk Management. Kepala Divisi Risk Management memberikan laporan ke Direksi guna mendapatkan dukungan yang lebih baik dalam pelaksanaan CSR yang segera dan efektif.

BUMI melengkapi struktur CSR tersebut dengan penjelasan lengkap mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pejabat pada level Direktur, Head of Risk Management Division, Governance, CSR & HSE Manager dan Pejabat pada Unit Pelaksana di unit usaha dalam bagian ini.

BUMI membentuk Komite dan Departemen Governance, CSR & HSE pada tahun 2012. Komite berperan untuk memonitor kegiatan CSR sementara Departemen bertugas untuk membuat program dan merancang *budget*. Kedua badan ini bekerja sama demi sukses dan keberlanjutannya kegiatan CSR di BUMI dan unit usaha. BUMI meluncurkan Kebijakan dan Prosedur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan ISO 26000:2012 sebagai panduan dalam penerapan program/proyek/kegiatan CSR di PT BUMI Resources Tbk. dan seluruh unit usaha pada tanggal 1 Agustus 2013. Sosialisasi dan pemahaman akan panduan tersebut dilakukan setelah peluncuran yang merupakan tahapan berkelanjutan dari terbentuknya Komite dan Departemen Governance, CSR & HSE dan Governance tahun lalu.

Peran dan Tanggung Jawab Direktur terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) adalah:

- Menyetujui kebijakan, tujuan dan anggaran CSR.
- Menetapkan dan menyetujui kerangka kerja, filosofi, visi dan misi, strategi, tujuan dan sasaran CSR baik di BUMI maupun di unit usaha.

BUMI will consistently and sustainably continues the CSR activities and programs suitable with the needs of the stakeholders using the spirit of developing self-sustained society.

Organization structure of the Corporate Social Responsibility at BUMI

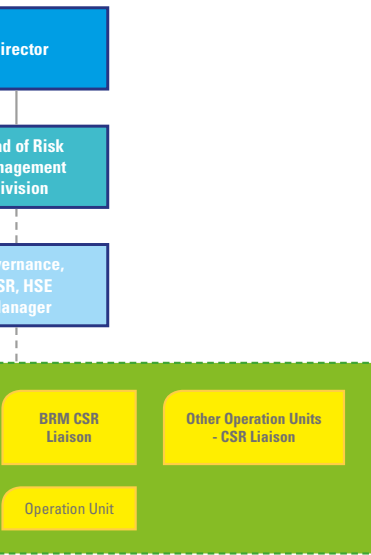


Figure 1. Organization Structure of CSR at BUMI

Currently, Governance, CSR & HSE Department is supervised under Risk Management Division in BUMI. BUMI's Head of Risk Management Division reports to the Director for better support in immediate and effective implementation of CSR.

CSR structure in BUMI is completed with detailed description of roles and responsibilities associated to each position at Director level, Head of Risk Management Division, Governance, CSR & HSE Manager and Executives in Implementing units under subsidiaries in this section.

BUMI has established committee and department of Governance, CSR & HSE in 2012. The Committee's role is to monitor the implementation of CSR activities while the Department's role is to arrange program as well as budget. The two bodies work together in accordance to the success and sustainable CSR activities in BUMI and business units. BUMI launched the CSR Policy and Procedure based on ISO 26000:2012 on August 1 2103 as a main guideline in implementing CSR programs/projects/activities at PT BUMI Resources Tbk and its business units. The socialization and awareness on the guideline conducted after the launch which is considering as the next step of the Committee and Department Governance, CSR & HSE formation last year.

Roles and responsibilities of the Director in relation with the corporate social responsibility are as follows:

- Approve the corporate social responsibility policies, objectives and budget.
- Establish and approve the corporate social responsibility framework, philosophy, vision and mission, strategy, objective and target across BUMI organization.

- Menyetujui kebijakan CSR Perusahaan baik yang baru maupun yang diperbaharui.
- Memastikan kebijakan CSR Perusahaan telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan di seluruh BUMI dan unit usahanya.
- Memberikan arahan dan kepemimpinan secara menyeluruh atas praktik CSR Perusahaan.
- Memastikan program/kegiatan CSR dan target pencapaian utama lainnya diterapkan dengan baik.
- Memastikan adanya pengembangan yang memadai bagi kemampuan CSR Perusahaan, termasuk perangkat-perangkat CSR.
- Memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola CSR.
- Memastikan efektivitas dari kinerja dan pelaksanaan CSR di Perusahaan.
- Menghadiri pertemuan *ad-hoc* dengan Komite Governance, CSR & HSE untuk mendiskusikan hal-hal penting yang membutuhkan tanggapan yang segera.

Peran dan Tanggung Jawab Komite Governance, CSR & HSE terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) adalah:

- Memastikan kebijakan Perusahaan dan standar dari kinerja CSR sesuai dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti praktik terbaik secara nasional dan internasional.
- Memantau dan meninjau efektivitas program dan kegiatan CSR BUMI termasuk metode yang digunakan untuk mengkomunikasikan program tersebut kepada para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh fungsi yang relevan di bawah Direktur, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.
- Memastikan strategi CSR BUMI yang dikembangkan oleh fungsi yang relevan telah memasukkan serta berdasarkan subyek utama dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ISO 26000 yang meliputi hal-hal berikut:
 - a. Hak-Hak Asasi Manusia
 - b. Praktik Perburuhan
 - c. Lingkungan
 - d. Praktik Operasi yang wajar
 - e. Isu-Isu Konsumen
 - f. Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat
- Menelaah kecukupan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program dan kegiatan CSR BUMI.
- Memastikan bahwa risiko atas CSR yang telah diidentifikasi dipantau dan dimitigasi secara memadai.
- Menelaah laporan terkait dengan CSR, misalnya masalah CSR yang signifikan.
- Memastikan bahwa sumber daya manusia terkait CSR menerima pelatihan yang memadai untuk memenuhi standar relevan yang ditetapkan oleh peraturan serta praktik terbaik yang berlaku.
- Memberikan saran dan rekomendasi yang diperlukan mengenai CSR kepada Direksi.
- Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan masalah CSR selain disebutkan di atas, serta hal yang telah disepakati dan diputuskan oleh rapat Komite.

- Approve new or updated Company's corporate social responsibility policies.
- Ensure the Company's CSR policies have been communicated and socialized to all management and employees throughout BUMI.
- Provide the overall leadership and direction for the Company's corporate social responsibility practices.
- Ensure that CSR programs/activities and key milestones are implemented properly.
- Ensure adequate development of the Company's CSR capabilities, including its infrastructure.
- Ensure adequate resources to manage CSR
- Ensure the effectiveness of the Company's CSR performance & implementation.
- Attend ad-hoc meeting with Governance, CSR & HSE Committee to discuss critical issues requiring immediate attention.

Roles and Responsibilities of the Governance, CSR and HSE Committee related with the CSR are as follows:

- Ensure that Company's policies and standards of performance of social responsibilities are in accordance and comply with the prevailing laws and regulations as well as national and international best practices.
- Monitor and review the effectiveness of CSR programs and activities of BUMI including the methods used to communicate such programs to stakeholders performed by relevant functions under the Director, as well as to provide recommendations for improvement as it deems necessary.
- Ensure that Company's CSR strategies of BUMI developed by relevant functions has included and based upon the social responsibility core subjects of ISO 26000 which include the following matters:
 - a. Human rights
 - b. Labor practices
 - c. The environment
 - d. Fair operating practices
 - e. Consumer issues
 - f. Community involvement and development
- Review the adequacy of allocated budget and resources for CSR programs and activities of BUMI.
- Ensure the Company's identified risks related to CSR are monitored and mitigated properly.
- Review reports related to CSR, i.e. significant issues of CSR.
- Ensure that CSR related human resources receive the adequate training to meet the relevant standards set by prevailing regulations and best practices.
- Provide necessary advices and recommendations relating to CSR to the Board of Directors.
- Perform other duties relating to CSR matters of BUMI Group beyond those mentioned above, in accordance with what have been agreed and decided by the Committee's meetings.

Peran dan Tanggung Jawab Kepala Divisi Risk Management terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) adalah:

- Mengajukan strategi, kebijakan dan anggaran CSR Perusahaan ke Direksi.
- Mengajukan kerangka kerja CSR BUMI dan unit bisnis ke Direksi.
- Menyetujui program CSR, Term of Reference (TOR) dan semua rekomendasi yang diajukan oleh CSR Department.
- Melaporkan kegiatan-kegiatan CSR ke Direksi.
- Memantau implementasi dari kegiatan CSR baik di BUMI dan unit bisnis.
- Mengelola sumber daya manusia dan anggaran terkait CSR BUMI.
- Memastikan identifikasi risiko Perseroan terkait dengan CSR telah dimonitor dan dimitigasi secara memadai.
- Mengelola tugas-tugas CSR lainnya seperti yang direkomendasikan oleh Komite Governance, CSR & HSE.
- Menghadiri pertemuan *ad-hoc* dengan Komite Governance, CSR & HSE dan Direksi untuk mendiskusikan hal-hal penting yang membutuhkan respon yang cepat.

Peran dan Tanggung Jawab Governance, CSR & HSE Manager terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) adalah:

- Mempersiapkan anggaran CSR.
- Menyusun kebijakan dan prosedur CSR.
- Menyusun program dan Term of Reference (TOR) CSR dan mengajukannya kepada Kepala Divisi Risk Management untuk persetujuan.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan CSR diseluruh BUMI dan unit usaha bersama dengan CSR *Liaisons*.
- Menjaga hubungan baik dengan berbagai para pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku CSR, LSM dan media.
- Meningkatkan kesadaran CSR di seluruh Perusahaan.
- Mempromosikan kegiatan CSR BUMI kepada masyarakat luas baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, guna meningkatkan nilai para pemangku kepentingan.
- Menggabungkan/mengkonsolidasikan semua informasi mengenai kegiatan CSR yang diperoleh dari CSR *Liaisons*.
- Memantau dan melaporkan kemajuan suatu kegiatan/proyek/program CSR kepada Kepala Divisi Risk Management.
- Mengikuti perkembangan terbaru dari suatu metodologi, teknik dan teknologi CSR.
- Melaporkan hal-hal penting yang membutuhkan respon cepat dari manajemen eksekutif kepada Kepala Divisi Risk Management.

CSR *Liaison* di unit bisnis bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan CSR dan memberikan laporan berkala tentang program dan kegiatan CSR kepada Governance, CSR & HSE Department di BUMI.

Peran dan Tanggung Jawab CSR *Liaison* di unit bisnis adalah:

- Bertanggung jawab sebagai penghubung antara BUMI dan unit bisnis dalam memberikan penyebaran informasi.
- Membantu CSR Department dalam mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur CSR Perusahaan di setiap unit bisnis.

Details of Roles and Responsibilities of Head of Risk Management Division Related with the CSR are:

- Propose the Company's corporate social responsibility strategy, policy and budget to the Board of Directors.
- Propose the corporate social responsibility framework for overall BUMI to the Board of Directors.
- Approve the CSR programs, TOR and all recommendations from CSR department.
- Report the corporate social responsibility activities to the Board of Directors.
- Monitor CSR implementation across BUMI.
- Manage budget and resources for CSR programs and activities of BUMI.
- Ensure the Company's identified risks related to CSR are monitored and mitigated properly.
- Manage other CSR assignments as recommended by the Governance, CSR & HSE Committee.
- Attend ad-hoc meeting with Governance, CSR & HSE Committee and Board of Directors to discuss critical issues requiring immediate attention.

Details of roles and responsibilities of Governance, CSR & HSE Manager Related with the CSR are:

- Prepare CSR budget.
- Develop SOP and Procedures CSR.
- Develop programs and Term of Reference (TOR) CSR, and submit it to Head of Risk Management Division for approval.
- Coordinate and conduct CSR implementation across BUMI together with CSR *Liaisons*.
- Maintain relationship with different stakeholders such as government, CSR players, NGOs partners and media.
- Promote CSR awareness throughout the Company.
- Promote BUMI's CSR activities to the national and international community to improve company's image and reputation in order to add value to the stakeholders.
- Consolidate all information of CSR activities from CSR *Liaisons*.
- Monitor and report the progress of CSR activities/projects/programs to Head of Risk Management Division.
- Keep abreast of the latest corporate social responsibility methodologies, techniques and technologies development.
- Escalate any critical issues requiring immediate attention from executive management to Head of Risk Management Division.

CSR *Liaison* in Business Units is responsible for coordinating CSR activity and providing periodic report on CSR programs and activities to the Governance, CSR & HSE Department at BUMI.

Roles and responsibilities of CSR *Liaison* in Business Units are:

- Responsible as a liaison between BUMI and business units to provide the information dissemination.
- Assist CSR Department in communicating Company's corporate social responsibility policies and process in each Business Units.

- Membantu CSR Department dalam memantau pelaksanaan kegiatan CSR di setiap unit usaha.
- Meningkatkan kesadaran CSR di unit bisnis.
- Mengikuti perkembangan terbaru dari metodologi, teknik dan pengembangan teknologi CSR.
- Menyediakan data dan membantu dalam penulisan laporan kegiatan CSR di setiap unit bisnis termasuk perkembangan dari kegiatan CSR kepada pimpinan masing-masing unit bisnis dan CSR Department.
- Melaporkan hal-hal penting yang membutuhkan respon cepat dari manajemen eksekutif ke CSR Department.

Belajar dari pengalaman berharga yang ada di unit usaha dan komitmen manajemen BUMI untuk Good Corporate Governance, BUMI melakukan inisiatif untuk membentuk suatu kerangka strategis dan menempatkan kegiatan CSR ke dalam strategi bisnis Perseroan.

Kerangka strategis ini akan membuat CSR BUMI dan unit usahanya lebih terorganisir dengan tema utama dan *flagship* yang sama, lebih terlihat dalam menciptakan keberlanjutan dan nilai-nilai bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan.

Langkah-langkah pengembangan/implementasi yang menjadi strategi bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan Good Corporate Citizen (GCC – CSR beyond the rules and regulations) meliputi:

- BUMI CSR Flagship
- BUMI CSR Strategic Framework
- BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plans

BUMI CSR Flagship

BUMI CSR Flagship adalah sebagai berikut:

“Untuk mengembangkan masyarakat yang mandiri melalui keunikan Indonesia, berguna untuk masyarakat dan kebersamaan yang didukung dengan strategi komunikasi yang terintegrasi untuk komunitas lokal, nasional dan internasional.”

Tujuan dari CSR Flagship ini adalah untuk memastikan keunggulan kompetitif di antara penanam modal dan pelanggan, mengurangi risiko, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan dari pertumbuhan dan keuntungan.

- Assist CSR Department in monitoring the implementation corporate social responsibility activities in each Business Units.
- Promote CSR awareness in each Business Units.
- Update with the latest corporate social responsibility methodologies, techniques and technologies development.
- Provide data and assist in report writing of CSR result in each Business Units including their implementation progress to their respective Head of Business Units and CSR Department.
- Escalate any critical issues requiring immediate attention from executive management to CSR Department.

Learning from the valuable experiences in business units and BUMI management’s commitment for Good Corporate Governance, BUMI conducted initiatives to establish a strategic framework and put CSR activities into the Company’s business strategy.

A strategic umbrella framework shall make BUMI CSR in BUMI group to be well organised within a common theme and flagship which in turn, will make BUMI CSR more visible in creating sustainability and values for all of the Company’s stakeholders.

BUMI has developed CSR strategy embedded within the business strategy through a step by step development/implementation for a company to achieve Good Corporate Citizen (GCC – CSR beyond the rules and regulations) that includes:

- BUMI CSR Flagship.
- BUMI CSR Strategic Framework.
- BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plan.

BUMI CSR Flagship

BUMI’s CSR Flagship is follow:

“To Develop Self Sustained Society Through Indonesian Uniqueness, Usefulness to all and Togetherness, supported with an Integrated Strategic Communication for Local, National and International Community.”

The purpose of the Flagship is to ensure competitive edge amongst investor and customers, mitigate risks, and ensure sustainable development of growth and profit.

Kerangka Kerja CSR BUMI (BUMI CSR Strategic Framework)

BUMI CSR Strategic Framework



Gambar 2. Kerangka Strategis CSR di BUMI

Figure 2. CSR Strategic Framework in BUMI

Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI (BUMI CSR Strategic Framework)

BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plans

Di bawah ini adalah gambar Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI:

Below is the BUMI's CSR Strategic Framework Implementation Plan picture:



Gambar 3. Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI

Figure 3. BUMI's CSR Strategic Framework Implementation Plan

Penjelasan singkat dari setiap langkah dalam Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI adalah sebagai berikut:

The brief description of each step in the CSR strategic framework implementation plan is as follow:

No	Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plan	Penjelasan Description
1.	Merevisi Visi, Misi dan Nilai Revise the Vision, Mission & Values	<p>Dengan kejelasan visi, misi dan nilai-nilai di BUMI, penyampaian informasi baik di internal perusahaan maupun kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai komitmen BUMI terhadap pembangunan berkelanjutan akan relatif mudah.</p> <p>With BUMI's clear vision, mission and values, the internal cascading within the organization as well as the communication to all stakeholders on BUMI commitment for sustainable development will be relatively easy.</p>
2.	Mengembangkan organisasi CSR yang efektif Develop the effective of CSR organization	<p>Strategi dan program CSR BUMI didukung oleh organisasi CSR yang efektif. Organisasi CSR memiliki otoritas penuh untuk akses langsung ke CEO Perusahaan dan dapat mengembangkan dan merencanakan strategi CSR, membuat anggaran CSR, dan melakukan program monitoring, pengawasan dan evaluasi, dan melakukan beberapa fleksibilitas dalam koordinasi bisnis serta membuat komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal. Para CEO dan/atau COO dari bisnis unit adalah anggota dari Komite Governance, CSR & HSE agar koordinasi di masing-masing lebih mudah dan praktik-praktik CSR yang terbukti berjalan dengan baik bisa dipromosikan dari masing-masing unit bisnis. BUMI's CSR strategy and programs are supported by an effective CSR organization. The organization has the necessary authority by having direct access to the CEO of the company and able to develop and plan the strategy, to decide funds allocation, and to do program monitoring, control, and evaluation and allows some flexibility in doing business coordination as well as making effective communication internally and externally. All CEO and/or COO of subsidiaries are members of the Governance, CSR & HSE Committee to ensure smooth coordination and enable to leverage the best proven practices through out all subsidiaries.</p>
3.	Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dan mensosialisasikan ke para pemangku kepentingan Develop the effective of communication strategy and socialization to stakeholders	<p>BUMI membuat program lanjutan, terstruktur dan efektif dalam mengkomunikasikan CSR untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor dan kontra publikasi yang spekulatif dalam masyarakat. Ini mencakup komunikasi perusahaan, paparan publik, program Public Relation dan kampanye iklan strategis melalui media yang strategis.</p> <p>BUMI established a continued, structured and effective program on CSR communications to improve corporate image, enhance public and investor confidence and counter speculative publicity in the public. It covers corporate communication, public expose, PR program and strategic advertising campaign through strategic media.</p>
4.	Menjabarkan nilai-nilai saling ketergantungan yang dapat dibagi bersama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Defining the interdependence shared values in line with society needs	<p>Program CSR BUMI harus mampu mengubah pola pikir, membangun karakter sosial dan modal sosial, memelihara kebersamaan, dan mengubah elemen-elemen baru untuk mendorong kemajuan dan perubahan. Ini akan mengembangkan kemandirian sosial dalam gerakan kolaboratif/bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang utama. Pelaksanaannya harus partisipatif untuk mengembangkan rasa kepemilikan di antara para stakeholder dan menciptakan masyarakat yang mandiri.</p> <p>BUMI's CSR Program should be able to change the mindset, build social character and social capital, nurture togetherness, and transform new elements to promote progress and changes. It shall develop social independence in a collaborative movement with key stakeholders (smart partnership). The implementation should be participatory to develop a sense of ownership among the stakeholders and creating self sustained society.</p>
5.	Untuk mengatasi dampak negatif To overcome negative impact	<p>Reputasi perusahaan adalah sesuatu yang menjadi perhatian utama dari manajemen BUMI. Manajemen risiko yang kuat akan mampu mengantisipasi potensi masalah dan kekhawatiran yang timbul, sebab itu persiapan terhadap kemungkinan yang timbul diperlukan untuk meminimalkan risiko. Strategi perusahaan dirancang untuk mengatasi publisitas negatif terhadap BUMI.</p> <p>Corporate reputation is something that BUMI's management always cares about. Robust risk management will be able to anticipate potential issues and concerns, hence preparation any contingency action are needed minimize the risk. Company strategy is designed to cope with negative publicity towards BUMI.</p>

No	Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plan	Penjelasan Description
6.	Menetapkan <i>Flagship</i> yang strategis Establish Strategic Flagship	<p>BUMI percaya bahwa kita dapat berpartisipasi dalam mengatasi salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan menjalankannya sebagai agenda CSR jangka panjang perusahaan dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi sebagai cerminan kontribusi BUMI kepada bangsa. Pada saat yang sama juga memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dari BUMI.</p> <p>Unsur-unsur yang paling penting dalam mencapai <i>flagship</i> BUMI adalah memastikan terjadinya perubahan pola pikir (membangun karakter mulai dari usia dini – remaja, program untuk ibu rumah tangga), pelatihan/pendidikan, keterlibatan/pemberdayaan yang didukung oleh infrastruktur yang diperlukan.</p> <p>BUMI believes that we can participate in taking one of the big challenges faced by Indonesia and drive it as the company's long term CSR agenda with high commitment and dedication as a reflection of BUMI contribution to the nation. At the same time it also ensures BUMI's sustainable growth.</p> <p>The most critical elements in achieving BUMI's flagship are to ensure mindset change (Character building starting from early age to teenagers up to programs for housewives), training/education, Involvement/empowerment supported by the necessary infrastructure.</p>
7.	Adanya komitmen para Pemangku Kepentingan Existence of Stakeholders Commitment	<p>Komitmen para pemangku kepentingan merupakan bagian integral dari seluruh kerangka kerja yang ditanamkan dari awal sampai akhir dari setiap program CSR. BUMI harus memastikan bahwa setiap program CSR dimulai dengan komitmen penuh dari manajemen dan juga mendapatkan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait untuk efektivitas dan keberhasilannya.</p> <p>Stakeholders' commitment is an integral part of the entire framework which is embedded from the start until the end of any CSR program. BUMI shall ensure that each CSR program is started with full commitment from its management and also earn the commitment from the related stakeholders for its effectiveness and success.</p>
8.	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Monitoring, Control & Evaluation	<p>Implementasi program CSR BUMI tetap selalu dipantau, dikendalikan dan dievaluasi. Evaluasi dari Internal <i>self-assessment</i> dan evaluasi eksternal dalam bentuk studi persepsi digunakan sebagai dasar perbaikan yang terus-menerus. Untuk mengukur hasil dan manfaat dari setiap kegiatan, masing-masing program CSR memiliki acuan keberhasilan. Acuan keberhasilan harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dibandingkan dengan perubahan persepsi di kalangan masyarakat (tingkat lokal, nasional dan internasional) guna mendukung BUMI kearah persepsi yang lebih positif.</p> <p>BUMI mengikuti GRI Reporting Guidelines yang memberikan indikator jelas untuk mengukur kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perusahaan atas pelaksanaan program CSR. Pelaporan yang berkelanjutan juga mensyaratkan perusahaan agar melaporkan anggaran CSR.</p> <p>BUMI's CSR Program implementation is continuous controlled, monitored, and evaluated. Internal self-assessment and external evaluation in the form of perception study is used as the base of continuous improvement. To gauge the results and benefits of each activity, each CSR Program establishes a clear benchmark for success. The success benchmark should be able to be measured quantitatively and qualitatively against a change in perception among the community (local, national and international level) towards a more positive perception that is supportive to BUMI.</p> <p>BUMI follows GRI Reporting Guidelines which provides clear indicators to measure Company's economic, social, and environmental performance as a result of its CSR program implementation. Sustainable reporting also requires company to report its CSR budget.</p>

No	Rencana Penerapan Kerangka Strategis CSR BUMI CSR Strategic Framework Implementation Plan	Penjelasan Description
9.	<p>Komitmen yang tinggi dan sepenuh hati Fully committed and whole hearted</p>	<p>Program CSR BUMI dilakukan sepenuh hati dan komprehensif untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan dalam suatu siklus tertentu. BUMI menyediakan sumber daya, dana, keterampilan dan kemampuan untuk mewujudkan <i>flagship</i> strategis dalam kehidupan. Ketika sumber daya perusahaan tidak cukup menangani masalah ini, BUMI juga terbuka untuk bersinergi dengan pihak ketiga/para profesional/ahli lainnya.</p> <p>BUMI's CSR programs are conducted whole heartedly and comprehensively to overcome social, economic and environmental challenges, in one complete cycle. BUMI provides man power, funding, skills and capabilities to materialize its strategic flagship into life. When the company's resources are not sufficient to comprehensively handle the matter, BUMI creates synergy with other professionals/experts.</p>
10.	<p>Masyarakat berkelanjutan yang mandiri Self sustained society</p>	<p>BUMI dapat membantu dengan cepat pengenalan kembali nilai-nilai moral/budaya orang Indonesia dan memaksimalkan pengaruh positif dari globalisasi melalui pembangunan karakter dari usia dini sampai remaja dan pemberdayaan perempuan termasuk ibu rumah tangga. Hal ini juga termasuk pemberantasan buta huruf dan pendidikan berbasis keterampilan (studi kejuruan) untuk memastikan adanya wirausahaan bagi generasi mendatang. Hal ini, pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang benar-benar mampu menghasilkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan menjadi aset berharga bagi bangsa, bukan hanya meminta bantuan pemerintah saja.</p> <p>BUMI thrives to re-establish the Indonesian basic moral value/culture and maximize positive influence of globalization through character building starting in early age as possible up to teenagers and also housewives (women empowerment), It also includes literacy eradication and skill-based education (vocational studies) to ensure self-employment for the future generation. This, in the end, will create a society that is truly able to generate welfare for its own and where the members are valuable assets for the nation, not just receivers of government supports.</p>

Fokus Utama Dari Social Responsibility

Gambar berikut adalah fokus utama dari Social Responsibility sesuai dengan ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility.

Social Responsibility Core Subjects

The following figure is the Social Responsibility core subjects according to ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility.



Gambar 6. Fokus utama dari Social Responsibility sesuai dengan ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

Figure 5. The Social Responsibility core subjects according ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility

No	Area Area	Penjelasan Description
1.	Tata Kelola Organisasi Organizational Governance	<p>Ada dua mekanisme tata kelola organisasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pemerintahan formal berdasarkan definisi struktur dan proses. • Mekanisme informal yang muncul sehubungan dengan budaya dan nilai-nilai dari organisasi. <p>Hal ini sering kali dipengaruhi oleh orang-orang yang memimpin organisasi.</p> <p>Tata kelola organisasi adalah fungsi utama dari setiap jenis organisasi karena merupakan kerangka kerja untuk membuat keputusan dalam organisasi.</p> <p>Organizational governance can comprise both formal governance mechanisms based on defined structures and processes and informal mechanisms that emerge in connection with the organization's culture and values.</p> <p>The Organizational governance is often influenced by the persons who are leading the organization.</p> <p>Organizational governance is a core function of every kind of organization as it is the framework for decision making within the organization.</p>

No	Area Area	Penjelasan Description
2.	Hak Asasi Manusia Human Rights	<p>Hak asasi manusia adalah hak dasar bagi semua manusia.</p> <p>Ada dua kategori hak asasi manusia yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori pertama menyangkut hak-hak sipil dan politik dan termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, persamaan di depan hukum dan kebebasan berekspresi. • Kategori kedua meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak untuk bekerja, hak atas pangan, hak atas standar kesehatan yang tinggi, hak atas pendidikan dan hak atas jaminan sosial. <p>Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara luas dianggap sebagai penting untuk aturan hukum dan konsep keadilan sosial dan kejujuran dan sebagai fondasi dasar dari lembaga yang paling penting dari masyarakat seperti sistem peradilan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang termasuk dalam ruang lingkup pengaruhnya.</p> <p>Human rights are the basic rights to which all human beings are entitled.</p> <p>There are two broad categories of human rights, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The first category concerns civil and political rights and includes such rights as the right to life and liberty, equality before the law and freedom of expression. • The second category concerns economic, social and cultural rights and includes such rights as the right to work, the right to food, the right to the highest attainable standard of health, the right to education and the right to social security. <p>Recognition and respect for human rights are widely regarded as essential to the rule of law and to concepts of social justice and fairness and as the basic underpinning of the most essential institutions of society such as the judicial system. States have a duty and responsibility to respect, protect and fulfil human rights. An organization has the responsibility to respect human rights, including within its sphere of influence.</p>
3.	Praktik Tenaga Kerja Labour Practices	<p>Praktik-praktik tenaga kerja dalam suatu organisasi mencakup semua kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan, baik oleh atau atas nama organisasi, termasuk pekerjaan yang disubkontrakkan.</p> <p>Praktik tenaga kerja melebihi hubungan sebuah organisasi dengan karyawan atau tanggung jawab suatu organisasi selaku pemberi kerja terhadap organisasi yang dimiliki atau secara langsung dikontrolnya.</p> <p>Praktik tenaga kerja termasuk rekrutmen dan promosi pekerja, disiplin dan prosedur pengaduan, transfer dan relokasi pekerja, pemutusan hubungan kerja, pelatihan dan pengembangan keterampilan, kesehatan, keselamatan dan industri kebersihan, dan setiap kebijakan atau praktik yang mempengaruhi kondisi kerja, khususnya waktu dan remunerasi bekerja.</p> <p>Praktik tenaga kerja juga mencakup pengakuan organisasi pekerja, perwakilan dan partisipasi baik dari organisasi pekerja dan pengusaha dalam perundingan bersama, dialog sosial dan konsultasi tripartit untuk mengatasi masalah sosial yang terkait dengan pekerjaan.</p> <p>The labour practices of an organization encompass all policies and practices relating to work performed within, by or on behalf of the organization, including subcontracted work.</p> <p>Labour practices extend beyond the relationship of an organization with its direct employees or the responsibilities that an organization has at a workplace that it owns or directly controls.</p> <p>Labour practices include the recruitment and promotion of workers; disciplinary and grievance procedures; the transfer and relocation of workers; termination of employment; training and skills development; health, safety and industrial hygiene; and any policy or practice affecting conditions of work, in particular working time and remuneration.</p> <p>Labour practices also include the recognition of worker organizations and representation and participation of both worker and employer organizations in collective bargaining, social dialogue and tripartite consultation to address social issues related to employment.</p>

No	Area Area	Penjelasan Description
4.	Lingkungan The Environment	<p>Keputusan dan aktivitas perusahaan selalu berdampak pada lingkungan di mana pun perusahaan tersebut berada. Dampak tersebut dapat dikaitkan dengan penggunaan sumber daya perusahaan, lokasi kegiatan perusahaan, polusi dan limbah, dan dampak kegiatan perusahaan di habitat alam. Untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut, perusahaan harus mengadopsi pendekatan terpadu dengan mempertimbangkan implikasi baik langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan dari setiap keputusan dan kegiatan perusahaan.</p> <p>The decisions and activities of companies invariably have an impact on the environment no matter where the companies are located. These impacts may be associated with the organization's use of resources, the location of the activities of the company, the generation of pollution and wastes, and the impacts of the company's activities on natural habitats. To reduce their environmental impacts, companies should adopt an integrated approach that takes into consideration the direct and indirect economic, social, health and environmental implications of their decisions and activities.</p>
5.	Praktik operasi yang adil Fair operating practices	<p>Praktik operasi yang adil menyangkut perilaku beretika dalam transaksi organisasi dengan organisasi lain. Ini termasuk hubungan antara organisasi dan lembaga pemerintah, serta antara organisasi dan mitra, pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi-asosiasi di mana perusahaan menjadi anggota.</p> <p>Isu-isu praktik operasi yang adil meningkat dalam bidang anti-korupsi, keterlibatan yang bertanggung jawab dalam ruang publik, persaingan yang adil, perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, hubungan dengan organisasi lain dan menghormati hak kepemilikan.</p> <p>Fair operating practices concern ethical conduct in an organization's dealings with other organizations. These include relationships between organizations and government agencies, as well as between organizations and their partners, suppliers, contractors, customers, competitors, and the associations of which they are members.</p> <p>Fair operating practice issues arise in the areas of anti-corruption, responsible involvement in the public sphere, fair competition, socially responsible behaviour, relations with other organizations and respect for property rights.</p>
6.	Isu Konsumen Consumer issues	<p>Perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada konsumen, serta pelanggan lain, memiliki tanggung jawab untuk konsumen dan pelanggan. Tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan pendidikan dan informasi yang akurat, adil, transparan dan membantu informasi pemasaran dan proses kontrak, mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan dan merancang produk dan layanan yang menyediakan akses ke semua dan melayani dengan tepat, baik untuk orang renta dan kurang beruntung.</p> <p>Tanggung jawab juga termasuk meminimalkan risiko dari penggunaan produk dan jasa, melalui desain, manufaktur, distribusi, penyediaan informasi, layanan pendukung dan prosedur penarikan dan pengembalian. Banyak perusahaan mengumpulkan atau menangani informasi pribadi dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan informasi dan privasi konsumen.</p> <p>Prinsip-prinsip klausul ini berlaku untuk semua organisasi dalam peran organisasi melayani konsumen, namun masalah tiap organisasi mungkin memiliki relevansi yang sangat berbeda, sesuai dengan keadaan sekitar dan jenis organisasinya (seperti organisasi swasta, pelayanan publik, organisasi kesejahteraan lokal atau jenis lainnya).</p> <p>Companies that provide products and services to consumers, as well as other customers, have responsibilities to those consumers and customers. Responsibilities include providing education and accurate information, using fair, transparent and helpful marketing information and contractual processes, promoting sustainable consumption and designing products and services that provide access to all and cater, where appropriate, for the vulnerable and disadvantaged.</p> <p>Responsibilities also involve minimizing risks from the use of products and services, through design, manufacture, distribution, information provision, support services and withdrawal and recall procedures. Many companies collect or handle personal information and have a responsibility to protect the security of such information and the privacy of consumers.</p> <p>The principles of this clause apply to all organizations in their role of serving consumers; however, the issues may have very different relevance, according to the kind of organization (such as private organizations, public service, local welfare organizations or other types) and the circumstances.</p>

No	Area Area	Penjelasan Description
7.	Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat Community involvement and development	<p>Saat ini sudah umum diterima kalau perusahaan memiliki kerja sama dengan masyarakat di mana mereka beroperasi. Kerja sama ini harus didasarkan pada keterlibatan masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat - baik secara individu maupun melalui asosiasi berusaha untuk meningkatkan partisipasi publik - membantu memperkuat masyarakat sipil. Perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat dan lembaga-lembaga setempat dapat mewakili dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan.</p> <p>Keterlibatan masyarakat melebihi dari mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan sehubungan dengan dampak kegiatan perusahaan, tetapi juga meliputi dukungan dan membangun hubungan dengan masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga diperlukan untuk mengetahui nilai dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat disebut perusahaan harus muncul dari pengakuan bahwa perusahaan adalah bagian dari pemangku kepentingan dalam masyarakat, berbagi kepentingan bersama dengan masyarakat.</p> <p>It is widely accepted today that companies have a relationship with the communities in which they operate. This relationship should be based on community involvement so as to contribute to community development. Community involvement – either individually or through associations seeking to enhance the public good – helps to strengthen civil society. Companies that engage in a respectful manner with the community and its institutions reflect and reinforce democratic and civic values.</p> <p>Community involvement goes beyond identifying and engaging stakeholders in regard to the impacts of a company's activities; it also encompasses support for and building a relationship with the community. Above all, it entails acknowledging the value of the community. A company's community involvement should arise out of recognition that the company is a stakeholder in the community, sharing common interests with the community.</p>

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PENGEMBANGAN KOMUNITAS

1. Kegiatan CSR BUMI

Pengelolaan CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan di KPC

Realisasi Pengembangan Masyarakat 2014

Komitmen KPC untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah kerangka pembangunan berkelanjutan merupakan bagian penting dari pemenuhan AMDAL 2010 di bidang sosial, serta mengacu pada perencanaan daerah dan rencana strategi pembangunan wilayah kabupaten dan propinsi. Di samping itu juga turut memenuhi tujuan Millennium Development Goals (MDGs) dengan memusatkan perhatian kepada tiga area yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar daerah tambang melalui penerapan tujuh program pengembangan masyarakat, khususnya pertanian, usaha kecil dan menengah masyarakat serta peningkatan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan ekonomi wilayah.
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak-pihak internal perusahaan (karyawan dan keluarga) serta pihak-pihak eksternal perusahaan (donor, NGO dan lain-lain).
3. Memperkuat penerapan etika bisnis serta tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap tindakan.

Pelaksanaan program disesuaikan dengan posisi KPC sebagai katalisator pembangunan wilayah, sehingga program tidak berdiri sendiri tetapi juga mendukung rencana utama pemerintah daerah dengan tujuan utama pembangunan daerah meliputi pengembangan agribisnis, pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur.

SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMMUNITY DEVELOPMENT

1. BUMI CSR Activities

KPC CSR Activities Management

Realization of Community Development 2014

KPC's commitment to realize corporate social responsibility as a framework of sustainable development is an important part to meet social requirements in AMDAL 2010 and refers to the regional planning and regional development strategy planning of the districts and provinces. The activities are also participation to realize the Millennium Development Goals (MDGs), by focusing in three areas as follows:

1. Poverty reduction of communities surrounding mine sites by applying seven community development programs, especially agribusiness, small and medium enterprises, and infrastructure improvement to boost the regional economy.
2. Building relationships with internal parties in the company (employees and their families) and external parties (donors, NGOs, etc.).
3. Strengthen the application of code of conduct as well as good corporate governance in day-to-day actions.

Program implementation is conducted within appropriate corridors of KPC as catalyst of regional development. Therefore, the programs are not stand alone initiatives, but are in support of the regional development plan set by the local government that covers: agribusiness development, education and health, and infrastructure.

KPC menjabarkannya menjadi 7 bidang program berikut dengan titik berat pada peningkatan sosial, ekonomi dan lingkungan sebagaimana terinci berikut ini:

Sosial

1. Peningkatan kesehatan masyarakat dan sanitasi
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan infrastruktur masyarakat

Ekonomi

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
5. Pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Usaha Kecil dan Mengengah (UKM)

Lingkungan

7. Pelestarian alam dan budaya.

Ketujuh bidang program tersebut mengarah pada peta jalan (*road map*) yang selaras dengan Rencana Penutupan Tambang (RPT) dengan tujuan besar mendukung kemandirian masyarakat.

Pencapaian sampai dengan Akhir 2014

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Kesehatan:

- Penyuluhan di radio sebanyak 51 kali siaran mengenai berbagai macam topik kesehatan saat ini.
- Penyuluhan kanker servik bekerja sama dengan RSUD Sangatta.
- Sosialisasi "STOP Merokok".
- Penyuluhan kanker payudara.
- Penanggulangan Tuberkulosis, antara lain melalui pemantauan rutin penderita TB, pelatihan kader TB, dan lain-lain.
- Program Pencegahan HIV/AIDS, antara lain melalui pemeriksaan dan pelayanan rutin VCT, pemeriksaan darah CD4 untuk ODHA (Orang Dengan HIV AIDS), dan lain-lain.
- Program Pengendalian Penyakit Akibat Nyamuk, antara lain dengan melakukan kunjungan rutin ke rumah penduduk oleh kader jumantik untuk pemeriksaan jentik nyamuk *Aedes*, evaluasi pelaksanaan program PSN, dan lain-lain.
- Program Kesehatan Ibu dan Anak, antara lain melalui sosialisasi pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak (KPKIA dan Pergizi), penjarangan balita gizi kurang dan gizi buruk, pemeriksaan rutin di klinik Pergizi serta pembagian susu sapi segar.
- Bakti Sosial Donor Darah dalam rangka HUT KPC.
- Program Senyum dan Harapan, antara lain penyelenggaraan bakti sosial operasi bibir sumbing di RSUD Sangatta bekerja sama dengan Yayasan Anugerah Sentosa dari Surabaya dan Universitas Airlangga.
- Persiapan Survei Kesehatan dan Lingkungan.
- Bakti Sosial Operasi Katarak
- Pembangunan berbagai infrastruktur kesehatan.
- Bantuan langsung di bidang kesehatan.

b. Pendidikan:

- Program "Celoteh Pendidikan" sebanyak 41 kali melalui radio GWP membahas isu pendidikan terkini.
- Program Penghijauan Sekolah bekerja sama dengan SMAN 2 Sangatta. Program ini diberi nama "Taman Edukasi Mandara SMAN 2 Sangatta Utara".

KPC further details 7 programs with emphasis on social, economics, and environmental improvement as follows:

Social

1. Improvement of community health and sanitation
2. Education and training
3. Public Infrastructure improvement

Economy

4. Community and institution capacity building
5. Agribusiness development
6. Small, and Medium Enterprises (SME) development

Environment

7. Nature and culture preservation.

These seven programs constitute a road map that is in congruence with Mining Closure Plan and the ultimate goal to support a self-sustained society.

Achievement up to 2014

1. Community Empowerment

a. Health:

- Counselling on various contemporary health topics broadcasted on radio, 51 times.
- Seminar on cervical cancer in collaboration with RS Sangatta.
- Socialization on "Stop Smoking".
- Seminar on breast cancer.
- Tuberculosis eradication, among others, through routine monitoring of patients with TB, TB cadre training, and many more.
- HIV/AIDS Prevention Program among others, through inspection and routine VCT, CD4 blood test for PLWHA (People Living with HIV AIDS), and others.
- Mosquito-borne Disease Control Program, among others by conducting regular visits to homes by cadres jumantik for *Aedes* mosquito larvae examination, evaluation of the implementation of PSN program, and others.
- Maternal and Child Health Program, among others through the socialization of maternal and child health program (KPKIA and Pergizi), screening of toddlers with malnutrition and severe malnutrition, routine checkup at Pergizi clinic as well as the distribution of fresh milk.
- Blood Donation commemorating KPC Anniversary.
- "Program Senyum dan Harapan", among others, through cleft lip surgery social service in RS Sangatta in cooperation with Yayasan Anugerah Sentosa and Airlangga University Surabaya.
- Preparation for Health and Environmental Survey.
- Cataract Surgery Social service
- Construction of health infrastructure.
- Direct assistance in health sector.

b. Education:

- "Celoteh Pendidikan" Program, on radio GWP, 41 times, discussing recent educational issues.
- School Greening Program in cooperation with SMAN 2 Sangatta. The program is named "Taman Edukasi Mandara SMAN 2 Sangatta Utara".

- Prestasi Junior Indonesia, yang melibatkan 5 sekolah yaitu SMAN 1 Rantau Pulung, SMAN 1 Bengalon, SMKN 1 Bengalon, SMAN 1 Sangatta Utara, dan SMKN 1 Sangatta Utara.
 - Pemberian beasiswa
 - Program Kerja sama dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), antara lain Uji Kompetensi dan Lomba Keterampilan Siswa (LKS).
 - Program Magang Mekanik (Apprentice Mechanic)
 - Pembangunan infrastruktur pendidikan.
 - Kegiatan sosial karyawan KPC.
 - Bantuan langsung di bidang pendidikan:
- c. Ekonomi:**
- Berbagai promosi untuk meningkatkan penjualan di Olsabara seperti Bazaar, Year End Party, dan HUT KPC. Olsabara telah menjadi vendor KPC untuk produk-produk *souvenir*, *merchandise*, pangan olahan dan lain-lain.
 - Pengembangan industri kerajinan dan UMK Umum, seperti kerajinan manik-manik, batik wakaroros.
 - Pengembangan produk UMK 3R, antara lain usaha pencacahan plastik.
 - Sampai dengan akhir November 2014, 16 pekerjaan infrastruktur dan non-infrastruktur dikerjakan oleh 12 kontraktor lokal.
 - Program Bapak Asuh UMKM (KAGAMA).
 - Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan.
 - Pemantauan terhadap industri kecil di Bengalon seperti: bubuk jahe, keripik pisang, amplang, kerajinan ukiran kayu, kerajinan anyaman, kerupuk rambak, dan lainnya.
 - Pemantauan rutin terhadap UMKM olahan pangan di sekitar Sangatta.
 - KPC bekerja sama dengan KNPI menggelar berbagai macam lomba antara lain: Lomba Wirausaha Muda Lokal Berprestasi, Lomba Tari Khas Kutai, Turnamen Sepakbola Usia Dini U12, dan Lomba Desain Cendera Mata.
- d. Agrikultur:**
- *Project* Peternakan Sapi di Lahan Paska Tambang
 - PESAT expansion, persiapan kerja sama dengan Kodim untuk pembuatan peternakan ayam pada lahan bekas tambang Pit J.
 - *Monitoring* kelompok tani wanita sebagai bagian dari Program Pergizi di Desa Mukti Jaya, Kebon Agung, dan Prima Jaya dengan usaha peternakan ayam dan jamur. Selain itu, usaha tanaman semusim juga dilakukan sebagai diversifikasi usaha dan pemenuhan gizi keluarga.
 - Bantuan 200.000 bibit ikan diberikan kepada kelompok tani di Muara Bengalon.
 - Penanaman padi dengan metode SRI seluas 25 ha di Sepaso Selatan.
 - Pengembangan demo *plot* pertanian di area Segading Resttlement untuk memberikan pengetahuan dan percontohan kepada petani di area tersebut.
 - Pemberian bantuan bibit tanaman semusim untuk kelompok tani di Tebangan Lembak.
 - Pelatihan ternak ayam di Tebangan Lembak dan hasilnya peternak ayam bisa melakukan panen 500 ayam pada tahap awalnya.
- Indonesian Junior Achievement, involving five schools namely SMAN 1 Rantau Pulung, SMAN 1 Bengalon, SMKN 1 Bengalon, SMAN 1 Sangatta Utara, and SMKN 1 Sangatta Utara.
 - Providing scholarships
 - Collaboration program with SMK (Vocational High School), among others Competency Test and Student Skills Competition (LKS).
 - Apprenticeships for Mechanics
 - Development of educational infrastructure.
 - Social activities of KPC employees.
 - Direct assistance in the field of education.
- c. Economics:**
- A variety of promotions to boost sales at Olsabara such as Bazaar, Year End Party, and KPC Anniversary. Olsabara has become KPC vendor for souvenirs, merchandise, processed food and others.
 - Development of craft industry and General SME, such as beads, batik wakaroros.
 - Development of SME 3R products, among others, plastic crusher.
 - As of the end of November 2014, 16 infrastructure and non-infrastructure works has been carried out by 12 local contractors.
 - MSME Fostering Program (KAGAMA).
 - Business and Finance Management Training.
 - Monitoring small industries in Bengalon such as: powdered ginger, banana chips, amplang, wood carving handicrafts, woven handicrafts, kerupuk rambak, and others.
 - Regular monitoring on SMEs food processing around Sangatta.
 - KPC in collaboration with KNPI hold various competitions, among others: Local Young Entrepreneur Competition, Kutai Dance Competition, U12 Early Childhood Football Tournament, and Souvenir Design Competition.
- d. Agriculture:**
- Cow Husbandry Project in Post Mining Land
 - PESAT expansion, preparing collaboration with KODIM in the development of chicken farms on post mined land at Pit J.
 - Monitoring women farmer groups as part of Pergizi Program at Desa Mukti Jaya, Kebon Agung, and Prima Jaya, which engages in chicken and mushroom farms. In addition, seasonal agriculture also performed as a business diversification and nutrition source for families.
 - Donating 200,000 seedlings to farmer groups at Muara Bengalon.
 - SRI method of rice cultivation on an area of 25 ha at Sepaso Selatan.
 - Development of agricultural plot demonstration in the Segading Resttlement to provide knowledge and model to farmers in the area.
 - Donating annual plant seeds for farmer groups at Tebangan Lembak.
 - Chicken Farm Training at Tebangan Lembak resulting a total of 500 chickens in its initial stage.

- Bantuan usaha perikanan keramba untuk Karang Taruna Swarga Bara.
- Penanaman jagung seluas 5 ha di Sepaso Barat untuk menunjang kegiatan peternakan ayam.
- Pemeliharaan kebun karet seluas 4 ha di area Segading Resettlement, direncanakan akan seluas 50-60ha. Pembagian 29.000 bibit tanaman karet.
- Proyek holtikultura di Muara Bengalon, Sepaso Induk, Sepaso Barat, Tebangan Lembak, Segading, Sekerat, dan Sepaso Selatan dengan komoditas antara lain: jagung, tomat, sayur-sayuran, buah naga, dan singkong.
- Persiapan lahan penanaman padi kering di Muara Bengalon seluas 15 ha. KPC memberikan bantuan berupa benih padi. Hal ini juga dilakukan di Segading Resettlement, Tebangan Lembak, Sepaso Selatan, Tepian Indah, Tepian Baru, dan Tepian Langsung.
- Perikanan air tawar di area Segading Resettlement. Pondok pemancingan sudah selesai dibangun.
- Bantuan 100 bebek kepada peternak di Tebangan Lembak
- Peternakan kambing di Tepian Indah mengalami kemajuan yang signifikan, jumlah kambing telah mencapai 90 ekor.
- Program Rumah Pangan Bersemita di Desa Rantau Makmur, Margo Mulyo, Mukti Jaya, dan Kebon Agung di Rantau Pulung serta di Dusun Kobo Jaya, Sangatta Utara.
- Pelatihan budi daya buah naga di Desa Margo Mulyo, Rantau Pulung.
- Pelatihan budi daya ikan lele di Rantau Makmur, Rantau Pulung.
- Donating fishery cages for Karang Taruna at Swarga Bara.
- Corn planting on an area of 5 ha in Sepaso Barat to support the chicken farm.
- Maintenance of rubber plantation in an area of 4 ha, from the plan of 50-60ha, in Segading Resettlement. Distributing 29,000 rubber tree seedlings.
- Horticultural project at Muara Bengalon, Sepaso Induk, Sepaso Barat, Tebangan Lembak, Segading, Sekerat, and Sepaso Selatan for commodities such as: corn, tomatoes, vegetables, dragon fruit, and cassava.
- Preparing land for rice cultivation on 15 ha dry field at Muara Bengalon. KPC provides assistance in the form of rice seeds. This is also done at Segading Resettlement, Tebangan Lembak, Sepaso Selatan, Tepian Indah, Tepian Baru, and Tepian Langsung.
- Freshwater fisheries at Segading Resettlement. Fishing lodge has been completed.
- Donating 100 ducks to farmers at Tebangan Lembak.
- Goat husbandry at Tepian Indah showing significant progress with 90 goats.
- Rumah Pangan Bersemita Program at Rantau Makmur, Margo Mulyo, Mukti Jaya, and Kebon Agung in Rantau Pulung Kobo and in Dusun Kobo Jaya, Sangatta Utara.
- Training on dragon fruit cultivation at Margo Mulyo, Rantau Pulung.
- Training on catfish farming at Rantau Makmur, Rantau Pulung.

2. Hubungan Komunitas

a. Keagamaan:

- Bantuan perayaan Hari Raya Nyepi di Sangatta.
- Bantuan penyelenggaraan MTQ di Rantau Pulung dan Sangatta Selatan.
- Bantuan penyelenggaraan perayaan Paskah berbagai gereja di Kutai Timur.
- Peringatan Haul Habib Kecamatan Bengalon
- Bantuan berbagai kegiatan Ramadhan di wilayah Sangatta dan sekitarnya.
- Safari Ramadhan Kecamatan Bengalon
- Kegiatan HUT Pura oleh PHDI
- Kegiatan Lomba Takbir PHBI Bengalon
- Pembangunan Musholla di Hatari
- Bantuan kegiatan peresmian, pentahbisan, dan ibadah syukur Gereja Bethel Tabernakel
- Bantuan sapi untuk peringatan Idul Adha di berbagai wilayah di Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta
- Bantuan penyelenggaraan perayaan Natal berbagai gereja di Kutai Timur.

b. Sosial/Program Desa Mandiri:

- Pemantauan dan pendampingan BUMDes 14 desa di 3 kecamatan dengan 24 unit bisnis
- Inisiasi pengembangan Desa Mandiri di Desa Rantau Makmur, Swarga Bara, dan Sangkima (pilot project) berjalan aktif dan produktif. Rantau Makmur menjadi Desa Mandiri berbasis Agribisnis, Swarga Bara menjadi Desa Mandiri berbasis Ekowisata, Sangkima

2. Community Relations

a. Religious:

- Donation for the celebration of Nyepi at Sangatta.
- Donation for the organizing of MTQ at Rantau Pulung and Sangatta Selatan.
- Donation for the Easter celebration at churches at Kutai Timur.
- Memorial Haul Habib at Bengalon
- Donation for Ramadan activities at Sangatta and surroundings.
- Safari Ramadhan at Bengalon
- Anniversary of Pura by PHDI
- Takbir Competition by PHBI Bengalon
- Construction of mosque at Hatari
- Donation for the inauguration, ordination, and gratitude service at Bethel Tabernacle Church
- Donating cow for the celebration of peringatan Idul Adha in different areas in Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, and Jakarta
- Donation for Christmas celebrations in various churches at Kutai Timur.

b. Social/Program Desa Mandiri:

- Monitoring and assistance for BUMDes at 14 villages in three districts with 24 business units
- Initiation of the development of Desa Mandiri at Desa Rantau Makmur, Swarga Bara, and Sangkima (pilot project), which were active and productive. Desa Rantau Makmur became an agribusiness-based self-reliant village, Swarga Bara became an

- menjadi Desa Mandiri berbasis Perikanan-Kelautan.
- Tipe bisnis yang dikembangkan:
Rantau Pulung – listrik, air minum, simpan pinjam, dan kebutuhan pertanian
Sangatta Utara – air bersih, simpan pinjam, *ecotourism*, dan transportasi sungai
Sangatta Selatan – air minum dan rumah kompos
- Perkembangan BUMDes di 3 Kecamatan sebagai berikut:

- Ecotourism based self-reliant village, Sangkima became Marine Fisheries based on self-reliance.
- The type of business developed:
Rantau Pulung - electricity, drinking water, savings and loans, and agricultural needs, Sangatta Utara - clean water, savings and loans, ecotourism, and river transportation; South Sangatta - drinking water and composting house.
- The development of BUMDes in 3 sub-districts as follows:

Keterangan Description	Kecamatan District		
	Rantau Pulung (8 Desa/Villages)	Sangatta Utara (3 Desa/Villages)	Sangatta Selatan (3 Desa/Villages)
Jumlah BUMDes / Number of Bumdes	8	3	3
Unit usaha yang dilakukan / Number of Business Unit	14 unit usaha / business unit	7 unit usaha / business unit	3 unit usaha / business unit
Unit usaha lain yang tumbuh / Other Growing Business Untit	43 usaha mikro / micro business	30 usaha mikro / micro business	5 usaha mikro / micro business
Kontribusi KPC / KPC Contribution	68 %	65 %	54%
Serapan tenaga kerja / Labor Absorption	56	45	10

c. Budaya & Olah Raga:

- Bantuan kejuaraan Drag Bike dan Drag Race Sangatta.
- Bantuan keikutsertaan PGSI Kaltim dalam Kejuaraan Gulat Junior Asia Tenggara.
- Bantuan kegiatan Turnamen Gateball Kutai Timur 2014.
- Bantuan kegiatan Bulu Tangkis Open antar perusahaan Bontang dan Sangatta.
- Bantuan kegiatan Turnamen Sepakbola U-16 BAPOR.
- Bantuan Kejuaraan Daerah Grass Track Seri 1 DISPORAPAR Cup 2014
- Bantuan kegiatan Swarga Bara Idol
- Bantuan untuk PGSI Kutai Timur dalam Kejurda gulat junior se-Kaltim 2014
- Bantuan kegiatan adat Ngembang Tahun Desa Keraitan Bengalon
- Bantuan kepada Asosiasi Memory Sport Indonesia untuk mengikuti Memory Sport Competition Tour
- Bantuan Pertandingan Sepakbola Forum Pemuda Kutai Timur
- Bantuan Kejurda Balap Motor IMI
- Kejuaraan tenis lapangan SBTC
- Bantuan keikutsertaan SMAN 2 Sangatta Utara dalam kejuaraan basket Honda DBL 2014
- Kejuaraan bulu tangkis 2014 – PBSI
- Bantuan Kejuaraan Menembak Awang Faroek Cup III
- Bantuan kejuaraan gulat dunia di Uzbekistan – PGSI
- Bantuan biaya operasional Ikatan Pencak Silat Indonesia cabang Sangatta
- Bantuan operasional Persikutim
- Jambore Sepeda Gunung – Sangatta Bikers Club

c. Culture & Sports:

- Donation for the Drag Bike and Drag Race Championship at Sangatta.
- Donation for the PGSI Kaltim to participate in the Southeast Asian Junior Wrestling Championship.
- Donation for Gateball Tournament 2014, Kutai Timur.
- Donation for Open Badminton tournament among companies at Bontang and Sangatta.
- Donation for U-16 Football Tournament Bapor.
- Donation for Regional Championship of Grass Track Series 1 DISPORAPAR Cup 2014
- Donation for Swarga Bara Idol
- Donation for PGSI Kutai Timur in junior wrestling championship of Kaltim 2014
- Donation for customary activities Ngembang Tahun Desa Keraitan Bengalon.
- Donation for the Association of Indonesian Memory Sport to follow the Memory Sport Competition Tour
- Donation for Soccer Game of Youth Forum Kutai Timur
- Donation for IMI Motor Racing Regional Championship
- SBTC Tennis Championship
- Donation for SMAN 2 Sangatta Utara to participate in basketball championship of Honda DBL 2014
- Badminton Championship 2014 - PBSI
- Donation for Awang Faroek Shooting Championship Cup III
- Donation for world wrestling championships in Uzbekistan - PGSI
- Donation for the operational costs Indonesian Pencak Silat Association at Sangatta
- Operational Assistance for Persikutim
- Mountain Bike Jamboree - Sangatta Bikers Club

- Bantuan kepada Sangatta Soccer Academy untuk mengikuti turnamen Indonesia National Championship 2014.

d. Lingkungan

- Telaga Batu Arang (TBA) – Post Mining Project
 - Pembuatan *draft master plan* oleh BITA telah didiskusikan dengan IPB untuk disinergikan dengan aktivitas di PESAT dan Pit Jupiter.
 - Perbaikan jogging track, area berkemah, dan tempat parkir.
 - Pembuatan kandang sapi perah, gudang pakan, dan mess karyawan.
 - Pengelolaan kunjungan wisata berbagai pihak ke PESAT.
 - Perawatan 17 ekor sapi perah yang dimiliki oleh PT.YSB
 - Pembuatan pagar rusa dan pengurusan ijin pengembangbiakan rusa.
 - Pemeliharaan 5 ha padang rumput, 0,5 ha ketela, dan 0,4 ha jagung untuk keperluan pakan sapi
 - Persiapan lahan 10 ha untuk tanaman buah lokal.
 - Pemeliharaan kebun sawit oleh kelompok tani Kabojaya.
- Gerak Bersemi – Gerakan Komunitas Bersih Sehat Mandiri
 - Gerakan Jumat Bersih dilakukan secara rutin dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Polres, Kodim, dan lainnya yang dikoordinir oleh UPT Kebersihan.
 - Pemantauan rutin untuk sekolah bersemi yaitu TKIT dan SMPIT Darussalam serta SDN 005 Sangatta Utara.
 - Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kaliorang dan Kongbeng bersama BLH Kutim.
 - Forkahat (Forum Kabupaten Sehat), melakukan penanaman pohon di jalan poros kabo bekerja sama dengan desa, KPC, dan UT.
 - Bantuan kepada UPT Kebersihan berupa jaring untuk truk sampah dan jas hujan.
 - Bantuan 100 bibit pohon untuk SMUN 2 Sangatta Utara dan 50 bibit untuk Lanal Sangatta.
 - Remaja Kreatif Peduli Lingkungan (RKPL): kerja sama dengan YSB untuk pengambilan sampah di Perumahan Panorama dan pengelolaan CTC di Town Hall, kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pelatihan pengelolaan sampah di Sangkulirang dan Telen. Selain itu juga training untuk Organisasi Wanita dan Bhayangkari di BPU Sangatta Utara
 - Sosialisasi Bank Sampah untuk ibu-ibu PKK Bengalon, bekerja sama dengan UPPKS Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, serta PT United Tractor.
 - Composting Training Centre (CTC): Setiap bulan rata-rata mengumpulkan 90 ton sampah dari Munthe, Panorama, dan Town Hall. Penyerapan sampah non-organik dari program Green Office KPC.
 - Bank Sampah terus berkembang dengan sosialisasi ke berbagai organisasi dan komunitas untuk mendapatkan nasabah.

- Donation for Sangatta Soccer Academy to join Indonesia National Championship tournament in 2014

d. Environment

- Telaga Batu Arang (TBA) - Post Mining Project
 - The preparation of master plan drafted by BITA has been discussed with IPB to be synergized with the activities of PESAT and Pit Jupiter.
 - Repairing jogging track, camping area and parking lot.
 - Construction of dairy cattle stables, feed warehouse, and employee dormitory.
 - Management of tourist visits from various parties to PESAT.
 - Caring for 17 dairy cows owned by PT.YSB.
 - Construction of deer fence and licence for deer breeding.
 - Maintenance of 5 ha grassland, 0.5 ha cassava, and 0.4 ha corn field for cattle feed purposes.
 - Preparation of 10 ha land for local fruit.
 - Maintenance of oil palm plantations by farmer groups at Kabojaya.
- Bersemi Movement - Bersih Sehat Mandiri Community Movement
 - "Jumat Bersih" Movement is carried out routinely involving various parties, such as the Police, Kodim and the parties, under coordination of UPT Health.
 - Routine monitoring on Bersemi school namely TKIT and SMPIT Darussalam and SDN 005 Sangatta Utara.
 - Socialization and Training on Waste Management at Kaliorang and Kongbeng together with BLH Kutim.
 - Forkahat (Forum Kabupaten Sehat) plants trees along the Kabo axis road in cooperation with villages, KPC, and UT.
 - Donating nets for garbage trucks and raincoats for UPT Health.
 - Donating 100 tree seedlings for SMU 2 Sangatta Utara and 50 seedlings for Lanal Sangatta.
 - Remaja Kreatif Peduli Lingkungan (RKPL): collaborate with YSB in garbage collection in Panorama Housing and CTC management at the Town Hall, collaborate with the Environment Agency to carry out waste management training in Sangkulirang and Telen. Training for women's organizations and Bhayangkari at BPU Sangatta Utara.
 - Socialization on Garbage Bank for PKK Bengalon, in cooperation with UPPKS Sangatta Utara and Sangatta Selatan, and PT United Tractor.
 - Composting Training Centre (CTC): Collecting waste from Munthe, Panorama, and Town Hall with an average of 90 tons a month. Absorption of non-organic waste from KPC Green Office program.
 - Garbage Bank continues to grow with socialization to various organizations and communities to get more customers.

- Taman Nasional Kutai dan Ecotourism Kabojaya
 - Pengurusan ijin ekowisata Kabojaya ke Taman Nasional Kutai, pengalokasian dana desa untuk perbaikan jetty, studi banding Taman Nasional Kutai dan pengelola ekowisata ke Taman Nasional Pangrango, Jawa Barat.
- BPPUTK/Kampung Pinang:
 - Pengelolaan berbagai kunjungan ke Kampung Pinang.
 - Perawatan demo plot kelinci, sapi perah, dan sayuran organik serta simbiosis budidaya padi dengan itik.
 - Koordinasi dan kolaborasi dengan Forum Komunikasi Pecinta Alam Kutai Timur.
 - Fasilitasi survei Burung Enggang oleh tim dari ITB.
 - Penggunaan ruang di BPPUTK oleh Kagama (Ikatan Alumni Universitas Gadjah Mada) untuk kegiatan kejar paket A – C.
 - Penggunaan ruang BPPUTK untuk Training Interpreter oleh Taman Nasional Kutai dan Kewirausahaan dalam bisnis turisme.
 - Pembangunan toilet di BPPUTK.

- Kutai National Park and Ecotourism at Kabojaya
 - Getting permit for ecotourism of Kabojaya to Kutai National Park, allocating funds for the village to repair the jetty, comparative study on the ecotourism management of Kutai National Park and Pangrango National Park, West Java.
- BPPUTK / Kampung Pinang:
 - Visits to Kampung Pinang.
 - Maintenance of demo plot for rabbits, dairy cows, and organic vegetables and symbiotic cultivation of rice and ducks.
 - Coordination and collaboration with the Communication Forum of East Kutai Nature Lovers.
 - Facilitating hornbill survey by a team from ITB.
 - Using the room in BPPUTK by Kagama (University of Gadjah Mada Alumni Association) for the activities of “Kejar Paket A – C”.
 - Using the room in BPPUTK BPPUTK for Interpreter Training by Kutai National Park and Entrepreneurship in the tourism business.
 - Construction of toilets in BPPUTK.

3. Pembangunan Infrastruktur

- Pembangunan masjid dan sekolah di area Resettlement Segading
- Pembangunan Kantor Desa Sekerat
- Renovasi lapangan sepakbola Kecamatan Bengalon
- Pembuatan jalan menuju ke sungai di Segading
- Peningkatan jalan Kelompok Tani Asam Payang
- Finishing Gedung Serba Guna Sepaso Timur
- Perbaikan jalan lingkungan Swarga Bara, Sangatta Utara (SBE, Bumi Etam, Bukit Batu bara, Sisi Danau)
- Bantuan pembangunan pembangkit listrik microhydro
- Renovasi PAUD di Sangatta Utara
- Bantuan pembangunan masjid Assalam Sangatta Utara
- Bantuan lanjutan pembangunan Gedung Serba Guna Sangatta Selatan
- Renovasi dan pembangunan ruang kelas TPA Nurul Iman Sangatta Utara.

3. Infrastructure Development

- Construction of mosques and schools in the Segading Resettlement
- Construction of Rural Office of Desa Sekerat
- Renovation of soccer field at Bengalon
- Construction of road to river at Segading
- Improving the road for Farmers Group at Asam Payang
- Finishing Multipurpose Building at Sepaso Timur
- Improving the neighborhood road at Swarga Bara, Sangatta Utara (SBE, Bumi Etam, Bukit Batu bara, Sisi Danau)
- Donation for the construction of microhydro power plant
- Renovation of PAUD at Sangatta Utara
- Donation for the construction of Assalam mosque at Sangatta Selatan
- Donation to continue the construction of Multipurpose Building at Sangatta Selatan
- Renovation and construction of classrooms of TPA Nurul Iman at Sangatta Utara.

4. Operasional

- Bantuan operasional untuk Forum MSH CSR Kutai Timur
- Operasional aktivitas pemberdayaan masyarakat.

4. Operational

- Operational Assistance for East Kutai MSH-CSR Forum
- Operational activities of community empowerment.

5. Pelayanan Masyarakat

a. Bencana Alam

- Bantuan untuk kejadian kebakaran di Pinang Dalam, Sangatta.

b. Donasi

Donasi yang diberikan antara lain:

- Bantuan kepada Wanadri untuk kegiatan Ekspedisi Tebing Karst Sangkulirang.
- Bantuan peringatan bulan K3 kepada FKM UI.
- Bantuan untuk kegiatan dialog dan penyuluhan bahaya narkoba oleh organisasi Baramuda.
- Bantuan untuk kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove oleh Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan Kaliorang.

5. Community Service

a. Natural Disaster

- Donation for fire disaster at Pinang Dalam, Sangatta.

b. Donation

Donations include:

- Donation for Wanadri for the activity of Karst Expedition Sangkulirang.
- Donation for K3 Month activity for FKM UI.
- Donation for the dialogue and outreach activities on the danger of drugs by Baramuda organization.
- Donation for Beach Cleaning Action and Mangrove Planting by the “Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan Kaliorang”.

- Dukungan Pengembangan Sekolah Alam Balikpapan
- Peringatan Hari Kartini Periska, Desa Sepaso, dan Sepaso Timur.
- Bantuan Seminar Nasional DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia.
- Sponsorship OHS Expo Universitas Indonesia.
- Bantuan kegiatan seminar APBI-KNPI.
- Dukungan kegiatan Alumni Peduli Sangatta 2014.
- Dukungan kegiatan kemasyarakatan Forum Community Relation Bengalon.
- Mubes dan Seminar Pemuda Laskar Pemuda Wehea Bersatu.
- Peringatan HUT RI 17 Agustus di Kutai Timur.
- Bantuan peringatan HUT Kutai Timur.
- Kegiatan IWOBE 2014 oleh UGM.
- Bantuan untuk Kejuaraan Menembak Nasional.
- Sponsor Seminar Prospek Pertambangan 2015.
- Dukungan kegiatan Konferensi Cabang PWI Kaltim.

- Supporting the Development of Sekolah Alam Balikpapan.
- Kartini Day at Periska, Sepaso Village, and Sepaso Timur.
- Donation for National Seminar of the DPD of "Mahasiswa Pembangunan Indonesia"
- Sponsorship for OHS Expo, University of Indonesia.
- Donation for seminar of ICMA-KNPI.
- Supporting the activity of Alumni Peduli Sangatta 2014.
- Supporting the community activities of Forum Community Relations at Bengalon.
- Conference and Seminar of Pemuda Laskar Pemuda Wehea Bersatu.
- Anniversary of Indonesian Independence in Kutai Timur.
- Donation for the anniversary of Kutai Timur.
- IWOBE 2014 Activities by UGM.
- Donation for National Shooting Championship.
- Sponsoring the Seminar on Mining Prospects in 2015.
- Supporting the Conference of PWI Kaltim.

Tabel Realisasi Anggaran Pengembangan Masyarakat 2014 (US\$)

Table of Realization Community Development Budget in 2014 (US\$)

No.	Program	Rencana 2014 (USD) Plan in 2014 (USD)	Realisasi 2014 (USD) Realization in 2014 (USD)
1.	Pemberdayaan Masyarakat / Community Empowerment	1,997,000	1,335,306
	a. Kesehatan / Health	732,000	627,297
	b. Pendidikan / Education	666,000	377,239
	c. Ekonomi / Economy	295,000	80,043
	d. Agrikultur / Agriculture	304,000	250,727
2.	Hubungan Komunitas / Community Relation	627,500	986,627
	a. Keagamaan / Religion	80,000	133,586
	b. Sosial / Social	210,000	192,762
	c. Budaya & Olah Raga / Culture & Sport	72,000	383,519
	d. Lingkungan / Environment	265,500	276,760
3.	Pembangunan Infrastruktur / Infrastructure Development	1,768,000	2,145,358
4.	Operasional / Operational	200,000	184,096
5.	Pelayanan Masyarakat / Social Service	407,500	379,448
	a. Bencana Alam / Natural Disasster	23,000	219
	b. Donasi / Donation	384,500	379,229
	Total	5,000,000	5,030,836

2. Kegiatan CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan di Arutmin

Arutmin senantiasa membina hubungan yang serasi dan memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar operasi tambang dan terminal batu bara. Arutmin juga berusaha mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup seminimal mungkin dan berkomitmen untuk senantiasa mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan CSR, yang difokuskan pada pengembangan 6 bidang kegiatan yang meliputi: Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur, Pelestarian Sosial dan Budaya, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, dan Pengembangan Ekonomi Lokal.

2. Arutmin CSR Social Activities Management

In carrying out social responsibility and development to the community, Arutmin develops harmonious relationships and provide benefits to communities around coal mining operations and the terminal. In conducting its business activities, Arutmin seeks to minimize the impact on the environment as much as possible and is committed to continue supporting the improvement of quality of life of the community through CSR activities. Arutmin CSR activities were focused on development in six areas: Infrastructure, Social and Cultural Preservation, Public Health Service, Improvement of Human Resources through Education and Local Economic Development.

Keenam bidang kegiatan tersebut direalisasikan di lima lokasi tambang Arutmin dan satu lokasi terminal batu bara, yang tersebar di tiga Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Adapun kelima lokasi tambang Arutmin tersebut adalah: tambang Asam Asam, Batulicin, Kintap, Satui dan Senakin serta Terminal Batu bara Pulau Laut Utara (North Pulau Laut Coal Terminal/ NPLCT).

Rencana strategi kegiatan dijalankan berdasarkan pendekatan tahun anggaran yang diuraikan secara berjenjang dalam bentuk Master Plan Community Development Programme. Rencana tersebut selalu dikaitkan dengan cakupan desa yang menjadi daerah binaan.

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan ini dilakukan guna mendukung tersedianya sarana dan prasarana masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar tambang, mendukung masyarakat lingkaran tambang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Diharapkan pula pengembangan infrastruktur dapat mendorong berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fasilitas telah dibangun oleh Arutmin di beberapa lokasi kegiatan operasional:

Those sixth fields of activity are realized through community empowerment programs in five mining locations and one coal terminal location, spread across three districts in South Kalimantan province namely Tanah Laut, Tanah Bumbu and Kotabaru. The five Arutmin mine sites are: Asam Asam, Batulicin, Kintap, Satui and Senakin, as well as North Pulau Laut Coal Terminal/ (NPLCT).

Strategic plans for the activities were executed using the approach of the fiscal year, described in stages in the Master Plan for Community Development Program. The plan has always been associated with the coverage of villages as the target areas.

Infrastructure Construction and Development

These activities are carried out in order to support the availability of public facilities and infrastructure to improve the life of people living around the mine. The development of infrastructure is expected to support the community around the mine in performing daily activities. Moreover, the infrastructure development is also expected to promote the development of local economies so that the public welfare can be increased. During 2014, several facilities have been built by Arutmin operations in several locations.

No	Program	Keterangan Description	Pemangku Kepentingan Stakeholder
1.	Perbaikan Jalan Desa / Road maintenance	Perbaikan jalan desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap serta Perbaikan Jalan Desa Sigam - Sarangtiung, Kabupaten Kotabaru. / Road maintenance at Sumber Jaya, District of Kintap and Road maintenance at Sigam - Sarangtiung, District of Kotabaru	Desa Lingkar Tambang / Villages around the mine sites
2.	Pembuatan Sarana Air Bersih / Clean Water Facility Construction	Pembuatan 2 Fasilitas Sarana Air Bersih di Desa Mekarsari, Batulicin dan Desa Sumber Jaya, Kintap. / Construction of 2 clean water facilities at Mekarsari, Batulicin and Sumber Jaya, Kintap.	Desa Lingkar Tambang / Villages around the mine sites
3.	Pembangunan Sarana Ibadah / Worship Facility Construction	Pembangunan dan Perbaikan 5 Sarana Ibadah di Kabupaten Tanah Laut. / Construction and maintenance of 5 religious facilities	Desa Lingkar Tambang, Kabupaten Tanah Laut / Villages around the mine sites, Tanah Laut Regency

Pelestarian Sosial dan Budaya

Pelestarian sosial dan budaya dilakukan untuk mendukung pelestarian Budaya, meningkatkan kualitas beribadah masyarakat sekitar dan mendukung pemuda dalam berkreasi dan berprestasi. Sepanjang tahun 2014, Arutmin melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya yang berupa antara lain:

Social Cultural Preservation

By social and cultural preservation, we mean the activities to support culture preservation effort, improving the quality of worship of people and support the activities of the youth to be creative and to be achievers. Throughout 2014, Arutmin has supported the community in conducting religious activities and culture in the form of, among others:

No	Program	Keterangan Description	Pemangku Kepentingan Stakeholders
1.	Kegiatan Keagamaan / Religious Activities	Safari Ramadhan dan pembagian paket Idul Fitri untuk pemangku kepentingan di seluruh lokasi tambang / Safari Ramadhan and distributing Eid packages for all stakeholders around sites.	Masyarakat dan pemerintah lokal di desa lingkar tambang / Communities and local governments in villages around the mines
		Distribusi 7 Hewan Qurban Sapi & 1 kambing dalam rangka Hari Raya Idul Adha di seluruh lokasi tambang / Distribution of 7 cows & 1 goat for sacrificial animal for Eid Adha around the mine site	Desa Lingkar Tambang / Villages around the mines

No	Program	Keterangan Description	Pemangku Kepentingan Stakeholders
2.	Kegiatan Sosial-Budaya / Social Culture Activities	Partisipasi dalam kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut / Participation in MTQ of South Kalimantan provincial level in Tanah Laut	Kabupaten Tanah Laut / Tanah Laut Regency
		Partisipasi pada kegiatan HUT kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru / Participation in the anniversary of the regency of Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru	Masyarakat dan pemerintah lokal di desa lingkaran tambang / Communities and Local Government of Villages around mine sites
		Partisipasi pada Hari Nusantara 2014 / Participation in Nusantara Day 2014	Kabupaten Kotabaru / Kotabaru Regency

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2014, kepedulian Arutmin dalam bidang kesehatan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan berikut:

Community Health Service

Health is a basic aspect in improving the quality of life. In 2014, Arutmin's concern in the field of health care is implemented by organizing various activities of health services, among others:

No	Program	Keterangan Description	Pemangku Kepentingan Stakeholders
1.	Donor Darah / Blood Donation	Kegiatan donor darah untuk mendukung ketersediaan kantor darah di PMI setempat dan menghasilkan 327 kantong darah untuk PMI / Blood donation to support the availability of blood at local Red Cross office and gaining 37 blood bags for PMI.	Karyawan, kontraktor dan masyarakat lingkaran tambang / Employees, contractors and the communities around the mine
2.	Posyandu	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mendukung kegiatan posyandu di seluruh desa lingkaran tambang / Supplementary Feeding to support Posyandu activities throughout the villages around the mine	90 unit posyandu di desa lingkaran tambang / 90 units of Posyandu in villages around mine sites

Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan

Dalam bidang ini dilakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, baik ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan sikap bagi para pemangku kepentingan khususnya masyarakat di sekitar lokasi kerja Arutmin. Selama tahun 2014, Arutmin memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh akses dan kesempatan dalam meningkatkan pendidikan melalui berbagai kegiatan:

Human Resources Capacity Building through Education

In this sector, the activities are aimed at improving the quality of education, skills, knowledge, and attitudes for stakeholders, especially the communities around Arutmin sites. Children's education is a prerequisite for the community to evolve toward a better condition and be able to adjust to changes. During 2014, Arutmin facilitated the public with access and opportunities in improving education through a variety of activities:

No	Program	Keterangan Description	Pemangku Kepentingan Stakeholders
1.	Beasiswa Bibit Unggul Daerah (BUD) / Scholarship for Local Student Achiever	Beasiswa khusus kepada mahasiswa terbaik (peringkat terbaik kabupaten) untuk menempuh pendidikan sarjana di universitas mitra (Institut Pertanian Bogor) / Scholarship for best students (best ranked students in the regency) at partner university (Bogor Agriculture Institute)	6 mahasiswa terbaik di tingkat kabupaten / 6 best students at district level
2.	Kuliah Kerja Nyata / Community Service Program	Kegiatan dan sarana pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus praktek lapangan di bidang pengembangan masyarakat / Activities and learning facilities for students as well on the job training in the field of community development	52 Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Kalimantan Selatan / 52 students from UNLAM, South Kalimantan
3.	Program Magang / Apprenticeship	Program magang bagi lulusan D3/S1 di lingkaran tambang untuk belajar sekaligus bekerja di PT Arutmin Indonesia / Apprenticeship Program for D3/S1 graduates around the mine site, learn and work at PT Arutmin Indonesia	Lulusan D3/S1 di desa lingkaran tambang / D3/S1 graduates from villages around the mine site

4.	Sekolah Lapang / Field School	Program pelatihan untuk petani, ibu-ibu PKK dan masyarakat di bidang pertanian, pasca panen, kesehatan dan lainnya / Training program for farmers, PKK and communities in the field of agriculture, post-harvesting, health care and many more.	Masyarakat di Kecamatan Asam-asam / People of Asam-Asam Sub District
5.	Fasilitas Pendidikan / Education Facility	Program Perpustakaan Keliling di Kecamatan Satui / Mobile Library Program at Sub-District of Satui.	Masyarakat di Kecamatan Satui. / People of Satui Sub District

Pembangunan Ekonomi Lokal

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat. Arutmin melakukan berbagai macam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal masyarakat setempat, melalui berbagai kegiatan, seperti:

Local Economy Development

Activities undertaken to improve people's living with social economic activities. People's economy is substantial for the effort to build a self-reliant community. Therefore, Arutmin performs various economic development programs based on local resources and local communities. Economic development is done through a variety of activities, such as:

No	Program	Lokasi Location	Rincian Detail
1.	Sektor Pertanian / Agricultural		
	Pengembangan Demplot Pertanian / Development of Agricultural Demo-plot	Desa Lingkar Tambang / Villages Around Mine Sites	Pengembangan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran / Fruits and vegetables farming
2.	Sektor Peternakan / Animal Husbandry		
	Peternakan Ayam / Chicken Husbandry	Kintap	Program fasilitas permodalan untuk peternak ayam petelur di desa lingkar tambang. / Capital Facility for laying hens farmer at Villages Around Mine Sites
3.	Sektor Perikanan / Fishery		
	Kepiting Cangkang Lunak / Kepiting Cangkang Lunak	Sarang Tiung, Kotabaru	Program pembibitan, pemijahan, pembersaran dan unit bisnis kepiting cangkang lunak / Seeding, spawning, cultivation of soft shell crabs
	Keramba Jaring Apung eks tambang / Fish cages in former mine voids	Senakin & Satui	Program pembersaran ikan di 6 unit Keramba Jaring Apung di lubang bekas kegiatan pertambangan (void) / Fish breeding program using 6 fish cages in former mine voids

Penghargaan

Penghargaan yang diterima Arutmin di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat di halaman 20-21 annual report ini.

Appreciation

Awards received by Arutmin in the field of community development can be seen on page 20-21 of this annual report.

Rencana Anggaran Community Development 2015

Di tahun 2015, Arutmin merencanakan anggaran Community Development sebesar US\$ 1,4 juta untuk bidang-bidang sebagai berikut:

- Pengembangan Ekonomi Lokal**
 - Peningkatan dan pengembangan usaha lokal
 - Pengembangan program perkebunan karet
 - Pengembangan program peternakan
 - Pengembangan program pertanian
- Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan**
 - Program beasiswa
 - Program Kuliah Kerja Nyata dengan universitas
 - Program magang
 - Infrastruktur dan sarana pendidikan
- Pelayanan Kesehatan Masyarakat**
 - Donor darah
 - Pengobatan masal gratis
 - Program posyandu
- Pelestarian Sosial dan Budaya**
 - Program pembinaan dan pengembangan olahraga
 - Pelestarian seni dan budaya lokal

Budget Plan for Community Development 2015

In 2015, Arutmin plans a Community Development budget of USD 1.4 million in the following areas:

- Local Economic Development**
 - Improvement and development of local businesses
 - Development of rubber plantation program
 - Development of animal husbandry program
 - Development of the agricultural program
- Improvement of Human Resources through Education**
 - Scholarship Program
 - KKN Program with universities
 - Internship program
 - Infrastructure and education facilities
- Public Health Service**
 - Blood donations
 - Free medical treatment
 - Posyandu Program
- Social and Cultural Preservation**
 - Coaching Program and sports development
 - Preservation of local art and culture

5. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur

- Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan
- Pembangunan sarana ibadah
- Pembangunan sarana pelayanan masyarakat.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Dengan skala usahanya yang bersifat internasional, BUMI telah menerapkan praktik terbaik berstandar internasional untuk pengelolaan Lingkungan, termasuk pengelolaan limbah di anak perusahaan. Dengan keterlibatan penuh dari badan pengawas pemerintah dan dukungan dari manajemen dan staf, langkah-langkah yang luas dan efektif diambil untuk meminimalkan atau menghilangkan dampak kegiatan pertambangan, sekaligus mempromosikan kegiatan reklamasi dan revegetasi yang menyertakan keterlibatan dan dukungan masyarakat.

Seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh dua anak usaha yang aktif memproduksi dengan skala luas, yakni PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin, sebagaimana diuraikan pada pembahasan berikut.

1. Pengelolaan Lingkungan di KPC

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Pernyataan Kebijakan Lingkungan KPC disatukan dengan kebijakan mengenai Pengelolaan K-3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Pengembangan Masyarakat sekitar, seperti tercantum pada uraian "Tanggung Jawab Terhadap Komunitas".

Sistem Manajemen Lingkungan

Untuk memastikan Sistem Manajemen Lingkungan diterapkan secara konsisten di seluruh areal kerja PT KPC, maka setiap tahun dilakukan audit internal dan audit eksternal oleh auditor independen. Audit Internal Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terintegrasi telah dilakukan pada tanggal 21 Juli hingga 22 Agustus 2014 di seluruh Divisi (14 Divisi) PT KPC. Selanjutnya pada tanggal 27-31 Oktober 2014 telah dilakukan audit *surveillance* secara integrasi untuk Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja OHSAS 18001 oleh badan sertifikasi PT SGS Indonesia. Pada bulan September 2014, PT KPC mendapat apresiasi dari Badan Sertifikasi PT SGS Indonesia untuk dedikasi dan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 selama 10 tahun sejak tahun 2004.

Pembukaan dan Reklamasi Lahan

Realisasi pembukaan lahan selama tahun 2014 di areal tambang Sangatta dan Bengalon mencapai luas 1.634,40 hektar, dari total rencana pembukaan lahan selama tahun 2014 seluas 2.537,44 hektar. Dengan demikian, secara kumulatif, luas lahan yang terbuka sampai dengan tahun 2014 adalah 21.810,52 Ha.

Total luas reklamasi lahan bekas tambang di Sangatta dan Bengalon selama tahun 2014 mencapai luas 1.191,29 hektar melebihi rencana reklamasi tahun 2014 seluas 1.167,64 hektar. Untuk pelaksanaan reklamasi seluas 1.191,29 ha diperlukan sejumlah 24.115,3 kbcm tanah sebagai media pertumbuhan tanaman. Kemudian dibutuhkan tanaman *pioneer* seperti agatis,

5. Infrastructure Construction and Development

- Construction and maintenance of roads and bridges
- Construction of religious facilities
- Development of community service facilities.

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

With its international scale businesses, BUMI applies the best practice according to international standards for environmental management, including waste management in subsidiaries. The full involvement from government supervisory bodies, the management, and all staff support extensive and effective initiatives implemented in order to minimize or eliminate mining impacts as well as promoting reclamation and re-vegetation activities, which invite community participation.

All activities of environmental management and monitoring are carried out by subsidiaries with wide-scale production activities, PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia. Detailed explanation is presented as follows.

1. Environmental Management in KPC

Environmental Management Policy

KPC's environmental policy is incorporated in its OHS Management and Community Development policy, as described in the 'Responsibility to Community' section.

Environmental Management System

To ensure the Environmental Management System is applied consistently throughout the working area of PT KPC, internal audits and external audits are conducted by independent auditors every year. Internal Audits on Integrated Environmental Management System and Occupational Health and Safety Management were carried out on July 21 until August 22, 2014 in all Division (14 Divisions) of PT KPC. Furthermore, on 27-31 October 2014, an integrated audit surveillance for ISO 14001 Environmental Management System and OHSAS 18001 Health and Safety Management System were carried out by PT SGS Indonesia, a certification agency. In September 2014, PT KPC received recognition from PT SGS Indonesia for its dedication and commitment in the implementation of the ISO 14001 Environmental Management System for 10 years since 2004.

Land Opening and Reclamation

In 2014, the realization of land opening in mining areas of Sangatta and Bengalon reached 1,634.40 hectares, compared to the planned 2,537.44 hectares. Cumulatively, the total land opening until 2014 was 21,810.52 hectares.

The total reclamation area of Sangatta and Bengalon post-mining sites in 2014 reached 1,191.29 hectare, exceeding the 2014 reclamation plan of 1,167.64 hectares. A reclamation area of 1191.29 ha required a 24,115.3 kbcm lad as plant growth media. Then, it takes pioneer plants such as Agatis, Jabon, Johar, Bekalajah, lenduhung and Makaranga, and plant commodities

jabon, johar, bekalahap, lenduhung dan makaranga, serta tanaman jenis komoditas, primer dan tanaman yang menghasilkan buah untuk konsumsi fauna sebanyak 334.529 tanaman dan biji-bijian legume sebanyak 4.300 kg. Tanaman yang digunakan berasal dari sumber pembibitan yang ada di KPC dan sebagian berasal dari pembibitan di masyarakat Bengalon. Dengan demikian, kumulatif lahan yang direklamasi sampai tahun 2014 adalah 6.226,19 Ha dan kumulatif *mine footprint* adalah 15.584,33 Ha. Terdapat peningkatan persentase area reklamasi terhadap area aktif yang masih digunakan menjadi 28,55% di tahun 2014 dari 26,65% di tahun 2013. Seperti terlihat di tabel berikut:

Area	2011	2012	2013	2014
Kumulatif Lahan Terganggu (Ha) / Cumulative Disturbed Land (Ha)	17,077.47	18,920.38	20,176.12	21,810.52
Kumulatif Reklamasi (Ha) / Cumulative Reclamation (Ha)	4,407.34	4,875.62	5,377.24	6,226.19
Kumulatif Mine Footprint (Ha) / Cumulative Mine Footprint (Ha)	12,670.13	14,044.76	14,798.88	15,584.33
Persentase / Percentage	25.81%	25.77%	26.65%	28.55%

Pengelolaan Kualitas Air

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana ditetapkan dalam AMDAL, Kepmen LH No.113/2003 dan Perda Kaltim 02/2011. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengelolaan sedimen, pengelolaan air asam tambang, pengelolaan kualitas pembuangan air limbah tambang, dan pemantauan kualitas air secara berkala.

a. Pengelolaan Sedimen

Strategi pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara:

- Pemeliharaan kolam pengendap,
- Peningkatan kapasitas kolam pengendap yang telah ada,
- Pembangunan kolam pengendap baru,
- Perbaikan drainase kolam, dan
- Pengelolaan air asam tambang.

Pengerukan lumpur dilakukan dengan menggunakan delapan (8) buah kapal keruk (KK) dan beroperasi sesuai kebutuhan di lima belas (15) kolam pengendap yang ada di dalam area KPC agar kualitas air yang keluar dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Sesuai dengan RKTTL PT KPC 2014 dan terkait perluasan areal tambang, beberapa kolam pengendap baru telah dibangun selama tahun 2014 untuk menampung aliran dari kegiatan tambang, yaitu: kolam yang merupakan perluasan dari kolam Melawai untuk mengontrol kualitas air dari Pit Bendili; kolam Cempaka telah selesai dibangun di hilir kolam Marunda untuk mengontrol kualitas air dari Pit Melawan; kolam Kutilang untuk mengontrol kualitas air dari Pit Kangguru; perluasan kolam Angsoka untuk menampung aliran dari Pit South Pinang. PT KPC mempunyai komitmen untuk membangun kolam pengendap terlebih dahulu sebelum dibukanya areal penambangan baru.

b. Pengelolaan Air Asam Batuan

Pengelolaan air asam batuan dilakukan dengan cara:

- Klasifikasi batuan NAF dan PAF
- Analisa geokimia NAG (Net Acid Generation) dilakukan

plants, primary plants and fruit plants for animal consumption, and 334,529 plants and legumes of 4,300 kg. Plants were taken from the seedling center at KPC and from the people's nursery in Bengalon. Cumulatively, total rehabilitated land until 2014 reached 6,226.19 hectares and cumulative mine footprint was 15,584.33 hectares. There was an increased in the percentage of the rehabilitated area to active area at 28.55% in 2014, up from 26.65% in 2013. As shown in the following table:

Water Quality Management

Water quality management is conducted to meet water quality standards as stipulated in the Environmental Impact Assessment (AMDAL) document, Decision of Environment Minister No. 113/2003, and Regional Regulation of East Kalimantan 02/2011. Activities of water quality management include management of sediment, mine acid water, mine effluents for washing, and regular monitoring.

a. Sediment Management

The water quality management strategy is carried out by:

- Maintenance of settling ponds,
- Increasing the capacity of existing settling ponds,
- Construction of the new settling ponds,
- Improving pond drainage, and
- Managing acid mine water.

Dredging was carried out using eight (8) dredgers operating as needed in fifteen (15) settling ponds in the area of KPC so that the quality of water can meet the quality standards.

In accordance with RKTTL of PT KPC in 2014 and related to the expansion of mining areas, several new settling ponds were built in 2014 to accommodate the flow of mining operations, namely: an extension pool of Melawai pool to control the water quality from Bendili Pit; Cempaka pool was completed downstream of Marunda pool to control the water quality of Melawan Pit; Kutilang pond to control the water quality of the Kangguru Pit; expansion of Angsoka pool to accommodate the flow from South Pinang Pit. PT KPC is committed to building settling ponds prior to the opening of new mining areas.

b. Mine Acid Water Management

Mine acid water management is carried out by:

- Classification of NAF and PAF
- NAG (Net Acid Generation) geochemical analysis was

pada percontoh (*sample*) batuan yang berasal dari areal eksplorasi (*diamond core* atau *geology drill chips*), lubang peledakan (*blast holes*) dan areal penimbunan akhir (*final dump*) sebelum reklamasi. Analisa dilakukan di Laboratorium Lingkungan KPC untuk mengetahui potensi pembentukan asam batuan, yaitu potensi batuan NAF (Non Acid Forming) dan PAF (Potential Acid Forming). Sebanyak 46.130 sampel batuan telah dianalisa NAG selama bulan Januari hingga Desember 2014.

Hasil analisa NAG selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membuat pemodelan batuan. Selama tahun 2014, pemodelan batuan yang telah diterbitkan adalah untuk pemodelan South Pinang 0314, Melawan North 0214, Melawan South Rev 0314, Pit Jupiter 0514, Bengalon 0514, dan Melawan North 1014. Pemodelan batuan tambang bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melakukan penempatan OB yang terpisah antara NAF dan PAF di daerah penimbunan batuan penutup.

- Pengapuran di kolam pengendap
Pengapuran dilakukan pada beberapa kolam pengendap di areal tambang Sangatta dan Bengalon untuk menjaga kualitas air (pH air). Di areal tambang Sangatta, kegiatan pengapuran dilakukan di kolam Keny J, Kepodang, Rangkok, Seriwang, Pelikan Selatan, Bengkirai dan kolam lain jika diperlukan. Demikian pula pada kolam-kolam pengendap di Bengalon dilakukan pengapuran dengan alat semi otomatis (di inlet kolam Kelawitan, dan outlet kolam New Pond) dan 2 unit alat neutramill (beroperasi di kolam Kelawitan dan Mawar). Pemantauan dilakukan secara ketat oleh Departemen Lingkungan PT KPC untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

a. Pemantauan Kualitas Air

Lokasi pembuangan air limbah dari areal penambangan ke badan air ditentukan melalui kajian lingkungan pembuangan air limbah, dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kutai Timur. Pemantauan kualitas air limbah mengacu pada baku mutu menurut Kep Men LH 113/2003 dan Perda Kaltim 02/2011 untuk parameter pH, TSS, konsentrasi logam besi (Fe) dan mangan (Mn). Selama tahun 2014, pemantauan dilakukan di 18 lokasi, yaitu 14 di areal Sangatta dan 4 lokasi di Bengalon.

Pemantauan pembuangan air limbah ke laut dilaksanakan sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur no. 658.31/K.154/2013 tertanggal 18 Februari 2013, dilakukan di 5 titik dengan parameter yang dipantau adalah suhu, residu klorin, pH, Zn, PO₄, TSS (untuk air pendingin PLTU dan blow down cooling tower), serta pH, TSS, Fe, dan Mn untuk kolam pengendap terminal batu bara.

b. Pemantauan Kualitas Udara dan Getaran

Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan mengacu kepada RPL AMDAL Peningkatan Produksi Batu bara Hingga 70 Juta Ton Per Tahun PT KPC. Baku mutu mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PP 41/1999 tentang baku mutu udara ambien nasional.

performed on samples from exploration area (diamond core or geology drill chips), blast holes and final disposal area (final dump) before reclamation. The analysis was carried out in the KPC Environment Laboratory to determine the potential acid forming, namely NAF (Non Acid Forming) and PAF (Potential Acid Forming). A total of 46,130 samples were analyzed from January to December 2014.

Further NAG analysis results were used as a reference to create a modeling. During 2014, the modelling published was for South Pinang 0314 modelling, Melawan North 0214, Melawan South Rev. 0314, Jupiter Pit 0514, Bengalon 0514, and Melawan North. Modelling served as a guideline for laying-out OB, separated between NAF and PAF.

- Calcification in settling ponds
Calcification is carried out in several settling ponds in Sangatta and Bengalon to maintain water quality (pH of water). In Sangatta, calcification activities were carried out in Keny J pond, Kepodang, Rangkok, Seriwang, Pelikan South ponds, Bengkirai, and other ponds as deemed necessary. Similarly, ponds in Bengalon were also treated with the calcification process with semi-automatic equipment (in the Kelawitan Pond inlet and New Pond outlet) and 2 units of neutramill equipment (in Kelawitan, and Mawar ponds). To ensure optimum results, KPC's Environmental Department implemented strict monitoring during the processes.

Environmental Quality Monitoring

a. Water Quality Monitoring

Location for disposing wastewater from mining area to water courses is determined through environmental assessment of waste water disposal, and established by the Decision of the Regent of East Kutai. Monitoring of liquid wastes is done regularly by referring to quality standards as established by Decision of Environment Minister No. 113/2003, and Regional Government Regulation of East Kalimantan No. 02/2011 for pH, TSS, Fe and Mn. In 2014, the monitoring was conducted in 18 locations, 14 in Sangatta and 4 in Bengalon.

For waste disposal to the sea, the monitoring was done in compliance with the East Kalimantan Governor Decision No. 658.31/K.154/2013 dated 18 February 2013 and was conducted along 5 points. The parameters used in the monitoring process were temperature, chlorine residue, pH, Zn, PO₄, TSS (for PLTU cooling water and blow down cooling water) as well as pH, TSS, and Fe, and Mn for settling ponds in coal terminal.

b. Air Quality and Noise Management

Air quality monitoring was in line with KPC's RPL AMDAL of Coal Production Increase up to 70 Million Tonnes per Annum. The quality standards referred to prevailing government regulation, PP No. 41/1999 regarding National Ambient Air Quality Standards.

Pemantauan debu (TSP atau Total Suspended Particulate) dan kualitas udara ambien (gas karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, oksidan, hidrokarbon dan timah hitam) di Sangatta dilakukan setiap tiga bulan oleh konsultan independen di lokasi pemukiman masyarakat dan lokasi industri dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 41/1999. Pemantauan debu dilakukan di 8 titik di Sangatta dan 8 titik di Bengalon dimana 15 titik diantaranya merupakan lokasi permukiman dan 1 titik lokasi industri/perdagangan.

Pemantauan kebisingan (*noise*) kawasan dilakukan setiap tiga bulan bersamaan dengan lokasi dan waktu pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan dilakukan selama 24 jam dengan alat 'Integrating Sound Level Meter', Adapun baku mutu kebisingan mengacu pada Kep Men LH no. 48/1996.

Pemantauan getaran dilakukan untuk mengetahui pengaruh kegiatan peledakan terhadap pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, meliputi pemantauan getaran tanah (*ground vibration*) dan kebisingan. Pemantauan dilakukan di areal pemukiman masyarakat di Sangatta (Desa Singa Gembara) dan Bengalon (Desa Segading).

Pemantauan emisi udara dari cerobong PLTU dan genset di areal tambang Sangatta dan Bengalon dilakukan oleh konsultan sesuai jadwal. Kegiatan pemantauan emisi mengacu pada Per MENLH no. 21/2008 tentang "Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal".

Pemantauan emisi udara dari cerobong insinerator dilakukan setiap triwulan, sesuai ijin dan baku mutu yang ditetapkan pada Kep. MENLH 276//2010, tentang izin pengoperasian alat pengolahan (Insinerator) limbah B3 PT KPC. Pengukuran dilakukan pada saat pembakaran limbah filter dan limbah medis (padat) dengan volume masing-masing adalah 100 kg dan 40 kg.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui penyimpanan di TPS berizin, pemanfaatan, insinerasi, bioremediasi dan pengiriman ke pihak ketiga berizin.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 mengacu pada ketentuan, meliputi: memastikan bahwa limbah B3 yang disimpan tidak lebih dari 90 hari serta dilengkapi dengan simbol dan label yang sesuai, pencatatan dan pembuatan neraca limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur, dan pencatatan limbah non-B3.

Dari bulan Januari hingga Desember 2014, sebanyak 10.851.936 L oli bekas telah ditimbulkan oleh KPC dan kontraktornya, baik di area Sangatta maupun Bengalon. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.567.405 L (42%) telah dimanfaatkan sebagai campuran bahan peledak (ANFO-Emulsi) dan sisanya sebanyak 6.284.531 L (58%) dikirim ke pihak ketiga berijin. Pemanfaatan oli bekas ini merupakan upaya KPC dalam menunjang konservasi energi.

In Sangatta, monitoring of Total Suspended Particulates (TSP) and quality of ambient air (carbon monoxide, sulphur dioxide, nitrogen oxide, oxidant, hydrocarbon, and black lead) was conducted every three months by an independent consultant at residential areas and industrial locations, in compliance with Government Regulation No. 41/1999. TSP assessment was done in 8 locations in Sangatta and 8 locations in Bengalon, of which 15 were in residential areas and 1 in an industrial / trade location.

Noise monitoring was also carried out every three months in conjunction with ambient air quality assessment. The monitoring was conducted for 24 hours by means of 'Integrating Sound Level Meter', The quality standard noise refers to Kep Men LH no. 48/1996.

Vibration monitoring was done with the purpose to identify impact of blasting activities on the communities living around mining areas, which include ground vibration and noise. Vibration monitoring was conducted in residential areas in Sangatta (Singa Gembara Village) and in Bengalon (Segading Village).

Monitoring was also done on air emission from the stacks of the thermal power plant and generator in Sangatta and Bengalon, conducted by a consultant as scheduled. The emission study used Decision of Environment Minister No. 21/2008 regarding "Quality Standards of Immovable Sources of Emission for Businesses and/or Activities of Thermal Power Station."

Monitoring for air emitted from incinerator stacks were done quarterly, in compliance with license and quality standards set forth in the Decision of Environment Minister No. 276/2010 regarding License to Operate Incinerator for Hazardous and Toxic Wastes issued for KPC. Measurement was carried out during the incineration of filter and solid medical waste, with volumes of 100 kg and 40 kg respectively.

Hazardous Management

B3 management was implemented through waste deposits in licensed temporary waste disposal (TPS) units, utilization, incineration, bio-remediation, and delivery to authorized licensed parties

B3 waste deposit activities followed certain guidelines, including: ensuring that B3 wastes were not deposited for more than 90 days and that waste was identified accordingly with signs and labels, and recording and creating B3 waste balance as required by the Ministry of Environment and the Environment Office of East Kutai.

From January to December 2014, a total of 10,851,936 L of used oil generated by KPC and its contractors, in Sangatta and Bengalon. 4,567,405 L (42%) of this was utilized as a mixture of explosives (ANFO-emulsion) and the remaining 6,284,531 L (58%) was sent to a licensed third-party. Utilization of used oil is an effort to support the KPC in energy conservation.

Pengelolaan limbah terkontaminasi hidrokarbon (filter dan majun bekas beroli) dan limbah medis dari klinik perusahaan, dilakukan dengan insinerasi menggunakan insinerator berizin yang terletak di Sangatta North Dump. Jumlah total limbah terkontaminasi hidrokarbon dan limbah medis yang diinsinerasi adalah sebanyak 88,54 ton dan 3,51 ton, menghasilkan abu residu seberat 13 ton. Abu hasil insinerasi ini kemudian dikirim ke pihak ketiga berizin yaitu PPLI di Bogor.

Pengolahan tanah yang terkontaminasi minyak dilakukan dengan cara bioremediasi. Pada awal tahun 2014, kegiatan pengolahan untuk tanah terkontaminasi dilakukan di siklus 14 dan siklus 15. Berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa tanah olahan sudah memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan sehingga tanah olahan sebanyak 256 m³ bisa dikeluarkan dan ditempatkan di area khusus untuk penampungan tanah hasil olahan bioremediasi. Kegiatan pengolahan dilanjutkan dengan mengolah tanah terkontaminasi sebanyak 256 m³ pada 2 sel yang berbeda, yaitu siklus 16 dan siklus 17. Pada pertengahan tahun 2014, tanah terkontaminasi minyak yang diolah di sel 2 sebanyak 128 m³ digabungkan dengan tanah terkontaminasi minyak yang diolah di sel 1. Selain itu, sebagian tanah terkontaminasi minyak yang masih ditampung di sel penampungan sebanyak 256 m³ dimasukkan ke dalam sel 2 untuk diolah sebagai siklus 18. Setelah proses pengolahan selama sekitar 3 bulan, hasil analisa laboratorium untuk gabungan siklus 16 & siklus 17 serta siklus 18 menunjukkan bahwa tanah olahan sudah memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan. Sebanyak 512 m³ tanah hasil olahan dikeluarkan dan ditempatkan pada area khusus untuk tanah hasil olahan bioremediasi. Kegiatan pengolahan tanah terkontaminasi dilanjutkan dengan memindahkan sebanyak 240 m³ pada sel 1 (siklus 19) dan 224 m³ pada sel 2 (siklus 20). Hingga akhir 2014, kegiatan pengolahan tanah terkontaminasi untuk siklus 19 dan siklus 20 masih dilakukan.

Sebanyak 6.556,60 ton abu batu bara (terdiri dari 4.729,53 ton *fly ash* dan 1.827,07 ton *bottom ash*) telah ditimbulkan selama bulan Januari hingga Desember 2014 dan abu batu bara tersebut disimpan di areal penyimpanan di Tanjung Bara.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan flora dan fauna darat dilakukan melalui program *biodiversity* (keanekaragaman hayati), yaitu dengan cara pemantauan flora dan fauna baik sebelum pembukaan tambang secara sampling maupun pada daerah yang telah di reklamasi.

Pengelolaan biota perairan dilakukan dengan cara penelitian dan survei di sungai-sungai di wilayah Sangatta dan Bengalon setiap dua tahun, dan telah dilakukan pada tahun 2013, untuk mengetahui keragaman jenis ikan yang ada di Sungai Sangatta dan Bengalon dari hulu hingga muara sungai. Pemantauan selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2015.

PT KPC bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melakukan pemindahan satwa liar khususnya Orangutan dari lokasi penambangan atau perumahan karyawan ke lokasi yang lebih aman (hutan atau areal Taman Nasional Kutai).

Waste that is contaminated with hydrocarbon (filters and oil stained rags) as well as medical wastes from the Company's clinics were controlled by means of incineration, using a licensed incinerator in Sangatta North Dump. The total hydrocarbon contaminated and medical waste that was incinerated totalled 88,54 tonnes and 3.51 tonnes, producing a residue of 13 tonnes. The ash from the incineration process was transferred to a third party licensed, namely PPLI, in Bogor.

Processing of oil-contaminated soil was carried out bio-remediation. In early 2014, contaminated soil treatment activities were carried out at cycle 14 and cycle 15. Laboratory tests showed that the processed soil met quality standards and safety for the environment; therefore a 256 m³ of processed soil can be placed in a special area for dumping the soil from the bio-remediation process. The processing activities is then continued with the process of 256 m³ of contaminated soil at two different cells, i.e. the cycle 16 and cycle 17. In mid-2014, the oil contaminated soil processed in cell 2 totalled 128 m³ of contaminated soil and was coupled with the oil contaminated soil from cell 1. In addition, 256 m³ of oil contaminated soil from collecting ponds was introduced into cell 2 to be processed as cycle 18. After 3 months of processing, the results of laboratory analysis for a combined cycle 16, cycle 17 and cycle 18 indicated that processed soil met the standard and safety for the environment. A total of 512 m³ of soil processed soil was placed in a special area for soil from the bio-remediation process. The contaminated soil processing then is continued by placing 240 m³ in cell 1 (cycle 19) and 224 m³ in cell 2 (cycle 20). As of the end of 2014, contaminated soil treatment activities for cycle 19 and cycle 20 were still running.

A total of 6,556.60 tons of coal ash (consisting of 4,729.53 tons of fly ash and 1827.07 tons of bottom ash) were generated during from January to December 2014 and this coal ash was stored in a storage area in Tanjung Bara.

Biodiversity Management

Biodiversity management was applied for vegetation and animals. Using samples, the condition of vegetation and animals before opening of mining area and after reclamation phase was monitored.

For water biota, studies and surveys in the rivers Sangatta and Bengalon are done every two years. In 2013, the study and survey assessed the diversity of fish living in upstream to downstream areas of Sangatta and Bengalon rivers. The next monitoring will be conducted in 2015.

In partnership with Natural Resources and Conservation Office (BKSDA), PT KPC assisted in relocating wildlife species, especially orangutans, from mining areas or employees' residential areas, to safer environments (to forests or to Kutai National Park).

Program Pasca Tambang (Mine Closure)

a. Peternakan Sapi

KPC mengembangkan peternakan sapi terpadu (PESAT) di Sangatta South East (SSE) Dump dan di D2 Murung, dengan tujuan memberikan sarana pelatihan peternakan bagi masyarakat sekitar agar mampu mengembangkan potensi peternakan di desa-desa tempat tinggalnya dan membangun kemandirian secara ekonomi. Luas areal PESAT sekitar 22 ha, terdiri dari: 2 ha kebun rumput gajah, 1 ha embung air, 14 ha kebun gembala, dan sisanya untuk kandang sapi, gedung kantor, mess karyawan dan tamu, areal parkir, serta sarana pengolahan limbah padat dan biogas. Jumlah sapi hingga akhir Desember 2014 sejumlah 69 ekor sapi, terdiri dari 64 sapi potong dan 5 sapi perah yang telah menghasilkan produk susu.

KPC juga telah mempersiapkan untuk kerja sama tahap kedua dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengelola lahan bekas tambang Pit Jupiter. Workshop untuk menyusun *masterplan* program kegiatan telah dilakukan pada Triwulan IV 2014, dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU kerja sama tahap kedua.

b. Studi Pemanfaatan Air Void (Kolam) Pasca Tambang

Telaga Batu Arang yang merupakan void bekas tambang telah dijadikan kolam untuk wisata perairan. Untuk keperluan tersebut, beberapa fasilitas telah dibangun di areal kolam Sangatta North (Telaga Batu Arang) yaitu: areal bermain untuk anak-anak (Play Ground), aula, beberapa gazebo, fasilitas MCK, fasilitas kantor, dermaga perahu, *jogging track*, dan karamba ikan. Di areal Telaga Batu Arang juga telah dilakukan penanaman buah Naga sebanyak 2.000 pohon pada pertengahan tahun 2014, yang ditanam secara tumpang sari dengan kacang tanah saat tanaman masih muda. Untuk areal penanaman buah Naga menggunakan pengairan sistem irigasi tetes, sehingga pemupukannya juga mudah dikontrol. Sistem irigasi ini memanfaatkan air kolam Telaga Batu Arang dengan cara dipompa menggunakan tenaga listrik dari kincir angin dan tenaga surya.

Program Efisiensi Energi

a. Program Efisiensi Bahan Bakar

Program efisiensi bahan bakar (khususnya solar) sudah mulai dilakukan sejak bulan Maret 2008, yang dilandasi oleh adanya data pemakaian bahan bakar pada kondisi yang tidak produktif. KPC kemudian membentuk sebuah tim yang bertugas menemukan faktor-faktor penyebab dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Adapun langkah perbaikan yang telah dilakukan adalah: membuat SOP baru tentang *monitoring fuel breather* (penutup saluran pengisian bahan bakar, meningkatkan kontrol dan sosialisasi penghematan bahan bakar dengan cara mematikan mesin yang tidak produktif, mengontrol status *engine run* pada *truck* melalui *dispatch* dengan melakukan *upgrade program* pada *dispatch*, membuat SOP baru berkaitan *service big digger* untuk mengontrol alat berat saat masuk dan keluar *service*, melaksanakan prosedur penyaringan kembali *fuel* sisa di tangki agar dapat dipakai kembali oleh *digger* tersebut setelah selesai *service*, pemasangan *fill safe system* di *excavator* untuk menambah kontrol agar tidak terjadi tumpahan *fuel* saat proses pengisian *fuel*.

Mine Closure Program

a. Cow Husbandry

KPC developed an Integrated Cow Husbandry Facility (PESAT) in Sangatta South East (SSE) Dump and in D2 Murung, aiming at being a husbandry model for surrounding communities, empowering them to develop farming potentials in their villages and to grow economic self-reliance. PESAT is situated on 22-hectares of land, which consists of: 2 hectares of elephant grass, 1 hectare of water basin, and 14 hectares of pasture. The remaining areas are used for cow enclosures, office buildings, employee and guest housing, paring areas, and waste treatment facility for solid waste and biogas. As of December 2014, it managed 69 cows, including 64 beef cattle and 5 dairy cattle.

KPC also prepared a collaboration with Bogor Agricultural Institute (IPB) to manage Pit Jupiter, a post mining land. A workshop to develop the master plan of activity program have been conducted in the fourth quarter of 2014, and will be followed by the signing of MoU on the second phase of cooperation.

b. Utilizing Void (Pond) Water Post-Mining

Telaga Batu Arang, a former mine, was used as recreational pool. For this purpose, several facilities were built at North Sangatta pool (Telaga Batu Arang) namely: children's play ground, function hall, gazebos, public toilets, office, jetty, jogging track, and fish cages. 2,000 dragon fruit trees were planted at Telaga Batu Arang in mid-2014, in an intercropping manner with groundnuts. The area for dragon fruit planting uses drip irrigation systems, so that fertilization is also easily controlled. The irrigation system uses water from Telaga Batu Arang pool pumped using electric power from windmills and solar power.

Energy Efficiency Program

a. Fuel Efficiency Program

Fuel efficiency programs (especially diesel) have been carried out since March 2008, prompted by data of fuel consumption showing an unproductive condition. KPC formed a team in charge of finding causing factors and implementing corrective measures. The corrective measures were: preparing new SOP on monitoring fuel breathers, improving control and conducting socialization on fuel saving by shutting down machines that are not productive, controlling the status of engines truck by upgrading dispatch program, preparing new SOP related to big digger repair to control heavy equipment that enter and exit service facilities, carrying out re-screening procedures for residual fuel in tanks to be reused by diggers upon completion of service (kidneylooping fuel), placing fill safe system in the excavators to prevent spillage of fuel during refuelling process.

Indikator keberhasilan penghematan bahan bakar dihitung berdasarkan jumlah solar (dalam satuan liter) yang digunakan untuk memindahkan tiap volume (dalam satuan Bcm) *over burden* (batuan penutup) selama 1 menit *cycle time* yang ditempuh oleh *truck*, atau disebut dengan Fuel Ratio = liter/bcm/menit, apabila FR actual lebih rendah dari FR *target project* maka penghematan *fuel* telah berdampak positif terhadap operasional. Perhitungan angka penghematan bahan bakar solar berdasarkan jumlah solar yang digunakan untuk menghasilkan produksi (jumlah *over burden* yang dihasilkan). Jumlah bahan bakar solar yang bisa dihemat selama tahun 2014 sebanyak 35.287 kL.

b. Program Efisiensi Oli

Latar belakang dilakukannya program ini adalah karena tingginya konsumsi oli sebagai pelumas pada alat berat, mahalnya harga pelumas baru, tingginya jumlah timbulan dan risiko penanganan pelumas bekas yang masuk dalam kategori Limbah B3; dan tingginya *down time* unit/alat saat *service* berkala.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka Divisi MSD (Mining Services Division) PT KPC sejak tahun 2008 telah melakukan program efisiensi/penghematan oli dengan cara mengurangi penggunaan oli pada 56 unit truk CAT 789, dengan detail program sebagai berikut:

- Memperpanjang usia pelumas *engine* (250 menjadi 500 jam), dengan cara: menaikkan *grade* oli dari API Service CH-4 menjadi CI-4 Plus, dan menambah kapasitas tanki dari 212 liter menjadi 280 liter.
- Memperpanjang usia pelumas transmisi, hidraulik, *final drive*, dan *differential* (2000 jam menjadi 4000 jam), dengan cara: menaikkan *grade* oli dari kelas Caterpillar TO-2 menjadi TO-4, dan melakukan penyaringan oli (Kidney looping) setiap 500 jam.
- Monitor kondisi oli setiap 500 jam dengan menyediakan *on site lab oil analysis* untuk mendapatkan analisa pada hari yang sama.

Dari implementasi hal tersebut pada 56 unit truk CAT 789 diperoleh penghematan oli *engine* sebesar 34% dan penghematan oli untuk transmisi, hidraulik, *final drive*, dan oli *differential* sebesar 50%. Program tsb kemudian diterapkan pada unit yang lain seperti truk CAT 785 dan CAT 777. Program efisiensi oli ini masih terus dilanjutkan pada tahun 2014.

c. Program Penghematan Listrik

Program penghematan listrik dalam rangka konservasi energi telah dimulai pada Triwulan II-2010. Program penghematan listrik ini bertujuan untuk mengurangi pemakaian listrik yang tidak sesuai peruntukannya dan berlebihan serta inisiatif penghematan listrik lainnya.

Program yang telah dilakukan sejak tahun 2010 adalah: pemasangan timer AC pada beberapa gedung kantor, menerbitkan SOP untuk pelayanan *camp* untuk mematikan alat elektronik yang tidak dipakai, pemasangan *photocell switch* pada sistem penerangan di *workshop* dan pabrik (*fixed plant*), secara bertahap mengganti lampu penerangan

The success of the fuel saving program is measured by the amount of diesel fuel (in liters) used to move each volume of *overburden* (in units Bcm), for 1 minute cycle time by truck, or called Fuel Ratio = liter/bcm/min. When the actual FR was lower than the targeted FR, then the fuel saving has brought a positive impact on operations. The amount of diesel fuel saved in 2014 was 35,287 kL.

b. Oil Efficiency Program

The reason behind this program is the high consumption of lubricants for heavy machinery, the expensive price of new lubricants, the high amount and high risk of used oil, which is a toxic and hazardous substance, as well as the high down time unit during periodic maintenance.

To overcome these problems, the Mining Services Division of PT KPC since 2008 has conducted an oil efficiency/saving program by reducing use of oil in 56 CAT-789 trucks, with details of the program as follows:

- Extending the life of engine lubricants (from 250 to 500 hours), by raising the oil grade from API Service CH-4 to CI-4 Plus, and enlarging the tank capacity from 212 litres to 280 litres.
- Preserving the transmission, hydraulic, final drive and differential oil (from 2000 hours to 4000 hours), by raising the oil grade from Caterpillar TO-2 to TO-4, and conducting kidney-looping every 500 hours.
- Monitoring the oil condition every 500 hours by providing on-site lab oil analysis to get the analysis result on the same day.

Implementing the program on 56 CAT 789 truck resulted in 34% engine oil saving, and 50% transmission, hydraulics, final drive and differential oils saving. The same program will be applied on other units, such as CAT 785 and CAT 777. This oil efficiency program was continued in 2014.

c. Electricity Saving Program

Electricity saving program in order to conserve the energy began in the second quarter of 2010. This electricity saving program aimed at reducing the excessive and improper power consumption and other electricity-saving initiatives.

The programs that have been carried out since 2010 among others are: installing air-conditioning timers in several office buildings, publishing SOP for camp services to turn off the electronic equipment when not being used, installing photocell switches at workshops and factories (fixed plant), gradually replacing lighting with energy-saving lamps, gradually replacing Window AC with Split AC, reducing the

dengan lampu hemat energi, secara bertahap mengganti AC Window dengan AC Split, mengurangi jumlah lampu di areal parkir yang memiliki penerangan berlebihan, dan kampanye hemat energi listrik. Dari berbagai upaya penghematan listrik di *workshop* dan kantor tersebut, jumlah energi listrik yang dapat dihemat selama tahun 2014 mencapai 1.636.078 kWh.

number of lights in the parking areas that have excessive lighting and conducting electrical energy-saving campaign. Those various efforts to save electricity in the workshop and office saved 1,636,078 kWh in 2014.

2. Pengelolaan Lingkungan di Arutmin

Arutmin menyadari bahwa akibat yang langsung terlihat dari kegiatan operasional penambangan terbuka yang dilakukannya adalah berubahnya bentang alam dan terganggunya habitat di sekitar lokasi penambangan yang dapat diikuti dengan memburuknya kualitas lingkungan lainnya. Oleh karena itu sebagai kontraktor pemerintah, Arutmin melalui kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat (K3LK) berkomitmen akan menaati semua peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam setiap kegiatan penambangannya, Arutmin senantiasa terus berusaha untuk mengidentifikasi dan mengelola setiap aspek lingkungan yang dianggap terkena gangguan dari kegiatan operasionalnya sebagai wujud komitmen dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi pengelolaan lingkungan yang dilakukan meliputi pengelolaan semua aspek lingkungan berdampak pada aktivitas di wilayah tambang, bengkel peralatan dan daerah terminal batu bara. Kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut mencakup aspek kualitas air, kualitas udara, pengelolaan limbah, sampah dan hidrokarbon, pelestarian keanekaragaman hayati hingga rehabilitasi lahan bekas tambang.

Guna mengontrol dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, Arutmin secara konsisten telah menerapkan manajemen pengelolaan lingkungan pada semua lokasi operasionalnya, baik lokasi tambang (Asam - Asam, Kintap, Satui, Batulicin dan Senakin) maupun pada Terminal Khusus Batu bara Pulau Laut Utara (North Pulau Laut Coal Terminal/NPLCT). Penerapan pengelolaan lingkungan yang dilakukan Arutmin mengacu pada dokumen lingkungan (AMDAL) yang dimiliki dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) perusahaan.

Sistem manajemen

Sistem Manajemen Lingkungan yang dijalankan oleh Arutmin diaudit oleh pihak independen dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001 yang merupakan standar internasional. Guna memastikan kesesuaian implementasi dan menjamin kelayakan sertifikasi, pada tahun 2014 dilakukan kegiatan internal audit sistem manajemen lingkungan seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan rutin internal audit ini untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan (SML) di Arutmin sesuai dan memenuhi persyaratan ISO 14001:2004. Di tahun 2015 Arutmin berencana untuk memperbarui sertifikasi ISO 14001.

Salah satu bentuk komitmen Arutmin untuk senantiasa menjaga agar setiap potensi dampak terhadap lingkungan akibat kegiatan operasionalnya senantiasa telah dikaji dan diperhitungkan serta untuk menjamin pemenuhan peraturan perundangan berlaku,

2. Arutmin Environmental Management

Arutmin realizes that its open pit mining operation has a visible direct impact, namely the change of landscape and habitat disturbance in the surrounding area, which can be followed by environmental degradation. Therefore, as a government contractor, through the implementation of Occupational Health, Safety, Environment and Society (K3LK) policy, Arutmin is committed to complying with all applicable laws and regulations, including regulation in environmental protection and management.

Therefore, in all of its mining activities, Arutmin always strives to identify and manage every environmental aspect causing disruption in its operations. Environmental management strategy includes the management of all environment aspects that were affected in the mining, workshop and coal terminal areas. The environmental management covers the aspects of water quality, air quality, waste, garbage and hydrocarbon management, biodiversity conservation and rehabilitation of mined lands.

In order to control and minimize the impact on the environment, Arutmin consistently implements environmental management at all locations, both mine sites (Asam - Asam, Kintap, Satui, Batulicin and Senakin) and North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT). The implementation of environmental management at Arutmin refers to the environmental impact assessment (AMDAL) document and the Company's Environmental Management System (SML).

Management System

Arutmin's Environmental Management System is audited by an independent party and is certified with ISO 14001, an international standard. In order to ensure the conformity of implementation and to ensure the feasibility of certification, in 2014 as in previous years, Arutmin carried out internal audits on environmental management system. These routine internal audits ensure that the Environmental Management System (EMS) at Arutmin has met the requirements of ISO 14001:2004. In 2015 Arutmin plans to update its ISO 14001 certification.

One of Arutmin's forms of commitment is to always study the potential impacts on environment resulting from its operations and take these into account to ensure compliance with applicable laws and regulations. Since 2012 Arutmin has started

sejak tahun 2012 Arutmin telah memulai proses pembaharuan dokumen studi AMDAL untuk beberapa lokasi tambang dan terminal batu bara Arutmin. Proses pembaharuan ini dilakukan untuk mengantisipasi rencana peningkatan produksi dan pembangunan beberapa fasilitas baru.

Selama tahun 2014 proses pembaharuan dokumen AMDAL untuk NPLCT dapat diselesaikan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan serta Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Dengan kajian AMDAL baru yang telah disetujui tersebut, kapasitas pengiriman batu bara NPLCT dapat ditingkatkan menjadi 26 juta ton per tahun. Bersamaan dengan itu dilakukan juga proses pembaharuan kajian dokumen AMDAL untuk beberapa lokasi tambang yang dijadwalkan penyelesaiannya di tahun 2015.

Pengelolaan Kualitas Air

Menyadari pentingnya air bagi keberlangsungan hidup ekosistem, pengelolaan kualitas air menjadi prioritas utama di semua lokasi operasional Arutmin yang dilakukan melalui mekanisme pencegahan pencemaran maupun pengendalian. Mekanisme pencegahan misalnya dilakukan dengan cara membatasi pembukaan lahan hanya pada areal yang memang diperlukan sehingga mengurangi luas lahan terbuka yang terpapar oleh air hujan dan berpotensi menimbulkan erosi dan meningkatkan kekeruhan air permukaan.

Secara umum mekanisme pengendalian terkait areal bukaan tambang dan lahan terganggu ditujukan bagi air limpasan permukaan (*runoff*) dan air dari pompaan tambang. Air larian permukaan dan hasil pompaan tambang tersebut dialirkan melalui saluran drainase untuk selanjutnya ditampung dan dikelola baik pada kolam-kolam pengendapan (*sediment pond*) maupun kolam perlakuan (*settling pond*). Pada areal kerja lain seperti bengkel, tempat penyimpanan material hidrokarbon dan limbah B3, juga dilengkapi dengan sarana penangkap ceceran minyak (*oil trap*) guna mencegah ceceran minyak terlepas ke lingkungan.

Kegunaan dari kolam pengendapan adalah untuk mengendapkan material padatan yang terbawa aliran air sehingga mengurangi risiko pendangkalan sungai/badan air dan mencegah pencemaran air. Pembuatan kolam-kolam pengendapan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan akan ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis dimana dapat secara maksimal menangkap aliran air yang kotor, baik berasal dari pemompaan pit, daerah timbunan tanah penutup dan topsoil maupun dari daerah terbuka lainnya yang terganggu aktivitas penambangan.

Selain pengelolaan terhadap parameter Total Padatan Tersuspensi (TSS), pada kolam pengendapan juga dilakukan pengukuran rutin dan pengelolaan terhadap parameter-parameter kualitas air lainnya seperti pH, Besi (Fe), Mangan (Mn) dan Kadmium (Cd), sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sehingga kualitas air yang dilepas ke badan air dipastikan telah memenuhi baku mutu.

Semua kolam pengendapan yang dioperasikan oleh Arutmin telah memiliki izin pembuangan limbah cair (titik penataan) dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terkait.

updating its AMDAL documents for some mining locations and coal terminal. This renewal process is carried out in anticipation of plans to increase production and construction of several new facilities.

In 2014, NPLCT renewed its AMDAL document and has gained Environmental Feasibility Letter and Environmental Permit from the Ministry of Environment. With the new AMDAL has been approved, NPLCT coal delivery capacity can be increased to 26 million tons per year, along with the renewal process of AMDAL documents for a number of mine sites to be completed in 2015.

Water Quality Management

Realizing the importance of water for the survival of ecosystems, water quality management is a key priority in all operational sites of Arutmin, and is conducted through pollution prevention and control mechanisms. Prevention mechanisms, for example, are carried out by limiting land clearing only in areas that are truly required, reducing land exposed to rainfall that may lead to erosion and may worsen the turbidity of surface water.

In general, control mechanisms related to opening of mining areas and disturbed land are intended for surface run-off water and water from pit pumping activities, which then flows through drainage channel to be contained and processed in the sediment pond as well as settling ponds. In other work areas such as workshops, hydrocarbon and hazardous material storage areas are also equipped with oil traps to prevent spills of oil released into the environment.

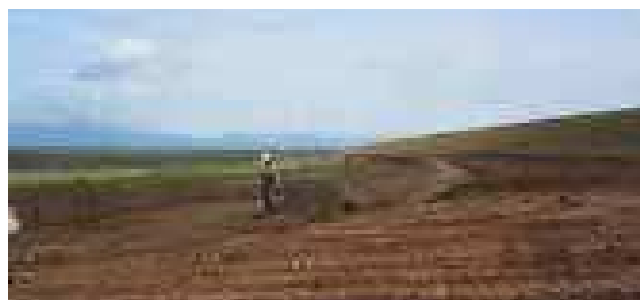
The benefit of the settling ponds is to deposit the solids material carried by runoff water, reducing the risk of silting of river/water body and prevent water pollution. The construction of settling ponds is tailored to the needs and will be placed in strategic locations which can optimally capture the run-off water from pit pumping activities, overburden, topsoil, and other open areas which were disrupted by mining activities.

In addition to management of parameters related to Total Suspended Solids (TSS), regular measurement and management activities are also done in settling ponds, using parameters of water quality such as pH, iron (Fe), Manganese (Mn), and Cadmium (Cd), in compliance with quality standards required by prevailing laws and regulations so that the quality of water discharged into the water bodies has met the quality standards.

All settling ponds operated by Arutmin have obtained licenses for liquid waste disposal (point of compliance) from the related Regional Environmental Agency (BLHD).



Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang



Post mining reclamation.

Pemastian terhadap pemenuhan baku mutu kualitas air ini juga dilakukan melalui pengukuran oleh pihak eksternal terakreditasi setiap bulan. Tidak kurang dari 2.052 sampel air dikirimkan

sepanjang tahun 2014 ke laboratorium terakreditasi untuk dianalisa kualitasnya. Evaluasi terhadap pengukuran kualitas air harian maupun bulanan juga dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu bagian dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Hasil pengukuran kualitas air di seluruh lokasi pemantauan selama tahun 2014 menunjukkan hasil yang memuaskan. Secara umum air yang keluar dari lokasi operasional Arutmin telah memenuhi bakumutu yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113/2003 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 36/2008.

Tambahan luas lahan baru yang dibuka selama tahun 2014 untuk digunakan sebagai kolam pengendap/perlakuan seluas kurang lebih 8,6 ha. Kolam-kolam pengendap/perlakuan ini difungsikan untuk melengkapi atau menggantikan kolam-kolam yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan proses kemajuan tambang.

Pengelolaan Kualitas Udara dan Kebisingan

Pengelolaan kualitas udara yang dilakukan Arutmin secara umum meliputi pengelolaan kualitas udara ambien/debu dan pengendalian emisi gas buang sisa hasil pembakaran dari sumber tidak bergerak seperti genset dan sumber bergerak seperti unit-unit operasional.

Pengendalian debu dilakukan secara berkala dengan melakukan penyiraman pada lokasi-lokasi yang mempunyai potensi tinggi menghasilkan debu, baik debu yang dihasilkan dari proses penambangan maupun proses pengangkutan/transfer batu bara. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan truk tangki air sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga diberlakukan pembatasan kecepatan terhadap unit-unit yang melewati jalan tambang dan jalan angkut batu bara dengan tujuan untuk menekan dispersi debu ke udara. Pengangkutan batu bara dari tambang Asam Asam dan Kintap ke terminal muat masing-masing dilakukan dengan menggunakan fasilitas sabuk penyampai (*overland conveyor/OLC*) sehingga dispersi debu ke udara dapat ditekan sekecil mungkin dibandingkan jika menggunakan truk angkut.

Pada terminal-terminal batu bara dan infrastruktur peremukan batu bara (*coal processing plant*) juga telah dilengkapi dengan

The fulfilment of water quality standards was assured through measurements conducted by an accredited external party on a

monthly basis. No less than 2,052 water samples were delivered throughout 2014 to an accredited laboratory for quality analysis. Evaluation of water quality measurements on daily or monthly basis is also carried out by the government, in this case the Ministry of Environment and the Environmental Office of South Kalimantan as part of the Company Performance Rating Program (PROPER).

In 2014, the results from water quality measurements in all monitoring locations showed satisfactory results. In general, water flowing from Arutmin sites have met the quality standard as required by the Decision of the Minister of Environment No. 113/2003 and Governor of South Kalimantan Regulation No. 36/2008.

Additional land of approximately 8.6 hectares was opened in 2014 to be used as settling/treatment ponds. These settling/treatment ponds function to supplement or replace the existing ponds built in the previous years, to keep up with the progress of the mining.

Air Quality and Noise Management

Air quality management conducted by Arutmin in general covers the management of ambient air quality/dust particles and control of gas emissions as incineration residue from immovable sources (generator) and movable sources (operational vehicles).

Dust control was conducted by spraying locations with high potential to generate dust particles, from mining operations and coal transportation. Spraying was conducted using water tank trucks whenever necessary. Arutmin also applies speed limits for vehicles that pass through mine access roads and coal roads aiming at minimizing dust dispersion to air. Coal transportation from Asam Asam and Kintap Mines to coal terminal use overland conveyor (OLC) to minimize dust dispersion to air, rather than using trucks.

In order to minimize dust particles from coal, Arutmin installed a dust suppression system (DSS) in hauling terminals and coal

fasilitas *dust suppression system* (DSS) yang berfungsi meminimalkan sebaran debu batu bara saat pembongkaran batu bara dari tongkang, pengisian batu bara ke kapal besar dan proses peremukannya. Upaya lain yang dilakukan adalah pemasangan penutup (*cover*) pada ban berjalan (*conveyor belt*), penggunaan corong (*chute*) saat pengisian batu bara ke kapal pengangkut dan pengaturan jarak jatuh batu bara.

Untuk mengendalikan kebisingan dan emisi gas buang dilakukan pengukuran dan pemeliharaan genset dan unit-unit kendaraan operasional secara teratur. Selain itu juga diupayakan untuk menggunakan genset dengan tingkat kebisingan yang rendah serta menempatkan genset dalam ruangan yang dilengkapi dengan peredam kebisingan.

Pengelolaan Hidrokarbon dan Limbah B3

Pengelolaan bahan hidrokarbon dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu aspek lingkungan yang juga menjadi perhatian dan terus dilakukan pengelolannya oleh Arutmin untuk menjaga kualitas lingkungan. B3 yang digunakan dan dihasilkan limbahnya antara lain adalah solar bekas, oli bekas, pelumas bekas, filter dan majun terkontaminasi, serta baterai bekas dari kegiatan operasional, perbaikan dan perawatan unit operasional di bengkel-bengkel kerja. Limbah B3 yang dihasilkan ditampung dan disimpan sementara pada gudang tempat penyimpanan sementara yang telah memiliki izin dari pemerintah sebelum diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengangkut mengelola lebih lanjut limbah B3 tersebut. Pengelolaan limbah B3 dilaporkan secara rutin setiap triwulan kepada instansi yang berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Daerah).

Sarana-sarana pendukung dan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 adalah dengan membuat dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) di lingkungan kerja yang berkaitan dengan pengelolaan bengkel, membuat sarana *oil trap*, *sediment pond*, saluran penirisan di sekeliling bengkel, gudang penyimpanan sementara serta menyediakan bahan penyerap (*oil absorbent*) jika terdapat tumpahan.

Sepanjang tahun 2014, limbah B3 yang dihasilkan dari seluruh lokasi operasional Arutmin meliputi kurang lebih 373,4 ton oli bekas, 5,6 ton aki bekas serta filter dan majun terkontaminasi sebanyak kurang lebih 115 ton.

Semua Limbah B3 yang dihasilkan 100 persen dikelola dengan cara disimpan terlebih dulu di tempat penyimpanan sementara (TPS B3) dalam batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebelum diserahkan kepada pihak pengangkut dan pengelola yang telah memiliki izin dari Kementerian/Badan Lingkungan Hidup. Semua TPS B3 yang dikelola oleh Arutmin telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat dimana masing-masing tambang dan terminal khusus beroperasi.

Rehabilitasi Lahan

Hingga akhir 2014 total luas lahan yang dibuka untuk kegiatan penambangan dan fasilitas pendukungnya mencapai kurang lebih 13.072 hektar. Dari total luas lahan terganggu tersebut, hingga

crushing infrastructure (coal processing plant). In addition, a conveyor belt facility was outfitted with a cover and chute was used during the process of coal loading to barges and adjusting the fall distance of coal.

To control noise and gas emissions, generators and operational vehicles are regularly monitored and maintained. Generators are operated at a low noise level and installed in sound proof enclosures.

Hydrocarbon and Hazardous and Toxic Wastes Management

Arutmin focuses its attention and continues the management of hydrocarbon and hazardous and toxic waste (B3) to maintain the quality of the environment. The B3 waste generated includes used diesel, used oil, used lubricant, used filters and contaminated rags, as well as the used batteries from operations, repair and maintenance of operational units in workshops. B3 wastes are contained and deposited in temporary storage before being transferred to third party licensed to transport and manage the waste. The management of B3 wastes is reported every quarter to relevant authorities (Ministry of Environment and Regional Environment Office).

In managing B3 waste, the Company has formulated and established Standard Operating Procedures (SOPs) applied in work areas, related to workshop management, oil trap installations, sediment ponds, and drainage systems around workshops, temporary storage areas, and availability of oil absorbent should a cases of spillage occur.

Throughout 2014, the B3 waste generated from all operational sites of Arutmin was approximately 373.4 tonnes of used oil, approximately 115 tonnes 5.6 tonnes of used batteries and filters and contaminated rags.

All B3 waste generated was managed by containing it first in temporary storage (TPS B3) within the time limit in accordance with the applicable legislation before transferring to a third party licensed to transport and manage the wastes. All TPS B3 managed by Arutmin had permission from the local government in which each mine and special terminals operate.

Land Rehabilitation

Until end of 2014, total lands opened for mining activities and supporting facilities reached around 13,072 hectares. By the end of the same year, 5,383 hectares of disturbed lands have been

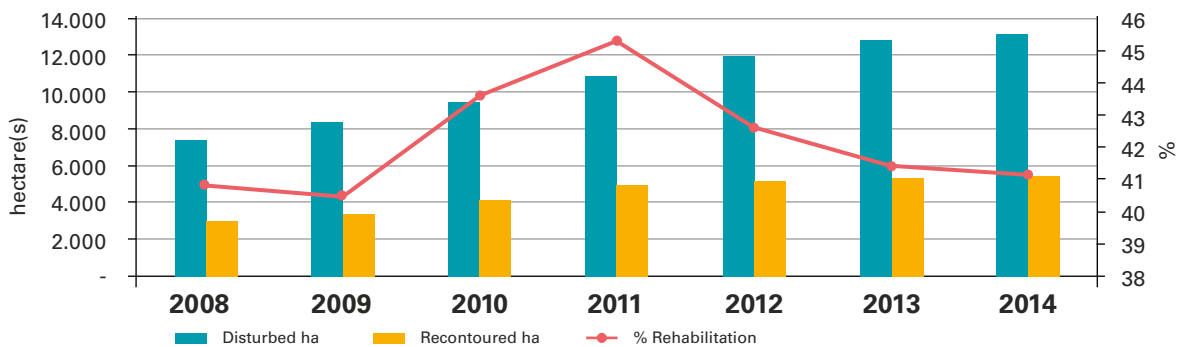
akhir 2014 seluas kurang lebih 5.383 hektar lahan telah ditata kembali dan kurang lebih 4.630 hektar telah direvegetasi. Rasio lahan yang telah ditata terhadap luas bukaan lahan kumulatif mencapai 41,2% sedangkan rasio lahan yang telah direvegetasi terhadap total luas bukaan adalah 35,4%.

Selama tahun 2014, kegiatan rehabilitasi lahan di seluruh lokasi tambang meliputi kegiatan penataan lahan seluas kurang lebih 142 ha atau 94,5% dari rencana dan revegetasi seluas kurang lebih 79,4 ha atau 74,1% dari rencana. Kinerja rehabilitasi lahan pada tahun 2014 tersebut lebih rendah dari rencana dikarenakan masih belum beroperasinya kegiatan penambangan, termasuk kegiatan rehabilitasi pada areal-areal yang ditinggalkan oleh sub-kontraktor PT Thiess Contractor Indonesia di Tambang Satu dan Senakin.

managed and 4,630 hectares have been re-vegetated. The ratio of managed lands compared to cumulative land clearance was 41.2% and ratio of re-vegetated lands compared to total land clearance was 35.4%.

In 2014, land rehabilitation activities in mining areas covered a total of 142 hectares or 94.5% of plan. Re-vegetation was conducted on a total of 301.3 hectares, or 86.9% of plan. The performance of land rehabilitation in 2014 was lower than the plan was due to termination of mining operations, including rehabilitation activities on areas left by the sub-contractor PT Thiess Contractor Indonesia in Satui and Senakin sites.

KINERJA REKLAMASI PERFORMANCE RECLAMATION



Program Lainnya di Bidang Lingkungan

a. Penangkaran Anggrek Meratus



Penangkaran tanaman anggrek Meratus di Tambang Asam Asam
Meratus Orchids Cultivation in Asam Asam Mine

Dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati pegunungan Meratus khususnya tanaman anggrek, pada tahun 2014 dimulai upaya serius penangkaran Anggrek Meratus oleh Tambang Asam-Asam. Sumber/bibit anggrek diperoleh dari wilayah operasi penambangan pra pembukaan lahan serta berasal dari beberapa masyarakat sekitar tambang yang menghibahkan kepemilikannya untuk dilakukan

Other Environmental Program

a. Meratus Orchids Cultivation



To conserve the biodiversity of Meratus Mountains, especially orchids, in 2014 serious efforts were made to breed and conserve Meratus Orchids by Asam-Asam Mine. Orchid seedlings were obtained from pre land-clearance mining areas and from some of the communities around mining areas who transferred their ownership for orchid cultivation in GSO Orchid House at Asam Asam

penangkaran dan budidaya Anggrek Meratus di GSO Orchid House di nursery Asam Asam. Dalam kegiatan ini Arutmin bekerjasama dengan INOS (Indonesian Native Orchids Society) Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga sosial khusus dalam melakukan pengayaan jenis dan penangkaran anggrek spesies alam. Beberapa jenis anggrek yang ada ditangkarkan antara lain *Dendrobium Spurium*, *Gastrochillus sp*, *Luisia sp* dan lain-lain.

b. Pelestarian Terumbu Karang

Sebagai terminal utama batu bara Arutmin, North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) praktis tidak memiliki kegiatan rehabilitasi lahan seperti di lokasi tambang karena tidak ada kegiatan pembukaan lahan yang terus menerus. Karena lokasinya yang berada di pinggir lautlah yang menjadi dasar NPLCT yang terletak di Tanjung Pemancingan, Kotabaru Kalsel ini ingin melakukan program lingkungan berbasis kelautan. Dimulai pada tahun 2009, berkerja sama dengan Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), NPLCT telah melakukan transplantasi terumbu karang buatan di perairan laut sekitar terminal. Terumbu karang buatan tersebut dipasang dan ditempatkan pada bagian infrastruktur pemecah gelombang yang rata di kedalaman 4 meter. Hasil pemantauan terakhir menunjukkan karang buatan yang ditanam telah berkembang dengan baik dan menjadi substrat bagi biota laut seperti ikan karang, spons dan karang batu, bulu babi dan crinoids.

Pada tahun 2014 NPLCT kembali melakukan transplantasi terumbu karang dengan sistem bola dunia. Terumbu karang diikatkan pada kerangka berbentuk Bola dengan diameter kurang lebih satu meter. Kegiatan ini dilakukan dengan Fakultas Perikanan UNLAM dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2014 yang diadakan di Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Pelestarian Rusa Sambar

Penangkaran rusa Sambar (*Cervus unicolor*) di Senakin dimulai sejak tahun 2011. Pada bulan Maret 2013, penangkaran Rusa Sambar di tambang Senakin telah menghasilkan keturunan seekor rusa betina dan pada bulan November 2013 seekor rusa jantan. Hingga akhir 2014 jumlah total rusa sambar yang ditangkarkan di Senakin sebanyak 4 ekor rusa jantan dan 3 ekor rusa betina.

Selama tahun 2014 penangkaran rusa Sambar di NPLCT yang dimulai pada tahun 2011 berhasil mendapatkan kembali seekor rusa betina yang lahir dari sepasang rusa sambar yang ditangkarkan, namun sayang anak rusa tersebut setelah beberapa hari tidak dapat bertahan hidup. Sampai dengan tahun 2014, rusa yang ditangkarkan di NPLCT sebanyak 3 ekor

Penangkaran rusa Sambar yang dilakukan oleh Arutmin bertujuan untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Program pelestarian ini dilakukan berkerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan.

Nursery. In this cultivation activities, Arutmin works closely with INOS (Indonesian Native Orchids Society) in South Kalimantan, a social institution dedicated to native orchid specie, developing, and cultivating various types of orchids. A number of species have been cultivated, including *Dendrobium Spurium*, *Gastrochillus Sp.*, and *Luisia Sp.*

b. Coral Reef Conservation

As Arutmin's main coal terminal, North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) practically has no land rehabilitation activities similar to mining sites since there is no continuing land clearing activities. Located oceanside, North Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) is situated in Tanjung Pemancingan of Kotabaru, South Kalimantan, and conducts ocean conservation efforts. Engaging in partnership with the Fishery Faculty of Lambung Mangkurat University (UNLAM) since 2009, NPLCT has transplanted an artificial coral reef in the sea around the terminal, placed on the flat section of the infrastructure built to break waves at a depth of 4 meters. Recent monitoring activities revealed that the artificial reef thrives and has become substrata for marine biota such as coral fish, sponges, rock corals, sea urchins, and crinoids.

In 2014, NPLCT again transplanted coral reefs using the reefball system. The coral reef was placed on spherical shape frame with a diameter of approximately one meter. This activity is conducted together with the Faculty of Fisheries of UNLAM in commemoration of the Archipelago Day 2014 held in Kotabaru, Kalimantan Selatan.

c. Sambar Deer Conservation

Sambar Deer (*Cervus Unicolor*) conservation efforts in Senakin started in 2011. In March 2013, the conservation program succeeded in breeding a female deer and a male deer in November 2013. Until end of 2014, the total deer managed in Senakin were 4 (four) male deer and 3 (three) female deer.

During the 2014, Sambar Deer conservation in NPLCT managed to have another doe, born from a pair of captive Sambar Deer, unfortunately the fawn died only few days afterwards. Until 2014, the total deer managed in NPLCT was 3 (three) deers.

Sambar deer conservation was conducted by Arutmin as contribution towards biodiversity preservation. The conservation program is conducted in collaboration with South Kalimantan Natural Resources Conservation Office.

d. Pembibitan dan Penanaman Mangrove

Selain melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang, Arutmin juga memiliki program rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman tanaman mangrove. Dipilihnya program ini didasari oleh keprihatinan telah banyaknya ekosistem mangrove yang rusak di kawasan pesisir padahal ekosistem mangrove mempunyai peran penting dalam menjaga garis pantai dari erosi dan sebagai habitat bagi biota pesisir. Kedepannya kawasan ekosistem mangrove yang sudah tertata dapat juga dikembangkan menjadi kawasan wisata mangrove.

Selama tahun 2014 telah dilakukan penanaman bibit mangrove sebanyak 100 pohon di lokasi Terminal Batu bara di Pulau Laut bagian Utara (NPLCT) dengan menggunakan sistem Beton Reef Ball. Selain itu tambang Kintap juga telah memulai program pembibitan mangrove yang diharapkan nantinya dapat ditanam pada kawasan pesisir di sekitar Kintap.

e. Program 4R

Guna terus berupaya dalam melakukan praktik penambangan yang ramah lingkungan, Arutmin tidak berhenti hanya pada sekedar pemenuhan peraturan sebagai batas standar pengelolaan, tapi juga berusaha melakukan hal-hal lain yang mempunyai nilai lebih terhadap lingkungan. Semangat untuk berbuat lebih terhadap lingkungan itulah yang coba diwujudkan misalnya dalam program-program Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery (4R).

Implementasi yang telah dilakukan terkait program 4R diantaranya mulai mengurangi penggunaan kemasan plastik dengan menyediakan air minum galon dan termos untuk mengurangi sampah botol kemasan, penggunaan kembali kertas bekas hingga penggunaan metode *kidney-loop* untuk membersihkan oli hidraulik kendaraan yang dapat mereduksi penggunaan oli hidraulik dan memperpanjang umur operasional oli hingga dua kalinya.

Rencana Pasca Tambang

Dengan telah disetujuinya dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) Arutmin pada tahun 2012 lalu, setiap program pengelolaan lingkungan utamanya rehabilitasi lahan bekas tambang diupayakan agar mengacu kepada dokumen RPT tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan akan membuat implementasi reklamasi dan pengelolaan lingkungan Arutmin lebih terarah dalam persiapan menuju pasca tambang.

Pada lubang-lubang bekas tambang/void yang telah terbentuk akan dilakukan kajian kelayakan secara ekonomi dan teknis untuk menentukan alternatif terbaik pemanfaatan pasca tambang sehingga diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.

Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan *pilot project* budidaya ikan air tawar di *void* Antasena tambang Satui yang merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada pertengahan tahun 2013 lalu. Ikan yang dicoba budi dayakan dalam keramba pada phase awal ini adalah Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*). Pilot proyek budi daya ikan air tawar ini melibatkan 4 kelompok petani sekitar tambang Satui. Untuk memastikan ikan yang dibudi daya nantinya aman untuk konsumsi, secara rutin juga akan dilakukan

d. Mangrove Cultivation

Apart from post-mining reclamation, Arutmin also conducted coastal rehabilitation program through mangrove cultivation. The program is conducted due to deep concern over the severity of damaged mangrove ecosystems in coastal areas, recognizing the critical role of mangrove ecosystem in protecting coastal line from erosion and as home to coastal biota. Mangrove ecosystem areas also have the potential to be developed as tourism sites.

During 2014, 100 mangrove seedlings were planted at North Pulau Laut Coal Terminal(NPLCT) using the Concrete Reef Ball system. In addition, Kintap mine has also started mangrove nursery program to be planted in coastal regions around Kintap.

e. 4R Program

In order to continue applying environmentally friendly mining practices, Arutmin goes beyond complying with the rules as the standard of management, but seeks to do other things that bring more value to the environment. The spirit to do more for the environment is realized through the implementation of Reduce, Reuse, Recycle and Recovery (4R) program.

The implementation of the 4R program among others by reducing the use of plastic packaging by providing reusable water containers and thermos, reuse of waste paper, using kidney-loop method for cleaning vehicle hydraulics to oil reduce the use of hydraulic oil and to extend the operational life of the oil for the second time.

Mine Closure Plant

With the approval of Arutmin's Mine Closure Plan (RPT) in 2012, any environmental management program, particularly the mined land rehabilitation program, should refer to the RPT, so that Arutmin's reclamation and environmental management can be carried out in a more focused manner in the preparation towards mine closure.

Feasibility studies have been conducted on former mine voids to assess economical and technical potential of mined area, which may be of best benefit for the surrounding communities.

In 2014, the freshwater fish farming pilot project was carried out at Antasena pit in Satui Mine, a continuation from mid-2013. In this initial phase, the project cultivates Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*) in floating cages. This freshwater fish farming project involves four groups of farmers around Satui. To ensure that farmed fish is safe for consumption, chemical analysis of fish meat is carried out routinely. This pilot project is expected to take

analisa kimia daging ikan. *Pilot project* budi daya ini diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal terhadap masyarakat sekitar khususnya dalam sektor perikanan air tawar.

Bibit buah naga yang ditanam di areal-areal bekas tambang pada 2013 lalu, selama tahun 2014 mulai berbunga dan menghasilkan buah di tambang Senakin dan Asam Asam. Melalui proyek percontohan buah naga ini Arutmin ingin menunjukkan bahwa tanaman buah naga dapat dijadikan sebagai salah satu tanaman budidaya bernilai tinggi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar pada pasca tambang nanti.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014

Terkait program CSR bidang lingkungan, berkerja sama dengan Dept. Lingkungan dilakukan juga beberapa kegiatan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2014 yang jatuh pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dirangkum sebagai berikut:

1. Pembersihan sampah di Pesisir Pantai dan penanaman tanaman buah-buahan di area Terminal Khusus Batu bara Tanjung Pemancingan, Kotabaru.
2. Penanaman cemara laut oleh karyawan dan kontraktor Arutmin di *port office* Tambang Kintap.
3. Dalam rangka peringatan HUT Arutmin ke-33, dilakukan pula penanaman mangrove yang merupakan sinergi dengan program rehabilitasi pantai Mekarsari, Kabupaten Tanah Laut.

TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pada dasarnya BUMI menerapkan kebijakan kesetaraan dan kompetensi individu dalam penilaian karyawan, tidak berdasar pada gender, latar belakang budaya maupun diskriminasi lainnya. BUMI memandang karyawan adalah mitra dan merupakan elemen utama dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Oleh karenanya BUMI senantiasa memastikan terpenuhinya kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan, kompensasi dan penghargaan yang kompetitif dan bersaing di industri.

Fasilitas dan benefit yang diberikan kepada karyawan, selain gaji dan bonus, meliputi:

- Jaminan kesejahteraan seperti bantuan beasiswa pendidikan anak karyawan, bantuan musibah, dan lain-lain.
- Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.
- Jaminan hari tua melalui Jamsostek dan Dana Pensiun.
- Fasilitas tunjangan seperti tunjangan hari raya, cuti melahirkan, hak cuti dan cuti akhir tahun.

Uraian lebih lengkap mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dalam aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada sub-Bab "Tinjauan Operasional-Pengelolaan Sumber Daya Manusia".

Dengan skala usahanya yang bersifat internasional, BUMI berkomitmen penuh untuk menerapkan sistem operasi berdasarkan standar keselamatan dan kesehatan kerja berkelas

place continuously, so as to provide maximum benefit to the local community, especially in the sectors of freshwater fisheries.

Dragon fruit seedlings were planted in former mining areas in 2013 and, during 2014 began to flower and produce fruit in Senakin and Asam Asam. Through this dragon fruit pilot project, Arutmin shows that dragon fruit can be used as cultivated plant of high-value and be of benefits to the surrounding communities following the mine closure.

2014 World Environmental Day

As part of CSR program in the field of environment, a number of activities were conducted in collaboration with the Department of Environment to commemorate World Environment Day 2014 in June. These activities are summarized as follows:

1. Cleaning up the beach and planting fruit trees in the area of Coal Terminal Tanjung Pemancingan, Kotabaru.
2. Planting Casuarina by Arutmin employees and contractors at the port office of Kintap Mine.
3. Commemorating the 33rd Anniversary of Arutmin, mangroves were planted in synergy with the rehabilitation program of Mekarsari coast, Tanah Laut.

RESPONSIBILITY TO EMPLOYEES AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

BUMI applies equality principle and uses individual competencies to review employees' performance irrespective of gender, cultural background, and other areas of discrimination. To BUMI, employees are partners and are the key element in driving the company in realizing its vision and mission. BUMI is determined to ensure employee welfare by providing benefits, compensation, and rewards that are competitive in the industry.

In addition to salaries and bonuses, facilities and benefits provided to employees include:

- Welfare, such as scholarship for children of the employees, assistance during a period of calamity, and so forth.
- Occupational health and accident security.
- Pension funds through Jamsostek and Dana Pensiun.
- Other benefits such as for religious holidays, maternity leave, annual leave, and end of year leave.

A more complete description on the implementation of corporate responsibility towards employees in the aspects of employment can be seen in the sub-chapter "Operational Review - Human Resources Management".

With its business on an international scale, BUMI is fully committed to applying world-class occupational health and safety standards in its operations, aligned with the standards set forth

dunia dengan tetap memperhatikan standar keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Gambaran program-program K3 yang diterapkan oleh BUMI dalam melaksanakan kegiatan operasional diuraikan pada pembahasan berikut.

Pengelolaan K3 di KPC

KPC memprioritaskan aspek keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas penambangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan Hidup, Keamanan dan Pembangunan Berkesinambungan (K3LK & PB), manajemen PT KPC dan para karyawannya memiliki tekad untuk mencapai kinerja yang terbaik dan peningkatan yang terus menerus di bidang K3LK & PB.

Terkait dengan K3, tekad tersebut mencakup hal berikut:

- Patuh dengan semua perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta persyaratan lain yang relevan
- Menerapkan sistem manajemen yang menetapkan elemen, standar dan prosedur yang berlaku di seluruh area operasi KPC untuk secara terus menerus mengidentifikasi dan mengontrol risiko K3
- Merencanakan, melaksanakan, mengukur, melaporkan dan mengkaji ulang tujuan, sasaran dan program K3 secara teratur
- Melaksanakan audit independen secara teratur atas kinerja K3.

KPC bertekad untuk memberikan lingkungan kerja di mana karyawan KPC dan kontraktornya dapat melaksanakan pekerjaan mereka bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus mendapatkan prioritas dalam semua aspek operasional perusahaan. Semua pihak, termasuk karyawan KPC dan kontraktor, memiliki tanggung jawab bersama untuk bekerja dengan aman sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan dan keselamatan kerja KPC.

Untuk memastikan dukungan penuh dan partisipasi seluruh jajaran karyawan dalam merealisasikan berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja (K3), KPC juga mengintegrasikan aspek K3 dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mensosialisasikan program tersebut bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Manajemen K3

Dalam rangka menjadikan aspek K3 sebagai budaya, KPC menyadari akan pentingnya Sistem Manajemen K3 yang memadai, sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan Budaya K3. Oleh karena itu, KPC selalu mengevaluasi dan menyempurnakan Sistem Manajemen K3 KPC yang diberi nama Prima Nirbhaya. Pada tahun 1998 Prima Nirbhaya dikembangkan dengan mengadopsi NOSA 5 Star System. Pada tahun 2002 Prima Nirbhaya disempurnakan dengan menambahkan Elemen Pencegahan Kecelakaan Fatal dan menerapkan Golden Rule sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan terjadinya kecelakaan fatal. Pada tahun 2007, Prima Nirbhaya disempurnakan dengan mengacu pada standar OHSAS 18001:2007 dan melalui audit yang dilakukan oleh PT SGS, KPC mendapatkan sertifikat OHSAS 18001:2007. Untuk memastikan penerapan K3 sesuai dengan standar operasi tersertifikasi OHSAS 18001:2007, KPC

in the prevailing laws and regulations. BUMI's OHS programs in its operational activities are as follows:

KPC's OHS Management

Safety and health of all employees in conducting mining activities are of an utmost importance to KPC. As asserted in its Occupational Health and Safety, Environment, Security, and Sustainable Development (OHSES & SD) policy, the management of PT KPC and its employees are determined to deliver the best performance and to continuously improve its OHSES & SD practices.

In particular relating to OHS, the company is committed to:

- Comply with all applicable laws and regulations as well as other relevant requirements
- Apply a management system that establishes all elements, standards, and procedures in all KPC's operational areas, in order to identify and control OHS risks in an on-going basis.
- Plan, implement, measure, report and review the goals and objectives of OHS programs regularly
- Conduct regular independent audit on OHS performance.

KPC is committed to ensure that KPC's employees and contractors are able to work in the safest and healthiest environment possible. Work safety and health shall be a priority in all of the company's operational aspects. All parties, KPC's employees and contractors, have the shared responsibility to work safely according to KPC's work safety and health procedures and standards.

To acquire full support and participation of employees in OHS efforts, KPC embeds the OHS element in the Collective Labor Agreement (CLA) and promotes the program in collaboration with the Workers/Labors Union.

Occupational Health and Safety (OHS) Management

KPC recognizes the critical role of adequate OHS Management System in nurturing OHS as company culture. To that end, KPC regularly reviews and enhances its OHS Management System, which is titled Prima Nirbhaya. Prima Nirbhaya was initially developed in 1998, adopting the NOSA 5 Star System. In 2002, Prima Nirbhaya was refined with Fatal Accident Prevention Element, and a Golden Rule was applied to reinforce efforts in preventing fatal accidents. In 2007, Prima Nirbhaya was further enhanced to adopt OHSAS 18001:2007 standard and through an audit conducted by PT SGS, KPC attained the OHSAS 18001:2007. To ensure the consistency of the standard's implementation, KPC carries out regular evaluation by audit and internal inspection. In addition, PT SGS conducts annual External Audit and up until now

melakukan evaluasi secara berkala melalui audit dan inspeksi internal. Selain itu PT SGS melakukan Audit External setiap tahunnya, dan sampai saat ini KPC selalu menunjukkan kinerja Sistem Manajemen K3 yang baik sehingga sertikat OHSAS 18001:2007 dapat selalu dipertahankan.

Statistik K3

Secara berkelanjutan, jajaran staf dan Kontraktor KPC, berupaya menumbuh kembangkan budaya sadar K3 dengan sasaran tercapainya target Nihil Kejadian Kecelakaan. Hasilnya, pada tahun 2013, total Hilang Waktu Kerja akibat cedera dan keparahan cedera dari kejadian kecelakaan berkurang, disertai tidak adanya kecelakaan yang berakibat fatal. Seluruh penyebab kecelakaan diselidiki untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, melindungi karyawan dari cedera akibat kecelakaan kerja dan sekaligus menjaga reputasi KPC di tingkat nasional maupun global.

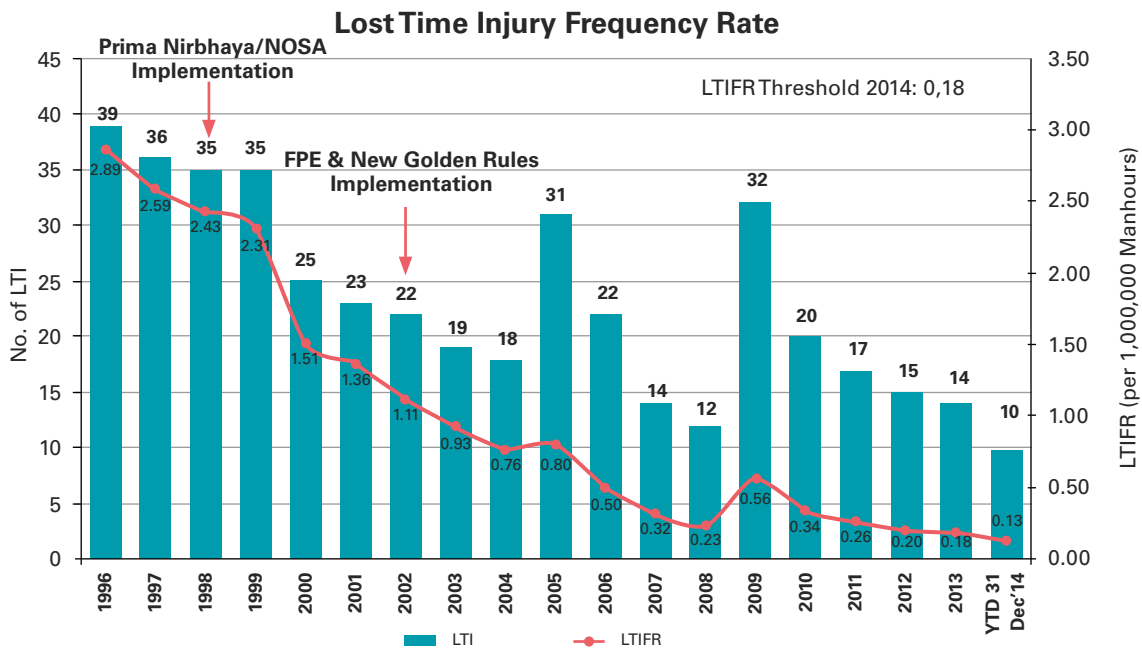
Di tahun 2014, tingkat kekerapan kejadian kecelakaan yang diukur dengan Tingkat Kekerapan Cedera Berakibat Hilang Waktu Kerja (LTIFR) menjadi 0,13 per 1.000.000 jam kerja, turun 28% dari LTIFR tahun 2013 yang sebesar 0,18.

KPC has always been demonstrating a sound OHS Management System, thus maintaining its OHSAS18001:2007 certification.

Statistics of OHS Performance

KPC’s staff and contractors are putting continuous efforts to foster OHS culture, aiming to realize a zero accident level. As the result, in 2014, total Lost Time due to injuries and fatal injuries resulting from accidents decreased, while fatal accidents recorded zero incidents. All causes of accidents were investigated thoroughly to prevent re-occurrence, to protect employees from injuries due to accidents, and to uphold KPC’s reputation at national and global levels.

In 2014, frequency of accidents was measured using Lost Time Injury Frequency Rates (LTIFR), showing 28% decrease to 0.13 per 1,000,000 work hour compared to LTIFR of 0.18 in 2013.

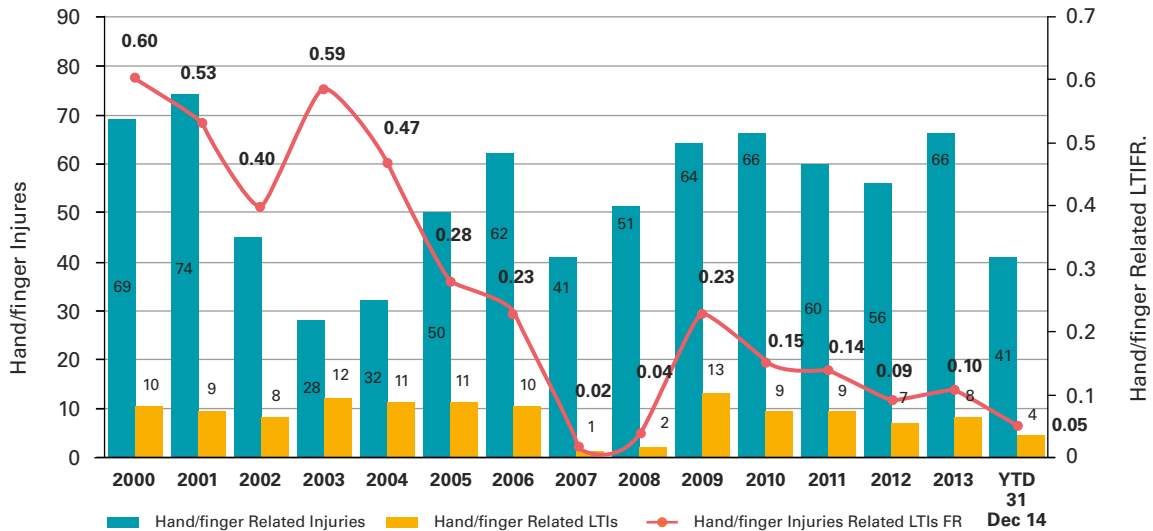


Tingkat keparahan, yang mengukur apakah kejadian kecelakaan mengakibatkan kehilangan hari kerja (Lost Time Injury - LTI), termasuk fatality, ataupun korban dapat kembali bekerja namun dengan keterbatasan (Restricted Work Day Injury - RWDI) berkurang secara signifikan, dari 12,60 di tahun 2013 menjadi 6,00 di tahun 2014. Dari 10 insiden kecelakaan yang mengakibatkan LTI di tahun 2014, 3 insiden terjadi di kawasan KPC dan 7 terjadi di kawasan kontraktor.

Tingkat Kekerapan Cedera Jari dan Tangan yang berakibat LTI menurun dibandingkan dengan tahun 2013; yakni dari 0,10 menjadi 0,05 di tahun 2014 dengan jumlah LTI 4.

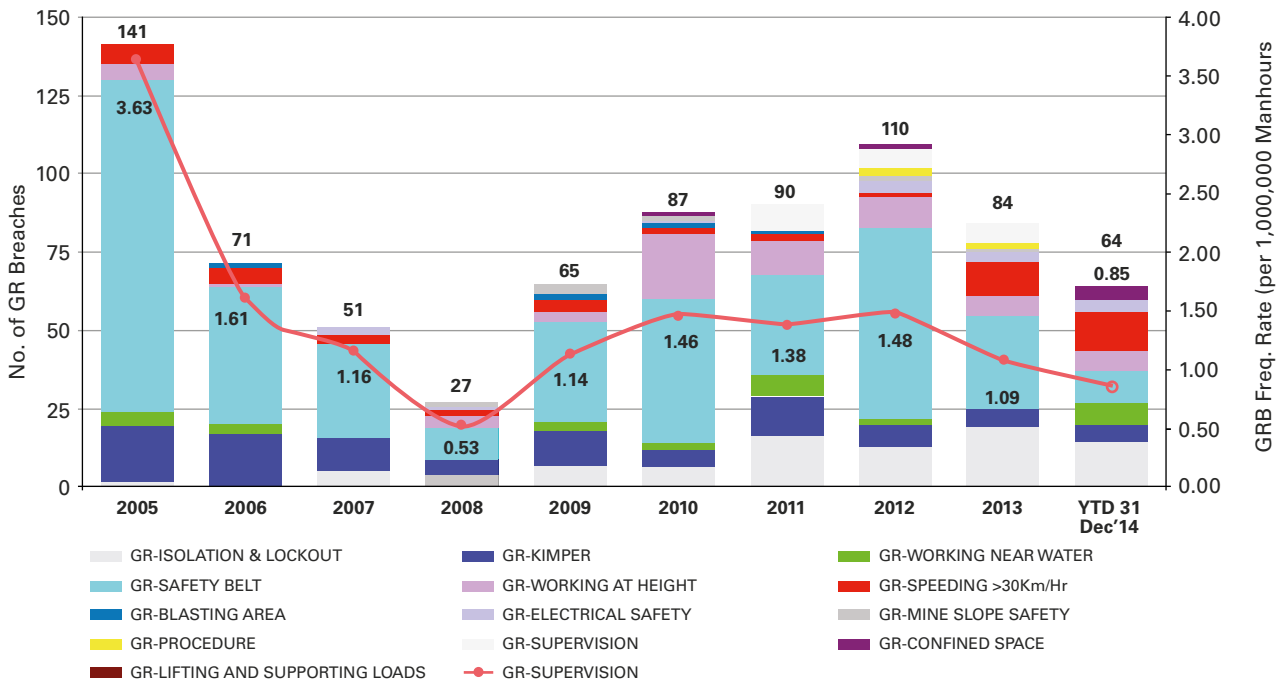
The severity rate, which identifies the rate of Lost Time Injury including fatality, or Restricted Duty Work Injury, showed a significant downturn from 12.60 in 2013 to 6.00 in 2014. From a total of 10 accidents that led to LTI, 3 accidents occurred in KPC areas and 7 in contractors’ areas.

Frequency of Finger and Arm Injury that led to LTI decreased from 0.10 in 2013 to 0.05 in 2014 with LTI of 4 cases.



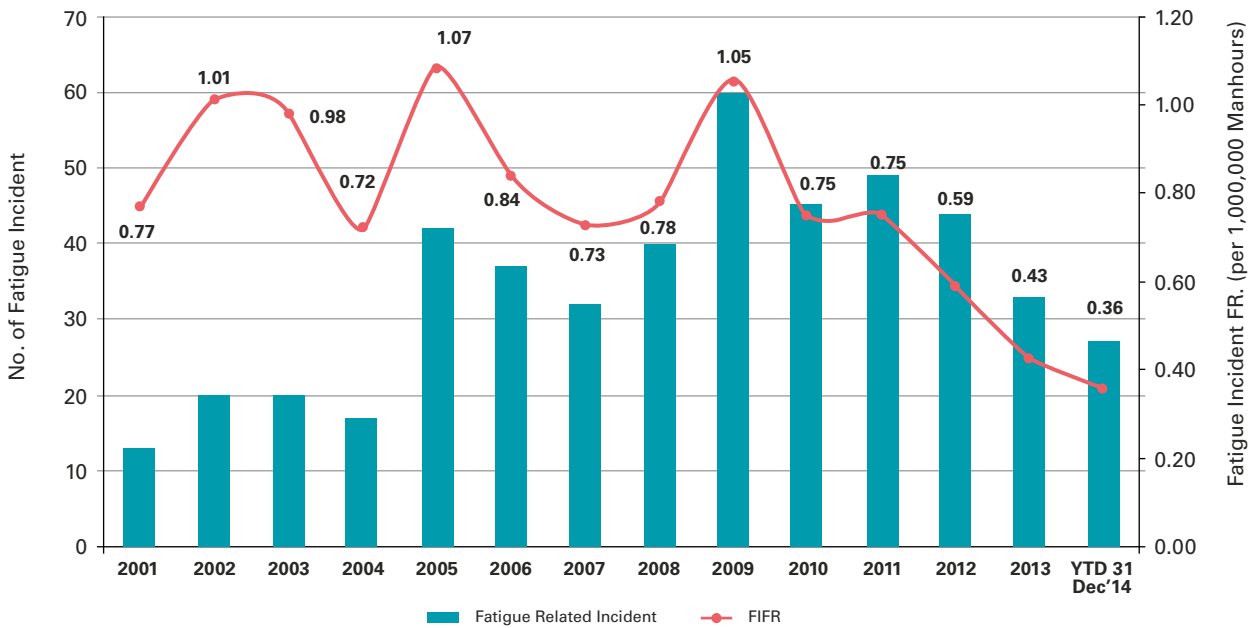
Tingkat Kecepatan Pelanggaran Aturan Baku (Golden Rule) menurun dari 1.09 per 1.000.000 jam kerja di tahun 2013 menjadi 0,85 per 1.000.000 jam kerja di tahun 2014, dengan mayoritas pelanggaran terjadi pada aturan Isolation and Lockout (15 dari 64 kejadian).

Frequency of Golden Rule violation also declined from 1.09 per 1,000,000 work-hours in 2013 to 0.85 per 1,000,000 work-hours in 2014, with most violations occurred against an Isolation and Lockout policy (15 out of 64 incidents).



Sementara Tingkat Kecepatan Insiden Akibat Kelelahan (Fatigue) menurun dari 0,43 per 1.000.000 jam kerja di tahun 2013 menjadi 0,36 di tahun 2014.

Meanwhile, frequency of Accidents Due to Fatigue decreased from 0.43 per 1,000,000 work-hours in 2012 to 0.36 in 2014.



Pengelolaan K3 di Arutmin

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan operasi PT Arutmin Indonesia. Setiap menjalankan aktivitas perusahaan, Arutmin dengan seluruh komponennya memiliki komitmen dan kesadaran yang tinggi terhadap standard K3. Di setiap lokasi kerja, baik jajaran manajemen maupun seluruh karyawan memiliki satu tujuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam bidang K3 sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan menyehatkan.

Aspek K3 Arutmin dijalankan mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 ini telah disertifikasi oleh Sucofindo International Certification Services (SICS) sejak tahun 2009 kemudian diperpanjang kembali untuk masa 3 tahun pada tahun 2012 yang lalu. Artinya, pada tahun 2015 nanti sistem manajemen K3 ini akan kembali diaudit untuk sertifikasi selanjutnya. Selain audit sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2014 Arutmin juga melakukan internal audit di seluruh lokasi kerja baik berdasarkan OHSAS 18001:2007 maupun Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa Arutmin memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap menjalankan operasional pertambangan batu bara dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan di bidang pengelolaan lingkungan, pada tahun 2014 kegiatan internal audit sistem manajemen lingkungan juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan internal audit K3. Kegiatan internal audit ini untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Lingkungan (SML) di Arutmin sesuai dan memenuhi persyaratan ISO 14001:2004.

Implementasi sistem manajemen lingkungan di Arutmin dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan guna mengurangi dampak dan gangguan terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan.

OHS Management In Arutmin

Occupational Health and Safety (OHS) is one of the important aspects of the operations of PT Arutmin Indonesia. Arutmin with all the components has always run its activities with commitment and high awareness towards OHS standards. At each site, both the management and all employees share a common goal of achieving high OHS performance so as to create a safe and healthy working environment.

Arutmin's OHS elements refer to the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) that has been certified by Sucofindo International Certification Services (SICS) since 2009 and was extended in 2012 for a 3 years of period. That is, in 2015 the SMK3 will be re-audited for next certification. In addition to SMK3 audit conducted by an external party, during 2014 Arutmin also conducted internal audits at all sites based on OHSAS 18001: 2007 and Government Regulation No. 50/2012 on the Implementation of Safety and Occupational Health Management System. This demonstrates that Arutmin has a strong commitment to run the coal mining operations with due regard to occupational health and safety aspects.

Regarding the environmental management, an internal audit on environment management system in 2014 was conducted in conjunction with the internal audit on OHS. This internal audit activities ensures that Arutmin has applied the Environmental Management System (EMS) that meet the requirements of ISO 14001: 2004.

The implementation of an environmental management system in Arutmin was conducted thoroughly and continuously in order to minimize the impact and disruption to the environment from mining activities.

Penghargaan

Penghargaan yang diterima Arutmin di bidang K3 dapat dilihat di halaman 20-21 annual report ini.

Selain penghargaan yang diterima terkait pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan, Arutmin juga mencatat kinerja K3 yang digambarkan melalui statistik kecelakaan di tabel berikut ini.

Deskripsi	2012	2013	2014
LTI-FR	0.09	0.09	0.08
LTI-SR	0.93	18.54	1.02
TI-FR	1.45	0.92	0.82
Accident FR	13.76	8.47	7.12

Arutmin menyadari bahwa kinerja K3 secara statistik belum memuaskan walaupun setiap tahun terjadi penurunan frekuensi terjadinya kecelakaan yang berakibat cedera kepada karyawan. Namun untuk kasus kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja (*lost time injury*) masih terjadi di lokasi kerja Arutmin.

Di tahun 2014 yang lalu tercatat ada 1 kasus kecelakaan *lost time injury* yang mengakibatkan 2 orang karyawan menjadi korban. Kecelakaan ini terjadi selain karena faktor teknis, juga dikarenakan pemahaman dan kewaspadaan karyawan terhadap bahaya dan risiko ketika melakukan pekerjaan masih kurang. Selain itu, kecelakaan yang terjadi juga dikarenakan prosedur kerja yang belum sepenuhnya ditaati sehingga masih perlu terus diberikan pelatihan, pengarahan dan pengawasan.

Program K3 Tahun 2014

Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu bara No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, Arutmin berkomitmen untuk melaksanakan program kerja dalam rangka pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan. Berkaitan dengan Pengelolaan Bidang Keselamatan Pertambangan, program K3 yang disusun oleh Arutmin adalah sebagai berikut:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Keselamatan Kerja

- Inspeksi lokasi dan peralatan kerja yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab atau pengawas area.
- Observasi perilaku pekerja untuk mengurangi tindakan tidak aman di lapangan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan (pengamatan tugas lapangan, *safe behavior observation*).
- Pertemuan membahas masalah keselamatan kerja bersama karyawan, kontraktor dan subkontraktor.
- Induksi dan pelatihan keselamatan kerja yang menekankan pada peningkatan kepedulian, kewaspadaan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan dengan aman.
- Kampanye keselamatan kerja dengan memasang spanduk, poster, baliho, stiker, *leaflet* dan media komunikasi lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan karyawan terhadap keselamatan kerja.
- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan bahaya dan risiko yang dihadapi dalam setiap pekerjaan.

Awards

The awards received by Arutmin in the field of OHS can be seen on page 20-21 of this annual report.

The OHS performance at Arutmin is recorded by accident statistics in the following table.

Arutmin realizes that statistically the OHS performance is not satisfactory although the frequency of accidents that resulting in injuries to employees declines every year. However, lost time injury still occurs at Arutmin's sites.

In 2014, Arutmin recorded 1 lost time injury with 2 employees injured. Apart from technical factors, the accidents occurred due to the lack of understanding and awareness of employees against hazards and risks. Moreover, accidents also occurred since the work procedures were not fully adhered to, and therefore training, guidance and supervision are still needed.

OHS Program in 2014

In accordance with the provisions in the Law on Mineral and Coal Mining No. 4/2009, Arutmin is committed to implement occupational health and safety in mining and safety in mining operations. The Arutmin's OHS program is as follows:

1. Occupational Health and Safety

a. Occupational Safety

- Inspection of work areas and equipment conducted by respective supervisor or foreman
- Duly observing employees' behaviours to curb unsafe practices on site, which may lead to accidents (e.g. observation by field officers, safe behaviour observation)
- Joint meeting attended by employees, contractors, and subcontractors discussing safety at the workplace
- Safety training and induction, emphasizing personnel awareness, alertness, and competence to conduct his/her work safely
- Work safety campaign using banners, posters, billboards, stickers, leaflets, and other communication media to increase awareness and attentiveness of employees toward safety
- Provide Personal Protective Equipment (PPE) for employees suitable with the potential dangers and risks

- Pengawasan kegiatan operasi pertambangan bersama tim pengawas keselamatan kerja (*safety department*) seperti *join safety patrol*, *fatigue check*, *speed check* dan lain-lain.
- Memasang rambu-rambu keselamatan kerja sesuai dengan jenis rambu yang dibutuhkan. Rambu larangan, rambu peringatan, rambu perintah dan rambu petunjuk adalah jenis-jenis rambu yang digunakan di tempat kerja.
- Audit keselamatan kerja yang dilakukan oleh tim internal maupun eksternal audit untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja berdasarkan hasil audit yang diperoleh.

b. Kesehatan Kerja

- Pemeriksaan kesehatan karyawan untuk mengetahui dampak terhadap kesehatan individu dari pekerjaan masing-masing yang dilakukan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap tahun.
- Inspeksi tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan seperti kantin dan *camp* serta fasilitas kesehatan seperti klinik di tempat kerja.
- Pelatihan kesehatan kerja baik bagi karyawan maupun bagi petugas yang bertanggung jawab dalam masalah kesehatan kerja seperti pelatihan industrial *hygiene* bagi pengawas di kantin dan *camp*.
- Kampanye kesehatan kerja melalui pertemuan seperti *health talk* maupun media komunikasi yang efektif lainnya seperti spanduk dan poster yang dipasang di sekitar tempat kerja.

c. Lingkungan Kerja

- Pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja dengan menggunakan alat ukur baik oleh internal maupun dari luar perusahaan.
- Melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala untuk memastikan hasil pengukuran lingkungan kerja mendapatkan hasil yang valid.
- Melaksanakan program *housekeeping* di tempat kerja dengan menerapkan prinsip-prinsip pemilahan, penataan, pembersihan, pembiasaan dan pendisiplinan.

d. Sistem Manajemen K3

Arutmin menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 ini telah diaudit dan disertifikasi oleh SICS sehingga layak mendapatkan sertifikat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta sertifikat OHSAS 18000:2007.

2. Keselamatan Operasi Pertambangan

a. Pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan

- Pengecekan awal setiap kali akan mengoperasikan unit atau peralatan pertambangan untuk memastikan unit masih aman dan layak digunakan.
- Pemeliharaan secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (*preventive maintenance check*).

b. Pengamanan instalasi

- Penjagaan instalasi di daerah-daerah berbahaya dan terlarang oleh petugas satuan keamanan.
- Patroli rutin guna mencegah hal-hal diluar kendali yang dapat mengancam keselamatan operasi pertambangan.

- Monitoring of mining operations conducted by safety department, such as safety patrol, fatigue check, speed check, and others.
- Install safety signs accordingly, such as: restriction signs, warning signs, order signs, and instruction signs.
- Safety audits conducted by internal and external audit team to improve safety performance

b. Occupational Health

- Annual employee health check-up to assess any health impacts individually, related to the work activities.
- Inspection of areas that may cause health disturbance, such as cafeterias and camps, as well as health facilities such as clinics at the workplace
- Health training for employees and for staff responsible for occupational health, such as training in industrial hygiene for cafeteria and camp supervisors
- Health campaign through health talk forum and other media such as banners and posters put up around work areas.

c. Work Environment

- Measurement and monitoring of work environment by internal and external teams.
- Regular calibration of measurement equipment to assure validity of environmental measurement.
- Housekeeping program at the workplace, applying sorting, organizing, and cleaning methods as well as adaptation and discipline.

d. OHS Management System

PT Arutmin Indonesia develops and implements an Occupational Health and Safety Management System accompanied by audit and certification by SICS. Based on the audit, the company is entitled to certification from Indonesia's Ministry of Labor and Transmigration as well as OHSAS 18000:2007.

2. Safety in Mining Operations

a. Maintenance of equipment, facilities, installations, and mining devices

- Early check of equipment prior to operation, to ensure safety and adequacy
- Preventive maintenance checks

b. Installation security

- Installation of security in hazardous and restricted areas by security unit.
- Routine patrol to prevent unwanted events that may pose threat to safety.

c. Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambangan

- Memeriksa kelayakan sarana, prasarana dan peralatan pertambangan yang baru masuk ke wilayah operasi pertambangan melalui kegiatan *commissioning*.
- Melengkapi syarat administrasi pengujian teknis peralatan-peralatan angkat dan angkut yang digunakan dalam operasi pertambangan (sertifikasi).

d. Kompetensi tenaga teknik

Memastikan tenaga teknis yang mengoperasikan peralatan pertambangan memiliki kompetensi yang memadai melalui tes kartu ijin mengemudi perusahaan (KIMPER), surat ijin operasi (SIO).

e. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan

Menindaklanjuti hasil evaluasi kajian teknis pertambangan untuk mengurangi dan mencegah potensi serta risiko terjadinya kecelakaan akibat operasional sarana, prasarana dan peralatan pertambangan lainnya.

c. Adequacy Of Equipment, Facilities, And Mining Devices

- Commissioning tests to ensure the adequacy of new equipment, facilities, and mining devices in mining areas.
- Technical certification for lifting and transport equipment used in mining areas.

d. Competence of technical staff

Ensuring operator competence for mining equipment by requiring SIMPER (Company's Driver's License) test, Operation License (SIO) test.

e. Evaluation of mining technical review report

Follow-up results of mining technical review to reduce and prevent risks of accidents due to operating facilities, infrastructure, and other mining equipment.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

BUMI menyadari pentingnya pemenuhan standar kualitas setiap produk yang dihasilkan serta pemenuhan tanggung jawab terhadap konsumen/pelanggan dalam membina hubungan bisnis jangka panjang. Keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bisnis dan kinerja usaha secara berkelanjutan. Oleh karenanya, BUMI menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam pengawasan proses dan output kualitas produksi termasuk dalam penanganan pengiriman produk. BUMI juga sangat memperhatikan kepuasan konsumen yang direalisasikan melalui penjagaan mutu produk sesuai standar yang disepakati, pemenuhan komitmen pengiriman tepat waktu, kuantitas dan kualitas serta penyelesaian setiap keluhan pelanggan sesuai koridor yang disepakati bersama.

Kebijakan Pelayanan kepada Konsumen

Untuk menyelesaikan setiap pengaduan konsumen, BUMI mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Konsumen, yang diterapkan secara konsisten melalui serangkaian langkah lanjutan meliputi:

- Penetapan penyelesaian pengaduan konsumen seperti diatur dalam Surat Keputusan tentang Kewenangan *Frontliner* dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- Penetapan fungsi-fungsi penyelesaian pengaduan konsumen, meliputi: Fungsi Penerimaan Pengaduan, Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, Fungsi Pemantauan Pengaduan dan Fungsi Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.

Penjagaan Mutu Produk

BUMI melakukan penanganan batu bara sesuai standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk menjamin kualitas dan pasokan batu bara kepada konsumen, mencakup:

- Pelaksanaan manajemen *stockpile*
Pengaturan tumpukan batu bara hasil produksi dan proses blending dilakukan sesuai dengan klasifikasi kualitas kalori. BUMI telah melengkapi seluruh fasilitas untuk mendukung proses *blending* batu bara yang merata.

RESPONSIBILITY TO CONSUMERS

BUMI acknowledges that meeting product quality standards and fulfilling its responsibilities to consumers/customers are critical in building long term business relationships, as both elements are significant parts of business growth and sustainable performance. Therefore, BUMI sets and enforces robust criteria in the monitoring of production processes and quality of production output, including product shipments. BUMI also seeks to ensure consumer satisfaction by keeping product quality within agreed standards, maintaining on-time delivery with accurate quantity and quality, and settling all customer complaints according to agreed methods.

Consumer Service Policy

Relating to customer complaint settlement, BUMI issued Decision Letter of the Board of Directors regarding Policy and Procedure of Customer Complaint Settlement, which has been consistently enacted through the following:

- Establishing customer complaint settlement process as stipulated by Decision Letter regarding Frontliner Authority in Settling Customer Complaints
- Establishing functions related to customer complaint: Complaint Desk, Complaint Handling and Settlement, Complaint Monitoring, and Complaint Settlement Reporting Functions.

Product Quality Maintenance

BUMI implements ISO Quality Management System 9001:2008 to ensure coal quality and supply that consists of:

- Stockpile management
Categorizing stockpiles of coal from production and blending process based on calorie classification. BUMI has added its facilities to support good blending process.

- **Pengendalian kualitas**
BUMI menjaga kualitas produksi melalui mekanisme *quality control* yang ketat pada setiap tahapan produksi dengan berpedoman pada standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Dengan sistem tersebut, BUMI melakukan uji sampling untuk memastikan kualitas batu bara yang akan ditambang, di area *stockpile* di daerah penambangan sebelum pemindahan ke *stockpile* pelabuhan, diikuti dengan pengujian di areal *stockpile* pelabuhan sebelum pemuatan ke kapal. Analisis kualitas batu bara dilakukan oleh unit laboratorium Perseroan atau unit laboratorium pihak ketiga yang kompeten dan independen yang telah menerima sertifikat Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2005 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- **Pengangkutan**
BUMI bekerjasama secara intensif dengan pihak ketiga dalam proses pengangkutan dari *stockpile* tambang ke *stockpile* pelabuhan. Pada area yang telah dilengkapi dengan OLC (Overland Conveyor Belt), BUMI senantiasa memastikan bahwa kualitas batu bara yang dipindahkan telah sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk menjaga mutu produk, sekaligus menjaga kesehatan lingkungan, Perseroan telah melengkapi fasilitas pemindahan OLC dengan penutup, agar tidak menimbulkan debu. Perseroan juga melengkapi fasilitas pemuatan dengan sarana penutup corong ke kapal pengangkut, untuk meminimalisir dispersi debu ke lingkungan sekitar, serta menjaga kualitas batu bara yang akan ditransportasikan ke pelanggan. Untuk melakukan kontrol atas keseluruhan proses produksi, pemindahan dan *barging* ke kapal pengangkut, BUMI telah mengembangkan Supply Chain Management System (SCMS).
- **Quality Control**
BUMI implements robust quality control mechanisms at all phases of production. The quality control system uses ISO 9001:2008 standards. With the system, BUMI, through subsidiaries KPC and Arutmin, performs sample testing to assure coal quality in stockpile areas located at mining sites prior to transportation of coal to harbour. At the harbour, sample testing is again performed in stockpile areas prior to coal loading to vessels. Coal quality analysis is done by the Company's Laboratory Unit or competent and independent third party laboratory, certified with Laboratory Quality Management System ISO/IEC17025:2005 from National Accreditation Committee (KAN).
- **Transportation**
BUMI works closely with third parties in conducting transportation of coal from mining stockpile areas at the harbor. In areas where OLC (Overland Conveyor Belt) is available, BUMI continuously ensures that the quality of transported coal meets the agreed contract. To maintain product quality as well as the environment, the Company has installed equipment to prevent dust dispersion to the surrounding areas, namely OLC cover and funnel lids. The closed system will, at the same time, also maintain the quality of coal to be delivered to customers. To control the overall process of production, transportation, and barging, BUMI has in place a Supply Chain Management System (SCMS).

Penyelesaian Keluhan Pelanggan

BUMI merealisasikan kegiatan penyelesaian keluhan pelanggan sebagai bentuk komitmen hubungan bisnis jangka panjang dan komitmen terhadap kualitas layanan terhadap pelanggan. Dalam pelaksanaan kegiatan, objek keluhan didata sebagai masukan bagi lini produksi atau pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Data objek keluhan pelanggan juga merupakan salah satu butir penilaian kinerja bagi pihak-pihak terkait.

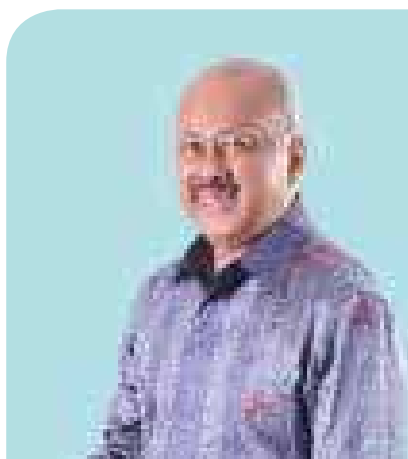
Customer Complaint Settlement

BUMI's commitment to settle all customer complaints is part of its endeavour to build long-term business relationships and to provide service excellence to customers. In its implementation, complaint items are recorded as input for the production units and any other relevant units to prevent re-occurrence. A customer complaint is also one of the items reviewed during performance assessment of relevant parties.



**INFORMASI/
DATA PERUSAHAAN
INFORMATION/CORPORATE DATA**

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Kusumo A. Martoredjo

Presiden Komisaris/Komisaris Independen
President Commissioners/Independent
Commissioner

Kusumo Abujono Martoredjo mulai menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen sejak 28 Juni 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001-2013. Beliau adalah pendiri PT Catur Yasa dan anggota Dewan Gubernur Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Penasihat Senior Kerjasama Komite Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEC).

Beliau diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perekonomian untuk Jepang dan Korea, dan merupakan Komisaris di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Energi, Industri, dan Pelayanan Ritel di sektor gas dan bahan bakar. Beliau juga Presiden Federasi Shorinji Kempo Indonesia.

Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Pada tahun 1969, beliau melanjutkan studinya di Gutbrod Moteren Werke GmbH, Jerman Barat.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 7 April 1943.

Kusumo Abujono Martoredjo has been serving as President Commissioner and Independent Commissioner since 28 June 2013. Previously he served as the Company's Commissioner from 2001-2013. He is the founder of PT Catur Yasa and member of Board of Governors of Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Senior Advisor for Cooperation of the Indonesia-Japan Economic Committee (IJEC).

He was appointed as Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for the Economic Affairs of Japan and Korea, and Commissioners at several companies in the fields of Energy, Industry, and Retail Services in, gas and energy sectors. He is also the President of Indonesian Shorinji Kempo Federation.

He graduated from the Faculty Economics, Universitas Indonesia. In 1969, he continued his study in Gutbrod Moteren Werke GmbH, West Germany.

An Indonesian citizen, he was born in Bandung on 7 April 1943.



Suryo B. Sulisto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suryo Bambang Sulisto bertugas sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Juni 2013. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 untuk kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan mulai bulan Mei 2012 sampai tahun 2013.

Beliau juga merupakan pendiri Satmarindo Group dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sejak 2010 sampai dengan 2015. Beliau adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Amerika Utara, Tengah dan Daerah Amerika Selatan (1998-2001).

Beliau meraih gelar BSc dari University of Wisconsin dan Master of Business Administration (MBA) dari Washington International University, Pennsylvania, keduanya di Amerika Serikat.

Warga Negara Indonesia, lahir di Solo pada tanggal 11 Februari 1947.

Suryo Bambang Sulisto has served as the Company's Independent Commissioner since June 2013. Previously he served as the Company's President Commissioner from 2001 until 2012 then served as the Company's Vice President Commissioner from May 2012 to 2013.

He is also a founder of Satmarindo Group and currently serves as the Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) since 2010 to 2015. He is the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for North America, Central, and South American Regions (1998-2001).

He obtained a BSc from the University of Wisconsin and Master of Business Administration (MBA) from Washington International University, Pennsylvania, both in the US.

An Indonesian citizen, born in Solo on 11 February 1947.

Iman Taufik menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Baramulti Sukessarana Tbk, pendiri dan Komisaris PT Gunanusa Utama Fabricators, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Engineering R.J. Brown & Associates di Singapura.

Beliau juga pendiri PT Tripatra Engineering. Beliau dianugerahi Satya Lencana Pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia atas usahanya dalam mengembangkan teknologi lepas pantai. Beliau lulus dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1967.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1942.

Iman Taufik has served as the Company's Commissioner since 2001. He also served as Independent Commissioner of PT Baramulti Sukessarana Tbk, founder and Commissioner of PT Gunanusa Utama Fabricators, after the position of Director of Engineering at R.J. Brown & Associates in Singapore.

The founder of PT Tripatra Engineering. He was awarded the Satya Lencana Pembangunan Medal by the President of the Republic of Indonesia on his efforts in developing the offshore technology. He graduated from Mechanical Engineering, Institute of Technology Bandung (ITB) in 1967.

An Indonesian citizen, he was born in Jakarta on 24 April 1942.



Iman Taufik

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Fuad Hasan Masyhur telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001. Beliau juga Presiden Direktur PT Maktour sejak tahun 1986.

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 29 Juni 1959.

Fuad Hasan Masyhur has served as the Company's Commissioner since 2001. He is also President Director of PT Maktour since 1986.

An Indonesian citizen, he was born in Ujung Pandang on 29 June 1959.



Fuad Hasan Masyhur

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Nalinkant A. Rathod

Komisaris
Commissioner

Nalinkant A. Rathod telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001. Beliau telah berkarier di Bakrie Group di Indonesia selama hampir 25 tahun dalam berbagai kapasitas dan memegang berbagai posisi senior. Saat ini beliau adalah Komisaris Utama di PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, keduanya merupakan pengekspor batu bara termal terbesar di Indonesia. Kedua tambang tersebut adalah perusahaan patungan (70:30) antara PT Bumi Resources Tbk, Indonesia dan Tata Power Ltd, India. Beliau ditunjuk sebagai CEO Bumi Plc pada Januari 2012 sehingga kemudian mengundurkan diri sebagai Komisaris dari seluruh operasi perusahaan non-batu bara di Grup Bakrie dan bertugas di London untuk meninjau operasional Bumi plc. Beliau mengundurkan diri dari Bumi plc di bulan Agustus 2013 dan kembali bertugas di Indonesia.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapura, penasihat keuangan perusahaan yang beroperasi di Asia. Beliau telah ditunjuk sebagai Komisaris di PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, dan PT Energi Mega Persada Tbk. Semua perusahaan tersebut di atas merupakan bagian dari Grup Bakrie. Beliau adalah seorang pengusaha sukses dalam bidangnya dan negosiator lintas budaya dan pembuat kesepakatan berpengalaman. Beliau juga aktif secara sosial dan saat ini merupakan Presiden India Club, Jakarta, Indonesia, dan baru-baru ini telah ditunjuk sebagai Ketua Komite Kamar Dagang dan Industri India di Indonesia.

Beliau menerima gelar Bachelor of Commerce dari Andhara University, India pada tahun 1970 dan Chartered Accountants India pada tahun 1976.

Warga Negara India, lahir di Rajahmundry, India pada tanggal 12 Mei 1950.

Nalinkant A. Rathod has served as the Company's Commissioner since 2001. He had 25 years of career with Bakrie Group Indonesia in various capacities and held various senior positions. Currently he is President Commissioner of PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia, both are the biggest exporters of thermal coal in Indonesia. Both mines are a joint venture (70:30) between PT Bumi Resources Tbk, Indonesia, and Tata Power Ltd., India. He was appointed CEO of Bumi Plc on January 2012 and resigned as Commissioner from of all non-coal companies operating in Bakrie Group and served in London to review the operation of Bumi plc. He resigned in August 2013 and resumed his duty in Indonesia.

Currently he is Managing Director of Capital Managers Asia Pte. Ltd, Singapore, a financial advisory company operating in Asia. He was appointed Commissioner of PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, and PT Energi Mega Persada Tbk. These companies are under the Bakrie Group. He was a successful businessman in his field and a cross-cultural negotiator as well as an experienced dealmaker. He is also socially active and is currently the President of India Club, Jakarta, Indonesia, and has recently been appointed as the Chairman of the Committee of Indian Chamber of Commerce and Industry in Indonesia.

He obtained a Bachelor of Commerce from Andhara University, India in 1970 and Chartered Accountants of India in 1976.

An Indian citizen, he was born in Rajahmundry, India on 12 May 1950.

Sulaiman Zuhdi Pane menjadi Komisaris PT Bumi Resources Tbk sejak tahun 2001. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Energi Mega Persada Tbk. Memulai karir di Pertamina sejak tahun 1962 sampai tahun 2000 dengan tiga jabatan terakhir masing-masing sebagai Kepala Badan Pengendalian Pengusahaan Kontraktor Asing BPPKA (sekarang BPMIGAS), Staf Ahli Direktur Utama dan Ketua Tim Perunding Kontrak Production Sharing.

Lulus sebagai Sarjana Geologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1962, dan lulus Kursus Reguler LEMHANNAS Angkatan 21 tahun 1988.

Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 23 Februari 1938.

Sulaiman Zuhdi Pane has served as Commissioner of PT Bumi Resources Tbk since 2001. He is also Commissioner of PT Energi Mega Persada Tbk. Started his career in Pertamina since 1962 to 2000 with three last positions of Head of Development Agency of Foreign Contractors BPPKA (now BPMIGAS), Expert Staff of President Director and Chairman of the Production Sharing Contract Negotiator.

He graduated with a Bachelor degree in Geology from Bandung Institute of Technology in 1962, and graduated from LEMHANNAS Regular course, 21st batch in 1988.

An Indonesian citizen, he was born in Pematang Siantar on 23 February 1938.



Sulaiman Zuhdi Pane

Komisaris
 Commissioner

Anton Setianto Soedarsono menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Memulai karirnya di Pertamina 1966-1981. Pada 5 tahun terakhir masa tugas di Pertamina, beliau menjabat sebagai Deputy General Manager of Foreign/Export Marketing for Crude Oil and Petroleum Products. Purna tugas di Pertamina, beliau menjadi konsultan independen untuk perusahaan minyak dan gas dan bisnis minyak internasional. Beliau mengeluarkan ide yang kemudian dilaksanakan untuk menjual minyak mentah Indonesia dengan harga premium pada tahun 1979.

Selanjutnya di tahun 1985, beliau memutuskan untuk bergabung dengan Unocal dan ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di Jakarta. Selama 10 tahun masa karirnya, telah menghadiri berbagai konferensi mengenai industri perminyakan di Amerika Serikat, Inggris dan Singapura. Beliau menjadi pejabat Vice President pertama di Unocal Indonesia. Pada periode 1994-1998, beliau menjabat sebagai CEO dan Presiden Direktur Bakrie Investindo dan sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bakrie Capital Indonesia periode 1998-1999.

Beliau lulus dari Universitas Nasional Yokohama, Jepang pada tahun 1966.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 22 November 1940.

Anton Setianto Soedarsono serves as the Company's Commissioner since 2009. He began his career with Pertamina in 1966-1981. In the last 5 years of his tenure at Pertamina, he served as Deputy General Manager of the Foreign/ Export Marketing for Crude Oil and Petroleum Products. After his duty in Pertamina, he became an independent consultant for oil and gas companies and international oil business. He declared an idea that was implemented to sell the Indonesian crude oil at a premium price in 1979.

In 1985, he joined Unocal and served in the Representative office of the Republic of Indonesia in Jakarta. During 10 years of his career, he has attended several oil industry conferences in the US, United Kingdom and Singapore. He was the first Vice President of Unocal Indonesia. In 1994-1998, he was CEO and President Director of Bakrie Investindo and Vice President Commissioner of PT Bakrie Capital Indonesia in 1998-1999.

He graduated from Yokohama National University, Japan in 1966.

An Indonesian citizen, he was born in Bandung on 22 November 1940.



Anton Setianto Soedarsono

Komisaris
 Commissioner

PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Saptari Hoedaja

Presiden Direktur
President Director

Saptari Hoedaja menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2001. Sejak pertengahan 2011, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Non Executive Director dan Chief Executive Officer di Bumi Plc.

Beliau lulus dari Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1983.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 1959.

Saptari Hoedaja has served as the Company's President Director since 2001. Since the mid of 2011, also served as the President Director of PT Arutmin Indonesia and PT Kaltim Prima Coal. He is also President Commissioner of PT Energi Mega Persada Tbk and PT Bumi Resources Minerals Tbk. He was Non Executive Director and Chief Executive Officer of Bumi Plc.

Graduated from Mechanical Engineering of Bandung Institute of Technology (ITB) in 1983.

An Indonesia citizen, he was born in Jakarta on 30 May 1959.



Andrew C. Beckham

Direktur
Director

Andrew Christopher Beckham mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013. Memulai karier profesional di Inggris 10 tahun sebelum pindah ke Australia untuk bekerja di Allianz dan Exxon Mobil. Pada bulan Februari 2000, beliau pindah ke Indonesia dan bekerja untuk BHP Billiton sebagai konsultan di PT Arutmin Indonesia. Pada Desember 2001, beliau dipromosikan sebagai Manajer Keuangan untuk Arutmin, sekarang dimiliki oleh Perseroan. Dengan akuisisi PT Kaltim Prima Coal (KPC), beliau diangkat sebagai Manajer Pengembangan Bisnis di KPC dan terlibat dalam penerbitan obligasi pertama dari Indonesia dengan Investment Grade setelah krisis keuangan.

Pada Januari 2005, beliau direkrut oleh Perseroan sebagai Vice President, sebelum beliau diangkat sebagai Chief Financial Officer pada bulan Desember 2006. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Herald Resources pada ASX sejak 2009, dan menjabat sebagai Chief Financial Officer di Bumi Plc sampai 2012. Beliau juga merupakan anggota dari Australian Institute of Company Directors.

Andrew Beckham lulus dari Portsmouth University dengan gelar Kehormatan di bidang Ekonomi.

Warga negara Inggris, lahir di Clacton on Sea, Inggris, pada tanggal 29 Desember 1967.

Andrew Beckham graduated from Portsmouth University with an Honours degree in Economics. After working in the UK for 10 years, he moved to Australia and worked for Allianz and Exxon Mobil. In February 2000, he moved to Indonesia and worked for BHP Billiton as a consultant in PT Arutmin Indonesia. In December 2001, he was appointed as Finance Manager for Arutmin, now owned by PT Bumi Resources Tbk. With the acquisition of PT Kaltim Prima Coal (KPC), he was appointed as Manager of Business Development in KPC and was involved in the issuance of the first bond from Indonesia with an Investment Grade rating after the financial crisis.

In January 2005, he joined the Company as Vice President, then was appointed as Chief Financial Officer on December 2006. He was also Director of Herald Resources in the ASX since 2009, and Chief Financial Officer of Bumi Plc until 2012. He is a member of Australian Institute of Company Directors.

He graduated from Portsmouth University with an Honorable Degree in Economics.

He is British citizen, and was born in Clacton on Sea, UK, on 29 December 1967.

Dileep Sivastava bergabung dengan Bakrie Group di tahun 1997. Beliau menjabat di sejumlah posisi senior di kelompok usaha, termasuk Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk, Trans-Bakrie, dan PT Bumi Resources Tbk, bertanggung jawab untuk Investor Relations Group dan Perencanaan/ Pengembangan Bisnis Perusahaan di PT Bakrie & Brothers Holding (termasuk PT Bakrie Telecom Tbk).

Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2006 untuk fungsi Investor Relations, Corporate Secretary, PR, Media, Tata Kelola, dan Komunikasi. Sejak Maret 2008 hingga Juni 2010, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk.

Sebelum bergabung dengan Grup Bakrie, beliau adalah Chief Executive Officer PT Kalindo Deka Griya (pemilik Menara Kadin Indonesia) dan beberapa proyek *real estate* lainnya di Indonesia, memimpin Bennett & Coleman (pemilik Times India Group, penerbit terbesar di India) di New Delhi dan ICI Limited di berbagai fungsi dan bisnis.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration dari Indian Institute of Management (IIMA), Ahmedabad, India.

Beliau adalah Warga Negara India. Lahir di Kanpur, India pada tanggal 27 Oktober 1952.

Dileep Srivastava joined the Bakrie Group in 1997. He served at a number of senior positions in the group companies, including Director of PT Bakrie & Brothers Tbk, Trans-Bakrie, and PT Bumi Resources Tbk; responsible for Group Investor Relations and Corporate Planning/ Business Development for PT Bakrie & Brothers Holding (including PT Bakrie Telecom Tbk).

He joined the Company in 2006 for the Investor Relations function, Corporate Secretary, PR, Media, Governance, and Communications. From March 2008 until June 2010, concurrently has held the position of Director of PT Bakrie & Brothers Tbk.

Prior to joining the Bakrie Group, he was Chief Executive Officer of PT Kalindo Deka Griya (owner of Menara Kadin Indonesia) and other real estate projects in Indonesia, headed the New Delhi establishment of Bennett & Coleman (owner of the Times India Group, the largest publishing house in India) and ICI Limited across various businesses and functions.

He holds a Master of Business Administration from the Indian Institute of Management (IIMA), Ahmedabad, India.

He is an Indian citizen, and was born in Kanpur, India on 27 October 1952.



Dileep Srivastava
Direktur & Sekretaris Perusahaan
Director & Corporate Secretary



Eddie J. Subari

Direktur
Director

Eddie Junianto Subari lulus dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia. Beliau memulai karirnya sebagai Akuntan, Auditor, di bidang pasar modal dari tahun 1994 hingga 1997. Beliau bergabung dengan Grup Bakrie pada 1997, dan menjabat berbagai posisi yaitu Head of Corporate Finance di PT Bakrie Capital Indonesia, Komisaris PT Bumi Modern (sekarang PT Bumi Resources Tbk) pada tahun 1997, sebagai Direktur PT Arutmin Indonesia dari tahun 2001 hingga 2007 dan Direktur PT Kaltim Prima Coal dari tahun 2003 hingga 2007. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Gallo Oil dari tahun 2000 hingga saat ini.

Beliau ditunjuk sebagai Direktur PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2000 hingga 2012 dan ditunjuk kembali pada tahun 2013. Pada tahun 2013 beliau ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Pendopo Energy Batu bara (PEB) hingga saat ini.

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, 21 Juni 1956.

Eddie Junianto Subari graduated from the University of Indonesia, Faculty of Economics, majoring in Accounting. He started his career as accountant, auditor and in the field of Capital Markets from 1984 to 1997. He joined the Bakrie Group in 1997 and served several positions, such as the Head of Corporate Finance in PT Bakrie Capital Indonesia, a Commissioner of PT Bumi Modern (now PT Bumi Resources Tbk) in 1997, as Director of PT Arutmin Indonesia from 2001 to 2007 and Director of PT Kaltim Prima Coal from 2003 to 2007. He has also been serving as a Director of Gallo Oil from 2000 to present.

Mr Subari was appointed as Director of PT Bumi Resources Tbk in 2000 to 2012 and reappointed in 2013. In 2013 he was also appointed as President Director of PT Pendopo Energi Batu bara (PEB).

An Indonesian citizen, he was born in Surabaya, June 21, 1956.



R.A. Sri Dharmayanti

Direktur
Director

R.A. Sri Dharmayanti mulai bertugas sebagai Direktur Perseroan dari tahun 2013. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bakrie & Brothers Tbk, dan sebagai Komisaris di PT Kaltim Prima Coal maupun di PT Arutmin Indonesia sejak tahun 2007.

Beliau adalah Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI), Anggota Dewan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API), Anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Anggota Tim Penilai Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Anggota ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association).

Sebelum penunjukan sebagai Direktur Perseroan, beliau bertugas sebagai Chief Legal Officer di PT Bumi Resources Tbk.

Beliau mendapatkan gelar Master of Law dari Universitas Indonesia.

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1962.

R.A. Sri Dharmayanti serves as the Company's Director since 2013. She is also serves as Director and Corporate Secretary of PT Bakrie & Brothers Tbk since 2008, and Commissioner of both PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia since 2007.

She is a Member of the Advisory Board of the Indonesian Coal Mining Association (ICMA), Board Member of Indonesian Mining Association (IMA), member of Association of Indonesian Mining Professionals (PERHAPI), member of assessment team of the Indonesia Public Listed Companies Association (AEI), and advisor of Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Prior to her appointment as the Company's Director, she is Chief Legal Officer of PT Bumi Resources Tbk.

She obtained Master of Law from Universitas Indonesia.

An Indonesian citizen, she was born in Jakarta on 1 March 1962.

Kenneth Patrick Farrell mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2004. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal sejak 2007, dan merupakan Direktur Independen dari WestSide Corporation Ltd, sebuah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Australia (ASX) dan Chairman dari Herald Resources juga tercatat di ASX.

Mulai tahun 2010 sampai dengan pertengahan 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk dan kemudian menjadi Direktur/Wakil Presiden Direktur pada perusahaan yang sama sampai Juni 2013. Mulai berkarir di tahun 1980 untuk BHP Billiton Limited selama 21 tahun dan bertugas pada berbagai posisi eksekutif dan manajerial pada bidang usaha bijih besi, transportasi, mangan, dan batu bara. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah Presiden Direktur BHP Billiton Coal Indonesia

Beliau memegang gelar sarjana di bidang Teknik dan Perdagangan dari University of Queensland dan memiliki ijazah pascasarjana dalam bidang Company Directorship dari University of New England. Beliau adalah Anggota Institution of Engineers, Australia, anggota dari The Australian Institute of Mining and Metallurgy, dan anggota dari Australian Institute of Company Directors.

Warga negara Australia, lahir di Toowoomba, Australia pada tanggal 22 Juli 1955.

Kenneth Patrick Farrell has served as a Director of the Company since 2004. He is also a Commissioner of PT Arutmin and PT Kaltim Prima Coal since 2007. He was formerly an Independent Director of WestSide Corporation Ltd, an ASX company, as well as Chairman of Herald Resources Ltd, formerly an ASX company.

From 2010 to 2012, he was President Director of PT Bumi Resources Minerals Tbk and then Director/ Vice President Director in the same company until June 2013.

He began his career in 1980 with BHP Billiton Ltd for 21 years with several executive and managerial positions in iron ore, transportation, manganese, and coal. Immediately prior to joining the Company, he was President Director of BHP Billiton Coal Indonesia.

He holds bachelor's degrees in both Engineering and Commerce from the University of Queensland and has a postgraduate diploma in the field of Company Directorship from the University of New England. He is a Member of the Institution of Engineers, Australia, a Member of The Australian Institute of Mining and Metallurgy, and a Fellow of the Australian Institute of Company Directors.

An Australian citizen, he was born in Toowoomba, Australia on 22 July 1955.



Kenneth P. Farrell

Direktur
Director

PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE PROFILE



Iman Taufik

Ketua
Chairman

Iman Taufik menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2001. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Baramulti Sukessarana Tbk, pendiri dan Komisaris PT Gunanusa Utama Fabricators, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Engineering R.J. Brown & Associates di Singapura.

Beliau juga pendiri PT Tripatra Engineering. Beliau dianugerahi Satya Lencana Pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia atas usahanya dalam mengembangkan teknologi lepas pantai. Beliau lulus dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1967. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1942.

Iman Taufik has served as the Company's Commissioner since 2001. He also served as Independent Commissioner of PT Baramulti Sukessarana Tbk, founder and Commissioner of PT Gunanusa Utama Fabricators, after the position of Director of Engineering at R.J. Brown & Associates in Singapore.

He is the founder of PT Tripatra Engineering. He was awarded the Satya Lencana Pembangunan Medal by the President of the Republic of Indonesia on his efforts in developing the offshore technology. He graduated from Mechanical Engineering, Institute of Technology Bandung (ITB) in 1967. An Indonesian citizen, he was born in Jakarta on 24 April 1942.



Myrnie Zachraini

Anggota Independen
Independent Party

Myrnie Zachraini diangkat menjadi anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk sejak 1 April tahun 2012. Beliau telah memiliki pengalaman bekerja selama 20 tahun di Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers Indonesia. Pernah aktif sebagai anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia, sekarang beliau adalah Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia. Selain itu juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, dan anggota Komite Audit di PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, jurusan akuntansi dan Magister Bisnis dan Hukum Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung dan berkewarganegaraan Indonesia.

Myrnie Zachraini was appointed as a member of Audit Committee of PT Bumi Resources Tbk since 1 April 2012. He has 20 years experience in the Public Accounting Firm PricewaterhouseCoopers Indonesia. She was an active member of Indonesian Institute of Certified Public Accountants, and now she is a Board Member of Indonesian Audit Committee Association. She is also an Independent Commissioner of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, and Audit Committee member of PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

She graduated from the Faculty of Economics, University of Indonesia, Jakarta, majoring in accounting and has a Masters in Business and Business Law, from the University of Padjadjaran, Bandung and an Indonesian citizenship.



Mulyadi

Anggota Independen
Independent Party

Mulyadi diangkat menjadi anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk sejak 1 April 2012. Saat ini beliau juga menjadi partner di Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan sejak tahun 2000 dan anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor sejak 2004 sampai dengan sekarang. Sebelum bergabung dengan PT Bumi Resources Tbk, beliau telah memiliki pengalaman sebagai konsultan manajemen selama 35 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971 dan Master of Science in Management and Administrative Sciences dari the University of Texas at Dallas, Amerika Serikat pada tahun 1983.

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1947.

Mulyadi was appointed as a member of Audit Committee of PT Bumi Resources Tbk since 1 April 2012. Currently he is also partner in Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah and Partners since 2000 and Board member of Qualified Internal Auditor Certification since 2004. Prior to joining PT Bumi Resources Tbk, he has 35 years of experience in management consultancy.

He obtained a Bachelor's degree in Accounting from the Faculty of Economics and Business, Gadjah Mada University in 1971 and a Master of Science in Management and Administrative Sciences from the University of Texas at Dallas, USA in 1983.

An Indonesian citizen, he was born in 1947

ALAMAT PERUSAHAAN CORPORATE ADDRESS

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

PT Bumi Resources Tbk
Bakrie Tower, 12th Floor
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia
Tel. +62 21 5794 2080
Fax. +62 21 5794 2070
www.bumiresources.com

PT Arutmin Indonesia

Bakrie Tower, 14th Floor
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

PT Kaltim Prima Coal

M1 Building Mine Site
Sangatta, Kutai Timur
Kalimantan Timur
Indonesia
Tel. +62 549 521155
Fax. +62 549 521701
www.kpc.co.id

Gallo Oil (Jersey) Ltd.

Bakrie Tower, 15th Floor
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

PT Fajar Bumi Sakti

Menara Kadin Indonesia, 29th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said, X-5, Kav. 2-3
Jakarta 12950
Indonesia

PT Pendopo Energi Batu bara

Gedung Menara Anugerah 17th Floor
Kantor Taman E. 3.3
Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan
Tel. +62 21 57942310/11/12
Fax. +62 21 57942309
www.pendopocoal.com

PT Bumi Resources Minerals Tbk

Bakrie Tower, 6th & 10th Floor
Rasuna Epicentrum Complex
Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan
Jakarta 12940
Tel. +62 21 5794 5698
Fax. +62 21 5794 5687
www.bumiresourcesminerals.com



**LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI 2014**
CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT 2014

Laporan Keuangan Konsolidasian
Beserta Laporan Auditor Independen
31 Desember 2014 dan 2013, dan
1 Januari 2013/31 Desember 2012, serta
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

*Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
December 31, 2014 and 2013, and
January 1, 2013/December 31, 2012, and
For the Years Ended
December 31, 2014 and 2013*

***PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES***

Daftar Isi**Table of Contents**

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position (balance sheets)</i>
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	5	<i>Consolidated statements of comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian	7	<i>Consolidated statements of changes in equity (capital deficiency)</i>
Laporan arus kas konsolidasian	8	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan Konsolidasian	9	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 31 DESEMBER 2013, DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2014,
DECEMBER 31, 2013, AND
JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Saptari Hoedaja
 Alamat kantor : PT BUMI Resources Tbk
 Bakrie Tower, lantai 12
 Komplek Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta 12940
 Alamat Rumah : Pancoran Baru VI/28, RT 007
 RW 006, Pancoran
 Jakarta Selatan
 Telepon : (021) 5794 2080
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Andrew Christopher Beckham
 Alamat kantor : PT BUMI Resources Tbk
 Bakrie Tower, lantai 12
 Komplek Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta 12940
 Alamat : Apt. Pavilion Tower 4 Unit 2302
 Jl. KH. Mas. Mansyur Kav 24
 Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 5794 2080
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BUMI Resources Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BUMI Resources Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BUMI Resources Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT BUMI Resources Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BUMI Resources Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Saptari Hoedaja
Direktur Utama / President Director



Andrew C Beckham
Direktur / Director

We, the undersigned:

1. Name : Saptari Hoedaja
 Office address : PT BUMI Resources Tbk
 Bakrie Tower, 12th floor
 Komplek Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta 12940
 Residential address : Pancoran Baru VI/28, RT 007
 RW 006, Pancoran
 Jakarta Selatan
 Telephone : (021) 5794 2080
 Title : President Director
2. Name : Andrew Christopher Beckham
 Office address : PT BUMI Resources Tbk
 Bakrie Tower, 12th floor
 Komplek Rasuna Epicentrum
 Jl. H.R. Rasuna Said
 Jakarta 12940
 Residential address : Apt. Pavilion Tower 4 Unit 2302
 Jl. KH. Mas. Mansyur Kav 24
 Jakarta Pusat
 Telephone : (021) 5794 2080
 Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT BUMI Resources Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements;
2. PT BUMI Resources Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in PT BUMI Resources Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. PT BUMI Resources Tbk and Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. We are responsible for PT BUMI Resources Tbk and Subsidiaries' internal control system.

This statement is made in all truth.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. AD15/P.TY3/06.26.02

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Bumi Resources Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bumi Resources Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. AD15/P.TY3/06.26.02

The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Bumi Resources Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bumi Resources Tbk (the "Company") and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2014, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Y. Santosa dan Rekan

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bumi Resources Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bumi Resources Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2014, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Y. Santosa dan Rekan

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan-catatan atas laporan konsolidasian berikut ini:

- a. Laporan keuangan konsolidasian terlampir telah disusun dengan asumsi bahwa Kelompok Usaha akan melanjutkan kelangsungan usahanya secara berkesinambungan. Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah liabilitas lancar konsolidasian telah melebihi jumlah aset lancar konsolidasian, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mengalami wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dengan gagal bayar atas pokok pinjaman tertentu dan/atau bunganya pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut juga diungkapkan dalam Catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ketidakpastian tersebut.
- b. Seperti diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo), Entitas Anak, telah menunda kegiatan operasinya di Yaman sejak bulan Januari 2011. Pemulihan nilai tercatat aset tergantung pada penyelesaian situasi di Yaman dan hasil aktivitas eksplorasi yang akan dilakukan di masa mendatang, yang hasilnya mungkin substansial tetapi belum dapat ditentukan saat ini. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ketidakpastian tersebut.

Emphasis of matters

We draw attention to the following Notes to the consolidated financial statements:

- a. *The accompanying consolidated financial statements have been prepared assuming that the Group will continue as a going concern. As of December 31, 2014, the Group has incurred capital deficiency attributable to the owners of the parent and the consolidated total current liabilities have exceeded its consolidated total current assets as disclosed in Note 54 to the consolidated financial statements. Furthermore, as discussed in Note 54 to the consolidated financial statements, the Group has incurred defaults under certain loan agreements due to non-payment of certain outstanding principal and/or interest amounts on due dates. These conditions, along with other matters as set forth in Note 54 to the consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern. Management's plans in regard to these matters are also described in Note 54 to the consolidated financial statements. The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.*
- b. *As disclosed in Note 18 to the consolidated financial statements, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo), a Subsidiary, has suspended its operations in Yemen since January 2011. The recoverability of the carrying value of the assets is dependent on the outcome of the uncertain situation in Yemen and the results of the exploratory works to be carried out in the future, the impact of which may be substantial but is not presently determinable. The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.*

Y. Santosa dan Rekan

- c. Seperti diungkapkan dalam Catatan 49 dan 50 atas laporan keuangan konsolidasian, Entitas Anak tertentu, yaitu PT Dairi Prima Mineral (Dairi), PT Citra Palu Minerals (CPM) dan PT Gorontalo Minerals (GM), menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi emas dan mineral lainnya di seluruh wilayah yang tercakup dalam wilayah konsesi yang berada dalam wilayah hutan lindung. Undang-undang Kehutanan No. 41, yang mulai berlaku sejak tahun 1999, melarang eksploitasi sumber daya alam di wilayah hutan lindung, termasuk wilayah KK yang diberikan sebelum deklarasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, Dairi, CPM dan GM masing-masing telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan eksplorasinya. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung memiliki batas waktu dan perlu diperpanjang. Selain itu, Entitas Anak tertentu, PT Mitra Bisnis Harvest, PT Buana Minera Harvest, PT MBH Mining Resource, PT Bintang Mineral Resource dan PT Citra Jaya Nurcahya, masing-masing telah memperoleh izin pertambangan untuk eksplorasi dan eksploitasi batubara di wilayah pertambangan mereka. Izin tersebut memiliki batas waktu dan perlu diperpanjang. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, semua Entitas Anak tersebut sedang dalam proses untuk memiliki izin perpanjangan. Manajemen berkeyakinan bahwa Entitas Anak tersebut akan dapat melanjutkan kegiatan mereka di wilayah pertambangan mereka. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ketidakpastian tersebut.
- d. Seperti diungkapkan dalam Catatan 43 dan 50 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjensi berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnis normal, termasuk pemeriksaan perpajakan, yang kini masih tertunda hasilnya atau sedang dalam proses di pengadilan atau Otoritas Pajak, dan hasil akhirnya mungkin substansial, tetapi belum dapat ditentukan saat ini.
- c. *As disclosed in Notes 49 and 50 to the consolidated financial statements, certain Subsidiaries, PT Dairi Prima Mineral (Dairi), PT Citra Palu Minerals (CPM) and PT Gorontalo Minerals (GM), have entered into Contracts of Work (CoW) with the Government of the Republic of Indonesia (GOI) for the exploration and exploitation of gold and other supplemental minerals in concession areas that fall within protected forests. Forestry Law No. 41, which became effective in 1999, prohibits the exploitation of natural resources within areas of protected forest, including for those CoWs that were granted prior to the declaration. As of December 31, 2014, Dairi, CPM and GM have each obtained a land-use permit within their respective protected forest areas to undertake their mining and exploration activities. The land-use permits have a limited period of validity and need to be extended. In addition, certain Subsidiaries, PT Mitra Bisnis Harvest, PT Buana Minera Harvest, PT MBH Mining Resource, PT Bintang Mineral Resource and PT Citra Jaya Nurcahya, have each obtained a mining exploration permit for the exploration and exploitation of coal in their respective mining areas. The permits have a limited period of validity and need to be extended. As of the completion date of the consolidated financial statements, all of the said Subsidiaries are in the process to obtain the relevant extension permits. The management believes that these Subsidiaries will be able to continue their activities in their respective mining areas. The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.*
- d. *As disclosed in Notes 43 and 50 to the consolidated financial statements, the Group is contingently liable for various claims from third parties arising from the ordinary conduct of business, including tax assessments, the results of which are either pending or being processed by the court or Tax Authorities, and while those outcomes may be substantial, they are not presently determinable.*

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

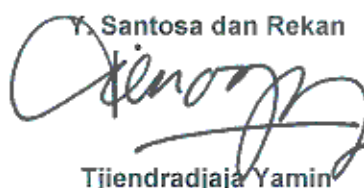
Y. Santosa dan Rekan

Hal lainnya

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 28 Maret 2014. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012 berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 27 Maret 2013.

Other matter

The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2013 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements on March 28, 2014. The consolidated statement of financial position as of January 1, 2013/December 31, 2012 was derived from the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2012 and for the year then ended, which were audited by other independent auditors who expressed a qualified opinion on such consolidated financial statements on March 27, 2013.

Y. Santosa dan Rekan


Tjiendradjaja Yamin

Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP.0384

26 Juni 2015 / June 26, 2015

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013, DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)

PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
DECEMBER 31, 2014 AND 2013, AND
JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)

		31 Desember/December 31,		1 Januari/ January 1, 2013	
	Catatan/ Notes	2014	2013 *)	31 Desember/ December 31, 2012 *)	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas	2d,2f,5	32.522.988	45.553.173	45.155.693	Cash
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	2e,2f,6	35.821.047	72.165.906	100.070.232	Restricted cash in banks
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2f,7	-	-	246.784.375	Available-for-sale financial assets
Wesel tagih	2f,8	-	254.026.670	111.034.424	Notes receivable
Aset derivatif	2f,32	-	10.891.082	111.673.516	Derivative assets
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar USD7.444.754 pada tanggal 31 Desember 2014, dan USD5.929.932 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012)					Trade receivables (net of allowance for impairment loss of USD7,444,754 as of December 31, 2014, and USD5,929,932 as of December 31, 2013 and 2012)
Pihak ketiga	2f,9	644.357.259	429.997.779	298.052.748	Third parties
Piutang lain-lain (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar USD1.134.018 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan USD924.987 pada tanggal 31 Desember 2012)	2f,10				Other receivables (net of allowance for impairment loss of USD1,134,018 as of December 31, 2014 and 2013, and USD924,987 as of December 31, 2012)
Pihak ketiga		285.084.286	55.163.479	39.295.125	Third parties
Pihak berelasi	2aa,44a	766.343	957.559	2.420.285	Related parties
Piutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2f,20				Current maturities of long-term receivables
Pihak ketiga		408.241.409	-	-	Third party
Piutang pihak berelasi	2f,2aa	-	-	44.906	Due from related parties
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar USD5.875.722 pada tanggal 31 Desember 2014, USD6.381.678 pada tanggal 31 Desember 2013, dan USD6.067.145 pada tanggal 31 Desember 2012)	2g,11	119.465.537	187.716.172	274.653.620	Inventories (net of allowance for inventory obsolescence of USD5,875,722 as of December 31, 2014, USD6,381,678 as of December 31, 2013, and USD6,067,145 as of December 31, 2012)
Tagihan pajak	43a	685.129.328	736.759.610	829.617.369	Taxes recoverable
Biaya dibayar dimuka	2h,12	9.758.853	8.257.214	8.931.049	Prepaid expenses
Kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	2o,13	97.652.734	104.206.977	164.860.399	Disposal group classified as held for sale
Aset lancar lainnya	14	28.091.923	38.541.156	30.617.067	Other current assets
Total Aset Lancar		2.346.891.707	1.944.236.777	2.263.210.808	Total Current Assets

*) Direklasifikasi (Catatan 51)

*) As Reclassified (Note 51)

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013, DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
DECEMBER 31, 2014 AND 2013, AND
JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,		1 Januari/ January 1, 2013	
		2014	2013 *)	31 Desember/ December 31, 2012 *)	
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang pihak berelasi	2f,2aa,44b	48.497.053	77.074.970	91.023.010	Due from related parties
Aset pajak tangguhan - neto	2x,43f	189.235.427	289.510.203	163.748.343	Deferred tax assets - net
Investasi pada entitas asosiasi	2i,15,44c	1.146.541.596	1.190.462.635	1.230.803.305	Investments in associates
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar USD1.180.294.427 pada tanggal 31 Desember 2014, USD1.260.878.630 pada tanggal 31 Desember 2013, dan USD1.121.969.295 pada tanggal 31 Desember 2012)	2j,16	683.863.808	859.994.392	887.999.585	Fixed assets (net of accumulated depreciation of USD1,180,294,427 as of December 31, 2014, USD1,260,878,630 as of December 31, 2013, and USD1,121,969,295 as of December 31, 2012)
Properti pertambangan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar USD285.659.707 pada tanggal 31 Desember 2014, USD282.781.305 pada tanggal 31 Desember 2013, dan USD214.095.084 pada tanggal 31 Desember 2012)	2k,17	839.524.043	844.691.351	864.710.441	Mining properties (net of accumulated amortization of USD285,659,707 as of December 31, 2014, USD282,781,305 as of December 31, 2013, and USD214,095,084 as of December 31, 2012)
Aset eksplorasi dan evaluasi (setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai sebesar USD236.683.233 pada tanggal 31 Desember 2014)	2l,18	538.121.991	756.018.507	431.061.409	Exploration and evaluation assets (net of accumulated impairment loss of USD236,683,233 as of December 31, 2014)
Tagihan pajak penghasilan	2x,43b	90.213.598	68.291.875	66.826.909	Claims for income tax refund
Goodwill - neto	2c,19	308.277.116	308.277.116	308.277.116	Goodwill - net
Piutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2f,20				Long-term receivables - net of current maturities
Pihak ketiga		68.084.827	425.117.922	369.164.153	Third parties
Pihak berelasi	2aa,44h	22.405.721	15.894.016	8.805.936	Related party
Aset tidak lancar lainnya	2f,21				Other non-current assets
Pihak ketiga		214.004.859	219.064.223	666.191.719	Third parties
Pihak berelasi	2aa,44a,44c	4.867.172	5.274.128	2.504.473	Related parties
Total Aset Tidak Lancar		4.153.637.211	5.059.671.338	5.091.116.399	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		6.500.528.918	7.003.908.115	7.354.327.207	TOTAL ASSETS

*) Direklasifikasi (Catatan 51)

*) As Reclassified (Note 51)

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013, DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
DECEMBER 31, 2014 AND 2013, AND
JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	2013 *)	1 Januari/ January 1, 2013 31 Desember/ December 31, 2012 *)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka pendek	2f,22	193.897.249	195.894.107	98.693.467	Short-term loans
Utang usaha	2f,23				Trade payables
Pihak ketiga		593.176.351	173.663.160	198.617.580	Third parties
Pihak berelasi	2aa,44d	91.172.585	75.913.920	120.265.878	Related parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	2f,24	309.483.194	147.178.079	68.478.120	Third parties
Utang kepada Pemerintah Indonesia	2f,25	728.211.623	1.012.028.374	948.138.192	Due to Government of Indonesia
Beban masih harus dibayar	2f,26	447.918.459	419.751.892	261.917.259	Accrued expenses
Utang pajak	2x,43d	316.947.063	170.353.901	143.863.254	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman jangka panjang	2f,30	3.582.418.484	1.563.525.493	470.246.275	Long-term loans
Utang sewa pembiayaan	2f,2p,27	41.775.754	53.491.476	64.835.095	Finance lease payables
Taksiran liabilitas restorasi dan rehabilitasi	2q,28	14.425.071	11.233.325	9.677.256	Estimated liability for restoration and rehabilitation
Premi penebusan	2f,30	-	434.852.158	87.326.162	Accrued redemption premium
Obligasi konversi	2f,31	375.000.000	371.835.409	-	Convertible bonds
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	2o,13	104.247.515	90.193.039	87.385.043	Liabilities directly associated with disposal group classified as held for sale
Total Liabilitas Jangka Pendek		6.798.673.348	4.719.914.333	2.559.443.581	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang pihak berelasi	2aa, 2f,44e	67.815.582	78.568.187	98.881.666	Due to related parties
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2x,43f	76.390.366	103.072.761	125.446.954	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan pasti pascakerja	2r,29	31.093.312	32.997.064	34.989.405	Post-employment benefit liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	2f,30	191.768	2.032.136.710	3.144.995.644	Long-term loans
Utang sewa pembiayaan	2f,2p,27	82.475.998	134.796.912	131.421.777	Finance lease payables
Taksiran liabilitas restorasi dan rehabilitasi	2q,28	176.929.902	205.381.683	197.352.104	Estimated liability for restoration and rehabilitation
Premi penebusan	2f,30	-	-	302.682.722	Accrued redemption premium
Obligasi konversi	2f,31	-	-	366.963.651	Convertible bonds
Total Liabilitas Jangka Panjang		434.896.928	2.586.953.317	4.402.733.923	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		7.233.570.276	7.306.867.650	6.962.177.504	Total Liabilities

*) Direklasifikasi (Catatan 51)

*) As Reclassified (Note 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013, DAN
1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
DECEMBER 31, 2014 AND 2013, AND
JANUARY 1, 2013/DECEMBER 31, 2012
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2014	31 Desember/ December 31, 2013 *)	1 Januari/ January 1, 2013 31 Desember/ December 31, 2012 *)	
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity (Capital Deficiency) Attributable to the Owners of the Parent
Modal saham					Capital stock
Modal dasar - 304.406.400.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, dan 77.500.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012					Authorized capital - 304,406,400,000 shares as of December 31, 2014, and 77,500,000 shares as of December 31, 2013 and 2012
Ditempatkan dan disetor penuh - 36.627.020.427 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014, dan 20.773.400.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012	33	1.614.650.269	1.476.792.700	1.476.792.700	Issued and fully paid - 36,627,020,427 shares as of December 31, 2014, and 20,773,400,000 shares as of December 31, 2013 and 2012
Tambahan modal disetor - neto	2s,2u,34	(672.000.931)	(878.787.284)	(878.787.284)	Additional paid-in capital - net
Saham beredar yang diperoleh kembali	2t,35	(34.159.759)	(34.159.759)	(34.159.759)	Treasury stock
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak/entitas asosiasi	2v,4h	(27.756.685)	(27.756.685)	(27.756.685)	Difference in the change in equity transaction of a Subsidiary/associate
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas pengendalian bersama	2v,4a	(306.833.020)	-	-	Difference in the change in equity transaction in jointly controlled entities
Cadangan modal lainnya	2f,2y,36	11.593.231	13.318.770	47.865.414	Other capital reserves
Saldo laba (defisit)					Retained earnings (deficit)
Dicadangkan		417.634.883	417.634.883	417.634.883	Appropriated
Belum dicadangkan		(1.847.677.274)	(1.459.689.117)	(850.675.199)	Unappropriated
Ekuitas (Defisiensi Modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		(844.549.286)	(492.646.492)	150.914.070	Equity (Capital Deficiency) attributable to the owners of the parent
Kepentingan Nonpengendali	2b,37	111.507.928	189.686.957	241.235.633	Non-controlling Interest
Ekuitas (Defisiensi Modal) - Neto		(733.041.358)	(302.959.535)	392.149.703	Equity (Capital Deficiency) - Net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		6.500.528.918	7.003.908.115	7.354.327.207	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

*) Direklasifikasi (Catatan 51)

*) As Reclassified (Note 51)

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	Catatan/ Notes	2014	2013	
PENDAPATAN	2w,38	2.786.067.095	3.547.424.427	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2w,39,44f	<u>2.298.607.757</u>	<u>2.861.220.277</u>	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		<u>487.459.338</u>	<u>686.204.150</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	2w,40,44g			OPERATING EXPENSES
Penjualan		220.463.479	263.291.275	Selling
Umum dan administrasi		<u>204.039.394</u>	<u>192.865.760</u>	General and administrative
Total Beban Usaha		<u>424.502.873</u>	<u>456.157.035</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA		<u>62.956.465</u>	<u>230.047.115</u>	OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2w			OTHER INCOME (EXPENSES)
Laba (rugi) neto atas penjualan Entitas Anak	4e,4f	949.520.959	(50.429.227)	Net gain (loss) on sale of Subsidiaries
Laba (rugi) selisih kurs - neto	2y	127.098.786	(136.806.919)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	2f	59.325.906	56.942.150	Interest income
Beban bunga dan keuangan	2f,30,41a	(864.160.519)	(660.954.644)	Interest expenses and finance charges
Penurunan nilai Klaim	2n,18 41b	(238.456.830)	-	Impairment losses Claims
Denda dan koreksi pajak	43c	(120.308.938)	(29.882.415)	Tax penalties and corrections
Beban amortisasi	2f	(54.304.695)	(27.545.179)	Amortization expenses
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	2i,15	(43.921.039)	(40.340.672)	Equity in net loss of associates
Rugi atas transaksi derivatif - neto	2f	(3.446.501)	(100.782.434)	Loss on derivative transactions - net
Penghapusbukuan aset	16,21	-	(26.443.282)	Asset write-off
Lain-lain - neto	41c	<u>10.831.592</u>	<u>71.705.216</u>	Others - net
Beban Lain-lain - Neto		<u>(372.974.885)</u>	<u>(975.286.028)</u>	Other Expenses - Net
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		(310.018.420)	(745.238.913)	LOSS BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	2x,43e	<u>(155.886.244)</u>	<u>85.135.436</u>	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
RUGI NETO		<u>(465.904.664)</u>	<u>(660.103.477)</u>	NET LOSS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	Catatan/ Notes	2014	2013	
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2y	(1.988.061)	(2.135.013)	<i>Exchange differences due to financial statements translation</i>
Kenaikan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2f,7,21,36	-	5.793.835	<i>Increase in fair value of available-for-sale financial assets</i>
Penyelesaian aset keuangan tersedia untuk dijual	7	-	(38.664.561)	<i>Settlement of available-for-sale financial assets</i>
Beban Komprehensif Lain - Neto		(1.988.061)	(35.005.739)	<i>Other Comprehensive Loss - Net</i>
RUGI KOMPREHENSIF NETO		(467.892.725)	(695.109.216)	NET COMPREHENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(387.988.157)	(609.013.918)	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali	2b,37	(77.916.507)	(51.089.559)	<i>Non-controlling interest</i>
Total		(465.904.664)	(660.103.477)	Total
RUGI KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(389.713.696)	(643.560.562)	<i>Owners of the parent</i>
Kepentingan nonpengendali		(78.179.029)	(51.548.654)	<i>Non-controlling interest</i>
Total		(467.892.725)	(695.109.216)	Total
RUGI PER 1.000 SAHAM DASAR/DILUSIAN	2z,42	(15,33)	(30,00)	BASIC/DILUTED LOSS PER 1,000 SHARES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DECEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)**

Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity (Capital Deficiency) Attributable to the Owners of the Parent											
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahkan Modal Disetor - Neto/ Additional Paid-in Capital - net	Saham Beredar yang Diperoleh Kembali/ Treasury Stock	Selisih Transaksi	Selisih Transaksi	Cadangan Modal Lainnya/ Other Capital Reserves	Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Ekuitas (Defisiensi Modal) - Neto/ Equity (Capital Deficiency) - Net	
				Perubahan Ekuitas Entitas Anak/ Entitas Asosiasi/ Difference in the Change in Equity Transaction of a Subsidiary/ Associate	Perubahan Ekuitas Entitas Pengendalian Bersama/ Difference in the Change in Equity Transaction of Jointly Controlled Entities		Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated			
Saldo 1 Januari 2013	1.476.792.700	(878.787.284)	(34.159.759)	(27.756.685)	-	47.865.414	417.634.883	(850.675.199)	241.235.633	392.149.703	Balance as of January 1, 2013
Akuisisi Entitas Anak	4d	-	-	-	-	-	-	-	(22)	(22)	Acquisition of Subsidiaries
Rugi neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(609.013.918)	(51.089.559)	(660.103.477)	Net loss for the year
Pendapatan (beban) komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive income (loss) for the year:
Kenaikan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2f,7,36	-	-	-	-	5.793.835	-	-	-	5.793.835	Increase in fair value of available-for sale financial assets
Penyelesaian aset keuangan tersedia untuk dijual	7	-	-	-	-	(38.664.561)	-	-	-	(38.664.561)	Settlement of available-for-sale financial assets
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2y,36	-	-	-	-	(1.675.918)	-	-	(459.095)	(2.135.013)	Exchange differences due to financial statements translation
Saldo 31 Desember 2013	1.476.792.700	(878.787.284)	(34.159.759)	(27.756.685)	-	13.318.770	417.634.883	(1.459.689.117)	189.686.957	(302.959.535)	Balance as of December 31, 2013
Kenaikan modal saham	33	137.857.569	206.786.353	-	-	-	-	-	-	344.643.922	Increase in capital stock
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas pengendalian bersama	2v,4h	-	-	-	-	(306.833.020)	-	-	-	(306.833.020)	Difference in the change in equity transaction in jointly controlled entities
Rugi neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(387.988.157)	(77.916.507)	(465.904.664)	Net loss for the year
Beban komprehensif lain tahun berjalan:											Other comprehensive loss for the year:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2y,36	-	-	-	-	(1.725.539)	-	-	(262.522)	(1.988.061)	Exchange differences due to financial statements translation
Saldo 31 Desember 2014	1.614.650.269	(672.000.931)	(34.159.759)	(27.756.685)	(306.833.020)	11.593.231	417.634.883	(1.847.677.274)	111.507.928	(733.041.358)	Balance as of December 31, 2014

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	2.517.692.793	3.415.479.396	<i>Receipts from customers</i>
Penerimaan dari penghasilan bunga	8.030.015	7.118.938	<i>Receipts from interest income</i>
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(1.887.132.725)	(2.541.503.797)	<i>Payments to suppliers, employees and others</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(58.664.985)	(155.341.801)	<i>Payments of taxes</i>
Pembayaran kepada pemerintah	(372.600.073)	(277.686.806)	<i>Payments to government</i>
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(146.259.386)	(418.775.013)	<i>Payments of interests and finance charges</i>
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>61.065.639</u>	<u>29.290.917</u>	<i>Net Cash Flows Provided by Operating Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penurunan piutang pihak berelasi	28.577.917	13.992.946	<i>Decrease in due from related parties</i>
Penebusan aset derivatif	7.444.581	-	<i>Redemption of derivative asset</i>
Mutasi properti pertambangan	2.852.433	(50.076.578)	<i>Movements on mining properties</i>
Pembelian aset tetap	(39.943.936)	(36.491.162)	<i>Acquisitions of fixed assets</i>
Pembayaran biaya eksplorasi dan evaluasi	(13.664.759)	(9.465.492)	<i>Disbursements for exploration and evaluation assets</i>
Penerimaan dari penyelesaian wesel tagih	-	81.034.424	<i>Proceeds from settlement of notes receivable</i>
Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga	-	(1.191.917)	<i>Loans granted to third parties</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	83.141	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Penarikan deposito berjangka	-	2.052.483	<i>Withdrawal of time deposits</i>
Pengembalian dari biaya proyek pengembangan usaha	-	112.778.779	<i>Refund from business development project costs</i>
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>(14.733.764)</u>	<u>112.716.624</u>	<i>Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari pinjaman	61.800.000	79.333.332	<i>Proceeds from loans</i>
Penarikan kas di bank yang dibatasi penggunaannya	36.344.859	27.904.326	<i>Withdrawal of restricted cash in banks</i>
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(87.111.678)	(75.768.973)	<i>Payments of finance lease payables</i>
Pembayaran atas pinjaman	(36.369.461)	(151.152.606)	<i>Payments of loans</i>
Penurunan utang pihak berelasi	(33.252.605)	(20.313.479)	<i>Decrease in due to related parties</i>
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(58.588.885)</u>	<u>(139.997.400)</u>	<i>Net Cash Flows Used in Financing Activities</i>
EFEK PERUBAHAN NILAI KURS PADA KAS	<u>(773.175)</u>	<u>(1.612.661)</u>	EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS NETO	(13.030.185)	397.480	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS PADA AWAL TAHUN	<u>45.553.173</u>	<u>45.155.693</u>	CASH AT BEGINNING OF YEAR
KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>32.522.988</u></u>	<u><u>45.553.173</u></u>	CASH AT END OF YEAR

Lihat Catatan 52 atas laporan keuangan konsolidasian untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

See Note 52 to the consolidated financial statements for the supplemental disclosures of cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bumi Resources Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 1973 berdasarkan Akta Notaris No. 130 dan No. 103 tanggal 28 November 1973, keduanya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., notaris di Surabaya dan mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1973 melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/433/12 dan didaftarkan di Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1822/1973, No. 1823/1973, No. 1824/1973 tanggal 27 Desember 1973, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1, Tambahan No. 7, tanggal 2 Januari 1974. Perusahaan memulai kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 17 Desember 1979.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan adalah berdasarkan Akta Notaris No. 123 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., notaris di Jakarta Utara, dimana pemegang saham Perusahaan setuju untuk merubah pasal 3 ayat 2 huruf (e). Akta Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Keputusan No. AHU-59167.AH.01.02. Tahun 2011.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara (termasuk pertambangan dan penjualan batubara) dan eksplorasi minyak. Saat ini, Perusahaan merupakan entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang aktivitas pertambangan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok Usaha Bakrie.

Kelompok Usaha Bakrie (PT Bakrie & Brothers Tbk dan Long Haul Holdings Ltd.) dan Bumi plc (saat ini Asia Resources Minerals plc (ARM)) mengadakan Perjanjian *Relationship* pada tanggal 16 November 2010 yang telah diubah pada tanggal 16 Juni 2011. Perjanjian tersebut, antara lain, mengatur hubungan antara Kelompok Usaha Bakrie dan ARM terhadap Perusahaan. Berdasarkan perjanjian, Kelompok Usaha Bakrie memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Namun, pada tanggal 25 Maret 2014, ARM menyelesaikan transaksi pemisahan dengan Kelompok Usaha Bakrie, termasuk pelepasan kepemilikan 29,18% di Perusahaan oleh ARM, melalui Vallar Investments UK Limited, kepada Kelompok Usaha Bakrie. Setelah penyelesaian transaksi pemisahan, Perjanjian *Relationship* secara otomatis dihentikan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bumi Resources Tbk (the “Company”) was established in the Republic of Indonesia on June 26, 1973 based on Notarial Deeds No. 130 and No. 103 dated November 28, 1973, both made by Djoko Soepadmo, S.H., notary in Surabaya and approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. Y.A.5/433/12 on December 12, 1973, registered in the Registry Book of the District Court of Surabaya No. 1822/1973, No. 1823/1973, No. 1824/1973 dated December 27, 1973, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1, Supplement No. 7, dated January 2, 1974. The Company commenced its commercial operations on December 17, 1979.

The most recent amendment of Articles of Association was based on Notarial Deed No. 123 dated October 21, 2011, made by Humbert Lie, S.H., notary in North Jakarta, wherein the Company’s shareholders agreed to amend article 3 (2) point e. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on December 2, 2011 under Decision No. AHU-59167.AH.01.02. Tahun 2011.

According to the Company’s Articles of Association, its scope of activities comprises exploration and exploitation of coal deposits (including coal mining and selling) and exploration of oil. Currently, the Company is a holding company of subsidiaries engaged in mining activities.

The Company is part of the Bakrie Group.

The Bakrie Group (PT Bakrie & Brothers Tbk and Long Haul Holdings Ltd.) and Bumi plc (currently Asia Resources Minerals plc (ARM)) entered into the Relationship Agreement on November 16, 2010 with amendment on June 16, 2011. Among others, the agreement regulates the relationship of Bakrie Group and ARM over the Company. Based on the agreement, the Bakrie Group is considered to have the ability to determine, directly or indirectly, the management and/or policy of the Company and is, therefore, deemed to be a controller of the Company in accordance with Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 on Takeovers of Public Companies. However, on March 25, 2014, ARM completed its separation transaction with the Bakrie Group, which included the disposal by ARM of its 29.18% ownership interest in the Company, through Vallar Investments UK Limited, to the Bakrie Group. Following the completion of the separation transaction, the Relationship Agreement was automatically terminated.

1. UMUM (Lanjutan)

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Lantai 12, Gedung Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan dan Aksi Korporasi yang Mempengaruhi Efek yang Diterbitkan

Sifat Aksi Korporasi	Jumlah Saham/ Number of Shares	Tanggal Efektif/ Effective Date	Nature of Corporate Actions
Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya)	10.000.000	18 Juli 1990/ July 18, 1990	Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta and Surabaya Stock Exchanges)
Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	10.000.000	22 Februari 1993/ February 22, 1993	Rights Issue I with Preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	594.000.000	4 November 1997/ November 4, 1997	Rights Issue II with Preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	18.612.000.000	18 Februari 2000/ February 18, 2000	Rights Issue III with Preemptive Rights
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	1.369.400.000	30 September 2010/ September 30, 2010	Additional Capital through Non-preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	15.853.620.427	30 Juni 2014/ June 30, 2014	Rights Issue IV with Preemptive Rights

c. Pembelian Kembali (Buy-back) Saham Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 17 Mei 2006, pemegang saham menyetujui pembelian kembali saham Perusahaan yang beredar sampai jumlah maksimum sebanyak 1.940.400.000 saham. Pembelian kembali dilaksanakan dalam periode dari tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan 17 November 2007, selama periode tersebut sebanyak 1.364.966.000 saham telah dibeli kembali (Catatan 35).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 12 Juni 2008, pemegang saham menyetujui untuk menambah pembelian kembali saham Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 582.120.000 saham atau tidak lebih dari 3% dari saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan, dengan harga yang tidak melebihi dari Rp11.600 per saham. Pada tahun 2008, Perusahaan telah menambah pembelian kembali sahamnya sebanyak 412.913.500 saham (Catatan 35).

1. GENERAL (Continued)

The Company's head office is located at 12th Floor, Bakrie Tower Building, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

b. Public Offering of the Company's Shares and its Corporate Actions that Affected the Issued Shares

Sifat Aksi Korporasi	Jumlah Saham/ Number of Shares	Tanggal Efektif/ Effective Date	Nature of Corporate Actions
Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya)	10.000.000	18 Juli 1990/ July 18, 1990	Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta and Surabaya Stock Exchanges)
Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	10.000.000	22 Februari 1993/ February 22, 1993	Rights Issue I with Preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas II dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	594.000.000	4 November 1997/ November 4, 1997	Rights Issue II with Preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	18.612.000.000	18 Februari 2000/ February 18, 2000	Rights Issue III with Preemptive Rights
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	1.369.400.000	30 September 2010/ September 30, 2010	Additional Capital through Non-preemptive Rights
Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	15.853.620.427	30 Juni 2014/ June 30, 2014	Rights Issue IV with Preemptive Rights

c. Buy-back of the Company's Shares of Stock

Based on the Extraordinary General Shareholders' Meeting on May 17, 2006, the shareholders approved the buy-back of the Company's shares up to a maximum of 1,940,400,000 shares. The buy-back was undertaken during the period from October 11, 2006 to November 17, 2007, during which time, 1,364,966,000 shares were bought back (Note 35).

Based on the Extraordinary General Shareholders' Meeting on June 12, 2008, the shareholders approved the additional buy-back of the Company's shares up to a maximum of 582,120,000 shares, or not more than 3% of all issued and fully paid-up shares of the Company, at a price of not more than Rp11,600 per share. In 2008, the Company bought back additional 412,913,500 shares (Note 35).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan pada tanggal 21 Oktober 2011, pemegang saham menyetujui untuk menambah pembelian kembali saham Perusahaan sampai jumlah maksimum sebanyak 780.000.000 saham atau tidak lebih dari 3,75% dari saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan, dengan harga yang tidak melebihi dari Rp5.000 per saham (Catatan 35).

d. Entitas Anak, Entitas Pengendalian Bersama dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan mempunyai kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung pada Entitas Anak, entitas pengendalian bersama dan entitas asosiasi (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kelompok Usaha"):

1. GENERAL (Continued)

Based on the Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 21, 2011, the shareholders approved the additional buy-back of the Company's shares up to a maximum of 780,000,000 shares, or not more than 3.75% of all issued and fully paid-up shares of the Company, at a price of not more than Rp5,000 per share (Note 35).

d. Subsidiaries, Jointly Controlled Entities and Associates

As of December 31, 2014, the Company has direct and indirect share ownerships in the following Subsidiaries, jointly controlled entities and associates (together with the Company hereinafter referred to as the "Group"):

<u>Nama Entitas/ Name of Entity</u>	<u>Lokasi/ Location</u>	<u>Kegiatan Usaha Utama/ Principal Activity</u>	<u>Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation</u>
Entitas Anak/Subsidiaries			
Forerunner International Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Sangatta Holdings Limited	Republik Seychelles/ Republic of Seychelles	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Enercoal Resources Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Knightley Business Resources Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Bumi Capital Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Bumi Investment Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Ebury International Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Bumi Netherlands B.V.	Belanda/ Netherlands	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Kalimantan Coal Limited	Mauritius	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Gallo Oil (Jersey) Ltd.	Republik Yaman/ Republic of Yemen	Pertambangan Minyak/ Oil Mining	-
PT Sitrade Coal	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Lumbung Capital	Indonesia	Jasa/Service	-
PT Bumi Resources Minerals Tbk	Indonesia	Perusahaan Induk/ Holding Company	2003
PT Citra Prima Sejati	Indonesia	Jasa/Service	-
PT Bumi Resources Investment	Indonesia	Jasa/Service	-
PT Green Resources	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas/ Name of Entity	Lokasi/ Location	Kegiatan Usaha Utama/ Principal Activity	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation
PT Kaltim Prima CBM	Indonesia	Pertambangan Gas Metana Batubara/ Coal Bed Methane Mining	-
PT Arutmin CBM	Indonesia	Pertambangan Gas Metana Batubara/ Coal Bed Methane Mining	-
Calipso Investment Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Bumi Resources Japan Company Limited	Jepang/Japan	Jasa Pemasaran/ Marketing Services	2004
International Minerals Company LLC	Amerika Serikat/ United States of America	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Lemington Investments Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Gorontalo Minerals	Indonesia	Pertambangan Emas/Gold Mining	-
PT Citra Palu Minerals	Indonesia	Pertambangan Emas/Gold Mining	-
Herald Resources Pty. Ltd.	Australia	Pertambangan Batubara Seam Gas/ Coal Seam Gas Mining	-
PT Sarkea Prima Minerals	Indonesia	Jasa Pertambangan/ Mining Service	-
PT Multi Capital	Indonesia	Perdagangan/ Trading	-
PT Dairi Prima Mineral	Indonesia	Pertambangan Timah dan Seng/ Lead and Zinc Mining	-
PT Multi Daerah Bersaing	Indonesia	Perdagangan/ Trading	-
Pendopo Coal Ltd.	Republik Seychelles/ Republic of Seychelles	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Alphard Resources International	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Indah Alam Raya	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Pendopo Energi Batubara	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
Leap-Forward Resources Ltd.	Republik Seychelles/ Republic of Seychelles	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Leap Coal Indonesia	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Bara Milenia Energi	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Kutai Bara Nusantara (dahulu/formerly PT Fajar Bumi Sakti)	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	1999
PT Guruh Putera Bersama	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	2013
PT Tribara Daya Global	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Fajar Bumi Shipping	Indonesia	Pengapalan/ Shipping	2009
PT Ade Putra Tanrajang	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT Seamgas Indonesia	Indonesia	Kontraktor Pertambangan dan Eksplorasi Gas Metana/ Methane Gas Exploration and Mining Contractor	-
KPC CBM Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas/ Name of Entity	Lokasi/ Location	Kegiatan Usaha Utama/ Principal Activity	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation
Arutmin CBM Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Kalenergy Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Westprima Resources Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Knightley Seamgas Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Knightley CBM Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Sahara Resources Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
Gain & Win Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Buana Minera Harvest	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT MBH Mining Resource	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT Mitra Bisnis Harvest	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT MBH Minera Resources	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT Citra Jaya Nurcahya	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
PT Bintan Mineral Resource	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	-
<u>Entitas pengendalian bersama/ Jointly controlled entities</u>			
PT Arutmin Indonesia	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	1989
PT Kaltim Prima Coal	Indonesia	Pertambangan Batubara/ Coal Mining	1992
IndoCoal Resources (Cayman) Limited	Kepulauan Cayman/ Cayman Islands	Distributor Batubara/ Coal Distributor	2005
IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited	Kepulauan Cayman/ Cayman Islands	Distributor Batubara/ Coal Distributor	2014
PT IndoCoal Kalsel Resources	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT IndoCoal Kaltim Resources	Indonesia	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
<u>Entitas asosiasi/Associates</u>			
PT Newmont Nusa Tenggara	Indonesia	Pertambangan/ Mining	2000
PT Visi Multi Artha	Indonesia	Pertambangan Gas Metana Batubara/ Coal Bed Methane Mining	-
PT Artha Widya Persada	Indonesia	Pertambangan Gas Metana Batubara/ Coal Bed Methane Mining	-
Zurich Assets International Ltd.	Republik Seychelles/ Republic of Seychelles	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-
PT Darma Henwa Tbk	Indonesia	Kontraktor Pertambangan/ Mining Contractor	1993
Tansar Gas Pte. Ltd.	Singapura/ Singapore	Entitas Bertujuan Khusus/ Special Purpose Entity	-

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

Persentase kepemilikan efektif Perusahaan dan total aset sebelum eliminasi Entitas Anak, entitas pengendalian bersama dan entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

The Company's effective percentage of ownerships and total assets before elimination of the Subsidiaries, jointly controlled entities and associates as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Nama Entitas/ Name of Entity	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest		Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Eliminations	
	2014 (%)	2013 (%)	2014	2013
Entitas Anak/Subsidiaries				
Forerunner International Pte. Ltd. (Forerunner) (langsung/direct)	100,00	100,00	1.589.002.541	1.814.888.651
Sangatta Holdings Limited (SHL) (langsung/direct)	100,00	100,00	624.529.396	680.744.566
Enercoal Resources Pte. Ltd. (langsung/direct)	100,00	100,00	48.321.954	37.186.211
Knightley Business Resources Pte. Ltd. (Knightley BR) (langsung/direct)	100,00	100,00	75.491	75.491
Bumi Capital Pte. Ltd. (langsung/direct)	100,00	100,00	321.000.000	303.000.000
Bumi Investment Pte. Ltd. (langsung/direct)	100,00	100,00	700.000.000	712.541.667
Ebury International Pte. Ltd. (langsung/direct)	100,00	100,00	2	2
Bumi Netherlands B.V. (langsung/direct)	100,00	100,00	1.102.048.032	1.803.219.923
Kalimantan Coal Limited (KCL) (langsung/direct)	99,99	99,99	622.692.473	673.979.391
Gallo Oil (Jersey) Ltd. (langsung/direct) ^a	100,00	100,00	112.524.658	182.996.028
PT Sitrade Coal (Sitrade) (langsung/direct)	99,99	99,99	126.733.519	381.798.517
PT Lumbung Capital (Lumbung) (langsung/direct)	99,80	99,80	166.796.781	198.243.621
Mountain Netherlands Investments B.V. (langsung/direct)	-	99,99	-	1
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) ^f (langsung/direct)	87,09	87,09	1.863.530.821	1.887.138.264
(melalui/through Lumbung)	0,00	0,00		
PT Citra Prima Sejati (CPS) (langsung/direct)	99,75	99,75	92.014.896	129.810.134
(melalui/through Sitrade)	0,25	0,25		
PT Bumi Resources Investment (BRI) (langsung/direct)	99,99	99,99	530.589.876	616.431.214
(melalui/through CPS)	0,01	0,01		
PT Green Resources (GR) (melalui/through BRI)	99,50	99,50	19.645.382	20.112.703
PT Kaltim Prima CBM (langsung/direct)	99,00	99,00	846.249	830.975
(melalui/through Sitrade)	1,00	1,00		
PT Arutmin CBM (langsung/direct)	99,00	99,00	8.355	8.204
(melalui/through Sitrade)	1,00	1,00		

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas/ Name of Entity	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest		Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Eliminations	
	2014 (%)	2013 (%)	2014	2013
Calipso Investment Pte. Ltd. (Calipso) (langsung/direct) (melalui/through BRMS)	0,01 87,08	0,01 87,08	541.267.558	539.101.991
Bumi Resources Japan Company Limited (BRJ) (melalui/through BRMS)	87,09	87,09	52.394.248	54.390.612
International Minerals Company LLC (IMC) (melalui/through BRMS)	87,09	87,09	44.005.668	36.736.506
Lemington Investments Pte. Ltd. (Lemington) (langsung/direct) (melalui/through BRMS)	0,01 87,08	0,01 87,08	2.614.702	7.614.702
PT Gorontalo Minerals (GM) (melalui/through IMC) ^c	69,67	69,67	44.005.668	36.736.506
PT Citra Palu Minerals (CPM) ^c (langsung/direct) (melalui/through BRMS)	3,03 84,45	3,03 84,45	13.452.829	12.120.196
Herald Resources Pty. Ltd. (Herald) (melalui/through Calipso)	87,09	87,09	194.693.862	192.535.150
PT Sarkea Prima Minerals (melalui/through Calipso) (melalui/through BRMS)	69,67 17,42	69,67 17,42	477.458	456.894
PT Multi Capital (MC) (melalui/through BRMS) (melalui/through GR)	87,00 0,09	87,00 0,09	1.129.994.915	1.133.140.713
PT Dairi Prima Mineral (Dairi) ^b (melalui/through Herald)	69,67	69,67	173.566.284	168.993.088
PT Multi Daerah Bersaing (MDB) (melalui/through MC)	65,33	65,33	1.120.585.993	1.086.222.231
Pendopo Coal Ltd. (PCL) (melalui/through BRI)	89,00	89,00	9.431.869	8.944.087
PT Alphard Resources International (ARI) (melalui/through PCL)	89,00	89,00	9.431.869	8.913.323
PT Indah Alam Raya (IAR) (melalui/through ARI)	89,00	89,00	9.431.869	8.913.323
PT Pendopo Energi Batubara (PEB) (melalui/through IAR)	84,55	84,55	9.431.869	8.913.323
Leap-Forward Resources Ltd. (Leap-Forward) (melalui/through BRI)	50,00	50,00	97.344.105	103.989.530
PT Leap Coal Indonesia (LCI) (melalui/through Leap-Forward)	50,00	50,00	101.445.175	97.973.330
PT Bara Milenia Energi (BME) (melalui/through LCI)	50,00	50,00	101.448.422	103.424.602
PT Kutai Bara Nusantara (KBN) ^e (dahulu/formerly PT Fajar Bumi Sakti (FBS)) (melalui/through BME)	50,00	50,00	92.873.877	89.915.576
PT Guruh Putera Bersama (GPB) (melalui/through KBN)	47,45	47,45	24.840.298	22.038.267

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas/ Name of Entity	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest		Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Eliminations	
	2014 (%)	2013 (%)	2014	2013
PT Tribara Daya Global (TDG) (melalui/through KBN)	50,00	50,00	278.602	294.299
PT Fajar Bumi Shipping (FB Shipping) (melalui/through KBN)	50,00	50,00	8.092.127	8.092.127
PT Ade Putra Tanrajeng (APT) (melalui/through TDG)	49,85	49,85	1.016.222	968.314
PT Seamgas Indonesia (PTSI) (melalui/through Knightley BR) (melalui/through Knightley Seamgas)	50,00 50,00	50,00 50,00	74.498	74.498
KPC CBM Pte. Ltd. (KPC-CBM) (melalui/through Knightley BR) (melalui/through Knightley Seamgas)	50,00 50,00	50,00 50,00	2	2
Arutmin CBM Pte. Ltd. (Arutmin-CBM) (melalui/through Knightley BR) (melalui/through Knightley Seamgas)	50,00 50,00	50,00 50,00	2	2
Kalenergy Pte. Ltd. (Kalenergy) (melalui/through Knightley BR) (melalui/through Knightley Seamgas)	50,00 50,00	50,00 50,00	2	2
Westprima Resources Pte. Ltd. (Westprima) (melalui/through Knightley BR) (melalui/through Knightley Seamgas)	50,00 50,00	50,00 50,00	2	1.979.326
Knightley Seamgas Pte. Ltd. (Knightley Seamgas) (melalui/through Knightley BR)	100,00	100,00	1.979.326	1.979.326
Knightley CBM Pte. Ltd. (Knightley CBM) (melalui/through Knightley BR)	100,00	100,00	1	1
Sahara Resources Pte. Ltd. (Sahara) (melalui/through BRMS)	87,09	87,09	2	2
Gain & Win Pte. Ltd. (Gain) (melalui/through Herald)	87,09	87,09	134.700.262	136.139.019
PT Buana Minera Harvest (BMH) ^a (melalui/through CPS)	99,96	99,96	7.922	10.330
PT MBH Mining Resource (MBH Mining) ^a (melalui/through CPS)	99,92	99,92	5.084	6.687
PT Mitra Bisnis Harvest (MBH) ^a (melalui/through CPS)	99,69	99,69	7.905	10.168
PT MBH Minera Resources (MBH Minera) ^a (melalui/through Lumbung)	99,97	99,97	10.342	11.334
PT Citra Jaya Nurcahya (CJN) ^a (melalui/through Lumbung)	99,95	99,95	3.559	3.938
PT Bintang Mineral Resource (BMR) ^a (melalui/through Lumbung)	99,96	99,96	7.850	8.012
<u>Entitas pengendalian bersama/ Jointly controlled entities</u>				
PT Arutmin Indonesia (Arutmin) (langsung/direct)	70,00	70,00	1.954.087.470	1.575.495.384

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas/ Name of Entity	Kepemilikan Efektif/ Effective Ownership Interest		Total Aset sebelum Eliminasi/ Total Assets before Eliminations	
	2014 (%)	2013 (%)	2014	2013
PT Kaltim Prima Coal (KPC) (langsung/direct)	25,00	13,60	2.474.390.045	2.629.245.972
(melalui/through Sitrade)	26,00	32,40		
(melalui/through SHL)	-	9,50		
(melalui/through KCL)	-	9,50		
IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL) (melalui/through Forerunner)	70,00	70,00	456.620.172	587.213.820
IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (langsung/direct)	51,00	-	17.524.047	-
PT IndoCoal Kalsel Resources (IndoCoal Kalsel) (langsung/direct)	70,00	70,00	502	545
PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kaltim) (langsung/direct)	51,00	70,00	49.250	325
Entitas asosiasi/Associates				
PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) (melalui/through MDB)	15,68	15,68	3.882.627.000	3.989.021.000
PT Visi Multi Artha (langsung/direct)	30,00	30,00	5.726.611	5.165.589
PT Artha Widya Persada (langsung/direct)	30,00	30,00	5.411.221	5.271.392
Zurich Assets International Ltd. (melalui/through BRI)	80,00	80,00	148.275	143.661
PT Darma Henwa Tbk (DEWA) (melalui/through Zurich)	17,29	17,29	355.859.007	365.758.029
(melalui/through Goldwave Capital Ltd.)	14,14	14,14		
Tansar Gas Pte. Ltd. (Tansar) (melalui/through Knightley BR)	30,00	30,00	2	2

- Entitas Anak masih dalam tahap eksplorasi atau pengembangan.
- Izin kegiatan Dairi berada dalam Tahap Konstruksi (Catatan 49b).
- Kegiatan eksplorasi GM dan CPM telah selesai dan, saat ini, memasuki tahap studi kelayakan (Note 49b).
- Konblo Bumi, Inc. telah diubah dari entitas asosiasi ke entitas yang dicatat dengan metode biaya efektif dari tanggal 18 Januari 2013 (Catatan 4c).
- Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat oleh Firdhonal, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham FBS setuju mengubah Anggaran Dasar FBS untuk mengubah nama dari FBS ke KBN. Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-11297.40.20.2014 tanggal 18 November 2014.
- Kepemilikan Perusahaan di BRMS adalah berdasarkan catatan dan konfirmasi pihak-pihak berikut ini:

- The Subsidiaries are under exploration or development stage.
- Dairi's permit is currently in the Construction Stage (Note 49b).
- Exploration activities of GM and CPM are completed and, currently, in the feasibility study stage (Note 49b).
- Konblo Bumi, Inc. was changed from associate to an entity under cost method effective from January 18, 2013 (Note 4c).
- Based on Notarial Deed No. 16 dated October 20, 2014 made by Firdhonal, S.H., notary in Jakarta, the shareholders of FBS approved to amend the Articles of Association of FBS to change the name from FBS to KBN. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per Decision Letter No. AHU-11297.40.20.2014 dated November 18, 2014.
- The Company's ownership interest in BRMS is based on the record and confirmations of the following parties:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Catatan dan konfirmasi dari:	2014		Records and confirmation from:
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Kepemilikan Perusahaan di BRMS/ Ownership Interest in BRMS	
PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)	6.526.052.382	25,52%	PT Sinartama Gunita (Securities Administration Agency)
PT DMS Investama	2.441.764.516	9,55%	PT DMS Investama
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	13.302.330.502	52,02%	Others (each below 5%)
Total	22.270.147.400	87,09%	Total

Catatan dan konfirmasi dari:	2013		Records and confirmation from:
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Kepemilikan Perusahaan di BRMS/ Ownership Interest in BRMS	
PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek)	6.878.270.382	26,90%	PT Sinartama Gunita (Securities Administration Agency)
PT Long Haul Indonesia	2.460.988.710	9,62%	PT Long Haul Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	12.930.888.308	50,57%	Others (each below 5%)
Total	22.270.147.400	87,09%	Total

Perusahaan menandatangani Perjanjian
Peminjaman Saham (Catatan 49dd).

The Company entered into Stock Loan Agreements
(Note 49dd).

**e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan
Karyawan**

**e. Board of Commissioners, Board of Directors,
Audit Committee and Employees**

Berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 yang diaktakan dengan Akta No. 98 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

Based on the minutes of the stockholders' General Meeting held on June 28, 2013 as documented in Deed No. 98 of Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2014 and 2013 is as follows:

2014 dan/and 2013

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Kusumo Abujono Martoredjo
Suryo Bambang Sulisto
Iman Taufik
Fuad Hasan Masyhur
Nalinkant Amratlal Rathod
Anton Setianto Soedarsono
Sulaiman Zuhdi Pane

Board of Commissioners
President Commissioner and
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Saptari Hoedaja
Andrew Christopher Beckham
Dileep Srivastava
Kenneth Patrick Farrell
Eddie Junianto Subari
R.A. Sri Dharmayanti

Board of Directors
President Director
Director
Director
Director
Director
Director

1. UMUM (Lanjutan)

Anggota Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

2014 dan / and 2013

Ketua	Iman Taufik	Chairman
Anggota	Mulyadi	Member
Anggota	Myrnie Zachraini Tamin	Member

Personil manajemen kunci Kelompok Usaha meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Entitas Anak dan entitas pengendalian bersama.

1. GENERAL (Continued)

The members of the Company's Audit Committee were as follows:

Key management personnel of the Group include the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, Subsidiaries and jointly controlled entities.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah karyawan tetap Kelompok Usaha masing-masing adalah 6.487 dan 6.463 (tidak diaudit).

As of December 31, 2014 and 2013, the Group had 6,487 and 6,463 permanent employees, respectively (unaudited).

f. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/Pengembangan

f. Exploration and Exploitation/Development Area

Area Eksplorasi

Exploration Area

Nama Lokasi/ Location	Nama Pemilik Izin Lokasi/ Owner of Concession	Tanggal Perolehan Izin Eksplorasi/ Date of Concession	Tanggal Jatuh Tempol/ End Date	Persentase Kepemilikan atas Lokasi/ Percentage of Ownership in the Area of Interest	Biaya Eksplorasi Neto yang Telah Dibukukan sampai dengan Tanggal Pelaporan/ Net Exploration Costs that Has Been Recognized as of Reporting Date
Senakin, Satui, Mulia/ Asam Asam, Batulicin, Pulau Laut, Sarongga, Kintap	PT Arutmin Indonesia	18 Agustus 1983/ August 18, 1983	2 November 1986/ November 2, 1986	100,00%	223.027.255
Sanggata	PT Kaltim Prima Coal	10 Oktober 1985/ October 10, 1985	18 November 1989/ November 18, 1989	100,00%	37.256.631
Dairi, Sumatera Utara	PT Dairi Prima Mineral	7 November 2012/ November 7, 2012	7 November 2013/ November 7, 2013	a) 100,00%	417.047.037
Muara Enim, South Sumatera	PT Pendopo Energi Batubara	5 Mei 2005/ May 5, 2005	4 Mei 2009/ May 4, 2009	100,00%	162.193.121
Loa Ulung, Kutai Kertanegara,	PT Fajar Bumi Sakti	10 Juni 2008/ June 10, 2008	10 Juni 2018/ June 10, 2018	100,00%	-
Block-I Tomboilat, Block-II Molotabu	PT Gorontalo Minerals	19 Juli 2012/ July 19, 2012	18 Juli 2013/ July 18, 2013	b) 100,00%	51.773.242
Sulawesi Tengah dan Sulawesi	PT Citra Palu Minerals	31 Maret 2011/ March 31, 2011	28 Januari 2012/ January 28, 2012	c) 100,00%	17.111.100
Block R2 East Al Marber, Daw'an#1, Daw'an#2, Tasilah#1, Al Murad#1, Daw'an South #1, Tasilah West #1	Gallo Oil (Jersey) Ltd.	13 Maret 1997/ March 13, 1997	13 Februari 2015/ February 13, 2015	d) 100,00%	167.436.416
Block 13 Wadi Armah, Al-Rizq #1A, Al-Barakat#1, Al-Rizq #1B ST		13 Maret 1997/ March 13, 1997	14 Mei 2016/ May 14, 2016	d) 100,00%	210.549.628
Banyuasin	PT Mitra Bisnis Harvest	12 Desember 2006/ December 12, 2006	12 Desember 2013/ December 12, 2013	e) 100,00%	30.756.052
Ogan Komering Ulu	PT Mitra Bisnis Harvest	5 Agustus 2009/ August 5, 2009	5 Agustus 2013/ August 5, 2013	e) 100,00%	2.353.409
Ogan Komering Ulu	PT Buana Minera Harvest	27 September 2009/ September 27, 2009	27 September 2014/ September 27, 2014	f) 100,00%	30.834.292

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Lokasi/ Location	Nama Pemilik Izin Lokasi/ Owner of Concession	Tanggal Perolehan Izin Eksplorasi/ Date of Concession	Tanggal Jatuh Tempo/ End Date	Persentase Kepemilikan atas Lokasi/ Percentage of Ownership in the Area of Interest	Biaya Eksplorasi Neto yang Telah Dibukukan sampai dengan Tanggal Pelaporan/ Net Exploration Costs that Has Been Recognized as of Reporting Date
Banyuasin	PT Buana Minera Harvest	9 Mei 2011/ May 9, 2011	9 Mei 2014/ May 9, 2014	f) 100,00%	30.834.292
Banyuasin	PT MBH Mining Resource	12 Agustus 2009/ August 12, 2009	12 Agustus 2014/ August 12, 2014	g) 100,00%	34.977.476
Ogan Komering Ulu Selatan	PT Bintan Mineral Resource	6 Desember 2009/ December 6, 2009	30 Januari 2015/ January 30, 2015	h) 100,00%	62.913.711
Ogan Komering Ulu Selatan	PT MBH Minera Resources	20 Juli 2011/ July 20, 2011	20 Juli 2025/ July 20, 2025	100,00%	81.991.415
Lahat	PT Citra Jaya Nurcahya	30 Desember 2011/ December 30, 2011	30 Desember 2014/ December 30, 2014	i) 100,00%	53.274.191

- a) Dairi masih dalam proses mendapatkan perpanjangan untuk Tahap Konstruksi (Catatan 49b).
b) CPM masih dalam proses mendapatkan izin perpanjangan Studi Kelayakan untuk Tahap Kedua (Catatan 49b).
c) GM masih dalam proses mendapatkan izin memasuki Tahap Konstruksi (Catatan 49b).
d) Surat-surat yang menyatakan persetujuan perpanjangan untuk kedua Blok 13 dan Blok R2 masih dalam proses (Catatan 18).
e) MBH masih dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kedua lokasi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu (Catatan 49e).
f) BMH masih dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kedua lokasi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu (Catatan 49f).
g) MBH Mining masih dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Catatan 49g).
h) BMR masih dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Catatan 49h).
i) CJN masih dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Catatan 49j).

- a) Dairi is still in the process of obtaining an extension for the Construction Stage (Note 49b).
b) CPM has not yet received the extension of the Feasibility Study permits for the Second Stage (Note 49b).
c) GM is still in the process of obtaining the permit to enter the Construction Stage (Note 49b).
d) The letters confirming the approval of extension permits for both Block 13 and Block R2 are still in process (Note 18).
e) MBH is still in the process of obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit for both Banyuasin and Ogan Komering Ulu locations (Note 49e).
f) BMH is still in the process of obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit for both Banyuasin and Ogan Komering Ulu locations (Note 49f).
g) MBH Mining is still in the process of obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit (Note 49g).
h) BMR is still in the process of obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit (Note 49h).
i) CJN is still in the process of obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit (Note 49j).

Area Eksploitasi/Pengembangan

Exploitation/Development Area

Nama Lokasi/ Location	Nama Pemilik Izin Lokasi/ Owner of Concession	Tanggal Perolehan Izin Eksplorasi/ Date of Concession	Tanggal Jatuh Tempo/ End Date	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Cadangan Terbukti (P1)* (dalam jutaan ton)/ Proven Reserve (P1)* (in million tonnes)	Total Produksi (dalam jutaan ton)/ Total Production (in million tonnes)	Sisa Cadangan Terbukti (dalam jutaan ton)/ Balance of Proven Reserve (In million tonnes)	
					Tahun Berjalan/ Current Year	Akumulasi Total Produksi/ Accumulated Total Production		
Senakin	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	133,04	0,48	105,37	27,67
Satu	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	137,67	0,16	86,82	50,85
Mulia/Asam Asam	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	193,42	15,77	86,82	106,60

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Lokasi/ Location	Nama Pemilik Izin Lokasi/ Owner of Concession	Tanggal Perolehan Izin Eksplorasi/ Date of Concession	Tanggal Jatuh Tempo/ End Date	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Total Cadangan Terbukti (P1)* (dalam jutaan ton)/ Proven Reserve (P1)* (in million tonnes)	Total Produksi (dalam jutaan ton)/ Total Production (in million tonnes)		Sisa Cadangan Terbukti (dalam jutaan ton)/ Balance of Proven Reserve (In million tonnes)
						Tahun Berjalan/ Current Year	Akumulasi Total Produksi/ Accumulated Total Production	
Batulicin	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	39,18	0,06	23,31	15,88
Pulau Laut	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	14,50	-	-	14,50
Sarongga	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	16,00	7,22	12,88	3,12
Kintap	PT Arutmin Indonesia	1 Oktober 1989/ October 1, 1989	30 September 2019/ September 30, 2019	100,00%	124,00	8,59	19,70	104,30
Sangatta	PT Kaltim Prima Coal	1 January 1991/ January 1, 1991	1 January 2022/ January 1, 2022	100,00%	1.198,00	52,65	91,80	1.106,20
Muara Enim	PT Pendopo Energi Batubara	5 Mei 2009/ May 5, 2009	4 Mei 2039/ May 4, 2039	100,00%	1.306,00	-	-	1.306,00
Ogan Komering Ulu	PT Mitra Bisnis Harvest	5 Agustus 2009/ August 5, 2009	5 Agustus 2013/ August 5, 2013	100,00%	38,25	-	-	38,25
Banyuasin	PT Mitra Bisnis Harvest	12 Desember 2006/ December 12, 2006	12 Desember 2013/ December 12, 2013	100,00%	424,08	-	-	424,08
Ogan Komering Ulu	PT Buana Minera Harvest	27 September 2009/ September 27, 2009	27 September 2014/ September 27, 2014	100,00%	184,75	-	-	184,75
Banyuasin	PT Buana Minera Harvest	9 Mei 2011/ May 9, 2011	9 Mei 2014/ May 9, 2014	100,00%	386,99	-	-	386,99
Banyuasin	PT MBH Mining Resource	12 Agustus 2009/ August 20, 2009	12 Agustus 2014/ August 20, 2014	100,00%	134,85	-	-	134,85
Ogan Komering Ulu Selatan	PT Bintan Mineral Resource	6 Desember 2009/ December 6, 2009	30 Januari 2015/ January 30, 2015	100,00%	131,73	-	-	131,73
Ogan Komering Ulu Selatan	PT MBH Minera Resources	20 Juli 2011/ July 20, 2011	20 Juli 2025/ July 20, 2025	100,00%	62,11	-	-	62,11
Lahat	PT Citra Jaya Nurcahya	30 Desember 2011/ December 30, 2011	30 Desember 2014/ December 30, 2014	100,00%	70,43	-	-	70,43

* Total Cadangan Terbukti (P1) untuk KPC, Arutmin dan Pendopo berdasarkan hasil penelitian pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013, 30 Juni 2012, dan 30 November 2011. Tambang Sangatta dan Muara Enim berdasarkan hasil kajian teknik yang dilakukan oleh PT Runge Pincock Minarco pada tanggal 20 Oktober 2013 dan PT Runge Indonesia pada bulan Maret 2011. Tambang Senakin, Satui, Mulia/Asam Asam, Batulicin, Kintap dan Sarongga berdasarkan hasil kajian teknik yang dilakukan oleh PT Runge Indonesia pada tanggal 28 Februari 2013, sedangkan untuk Pulau Laut berdasarkan studi kelayakan in-house pada bulan Desember 1989.

Total Cadangan Terbukti (P1) untuk MBH, BMH, MBH Mining, BMR, MBH Minera dan CJN berdasarkan penelitian pada tahun 2014. Figur pada Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Banyuasin dan Lahat berdasarkan hasil kajian teknik yang dilakukan PT Gada Energi pada bulan Maret 2014.

* Total Proven Reserve (P1) for KPC, Arutmin and Pendopo were based on survey result as of March 31, 2013, June 30, 2012, and November 30, 2011, respectively. The figures for Sangatta and Muara Enim were based on the results of technical review performed by PT Runge Pincock Minarco on October 20, 2013 and PT Runge Indonesia in March 2012, respectively. The figures for Senakin, Satui, Mulia/Asam Asam, Batulicin, Kintap and Sarongga were based on the results of technical review performed by PT Runge Indonesia on February 28, 2013, while Pulau Laut was based on in-house feasibility study in December 1989.

Total Proven Reserve (P1) for MBH, BMH, MBH Mining, BMR, MBH Minera and CJN was based on survey result in 2014. The figures on Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Banyuasin and Lahat were based on the results of technical review performed by PT Gada Energi in March 2014.

1. UMUM (Lanjutan)

g. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2015.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Seperti diungkapkan lebih lanjut dalam catatan-catatan terkait Kelompok Usaha menerapkan ISAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*), arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar Amerika Serikat, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

1. GENERAL (Continued)

g. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which have been authorized for issue by the Board of Directors on June 26, 2015.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements and Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies issued by the Financial Service Authority (OJK).

The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013. As disclosed further in the relevant succeeding notes, the Group adopted ISAKs effective January 1, 2014.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, being classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is United States Dollar, which is also the functional currency of the Company.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan, semua Entitas Anak yang dikendalikan oleh Perusahaan dan bagian proporsional Perusahaan atas laporan keuangan entitas pengendalian bersama.

Entitas Anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Kelompok Usaha memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasionalnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Kelompok Usaha mempunyai pengendalian atas entitas lain.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian.

Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

- (a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- (b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- (c) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- (d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi dan dewan komisaris atau badan tersebut.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company, all Subsidiaries that are controlled by the Company, and the proportionate share of the accounts of its jointly controlled entities.

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Group obtained control, and continue to be consolidated until the dated such control ceases.

Control is presumed to exist when the Company, directly or indirectly through Subsidiaries, owns more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control. Control also exists when the Company owns half or less of the voting power of an entity when there is:

- (a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
- (b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
- (c) power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors and board of commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or
- (d) power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors and board of commissioners or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- derecognizes the carrying amount of any non-controlling interest;
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba atau rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laba atau rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Kepentingan nonpengendali merupakan proporsi atas laba atau rugi dan aset neto yang tidak dimiliki Kelompok Usaha dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar-entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Entitas yang dikendalikan bersama dengan entitas lain dalam rangka suatu perjanjian kontraktual (*contractual arrangement*) dikonsolidasi dengan menggunakan metode konsolidasian proporsional (*proportionate consolidation*) sesuai dengan PSAK No. 12 (Revisi 2009), "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama". Entitas pengendalian bersama adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian perseroan terbatas, persekutuan atau entitas lainnya yang mana setiap *venturer* mempunyai bagian partisipasi. Entitas tersebut beroperasi dalam cara yang sama seperti entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar-*venturer* yang menciptakan pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi entitas.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

Dalam keadaan tersebut nilai tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Entitas pengendalian bersama mengendalikan aset ventura bersama, menanggung liabilitas dan beban dan memperoleh penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

- recognizes the fair value of the consideration received;
- recognizes the fair value of any investment retained;
- recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

Non-controlling interest represents the portion of profit or loss and the net assets not held by the Group and are presented separately in the consolidated statements of comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separately from equity attributable to the parent.

All significant inter-company transactions and balances have been eliminated.

The entities that are involved in joint ventures with other venturers under a contractual arrangement are consolidated using the proportionate consolidation method in accordance with PSAK No. 12 (Revised 2009), "Interests in Joint Ventures". A jointly controlled entity is a joint venture that involves the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest. The entity operates in the same way as other entities, except that a contractual arrangement between the venturers establishes joint control over the economic activity of the entity.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners).

In such circumstances the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests shall be adjusted to reflect the changes in their realtive interests in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received shall be recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, incurs liabilities and expenses and earns income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui kepemilikan pada entitas pengendalian bersama yang terdiri dari PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin), IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC), PT IndoCoal Kalsel Resources (IndoCoal Kalsel) dan PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kaltim) (secara bersama selanjutnya disebut sebagai "Perusahaan Batubara") menggunakan metode konsolidasian proporsional sesuai dengan PSAK No. 12 (Revisi 2009).

c. Kombinasi Bisnis

Kelompok Usaha menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan merupakan suatu bisnis, maka Kelompok Usaha akan mencatatnya sebagai akuisisi aset. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik yang diakuisisi sebelumnya dan ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas kontijen. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontijen yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Selisih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan atas nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada. Kemudian dilakukan pengujian penurunan nilai tahunan sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset".

Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi (yaitu, *discount on acquisition*), nilai wajar aset nonmoneter dikurangi secara proporsional sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Selanjutnya sisa lebih setelah penurunan nilai wajar aset nonmoneter tersebut diakui sebagai *goodwill* negatif, yang harus diakui segera dalam laba atau rugi.

d. Kas

Kas terdiri dari saldo kas dan bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The Group recognized its interests in jointly controlled entities namely PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin), IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC), PT IndoCoal Kalsel Resources (IndoCoal Kalsel) and PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kaltim) (collectively herein referred to as the "Coal Companies") using proportionate consolidation method in accordance with PSAK No. 12 (Revised 2009).

c. Business Combination

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. If the asset as acquired is not a business, the Group shall account for it as an asset acquisition. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the asset transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable asset acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

Any excess of the cost of acquisition over the fair values of the identifiable net assets acquired is recognized as goodwill. Goodwill is subsequently measured at cost less accumulated impairment losses, if any. It is subject to annual impairment testing in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets".

When the cost of acquisition is less than the fair values of the identifiable assets and liabilities acquired as at the date of acquisition (i.e. discount on acquisition), fair values of the acquired non-monetary assets are reduced proportionately until all the excess is eliminated. The remaining excess after reducing the fair values of non-monetary assets acquired is recognized as negative goodwill, which should be recognized immediately in profit or loss.

d. Cash

Cash consist of cash on hand and in banks that are not pledged as collateral or restricted in use.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Kas di Bank yang Dibatasi Penggunaannya". Kas di bank yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

f. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Kelompok Usaha menerapkan ISAK No. 27, "Peralihan Aset dari Pelanggan" dan ISAK No. 28, "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas". Penerapan interpretasi ini tidak memiliki dampak material dalam laporan keuangan konsolidasian.

(1) Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba atau rugi (FVTPL) yang pada awalnya diukur dengan nilai wajar. Klasifikasi aset keuangan antara lain sebagai aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada FVTPL, investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awal dan sepanjang diperbolehkan dan diperlukan, ditelaah kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Restricted Cash in Banks

Cash in banks, which are restricted in use, are presented as "Restricted Cash in Banks". Restricted cash in banks to be used to pay currently maturing obligations that are due within one (1) year is presented under current assets.

f. Financial Instruments

Effective January 1, 2014, the Group adopted ISAK No. 27, "Transfer of Assets from Customers" and ISAK No. 28, "Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments." The adoption of these interpretations did not have material impact in the consolidated financial statements.

(1) Financial assets

Initial recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss (FVTPL) which are initially measured at fair value. Financial assets are classified as financial assets at FVTPL, held-to-maturity (HTM) investments, loans and receivables, or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at the end of each reporting period.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada FVTPL

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.
- Investasi HTM

Aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba atau rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba atau rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

- *Financial assets at FVTPL*

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial assets are either held for trading or they are designated as FVTPL at initial recognition. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at FVTPL are carried in the consolidated statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. The gains or losses recognized include any dividend or interest earned from the financial assets.
- *HTM investments*

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method less any impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.
- *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments those are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

- Aset keuangan AFS

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga (3) kategori sebelumnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau sampai diturunkan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui dalam laba atau rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas (12) bulan dari periode pelaporan.

Aset keuangan AFS yang tidak mempunyai harga pasar diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada, karena nilai wajar pasar tidak dapat diukur secara handal.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Kelompok Usaha mentransfer aset keuangan, maka Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

- AFS financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as AFS or are not classified in any of the three (3) preceding categories. After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains and losses being recognized as other comprehensive income until the financial assets are derecognized or until the financial assets are determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity are included in profit or loss. These financial assets are classified as non-current assets unless the intention is to dispose such assets within twelve (12) months from the reporting period.

Unquoted AFS financial assets that do not have ready market prices are measured at cost, less allowance for impairment, if any, since their fair market value cannot be reliably measured.

Derecognition of financial assets

The Group shall derecognize financial assets when, and only when, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred to another entity or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but they assume a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it shall evaluate the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukan aset tersebut kedalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Impairment of financial assets

At each end of the reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the assets (an incurred "loss event"), and that loss event has an impact on the estimated future cash flow of the financial assets or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payment, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and the observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flow, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

- Financial assets carried at amortized cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment for impairment.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba atau rugi.

Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

Jika, dalam periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan penurunan nilai. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan aset keuangan diakui dalam laba atau rugi.

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut, jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

(2) Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Pengakuan awal

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the assets are reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is directly recognized in profit or loss.

Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loan, together with the associated allowance, is written off when there is no realistic prospect of future recovery and collateral, if any, has been realized or has been transferred to the Group.

If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in profit or loss.

The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate.

(2) Financial liabilities and equity instruments

Initial recognition

The Group determines the classification of financial liabilities at initial recognition. Debt and equity instruments are classified as either financial liabilities or equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, pinjaman dan utang, atau sebagai derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha dicatat sebesar hasil yang diperoleh, dikurangi biaya penerbitan instrumen ekuitas.

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen sejenis yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan, dipisahkan antara liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi dengan menggunakan suku bunga yang berlaku di pasar untuk instrumen *non-convertible* yang serupa. Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas dengan dasar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan liabilitas tersebut berakhir melalui konversi atau pada tanggal instrumen jatuh tempo. Komponen ekuitas ditentukan dengan cara mengurangi jumlah komponen liabilitas dari keseluruhan nilai wajar instrumen keuangan majemuk. Nilai ini diakui dan dicatat dalam ekuitas, dikurangi dengan pajak penghasilan, dan tidak ada pengukuran setelah pengakuan awal.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran setelah pengakuan awal liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Financial liabilities are classified as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issuance costs.

Compound financial instruments, a bond or similar instrument convertible by the holder into a fixed number of ordinary shares, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual arrangement. At the date of issuance of compound financial instruments, the fair value of the liability component is estimated using the prevailing market interest rate for a similar non-convertible instrument. This amount is recorded as a liability on an amortized cost basis using the effective interest method until extinguished upon conversion or at the instrument's maturity date. The equity component is determined by deducting the amount of the liability component from the fair value of the compound financial instruments as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and is not subsequently remeasured.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- *Financial liabilities at FVTPL*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada FVTPL. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali liabilitas derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dinyatakan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan atau kerugian yang diakui termasuk bunga yang dibayar atas liabilitas keuangan.

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba atau rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Kelompok Usaha dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.

(3) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. Gains or losses recognized incorporate any interest paid on the financial liabilities.

- *Financial liabilities measured at amortized cost*

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.

(3) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position, if and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

(4) Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

(5) Instrumen derivatif

Instrumen derivatif dicatat pada pengakuan awal sebesar nilai wajar pada tanggal perjanjian derivatif ditandatangani dan diukur kembali pada setiap akhir periode pelaporan. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Derivatif melekat disajikan dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang mencerminkan penyajian yang memadai atas seluruh arus kas pada masa mendatang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Derivatif yang melekat pada instrumen keuangan atau kontrak awal diperlakukan sebagai derivatif yang berbeda saat risiko dan karakteristiknya tidak saling berhubungan dengan kontrak utamanya dan kontrak utama tersebut tidak diukur dengan nilai wajar serta perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba atau rugi.

Derivatif disajikan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang jika sisa periode jatuh tempo dari instrumen tersebut lebih dari dua belas (12) bulan dan tidak diharapkan untuk direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui dalam laba atau rugi tahun berjalan, kecuali seluruh persyaratan khusus (yaitu, dokumen formal, penetapan dan pengukuran keefektifan transaksi) untuk diakui sebagai pendapatan komprehensif lain sesuai dengan tipe akuntansi lindung nilai, seperti yang dimaksud dalam PSAK, terpenuhi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

(4) Financial instruments measured at amortized cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

(5) Derivative instruments

Derivative instruments should be initially recognized at fair value at the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured to their fair value at the end of each reporting period. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

An embedded derivative is presented with the host contract in the consolidated statements of financial position, which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole. Derivatives embedded in other financial instruments or other host contracts are treated as separate derivatives when their risks and characteristics are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the remaining maturity of the instrument is more than twelve (12) months and it is not expected to be realized or settled within twelve (12) months.

Gains or losses arising from changes in the fair value of the derivative instrument are recognized currently in profit or loss, unless all the specific requirements (i.e., formal documentation, designation and assessment of the effectiveness of the transaction) to allow deferral as other comprehensive income under certain types of hedge accounting, as provided for in the PSAK, are met.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Seperti yang diterangkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2011) untuk kriteria khusus bagi akuntansi lindung nilai, seluruh instrumen derivatif Kelompok Usaha yang disebutkan di atas tidak memenuhi syarat dan, oleh karenanya, tidak ditentukan sebagai transaksi lindung nilai untuk kepentingan akuntansi.

(6) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan merujuk pada harga yang ditentukan. Untuk instrumen keuangan dimana tidak ada pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut termasuk dengan menggunakan transaksi pasar yang wajar, merujuk pada nilai wajar dari instrumen lain yang secara substansi sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan batubara ditentukan dengan mempergunakan metode rata-rata tertimbang sedangkan biaya perolehan persediaan suku cadang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Penyisihan atas kerugian persediaan usang dibentuk untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya, yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan yang bersangkutan pada akhir periode pelaporan.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar dari biaya dibayar dimuka disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana jumlah tercatat investasi tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

In reference to such specific criteria for hedge accounting provided under PSAK No. 55 (Revised 2011), all of the aforementioned derivative instruments of the Group does not qualify and, therefore, are not designated as hedges for accounting purposes.

(6) Fair value measurement

The fair values of financial instruments that are traded in an active market are determined by reference to quoted prices. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

g. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV). Cost of coal inventories is determined using weighted average method, while cost of spare parts inventories is determined using the moving average method. Allowance for inventory obsolescence is provided to reduce the carrying values of inventories to their NRV based on the review of the status of the inventories at the end of the reporting period.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method. The non-current portion of prepaid expenses is classified under "Other Non-current Assets" in the consolidated statements of financial position.

i. Investments in Associates

An associate is an entity in which the Group has significant influence. Investments in associates are recorded using the equity method, whereby the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of and dividends received from the associate since the date of acquisition.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Laporan keuangan dari entitas asosiasi telah disiapkan pada periode pelaporan sebagai kelompok usaha. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat untuk membawa kebijakan akuntansi sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha.

Setelah menerapkan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba atau rugi.

Sejak mengalami kerugian yang berpengaruh secara signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui nilai investasi pada nilai wajar. Seluruh perbedaan antara jumlah tercatat pada entitas asosiasi yang mengalami kerugian yang berpengaruh secara signifikan dan nilai wajar dari pengembalian investasi dan hasil dari penjualannya diakui pada laba rugi.

j. Aset Tetap

Kelompok Usaha telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya aset tetap terdiri dari harga perolehan, setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen, dan estimasi awal biaya pembongkaran dan rehabilitasi lokasi yang terkait dengan aset tersebut dan merupakan tanggung jawab dari Kelompok Usaha.

Biaya dari aset tetap dikapitalisasi ke dalam bermacam-macam komponen dimana masa manfaat ekonomis dari komponen-komponen tersebut berbeda dari aset utama aset tetap dimana komponen tersebut dapat secara logis dialokasikan. Biaya yang terjadi untuk mengganti atau memodifikasi komponen signifikan dari aset tetap dikapitalisasi dan sisa dari harga perolehan dari komponen yang diganti dihapus bukukan sebagai beban dalam laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group.

After applying the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. In this case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognises any retaining investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognised in profit or loss.

j. Fixed Assets

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of fixed assets comprises the purchase price, any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, and the estimated costs of decommissioning the assets and site rehabilitation costs to the extent that they relate to the asset and are the responsibility of the Group.

The cost of an item of fixed assets is capitalized into various components where the useful lives of the components differ from the main item of fixed assets to which the component can be logically assigned. Cost incurred to replace or modify a significant component of fixed assets is capitalized and any remaining carrying value of the component replaced is written-off as expense in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Biaya selanjutnya dari aset tetap hanya dikapitalisasi bila biaya tersebut meningkatkan nilai atau hasil dari aset tersebut di atas harapan awal dan dapat diukur secara andal. Namun, biaya yang terjadi atas perbaikan dan perawatan aset tetap diakui sebagai beban dalam laba atau rugi di periode berjalan.

Laba atau rugi atas penjualan aset tetap, dihitung dengan cara penerimaan atas penjualan aset dikurangi nilai tercatat pada tanggal transaksi, diakui dalam laba atau rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap atau sisa masa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), mana yang lebih pendek. Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Mesin dan peralatan	3-30	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan dan perabotan kantor	3-8	<i>Office furniture and fixtures</i>
Kendaraan	3-8	<i>Vehicles</i>

Masa manfaat ekonomis aset tetap dan metode depresiasi ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba atau rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba atau rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Subsequent cost on fixed assets is only capitalized when such cost enhances the value or output of the asset beyond original expectations and it can be measured reliably. However, cost incurred on repairing and maintaining fixed assets are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

Gains or losses on the disposal of fixed assets, which are calculated as the proceeds on disposal of such assets less their carrying values at that date, are recognized in profit or loss.

Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets or the remaining term of the Coal Contract of Work (CCoW), whichever period is shorter. The estimated useful lives of fixed assets were as follows:

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of reporting period.

Construction-in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred, if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group, and the cost of the item can be measured reliably. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its continued use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Properti Pertambangan

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Kelompok Usaha menerapkan ISAK No. 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (*Stripping Cost*) dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka". Karena penerapan ISAK No. 29, PSAK No. 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di bidang Pertambangan Umum" secara resmi ditarik melalui PPSAK No. 12, "Penarikan PSAK No. 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di bidang Pertambangan Umum". Penarikan PSAK No. 33 (Revisi 2011) berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Properti pertambangan mencakup aset dalam produksi dan pengembangan, aset yang ditransfer dari aset eksplorasi dan evaluasi, pengupasan tanggahan dalam pengembangan tambang dan nilai wajar sumber daya mineral yang diperoleh melalui kombinasi bisnis.

Biaya pengupasan tanah bagian atas (*top soil*) dibedakan menjadi (i) pengupasan tanah awal untuk membuka tambang yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan (ii) pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan awal dikapitalisasi sebagai bagian dari properti pertambangan atas tambang yang telah berproduksi. Biaya pengupasan tambahan dicatat sesuai ketentuan ISAK No. 29 dan dikapitalisasi sebagai bagian dari properti pertambangan dalam aset produksi kegiatan pengupasan tanah.

Tambang yang telah Berproduksi

Properti pertambangan dalam pengembangan dan sumber daya mineral yang diperoleh tidak diamortisasi sampai produksi dimulai, yang mana diamortisasi menggunakan metode unit produksi (UoP) hingga sisa masa Kontrak Karya. Uang muka yang dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan pengupasan tanah tanggahan juga termasuk dalam properti pertambangan sebagai biaya pengembangan.

Ketika cadangan terbukti ditentukan dan pengembangan disetujui, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke properti pertambangan. Semua biaya pengembangan selanjutnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai aset dalam pengerjaan pada properti pertambangan. Biaya pengembangan adalah neto dari penjualan batubara atau mineral yang diekstrak selama tahap pengembangan. Ketika pembangunan selesai, semua aset direklasifikasi baik sebagai properti pertambangan atau komponen lain dari aset tetap.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

k. Mining Properties

Effective January 1, 2014, the Group applied ISAK No. 29, "Stripping Costs in Production Phase of a Surface Mine". Due to the application of ISAK No. 29, PSAK No. 33 (Revised 2011), "Stripping Activities and Environmental Management in General Mining" is officially withdrawn through PPSAK No. 12, "Withdrawal of PSAK No. 33: Stripping Activities and Environmental Management in General Mining". The withdrawal of PSAK No. 33 (Revised 2011) was effective from January 1, 2014.

Mining properties include assets in production and in development, assets transferred from exploration and evaluation assets, deferred stripping performed in the development of the mine and fair value of mineral resources acquired through business combinations.

Stripping cost on top soil is divided into (i) initial stripping of the top soil to open up the mining area before production commences and (ii) additional stripping that is performed during the production activity. Initial stripping costs are capitalized as part of mining properties under producing mines. Additional stripping costs are accounted using the provisions of ISAK No. 29 and are capitalized as part of mining properties under production stripping activity assets.

Producing Mines

Mining properties in development and acquired mineral resources are not amortized until production commences, upon which these are amortized on a unit of production (UoP) method up to the remaining term of the CCoW. Advances paid to contractors in respect of deferred stripping are also included in mining properties as development costs.

When proven reserves are determined and development is sanctioned, exploration and evaluation assets are reclassified to mining properties. All subsequent development costs relating to construction of infrastructure required to operate the mine is capitalized and classified as assets under construction under mining properties. Development costs are net of proceeds from the sale of coal or minerals extracted during the development phase. Once development is completed, all assets are reclassified as either mining properties or other component of fixed assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Kegiatan Pengupasan Tanah pada Aset Produksi

ISAK No. 29 mengatur secara rinci akuntansi untuk semua biaya yang terkait dengan pembuangan limbah selama tahap produksi tambang terbuka. Ketika manfaat (*benefit*) dari kegiatan pengupasan direalisasi dalam periode berjalan, biaya pengupasan lapisan tanah dicatat sebagai biaya persediaan. Saat manfaat (*benefit*) adalah berupa peningkatan akses terhadap batubara di masa mendatang, biaya diakui sebagai aset tidak lancar, apabila kriteria tertentu telah terpenuhi. Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan diamortisasi secara sistematis (metode unit produksi) selama masa manfaat yang diharapkan dari komponen teridentifikasi lapisan batubara yang menjadi lebih mudah diakses sebagai hasil dari aktivitas pengupasan.

Selanjutnya ISAK No. 29 mensyaratkan bahwa aset kegiatan pengupasan tanah harus diakui jika, dan hanya jika, semua hal berikut telah dipenuhi:

- terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan (peningkatan akses ke lapisan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan tanah akan mengalir ke entitas;
- entitas dapat mengidentifikasi komponen lapisan batubara dimana akses ke lapisan batubara tersebut telah diperbaiki; dan
- biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengupasan tanah terkait dengan komponen dapat diukur dengan andal.

Penerapan dari ISAK No. 29 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan tahun sebelumnya.

I. Aset dan Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral dan minyak dan gas bumi, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya teridentifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

- (i) pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
- (ii) pengeboran, penggalian dan sampel;
- (iii) menentukan dan memeriksa volume dan kualitas sumber daya; dan
- (iv) meneliti persyaratan transportasi dan infrastruktur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Production Stripping Activity Assets

ISAK No. 29 specifies the accounting for costs associated with waste removal (*stripping*) during the production phase of a surface mine. When the benefit from the production stripping activity is realized in the current period, the stripping costs are accounted for as the cost of inventory. When the benefit is the improved access to coal in future periods, the costs are recognized as a non-current asset, if certain criteria are met. After initial recognition, the production stripping activity asset is amortized on a systematic basis (unit of production method) over the expected useful life of the identified component of the coal seam that becomes more accessible as a result of the stripping activity.

ISAK No. 29 further requires that a stripping activity asset shall be recognized if, and only if, all of the following are met:

- it is probable that the future economic benefit (improved access to the coal seam) associated with the stripping activity will flow to the entity;
- the entity can identify the component of the coal seam for which access has been improved; and
- the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

The implementation of ISAK No. 29 did not result in changes to the Group's accounting policies and had no effect on the amounts reported for prior financial year.

I. Exploration and Evaluation Costs and Assets

Exploration and evaluation activities involve the search for mineral and oil and gas resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource. Such activities include:

- (i) gathering exploration data through topographical, geochemical and geophysical studies;
- (ii) exploratory drilling, trenching and sampling;
- (iii) determining and examining the volume and grade of the resource; and
- (iv) surveying transportation and infrastructure requirements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan pada laba atau rugi. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau izin.

Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dibebankan pada laba atau rugi pada saat terjadinya, kecuali dalam keadaan berikut, dalam hal biaya tersebut dapat dikapitalisasi sehubungan dengan kegiatan batubara dan mineral:

- (i) akuisisi atas konsesi atau izin atas *area of interest* pada tahap eksplorasi dan evaluasi dari pihak ketiga yang diukur pada nilai wajar pada saat akuisisi; atau
- (ii) keberadaan deposit mineral komersial telah ditetapkan.

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah untuk indikasi penurunan nilai. Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap *area of interest* dalam kaitannya dengan kelompok aset operasi terkait (yang merupakan unit penghasil kas) terhadap eksplorasi yang diterkait tersebut. Sejauh biaya eksplorasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan pada laba atau rugi.

Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dalam arus kas konsolidasian, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang dibiayakan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

Administration costs that are not directly attributable to a specific exploration area are charged to profit or loss. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration area are capitalized and amortized over the term of the license or permit.

Exploration and evaluation costs (including amortization of capitalized license costs) are charged to profit or loss as incurred, except in the following circumstances in which case the cost may be capitalized in respect of coal and mineral activities:

- (i) the acquisition of a concession or license area of interest at the exploration and evaluation stage from a third party which is measured at fair value on acquisition; or*
- (ii) when the existence of a commercially viable mineral deposit has been established.*

Capitalized exploration and evaluation costs are recorded under "Exploration and Evaluation Assets" and are subsequently measured at cost less any allowance for impairment. Such assets are not depreciated as they are not available for use but monitored for indications of impairment. Where a potential indication of impairment exists, an assessment is performed for each area of interest in conjunction with the group of operating assets (representing a cash generating unit) to which the exploration is attributed. To the extent that deferred exploration costs are not expected to be recovered, it is charged to profit or loss.

Cash flows associated with capitalized exploration and evaluation costs are classified as investing activities in the consolidated cash flows, while cash flows in respect of exploration and evaluation costs that are expensed are classified as operating cash flows.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (*Lanjutan*)

m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi dengan pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi tertentu terhadap pengeluaran untuk aset kualifikasian tersebut. Seluruh biaya pinjaman lain dibiayakan pada saat terjadinya.

n. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba atau rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba atau rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada periode sebelumnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** (*Continued*)

m. Borrowing Costs

Borrowing costs, either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not specific to the acquisition of a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expensed on the qualifying asset. All other borrowing costs are expensed as incurred.

n. Impairment of Non-financial Assets

At each end of reporting period, the Group evaluates whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment loss recognized in prior periods is recorded when there is an indication that the impairment loss recognized for the asset no longer exists or has decreased. The recovery is recognized in profit or loss. However, the increase in carrying amount of an asset due to a recovery of an impairment loss is recognized to the extent that it does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of depreciation and amortization) had no impairment loss been recognized for that asset in prior periods.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar dan kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dipenuhi jika penjualannya sangat mungkin terjadi dan aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) tersebut tersedia untuk segera dijual dalam kondisi kininya. Manajemen harus berkomitmen terhadap rencana penjualan tersebut, yang diharapkan akan diselesaikan dalam satu (1) tahun setelah tanggal klasifikasi.

Jika Kelompok Usaha berkomitmen terhadap rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak, seluruh aset dan liabilitas entitas anak tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ketika kriteria yang dijelaskan di atas terpenuhi, meskipun setelah penjualan tersebut Kelompok Usaha masih memiliki kepentingan nonpengendali entitas anak terdahulu.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat sebelumnya dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

p. Sewa

Sewa yang mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, sewa pembiayaan dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dicatat dalam laba atau rugi. Aset sewaan yang dimiliki oleh penyewa dengan dasar sewa pembiayaan dicatat pada akun aset tetap dan disusutkan sepanjang masa manfaat dari aset sewaan tersebut atau periode masa sewa, mana yang lebih pendek.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

o. Non-current Assets Held for Sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the non-current asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition. Management must be committed to the sale plan, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one (1) year from the date of classification.

When the Group is committed to a sale plan involving loss of control of a subsidiary, all of the assets and liabilities of that subsidiary are classified as held for sale when the criteria described above are met, regardless of whether the Group will retain a non-controlling interest in its former subsidiary after the sale.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their previous carrying amount and fair value less costs to sell.

p. Leases

Leases that transfer substantially all the risks and benefits incidental to the ownership of the leased item to the lessee are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased assets or at the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than the fair value. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recorded in profit or loss. Leased assets held by the lessee under finance leases are included in fixed assets and depreciated over the estimated useful life of the assets or the lease term, whichever is shorter.

Leases that do not transfer substantially all the risks and benefits incidental to the ownership of the leased item are classified as operating leases.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

q. Taksiran Liabilitas Restorasi dan Rehabilitasi

Kelompok Usaha mempunyai kebijakan untuk memenuhi atau melampaui berbagai ketentuan yang diatur dalam PKP2B dan seluruh kebijakan mengenai lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah terbukti secara teknis dan ekonomis dapat diterapkan. Manajemen pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan Entitas Anak meliputi, namun tidak terbatas pada, penggantian tanah bagian atas (*top soil*), pengerukan endapan pada kolam dan bendungan, pengawasan atas kualitas air, pengolahan limbah, penanaman kembali dan pembibitan hutan.

Taksiran liabilitas restorasi dan rehabilitasi lingkungan ditentukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Beban restorasi dan rehabilitasi tersebut dibebankan sebagai beban produksi. Taksiran liabilitas ditelaah secara rutin dan dampak dari perubahannya diakui secara prospektif.

Pengakuan bagian jangka pendek liabilitas tersebut berdasarkan estimasi dari manajemen.

r. Biaya dan Liabilitas Imbalan Pasti Pascakerja

Kelompok Usaha menentukan liabilitas imbalan pasti pascakerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Perjanjian Kerja Bersama karyawan tetap. Beban imbalan pasti pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*". Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini imbalan pasti dan 10% dari nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan. Keuntungan atau kerugian diakui atas dasar metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. Beban jasa lalu yang terjadi ketika memperkenalkan program imbalan pasti atau mengubah imbalan terutang pada program imbalan pasti yang ada, diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

**q. Estimated Liability for Restoration and
Rehabilitation**

The Group's policy is to meet or surpass the requirements of the CCoW and all applicable environmental regulations issued by the Government of Indonesia (GOI), by application of technically proven and economically feasible measures. Environmental management of the Subsidiaries includes, but is not limited to, top soil replacement, dredging of sediment ponds and dams, water quality control and waste handling, planting and seeding.

Estimated liability for restoration and rehabilitation costs are based principally on legal and regulatory requirements. Such estimated costs as a result of production activities are charged as production cost. Estimates are reassessed regularly and the effects of changes are recognized prospectively.

Recognition of current portion of liability is based on the estimates of the management.

r. Post-employment Benefit Costs and Liabilities

The Group determines its post-employment benefits liabilities under the Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003, as well as the Collective Labor Agreement covering permanent employees. The cost of providing post-employment benefits is determined using the "Projected Unit Credit" method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting period exceeded the higher of 10% of the defined benefit obligation and 10% of the fair value of plan assets at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line basis method over the expected average remaining working lives of the employees. Past service cost arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits obligation of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian pada saat terjadinya. Kurtailmen terjadi jika entitas menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program atau mengubah ketentuan dalam program yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah. Sebelum menentukan dampak kurtailmen atau penyelesaian, Kelompok Usaha mengukur kembali kewajiban dan aset program yang terkait dengan menggunakan asumsi aktuarial yang berlaku.

s. Biaya Emisi Saham

Semua biaya yang terjadi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan Penawaran Umum Terbatas saham Perusahaan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam ekuitas.

t. Saham Beredar yang Diperoleh Kembali

Saham beredar yang diperoleh kembali (*treasury stock*) untuk dikeluarkan lagi di kemudian hari dicatat dengan metode nilai nominal atau *par value method*. Berdasarkan metode ini, saham beredar yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominalnya dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Apabila saham beredar yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun tambahan modal disetor akan disesuaikan. Selisih lebih harga perolehan dari harga penerbitannya akan dikoreksi ke saldo laba.

u. Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

The Group recognizes gains or losses on the curtailment or settlement when it occurs. A curtailment occurs when an entity is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan or amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. Before determining the effect of a curtailment or settlement, the Group remeasures the obligation and the related plan assets using current actuarial assumptions.

s. Share Issuance Costs

Costs incurred in connection with the Initial Public Offering and Rights Issue of the Company's shares are classified as part of "Additional Paid-in Capital" in equity.

t. Treasury Stock

Re-acquisition of capital stock to be held as treasury stocks for future reissuance is accounted for under the par value method. Under this method, treasury stock is presented at par value as a reduction from the capital stock account. If the treasury stock had been originally issued at a price above par value, the related additional paid-in capital account is adjusted. Any excess of the reacquisition cost over the original issuance price is treated as an adjustment to retained earnings.

**u. Difference in Value from Transaction with
Entities Under Common Control**

Business combination of entities under common control is accounted for using the pooling of interest method. The difference between the transfer price and the book value is recorded under the account "Difference in Value from Transaction with Entities under Common Control" and presented as part of "Additional Paid-in Capital" in the consolidated statements of financial position and subsequently should not be recognized as a realized gain or loss or reclassified to retained earnings.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

v. Transaksi Perubahan Ekuitas

Transaksi perubahan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan nilai ekuitas Entitas Anak atau entitas asosiasi yang bukan merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Entitas Anak atau entitas asosiasi diakui sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Entitas Asosiasi", dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.

Transaksi perubahan nilai investasi yang disebabkan terjadinya perubahan nilai ekuitas entitas pengendalian bersama yang bukan merupakan transaksi antara Perusahaan dengan entitas pengendalian bersama diakui sebagai bagian dari ekuitas pada akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Pengendalian Bersama", dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan.

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak penjualan (PPN).

Kelompok Usaha menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Kelompok Usaha berkesimpulan Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Batubara

Penjualan diakui sebagai pendapatan ketika hak kepemilikan atas batubara beralih kepada pembeli dan harga jual sudah ditentukan atau dapat diperkirakan secara wajar. Penjualan disajikan secara neto, setelah dikurangi dengan retur dan klaim dari pembeli.

Sesuai dengan ketentuan dalam PKP2B (untuk KPC dan Arutmin, entitas pengendalian bersama) dan Kuasa Penambangan Batubara (untuk PT Kutai Bara Nusantara (KBN) (dahulu PT Fajar Bumi Sakti (FBS)), Entitas Anak), entitas-entitas tersebut tidak mempunyai hak untuk memiliki atau membeli batubara yang menjadi hak Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan sendiri batubara tersebut dan mengangkutnya dari lokasi penambangan, atau meminta KPC, Arutmin dan KBN untuk menjual semua atau sebagian batubara miliknya kepada pihak ketiga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

v. Changes in Equity Transaction

Changes in the value of investment due to changes in the equity of a Subsidiary or associate arising from capital transactions of such Subsidiary or associate with other parties are recognized in equity as "Difference in the Change in Equity Transaction of a Subsidiary/Associate", and derecognized in the period the investment is disposed.

Changes in the value of investment due to changes in the equity of a jointly controlled entity arising from capital transactions with other parties without loss of joint control over that jointly controlled entity are recognized in equity as "Difference in the Change in Equity Transaction of Jointly Controlled Entities", and derecognized in the period the investment is disposed.

w. Revenues and Expenses Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and sales taxes (VAT).

The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria in order to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Coal

Sale is recognized as earned when the title for coal passes to the customer and selling prices are known or can be reasonably estimated. Sales are presented net of quality claims and customer rejections.

Under the terms of the CCoW (for KPC and Arutmin, jointly controlled entities) and Coal Mining Rights (for PT Kutai Bara Nusantara (KBN) (formerly PT Fajar Bumi Sakti (FBS)), a Subsidiary), the entities have no right to take title to or purchase the GOI's share of coal. The GOI can use its own share of coal and transport it from the mine process facilities or may request KPC, Arutmin and KBN to sell all or a part of its share of coal to third parties.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(Lanjutan)*

Penjualan KPC, Arutmin dan KBN termasuk penjualan batubara yang menjadi hak Pemerintah Indonesia yang dijual oleh KPC, Arutmin dan KBN.

Jasa

Pendapatan jasa merupakan jasa manajemen dan diakui pada saat jasa telah dilakukan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak periode berjalan.

Pajak penghasilan dalam laba atau rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba atau rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau pendapatan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau pendapatan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan pada setiap akhir periode pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES** *(Continued)*

Sales of KPC, Arutmin and KBN include amounts pertaining to the GOI's coal entitlement that have been shipped and sold by KPC, Arutmin and KBN.

Service

Service revenue represents management fees and is recognized when the service has been performed.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (accrual basis).

x. Income Taxes

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period.

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at the end of each reporting period. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

KPC dan Arutmin menggunakan tarif pajak yang diatur dalam PKP2B dalam menghitung pajak penghasilan. Berdasarkan PKP2B (Catatan 49a), tarif pajak tahunan adalah 35% untuk sepuluh (10) tahun pertama sejak dimulainya periode operasi, dan 45% untuk sisa periode operasi. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pajak tangguhan KPC dan Arutmin telah diukur dengan menggunakan tarif pajak 45%.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Namun jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya, jumlah tersebut ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

y. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

1) Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang ada dalam laporan keuangan dari setiap entitas Kelompok Usaha diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomis utama dimana entitas usaha tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). USD merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. USD juga merupakan mata uang dimana laporan keuangan konsolidasian disajikan, karena hal ini diyakini dapat mencerminkan kinerja bisnis global Kelompok Usaha secara keseluruhan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities that intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

KPC and Arutmin used tax rates specified in the CCoW to determine income taxes. Under the CCoW (Note 49a), the annual tax rates are 35% during the first full ten (10) years from the commencement of the operating period, and 45% during the remainder of the operating period. As of December 31, 2014 and 2013, deferred taxes of KPC and Arutmin have been measured at a tax rate of 45%.

Additional tax principal and penalty amounts based on Tax Assessment Letters ("SKP") are recognized as income or expense in profit or loss. However when further avenue is sought, such amounts are deferred if they meet the asset recognition criteria.

y. Foreign Exchange Transactions and Translation

1) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which each entity operates (the "functional currency"). USD is the functional currency of the Group. It is also the currency in which the Group's consolidated financial statements are presented, as it most reliably reflects global business performance of the Group as a whole.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2) Transaksi dan saldo

Transaksi-transaksi dalam periode berjalan yang menggunakan mata uang yang bukan Dolar AS dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang yang bukan Dolar AS tersebut disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada setiap akhir periode pelaporan. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba atau rugi.

3) Penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional

Posisi keuangan dan hasil usaha dari semua entitas (tidak ada mata uang yang mengalami ekonomi hiper-inflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian dijabarkan ke dalam mata uang penyajian menggunakan prosedur berikut ini:

- (i) aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
- (ii) pendapatan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi atau, untuk alasan praktis, menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut; dan
- (iii) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, yang termasuk dalam "Cadangan Modal Lainnya".

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang muncul pada akuisisi entitas asing diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari entitas asing dan dijabarkan menggunakan kurs penutup.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs yang digunakan adalah kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

	2014	2013	
10.000 Rupiah Indonesia	0,81	0,82	10,000 Indonesian Rupiah
1 Pound Sterling Inggris	1,56	1,65	1 UK Pound Sterling
1 Euro	1,22	1,38	1 Euro
1 Dolar Australia	0,82	0,89	1 Australian Dollar
100 Yen Jepang	0,84	0,95	100 Japanese Yen
1 Dolar Singapura	0,76	0,79	1 Singaporean Dollar
100 Ouguiya Mauritania	0,35	0,35	100 Mauritanian Ouguiya

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

2) Transactions and balances

Transactions during the period involving other currencies are recorded in USD at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. Monetary assets and liabilities denominated in other currencies are adjusted to USD to reflect the rates of exchange prevailing at the end of the reporting period. The resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

3) Use of presentation currency other than the functional currency

The financial position and results of all entities (none of which has the currency of a hyper-inflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency are translated into the presentation currency using the following procedures:

- (i) assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of the statement;
- (ii) income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at the exchange rates at the dates of the transactions or, for practical reasons, at the average exchange rate for the year; and
- (iii) all resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income under exchange differences due to financial statements translation, which is included in "Other Capital Reserves".

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and liabilities of the foreign entity and translated at the closing rate.

As of December 31, 2014 and 2013, the exchange rates used were the middle rates published by Bank Indonesia as follows:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

z. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi neto dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Laba atau rugi per saham dilusi dihitung dengan membagi laba atau rugi neto dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa setelah disesuaikan dengan efek dari saham biasa yang sifatnya berpotensi untuk dilusi.

aa. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha memiliki transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana ditentukan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga ataupun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

bb. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar kelompok usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

z. Earnings or Loss per Share

Basic earnings or loss per share is computed by dividing net income or loss by the weighted average number of issued and outstanding shares of stock during the period.

Diluted earnings or loss per share is computed by dividing net income or loss by the weighted average number of issued and outstanding shares as adjusted for the effects of all potential dilution.

aa. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with certain parties, which have a related party relationship as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures". The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All significant transactions with related parties whether or not conducted under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

bb. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the Chief Operating Decision Maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of the consolidation process.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

cc. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi tersebut dihapuskan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang ada pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi yang ada mengenai perkembangan di masa mendatang dapat berubah akibat perubahan pasar atau keadaan yang timbul di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi saat hal tersebut terjadi.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

cc. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

The following judgments, estimates and assumptions were made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Penentuan keberadaan pengendalian bersama dalam entitas pengendalian bersama

Pengendalian bersama adalah kesepakatan kontraktual pembagian pengendalian atas aktivitas ekonomi dan keberadaannya hanya bila keputusan keuangan dan operasi strategis yang berhubungan dengan kegiatan yang memerlukan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang bersama-sama memegang pengendalian. Manajemen Kelompok Usaha menentukan bahwa terdapat pengendalian bersama atas Perusahaan Batubara (PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, IndoCoal Resources (Cayman) Limited, IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited, PT IndoCoal Kalsel Resources dan PT IndoCoal Kaltim Resources), karena keputusan atas kegiatan ekonomi dari entitas tersebut dibuat secara bersama-sama oleh para ventura.

Menentukan apakah pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan investee

Menentukan apakah Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan terhadap investee membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Umumnya, kepemilikan saham sebesar 20% sampai 50% hak suara investee dianggap Kelompok Usaha memiliki pengaruh yang signifikan. Pengendalian juga dianggap ada apabila entitas induk memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas kecuali, dalam keadaan luar biasa, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Manajemen entitas induk telah menetapkan bahwa, meskipun hanya memiliki 50% kepemilikan di beberapa entitas anak, Kelompok Usaha memiliki pengendalian untuk memberikan suara mayoritas pada rapat Direksi dan mengendalikan entitas melalui Direksi. Selanjutnya, manajemen juga telah memutuskan bahwa, walaupun memiliki lebih dari 50% kepemilikan di beberapa entitas investee, Kelompok Usaha tidak memiliki pengendalian berdasarkan perjanjian.

Konsolidasi entitas bertujuan khusus (EBK)

Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengidentifikasi EBK untuk tujuan konsolidasi. Suatu entitas dianggap sebagai EBK dan termasuk dalam konsolidasi, bahkan dalam kasus ketika entitas induk memiliki kurang dari satu-setengah atau tidak ada kepemilikan di EBK jika substansi hubungan antara entitas induk dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh entitas induk. Perusahaan telah mengkonsolidasi beberapa EBK karena Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi serta kegiatan EBK ini terutama memberikan manfaat bagi Perusahaan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determination if joint control exists in a jointly controlled entity

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity and exists only when the strategic financial and operating decisions relating to the activity require the unanimous consent of the parties sharing control. Management of the Group determined that it has joint control over the Coal Companies (PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, IndoCoal Resources (Cayman) Limited, IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited, PT IndoCoal Kalsel Resources dan PT IndoCoal Kaltim Resources), since the decisions on economic activities of these entities are made jointly by the venturers.

Determination if significant influence or control exists in an investee company

Determining whether the Group has significant influence only in an investee requires significant judgment. Generally, a shareholding of 20% to 50% of the voting rights of an investee is presumed to give the Group a significant influence. Control is presumed to exist when the parent company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not constitute control.

Management of the parent company has determined that, despite only having 50% ownership in some of its subsidiaries, the Group has control by virtue of its power to cast the majority votes at meetings of their Boards of Directors and control of the entity is by those Boards of Directors. Furthermore, the management has determined that, despite having more than 50% ownership in some of its investee companies, the Group has no control by virtue of agreements.

Consolidation of a special purpose entity (SPE)

Management exercises its judgment in identifying SPEs for consolidation. An entity is considered an SPE and included in consolidation, even in cases when the parent company owns less than one-half or none of the SPE's equity, when the substance of the relationship between the parent company and the SPE indicates that the SPE is controlled by the parent company. The Company has included in consolidation some SPEs since the Company has the ability to govern its financial and operating policies and the activities of these SPEs primarily benefit the Company.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Menentukan apakah akuisisi merupakan kombinasi
bisnis

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan apakah akuisisi suatu entitas merupakan kombinasi bisnis. Kelompok Usaha menilai apakah entitas yang diambil alih memenuhi definisi bisnis sebagaimana diatur dalam PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis". Jika entitas yang diakuisisi termasuk dalam definisi yang ditentukan sebagai bisnis, maka akuisisi dicatat sebagai kombinasi bisnis. Apabila entitas yang diambil alih tidak termasuk dalam definisi yang ditentukan sebagai bisnis, maka akuisisi diperlakukan sebagai akuisisi aset.

Pada tahun 2013, Kelompok Usaha mengakuisisi beberapa perusahaan dan telah menetapkan bahwa akuisisi tersebut tidak termasuk dalam definisi bisnis sehingga telah mengakui transaksi tersebut dengan menggunakan metode akuisisi aset.

Menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas
keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Menentukan nilai wajar atas instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif (sebagai contoh: derivatif) ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi. Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan ini untuk memilih variasi metode-metode dan menggunakan asumsi-asumsi yang pada hakikatnya berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada akhir periode pelaporan tersebut. Kelompok Usaha telah menggunakan analisis arus kas yang didiskontokan dan metode analisis lainnya untuk berbagai derivatif yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (Catatan 47).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining whether the acquisition constitutes a
business combination

Significant judgment is required in determining whether the acquisition of an entity constitutes a business combination. The Group assesses whether the entity acquired meets the definition of a business as set out in PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combination". If the entity acquired falls within the prescribed definition of a business, it is accounted for as a business combination. Where the entity acquired does not fall within the prescribed definition of a business, it is treated as an assets acquisition.

In 2013, the Group acquired several companies and has determined that the acquisition does not fall under the definition of a business, thus it recognized the transaction using the asset acquisition method.

Determining classification of financial assets and
financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

Determining fair value of financial instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's profit or loss.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example: derivatives) is determined by using valuation techniques. The Group uses its judgment to select a variety of methods and makes assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting period. The Group has used discounted cash flows analysis and other methods for various derivatives that are not traded in active markets (Note 47).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Menentukan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. Kelompok Usaha mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Kelompok Usaha, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Dolar Amerika Serikat (USD), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Kelompok Usaha dipengaruhi oleh penetapan harga di pasar komoditas internasional dengan lingkungan ekonomis USD.

Alokasi harga beli dalam suatu kombinasi bisnis

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi untuk mengalokasikan harga perolehan terhadap nilai pasar wajar dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Setiap kelebihan dari harga perolehan atas nilai pasar wajar yang diestimasi dari aset neto yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, pertimbangan yang dibuat dalam mengestimasi nilai pasar wajar yang diatribusikan ke aset dan liabilitas entitas yang diakuisisi dapat mempengaruhi kinerja keuangan Kelompok Usaha secara material.

Menilai penyisihan piutang

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa beberapa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang ada, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang (Catatan 9 dan 10).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determination of functional currency

The functional currency of the entities under the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be United States Dollar (USD), as this reflected the fact that majority of the Group's businesses are influenced by pricing in internationally commodity markets with a USD economic environment.

Purchase price allocation in a business combination

Accounting of acquisition requires extensive use of accounting estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair market values of the acquiree's identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Any excess in the purchase price over the estimated fair market values of the net assets acquired is recorded as goodwill in the consolidated financial statements. Thus, the numerous judgments made in estimating the fair market value to be assigned to the acquiree's assets and liabilities can materially affect the Group's financial performance.

Assessing impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the allowance for impairment (Notes 9 and 10).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Memperkirakan penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi (Catatan 11).

Menentukan penyusutan aset tetap dan umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara tiga (3) sampai tiga puluh (30) tahun atau hingga sisa masa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mana yang lebih pendek. Hal ini merupakan umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan pada tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan oleh sebab itu biaya penyusutan masa depan dapat direvisi (Catatan 2j dan 16).

Menentukan perkiraan cadangan batubara

Kelompok Usaha menggunakan laporan cadangan batubara sesuai dengan *Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves* (edisi 2004) ("JORC Code 2004"), dibuat dan diterbitkan oleh *The Joint Ore Reserve Committee (JORC) of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia*.

Menurut JORC Code 2004, istilah "sumber batubara" adalah suatu konsentrasi atau kejadian atas batubara yang memiliki nilai ekonomi dalam atau pada kerak bumi, dalam bentuk dan kuantitas yang memiliki prospek yang memadai untuk ditambang. Lokasi, kuantitas, kualitas, karakteristik geologi dan keberlanjutan atas sumber batubara dapat diketahui, diperkirakan atau ditafsirkan melalui bukti geologi yang spesifik dan ilmu pengetahuan. Sumber daya batubara digolongkan, menurut urutan peningkatan keyakinan geologi, menjadi kategori tereka, terindikasi dan terukur.

Istilah "cadangan batubara" didefinisikan oleh *JORC Code 2004* sebagai bagian dari sumber batubara yang terukur dan terindikasi, yang dapat ditambang secara ekonomis. Cadangan batubara dibagi menurut peningkatan keyakinan menjadi "cadangan terestimasi" dan "cadangan terbukti".

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Estimating allowance for decline in market value and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated (Note 11).

Determining depreciation method and useful life of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within three (3) up to thirty (30) years or the remaining term of the Coal Contract of Work (CCoW), whichever period is shorter. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised (Notes 2j and 16).

Determining coal reserve estimates

The Group uses the coal reserves reports in accordance with the *Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves* (2004 edition) (the "JORC Code 2004"), prepared and published by *The Joint Ore Reserves Committee (JORC) of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia*.

Under the 2004 JORC Code, the term "coal resource" refers to a concentration or occurrence of coal of intrinsic economic interest in or on the earth's crust in such form and quantity that there are reasonable prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, grade, geological characteristics and continuity of a coal resource are known, estimated or interpreted from specific geological evidence and knowledge. Coal resources are subdivided, in order of increasing geological confidence, into "inferred," "indicated" and "measured" categories.

The term "coal reserve" is defined in the *JORC Code 2004* as the economically mineable part of a measured and indicated coal resource. Coal reserves are subdivided in order of increasing confidence into "probable coal reserves" and "proved coal reserves".

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Cadangan, dan untuk tambang tertentu, sumber daya mineral lainnya, ditentukan dengan cara digunakan dalam perhitungan biaya penyusutan, amortisasi dan penurunan nilai, penilaian umur rasio pengupasan tanah dan perkiraan waktu pembayaran penutupan dan biaya restorasi dan pembersihan.

Dalam menilai umur tambang untuk tujuan akuntansi, sumber daya mineral hanya diperhitungkan dimana ada tingkat keyakinan yang tinggi atas penambangan yang ekonomis.

Ada berbagai ketidakpastian melekat dalam mengestimasi cadangan dan asumsi yang berlaku pada saat estimasi dapat berubah secara signifikan ketika informasi baru tersedia. Perubahan perkiraan harga komoditas, nilai tukar, biaya produksi atau tingkat pemulihan dapat mengubah status keekonomisan atas cadangan dan mungkin pada akhirnya dapat mengakibatkan perubahan terhadap perkiraan cadangan.

Menentukan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Kelompok Usaha atas biaya eksplorasi dan evaluasi memerlukan pertimbangan untuk menentukan apakah mungkin manfaat ekonomis masa mendatang dapat menghasilkan eksploitasi di masa mendatang atau penjualan atau aktivitas eksplorasi tidak mencapai tahap penilaian yang layak atas keberadaan cadangan. Penentuan sumber daya JORC sendiri merupakan proses estimasi yang dibutuhkan, berbagai tingkat ketidakpastian tergantung pada subklasifikasi dan estimasi ini berdampak langsung terhadap biaya eksplorasi dan evaluasi. Berdasarkan kebijakan tangguhan, manajemen mengharuskan untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu tentang kejadian masa depan atau kondisi-kondisi, khususnya apakah kegiatan penambangan ekonomis dapat didirikan. Estimasi dan asumsi dapat sangat beragam jika kemudian informasi baru tersedia. Jika, setelah kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi (yaitu aset eksplorasi dan evaluasi) dicatat, informasi baru menunjukkan perkiraan bahwa pemulihan dari biaya tangguhan tersebut tidak memungkinkan, maka biaya tersebut dihapuskan (Catatan 18).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Reserves, and for certain mines, other mineral resources, determined in this way are used in the calculation of depreciation, amortization and impairment charges, the assessment of life of mine stripping ratios and for forecasting the timing of the payment of close-down and restoration costs and clean-up costs.

In assessing the life of a mine for accounting purposes, mineral resources are only taken into account where there is a high degree of confidence of economic extraction.

There are numerous uncertainties inherent in estimating reserves and assumptions that are valid at the time of estimation may change significantly when new information becomes available. Changes in the forecast prices of commodities, exchange rates, production costs or recovery rates may change the economic status of reserves and may, ultimately, result in changes to reserve estimates.

Determining capitalization of exploration and evaluation costs

The application of the Group's accounting policy for exploration and evaluation costs requires judgment in determining whether it is likely that future economic benefits are likely either future exploitation or sale or where activities have not reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence of reserves. The determination of a JORC resource is itself an estimation process which requires varying degrees of uncertainty depending on sub-classification and these estimates directly impact the point of exploration and evaluation costs. Under the deferral policy, the management is required to make certain estimates and assumptions about future events or circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. Estimates and assumptions may vary if new information becomes available. If, after the capitalized exploration and evaluation cost (i.e. exploration and evaluation asset) is recorded, a new information suggests that recovery of such cost is not possible, such cost is then written-off (Note 18).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Menentukan kapitalisasi dan amortisasi kegiatan
pengupasan tanah pada aset produksi

Kelompok Usaha mengkapitalisasi biaya produksi kegiatan pengupasan tanah sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dimana biaya tersebut diperkirakan dapat meningkatkan akses ke lapisan batubara di masa mendatang berdasarkan kriteria tertentu. Jika jumlah yang akan dikapitalisasi tidak dapat diidentifikasi secara khusus, maka ditentukan berdasarkan volume pengupasan yang diekstraksi dibandingkan dengan volume yang diharapkan untuk komponen teridentifikasi dari lapisan batubara. Penentuan komponen ini tergantung pada desain tambang dan rencana tambang secara individu dan oleh karena itu, perubahan desain tambang atau rencana tambang akan menghasilkan perubahan estimasi. Penilaian tersebut tergantung pada berbagai faktor termasuk fitur operasional spesifik setiap tambang dan desain tambang. Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha tidak memiliki biaya pengupasan yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi menjadi aset sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Rasio umur tambang didasarkan pada cadangan terbukti dan terestimasi serta sangat tergantung pada desain tambang, dan secara teknis dan ekonomi diasumsikan selama umur tambang. Kelompok Usaha menelaah rasio umur tambang secara periodik.

Penentuan tanggal mulai produksi

Kelompok Usaha menelaah tahap pengembangan setiap proyek pertambangan untuk menentukan kapan sebuah pertambangan pindah ke tahap produksi. Kriteria yang digunakan untuk menelaah tanggal dimulainya sebuah pertambangan adalah ditentukan berdasarkan sifat yang unik dari setiap proyek pengembangan pertambangan. Kelompok Usaha mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan untuk menelaah kapan pertambangan secara mendasar selesai, siap untuk digunakan dan pindah ke tahap produksi. Beberapa kriteria termasuk, tetapi tidak terbatas pada sebagai berikut:

- tingkat belanja modal dibandingkan dengan estimasi biaya konstruksi;
- penyelesaian periode pengujian atas aset tetap pertambangan yang masuk akal;
- kemampuan untuk memproduksi batubara dalam bentuk yang dapat dijual; dan
- kemampuan untuk mempertahankan produksi batubara yang sedang berlangsung.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining capitalization and amortization of
production stripping activity assets

The Group capitalizes production stripping activity costs as assets in the consolidated statement of financial position where they are considered to improve access to coal in future periods based on certain criteria. Where the amount to be capitalized cannot be specifically identified, it is determined based on the volume of the overburden extracted compared with expected volume for the identified component of the coal seam. This determination of a component is dependent on an individual mine's pit design and mine plans and therefore changes to the pit design or mine plans will result in changes to these estimates. The assessment depends on a range of factors including each mine's specific operational features and pit design. As of December 31, 2014, the Group does not have production stripping activity costs that are qualified for capitalization to assets in accordance with the Group's accounting policies.

The life of mine ratio is based on proved and probable reserves of the mine and is also highly dependent on the design of the mine and on the technical and economic parameters assumed over the life of the mine. The Group reviews regularly the life of mine ratio.

Determination of production start date

The Group assesses the stage of each mine development project to determine when a mine moves into the production stage. The criteria used to assess the start date of a mine are determined based on the unique nature of each mine development project. The Group considers various relevant criteria to assess when the mine is substantially complete, ready for its intended use and moves into the production phase. Some of the criteria include, but are not limited to the following:

- the level of capital expenditure compared to construction cost estimates;
- completion of a reasonable period of testing of the mine fixed assets;
- ability to produce coal in saleable form; and
- ability to sustain ongoing production of coal.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Pada saat proyek pengembangan pertambangan pindah ke tahap produksi, kapitalisasi dari biaya-biaya konstruksi pertambangan tertentu dihentikan dan biaya-biaya dianggap sebagai persediaan atau beban, kecuali untuk biaya-biaya yang dikapitalisasi sehubungan dengan tambahan atau perbaikan-perbaikan aset pertambangan, pengembangan pertambangan bawah tanah atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang. Sehingga pada saat ini juga penyusutan/amortisasi dimulai.

Menilai penurunan nilai aset nonkeuangan tertentu

PSAK No. 48 (Revisi 2009) mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset nonkeuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Kelompok Usaha yang dapat memicu penilaian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) kinerja yang kurang signifikan terkait dengan hasil ekspektasi historis atau hasil operasional proyek di masa depan;
- b) perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) tren negatif yang signifikan dari industri dan ekonomi.

Penilaian penurunan nilai juga harus dilakukan untuk aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan fakta dan keadaan seperti yang diidentifikasi dalam PSAK No. 64.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset nonkeuangan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan memerlukan estimasi nilai pakai unit penghasil kas (UPK) atas aset yang milik. Memperkirakan nilai pakai mensyaratkan Kelompok Usaha untuk membuat perkiraan arus kas yang diharapkan dari unit penghasil kas dan juga untuk memilih tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut. UPK adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Manajemen diharuskan untuk melakukan penilaian dalam mengidentifikasi UPK tersebut.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

When a mine development project moves into the production stage, the capitalization of certain mine construction costs ceases and costs are either regarded as inventory or expensed, except for capitalizable costs related to mining asset additions or improvements, underground mine development or mineable reserve development. It is also at this point that depreciation/amortization commences.

Assessing impairment of certain non-financial assets

PSAK No. 48 (Revised 2009) requires that an impairment review be performed on certain non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to the expected historical or project future operating results;*
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
- c) significant negative industry or economic trends.*

An impairment review should also be performed for exploration and evaluation assets based on facts and circumstances as identified under PSAK No. 64.

An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of a non-financial asset exceeds its recoverable amount. Determining the recoverable amount of such assets requires the estimation of cash flows expected to be generate from the continued use and ultimate disposition of such assets. Determining the recoverable amount requires an estimation of the value-in-use of the cash generating units (CGU) to which the assets belong. Estimating value-in-use requires the Group to make an estimate of the expected cash flows from the cash generating units and also to choose a suitable rate to calculate the present value of these cash flows. The asset's CGU is the smallest group of assets that includes the asset and generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets. Management is required to exercise judgment in identifying these CGUs.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha menilai bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada akun investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, properti pertambangan, *goodwill* dan aset tidak lancar lainnya. Akan tetapi, rugi penurunan nilai diakui untuk aset eksplorasi dan evaluasi. Reviu penurunan nilai juga harus dilakukan untuk aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan fakta dan keadaan seperti yang diidentifikasi dalam PSAK No. 64 (Catatan 15, 16, 17, 18, 19 dan 21).

Memperkirakan penyisihan untuk restorasi lingkungan dan rehabilitasi

Parameter-parameter yang memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah provisi yang terkait dengan restorasi dan rehabilitasi lingkungan termasuk waktu pengeluaran dan tingkat diskonto yang diterapkan pada arus kas serta tingkat pengeluaran aktual. Parameter-parameter ini didasarkan pada informasi dan perkiraan tersedia bagi Kelompok Usaha saat ini, termasuk umur tambang dan sisa jangka waktu hak Kuasa Pertambangan, PKP2B atau Kontrak Karya.

Jumlah yang dibutuhkan untuk rehabilitasi lingkungan dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan yang sedang berlangsung di Indonesia, setelah dikeluarkannya Undang-undang Mineral dan Batubara No. 4/2009 pada tanggal 12 Januari 2009. Sejalan dengan implementasi persyaratan baru oleh Pemerintah Indonesia menjadi lebih jelas, ada kemungkinan untuk merevisi provisi atas rehabilitasi lingkungan.

Sebagai tambahan, perkiraan biaya dapat bervariasi bergantung pada berbagai macam faktor termasuk munculnya teknik restorasi baru atau pengalaman di lokasi tambang lainnya. Waktu yang diharapkan dari pengeluaran juga dapat berubah, sebagai contoh perubahan dalam cadangan atau tingkat produksi. Akibatnya mungkin ada penyesuaian yang signifikan terhadap provisi atas rehabilitasi lingkungan yang akan mempengaruhi posisi keuangan masa depan (Catatan 28).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS** *(Continued)*

As of December 31, 2014, the Group assessed that there is no indication of impairment on investments in associates, fixed assets, mining properties, goodwill and other non-current assets accounts. However, impairment loss was recognized under exploration and evaluation assets. An impairment review should be performed for exploration and evaluation assets based on facts and circumstances as identified under PSAK No. 64 (Notes 15, 16, 17, 18, 19 and 21).

Estimating provision for environmental restoration and rehabilitation

Parameters having a significant influence on the amount of provisions relating to environmental restoration and rehabilitation include the timing of expenditure and the discount rate applied to cash flows, as well as the actual level of expenditure. These parameters are based on information and estimates available to the Group at the current time, including the life of mine and the remaining term of the Coal Mining Rights, CCoW or Contract of Work.

The amounts required to be provided for environmental remediation are subject to ongoing regulatory change in Indonesia, subsequent to the issuance of the new Mineral and Coal Mining Law No. 4/2009 dated January 12, 2009. As the Government of Indonesia's implementation of new requirements becomes clearer, there may be a need to revise the rehabilitation provision.

In addition, cost estimates can vary in response to many other factors including, the emergence of new restoration techniques or experience at other mine sites. The expected timing of expenditure can also change, for example in response to changes in reserves or production rates. As a result there could be significant adjustments to the provision, which would affect future financial results (Note 28).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Menentukan biaya dan liabilitas imbalan pasti
pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasti pascakerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh lebih dari 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas biaya dan liabilitas imbalan pasti pascakerja dan beban imbalan kerja bersih (Catatan 29).

Mengevaluasi perjanjian sewa

Kelompok Usaha menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Kelompok Usaha. Sewa guna usaha dimana Kelompok Usaha memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi (Catatan 16 dan 27).

Menilai pajak penghasilan

Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai (Catatan 43).

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (Continued)**

Determining post-employment benefit costs and
liabilities

The determination of the Group's liabilities and costs for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions which effects are more than 10% of the present value of defined benefit obligations are deferred and being amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its post-employment benefit costs and liabilities (Note 29).

Evaluating lease agreements

The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as finance lease, otherwise it is accounted for as operating lease (Notes 16 and 27).

Assessing income tax

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

The Group reviews its deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient future taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly (Note 43).

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (Lanjutan)**

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Kelompok Usaha saat ini sedang terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum/pajak Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mempertimbangkan faktor risiko dan ketidakpastian.

Kelompok Usaha tidak berkeyakinan bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Menentukan nilai wajar dan biaya untuk menjual serta klasifikasi dari aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Nilai wajar dan biaya untuk menjual dari aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar terkait dengan aset dalam kondisi kininya. Setiap perubahan dalam prospek pasar mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran nilai wajar dan biaya untuk menjual dari aset tersebut dan bisa mengakibatkan penyesuaian pada jumlah yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Penentuan aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual berdasarkan pertimbangan manajemen yang mungkin berubah akibat perubahan situasi di masa mendatang yang di luar kendali Kelompok Usaha (Catatan 13).

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA

a. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Entitas Asosiasi

- 1) Pada bulan Desember 2010, kepemilikan Perusahaan di PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), Entitas Anak, menurun dari 100% menjadi 81,84% sehubungan dengan penawaran saham perdana. Selisih antara kepemilikan saham Perusahaan atas ekuitas BRMS yang terjadi setelah penerbitan saham baru dengan nilai tercatat atas investasi sebelum penerbitan saham baru adalah sebesar USD3.636.954 dicatat sebagai selisih transaksi perubahan ekuitas.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Evaluating provisions and contingencies

The Group is currently involved in various legal and tax proceedings. The management exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies mainly through consultation with the Group's legal/tax counsel handling those proceedings. The Group sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions. In recognizing and measuring provisions, the management takes risk and uncertainty into account.

The Group does not believe that those proceedings will have a significant adverse effect on its consolidated financial statements.

Determining fair value and costs to sell, and the classification of non-current assets held for sale

Fair value and costs to sell of non-current assets and disposal groups classified as held for sale are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook associated with the asset in its present condition. Any changes in the expected market outlook may have a material impact on the measurement of the fair value and costs to sell and could result in adjustments to the amount booked in the consolidated financial statements.

The determination of non-current assets and disposal groups classified as held for sale are based on management's judgment that may change due to changes of circumstances in the future arising beyond the control of the Group (Note 13).

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

a. Difference in the Change in Equity Transaction of a Subsidiary/Associate

- 1) In December 2010, the Company's ownership interest in PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), a Subsidiary, decreased from 100% to 81.84% in relation to the initial public offering. The difference between the Company's share in the equity of BRMS subsequent to the new share issuance and the Company's share in the equity of BRMS prior to the new share issuance amounted to USD3,636,954 was recorded under difference in the change in equity transaction.

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA (Lanjutan)

- 2) Terkait dengan penawaran umum terbatas atas saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA), entitas asosiasi, pada tahun 2010, dimana PT Bumi Resources Investment (BRI), Entitas Anak, tidak ikut berpartisipasi, kepemilikan efektif BRI di DEWA terdilusi menjadi 28,79%. Selisih antara kepemilikan saham Perusahaan terhadap ekuitas DEWA setelah penerbitan saham dengan kepemilikan saham Perusahaan terhadap ekuitas DEWA sebelum penerbitan saham sebesar USD29.179.911. Kepemilikan efektif BRI meningkat menjadi 31,43% sejalan dengan penerbitan saham baru DEWA, sehingga selisih transaksi perubahan ekuitas yang diakui adalah sebesar USD1.012.036 dan USD4.048.144 masing-masing pada tahun 2012 dan 2011.

b. Sahara Resources Pte. Ltd.

Pada bulan Juni 2013, investasi Sahara di Tamagot Bumi S.A. telah dialihkan kepada Bumi Mauritania S.A.

c. Konblo Bumi, Inc. (Konblo)

Pada tanggal 18 Januari 2013, *Trinity Business Corporation* (TBC) telah menyetujui untuk menerima 1.515 lembar saham baru yang dikeluarkan oleh Konblo sehingga total kepemilikan saham TBC pada Konblo adalah 1.520 lembar atau sebesar 95% dari seluruh saham yang dikeluarkan. Dengan adanya penerbitan saham baru tersebut, maka kepemilikan saham Lemington terhadap Konblo berkurang menjadi sebesar 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan, sehingga Perusahaan tidak lagi melakukan konsolidasi laporan keuangan Konblo.

d. Akuisisi kepemilikan Entitas Anak atas Proyek Batubara di Sumatera

Berdasarkan Perjanjian Konversi Utang menjadi Penyertaan Modal, Perusahaan, melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, PT Citra Prima Sejati atau PT Lumbung Capital (pengakuisisi), dan Entitas Anak (yang diakuisisi) setuju untuk mengkonversi piutang menjadi penyertaan modal atau investasi di Entitas Anak dan seluruh piutang tersebut dianggap diselesaikan secara efektif pada tanggal perjanjian. Piutang ini merupakan dana yang sebelumnya dipegang oleh perantara pihak ketiga Perusahaan dan dicatat sebagai bagian dari biaya proyek pengembangan usaha dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akuisisi kepemilikan pada Entitas Anak, yang merupakan Proyek Batubara di Sumatera, terkait dengan Perjanjian Penyelesaian antara Perusahaan dan perantara pihak ketiga (Catatan 21).

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES (Continued)

- 2) Following a rights issue of PT Darma Henwa Tbk (DEWA), an associate, in 2010 in which PT Bumi Resources Investment (BRI), a Subsidiary, did not participate, the effective interest of BRI in DEWA was diluted to 28.79%. The difference between the Company's share in the equity of DEWA subsequent to the new share issuance and the Company share in the equity of DEWA prior to the new share issuance amounted to USD29,179,911. BRI's effective ownership interest increased to 31.43% following DEWA's issuance of new shares, resulting in a recognition of difference in the change in equity transaction amounted to USD1,012,036 and USD4,048,144 in 2012 and 2011, respectively.

b. Sahara Resources Pte. Ltd.

In June 2013, the ownership of Sahara in Tamagot Bumi S.A. has been assigned to Bumi Mauritania S.A.

c. Konblo Bumi, Inc. (Konblo)

On January 18, 2013, *Trinity Business Corporation* (TBC) agreed to receive 1,515 new shares issued by Konblo with the result TBC's shares ownership in Konblo became 1,520 or equivalent to 95% of the total paid-up capital. By the issuance of the new shares, shares ownership of Lemington in Konblo has been reduced up to 5% of the total shares issued, therefore, the Company no longer consolidates the financial statements of Konblo.

d. Acquisition of ownership interests in Subsidiaries under the Sumatera Coal Project

Under each Agreement on Conversion of Debt into Capital Participation, the Company, through its wholly-owned subsidiaries, PT Citra Prima Sejati or PT Lumbung Capital (the acquirer), and the Subsidiary (the acquiree) agreed to convert the receivables into capital participation or investments in the Subsidiary and that such receivables were considered settled effectively upon the date of the agreement. These receivables represents funds previously held by a third-party intermediary of the Company and are recorded as part of business development project costs in the consolidated statements of financial position. The acquisition of the ownership interests in the Subsidiaries, which represents the Sumatera Coal Project, relates to the Settlement Agreement between the Company and third-party intermediary (Note 21).

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA (Lanjutan)

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES (Continued)

Entitas Anak tersebut memegang konsensi batubara dan masih dalam tahap eksplorasi (Catatan 1d dan 1f). Rincian Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The Subsidiaries hold coal concessions and are still under exploration stage (Notes 1d and 1f). Details of the Subsidiaries were as follows:

Pihak yang Diakuisisi/Entitas Anak <i>Name of Acquiree/Subsidiaries</i>	Pihak Pengakuisisi/ <i>Name of Acquirer</i>	Tanggal Efektif Perjanjian/Akuisisi / <i>Effective Date of the Agreement/Acquisition</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership (%)</i>	Jumlah Piutang Dikonversi / <i>Amount of Receivables Converted</i>
PT Mitra Bisnis Harvest	PT Citra Prima Sejati	28 November 2013/ November 28, 2013	99,69%	33.108.959
PT Buana Minera Harvest	PT Citra Prima Sejati	28 November 2013/ November 28, 2013	99,96%	61.659.209
PT MBH Mining Resource	PT Citra Prima Sejati	28 November 2013/ November 28, 2013	99,92%	34.982.778
PT Bintang Mineral Resource	PT Lumbung Capital	20 Desember 2013/ December 20, 2013	99,96%	62.888.276
PT MBH Minera Resource	PT Lumbung Capital	20 Desember 2013/ December 20, 2013	99,97%	81.981.542
PT Citra Jaya Nurcahya	PT Lumbung Capital	20 Desember 2013/ December 20, 2013	99,95%	53.256.235
Total				327.876.999

Rincian jumlah imbalan yang ditransfer adalah sebagai berikut:

Details of the total consideration transferred were as follows:

	Jumlah/Amount	
Jumlah yang diakui atas aset neto:		Recognized values of net assets:
Aset	44.856	Assets
Liabilitas	(102.717)	Liabilities
Kepentingan nonpengendali	22	Non-controlling interest
Neto	(57.839)	Net
Hak penambangan	327.934.838	Mining rights
Imbalan yang Ditransfer	327.876.999	Total Consideration Transferred

Hal penambangan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" (Catatan 18).

The mining rights are presented as part of "Exploration and Evaluation Assets" account (Note 18).

Transaksi non kas atas akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

The non-cash outflow on the acquisition was as follows:

	Jumlah/Amount	
Pembayaran kas	-	Cash paid
Piutang yang dikonversi	327.876.999	Receivables converted

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA (Lanjutan)

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES (Continued)

	<u>Jumlah/Amount</u>	
Imbalan yang ditransfer	327.876.999	Total consideration transferred
Dikurangi: saldo kas Entitas Anak saat akuisisi	44.856	Less: Cash balance of Subsidiaries at acquisition
Jumlah neto non kas yang ditransfer dari akuisisi Entitas Anak	<u>327.832.143</u>	Net non-cash transferred for the acquisition of Subsidiaries

e. Mountain Netherlands Investments B.V.

Pada tanggal 3 Desember 2013, Perusahaan mendirikan Mountain Netherlands Investments B.V. (Mountain Netherlands), sebagai Newco, terutama dalam kaitannya dengan salah satu transaksi utama dalam *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali (Catatan 49ff). Mountain Netherlands memiliki modal dasar dan disetor sebesar EUR1.000, yang terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nilai nominal EUR1.

Pada tanggal 2 Juli 2014, Perusahaan menjual sahamnya di Mountain Netherlands ke Sea Breeze I B.V., afiliasi dari Country Forest Limited, sesuai dengan *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali. Laba diakui dari transaksi penjualan ini sebesar USD949.520.959.

f. Bumi Holding S.A.S., Bumi Mauritania S.A. dan Tamagot Bumi S.A.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 4 Desember 2013, Lemington Investments Pte. Ltd., Entitas Anak, menjual 2.220 saham yang mewakili kepemilikan sebesar 60% di Bumi Holding S.A.S. kepada Rubis International Limited dengan harga penjualan sebesar USD5.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha BRMS telah kehilangan pengendalian atas Entitas Anak tersebut. Rugi neto atas penjualan atas Entitas Anak sebesar USD50.429.227, termasuk biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada aset eksplorasi dan evaluasi Bumi Mauritania S.A. yang dicatat di Perusahaan sebesar USD10.925.278, yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun 2013.

g. IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited

Pada tanggal 27 Januari 2014, 1 saham di IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC) dialihkan kepada Perusahaan tanpa imbalan, dalam kaitannya dengan salah satu transaksi utama *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali (Catatan 49ff). Oleh karena itu, IndoCoal KPC menjadi Entitas Anak dari Perusahaan.

e. Mountain Netherlands Investments B.V.

On December 3, 2013, the Company secured the establishment process of Mountain Netherlands Investments B.V. (Mountain Netherlands), as the Newco, mainly in relation to one of the main transactions in the Amended and Restated Master Deed (Note 49ff). Mountain Netherlands has authorized and issued capital amounting to EUR1,000, consisting of 1,000 shares at nominal value of EUR1.

On July 2, 2014, the Company sold its shares in Mountain Netherlands to Sea Breeze I B.V., an affiliate of Country Forest Limited, in compliance with the Amended and Restated Master Deed. Gain recognized on this sale transaction amounted to USD949,520,959.

f. Bumi Holding S.A.S., Bumi Mauritania S.A. and Tamagot Bumi S.A.

Based on Share Purchase Agreement dated December 4, 2013, Lemington Investments Pte. Ltd., a Subsidiary, sold of its 2,220 shares representing 60% ownership interest in Bumi Holding S.A.S. to Rubis International Limited at a sales price of USD5,000,000. As of December 31, 2013, the BRMS Group has lost control over those Subsidiaries. Net loss on sale of Subsidiaries amounting to USD50,429,227, which includes capitalized borrowing costs on the exploration and evaluation assets of Bumi Mauritania S.A. recorded in the Company amounting to USD10,925,278, is recognized in the consolidated statements of comprehensive income in 2013.

g. IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited

On January 27, 2014, 1 share in IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC) was transferred to the Company without consideration, in relation to one of the main transactions in the Amended and Restated Master Deed (Note 49ff). Accordingly, IndoCoal KPC became a Subsidiary of the Company.

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA (Lanjutan)

Namun demikian, IndoCoal KPC menjadi entitas pengendalian bersama terkait dengan Perjanjian Pemegang Saham KPC tanggal 2 Juli 2014 (Catatan 49x).

h. Perubahan Struktur Kepemilikan di PT Kaltim Prima Coal

Pada tanggal 25 Februari 2014, Perusahaan, Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) dan PT Sitrade Coal (Sitrade) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham di PT Kaltim Prima Coal (KPC), dimana KCL, SHL dan Sitrade menjual, menyerahkan dan mengalihkan semua saham mereka di KPC sebanyak 62.132 saham kepada Perusahaan dengan imbalan sebesar USD6.213.200. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, Sitrade dan PT Kutai Timur Sejahtera mengadakan Perjanjian Jual dan Beli Saham, dimana KTS menjual, menyerahkan dan mengalihkan sebanyak 15.000 sahamnya di KPC kepada Sitrade dengan imbalan sebesar USD255.000.000. Perjanjian ini dimasukkan sebagai bagian dari Reorganisasi KPC berdasarkan *Master Deed yang Diubah dan Dinyatakan Kembali* (Catatan 49ff) dan tunduk pada penyelesaian kondisi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak seperti persetujuan dan peraturan.

Pada tanggal 24 Maret 2014, Pemegang Saham KPC dalam Keputusan Sirkulernya Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui sebagai berikut:

- 1) Pengalihan kepemilikan saham KPC yang dimiliki oleh KCL, SHL, Sitrade dan KTS kepada Perusahaan;
- 2) Perubahan struktur kepemilikan saham dan peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebagai berikut:

Modal	Sebelumnya/ Previous		Setelah peningkatan/ After Increase		Capital
	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount	
Modal Dasar					Authorized Capital:
Saham Biasa	300.000	30.000.000	-	-	Ordinary Shares
Saham Seri A	-	-	300.000	30.000.000	Series A Shares
Saham Seri B	-	-	111.800	559.000	Series B Shares
Total	300.000	30.000.000	411.800	30.559.000	Total

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES (Continued)

However, IndoCoal KPC became a jointly controlled entity following the KPC Shareholders' Agreement on July 2, 2014 (Note 49x).

h. Changes in Shareholdings of PT Kaltim Prima Coal

On February 25, 2014, the Company, Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) and PT Sitrade Coal (Sitrade) entered into an Agreement for the Sale and Purchase of Shares in PT Kaltim Prima Coal (KPC), wherein KCL, SHL and Sitrade sell, assign and transfer all its 62,132 shares in KPC to the Company at a consideration totaling USD6,213,200. Furthermore, on the same date, Sitrade and PT Kutai Timur Sejahtera entered into a Sale and Purchase of Shares Agreement, wherein KTS sells, assigns and transfers its 15,000 shares in KPC to Sitrade at a consideration of USD255,000,000. These agreements were entered as part of the KPC Reorganization under the Amended and Restated Master Deed (Note 49ff) and are subject to completion of conditions to be done by the respective parties such as corporate and regulatory approvals.

On March 24, 2014, the Shareholders of KPC approved in its Circular Resolutions in Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders the following:

- 1) Transfers of shareholdings of KPC owed by KCL, SHL, Sitrade and KTS to the Company;
- 2) Amendment of shares structures and increase of the authorized, issued and paid up share capital as follows:

4. AKUISISI, RANGKAIAN, PELEPASAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN ENTITAS PENGENDALIAN BERSAMA (Lanjutan)

4. ACQUISITIONS, ESTABLISHMENTS, DISPOSALS AND CHANGES IN THE OWNERSHIP INTEREST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINTLY CONTROLLED ENTITIES (Continued)

Modal	Sebelumnya/ Previous		Setelah peningkatan/ After Increase		Capital
	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount	Jumlah saham/ Number of shares	Jumlah/ Amount	
Modal Ditempatkan/ Disetor					<i>Issued/Paid-up Capital:</i>
Saham Biasa	300.000	30.000.000	-	-	<i>Ordinary Shares</i>
Saham Seri A	-	-	300.000	30.000.000	<i>Series A Shares</i>
Saham Seri B	-	-	111.800	559.000	<i>Series B Shares</i>
Total	300.000	30.000.000	411.800	30.559.000	Total

- 3) Pemesanan saham Seri B di KPC ke Newco, Perusahaan dan Bhira (Saham Seri A adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor);
- 4) Pembebasan kepada KCL, SHL, Sitrade dan Perusahaan atas HMETD mereka sehubungan dengan usulan penerbitan saham baru KPC;
- 5) Perubahan Anggaran Dasar KPC; dan
- 6) Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi KPC.

- 3) *Subscription of the Series B shares in KPC to Newco, the Company and Bhira (Series A shares are the shares that have been issued and paid-up);*
- 4) *Waiver of KCL, SHL, Sitrade and the Company of their preemptive rights in connection with the proposed issuance of new shares of KPC;*
- 5) *Amendments of Articles of Association of KPC; and*
- 6) *Change of KPC's Boards of Commissioners and Directors.*

Persetujuan di atas akan efektif setelah KPC memperoleh persetujuan dari pihak regulator Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku saat ini.

The above approvals will be effective once KPC obtains approvals from the Indonesian authorities as required under the prevailing laws.

Pada tanggal 25 Maret 2014 dan 3 Juni 2014, KPC mengirimkan surat masing-masing kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait dengan perubahan struktur kepemilikan saham dan peningkatan modal dasar, modal saham ditempatkan dan disetor, yang masing-masing telah disetujui pada tanggal 7 Mei 2014 dan 5 Juni 2014.

On March 25, 2014 and June 3, 2014, KPC sent a letter to the Ministry of Energy and Mineral Resources and Indonesian Capital Investment Coordination Board, respectively, in relation to the amendment of the shares structures and increase of the authorized, issued and paid-up share capital, which was approved on May 7, 2014 and June 5, 2014, respectively.

Setelah selesainya Reorganisasi KPC di bulan Juli 2014 yang mengakibatkan penurunan kepemilikan Kelompok Usaha sebesar 19% masing-masing di KPC dan IndoCoal Kaltim tanpa kehilangan pengendalian bersama atas entitas tersebut, Kelompok Usaha mengakui USD306.833.020, yang disajikan sebagai akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Pengendalian Bersama" di ekuitas.

Following the completion of the KPC Reorganization in July 2014 resulting in reduction of the Group's ownership interest by 19% each in KPC and IndoCoal Kaltim without losing joint control in those entities, the Group recognized USD306,833,020, which is presented in equity as "Difference in the Change in Equity Transaction of Jointly Controlled Entities" account.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

5. KAS

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kas		
Rupiah	96.319	256.410
Dolar AS	33.756	19.211
Lain-lain (masing-masing dibawah USD20.000)	<u>15.297</u>	<u>16.356</u>
Total kas	<u>145.372</u>	<u>291.977</u>
Bank		
<u>Rupiah</u>		
Deutsche Bank AG	10.071.588	30.445
PT Bank ANZ Indonesia	4.181.987	109.818
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.299.645	6.299.835
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	392.536	644.816
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	186.927	926.064
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	<u>593.313</u>	<u>653.655</u>
Sub-total	<u>16.725.996</u>	<u>8.664.633</u>
<u>Dolar AS</u>		
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited	6.468.372	322.833
PT Bank ANZ Indonesia	4.879.308	45.032
PT Bank Central Asia Tbk	2.150.369	125.888
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.183.855	18.222.481
PT Bank Mega Tbk	773.048	375.174
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	48.868	1.531.022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.653	510.455
ICICI Bank Ltd.	6.237	5.823.108
The Bank of New York Mellon	1.495	4.266.900
Standard Chartered Bank	-	4.652.787
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	<u>48.859</u>	<u>553.167</u>
Sub-total	<u>15.574.064</u>	<u>36.428.847</u>
<u>Dolar Australia</u>		
Lain-lain (masing-masing di bawah USD500.000)	<u>336</u>	<u>109.802</u>
<u>Yen Jepang</u>		
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited	<u>77.220</u>	<u>57.914</u>
Total kas di bank	<u>32.377.616</u>	<u>45.261.196</u>
Total	<u>32.522.988</u>	<u>45.553.173</u>

5. CASH

This account consists of:

Cash on hand
Rupiah
US Dollar
Others
<i>(each below USD20,000)</i>
Total cash on hand
Cash in banks
<u>Rupiah</u>
Deutsche Bank AG
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Others
<i>(each below USD500,000)</i>
Sub-total
<u>US Dollar</u>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
ICICI Bank Ltd.
The Bank of New York Mellon
Standard Chartered Bank
Others
<i>(each below USD500,000)</i>
Sub-total
<u>Australian Dollar</u>
Others
<i>(each below USD500,000)</i>
<u>Japanese Yen</u>
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited
Total cash in banks
Total

Seluruh kas di bank ditempatkan pada pihak ketiga.

All cash in banks were placed with third parties.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

6. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Rekening bank		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	5.332.677
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	<u>74.281</u>	<u>372.927</u>
Sub-total	<u>74.281</u>	<u>5.705.604</u>
<u>Dolar AS</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.581.837	12.519.217
Deutsche Bank AG	12.292.888	11.138.836
Standard Chartered Bank	5.675.923	6.413.020
The Bank of New York Mellon	5.155.407	28.991.161
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	6.114.835
PT Bank ANZ Indonesia	-	1.058.062
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	<u>40.711</u>	<u>225.171</u>
Sub-total	<u>35.746.766</u>	<u>66.460.302</u>
Total rekening bank	<u>35.821.047</u>	<u>72.165.906</u>
Total	<u>35.821.047</u>	<u>72.165.906</u>

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada The Bank of New York Mellon dan Standard Chartered Bank merupakan akun *escrow* yang dibentuk sesuai dengan Perjanjian Distribusi Kas (*Cash Distribution Agreement/CDA*) (Catatan 49o) dan *Debt Service Accounts* untuk Pinjaman CFL, Surat Berharga Berгарansi Senior II sebesar USD700 juta dan Surat Berharga Berгарansi Senior sebesar USD300 juta (masing-masing Catatan 30a, 30b dan 30c) untuk pembayaran beban bunga. Ini juga merupakan rekening *escrow* sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Bumi Resources Japan Company Limited (BRJ), Entitas Anak, pada tanggal 18 Oktober 2010 (Catatan 30h).

Kas yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Deutsche Bank AG dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan bank garansi sehubungan dengan *performance bonds* dan garansi yang diberikan oleh bank tersebut untuk kepentingan bagi pelanggan dan pemasok PT Kaltim Prima Coal (KPC), entitas pengendalian bersama. Kas yang dibatasi penggunaannya di Standard Chartered Bank juga dimaksudkan untuk pembayaran dan penagihan dari PT Thiess Contractors Indonesia, PT Pamapersada Nusantara dan PT Darma Henwa Tbk, entitas asosiasi, yang merupakan kontraktor penambangan KPC.

6. RESTRICTED CASH IN BANKS

This account consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bank accounts		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	5.332.677
Others (each below USD500,000)	<u>74.281</u>	<u>372.927</u>
Sub-total	<u>74.281</u>	<u>5.705.604</u>
<u>US Dollar</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.581.837	12.519.217
Deutsche Bank AG	12.292.888	11.138.836
Standard Chartered Bank	5.675.923	6.413.020
The Bank of New York Mellon	5.155.407	28.991.161
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	6.114.835
PT Bank ANZ Indonesia	-	1.058.062
Others (each below USD500,000)	<u>40.711</u>	<u>225.171</u>
Sub-total	<u>35.746.766</u>	<u>66.460.302</u>
Total bank accounts	<u>35.821.047</u>	<u>72.165.906</u>
Total	<u>35.821.047</u>	<u>72.165.906</u>

Restricted cash in The Bank of New York Mellon and Standard Chartered Bank represent escrow accounts in accordance with the Cash Distribution Agreement (CDA) (Note 49o) and Debt Service Accounts for the CFL Loan, USD700 million Guaranteed Senior Secured Notes II and USD300 million Guaranteed Senior Secured Notes (Notes 30a, 30b and 30c, respectively) for interest payments. This also represents escrow account in accordance with the Credit Agreement entered into by Bumi Resources Japan Company Limited (BRJ), a Subsidiary, on October 18, 2010 (Note 30h).

Restricted cash in PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Deutsche Bank AG and PT Bank Danamon Indonesia Tbk are related to bank guarantees for performance bonds and bank guarantees provided by such banks for the benefit of certain customers and suppliers of PT Kaltim Prima Coal (KPC), a jointly controlled entity. Restricted cash in Standard Chartered Bank is also intended for payment and collection from PT Thiess Contractors Indonesia, PT Pamapersada Nusantara and PT Darma Henwa Tbk, an associate, KPC's mining contractors.

**6. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
(Lanjutan)**

Pada tanggal 10 Januari 2014, BRJ telah melunasi Perjanjian Kredit dan menarik dana yang ditempatkan di rekening escrow.

Seluruh kas di bank yang dibatasi penggunaannya ditempatkan pada pihak ketiga.

7. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Perusahaan menandatangani kontrak jasa pengelolaan dana dengan PT Recapital Asset Management (Recapital), pihak ketiga, untuk jangka waktu enam (6) bulan, yang dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan kontrak ini, Perusahaan memberikan kewenangan penuh kepada Recapital untuk bertindak sebagai manajer investasi dalam mengelola dana Perusahaan sampai dengan USD350 juta.

Pada tanggal 2 September 2009, Perusahaan menandatangani kontrak jasa pengelolaan dana kedua dengan Recapital untuk jangka waktu enam (6) bulan, yang dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan kontrak ini, Perusahaan memberikan kewenangan penuh kepada Recapital untuk bertindak sebagai manajer investasi dalam mengelola dana Perusahaan sampai dengan USD50 juta.

Pada tanggal 28 Februari 2011, kedua perjanjian tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 dan para pihak sepakat untuk menggabungkan perjanjian tersebut dan akan disebut sebagai "Addendum Restrukturisasi".

Pada tanggal 14 Agustus 2012, para pihak setuju untuk memperpanjang masa perjanjian selama dua belas (12) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 27 Agustus 2013.

Pada tanggal 26 Agustus 2013, Perusahaan dan PT Recapital Asset Management menandatangani Perjanjian Penyelesaian. Berdasarkan Perjanjian ini, dana Perusahaan akan diselesaikan secara non-tunai dimana Perusahaan akan mengambil kepemilikan bagian atas saham-saham dalam PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) di PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pelunasan secara penuh atas kewajiban entitas tersebut kepada Perusahaan (Catatan 49cc). Pelaksanaan Penyelesaian investasi ini akan dilakukan oleh Perusahaan dalam jangka waktu dan dengan tata cara, ketentuan serta prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum penyelesaian transaksi, Perusahaan menempatkan dana tersebut di akun "Wesel Tagih" (Catatan 8) dan mencatat laba yang direalisasi sebesar USD48.330.702 (USD38.664.561 setelah dikurangi pajak).

6. RESTRICTED CASH IN BANKS (Continued)

On January 10, 2014, BRJ settled the Credit Agreement and withdrew the fund placed in the escrow account.

All restricted cash in banks were placed with third parties.

7. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS

On August 27, 2008, the Company and PT Recapital Asset Management (Recapital), a third party, entered into a discretionary fund contract for a period of six (6) months, which is subject to extension as agreed by both parties. Based on this contract, the Company will give full authority to Recapital as investment manager to carry out the management of the Company's funds up to an amount of USD350 million.

On September 2, 2009, the Company and Recapital entered into a second discretionary fund contract for a period of six (6) months, which is subject to extension as agreed by both parties. Based on this contract, the Company will give full authority to Recapital as investment manager to carry out the management of the Company's funds up to an amount of USD50 million.

On February 28, 2011, both agreements were extended until August 27, 2012 and the parties agreed to combine those agreements and referred it as "Addendum Restrukturisasi".

On August 14, 2012, the parties agreed to extend the term for an additional twelve (12) months, to expire on August 27, 2013.

On August 26, 2013, the Company and PT Recapital Asset Management entered into a Settlement Agreement. Based on this Agreement, the Company's funds will be settled in a non-cash settlement in which the Company will take the ownership of shares of PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) in PT Kaltim Prima Coal (KPC) as a full settlement of entity's obligation to the Company (Note 49cc). The settlement of these investment funds will be executed by the Company within a period of time and in the manner, conditions and procedures in accordance with the prevailing laws in Indonesia. However, prior to the settlement, the Company placed the investment funds to "Notes Receivable" account (Note 8) and realized a gain of USD48,330,702 (USD38,664,561 net of tax).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

7. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL
(Lanjutan)

Mutasi laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Saldo awal	41.088.408
Laba yang belum direalisasi selama tahun berjalan	<u>7.242.294</u>
	48.330.702
Dikurangi	
Keuntungan yang direalisasi atas penebusan (Catatan 8)	<u>(48.330.702)</u>
Saldo Akhir	<u><u>-</u></u>

7. AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
(Continued)

The movements of unrealized gain on increase in fair value of available-for-sale financial assets were as follows:

Beginning balance	41.088.408
Unrealized gain during the year	7.242.294
	48.330.702
Redemption	
Realized gain upon settlement (Note 8)	(48.330.702)
Ending Balance	<u><u>-</u></u>

8. WESEL TAGIH

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>
Pihak ketiga - Dolar AS	
Wesel tagih	<u><u>-</u></u>

8. NOTES RECEIVABLE

This account consists of:

	<u>2013</u>
Third party - US Dollar	
Notes receivable	<u><u>254.026.670</u></u>

Wesel tagih sebesar USD254.026.670 pada tanggal 31 Desember 2013 merupakan *Medium Term Notes* (MTN) tanpa bunga yang diterbitkan oleh PT Kutai Timur Sejahtera kepada Perusahaan sebagai penyelesaian sementara atas dana investasi dari PT Recapital Asset Management (Catatan 7).

Notes receivable of USD254,026,670 as of December 31, 2013 consists mainly of non-interest bearing Medium Term Notes (MTNs) issued by PT Kutai Timur Sejahtera to the Company as temporary settlement of the investment funds from PT Recapital Asset Management (Note 7).

Pada tanggal 25 Februari 2014, wesel tagih ini diselesaikan melalui pengalihan 15.000 saham di KPC milik KTS ke PT Sitrade Coal (Catatan 4h).

On February 25, 2014, this notes receivable was settled through transfer by KTS of its 15,000 shares in KPC to PT Sitrade Coal (Note 4h).

Pada tanggal 28 Maret 2013, seluruh pokok, bunga dan premi wesel tagih milik BRMS dengan nilai tercatat sebesar USD111.034.424 pada tanggal 31 Desember 2012 telah diselesaikan oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. dan ditempatkan oleh BRMS sebagai dana simpanan atas pelaksanaan Perjanjian *Technical and Project Support* antara BRMS dan Perusahaan.

On March 28, 2013, all principal, interest and premium of BRMS's notes receivable with carrying value of USD111,034,424 as of December 31, 2012 have been cleared with UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. and was placed by BRMS as fund deposit pursuant to the *Technical and Project Support Agreement* between BRMS and the Company.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

9. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

9. TRADE RECEIVABLES

This account consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Pelanggan luar negeri - Dolar AS</u>			<u>Overseas customers - US Dollar</u>
<u>Dolar AS</u>			
Coastal Gujarat Power Limited India	23.333.939	-	Coastal Gujarat Power Limited, India
Reignwood Horizon Pte. Ltd., Singapura	19.540.266	-	Reignwood Horizon Pte. Ltd., Singapore
Adani Global FZE, Uni Emirat Arab	16.356.818	31.400.784	Adani Global FZE, United Arab Emirates
Commodity Reserve Ltd., Kepulauan Virgin Britania Raya	8.382.287	-	Commodity Reserve Ltd., British Virgin Islands
Candice Investments Pte. Ltd., Singapura	7.472.818	7.002.713	Candice Investments Pte. Ltd., Singapore
EPDC-Electric Power Dev. Co., Jepang	7.301.351	-	EPDC-Electric Power Dev. Co., Japan
Gheco One Company Limited, Thailand	7.173.617	-	Gheco One Company Limited, Thailand
CLP Power Hong Kong Ltd., Hong Kong	3.924.889	7.267.929	CLP Power Hong Kong Ltd., Hong Kong
Mitsubishi Corporation, Jepang	-	31.023.362	Mitsubishi Corporation, Japan
Tata Power Company Limited, India	-	20.406.308	Tata Power Company Limited, India
Gheco Melawan, Malaysia	-	12.641.406	Gheco Melawan, Malaysia
Formosa Plastic Group, Taiwan	-	8.259.647	Formosa Plastic Group, Taiwan
Guangzhou Yuehe Energy Co. Ltd., Cina	-	7.278.555	Guangzhou Yuehe Energy Co. Ltd., China
TNB Fuel Services Sdn Bhd, Malaysia	-	6.871.902	TNB Fuel Services Sdn Bhd, Malaysia
General Nice Resources (Hong Kong) Ltd., Hong Kong	-	6.763.548	General Nice Resources (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Jepang	-	5.732.169	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	<u>21.589.765</u>	<u>40.467.722</u>	Others (each below USD5,000,000)
Sub-total	<u>115.075.750</u>	<u>185.116.045</u>	Sub-total
Total pelanggan luar negeri	<u>115.075.750</u>	<u>185.116.045</u>	Total overseas customers
<u>Pelanggan dalam negeri</u>			<u>Local customers</u>
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
PT Jhonlin Group	387.098.233	171.318.825	PT Jhonlin Group
PT Surya Mega Adiperkasa	67.906.895	-	PT Surya Mega Adiperkasa
PT Adimitra Mega Perkasa	13.764.957	13.764.957	PT Adimitra Mega Perkasa
PT Mahkotamas Duta Makmur	5.816.649	5.816.649	PT Mahkotamas Duta Makmur
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	<u>4.632.788</u>	<u>6.037.984</u>	Others (each below USD5,000,000)
Sub-total	<u>479.219.522</u>	<u>196.938.415</u>	Sub-total

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

9. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Rupiah</u>		
PT Indonesia Power	33.538.552	23.144.678
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23.580.256	30.728.573
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	387.933	-
Sub-total	<u>57.506.741</u>	<u>53.873.251</u>
Total pelanggan dalam negeri	<u>536.726.263</u>	<u>250.811.666</u>
Total pihak ketiga	651.802.013	435.927.711
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	<u>(7.444.754)</u>	<u>(5.929.932)</u>
Neto	<u>644.357.259</u>	<u>429.997.779</u>

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lancar	639.227.491	343.599.940
1 sampai dengan 30 hari	321.648	79.283.946
Lebih dari 90 hari	<u>12.252.874</u>	<u>13.043.825</u>
Total	651.802.013	435.927.711
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	<u>(7.444.754)</u>	<u>(5.929.932)</u>
Neto	<u>644.357.259</u>	<u>429.997.779</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Saldo awal	5.929.932	5.929.932
Penyisihan selama tahun berjalan	<u>1.514.822</u>	<u>-</u>
Saldo Akhir	<u>7.444.754</u>	<u>5.929.932</u>

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari beberapa kreditor (Catatan 30).

9. TRADE RECEIVABLES (Continued)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>Rupiah</u>		
PT Indonesia Power	33.538.552	23.144.678
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23.580.256	30.728.573
Others (each below USD5,000,000)	387.933	-
Sub-total	<u>57.506.741</u>	<u>53.873.251</u>
Total local customers	<u>536.726.263</u>	<u>250.811.666</u>
Total third parties	651.802.013	435.927.711
Less:		
Allowance for impairment loss	<u>(7.444.754)</u>	<u>(5.929.932)</u>
Net	<u>644.357.259</u>	<u>429.997.779</u>

Aging schedule of trade receivables was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Lancar	639.227.491	343.599.940
1 - 30 days due	321.648	79.283.946
Over 90 days due	<u>12.252.874</u>	<u>13.043.825</u>
Total	651.802.013	435.927.711
Less:		
Allowance for impairment loss	<u>(7.444.754)</u>	<u>(5.929.932)</u>
Net	<u>644.357.259</u>	<u>429.997.779</u>

The movements of the allowance for impairment loss were as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Beginning balance	5.929.932	5.929.932
Provision during the year	<u>1.514.822</u>	<u>-</u>
Ending Balance	<u>7.444.754</u>	<u>5.929.932</u>

Based on the review of the individual receivable accounts at the end of year, the management believes that the allowance for impairment loss was adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Trade receivables are used as collateral of long-term loans obtained from several lenders (Note 30).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

10. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak ketiga - Dolar AS		
PT Karsa Daya Rekatama	150.000.000	-
PT Jhonlin Group	75.000.000	-
PT Mitratama Perkasa	25.108.079	27.542.485
Candice Investments Pte. Ltd., Singapura	16.418.820	13.421.737
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	19.691.405	15.333.275
Sub-total	286.218.304	56.297.497
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(1.134.018)	(1.134.018)
Neto	<u>285.084.286</u>	<u>55.163.479</u>
Pihak berelasi - Rupiah		
Piutang karyawan - bagian jangka pendek (Catatan 44a)	766.343	957.559
Total	<u>285.850.629</u>	<u>56.121.038</u>

Piutang lain dari PT Karsa Daya Rekatama sebesar USD150 juta merupakan piutang pemesanan saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV.

Piutang lain dari PT Jhonlin Group merupakan pengalihan piutang usaha dari Arutmin kepada Perusahaan.

Pada bulan Oktober 2012, PT Kaltim Prima Coal (KPC), entitas pengendalian bersama, dan PT Mitratama Perkasa (PTMP) menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar-Perusahaan dimana KPC telah menyetujui untuk memberikan pinjaman setiap saat kepada PTMP hingga sejumlah USD12,5 juta sejak tanggal 1 Juli 2012. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai permintaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh PTMP kepada KPC.

Pada bulan Oktober 2012, PT Arutmin Indonesia (Arutmin), entitas pengendalian bersama, dan PTMP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar-Perusahaan dimana Arutmin telah menyetujui untuk memberikan pinjaman setiap saat kepada PTMP hingga sejumlah USD32 juta sejak tanggal 1 Juli 2012. Perjanjian ini digunakan untuk biaya-biaya proyek atas pelabuhan PTMP di Mulia Barat yang dibayarkan oleh Arutmin atas nama PTMP yang masih terutang sejak tanggal efektif. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai permintaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh PTMP kepada Arutmin.

10. OTHER RECEIVABLES

This account consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Third parties - US Dollar		
PT Karsa Daya Rekatama	-	-
PT Jhonlin Group	-	-
PT Mitratama Perkasa	27.542.485	27.542.485
Candice Investments Pte. Ltd., Singapore	13.421.737	13.421.737
Others (each below USD5,000,000)	15.333.275	15.333.275
Sub-total	56.297.497	56.297.497
Less:		
Allowance for impairment loss	(1.134.018)	(1.134.018)
Net	<u>55.163.479</u>	<u>55.163.479</u>
Related parties - Rupiah		
Employee receivables - current portion (Note 44a)	957.559	957.559
Total	<u>56.121.038</u>	<u>56.121.038</u>

Other receivable from PT Karsa Daya Rekatama amounting USD150 million represents share subscription receivable through Rights Issue IV.

Other receivable from PT Jhonlin Group pertains to the transferred trade receivable from Arutmin to the Company.

In October 2012, PT Kaltim Prima Coal (KPC), a jointly controlled entity, and PT Mitratama Perkasa (PTMP) entered into an Intercompany Loan Facility Agreement, whereby KPC has agreed to provide loans, from time to time, to PTMP up to a value of USD12.5 million starting from July 1, 2012. These loans will be collectible on demand. This loan shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balance, which shall be payable quarterly by PTMP to KPC.

In October 2012, PT Arutmin Indonesia (Arutmin), a jointly controlled entity, and PTMP entered into an Intercompany Loan Facility Agreement, whereby Arutmin has agreed to provide loans, from time to time, to PTMP up to a value of USD32 million starting from July 1, 2012. This agreement shall apply to project costs of PTMP's port in West Mulia site paid by Arutmin on behalf of PTMP that are still outstanding as of effective date. These loans will be collectible on demand. This loan shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balance, which shall be payable quarterly by PTMP to Arutmin.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

10. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Piutang lain dari Candice Investments Pte. Ltd. merupakan pinjaman tanpa bunga untuk modal kerja yang diberikan oleh IndoCoal Resources (Cayman) Limited, entitas pengendalian bersama, yang dapat tertagih dalam waktu satu (1) tahun.

Piutang lain-lain digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari jaminan beberapa kreditor (Catatan 30).

Analisis umur piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Lancar	285.850.629	56.121.038	Current
Lebih dari 90 hari	1.134.018	1.134.018	Over 90 days due
Total	286.984.647	57.255.056	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.134.018)	(1.134.018)	Allowance for impairment loss
Neto	<u>285.850.629</u>	<u>56.121.038</u>	Net

Mutasi penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal	1.134.018	924.987	Beginning balance
Cadangan selama tahun berjalan	-	209.031	Provision during the year
Saldo Akhir	<u>1.134.018</u>	<u>1.134.018</u>	Ending Balance

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

10. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Other receivable from Candice Investments Pte. Ltd. represents non-interest bearing advances for working capital granted by IndoCoal Resources (Cayman) Limited, a jointly controlled entity, collectible within one (1) year.

Other receivables are used as collateral of long-term loans obtained from several lenders (Note 30).

The aging schedule of other receivables was as follows:

The movements of the allowance for impairment loss were as follows:

Based on the review of the individual receivable accounts at the end of year, the management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables.

11. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Batubara	76.559.408	128.147.711	Coal
Suku cadang dan bahan bakar	48.781.851	65.950.139	Spare parts and fuel supplies
Total	125.341.259	194.097.850	Total
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang	(5.875.722)	(6.381.678)	Less: Allowance for inventory obsolescence
Neto	<u>119.465.537</u>	<u>187.716.172</u>	Net

11. INVENTORIES

This account consists of:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

11. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal	6.381.678	6.067.145	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	314.533	<i>Addition</i>
Penghapusan	(491.389)	-	<i>Write-off</i>
Penyesuaian	(14.567)	-	<i>Adjustment</i>
Saldo Akhir	<u>5.875.722</u>	<u>6.381.678</u>	<i>Ending Balance</i>

Berdasarkan penelaahan terhadap persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang adalah cukup untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dan keusangan dari persediaan.

Sesuai dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), suku cadang dan bahan bakar yang tercatat dalam laporan keuangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin), entitas pengendalian bersama, merupakan milik Pemerintah Indonesia yang diserahkan hak penggunaannya kepada entitas pengendalian bersama tersebut (Catatan 49a).

Persediaan KPC diasuransikan dalam satu paket dengan aset tetap (Catatan 16). Persediaan Arutmin diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD72,15 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Iuran kehutanan (Catatan 50x)	6.274.034	3.012.556	<i>Forestry fee (Note 50x)</i>
Asuransi	3.005.795	3.886.294	<i>Insurance</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah (USD500.000))	479.024	1.358.364	<i>Others (each below USD500,000)</i>
Total	<u>9.758.853</u>	<u>8.257.214</u>	<i>Total</i>

11. INVENTORIES (Continued)

The movements of the allowance for inventory obsolescence were as follows:

Based on a review of the inventories at the end of year, the management believes that the allowance for inventory obsolescence was adequate to cover possible losses and obsolescence arising from inventories.

In accordance with the Coal Contract of Work (CCoW), spare parts and fuel supplies recorded in the financial statements of PT Kaltim Prima Coal (KPC) and PT Arutmin Indonesia (Arutmin), jointly controlled entities, remain the property of the Government of Indonesia, with an exclusive right of use granted to these jointly controlled entities (Note 49a).

Inventories of KPC are insured in a package with fixed assets (Note 16). Inventories of Arutmin are covered by insurance against losses from fire and other risks for a coverage amounting to USD72.15 million as of December 31, 2014 and 2013. Management believes that such insurance coverages were adequate to cover possible losses from such risks.

12. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

**13. KELOMPOK LEPASAN YANG DIKLASIFIKASIKAN
SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL**

Pada tanggal 29 Agustus 2012, PT Bumi Resources Investment (BRI) (sebagai "Penjual"), Entitas Anak, dan PT Alam Cipta Manunggal (ACM) (sebagai "Pembeli") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBSB) yang kemudian diubah dengan perubahan perjanjian tanggal 7 Januari 2013, 8 Maret 2013, 27 Juni 2013 dan 27 Januari 2014. Berdasarkan perjanjian tersebut dan perubahan-perubahannya, BRI akan menjual 500 saham yang merupakan 50% hak kepemilikan di Leap-Forward Resources Ltd. (Leap-Forward), Entitas Anak, dengan harga penjualan sebesar USD140.000.000 yang dapat disesuaikan maksimum sebesar USD60.000.000 untuk mencerminkan nilai akhir Leap-Forward sebelum tanggal penutupan. Pembayaran pertama sebesar USD50.000.000 akan dilakukan pada tanggal penutupan, tergantung pada pemenuhan atau pembebasan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam perubahan perjanjian, dan keseluruhan sisanya akan dibayar maksimum pada tanggal 30 Mei 2014. Akan tetapi, PJBSB secara otomatis telah berakhir karena kedua belah pihak setuju untuk tidak memperpanjang perjanjian.

Sejak bulan Desember 2013, BRI mengambil tindakan dengan melibatkan penasihat keuangan untuk mencari pembeli potensial lainnya untuk mempercepat proses penjualan. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 21 November 2014, PT Bumi Resources Investment (BRI) ("Penjual") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBSB) dengan Jainson Holdings Hong Kong Limited (Jainson) ("Pembeli"), dimana BRI akan menjual 500 saham di Leap-Forward Resources Ltd. dengan kepemilikan 50%. Imbalan jual beli saham tersebut sejumlah pembayaran ke Axis Bank, maksimum sebesar USD140.000.000. PJBSB ini tunduk pada penyelesaian kondisi tertentu, yang harus dipenuhi pada atau sebelum tanggal penyelesaian, yaitu enam (6) bulan setelah tanggal PJBSB. Namun, selanjutnya, PJBSB ini otomatis dihentikan setelah tanggal penyelesaian, yaitu tanggal 21 Mei 2015.

Pada tanggal 13 Maret 2015, 21 Mei 2015 dan 26 Juni 2015, BRI juga secara terpisah mengadakan Perjanjian Jual dan Beli Saham dengan Oceanpro Investment Limited (Oceanpro) (Catatan 53m).

Manajemen berpendapat bahwa transaksi penjualan dengan Oceanpro akan selesai dalam beberapa bulan ke depan sehingga masih mengklasifikasikan Leap-Forward sebagai kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2014.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 58 (Revisi 2009) dalam akuntansi penjualan kelompok lepasan dan menyajikan aset dan liabilitasnya masing-masing sebagai "Kelompok Lepasannya yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" dan "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepasannya yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual".

**13. DISPOSAL GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR
SALE**

On August 29, 2012, PT Bumi Resources Investment (BRI) (the "Seller"), a Subsidiary, and PT Alam Cipta Manunggal (ACM) (the "Purchaser") entered into a Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement (CSPA), which were subsequently amended with amendment agreements dated January 7, 2013, March 8, 2013, June 27, 2013 and January 27, 2014. Based on the CSPA and its amendments, BRI will sell 500 shares representing 50% ownership interest in Leap-Forward Resources Ltd. (Leap-Forward), a Subsidiary, at a sale price of USD140,000,000 which may be subject to an adjustment of not more than USD60,000,000 in order to reflect the final value of Leap-Forward prior to the closing date. The first payment of USD50,000,000 shall be on the closing date, conditional upon satisfaction or waiver of certain conditions stated in the amendments, and the whole remaining amount shall be paid not later than May 30, 2014. However, the CSPA was automatically terminated, as both parties agreed not to extend it further.

Since December 2013, BRI has taken the necessary actions by engaging a financial advisor to seek for other potential buyers in order to expedite the sales process. As a follow-up to the above engagement, on November 21, 2014, PT Bumi Resources Investment (BRI) (the "Seller") entered into a Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) with Jainson Holdings Hong Kong Limited (Jainson) (the "Buyer"), wherein BRI will sell its 500 shares in Leap-Forward Resources Ltd. representing 50% ownership interest. The consideration for the purchase of the sale shares shall be the Axis Bank repayment amount, subject to a maximum of USD140,000,000. This CSPA is subject to completion of certain conditions that should be satisfied on or before the long stop date, which means the date falling six (6) months after the date of the CSPA. However, subsequently, this CSPA was automatically terminated after the long stop date, which was May 21, 2015.

On March 13, 2015, May 21, 2015 and June 26, 2015, BRI separately entered into agreements for the sale of shares with Oceanpro Investment Limited (Oceanpro) (Note 53m).

Management believes that the sale transactions with Oceanpro will be completed within the next few months thus still classifies Leap-Forward as disposal group classified as held for sale as of December 31, 2014.

The Group applied PSAK No. 58 (Revised 2009) in accounting for the sale of the disposal group and presented their assets and liabilities under "Disposal Group Classified as Held for Sale" and "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" accounts, respectively.

**13. KELOMPOK LEPASAN YANG DIKLASIFIKASIKAN
 SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL (Lanjutan)**

Kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai tercatat, yang lebih rendah dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

Nilai tercatat kelompok aset dan liabilitas utama dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

**13. DISPOSAL GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR
 SALE (Continued)**

The disposal group held for sale is measured at its carrying amount, which is less than its fair value less costs to sell.

The carrying values of major classes of assets and liabilities of the disposal group classified as held for sale were as follows:

		2014				
	Total Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Penyesuaian/ Eliminasi/ Adjustment/ Elimination		Neto/ Net		
Aset						Assets
Piutang lain-lain	5.558.250	-		5.558.250		Other receivables
Aset tetap - neto	30.669.228	308.629		30.977.857		Fixed assets - net
Goodwill - neto	10.302.937	-		10.302.937		Goodwill - net
Aset lainnya	50.813.690	-		50.813.690		Other assets
Total aset kelompok lepasan	97.344.105	308.629		97.652.734		Total assets of the disposal group
Liabilitas						Liabilities
Utang lain-lain	18.073.043	-		18.073.043		Other payables
Utang sewa pembiayaan	19.802.203	-		19.802.203		Finance lease payables
Utang pihak berelasi	49.135.305	(39.356.049)		9.779.256		Due to related parties
Liabilitas lainnya	56.593.013	-		56.593.013		Other liabilities
Total liabilitas kelompok lepasan	143.603.564	(39.356.049)		104.247.515		Total liabilities of the disposal group
Liabilitas Neto	(46.259.459)	39.664.678		(6.594.781)		Net Liabilities
		2013				
	Total Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	Penyesuaian/ Eliminasi/ Adjustment/ Elimination		Neto/ Net		
Aset						Assets
Piutang lain-lain	5.558.250	-		5.558.250		Other receivables
Aset tetap - neto	37.314.653	217.447		37.532.100		Fixed assets - net
Goodwill - neto	10.302.937	-		10.302.937		Goodwill - net
Aset lainnya	50.813.690	-		50.813.690		Other assets
Total aset kelompok lepasan	103.989.530	217.447		104.206.977		Total assets of the disposal group
Liabilitas						Liabilities
Utang lain-lain	18.073.043	-		18.073.043		Other payables
Utang sewa pembiayaan	19.802.203	-		19.802.203		Finance lease payables
Utang pihak berelasi	49.135.305	(41.287.400)		7.847.905		Due to related parties
Liabilitas lainnya	44.469.888	-		44.469.888		Other liabilities
Total liabilitas kelompok lepasan	131.480.439	(41.287.400)		90.193.039		Total liabilities of the disposal group
Aset (Liabilitas) Neto	(27.490.909)	41.504.847		14.013.938		Net Assets (Liabilities)

14. ASET LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2014	2013	
Uang muka	18.636.597	30.715.893	Advances
Jaminan	9.455.326	7.825.263	Deposits
Total	28.091.923	38.541.156	Total

14. OTHER CURRENT ASSETS

This account consists of:

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Rincian dan mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

Details and movements of this account were as follows:

2014					
Metode ekuitas	Nominal Persentase Kepemilikan/ Nominal Percentage of Ownership (%)	Nilai Penyertaan Awal/ Carrying Value at Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi)/ Equity in Net Income (Loss)	Nilai Penyertaan Akhir/ Carrying Value at Ending Balance	Equity method
PT Newmont Nusa Tenggara	24,00	1.009.961.865	(44.038.359)	965.923.506	PT Newmont Nusa Tenggara
PT Darma Henwa Tbk	39,29	180.445.622	117.320	180.562.942	PT Darma Henwa Tbk
PT Visi Multi Artha	30,00	27.574	-	27.574	PT Visi Multi Artha
PT Artha Widya Persada	30,00	27.574	-	27.574	PT Artha Widya Persada
Net		1.190.462.635	(43.921.039)	1.146.541.596	Net

2013					
Metode ekuitas	Nominal Persentase Kepemilikan/ Nominal Percentage of Ownership (%)	Nilai Penyertaan Awal/ Carrying Value at Beginning Balance	Bagian Rugi/ Equity in Net Loss	Nilai Penyertaan Akhir/ Carrying Value at Ending Balance	Equity method
PT Newmont Nusa Tenggara	24,00	1.029.972.247	(20.010.382)	1.009.961.865	PT Newmont Nusa Tenggara
PT Darma Henwa Tbk	39,29	200.775.912	(20.330.290)	180.445.622	PT Darma Henwa Tbk
PT Visi Multi Artha	30,00	27.574	-	27.574	PT Visi Multi Artha
PT Artha Widya Persada	30,00	27.574	-	27.574	PT Artha Widya Persada
Net		1.230.803.307	(40.340.672)	1.190.462.635	Net

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

15. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

Bagian atas rugi neto pada PT Newmont Nusa Tenggara, entitas asosiasi, terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bagian atas rugi neto	(27.343.817)	(3.315.840)
Penyesuaian untuk biaya penyusutan dari aset tertentu yang dapat disusutkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal perolehan	<u>(16.694.542)</u>	<u>(16.694.542)</u>
Total	<u>(44.038.359)</u>	<u>(20.010.382)</u>

Tabel berikut berisi ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi yang penting:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Newmont Nusa Tenggara		
Total aset	3.882.627.000	3.989.021.000
Total liabilitas	1.177.498.000	1.169.959.000
Pendapatan	472.606.000	522.594.000
Rugi neto	(113.933.000)	(13.816.000)
PT Darma Henwa Tbk		
Total aset	355.859.007	365.758.029
Total liabilitas	133.452.468	143.650.091
Pendapatan	234.664.122	222.028.647
Laba (rugi) neto	298.601	(51.744.184)

15. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (Continued)

Equity in net loss of PT Newmont Nusa Tenggara, an associate, consists of:

Equity in net loss
Adjustment for depreciation of assets based fair values at acquisition date
Total

The following table summarizes the financial information of significant associates:

PT Newmont Nusa Tenggara
Total assets
Total liabilities
Revenues
Net loss
PT Darma Henwa Tbk
Total assets
Total liabilities
Revenues
Net income (loss)

16. ASET TETAP

Rincian dan mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

16. FIXED ASSETS

Details and movements of this account were as follows:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Penyesuaian/ Adjustments	Reklasifikasi/ Reclassifi- cations	Selisih Kurs/ Translation Adjustments	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2014	
Harga perolehan								Acquisition cost
<u>Pemilikan langsung</u>								<u>Direct ownership</u>
Mesin dan peralatan	1.309.796.067	17.578.943	(15.600.612)	(189.305.140)	35.587.300	(11.478)	1.158.045.080	Machinery and equipment
Peralatan dan perabotan kantor	270.963.958	9.422.646	-	(55.242.819)	4.735.956	(839)	229.878.902	Office furniture and fixtures
Kendaraan	6.412.981	1.082	-	-	-	-	6.414.063	Vehicles
Aset dalam penyelesaian	233.811.866	25.790.441	-	(8.580.141)	(27.263.113)	1.063.475	224.822.528	Construction-in-progress
Sub-total	<u>1.820.984.872</u>	<u>52.793.112</u>	<u>(15.600.612)</u>	<u>(253.128.100)</u>	<u>13.060.143</u>	<u>1.051.158</u>	<u>1.619.160.573</u>	Sub-total
<u>Pemilikan tidak langsung</u>								<u>Indirect ownership</u>
Aset sewa pembiayaan								Leased assets
Mesin dan peralatan	299.179.763	22.961.222	(594.774)	(64.310.613)	(13.060.143)	-	244.175.455	Machinery and equipment
Kendaraan	708.387	113.820	-	-	-	-	822.207	Vehicles
Sub-total	<u>299.888.150</u>	<u>23.075.042</u>	<u>(594.774)</u>	<u>(64.310.613)</u>	<u>(13.060.143)</u>	<u>-</u>	<u>244.997.662</u>	Sub-total
Total harga perolehan	<u>2.120.873.022</u>	<u>75.868.154</u>	<u>(16.195.386)</u>	<u>(317.438.713)</u>	<u>-</u>	<u>1.051.158</u>	<u>1.864.158.235</u>	Total acquisition costs
Akumulasi penyusutan								Accumulated depreciation
<u>Pemilikan langsung</u>								<u>Direct ownership</u>
Mesin dan peralatan	984.614.611	56.430.166	(15.447.175)	(146.337.886)	19.684.555	(7.957)	898.936.314	Machinery and equipment
Peralatan dan perabotan kantor	165.874.643	17.778.433	-	(34.613.130)	-	(916)	149.039.030	Office furniture and fixtures
Kendaraan	6.322.716	247.456	-	-	-	-	6.570.172	Vehicles
Sub-total	<u>1.156.811.970</u>	<u>74.456.055</u>	<u>(15.447.175)</u>	<u>(180.951.016)</u>	<u>19.684.555</u>	<u>(8.873)</u>	<u>1.054.545.516</u>	Sub-total

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

16. ASET TETAP (Lanjutan)

16. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2014	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Penyesuaian/ Adjustments	Reklasifikasi/ Reclassifi- cations	Selisih Kurs/ Translation Adjustments	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2014	
Pemilikan tidak langsung								<i>Indirect ownership</i>
Aset sewa pembiayaan								<i>Leased assets</i>
Mesin dan peralatan	103.704.047	67.885.624	(594.774)	(26.054.592)	(19.684.555)	-	125.255.750	<i>Machinery and equipment</i>
Kendaraan	362.613	138.210	-	(7.662)	-	-	493.161	<i>Vehicles</i>
Sub-total	104.066.660	68.023.834	(594.774)	(26.062.254)	(19.684.555)	-	125.748.911	<i>Sub-total</i>
Total akumulasi penyusutan	1.260.878.630	142.479.889	(16.041.949)	(207.013.270)	-	(8.873)	1.180.294.427	<i>Total accumulated depreciation</i>
Nilai Buku	859.994.392						683.863.808	Carrying Value
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Penyesuaian/ Adjustments	Reklasifikasi/ Reclassifi- cations	Selisih Kurs/ Translation Adjustments	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2013	
Harga perolehan								<i>Acquisition cost</i>
Pemilikan langsung								<i>Direct ownership</i>
Mesin dan peralatan	1.180.700.408	18.302.998	(24.998.447)	-	135.808.832	(17.724)	1.309.796.067	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan dan perabotan kantor	235.143.721	30.541.364	(1.249.868)	-	6.801.637	(272.896)	270.963.958	<i>Office furniture and fixtures</i>
Kendaraan	7.524.190	37.195	(1.148.404)	-	-	-	6.412.981	<i>Vehicles</i>
Aset dalam penyelesaian	236.859.533	25.130.144	-	-	(25.133.687)	(3.044.124)	233.811.866	<i>Construction-in-progress</i>
Sub-total	1.660.227.852	74.011.701	(27.396.719)	-	117.476.782	(3.334.744)	1.820.984.872	<i>Sub-total</i>
Pemilikan tidak langsung								<i>Indirect ownership</i>
Aset sewa pembiayaan								<i>Leased assets</i>
Mesin dan peralatan	348.927.678	67.728.867	-	-	(117.476.782)	-	299.179.763	<i>Machinery and equipment</i>
Kendaraan	813.350	71.622	(176.585)	-	-	-	708.387	<i>Vehicles</i>
Sub-total	349.741.028	67.800.489	(176.585)	-	(117.476.782)	-	299.888.150	<i>Sub-total</i>
Total harga perolehan	2.009.968.880	141.812.190	(27.573.304)	-	-	(3.334.744)	2.120.873.022	<i>Total acquisition costs</i>
Akumulasi penyusutan								<i>Accumulated depreciation</i>
Pemilikan langsung								<i>Direct ownership</i>
Mesin dan peralatan	874.645.693	63.167.663	(18.900.336)	-	65.718.396	(16.805)	984.614.611	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan dan perabotan kantor	148.072.437	18.772.111	(663.120)	-	(308.908)	2.123	165.874.643	<i>Office furniture and fixtures</i>
Kendaraan	6.201.536	256.292	(89.381)	-	-	(45.731)	6.322.716	<i>Vehicles</i>
Sub-total	1.028.919.666	82.196.066	(19.652.837)	-	65.409.488	(60.413)	1.156.811.970	<i>Sub-total</i>
Pemilikan tidak langsung								<i>Indirect ownership</i>
Aset sewa pembiayaan								<i>Leased assets</i>
Mesin dan peralatan	92.699.756	76.413.779	-	-	(65.409.488)	-	103.704.047	<i>Machinery and equipment</i>
Kendaraan	349.873	116.792	(104.052)	-	-	-	362.613	<i>Vehicles</i>
Sub-total	93.049.629	76.530.571	(104.052)	-	(65.409.488)	-	104.066.660	<i>Sub-total</i>
Total akumulasi penyusutan	1.121.969.295	158.726.637	(19.756.889)	-	-	(60.413)	1.260.878.630	<i>Total accumulated depreciation</i>
Nilai Buku	887.999.585						859.994.392	Carrying Value

Sesuai dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin), entitas pengendalian bersama, merupakan milik Pemerintah Indonesia. KPC dan Arutmin mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan aset tetap tersebut selama masa manfaat ekonomisnya atau sisa masa dalam PKP2B, mana yang lebih pendek (Catatan 49a).

In accordance with the Coal Contract of Work (CCoW), fixed assets recorded in the financial statements of PT Kaltim Prima Coal (KPC) and PT Arutmin Indonesia (Arutmin), jointly controlled entities, remain to be the property of the Government of Indonesia, with KPC and Arutmin having an exclusive right to use the assets over their useful lives or the remaining term of the CCoW, whichever is shorter (Note 49a).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

16. ASET TETAP (Lanjutan)

Alokasi beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 39)	133.744.860	148.143.696	Cost of revenues (Note 39)
Beban usaha (Catatan 40)	7.537.063	14.418.790	Operating expenses (Note 40)
Total	141.281.923	162.562.486	Total
Penyusutan yang dikapitalisasi	1.197.966	1.271.958	Capitalized depreciation
Reklasifikasi	-	(5.107.807)	Reclassification
Neto	<u>142.479.889</u>	<u>158.726.637</u>	Net

Aset tetap dan persediaan Kelompok Usaha diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar USD2,292 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD2,312 miliar pada tanggal 31 Desember 2013. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

KPC, entitas pengendalian bersama, telah mengadakan perjanjian sewa pembiayaan untuk beberapa alat berat yang digunakan untuk kegiatan operasional penambangan (Catatan 27).

Beban penyusutan aset tetap dari Entitas Anak pada tahap eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi masing-masing sebesar USD1.197.966 dan USD1.271.958 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Aset tetap KBN diklasifikasikan sebagai "Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

Pada tanggal 18 Januari 2013, aset tetap PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), Entitas Anak, dari Konblo dengan nilai buku sebesar USD7.598.385 telah dihapuskan sehubungan dengan dilusi kepemilikan di Konblo, sehingga Kelompok Usaha BRMS tidak lagi mengkonsolidasi Konblo (Catatan 4c).

Aset dalam penyelesaian terdiri dari kapitalisasi biaya yang berkaitan dengan aset tetap tertentu Kelompok Usaha yang belum siap untuk digunakan. Rincian atas akun ini adalah sebagai berikut:

<u>Aset dalam Penyelesaian yang Belum Selesai pada Tanggal Pelaporan</u>	<u>Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion</u>	<u>Akumulasi Biaya/ Accumulated Costs</u>	<u>Estimasi Tanggal Penyelesaian/ Estimated Completion Date</u>	<u>Construction-in-progress that Have Not Been Completed at Reporting Date</u>
Mesin dan peralatan	5%-99%	168.302.279	2015-2016	Machinery and equipment
Bangunan	10%-99%	56.520.249	2015-2016	Building

16. FIXED ASSETS (Continued)

Allocation of depreciation expense for the years ended December 31, 2014 and 2013 was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 39)	133.744.860	148.143.696	Cost of revenues (Note 39)
Beban usaha (Catatan 40)	7.537.063	14.418.790	Operating expenses (Note 40)
Total	141.281.923	162.562.486	Total
Penyusutan yang dikapitalisasi	1.197.966	1.271.958	Capitalized depreciation
Reklasifikasi	-	(5.107.807)	Reclassification
Neto	<u>142.479.889</u>	<u>158.726.637</u>	Net

Fixed assets, as well as inventories of the Group, were covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to USD2.292 billion as of December 31, 2014 and USD2.312 billion as of December 31, 2013. Management believes that such insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

KPC, a jointly controlled entity, has entered into finance lease agreements for various items of heavy equipment that are used for mining operations (Note 27).

The depreciation expense for fixed assets of Subsidiaries under exploration and development stages that were capitalized amounted to USD1,197,966 and USD1,271,958 for the years ended December 31, 2014 and 2013, respectively.

Fixed assets of KBN were reclassified to "Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

As of January 18, 2013, fixed assets of PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), a Subsidiary, from Konblo with the carrying value amounting to USD7,598,385 has been disposed due to the dilution of ownership interest in Konblo, therefore BRMS' Group no longer consolidates Konblo (Note 4c).

Construction-in-progress consists of costs capitalized in connection with the Group's certain fixed assets that were not yet ready for their intended use. Details of this account were as follows:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

16. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian aset dalam penyelesaian.

Total biaya pinjaman utang bank dan obligasi yang dikapitalisasi sehubungan dengan aset dalam penyelesaian sejumlah USD46.629.927 pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD33.780.751 pada tanggal 31 Desember 2013. Tingkat kapitalisasi adalah 10,42% pada tanggal 31 Desember 2014 dan 13,50% pada tanggal 31 Desember 2013.

Jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Harga perolehan	260.911.005	284.795.791	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(260.911.005)	(284.795.791)	Accumulated depreciation

Rincian penjualan/pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Harga jual	-	83.141	Selling price
Nilai tercatat	153.437	(31.271)	Carrying value
Laba atas penjualan	153.437	51.870	Gain on disposal
Rugi atas pelepasan	-	(145.497)	Loss on retirement
Rugi atas pelepasan/penjualan - neto	<u>153.437</u>	<u>(93.627)</u>	Loss on disposal/retirement - net

Manajemen tidak mengakui adanya penurunan nilai aset dan berkeyakinan bahwa jumlah terpulihkan aset tetap lebih tinggi dari nilai tercatat.

16. FIXED ASSETS (Continued)

Management believes there are no obstacles on the completion of construction-in-progress.

Total capitalized borrowing costs of bank loans and bonds related to construction-in-progress amounted to USD46,629,927 as of December 31, 2014 and USD33,780,751 as of December 31, 2013. The capitalization rates used were 10.42% as of December 31, 2014 and 13.50% as of December 31, 2013.

The gross carrying amounts of fully-depreciated fixed assets still being used were as follows:

The details of disposal/retirement of fixed assets were as follows:

The management did not recognize any impairment on fixed assets and believes that the recoverable amounts of fixed assets are higher than carrying values.

17. PROPERTI PERTAMBANGAN

Rincian properti pertambangan adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Harga perolehan			Cost
PT Dairi Prima Mineral			PT Dairi Prima Mineral
Proyek Dairi	417.047.037	414.806.194	Dairi Project
PT Pendopo Energi Batubara			PT Pendopo Energi Batubara
Sumatera	162.193.121	161.580.971	Sumatera
PT Arutmin Indonesia			PT Arutmin Indonesia
Satui	187.184.637	187.184.636	Satui
Senakin	153.153.394	153.153.394	Senakin
Asam Asam	106.968.880	106.936.754	Asam Asam
Kintap	7.495.285	6.690.682	Kintap
Batulicin	6.950.069	6.950.069	Batulicin
PT Kaltim Prima Coal			PT Kaltim Prima Coal
Sangatta	84.191.327	90.169.956	Sangatta
Total harga perolehan	<u>1.125.183.750</u>	<u>1.127.472.656</u>	Total costs

17. MINING PROPERTIES

The details of mining properties were as follows:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

17. PROPERTI PERTAMBANGAN (Lanjutan)

	2014	2013
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		
Saldo awal	282.781.305	214.095.084
Penambahan	12.030.365	70.492.515
Pengurangan	(9.151.963)	(1.806.294)
Saldo akhir	<u>285.659.707</u>	<u>282.781.305</u>
Properti Pertambangan - Neto	<u>839.524.043</u>	<u>844.691.351</u>

Properti pertambangan terdiri dari pengeluaran pra-produksi pada wilayah komersial produktif dan kegiatan eksplorasi.

Amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar USD12.030.365 dan USD70.492.515.

Total biaya pinjaman utang bank dan obligasi yang dikapitalisasi sehubungan dengan properti pertambangan sejumlah USD2.050.078 pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD1.486.551 pada tanggal 31 Desember 2013. Tingkat kapitalisasi adalah 10,42% pada tanggal 31 Desember 2014 dan 13,50% pada tanggal 31 Desember 2013.

Manajemen tidak mengakui adanya penurunan nilai properti pertambangan dan berkeyakinan bahwa jumlah terpulihkan properti pertambangan lebih tinggi dari nilai tercatat.

18. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Rincian dan mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/Location	2014				Saldo Akhir/ Ending Balance
		Saldo Awal/ Beginning Balance	Akuisisi/ Acquisition	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	
PT Gorontalo Minerals	Block-I Tombolilato, Block-II Molotabu	44.243.977	-	7.529.265	-	51.773.242
PT Citra Palu Minerals	Poboya	14.380.166	-	2.730.934	-	17.111.100
Gallo Oil (Jersey) Ltd.	Block R2	165.662.526	-	1.773.890	-	167.436.416
	Block 13	203.797.000	-	6.752.628	-	210.549.628
PT Mitra Bisnis Harvest	Banyuasin	30.756.052	-	-	-	30.756.052
PT Buana Minera Harvest	Ogan Komering Ulu	2.353.409	-	-	-	2.353.409
	Banyuasin	30.834.292	-	-	-	30.834.292
PT MBH Mining Resource	Ogan Komering Ulu	30.834.292	-	-	-	30.834.292
PT MBH Mining Resource	Banyuasin	34.977.476	-	-	-	34.977.476
PT Bintang Mineral Resources	Ogan Komering Ulu Selatan	62.913.711	-	-	-	62.913.711
PT MBH Minera Resource	Ogan Komering Ulu Selatan	81.991.415	-	-	-	81.991.415
PT Citra Jaya Nurcahya	Lahat	53.274.191	-	-	-	53.274.191
Total		<u>756.018.507</u>	<u>-</u>	<u>18.786.717</u>	<u>-</u>	<u>774.805.224</u>
Dikurangi/Less: Rugi penurunan nilai/ Impairment loss		-	-	236.683.233	-	236.683.233
Nilai/Carrying value		<u>756.018.507</u>				<u>538.121.991</u>

17. MINING PROPERTIES (Continued)

	2014	2013	
Dikurangi: Akumulasi amortisasi			<i>Less : Accumulated amortization</i>
Saldo awal	282.781.305	214.095.084	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	12.030.365	70.492.515	<i>Additions</i>
Pengurangan	(9.151.963)	(1.806.294)	<i>Disposals</i>
Saldo akhir	<u>285.659.707</u>	<u>282.781.305</u>	<i>Ending balance</i>
Properti Pertambangan - Neto	<u>839.524.043</u>	<u>844.691.351</u>	<i>Mining Properties - Net</i>

Mining properties consist of pre-production expenditures on commercially productive areas and exploration activities.

Amortization charged to cost of revenue for the years ended December 31, 2014 and 2013 amounted to USD12,030,365 and USD70,492,515, respectively.

Total capitalized borrowing costs of bank loans and bonds related to mining properties amounted to USD2,050,078 as of December 31, 2014 and USD1,486,551 as of December 31, 2013. The capitalization rates used were 10.42% as of December 31, 2014 and 13.50% as of December 31, 2013.

The management did not recognize any impairment on mining properties and believes that the recoverable amounts of the mining properties are higher than the carrying value.

18. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

Details and movements of this account were as follows:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

18. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

**18. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS
(Continued)**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Lokasi/Location	2013				Saldo Akhir/ Ending Balance
		Saldo Awal/ Beginning Balance	Akuisisi/ Acquisition	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	
PT Gorontalo Minerals	Block-I Tombolilato, Block-II Molotabu	34.945.524	-	9.298.453	-	44.243.977
PT Citra Palu Minerals	Poboya	10.841.444	-	3.538.722	-	14.380.166
Konblo Bumi, Inc.	Mafa Cost, Kakata, Liberia	18.265.102	-	-	18.265.102	-
Gallo Oil (Jersey) Ltd.	Block R2	165.026.566	-	635.960	-	165.662.526
	Block 13	201.982.773	-	1.814.227	-	203.797.000
PT Mitra Bisnis Harvest	Banyuasin	-	30.756.052	-	-	30.756.052
	Ogan Komering Ulu	-	2.353.409	-	-	2.353.409
PT Buana Minera Harvest	Banyuasin	-	30.834.292	-	-	30.834.292
	Ogan Komering Ulu	-	30.834.292	-	-	30.834.292
PT MBH Mining Resource	Banyuasin	-	34.977.476	-	-	34.977.476
PT Bintang Mineral Resources	Ogan Komering Ulu Selatan	-	62.913.711	-	-	62.913.711
PT MBH Minera Resource	Ogan Komering Ulu Selatan	-	81.991.415	-	-	81.991.415
PT Citra Jaya Nurcahya	Lahat	-	53.274.191	-	-	53.274.191
Total		431.061.409	327.934.838	15.287.362	18.265.102	756.018.507

Aset eksplorasi dan evaluasi atas Gallo merupakan biaya minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi di Yaman. Gallo dan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Republik Yaman melakukan Perjanjian Bagi Hasil Produksi pada tanggal 25 Februari 1999 (Catatan 49r).

Exploration and evaluation assets for Gallo represent costs of oil and gas properties in connection with the exploration activities in Yemen. Gallo and the Ministry of Oil and Mineral Resources (MOMR) of the Republic of Yemen entered into a Production Sharing Agreement on February 25, 1999 (Note 49r).

Pada tanggal 28 April 2013, Gallo diberi tambahan perpanjangan izin selama dua belas bulan (12) dari tanggal 14 Mei 2013 sampai tanggal 13 Mei 2014 untuk izin tahap eksplorasi kedua di Blok 13. Lebih lanjut, Gallo telah diinformasikan oleh Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral atas perpanjangan izin selama dua (2) tahun terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014. Disamping itu, pada bulan Mei 2014, sesuai dengan permintaan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral, Gallo memperpanjang *irrevocable standby letter of credit* untuk periode yang sama dengan perpanjangan izin dan akan berakhir pada atau sebelum tanggal 13 November 2016. Berdasarkan hal tersebut, permintaan Gallo untuk perpanjangan di Blok 13 telah disetujui, tetapi surat yang menyatakan persetujuan tersebut masih dalam proses sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 1 April 2015, Gallo mengajukan kepada Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral untuk perpanjangan masa eksplorasi di Blok 13 (Catatan 53o).

On April 28, 2013, Gallo was granted an extra extension for twelve (12) months from May 14, 2013 to May 13, 2014 for the second exploration phase in the PSA for Block 13. In addition, Gallo has been notified by the MOMR of another extension for two (2) years with effect from May 14, 2014. Furthermore in May 2014, following the request from MoMR, Gallo extended the related irrevocable standby letter of credit for a similar period of the extension given and to expire on or before November 13, 2016. Based on the said notification, Gallo's request for another extension on Block 13 has been approved, but the letter confirming the approval is still in process as of the completion date of the consolidated financial statements. On April 1, 2015, Gallo applied to the MOMR for request of extension of the exploration period in Block 13 (Note 53o).

18. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (Lanjutan)

Pada tanggal 28 April 2013, Gallo diberi tambahan dan perpanjangan izin terakhir untuk tahap eksplorasi kedua di Blok R2 selama dua belas bulan (12) dari tanggal 14 Februari 2013 sampai tanggal 13 Februari 2014. Akan tetapi, Gallo telah diinformasikan oleh Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral untuk perpanjangan izin selama dua belas (12) bulan dari tanggal 14 Februari 2014 sampai tanggal 13 Februari 2015. Disamping itu, pada bulan Mei 2014, sesuai dengan permintaan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral, Gallo memperpanjang *irrevocable standby letter of credit* untuk periode yang sama dengan perpanjangan izin dan akan berakhir pada atau sebelum tanggal 13 Agustus 2015. Berdasarkan hal tersebut, permintaan Gallo untuk perpanjangan di Blok R2 telah disetujui, tetapi surat yang menyatakan persetujuan tersebut masih dalam proses sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Namun, pada tanggal 1 April 2015, Gallo mengajukan kepada Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral untuk perpanjangan masa eksplorasi di Blok R2 dan pada tanggal 6 Juni 2015, permintaan perpanjangan diberikan (Catatan 53o).

Sejak Januari 2011, Gallo telah menunda kegiatan operasinya untuk Blok R2 dan Blok 13 sehubungan dengan ketidaktersediaan jasa yang diperlukan untuk aktivitas eksplorasinya. Pemulihan nilai tercatat aset tersebut tergantung pada penyelesaian situasi di Yaman, hasil aktivitas eksplorasi yang akan dilakukan di masa mendatang dan status dari persetujuan perpanjangan izin. Namun, manajemen memutuskan untuk mencatat rugi penurunan nilai aset minyak dan gas bumi di Blok R2 sebesar USD167.436.416 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, karena saat ini, pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi lebih lanjut tidak dianggarkan atau direncanakan.

Pada tanggal 18 Januari 2013, aset eksplorasi dan evaluasi Konblo dihapuskan sehubungan dengan dilusi atas kepemilikan di Konblo (Catatan 4c).

Manajemen mengakui kerugian penurunan nilai hak penambangan untuk semua Entitas Anak dibawah Proyek Batubara Sumatera sebesar USD69.246.817 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai akibat dari penurunan terus-menerus dari kondisi pasar global untuk harga batubara. Manajemen mengakui rugi penurunan nilai untuk mencatat aset tersebut dari nilai tercatat ke jumlah terpuhikannya, berdasarkan pada perhitungan nilai pakai yang menggunakan tingkat diskonto 10%.

Total biaya pinjaman utang bank dan obligasi yang dikapitalisasi sehubungan dengan aset eksplorasi dan evaluasi sejumlah USD21.841.694 pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD16.719.739 pada tanggal 31 Desember 2013. Tingkat kapitalisasi adalah 10,42% pada tanggal 31 Desember 2014 dan 13,50% pada tanggal 31 Desember 2013.

**18. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS
(Continued)**

On April 28, 2013, Gallo was granted an extra and last extension for the second exploration phase in the PSA for Block R2 for twelve (12) months from February 14, 2013 to February 13, 2014. However, Gallo has been notified by the MOMR of another extension for twelve (12) months from February 14, 2014 to February 13, 2015. Furthermore in May 2014, following the request from MOMR, Gallo extended the related irrevocable standby letter of credit for a similar period of the extension given and to expire on or before August 13, 2015. Based on the said notification, Gallo's request for another extension on Block R2 has been approved, but the letter confirming the approval is still in process as of the completion date of the consolidated financial statements. However, on April 1, 2015, Gallo applied to the MOMR for request of extension of the exploration period in Block R2 and, on June 6, 2015, the request for extension was granted (Note 53o)

Since January 2011, Gallo has suspended its operations for Block R2 and Block 13 due to current unavailability of most of the services required for its exploration activities. The recoverability of the carrying value of such assets is dependent on the outcome of this situation in Yemen, the results of the exploratory works to be carried out in the future and the status of the approval of extension permits. However, the management decided to recognize impairment loss on oil and gas properties in Block R2 amounting to USD167,436,416 for the year ended December 31, 2014, because expenditures for further exploration and evaluation are not currently budgeted or planned.

On January 18, 2013, Konblo's exploration and evaluation assets have been disposed due to the dilution of ownership interest in Konblo (Note 4c).

The management recognized impairment losses for the mining rights on all Subsidiaries under the Sumatera Coal Project totaling USD69,246,817 for the year ended December 31, 2014, in response to the continuous decline of global market conditions for coal price. The management provided impairment loss to write down such assets from their carrying values to recoverable amounts, which were based on the value in use calculation and were computed using the discount rate of 10%.

Total capitalized borrowing costs of bank loans and bonds related to exploration and evaluation assets amounted to USD21,841,694 as of December 31, 2014 and USD16,719,739 as of December 31, 2013. The capitalization rates used were 10.42% as of December 31, 2014 and 13.50% as of December 31, 2013.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

19. GOODWILL

Akun ini merupakan selisih lebih biaya perolehan di atas nilai aset neto Entitas Anak.

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2014	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2014	
Harga	458.365.358	-	-	458.365.358	Cost
Akumulasi amortisasi	150.088.242	-	-	150.088.242	Accumulated amortization
Nilai Tercatat	308.277.116	-	-	308.277.116	Carrying Value

19. GOODWILL

This account represents the excess of acquisition cost over the net assets value of Subsidiaries.

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2013	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2013	
Harga	458.365.358	-	-	458.365.358	Cost
Akumulasi amortisasi	150.088.242	-	-	150.088.242	Accumulated amortization
Nilai Tercatat	308.277.116	-	-	308.277.116	Carrying Value

Perusahaan tidak mengamortisasi *goodwill* sejak tahun 2011 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. Akumulasi amortisasi merupakan amortisasi *goodwill* sampai dengan tahun 2010.

The Company has not amortized goodwill since 2011 in connection with the adoption of PSAK No. 22 (Revised 2010) which was effective on January 1, 2011. The accumulated amortization pertains the amortization of goodwill up to 2010.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah terpulihkan atas *goodwill* lebih tinggi dari nilai tercatat.

The management believes that the recoverable amount of goodwill is higher than its carrying value.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, *goodwill* yang diakui di Leap-Forward Resources Ltd. diklasifikasikan sebagai "Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

As of December 31, 2014 and 2013, goodwill recognized in Leap-Forward Resources Ltd. was reclassified to "Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

20. PIUTANG JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

20. LONG-TERM RECEIVABLES

This account consists of:

	Catatan/ <i>Notes</i>	2014	2013	
Pihak ketiga - Dolar AS				Third parties - US Dollar
PT Bukit Mutiara (setelah dikurangi premi yang belum diamortisasi sebesar USD52.548.065 pada tanggal 31 Desember 2014 dan USD76.608.205 pada tanggal 31 Desember 2013)	20a	408.241.409	358.418.198	PT Bukit Mutiara (net of unamortized premium of USD 52,548,065 as of December 31, 2014 and USD 76,608,205 as of December 31, 2013)
Candice Investments Pte. Ltd.	20b	68.084.827	66.699.724	Candice Investments Pte. Ltd.
Sub-total		476.326.236	425.117.922	Sub-total

20. PIUTANG JANGKA PANJANG (Lanjutan)

20. LONG-TERM RECEIVABLES (Continued)

	Catatan/ Notes	2014	2013	
Pihak berelasi - Dolar AS (Catatan 44h)				Related party - US Dollar (Note 44h)
PT Citra Kusuma Perdana	20c	22.405.721	15.894.016	PT Citra Kusuma Perdana
Total		498.731.957	441.011.938	Total
Dikurangi: Bagian jangka panjang		90.490.548	441.011.938	Less: Non-current portion
Bagian Jangka Pendek		408.241.409	-	Current Portion

a. PT Bukit Mutiara

Pada tanggal 2 November 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bukit Mutiara (Bukit Mutiara) dimana Perusahaan setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok sebesar USD300 juta kepada Bukit Mutiara sehubungan dengan perjanjian pembelian dan pemesanan saham untuk mengakuisisi kepemilikan tidak langsung sebesar 90% di PT Berau Coal ("Perusahaan Batubara Target") oleh Bukit Mutiara.

Pinjaman ini tidak menggunakan jaminan dan akan dibayar kembali seluruhnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 5 November 2015. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun dan jatuh tempo setiap triwulan. Berdasarkan perubahan perjanjian tanggal 27 Agustus 2012, bunga yang terutang sejak bulan Januari 2012 harus dibayar pada tanggal pelunasan terakhir. Ketika utang ini dibayar lunas, Bukit Mutiara harus membayar premi penebusan dengan *internal rate of return* sebesar 19% kepada Perusahaan.

Saldo pinjaman merupakan biaya perolehan diamortisasi dari fasilitas pinjaman tersebut di atas dan termasuk piutang atas tagihan biaya *arranger* dan pemasaran. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar.

a. PT Bukit Mutiara

On November 2, 2009, the Company entered into a loan agreement with PT Bukit Mutiara (Bukit Mutiara), wherein the Company agreed to grant a loan facility with the principal amount of up to USD300 million to Bukit Mutiara in connection with a share sale and subscription agreement, which Bukit Mutiara has negotiated in relation to the acquisition of an indirect 90% interest in PT Berau Coal (the "Coal Company Target").

The loan is unsecured and shall be repaid in full upon its maturity on November 5, 2015. The interest rate of the loan is 12% per annum and is payable every quarter. Based on amendment agreement dated August 27, 2012, the interest accrued since January 2012 shall be paid on the final repayment date. When the loan is repaid in full, Bukit Mutiara must pay a redemption premium such that the Company receives an internal rate of return of 19%.

The outstanding balance represents the amortized cost of loan facility and receivables related to arranger and marketing fees. As of December 31, 2014, the outstanding balance was classified to current asset.

20. PIUTANG JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

b. Candice Investments Pte. Ltd.

Pada bulan Juni 2010, IndoCoal Resources Cayman Limited (ICRL) ("Pemberi Pinjaman") dan Candice Investments Pte. Ltd. (Candice) ("Peminjam") menandatangani Perjanjian Pinjaman *Equity Partner*, dimana ICRL memberikan Candice fasilitas pinjaman konversi berjangka tanpa jaminan dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000 ditambah setiap Jumlah Kekurangannya. Peminjam diharuskan membayar bunga pinjaman dari jumlah persentase tarif (a) LIBOR dan (b) 2% setiap tahun. Peminjam harus membayar pinjaman dan seluruh bunga terutang paling lambat (a) pada Tanggal Pelunasan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal lainnya yang mungkin disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini dan (b) pada tanggal dimana kewajiban untuk melakukan pelunasan atau pembayaran lainnya sesuai dengan perjanjian ini tidak lagi tergantung pada pembatasan dalam Perjanjian Subordinasi (Catatan 49ee).

c. PT Citra Kusuma Perdana

Pada tanggal 28 Juni 2011, ICRL ("Pemberi Pinjaman") dan PT Citra Kusuma Perdana (CKP) ("Peminjam") menandatangani Perjanjian Pinjaman *Equity Partner*, dimana ICRL memberikan CKP fasilitas pinjaman konversi berjangka tanpa jaminan dengan jumlah USD25.000.000 ditambah setiap Jumlah Kekurangannya. Peminjam diharuskan membayar bunga pinjaman dari jumlah persentase tarif (a) LIBOR dan (b) 2% setiap tahun. Peminjam harus membayar pinjaman dan seluruh bunga terutang paling lambat (a) pada Tanggal Pelunasan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017 atau tanggal lainnya yang mungkin disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini dan (b) pada tanggal dimana kewajiban untuk melakukan pelunasan atau pembayaran lainnya sesuai dengan perjanjian ini tidak lagi tergantung pada pembatasan dalam Perjanjian Subordinasi (Catatan 49ee).

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman *Equity Partner* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 6 Februari 2014, ICRL dan CKP setuju untuk meningkatkan jumlah pokok pinjaman dari USD25.000.000 menjadi USD35.000.000. Oleh karena itu, Perjanjian Pinjaman *Equity Partner* tanggal 28 Juni 2011 diubah dan disajikan kembali.

20. LONG-TERM RECEIVABLES *(Continued)*

b. Candice Investments Pte. Ltd.

In June 2010, IndoCoal Resources Cayman Limited (ICRL) (the "Lender") and Candice Investments Pte. Ltd. (Candice) (the "Borrower") entered into an Equity Partner Loan Agreement, whereby ICRL grants to Candice an unsecured, convertible term loan facility in the principal amount not exceeding USD100,000,000 plus any Shortfall Amount. The Borrower shall pay interest on the loan at the aggregate percentage of (a) the LIBOR plus (b) 2% per annum. The Borrower shall repay the loan and all accrued interest on the later of (a) the Repayment Date, which is on December 31, 2017 or any such date as maybe agreed by the parties to this agreement, and (b) the date on which its obligation to make repayments and payments of other amounts under this agreement are no longer subject to the restrictions in the Subordination Agreement (Note 49ee).

c. PT Citra Kusuma Perdana

On June 28, 2011, ICRL (the "Lender") and PT Citra Kusuma Perdana (CKP) (the "Borrower") entered into an Equity Partner Loan Agreement, whereby ICRL grants to CKP an unsecured, convertible term loan facility in the principal amount of USD25,000,000 plus any Shortfall Amount. The Borrower shall pay interest on the loan at the aggregate percentage of (a) the LIBOR plus (b) 2% per annum. The Borrower shall repay the loan and all accrued interest on the later of (a) the Repayment Date, which is on December 31, 2017 or any such date as maybe agreed by the parties to this agreement, and (b) the date on which its obligation to make repayments and payments of other amounts under this agreement are no longer subject to the restrictions in the Subordination Agreement (Note 49ee).

Based on the Amendment and Restatement Agreement relating to the Equity Partner Loan Agreement on February 6, 2014, ICRL and CKP agreed to increase the principal amount of loan from USD25,000,000 to USD35,000,000. Accordingly, the original Equity Partner Loan Agreement dated June 28, 2011 was amended and restated.

21. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pihak ketiga		
Biaya proyek pengembangan usaha	127.750.000	127.750.000
Uang muka dan jaminan	37.856.186	37.211.932
Biaya rehabilitasi untuk masa depan dari kontraktor	28.363.219	25.881.327
Lisensi	9.975.112	9.975.112
Biaya proyek unit usaha	3.898.067	-
Jaminan DHPB	-	13.741.898
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	6.162.275	4.503.954
Sub-total	<u>214.004.859</u>	<u>219.064.223</u>
Pihak berelasi		
Aset keuangan tersedia untuk dijual (Catatan 44c)	2.671.629	2.671.629
Piutang karyawan - bagian jangka panjang (Catatan 44a)	2.195.543	2.602.499
Sub-total	<u>4.867.172</u>	<u>5.274.128</u>
Total	<u>218.872.031</u>	<u>224.338.351</u>

Biaya proyek pengembangan usaha merupakan dana Kelompok Usaha yang ditempatkan melalui perantara pihak ketiga tertentu untuk peluang pengembangan usaha. Dana ini telah diinvestasikan dalam berbagai proyek, dalam bentuk mulai dari pinjaman, termasuk hak untuk mengkonversi ke ekuitas, partisipasi pendanaan langsung di bidang pertambangan, dan usaha bisnis lainnya. Proyek-proyek ini akan dicatat secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha ketika Perusahaan telah mengambil kepemilikan langsung atau tidak langsung.

Pada tanggal 2 Mei 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Penyelesaian dengan pihak ketiga dimana dana Perusahaan yang diinvestasikan akan diselesaikan melalui konversi menjadi kepemilikan atas konsesi batubara di Sumatera ("Proyek Batubara Sumatera"). Pada tanggal 31 Desember 2013, konsesi batubara tersebut telah diakuisisi (Catatan 4d). Dengan demikian, pengakuan pemulihan dari penurunan nilai aset sebelumnya sebesar USD31.305.000 telah diakui pada tahun 2013.

Pada tanggal 24 September 2013, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Bersyarat dengan pihak ketiga untuk mengalihkan dana Perusahaan menjadi kepemilikan atas konsesi batubara di Kalimantan Timur, yang membutuhkan pemenuhan kondisi tertentu sebagaimana tercantum dalam Perjanjian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pemenuhan kondisi tersebut masih dalam proses.

21. OTHER NON-CURRENT ASSETS

This account consists of:

<u>2014</u>	<u>2013</u>	
		Third parties
		<i>Business development project costs</i>
		<i>Advances and deposits</i>
		<i>Recoverable from contractors for future rehabilitation costs</i>
		<i>License</i>
		<i>Business unit project costs</i>
		<i>DHPB deposit</i>
		<i>Others (each below USD5,000,000)</i>
		<i>Sub-total</i>
		Related parties
		<i>Available-for-sale financial assets (Note 44c)</i>
		<i>Employee receivables - non-current portion (Note 44a)</i>
		<i>Sub-total</i>
		Total

Business development project costs represent the Group's funds placed with certain third-party intermediaries to pursue business development opportunities. These funds have been invested in various projects, in forms ranging from loans, including rights to convert to equity, direct funding participation in mining and other business ventures. These projects will be accounted for separately in the Group's consolidated financial statements once the Company has taken on a direct or indirect ownership interest.

On May 2, 2013, the Company entered into a Settlement Agreement with a third party that the Company's funds invested will be settled by conversion into ownership interests in several coal concessions in Sumatera ("Sumatera Coal Project"). As of December 31, 2013, those coal concessions have been acquired (Note 4d). Accordingly, recovery from impairment previously recognized amounting to USD31,305,000 was recognized in 2013.

On September 24, 2013, the Company entered into a Conditional Asset Transfer Agreement with third parties for the transfer of the Company's fund into ownership interest in a coal concession in East Kalimantan that requires certain conditions as stated in the Agreement. As of the completion date of the consolidated financial statements, the settlements of those conditions are still in process.

21. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA *(Lanjutan)*

Berdasarkan kemajuan dan status dari proyek tersebut, manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi bahwa dana yang diinvestasikan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, tidak ada rugi penurunan nilai yang dicatat.

Uang muka dan jaminan terdiri dari uang muka kepada PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang merupakan dana talangan sejumlah USD4.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan PT Multi Capital, Entitas Anak, pada tanggal 23 Juli 2009 sehubungan dengan pendirian PT Multi Daerah Bersaing (MDB), Entitas Anak, dan atas akuisisi saham PT Newmont Nusa Tenggara, entitas asosiasi. Berdasarkan persetujuan pemegang saham MDB, pada tanggal 4 Juli 2011, MDB telah setuju untuk memberikan dividen dibayar dimuka sebesar USD30.000.000 kepada DMB. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo dividen dibayar dimuka ini telah bertambah masing-masing menjadi USD35.777,461 dan USD35.748.155. Dividen dibayar dimuka ini tanpa bunga dan akan diperhitungkan dengan pembayaran dividen yang akan dideklarasikan dan dibayarkan kemudian hari oleh MDB kepada DMB (pemegang sahamnya).

Tagihan kontraktor untuk biaya rehabilitasi di masa mendatang dibebankan kepada kontraktor untuk daerah yang telah ditambang dan belum direhabilitasi pada setiap akhir periode pelaporan (Catatan 28). Arutmin menghapusbukukan tagihan kepada Thiess untuk biaya rehabilitasi di masa mendatang sebesar USD26.443.282 pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Akta Penyelesaian dan Penghentian.

Biaya proyek unit usaha sehubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Gorontalo Mineral di Motomboto Utara dan Timur (Catatan 49kk).

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan investasi di Konblo Bumi Inc., pihak berelasi, sebesar USD2.614.701, sehubungan dengan dilusi kepemilikan saham Lemington terhadap Konblo, yang mana telah berkurang menjadi sebesar 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan telah disajikan sebagai aset keuangan aset keuangan AFS (Catatan 4c).

21. OTHER NON-CURRENT ASSETS *(Continued)*

Based on the progress and status of those projects, management believes that there is no indication that the funds invested may not be recoverable. Accordingly, no impairment loss was recorded.

Advances and deposits include advances to PT Daerah Maju Bersaing (DMB) which represents bridging facility amounting to USD4,000,000 based on the Cooperation Agreement with PT Multi Capital, a Subsidiary, on July 23, 2009 related to the establishment of PT Multi Daerah Bersaing (MDB), a Subsidiary, and for the acquisition of shares in PT Newmont Nusa Tenggara, an associate. Based on MDB shareholders' meeting on July 4, 2011, MDB has agreed to render an advance dividend amounting to USD30,000,000 to DMB. As of December 31, 2014 and 2013, advance dividends amounted to USD35,777,461 and USD35,748,155, respectively. The advance dividends are non-interest bearing and will be accounted for against future dividend payments distributed by MDB to DMB (its shareholder).

Recoverable from contractors for future rehabilitation costs represents chargeable to the contractors for the disturbed areas that remain non-rehabilitated at the end of each reporting period (Note 28). Arutmin wrote off recoverable from Thiess for future rehabilitation costs amounting to USD26,443,282 as of December 31, 2013 in line with the Deed of Settlement and Termination.

Business unit project costs pertain to costs incurred to commence the Gorontalo Mineral's Projects in North and East Motomboto (Note 49kk).

Available-for-sale financial assets represent investment in Konblo Bumi Inc., a related party, amounting to USD2,614,701, in relation to the diluted share ownership of Lemington in Konblo, which has been reduced to 5% of the total issued shares and has been presented as AFS financial assets (Note 4c).

22. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

22. SHORT-TERM LOANS

This account consists of:

		2014			
	Catatan/ Notes	Pokok/ Principal	Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Financing cost	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost	
Pihak ketiga - Dolar AS					
Fasilitas Credit Suisse 2012	22a	143.897.249	-	143.897.249	<i>Third parties - US Dollar Credit Suisse Facility 2012</i>
Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014	22c	50.000.000	-	50.000.000	<i>Castleford Investment Holdings Ltd. Facility 2014</i>
Total		193.897.249	-	193.897.249	Total
2013					
	Catatan/ Notes	Pokok/ Principal	Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Financing cost	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost	
Pihak ketiga - Dolar AS					
Fasilitas Credit Suisse 2012	22a	116.560.775	-	116.560.775	<i>Third parties - US Dollar Credit Suisse Facility 2012</i>
Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2013	22b	79.333.332	-	79.333.332	<i>Castleford Investment Holdings Ltd. Facility 2013</i>
Total		195.894.107	-	195.894.107	Total

Rincian pembayaran yang dilakukan pada tahun berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

The details of repayments made during the year for each loan facility were as follows:

	2014	2013	
Pihak ketiga - Dolar AS			Third parties - US Dollar
Fasilitas Castleford Investment	150.000.000	-	<i>Castleford Investment</i>

a. Fasilitas Credit Suisse 2012

a. Credit Suisse Facility 2012

Pada tanggal 14 Juni 2012, BRMS dan Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai "Financial Institutions, the Original Lenders, Arranger, Facility Agent, Security Agent dan Account Bank"), menandatangani Perjanjian Kredit, di mana Pemberi Pinjaman setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BRMS sebesar USD100.000.000, yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu dua belas (12) bulan sejak penarikan dana dan dapat diperpanjang selama periode yang tidak melebihi tanggal 19 September 2013.

On June 14, 2012, BRMS and Credit Suisse AG, Singapore branch (the "Financial Institutions, the Original Lenders, Arranger, Facility Agent, Security Agent and Account Bank") entered into a Credit Agreement, whereby the Original Lenders agreed to provide to BRMS a credit facility amounting to USD100,000,000, which is payable in full twelve (12) months following the utilization date and could be extended up to September 19, 2013.

22. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Credit Suisse AG telah memberikan beberapa kali persetujuan perpanjangan terhadap fasilitas pinjaman ini, perpanjangan terbaru atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 3 April 2015.

Bersama dengan perpanjangan tanggal jatuh tempo, beberapa klausa telah diubah terutama terkait definisi jumlah pokok yang sekarang termasuk bunga masih harus dibayar, dan beberapa hal lainnya.

Hasil dari pinjaman ini, setelah dikurangi (i) biaya-biaya transaksi; dan (ii) alokasi pembayaran minimum atau cadangan pembayaran utang, dapat digunakan oleh BRMS untuk pendanaan, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara BRMS dan PT Dairi Prima Mineral (Dairi), aktivitas bisnis Dairi yang meliputi aktivitas bisnis normal termasuk, dan tidak terbatas pada, utang usaha dan utang lainnya Dairi serta pengeluaran Dairi sehubungan dengan pengembangan Area Tambang Dairi.

b. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2013

Pada tanggal 14 November 2013, PT Bumi Resources Investment (BRI), Entitas Anak non-terbatas, dan Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) menandatangani Perjanjian Fasilitas dimana Castleford setuju untuk memberikan dukungan dana sebesar USD110.000.000 untuk mengembangkan proyek tertentu dari BRI.

Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga 5% per tahun. Pinjaman terutang dalam jangka waktu dua belas (12) bulan, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pada tanggal 5 Juni 2014, Perusahaan, BRI dan Castleford menandatangani Perjanjian Novasi dimana BRI menyerahkan dan menovasikan kepada Perusahaan semua hak, kewajiban dan kepentingan BRI berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 14 November 2013 antara Castleford dan BRI sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu.

Pada tanggal 5 Juni 2014, Perusahaan dan BRI menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang dimana Perusahaan telah menerima pinjaman sebesar USD150.000.000 dari BRI dengan *internal rate of return* sebesar 5%.

22. SHORT-TERM LOANS (Continued)

Credit Suisse AG has granted approval to various extensions of the facility's maturity date, the latest being an extension of the facility's maturity date, the latest being an extension of the facility's maturity date until April 3, 2015.

Together with the extension of maturity date, certain clauses were also amended particularly with regard to the definition of principal amount, which now includes, accrued interest, among others.

The loan, after being deducted by (i) transaction expenses; and (ii) allocation of minimum repayment amount or accrual of payments, can be used by BRMS for funding, by way of BRMS and PT Dairi Prima Mineral (Dairi) Inter-Company Loan, those business activities of Dairi which are conducted in its normal course of business including, without limitation, payables and other liabilities of Dairi and expenditure by Dairi in connection with the development of the Dairi's Mining Site.

b. Castleford Investment Holdings Ltd. Facility 2013

On November 14 2013, PT Bumi Resources Investment (BRI), a non-restricted Subsidiary, and Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) entered into a Facility Agreement wherein Castleford agreed to provide financial support amounting to USD110,000,000 in order to develop certain projects of BRI.

The loan bears an interest rate of 5% per annum. The loan is payable within twelve (12) months, however, the term can be extended as agreed by both parties.

On June 5, 2014, the Company, BRI and Castleford entered into a Novation Agreement whereby BRI shall transfer to the Company, by way of novation, all right, title and interest of BRI under Facility Agreement dated November 14, 2013 between Castleford and BRI as has been amended from time to time.

On June 5, 2014, the Company and BRI entered into a Debt Acknowledgment Agreement whereby the Company has received a loan facility amounting to USD150,000,000 from BRI with a 5% IRR (Internal Rate of Return).

22. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 10 Juni 2014, Perusahaan dan Castleford menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang ("*Debt Settlement Agreement*"), Perusahaan dan Castleford setuju setiap utang Perusahaan berdasarkan Perjanjian Novasi akan diselesaikan dengan saham Perusahaan terkait dengan Penawaran Umum Terbatas Perusahaan. Perusahaan dan Castleford setuju dan mengakui saldo utang Perusahaan kepada Castleford saat ini sebesar USD 150.000.000.

Pada tanggal 30 September 2014, fasilitas ini telah dikonversi menjadi kepemilikan saham di Perusahaan.

c. Fasilitas Castleford Investment Holdings Ltd. 2014

Pada tanggal 30 Desember 2014, Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang, dimana Perusahaan mengakui berutang kepada Castleford sebesar USD50 juta. Hal ini terkait dengan penyerahan Fasilitas China Development Bank Corporation (CDB) atas sebagian dari Fasilitas China Development Bank (Catatan 30k) sebesar USD50 juta kepada Castleford. Penyerahan ini tidak menyerahkan dan mengalihkan hak CDB kepada Castleford terhadap jaminan atas *Common Security Documents*.

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 6,7% per tahun dan LIBOR. Fasilitas ini akan dilunasi dalam satu tahun baik secara tunai atau dengan konversi saham setelah tanggal efektif penyerahan yang dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

22. SHORT-TERM LOANS (Continued)

On June 10, 2014, the Company and Castleford entered into a *Debt Settlement Agreement* whereby the Company and Castleford agreed that all debts of the Company under *Novation Agreement* will be settled through conversion of debt into shares of the Company in respect of the Company's *Rights Issue*. The Company and Castleford agree and acknowledge that the current outstanding debt obligations to Castleford amount to USD150,000,000.

On September 30, 2014, this facility has been converted to equity shares of the Company.

c. Castleford Investment Holdings Ltd. Facility 2014

On December 30, 2014, Castleford Investment Holdings Ltd. (Castleford) and the Company entered into an *Acknowledgment of Indebtedness Agreement*, wherein the Company acknowledged its indebtedness to Castleford amounting to USD50 million. This is in line with the assignment of China Development Bank Corporation (CDB) Facility for part of its China Development Bank Facility (Note 30k) amounting to USD50 million to Castleford. This assignment does not assign and transfer the right of CDB to Castleford against the *Security Interest* under the *Common Security Documents*.

The loan bears an interest rate of 6.7% per annum and LIBOR. The facility shall be repaid in a year either by cash or by shares conversion after the effective date of the assignment which may be extended in accordance with a written instrument signed by both parties.

23. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>
Pihak ketiga	
<u>Dolar AS</u>	
PT Jhonlin Baratama	351.963.072
PT Rian Pratama Mandiri	38.974.978
PT Nusa Tambang Pratama	38.252.037
PT Mitratama Perkasa	24.954.999
PT Pama Persada Nusantara	14.760.905
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	12.101.596
PT United Tractors Tbk	7.477.156
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	6.779.849

23. TRADE PAYABLES

This account consists of:

	<u>2013</u>	
		Third parties
		<u>US Dollar</u>
	-	PT Jhonlin Baratama
	-	PT Rian Pratama Mandiri
	12.220.798	PT Nusa Tambang Pratama
	-	PT Mitratama Perkasa
	16.164.701	PT Pama Persada Nusantara
	16.217.532	PT Bukit Makmur Mandiri Utama
	5.635.811	PT United Tractors Tbk
	6.793.322	PT Hexindo Adiperkasa Tbk

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

23. UTANG USAHA (Lanjutan)

23. TRADE PAYABLES (Continued)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Liebherr Indonesia Perkasa	6.382.441	10.254.207	PT Liebherr Indonesia Perkasa
Trust Energy Resources Pte. Ltd., Singapura	6.302.356	5.480.089	Trust Energy Resources Pte. Ltd., Singapore
PT Kaltim Nitrate Indonesia	4.832.072	7.020.817	PT Kaltim Nitrate Indonesia
Mitsui & Co. Ltd., Jepang	2.219.874	5.165.959	Mitsui & Co. Ltd., Japan
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	62.911.758	71.467.599	Others (each below USD5,000,000)
Sub-total	577.913.093	156.420.835	Sub-total
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Energy Transporter Indonesia	6.110.574	-	PT Energy Transporter Indonesia
PT Putra Perkasa Abadi	3.002.505	7.532.679	PT Putra Perkasa Abadi
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	4.960.533	7.962.248	Others (each below USD5,000,000)
Sub-total	14.073.612	15.494.927	Sub-total
<u>Dolar Australia</u>			<u>Australian Dollar</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	771.639	1.140.248	Others (each below USD5,000,000)
<u>Euro</u>			<u>Euro</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	411.146	593.025	Others (each below USD5,000,000)
<u>Mata uang lainnya</u>			<u>Other Currencies</u>
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	6.861	14.125	Others (each below USD5,000,000)
Total pihak ketiga	593.176.351	173.663.160	Total third parties
Pihak berelasi (Catatan 44d)			Related parties (Note 44d)
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
PT Petromine Energy Trading	69.197.447	58.378.538	PT Petromine Energy Trading
PT Darma Henwa Tbk	21.975.138	17.535.382	PT Darma Henwa Tbk
Total pihak berelasi	91.172.585	75.913.920	Total related parties
Total	684.348.936	249.577.080	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There are no collaterals given for trade payables.

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Aging schedule of trade payables was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Lancar	449.648.023	148.569.059	Current
31 sampai dengan 60 hari	62.123.878	26.908.214	31 to 60 days due
61 sampai dengan 90 hari	48.055.080	30.260.458	61 to 90 days due
Lebih dari 90 hari	124.521.955	43.839.349	Over 90 days due
Total	684.348.936	249.577.080	Total

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

24. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
Hartman International Pte. Ltd., Singapura	103.087.500	-	Hartman International Pte. Ltd., Singapore
PT Thiess Contractor Indonesia (Catatan 50t)	84.979.079	56.647.574	PT Thiess Contractor Indonesia (Note 50t)
Paradiso Resources Ltd., Kepulauan Virgin Britania Raya	56.400.000	-	Paradiso Resources Ltd., British Virgin Islands
Khopoli Investments Limited, Mauritius	5.250.000	7.416.666	Khopoli Investments Limited, Mauritius
Bank ICICI Limited, Singapura	-	21.968.679	ICICI Bank Limited, Singapore
PT Kutai Timur Sejahtera	-	15.066.495	PT Kutai Timur Sejahtera
Lain-lain (masing-masing dibawah USD5.000.000)	59.766.615	46.078.665	Others (each below USD5,000,000)
Total	<u>309.483.194</u>	<u>147.178.079</u>	Total

Utang ke ICICI Bank Limited merupakan saldo fasilitas *Usance Letter of Credit (L/C)* dari ICICI Bank Limited untuk modal kerja, yang mana akan dibayarkan pada saat L/C tersebut jatuh tempo, maksimum 180 hari. Utang ini sudah lunas di tahun 2014.

24. OTHER PAYABLES

This account consists of:

Payable to ICICI Bank Limited pertains to outstanding value of Usance Letter of Credit (L/C) facility from ICICI Bank Limited for working capital purposes, which will be paid upon maturity of the L/C for a maximum period of 180 days. This payable was settled in 2014.

25. UTANG ROYALTI KEPADA PEMERINTAH INDONESIA

Utang royalti kepada Pemerintah Indonesia merupakan utang sehubungan dengan hak Pemerintah Indonesia atas penjualan batubara ("Dana Hasil Produksi Batubara"/DHPB) (Catatan 49a) oleh entitas pengendalian bersama rincian berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
PT Kaltim Prima Coal	501.285.903	654.250.177	PT Kaltim Prima Coal
PT Arutmin Indonesia	226.925.720	357.778.197	PT Arutmin Indonesia
Total	<u>728.211.623</u>	<u>1.012.028.374</u>	Total

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, utang royalti PT Kutai Bara Nusantara (dahulu PT Fajar Bumi Sakti) kepada Pemerintah Indonesia diklasifikasikan sebagai "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

25. ROYALTY PAYABLES TO GOVERNMENT OF INDONESIA

Royalty payables to Government of Indonesia (GOI) relate to the GOI's entitlements on sales of coal ("Coal Production Proceeds"/DPHB) (Note 49a) of the jointly controlled entities with details as follows:

As of December 31, 2014 and 2013, royalty payables of PT Kutai Bara Nusantara (formerly PT Fajar Bumi Sakti) to GOI was reclassified to "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

26. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bunga	194.509.566	125.115.839
Penambangan dan pemeliharaan	133.098.894	244.414.249
Denda atas keterlambatan pembayaran Utang kepada Pemerintah Indonesia	17.304.258	8.117.218
Komisi	14.733.661	12.275.973
Pengapalan	7.154.416	8.448.018
Gaji dan upah	2.678.787	1.637.024
Pemberhentian karyawan		
Lain-lain	<u>78.438.877</u>	<u>19.743.571</u>
Total	<u>447.918.459</u>	<u>419.751.892</u>

Beban penambangan dan pemeliharaan merupakan utang kepada para kontraktor sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, entitas pengendalian bersama.

26. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

<i>Interest</i>
<i>Mining and maintenance</i>
<i>Penalty for late payment of Due to Government of Indonesia</i>
<i>Commission</i>
<i>Shipping</i>
<i>Salaries and wages</i>
<i>Employee termination</i>
<i>Others</i>
Total

Mining and maintenance expenses pertain to payables to contractors related to exploration, development and mining activities in PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia, jointly controlled entities.

27. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kelompok Usaha memiliki utang sewa pembiayaan kepada:

<u>Perusahaan sewa pembiayaan</u>	<u>Jenis</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Category</u>	<u>Lessors</u>
PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia	Mesin	56.577.260	67.886.067	Machinery	PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia
PT Caterpillar Finance Indonesia	Mesin	28.333.289	47.991.534	Machinery	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT Komatsu Astra Finance	Mesin	17.116.438	27.069.195	Machinery	PT Komatsu Astra Finance
Liebherr France S.A.S.	Mesin	16.046.482	29.744.683	Machinery	Liebherr France S.A.S.
PT Orix Indonesia Finance	Mesin	2.515.402	6.292.320	Machinery	PT Orix Indonesia Finance
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Mesin	2.205.598	6.402.945	Machinery	PT Chandra Sakti Utama Leasing
PT ITC Auto Multi Finance	Mesin	822.087	1.351.562	Machinery	PT ITC Auto Multi Finance
PT BTMU BRI Finance	Mesin	632.879	1.492.050	Machinery	PT BTMU BRI Finance
PT Austindo Nusantara Finance	Mesin	2.317	11.248	Machinery	PT Austindo Nusantara Finance
PT Dipo Star Indonesia	Mesin	-	46.784	Machinery	PT Dipo Star Indonesia
Total		<u>124.251.752</u>	<u>188.288.388</u>		Total
Dikurangi: Bagian jangka pendek		<u>41.775.754</u>	<u>53.491.476</u>		Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang		<u>82.475.998</u>	<u>134.796.912</u>		Non-current Portion

27. FINANCE LEASE PAYABLES

As of December 31, 2014 and 2013, the Group had finance lease payables as follows:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

27. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa mendatang, serta nilai kini dari pembayaran sewa minimum pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013		
	Pembayaran Minimum/ Minimum Payments	Nilai Kini Neto/ Net Present Value	Pembayaran Minimum/ Minimum Payments	Nilai Kini Neto/ Net Present Value	
Pembayaran sewa minimum yang akan jatuh tempo dalam:					Minimum lease payments due in:
Kurang dari 1 tahun	46.884.070	41.775.754	61.615.164	53.491.476	Not later than 1 year
Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun	83.582.766	77.741.650	138.854.388	128.303.145	Later than 1 year but not later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	4.872.184	4.734.348	6.700.018	6.493.767	Later than 5 years
Total pembayaran sewa minimum	135.339.020		207.169.570		Total minimum lease payments
Dikurangi: Beban bunga	(11.087.268)		(18.881.182)		Less: Future finance charges
Nilai kini dari pembayaran sewa minimum	124.251.752	124.251.752	188.288.388	188.288.388	Present value of minimum lease payments
Dikurangi:					
Bagian jangka pendek	41.775.754	41.775.754	53.491.476	53.491.476	Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang	82.475.998	82.475.998	134.796.912	134.796.912	Non-current Portion

Utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset yang dibiayai oleh utang ini (Catatan 16).

27. FINANCE LEASE PAYABLES (Continued)

Future minimum lease payments under finance leases, together with the net present value of minimum lease payments, as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

Finance lease payables are collateralized by assets financed by these leases (Note 16).

28. TAKSIRAN LIABILITAS RESTORASI DAN REHABILITASI

Akun ini terdiri dari:

	2014	2013	
Saldo awal	216.615.008	207.029.360	Beginning balance
Dikurangi:			Less:
Provisi selama tahun berjalan	25.033.984	30.389.750	Provision during the year
Beban restorasi yang dibayar selama tahun berjalan	(24.036.291)	(20.804.102)	Restoration expenses paid during the year
Penyesuaian	(26.257.728)	-	Adjustment
Saldo akhir	191.354.973	216.615.008	Ending balance
Dikurangi: Bagian jangka pendek	14.425.071	11.233.325	Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang	176.929.902	205.381.683	Non-current Portion

Mutasi taksiran liabilitas restorasi dan rehabilitasi berdasarkan *area of interest* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Movements of the estimated liability for restoration and rehabilitation based on *area of interest* for the year ended December 31, 2014 were as follows:

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**28. TAKSIRAN LIABILITAS RESTORASI DAN
REHABILITASI (Lanjutan)**

**28. ESTIMATED LIABILITY FOR RESTORATION AND
REHABILITATION (Continued)**

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan (Pemulihan) - neto/ <i>Additions (Reversal) - net</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Entitas pengendalian bersama						Jointly controlled entities
PT Arutmin Indonesia						PT Arutmin Indonesia
Satui	29.367.604	(515.964)	(3.364.974)	-	25.486.666	Satui
Senakin	26.244.471	1.153.541	(4.200.851)	-	23.197.161	Senakin
Mulia	12.135.717	3.212.095	(1.092.279)	-	14.255.533	Mulia
Batulicin	6.988.344	(397.619)	3.161.952	-	9.752.677	Batulicin
Asam Asam	13.999.179	1.346.002	(716.785)	-	14.628.396	Asam Asam
Sarongga	1.007.167	1.664.571	(277.815)	-	2.393.923	Sarongga
Kintap	7.824.476	3.012.643	(357.613)	-	10.479.506	Kintap
PT Kaltim Prima Coal					-	PT Kaltim Prima Coal
Sangatta	119.048.050	15.558.715	(17.187.926)	(26.257.728)	91.161.111	Sangatta
Total	216.615.008	25.033.984	(24.036.291)	(26.257.728)	191.354.973	Total

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, taksiran liabilitas restorasi dan rehabilitasi PT Kutai Bara Nusantara (dahulu PT Fajar Bumi Sakti), Entitas Anak, diklasifikasikan sebagai "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

As of December 31, 2014 and 2013, the estimated liability for restoration and rehabilitation of PT Kutai Bara Nusantara (formerly PT Fajar Bumi Sakti), a Subsidiary, was reclassified to "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

29. LIABILITAS IMBALAN PASTI PASCAKERJA

29. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

Kelompok Usaha menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The Group has defined benefit pension plans covering substantially all of their eligible permanent employees. The assumptions used in the calculation of post-employment benefit liabilities were as follows:

	2014	2013	
Perusahaan			The Company
Tingkat diskonto	8,16%	8,60%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary growth rate
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI '11)/ Indonesian Mortality Table 2011 (TMI '11)		Mortality rate
Umur pensiun normal	55 tahun/55 years old		Normal retirement age
Tingkat kemungkinan cacat	5,00% dari Tabel Mortalitas/ 5.00% of Mortality Table		Disability rate
Tingkat pengunduran diri	7,30% sampai dengan usia 40 tahun, kemudian menurun secara linier sampai 0% pada usia 55 tahun/ 7.30% up to age 40 then decreasing linearly to 0% at age 55		Resignation rate
Tanggal penilaian terakhir	12 Maret/March 12, 2015	27 Maret/March 27, 2014	Date of the latest appraisal
Nama aktuaris independen	PT Dayamandiri Dharmakonsilindo		Name of independent actuary
Frekuensi penilaian	setiap tahun/annually		Frequency of appraisal
Administrator program	nihil/nil		Plan administrator

**29. LIABILITAS IMBALAN PASTI PASCAKERJA
(Lanjutan)**

**29. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES
(Continued)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<u>PT Kaltim Prima Coal</u>			<u>PT Kaltim Prima Coal</u>
Tingkat diskonto	8,15%	9,20%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	8,00%	8,00%	<i>Salary growth rate</i>
Tingkat pengembalian diharapkan atas aset program	9,20%	9,00%	<i>Expected rate of return on plan assets</i>
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI '11)/ <i>Indonesian Mortality Table 2011 (TMI '11)</i>		<i>Mortality rate</i>
Umur pensiun normal	55 tahun/55 years old		<i>Normal retirement age</i>
Tingkat kemungkinan cacat	10,00% dari Tabel Mortalitas/ 10.00% of Mortality Table		<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	2,50% pada usia 20 tahun, menurun secara linier sampai 0% pada usia 45 tahun dan 1,00% pada usia 46-54 tahun/ 2.50% at age 20, decreasing linearly to 0% at age 45 and 1.00% at age 46-54		<i>Resignation rate</i>
Tanggal penilaian terakhir	12 Januari/January 12, 2015	15 Januari/January 15, 2014	<i>Date of the latest appraisal</i>
Nama aktuaris independen	PT Dayamandiri Dharmakonsilindo		<i>Name of independent actuary</i>
Frekuensi penilaian	setiap tiga bulan/quarterly		<i>Frequency of appraisal</i>
Administrator program	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan/and Dana Pensiun Kaltim Prima Coal		<i>Plan administrators</i>
<u>PT Arutmin Indonesia</u>			<u>PT Arutmin Indonesia</u>
Tingkat diskonto	8,29%	8,80%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	8,29%	8,80%	<i>Salary growth rate</i>
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI '11)/ <i>Indonesian Mortality Table 2011 (TMI '11)</i>		<i>Mortality rate</i>
Umur pensiun normal	55 tahun/55 years old		<i>Normal retirement age</i>
Tingkat kemungkinan cacat	10,00% dari Tabel Mortalitas/ 10.00% of Mortality Table		<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5,00% pada usia 20 tahun, menurun secara linier sampai 1,00% pada usia 45 tahun dan 1,00% pada usia 46-54 tahun/ 5.00% at age 20, decreasing linearly to 1.00% at age 45 years and 1.00% at age 46-54		<i>Resignation rate</i>
Tanggal penilaian terakhir	8 Januari/January 8, 2015	13 Januari/January 13, 2014	<i>Date of the latest appraisal</i>
Nama aktuaris independen	PT Dayamandiri Dharmakonsilindo		<i>Name of independent actuary</i>
Frekuensi penilaian	setiap tiga bulan/quarterly		<i>Frequency of appraisal</i>
Administrator program	nihil/nil		<i>Plan administrator</i>
<u>PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT Dairi Prima Mineral, PT Gorontalo Minerals dan PT Citra Palu Minerals</u>			<u>PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT Dairi Prima Mineral, PT Gorontalo Minerals and PT Citra Palu Minerals</u>
Tingkat diskonto	8,00%	9,00%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	<i>Salary growth rate</i>
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI '11)/ <i>Indonesian Mortality Table 2011 (TMI '11)</i>		<i>Mortality rate</i>

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**29. LIABILITAS IMBALAN PASTI PASCAKERJA
(Lanjutan)**

**29. POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES
(Continued)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Umur pensiun normal	56 tahun/56 years old		Normal retirement age
Tingkat kemungkinan cacat	10,00% dari Tabel Mortalitas/ 10.00% from Mortality Table		Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10,00% sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linier sampai 0% pada usia 52 tahun/ 10.00% up to ages 30, then decreasing linearly to 0% at age 52		Resignation rate
Tanggal penilaian terakhir	23 Maret/March 23, 2015	14 Maret/March 14, 2014	Date of the latest appraisal
Nama aktuaris independen	PT Sentra Jasa Aktuaria		Name of independent actuary
Frekuensi penilaian	setiap tahun/annually		Frequency of appraisal
Administrator program	nihil/nil		Plan administrator

Analisis liabilitas imbalan pasti pascakerja dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Analyses of the post-employment benefit liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	82.963.680	88.793.761	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(37.353.850)	(39.803.677)	Fair value of plan assets
Status yang tidak didanai	45.609.830	48.990.084	Unfunded status
Kerugian aktuarial belum diakui	(11.429.289)	(11.647.779)	Unrecognized actuarial losses
Beban jasa lalu yang belum diakui - yang belum menjadi hak	(3.087.229)	(4.345.241)	Unrecognized past service cost-non-vested benefits
Liabilitas Imbalan Pascakerja - Neto	<u>31.093.312</u>	<u>32.997.064</u>	Post-employment Benefit Liabilities - Net

Mutasi liabilitas imbalan pasti pascakerja adalah sebagai berikut:

Movements of the post-employment benefit liabilities were as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Saldo awal	32.997.064	34.989.405	Beginning balance
Provisi pada tahun berjalan	10.792.182	13.512.392	Provision during the year
Kontribusi pekerja	(4.720.065)	(5.917.263)	Employer contribution
Realisasi pembayaran imbalan	(2.526.017)	(1.957.794)	Actual benefits payment
Selisih kurs	(572.427)	(7.629.676)	Effect of foreign exchange
Penyesuaian	(4.877.425)	-	Adjustment
Saldo Akhir	<u>31.093.312</u>	<u>32.997.064</u>	Ending Balance

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, liabilitas imbalan pasti pascakerja PT Kutai Bara Nusantara (dahulu PT Fajar Bumi Sakti), Entitas Anak, diklasifikasikan sebagai "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

As of December 31, 2014 and 2013, post-employment benefits liability of PT Kutai Bara Nusantara (formerly PT Fajar Bumi Sakti), a Subsidiary, was reclassified to "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**29. LIABILITAS IMBALAN PASTI PASCAKERJA
(Lanjutan)**

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	88.793.761	118.467.491	<i>Present value of defined benefit obligation at beginning of year</i>
Biaya jasa kini	6.008.371	8.395.797	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	7.721.497	7.368.701	<i>Interest cost</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	4.348.175	(23.559.693)	<i>Actuarial losses (gains)</i>
Imbalan yang dibayar	(2.526.017)	(1.957.794)	<i>Benefits paid</i>
Selisih kurs	(2.927.927)	(19.920.741)	<i>Effect of foreign exchange</i>
Penyesuaian	(18.454.180)	-	<i>Adjustment</i>
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Pada Akhir Tahun	<u>82.963.680</u>	<u>88.793.761</u>	<i>Present Value of Defined Benefit Obligation at End of Year</i>

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Nilai wajar aset program pada awal tahun	39.803.677	46.054.535	<i>Fair value of plan assets at beginning of year</i>
Kontribusi pekerja	4.720.065	5.917.263	<i>Employer contributions</i>
Hasil yang diharapkan dari aset program	3.698.910	3.354.993	<i>Expected return on plan assets</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	568.453	(4.548.610)	<i>Actuarial gains (losses)</i>
Imbalan yang dibayar	(969.200)	(1.156.891)	<i>Benefits paid</i>
Selisih kurs	(1.294.915)	(9.817.613)	<i>Effect of foreign exchange</i>
Penyesuaian	(9.173.140)	-	<i>Adjustment</i>
Nilai Wajar Aset Program Pada Akhir Tahun	<u>37.353.850</u>	<u>39.803.677</u>	<i>Fair Value of Plan Assets at End of Year</i>

Komposisi utama dari aset program dalam persentase dari total aset program sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Obligasi pemerintah	68,17%	67,07%	<i>Government bonds</i>
Efek pemerintah	19,86%	23,98%	<i>Government securities</i>
Deposito <i>on-call</i>	4,12%	0,48%	<i>On-call deposits</i>
Reksadana	3,15%	3,10%	<i>Mutual fund</i>
Deposito berjangka	2,67%	3,81%	<i>Term deposits</i>
Saham Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	2,03%	1,56%	<i>Indonesian shares listed in Indonesia Stock Exchange</i>
Total	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<i>Total</i>

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN PASTI PASCAKERJA
(Lanjutan)

Kelompok Usaha mengharapkan kontribusi sebesar USD4,12 juta untuk imbalan pensiun pasti untuk tahun 2015.

Jumlah yang diakui dalam laba atau rugi sehubungan dengan imbalan pasti pascakerja adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Beban jasa kini	6.008.371	8.395.797	Current service cost
Beban bunga	7.721.497	7.368.701	Interest cost
Hasil yang diharapkan atas aset program	(3.698.910)	(3.354.993)	Expected return on plan assets
Amortisasi atas beban jasa lalu yang belum menjadi hak	245.039	395.436	Amortization of past service cost-vested
Efek kurtailmen atau penyelesaian	-	(1.022.937)	Effect of any curtailment or settlement
Pembebanan atas beban jasa lalu	65.031	261.504	Recognition of past service cost
Kerugian aktuarial neto yang diakui	<u>451.154</u>	<u>1.468.884</u>	Net actuarial loss recognized
Beban Imbalan Pascakerja - Neto	<u>10.792.182</u>	<u>13.512.392</u>	Post-employment Benefit Expense - Net
Hasil Aktual dari Aset Program	<u>4.267.363</u>	<u>(553.766)</u>	Actual Return on Plan Assets

Perbandingan nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan penyesuaian yang timbul (akibat perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya dan apa yang sebenarnya terjadi) selama tahun berjalan dan selama empat (4) tahun adalah sebagai berikut:

Comparison of the present value of defined benefit obligation, the fair value of plan assets and the experience adjustments (the effects of differences between the previous actuarial assumptions and what has actually occurred) during the current year and over the last four (4) years was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	82.963.680	88.793.761	118.467.491	101.101.440	68.343.642	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(37.353.850)	(39.803.677)	(46.054.535)	(35.234.380)	(27.481.666)	Fair value of plan assets
Defisit pada program	<u>45.609.830</u>	<u>48.990.084</u>	<u>72.412.956</u>	<u>65.867.060</u>	<u>40.861.976</u>	Deficit in the plan
Penyesuaian atas liabilitas program	(364.194)	(2.216.429)	(3.888.937)	2.974.365	(2.469.837)	Experience adjustments arising on plan liabilities
Penyesuaian atas aset program	<u>568.453</u>	<u>(3.908.759)</u>	<u>5.760.217</u>	<u>432.459</u>	<u>325.140</u>	Experience adjustments arising on plan assets

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

30. LONG-TERM LOANS

This account consists of:

2014						
Catatan/ Notes	Pokok/ Principal	Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Financing cost	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost	Premi Penebusan yang Masih Harus Dibayar/ Accrued Redemption Premium	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi Ditambah Premi Penebusan yang Masih Harus Dibayar/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost Plus Accrued Redemption Premium	
						Third parties
						<u>US Dollar</u>
Pihak ketiga						
<u>Dolar AS</u>						
Fasilitas Country Forest Limited 2009	30a	1.062.044.361	-	1.062.044.361	-	1.062.044.361
Surat Beharga Begaransi Senior II	30b	700.000.000	-	700.000.000	-	700.000.000
Fasilitas China Development Bank	30k	550.150.527	-	550.150.527	-	550.150.527
Fasilitas Credit Suisse 2010 - 1	30g	405.574.053	-	405.574.053	-	405.574.053
Surat Beharga Begaransi Senior	30c	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000
Fasilitas Axis Bank Limited 2011	30d	135.000.000	-	135.000.000	-	135.000.000
Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2	30e	117.500.000	-	117.500.000	-	117.500.000
Fasilitas Credit Suisse 2014	30p	114.310.344	-	114.310.344	-	114.310.344
Fasilitas Raiffeisen Bank International	30o	80.689.655	-	80.689.655	-	80.689.655
Fasilitas UBS AG 2012 - 1	30m	62.505.000	-	62.505.000	-	62.505.000
Fasilitas Deutsche Bank 2011	30i	54.000.000	-	54.000.000	-	54.000.000
						<u>Rupiah</u>
Fasilitas Bank Muallamat	30l	525.617	-	525.617	-	525.617
Fasilitas Bank Bukopin	30j	310.695	-	310.695	-	310.695
Total		3.582.610.252	-	3.582.610.252	-	3.582.610.252
Dikurangi:						Less:
Bagian jangka panjang		191.768	-	191.768	-	191.768
Bagian Jangka Pendek		3.582.418.484	-	3.582.418.484	-	3.582.418.484
						Non-current portion
						Current Portion

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

		2013					
	Catatan/ Notes	Pokok/ Principal	Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Financing cost	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost	Premi Penebusan yang Masih Harus Dibayar/ Accrued Redemption Premium	Saldo Pinjaman setelah Dikurangi Biaya Keuangan yang Belum Diamortisasi Ditambah Premi Penebusan yang Masih Harus Dibayar/ Loan Balance, Net of Unamortized Financing Cost Plus Accrued Redemption Premium	
Pihak ketiga							Third parties
<u>Dolar AS</u>							<u>US Dollar</u>
Fasilitas Country Forest Limited 2009	30a	1.300.000.000	(9.224.492)	1.290.775.508	434.852.158	1.725.627.666	Country Forest Limited Facility 2009
Surat Beharga							Guaranteed Senior Secured Note II
Begaransi Senior II	30b	700.000.000	(15.718.723)	684.281.277	-	684.281.277	China Development Bank Facility
Fasilitas China Development Bank	30k	600.000.000	(1.574.835)	598.425.165	-	598.425.165	Credit Suisse Facility
Fasilitas Credit Suisse '2010 - 1	30g	333.031.787	-	333.031.787	-	333.031.787	2010 - 1
Surat Beharga							Guaranteed Senior Secured Notes
Begaransi Senior	30c	300.000.000	(2.610.241)	297.389.759	-	297.389.759	Axis Bank Limited Facility 2011
Fasilitas Axis Bank Limited 2011	30d	145.000.000	(5.185.346)	139.814.654	-	139.814.654	Credit Suisse Facility
Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2	30e	125.000.000	-	125.000.000	-	125.000.000	2010 - 2
Fasilitas UBS AG '2012 - 1	30m	62.505.000	-	62.505.000	-	62.505.000	UBS AG Facility 2012 - 1
Fasilitas Deutsche Bank '2011	30i	60.000.000	(266.720)	59.733.280	-	59.733.280	Deutsche Bank 2011 Facility
Fasilitas Pinjaman Nomura	30h	3.333.559	-	3.333.559	-	3.333.559	Nomura Loan Facility
<u>Rupiah</u>							<u>Rupiah</u>
Fasilitas Bank Muallamat	30l	886.781	-	886.781	-	886.781	Bank Muallamat Facility
Fasilitas Bank Bukopin	30j	485.433	-	485.433	-	485.433	Bank Bukopin Facility
Total		3.630.242.560	(34.580.357)	3.595.662.203	434.852.158	4.030.514.361	Total
Dikurangi:							Less:
Bagian jangka pendek		1.576.842.671	(13.317.178)	1.563.525.493	434.852.158	1.998.377.651	Current portion
Bagian Jangka Panjang		2.053.399.889	(21.263.179)	2.032.136.710	-	2.032.136.710	Non-current Portion

Rincian pembayaran yang dilakukan pada tahun berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

The details of repayments made during the year for each loan facility were as follows:

	2014	2013	
Pihak ketiga			
<u>Dolar AS</u>			
Fasilitas Country Forest Limited 2009	785.386.994	-	Country Forest Limited Facility 2009
Fasilitas China Development Bank	49.849.473	-	China Development Bank Facility
Fasilitas Axis Bank Limited 2011	10.000.000	30.000.000	Axis Bank Limited Facility 2011

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2	7.500.000	25.000.000	Credit Suisse Facility 2010 - 2
Fasilitas Deutsche Bank 2011	6.000.000	72.000.000	Deutsche Bank 2011 Facility
Fasilitas Pinjaman Nomura	3.333.559	11.118.554	Nomura Loan Facility
Fasilitas UBS AG 2012 - 1	-	12.495.000	UBS AG Facility 2012 - 1
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Fasilitas Bank Muallamat	360.765	364.051	Bank Muallamat Facility
Fasilitas Bank Bukopin	172.999	175.001	Bank Bukopin Facility
Total	<u>862.603.790</u>	<u>151.152.606</u>	Total

a. Fasilitas Country Forest Limited 2009

a. Country Forest Limited Facility 2009

Pada tanggal 18 September 2009, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, PT Sitrade Coal (Sitrade), Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) dan Forerunner International Pte. Ltd. (Forerunner) (sebagai "Original Subsidiary Guarantors"), PT Samuel Sekuritas Indonesia (sebagai "Arranger"), The Bank of New York Mellon (sebagai "Administrative dan Security Agent") dan Country Forest Limited (sebagai "Pemilik Dana"), entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh China Investment Corporation (CIC), menandatangani Perjanjian Pinjaman Berjangka Senior yang Dijamin ("Pinjaman CFL") dimana Country Forest Limited setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar USD1,9 miliar yang terdiri dari:

On September 18, 2009, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, PT Sitrade Coal (Sitrade), Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) and Forerunner International Pte. Ltd. (Forerunner) (the "Original Subsidiary Guarantors"), PT Samuel Sekuritas Indonesia (the "Arranger"), The Bank of New York Mellon (the "Administrative and Security Agent") and Country Forest Limited (the "Original Lender"), a wholly-owned subsidiary of China Investment Corporation (CIC), entered into a Senior Secured Term Loan Agreement ("CFL Loan") wherein Country Forest Limited agreed to provide to the Company term loan facilities amounting to USD1.9 billion that consist of:

- i. Fasilitas *Commitment A* sebesar USD600 juta yang akan jatuh tempo pada tahun ke-4 sejak tanggal penarikan pinjaman ini;
- ii. Fasilitas *Commitment B* sebesar USD600 juta yang akan jatuh tempo pada tahun ke-5 sejak tanggal penarikan pinjaman ini; dan
- iii. Fasilitas *Commitment C* sebesar USD700 juta yang akan jatuh tempo pada tahun ke-6 sejak tanggal penarikan pinjaman ini.

- i. Facility A Commitment amounting to USD600 million that will mature on the 4th year from the loan drawdown date;
- ii. Facility B Commitment amounting to USD600 million that will mature on the 5th year from the loan drawdown date; and
- iii. Facility C Commitment amounting to USD700 million that will mature on the 6th year from the loan drawdown date.

Pada tanggal jatuh tempo setiap fasilitas pinjaman atau tanggal pembayaran lainnya, Perusahaan harus melunasi (i) pokok kredit terutang beserta bunga yang masih harus dibayar, jika ada, (ii) premi yang berlaku, yang jumlahnya dihitung pada tanggal pembayaran kembali untuk setiap masing-masing pinjaman yang terkait, dengan 5% sebagai pilihan pertama untuk tanggal pembayaran kembali atas pinjaman terkait, berkurang berdasarkan metode garis lurus hingga nihil pada tanggal jatuh tempo, (iii) jumlah terutang lainnya berdasarkan pinjaman terkait, dan (iv) jumlah keseluruhan, yaitu jumlah yang memberikan kepada pemberi pinjaman *internal rate of return* sebesar 19% secara keseluruhan untuk pinjaman tersebut.

On the maturity date of each of the facilities or other repayment date, the Company shall pay (i) the outstanding principal amount together with the unpaid accrued interest if any, (ii) any applicable premium, which amount is calculated at the repayment date of each relevant facility, at 5% as of the first optional repayment date of the relevant facility, decreasing on a straight line basis to zero at the applicable maturity date for that facility, (iii) other amounts payable under the relevant facility, and (iv) a make-whole amount, which is the amount that provides the lender with an overall *internal rate of return* of 19% on the relevant facility.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Dana yang diperoleh digunakan untuk membayar saldo utang yang timbul dari akuisisi tidak langsung atas kepemilikan saham di PT Darma Henwa Tbk, PT Fajar Bumi Sakti (saat ini PT Kutai Bara Nusantara) dan PT Pendopo Energi Batubara, pembayaran utang-utang Kelompok Usaha, dan sisa pinjaman untuk modal kerja dan keperluan operasional umum perusahaan.

Bunga pinjaman dibayar bulanan, dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 5 November 2009, dan suku bunga 12% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan (*the "Common Security"*) yang berasal dari dokumen-dokumen berikut (*"Common Security Documents"*) diantaranya termasuk:

- penyerahan (*assignment*) hak penerimaan Perusahaan berdasarkan *Cash Distribution Agreement (CDA)*;
- pembebanan atas rekening penerimaan Dolar Amerika Serikat;
- jaminan atas piutang dalam mata uang Rupiah Indonesia;
- surat kuasa untuk menarik dana;
- jaminan atas saham-saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin), IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), PT IndoCoal Kalsel Resources, PT IndoCoal Kaltim Resources dan *Original Guarantors* (jaminan saham dan Pinjaman CFL *Restricted Subsidiaries*) milik Perusahaan dan *Original Subsidiary Guarantors*; dan
- penyerahan (*assignment*) hak dari Perusahaan dan Pinjaman CFL *Restricted Subsidiaries* untuk menerima pembayaran berdasarkan pinjaman antar-perusahaan diantara mereka (sebagai pemberi pinjaman) dan Entitas Anak, selain Entitas Anak keuangan (sebagai Peminjam).

Fasilitas pinjaman meliputi beberapa pembatasan terhadap Kelompok Usaha untuk bertindak, termasuk di dalamnya:

- i. Perusahaan tidak mengizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau Arutmin berdasarkan PKP2B;

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

The proceeds of the loan were used to pay the remaining balance of consideration for the acquisition of indirect shareholdings in PT Darma Henwa Tbk, PT Fajar Bumi Sakti (currently PT Kutai Bara Nusantara) and PT Pendopo Energi Batubara, repayment of all of the existing indebtedness of the Group, and the remaining balance for working capital and general corporate purposes.

The interest on the loan is payable monthly, with the first payment commencing on November 5, 2009, and accrues at the rate of 12% per annum.

This loan facility was secured by the security interests ("Common Security") created under the following documents ("Common Security Documents") which include among others:

- *the assignment of rights of the Company to receive payments under the Cash Distribution Agreement (CDA);*
- *the charge over United States Dollar proceeds accounts;*
- *the pledge over the receivables under the Indonesian Rupiah accounts;*
- *the power of attorney to withdraw funds;*
- *the share pledges over the shares of PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin), IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), PT IndoCoal Kalsel Resources, PT IndoCoal Kaltim Resources and the Original Guarantors (the "Share Pledges and CFL Loan Restricted Subsidiaries") by the Company and each of the Original Subsidiary Guarantors; and*
- *the assignment of rights of the Company and each CFL Loan Restricted Subsidiaries to receive any payments under the inter-company loans between them (as lenders) and the Subsidiaries of the Company, other than a finance Subsidiary (as Borrowers).*

This loan facility contains restrictions on the ability of the Group to take certain actions, including the following:

- i. *The Company will not permit either KPC or Arutmin to sell, transfer or otherwise dispose of, directly or indirectly any of KPC's or Arutmin's rights or interests under its CCoWs;*

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

- ii. Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL *Restricted Group* yang diizinkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu, yang meliputi diantaranya pengumuman atau pembayaran dividen, pembelian, penebusan, pelepasan atau penebusan saham Perusahaan atau Pinjaman CFL *Restricted Subsidiaries*, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah dipenuhi;
- iii. Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL *Restricted Group* yang diizinkan untuk menerbitkan atau menjual saham Pinjaman CFL *Restricted Subsidiaries*, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah dipenuhi;
- iv. Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL *Restricted Group* yang diizinkan untuk secara langsung atau tidak langsung, mengadakan, memperbaharui atau memperpanjang transaksi atau perjanjian dengan *beneficial holder* yang memiliki 10% atau lebih saham Perusahaan atau afiliasinya, kecuali dalam kondisi tertentu atau rasio keuangan telah terpenuhi;
- v. Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL *Restricted Group* yang diizinkan untuk memberikan gadai atas *Common Security*;
- vi. Perusahaan tidak dapat melakukan konsolidasi atau merger, menjual, menyerahkan, mengalihkan, menyewakan atau bahkan melepaskan semua atau secara substansial asetnya, kepada pihak lain, kecuali persyaratan tertentu dipenuhi;
- vii. Tidak ada anggota dari Pinjaman CFL *Restricted Group* yang diizinkan untuk mengadakan utang kecuali Perusahaan dapat memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu.
- viii. KPC, Arutmin dan ICRL tidak diizinkan untuk mengadakan utang kecuali Entitas Anak ini dapat memenuhi beberapa rasio keuangan tertentu.

Selanjutnya, fasilitas pinjaman meliputi ketentuan yang mengizinkan Perusahaan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ke Entitas Anak keuangan untuk mencapai efisiensi pajak, mengacu pada pembaharuan dari fasilitas pinjaman yang dapat memenuhi harapan semua pihak. Proses pengalihan diselesaikan pada tanggal 5 November 2009, dimana hak dan kewajiban Perusahaan sebagai Peminjam dialihkan ke Entitas Anaknya di Belanda yang dimiliki secara penuh, Bumi Netherlands B.V. (Bumi Netherlands). Perusahaan, bersama-sama dengan *Original Subsidiary Guarantors*, terus menjamin kewajiban Bumi Netherlands B.V. berdasarkan Pinjaman CFL yang dialihkan tersebut.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

- ii. No member of the CFL Loan *Restricted Group* is permitted to make restricted payments, which include among others the declaration or payment of dividends, purchase, redemption, retirement or redemption of any shares of stocks of the Company or its CFL Loan *Restricted Subsidiaries*, unless certain circumstances or financial ratios were satisfied;
- iii. No member of the CFL Loan *Restricted Group* is permitted to issue or sell any shares of capital stocks of any CFL Loan *Restricted Subsidiaries*, unless certain circumstances or financial ratios were satisfied;
- iv. No member of the CFL Loan *Restricted Group* is permitted to directly or indirectly, enter into, renew or extend any transaction or arrangement with any beneficial holder of 10% or more of any class of capital stocks the Company or any of its affiliates, unless certain circumstances or financial ratios were satisfied;
- v. No member of the CFL Loan *Restricted Group* is permitted to create any liens over the *Common Security*;
- vi. The Company shall not consolidate or merge with, sell, convey, transfer, lease or otherwise dispose of all or substantially all of its assets, to other person, unless certain requirements are complied with;
- vii. No member of the CFL Loan *Restricted Group* is permitted to incur indebtedness unless the Company is able to satisfy certain financial ratios;
- viii. KPC, Arutmin and ICRL are not permitted to incur indebtedness unless these *Subsidiaries* are able to satisfy certain financial ratios.

Moreover, the loan facility contains a provision which allows the Company to transfer its rights and obligations under the loan to finance *Subsidiaries* to achieve greater tax efficiency, subject to amendments to the loan facility that are satisfactory to the parties. The transfer process was completed on November 5, 2009, whereupon the rights and obligations of the Company as Borrower were assumed by its wholly-owned Dutch *Subsidiary*, Bumi Netherlands B.V. (Bumi Netherlands). The Company, together with the *Original Subsidiary Guarantors*, continue to guarantee the obligations of Bumi Netherlands B.V. under the transferred CFL Loan.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Berdasarkan fasilitas pinjaman ini, Perusahaan, *Original Subsidiary Guarantors*, The Bank of New York Mellon dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, menandatangani sebuah *Intercreditor Agreement* tertanggal 1 Oktober 2009.

Perjanjian kredit ini kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 24 September 2009 dan diubah lebih lanjut pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan sebuah akta perubahan.

Pada tanggal 8 November 2011, Perusahaan telah melunasi Fasilitas *Commitment A* dari Pinjaman CFL. Perusahaan menggunakan hak opsi pembayaran di muka sebagai pelunasan Fasilitas *Commitment A*, yang jatuh tempo awalnya pada tanggal 30 September 2013.

Saldo dari saldo pinjaman, setelah dikurangi biaya keuangan yang belum diamortisasi, dan premi penebusan yang masih harus dibayar dari Pinjaman CFL disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan, CFL, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), KCL, SHL dan Bumi Netherlands menandatangani *Master Deed* yang kemudian diamandemen dan disajikan kembali pada tanggal 28 Januari 2014, untuk menyelesaikan sebagian dari sisa pokok pinjaman dengan CFL sebesar USD1,3 miliar (Catatan 49ff).

Pinjaman CFL dalam kondisi *default* (wanprestasi) berdasarkan ketentuan *cross default* seperti yang disebutkan dalam perjanjian karena gagal bayar oleh Kelompok Usaha atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lainnya saat jatuh tempo.

b. Surat Beharga Bergaransi Senior II

Pada tanggal 30 September 2010, Perusahaan melalui Bumi Investment Pte. Ltd. ("Penerbit"), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menerbitkan 10,75% Surat Beharga Bergaransi Senior senilai USD700 juta yang jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2017 ("Surat Utang") dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, Deutsche Bank dan JPMorgan (S.E.A.) Limited sebagai *Joint Lead Manager*. Surat Utang dijamin oleh Kelompok Usaha, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner.

Surat Utang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2017 dan dikenakan tingkat suku bunga 10,75% per tahun, yang akan terutang setiap enam (6) bulan.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

Pursuant to this loan facility, the Company, the Original Subsidiary Guarantors, The Bank of New York Mellon and Standard Chartered Bank, Jakarta branch, entered into an Intercreditor Agreement dated October 1, 2009.

The loan agreement was subsequently amended and restated on September 24, 2009 and further amended on October 28, 2009 under a deed of amendment.

On November 8, 2011, the Company repaid the Facility A Commitment of CFL Loan. The Company used its prepayment option right to early repay the Facility A Commitment, which originally will be due on September 30, 2013.

The balances of loan balance, net of unamortized financing cost, and accrued redemption premium of CFL Loan are presented separately in the consolidated statements of financial position.

On October 8, 2013, the Company, CFL, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), KCL, SHL, and Bumi Netherlands entered into a Master Deed, which was subsequently amended and restated on January 28, 2014, in order to settle a portion of the remaining USD1.3 billion outstanding principal amount of the CFL Loan (Notes 49ff).

The CFL loan is in default under the cross default provision of the agreement due to non-payment by the Group of its outstanding principal and/or interest amounts on due dates on other loans.

b. Guaranteed Senior Secured Notes II

On September 30, 2010, the Company, through Bumi Investment Pte. Ltd. ("Issuer"), a wholly-owned Subsidiary, issued USD700 million 10.75% Guaranteed Senior Secured Notes due on October 6, 2017 (the "Notes") with Credit Suisse Limited, Singapore branch, Deutsche Bank and JP Morgan (S.E.A.) Limited acting as the Joint Lead Managers. The Notes were guaranteed by the Group, including Sitrade, KCL, SHL and Forerunner.

The Notes, maturing on October 6, 2017, bear an interest of 10.75% per annum, which is payable semi-annually.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 6 Oktober 2014, secara keseluruhan atau sebagian, pada harga penebusan yang setara dengan pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 6 Oktober 2014 dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian pada harga penebusan setara dengan 105,375%, 102,6875% dan 100% ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas (12) bulan masing-masing dimulai pada tanggal 6 Oktober 2014, 6 Oktober 2015 dan 6 Oktober 2016 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus 35% dari Surat Utang sebelum tanggal 6 Oktober 2014 dengan harga penebusan 110,75% dari pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan dana dari penjualan satu atau lebih penawaran saham Penerbit atau Perusahaan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek JPMorgan Chase, Credit Suisse dan Bright Ventures serta untuk membayar penuh utang jangka panjang Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, pembelian kembali sebagian dari 5% Obligasi Konversi Berjamin II senilai USD300 juta dan untuk membayar kembali utang lainnya.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan tidak diizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau Arutmin berdasarkan PKP2B;
2. Perusahaan tidak diizinkan untuk mengganti bidang usaha utama; dan
3. Perusahaan dan entitas anak penjamin harus tetap menjaga kelangsungan usahanya.

Surat Utang dijamin dengan *Common Security Documents* (Catatan 30a). Persyaratan dari Surat Utang meliputi pembatasan yang sama kepada Perusahaan, Bumi Investments dan beberapa Entitas Anak seperti pembatasan yang dinyatakan dalam Surat Beharga Bergaransi Senior senilai USD300 juta.

Surat Utang dalam kondisi *default* (wanprestasi) berdasarkan ketentuan *cross default* seperti yang disebutkan dalam perjanjian karena gagal bayar oleh Kelompok Usaha atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lainnya saat jatuh tempo. Pada tanggal 10 November 2014, Bumi Investment Pte. Ltd. menerima surat dari Wali Amanat mengenai gagal bayar pembayaran bunga dan *Parent Guarantor Default*.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

The Issuer may at its option redeem the Notes prior to October 6, 2014, in whole or in part, at a redemption price equal to the principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, plus a premium. Redemptions made on or after October 6, 2014 in whole or in part will be at the redemption prices equal to 105.375%, 102.6875% and 100% plus accrued and unpaid interest for the 12-month period beginning on October 6, 2014, October 6, 2015 and October 6, 2016 and thereafter, respectively.

Moreover, the Issuer may at its option redeem 35% of the Notes before October 6, 2014 at a redemption price of 110.75% of the principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, with the proceeds from sales of one or more equity offerings of the Issuer or the Company.

The proceeds of the Notes will be used to repay in full the outstanding balances of short-term loans from JPMorgan Chase, Credit Suisse and Bright Ventures as well as to repay in full the long-term loan from Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, partial repurchase of the 5% USD300 million Guaranteed Convertible Bonds II and repayment of other indebtedness.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is not permitted either KPC and Arutmin to sell, transfer or dispose of, either directly or indirectly, the rights or interests of KPC or Arutmin based on CCoW;
2. The Company is not allowed to change the main business types; and
3. The Company and its subsidiary guarantors must maintain its going concern

The Notes were secured by the *Common Security Documents* (Note 30a). The terms of the Notes contain restrictions on the ability of the Company, Bumi Investments and certain Subsidiaries of the Company by the same restrictions as stated in the USD300 million Guaranteed Senior Secured Notes.

The Notes is in default under the cross default provision of the agreement due to non-payment by the Group of its outstanding principal and/or interest amounts on due dates on other loans. On November 10, 2014, Bumi Investment Pte. Ltd. received a letter from the Trustee in connection with payment default on interest and the Parent Guarantor Default.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

c. Surat Beharga Bergaransi Senior

Pada tanggal 13 November 2009, Perusahaan (sebagai "Penjamin"), melalui Bumi Capital Pte. Ltd. (sebagai "Penerbit"), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menerbitkan 12% Surat Beharga Bergaransi Senior, senilai USD300 juta yang jatuh tempo pada tanggal 10 November 2016 ("Surat Utang") dengan Credit Suisse Limited, cabang Singapura, dan Deutsche Bank sebagai Manajer. Surat Utang dijamin oleh Entitas Anak, diantaranya Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Subsidiary Guarantors").

Surat Utang, yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2016, dikenakan tingkat suku bunga 12% per tahun yang akan terutang setiap enam (6) bulan.

Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus Surat Utang sebelum tanggal 10 November 2013, secara keseluruhan dan bukan hanya sebagian, pada harga penebusan yang setara dengan pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, ditambah dengan premi. Penebusan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 13 November 2013 dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian pada harga penebusan setara dengan 106%, 103% dan 100% ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar untuk periode dua belas (12) bulan masing-masing dimulai pada tanggal 10 November 2013, 10 November 2014 dan 10 November 2015.

Selanjutnya, Penerbit dengan hak opsinya dapat menebus 35% dari Surat Utang sebelum tanggal 13 November 2013 dengan harga penebusan 112% dari pokok kredit ditambah dengan bunga terutang dan masih harus dibayar, jika ada, dengan hasil penjualan atas beberapa jenis modal saham Perusahaan.

Dana yang diperoleh dari Surat Utang akan digunakan untuk belanja modal awal dan pengeluaran untuk biaya eksplorasi dan pengembangan milik PT Dairi Prima Mineral, Entitas Anak, investasi dan perolehan mendatang atas perusahaan-perusahaan tambang lainnya, modal kerja dan keperluan operasional.

Surat Utang dijamin dengan:

- penyerahan (*assignment*) hak penerimaan;
- penyerahan (*assignment*) hak pinjaman antar-perusahaan;
- pembebanan atas rekening penerimaan Dolar Amerika Serikat;
- jaminan atas rekening penerimaan Rupiah Indonesia;

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

c. Guaranteed Senior Secured Notes

On November 13, 2009, the Company (the "Guarantor"), through Bumi Capital Pte. Ltd. (the "Issuer"), a wholly-owned Subsidiary, issued USD300 million 12% Guaranteed Senior Secured Notes due on November 10, 2016 (the "Notes") with Credit Suisse Limited, Singapore branch, and Deutsche Bank acting as the Manager. The Notes were guaranteed by the Company's Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Subsidiary Guarantors").

The Notes, maturing on November 10, 2016, bear an interest rate of 12% per annum and are payable semi-annually.

The Issuer may at its option redeem the Notes prior to November 10, 2013, in whole but not in part, at a redemption price equal to the principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, plus a premium. Redemptions made on or after November 13, 2013 may be made in whole or in part at the redemption prices equal to 106%, 103% and 100% plus accrued and unpaid interest for the 12-month period beginning on November 10, 2013, November 10, 2014 and November 10, 2015, respectively.

Moreover, the Issuer may at its option redeem 35% of the Notes before November 13, 2013 at a redemption price of 112% of the principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, with the proceeds from sales of certain kinds of capital stock of the Company.

The proceeds of the Notes will be used for initial capital expenditures and mine exploration and development expenditures of PT Dairi Prima Mineral, a Subsidiary, future acquisitions and investments in mining related companies, working capital and general corporate purposes.

The Notes were secured by:

- *the assignment of rights to proceeds;*
- *the assignment of inter-company loans;*
- *the charge over United States Dollar proceeds accounts;*
- *the pledge over Indonesian Rupiah proceeds accounts;*

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

- surat kuasa untuk menarik dana;
- *subordination deed*; dan
- dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi aset Perusahaan.

Persyaratan atas Surat Utang meliputi pembatasan kepada Perusahaan, Bumi Capital Pte. Ltd. dan beberapa Entitas Anak untuk bertindak, termasuk diantaranya, penambahan utang yang dapat mempengaruhi beberapa rasio keuangan tertentu, melakukan pembayaran-pembayaran terbatas, menerbitkan *preferred stocks*, melakukan gadai, menjual atau pelepasan aset, merger atau konsolidasi, melakukan transaksi jual dan sewa-balik, melakukan transaksi dengan afiliasi dan memulai lini usaha yang baru.

Surat Utang dalam kondisi *default* (wanprestasi) berdasarkan ketentuan *cross default* seperti yang disebutkan dalam perjanjian karena gagal bayar oleh Kelompok Usaha atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lainnya saat jatuh tempo. Pada tanggal 12 November 2014, Bumi Capital Pte. Ltd. menerima surat dari Wali Amanat mengenai gagal bayar pembayaran bunga dan *cross default*.

d. Fasilitas Axis Bank Limited 2011

Pada tanggal 4 Agustus 2011, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), dan Axis Bank Limited, cabang Hong Kong, (sebagai "Pemilik Dana, Arranger, Facility Agent dan Security Agent") mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan fasilitas kredit sebesar USD200 juta.

Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sebagian utang Perusahaan dari satu atau lebih fasilitas yang diberikan oleh *Secured Creditor* (seperti yang telah dinyatakan dalam *Intercreditor Agreement*) dan membayar beban transaksi.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 5,5% per tahun dan akan dilunasi dalam dua puluh (20) angsuran triwulanan. Perusahaan memiliki opsi untuk membayar lebih cepat seluruh atau sebagian pinjaman ini sebelum jatuh tempo, namun dikenakan biaya 2% dari total utang yang dipercepat pembayarannya.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

- *the power of attorney to withdraw funds;*
- *the subordination deed; and*
- *any other document evidencing or security over any assets of the Company.*

The terms of the Notes contain restrictions on the ability of the Company, Bumi Capital Pte. Ltd. and certain Subsidiaries of the Company to take certain actions, which include among others, the incurrence of additional debt which would result in a certain financial ratio, make restrictive payments, issue redeemable and preferred stocks, create liens, sell or otherwise dispose of assets, enter into merger or consolidations, enter into sale and leaseback transactions, enter into transactions of affiliates and enter into new lines of business.

The Notes is in default under the cross default provision of the agreement due to non-payment by the Group of its outstanding principal and/or interest amounts on due dates on other loans. On November 12, 2014, Bumi Capital Pte. Ltd. received a letter from the Trustee in connection with payment default interest and cross default.

d. Axis Bank Limited Facility 2011

On August 4, 2011, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner. (the "Original Guarantors"), and Axis Bank Limited, Hong Kong branch, (the "Original Lender, Arranger, Facility Agent and Security Agent") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lender agreed to provide the Company a credit facility amounting to USD200 million.

The proceeds of the loan facility will be used to repay part of certain financial indebtedness owed by the Company under one or more facilities granted to it by a Secured Creditor (as defined in Intercreditor Agreement) and pay transaction expenses.

The loan is subject to LIBOR plus 5.5% interest rate per annum and payable in twenty (20) quarterly installments. The Company has the option to prepay all or part of the loan prior the initial maturity date subject to prepayment fees of 2% of the loan prepaid.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan tidak diizinkan baik KPC maupun Arutmin untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan, baik langsung maupun tidak langsung hak atau kepentingan KPC atau Arutmin berdasarkan PKP2B; dan
2. Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo masing-masing sejak bulan Maret 2014 dan Oktober 2014.

e. Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2

Pada tanggal 19 Agustus 2010, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), Lembaga Keuangan (sebagai "Pemilik Dana") dan Credit Suisse, cabang Singapura (sebagai "Arranger, Facility Agent dan Security Agent"), menandatangani Perjanjian Kredit dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar USD150 juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 11% per tahun.

Fasilitas pinjaman akan dibayar kembali seluruhnya pada tahun 2013. Namun demikian, pinjaman wajib dilunasi apabila terjadi perubahan pengendalian. Perubahan pengendalian terjadi apabila terdapat seseorang atau sekelompok orang yang bertindak dengan persetujuan (selain dari sekelompok orang yang terdiri hanya dari salah satu atau lebih anggota Kelompok Usaha Bakrie) memperoleh pengendalian atas Perusahaan.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Apabila Perusahaan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka Perusahaan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan;

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is not permitted either KPC and Arutmin to sell, transfer or dispose of, either directly or indirectly, the rights or interests of KPC or Arutmin based on PKP2B; and
2. The Company is not permitted to dispose its interest in (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

The loan is in default due to non-payment by the Company of its outstanding principal installment and interest amounts on due dates since March 2014 and October 2014, respectively.

e. Credit Suisse Facility 2010 - 2

On August 19, 2010, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Guarantors"), Financial Institutions (the "Original Lenders") and Credit Suisse, Singapore branch (the "Arranger, Facility Agent and Security Agent") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lenders agreed to provide to the Company a credit facility amounting to USD150 million. The interest rate of the loan is LIBOR plus 11% per annum.

The loan facility shall be repaid in full upon its maturity in 2013. However, the loan must be mandatorily repaid if a change in control occurs. Change in control occurs if any person or group of persons acting in concert (other than a group of persons consisting solely of any one or more members of the Bakrie Group) gains control of the Company.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is prohibited from amending the articles of association that can provide a material adverse effect without prior notice;
2. If the Company enters into merger or business reconstruction, then the Company shall act as the surviving entity;

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (*Lanjutan*)

3. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan; dan
4. Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

Dana yang diperoleh dari pinjaman hanya dapat digunakan oleh Enercoal Resources Pte. Ltd., Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, untuk penebusan atas obligasi konversi dan pembayaran atas biaya transaksi (Catatan 31).

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama seperti yang tercantum pada Surat Berharga Bergaransi Senior (Catatan 30c).

Pada tanggal 9 Agustus 2013, Perusahaan dan Credit Suisse, cabang Singapura menandatangani *Supplemental Agreement* yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Perjanjian Kredit, dimana fasilitas pinjaman akan dilunasi dalam lima belas (15) angsuran bulanan sejak bulan Oktober 2013 hingga November 2014 dan tingkat suku bunga pinjaman diubah menjadi sebesar LIBOR ditambah 18% per tahun efektif sejak tanggal 7 Agustus 2013.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo masing-masing sejak bulan Februari 2014 dan September 2014.

f. Fasilitas PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2009, PT Fajar Bumi Sakti (saat ini PT Kutai Bara Nusantara), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebagai "Pemilik Dana") sebesar USD4,5 juta. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai pembelian *tug boat ships* dan *tug barge ships*. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman ini dijamin oleh hak fidusia atas aset tersebut.

Pinjaman ini akan diangsur dalam tiga puluh enam (36) kali pembayaran sampai dengan tahun 2012 dengan tarif bunga sebesar 9% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman ini diklasifikasikan sebagai "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

30. LONG-TERM LOANS (*Continued*)

3. The Company must ensure that any cash dividends of each subsidiary are parties to the agreement will be deposited in an account that has been set; and
4. The Company is not permitted to dispose its interest in (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

The proceeds of the loan will be lent to Enercoal Resources Pte. Ltd., a wholly-owned Subsidiary, for the redemption of its convertible bonds and payment of transaction expenses (Note 31).

This facility was secured by the same security instruments as stated in the Guaranteed Senior Secured Notes (Note 30c).

On August 9, 2013, the Company and Credit Suisse, Singapore branch entered into a Supplemental Agreement to amend certain terms in the Credit Agreement, whereby the loan facility shall be repaid in fifteen (15) monthly installments from October 2013 until November 2014 and interest rate of the loan is changed to become LIBOR plus 18% per annum effective August 7, 2013.

The loan is in default due to non-payment by the Company of its outstanding principal installment and interest amounts on due dates since February 2014 and September 2014, respectively.

f. PT Bank CIMB Niaga Tbk Facility

On December 28, 2009, PT Fajar Bumi Sakti (currently PT Kutai Bara Nusantara), a Subsidiary, entered into Credit Agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk (the "Lender") amounting to USD4.5 million. This facility will be used to finance tug boat ships and tug barge ships. Under the terms of the agreement, the loan is guaranteed by the fiduciary rights over these assets.

The loan is payable in thirty-six (36) equal installments until 2012 with a 9% interest rate per annum.

As of December 31, 2014 and 2013, the loan was reclassified to "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (*Lanjutan*)

g. Fasilitas Credit Suisse 2010 - 1

Pada tanggal 23 Maret 2010, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), Entitas Anak (sebagai "Peminjam"), Credit Suisse AG, cabang Singapura (sebagai "Financial Institutions, Pemilik Dana, Arranger, Facility Agent, Security Agent dan Account Bank"), dan Credit Suisse International sebagai bank *hedging*, menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MDB sebesar USD200 juta ("Fasilitas A"), yang akan dibayar sepenuhnya dalam kurun waktu dua puluh empat (24) bulan sejak penarikan dana. Pada tanggal jatuh tempo pinjaman, MDB harus membayar premi penebusan (*Redemption Premium*), yaitu jumlah yang menyediakan kepada pemberi pinjaman dengan *internal rate of return* sebesar 15%. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 7% per tahun dan jatuh tempo setiap triwulan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, pendanaan *debt reserve account* dan pelunasan sebagian pinjaman MDB.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- penjaminan saham-saham MDB atas kepemilikan sahamnya di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), entitas asosiasi, dan surat kuasa untuk menjual saham;
- penyerahan (*assignment*) atau kuasa atas jaminan (yaitu antara lain, hipotek, jaminan, hak gadai, tanggungan); dan
- dokumen lain yang membuktikan atau menyebabkan sekuritisasi atas aset MDB.

Pinjaman ini diatur dengan ketentuan berikut, dengan beberapa pengecualian:

- MDB tidak diperbolehkan membuat atau melakukan penjaminan atas aset-asetnya;
- tidak diperbolehkan menjual aset yang disyaratkan yang mungkin diperoleh oleh afiliasi MDB dalam transaksi terutama untuk membiayai pembelian aset; dan
- tidak diperbolehkan menjual kepemilikan saham pada NNT, membuat perjanjian pinjaman keuangan, mengubah sifat usaha, memberikan pinjaman (kecuali antar pihak berelasi), membayar dividen atau menerbitkan saham kepada siapapun.

Perjanjian kredit ini kemudian diperbaharui pada tanggal 1 April 2010 yang memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada MDB sebesar USD100 juta ("Fasilitas B") sehingga meningkatkan jumlah fasilitas pinjaman dari USD200 juta menjadi USD300 juta.

30. LONG-TERM LOANS (*Continued*)

g. Credit Suisse Facility 2010 - 1

On March 23, 2010, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), a Subsidiary (the "Borrower"), Credit Suisse AG, Singapore branch (the "Financial Institutions, the Original Lenders, Arranger, Facility Agent, Security Agent and Account Bank") and Credit Suisse International as hedging bank, entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lenders agreed to provide to MDB a credit facility amounting to USD200 million ("Facility A"), which is payable in full after twenty-four (24) months following the utilization date. On the maturity date of the loan, MDB shall pay a Redemption Premium, which is the amount that provides the lender with an overall internal rate of return of 15%. The interest rate of the loan is LIBOR plus 7% per annum and is payable every quarter.

The proceeds of the loan will be used for working capital requirements, funding of the debt reserve account and partial repayment of the MDB Loan.

The loan was secured by:

- share pledges by MDB over shares in PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), an associate, and the Power of Attorney to sell the shares;
- the assignment or charge evidencing Security Interests (i.e. mortgage, pledge, lien, assignment, hypothecation, among others); and
- any other document evidencing or creating security over any assets of MDB.

The loan was subject to the following covenants, with few exceptions:

- MDB may not create or allow to exist any security interest over its assets;
- may not dispose of its assets on terms where they may be acquired by MDB's affiliates in transactions entered into primarily to finance the acquisition of the asset; and
- may not dispose of its shareholding in NNT, incur any financial indebtedness, change the nature of its business, provide loans (except for inter-company loans), pay any dividends or issue shares to any person.

The loan agreement was subsequently amended on April 1, 2010 granting MDB an additional loan facility amounting to USD100 million ("Facility B"), which increased the total loan facility from USD200 million to USD300 million.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Fasilitas pinjaman tambahan ini akan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah 7% dan dibayarkan setiap triwulan. Fasilitas B dibayar secara penuh setelah dua puluh empat (24) bulan dari tanggal penggunaan Fasilitas A. Pada tanggal jatuh tempo, MDB akan membayar Premi Penebusan (*Redemption Premium*) kepada Pemberi Pinjaman dengan *rate of return* sebesar 15%.

Pada tanggal 16 September 2011, MDB dan Credit Suisse AG menandatangani perubahan perjanjian pinjaman yang memberikan tambahan fasilitas pinjaman kepada MDB sebesar USD60.000.000 ("Fasilitas C"). Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2013, Credit Suisse telah memberikan persetujuan perpanjangan pinjaman jangka panjang kepada MDB untuk jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal 19 September 2013.

Credit Suisse AG, telah memberikan beberapa kali persetujuan perpanjangan terhadap fasilitas pinjaman ini, perpanjangan terbaru atas fasilitas ini sampai dengan tanggal 3 April 2015. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, proses perpanjangan fasilitas ini masih berlangsung.

Pada tanggal 31 Desember 2014, MDB telah memenuhi ketentuan pinjaman, sebagaimana diatur atau disyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

h. Fasilitas Pinjaman Nomura

Bumi Resources Japan Co. Ltd. (BRJ), Entitas Anak, menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar USD21 juta pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan Nomura International plc (Nomura), sebagai pemberi pinjaman, *facility agent* dan *security agent*, BRMS, Entitas Anak, sebagai penjamin, dan Nomura Singapore Limited sebagai *arranger*. Kewajiban BRJ pada perjanjian pinjaman ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh BRMS.

Dana dari pinjaman ini hanya bisa digunakan untuk pembayaran beban BRMS dalam kaitannya dengan penawaran umum saham perdana, belanja modal dan modal kerja yang dibutuhkan oleh BRMS dan Entitas Anaknya. Suku bunga pinjaman sebesar 8% per tahun. Pinjaman ini diangsur secara triwulan dimulai sejak tanggal 11 Januari 2011 dan akan jatuh tempo dua puluh tujuh (27) bulan setelah penarikan pertama.

Pada tanggal 4 Januari 2012, BRJ menandatangani perubahan perjanjian fasilitas pinjaman dari USD21 juta menjadi USD27 juta.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

The additional loan facility will be subject to an annual interest of LIBOR plus 7% and is payable every quarter. The Facility B is payable in full after twenty-four (24) months from the utilization date of Facility A. On the maturity date, MDB shall pay a Redemption Premium equivalent to an amount which provides the Lenders with an overall rate of return of 15%.

On September 16, 2011, MDB and Credit Suisse AG entered into an amendment agreement granting MDB an additional loan facility amounting to USD60,000,000 ("Facility C"). Furthermore, on September 25, 2013, Credit Suisse has granted the approval for MDB's long-term facility for period of three (3) months since September 19, 2013.

Credit Suisse AG has granted approval to various extension of the facility's maturity date, the latest being, an extension of all the facilities' maturity date until April 3, 2015. As of the completion date of the consolidated financial statements, the process for another extension of the said facility's maturity date is still in process.

As of December 31, 2014, MDB is in compliance with the loan covenants, as regulated or required under the loan agreement.

h. Nomura Loan Facility

Bumi Resources Japan Co. Ltd. (BRJ), a Subsidiary, entered into a USD21 million loan facility agreement on October 18, 2010 with Nomura International plc (Nomura), as lender, facility agent and security agent, BRMS, a Subsidiary, as guarantor, and Nomura Singapore Limited, as arranger. BRJ's obligations under the loan agreement are irrevocably and unconditionally guaranteed by BRMS.

The proceeds of the loan may only be used to pay for the expenses of the BRMS in relation to the initial public offering, for capital expenditures and working capital requirements of the BRMS and its Subsidiaries. The loan accrues interest of 8% annually. The loan is payable in quarterly installments commencing on January 11, 2011 and will mature twenty-seven (27) months after the initial drawdown.

On January 4, 2012, BRJ signed an amendment loan facility agreement to increase the facility from USD21 million to USD27 million.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Fasilitas baru ini terdiri dari *Tranche A* sejumlah USD11,67 juta yang jatuh tempo pada bulan Januari 2013 dan *Tranche B* sejumlah USD15,33 juta yang jatuh tempo pada bulan Januari 2016. Dana dari *Tranche A* hanya dapat digunakan untuk pembayaran sisa pokok fasilitas pinjaman lama sedangkan *Tranche B* digunakan untuk kewajiban keuangan lain selain pembayaran sisa pokok fasilitas pinjaman lama, pembayaran biaya transaksi, pendanaan lain yang diperlukan untuk disimpan dalam *Tax Reserve Account* sehubungan dengan Cadangan Pembayaran Pajak dan kewajiban perpajakan lainnya serta belanja modal dan modal kerja yang dibutuhkan BRMS Kelompok Usaha. Suku bunga pinjaman sebesar 9% pertahun.

Pada tanggal 10 Januari 2014, BRJ telah melunasi seluruh pokok dan bunga fasilitas pinjaman dari Nomura.

i. Fasilitas Deutsche Bank 2011

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL, dan Forerunner (sebagai "*Original Guarantors*"), Deutsche Bank AG, cabang Singapura, dan WestLB AG, cabang Singapura, (sebagai "Pemilik Dana"), Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, (sebagai "*Facility Agent*") dan DB Trustees (Hong Kong) Limited (sebagai "*Security Agent*") menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar USD150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 5% per tahun ditambah LIBOR. Perjanjian pembiayaan ini akan dibayar dengan angsuran bulanan sebanyak dua puluh lima (25) kali sampai dengan bulan November 2014.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Apabila Perusahaan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka Perusahaan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan;
3. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan; dan
4. Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

The new facility consists of *Tranche A* amounting to USD11.67 million which will mature in January 2013 and *Tranche B* amounting to USD15.33 million which will mature in January 2016. The proceeds of *Tranche A* may only be used to repay the outstanding principal of the previous facility, in the case of the *Tranche B* to repay the financial indebtedness outstanding other than the outstanding principal, payment of transaction expenses, funding any amount required to be deposited into the *Tax Reserve Account* in connection with the *Tax Reserve Amount* and any other tax payment due and payable and capital expenses and working capital requirements of BRMS' Group. The loan bears interest 9% per annum

On January 10, 2014, BRJ settled all principal and interest of loan facility from Nomura.

i. Deutsche Bank 2011 Facility

On October 6, 2011, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Guarantors"), Deutsche Bank AG, Singapore branch, and WestLB AG, Singapore branch, (the "Original Lenders"), Deutsche Bank AG, Hong Kong branch, (the "Facility Agent") and DB Trustees (Hong Kong) Limited (the "Security Agent") entered into a Credit Agreement, under which the Original Lenders agreed to provide to the Company credit facility amounting to USD150 million with an interest rate of 5% per annum plus LIBOR. The loan shall be repaid in twenty-five (25) equal monthly installments until November 2014.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is prohibited from amending the articles of association that can provide a material adverse effect without prior notice;
2. If the Company enters into merger or business reconstruction, then the Company shall act as the surviving entity;
3. The Company must ensure that any cash dividends of each subsidiary are parties to the agreement will be deposited in an account that has been set; and
4. The Company is not permitted to dispose its interest in (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (*Lanjutan*)

Perusahaan menerima pemberitahuan *default* pada tanggal 16 April 2014 karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pada tanggal 3 Oktober 2014, Perusahaan juga menerima pemberitahuan *default* terkait gagal bayar pinjaman dan bunga saat jatuh tempo.

j. Fasilitas Bank Bukopin

Pada tanggal 1 Juli 2011, BRMS dan PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dimana Bank Bukopin setuju menyediakan pendanaan sebesar Rp10 miliar (setara dengan USD1,09 juta) untuk pembelian ruang kantor di Bakrie Tower. Pinjaman dikenakan bunga tetap 12% per tahun dan akan dibayar enam puluh (60) kali angsuran bulanan sampai dengan 1 Juli 2016. Ruang kantor digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan ini.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. BRMS tidak akan mengadakan perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain, lembaga keuangan lainnya, orang-orang lain atau apapun namanya sepanjang yang mengenai hak atas jaminan yang diberikan masih menjadi jaminan hutang BRMS kepada Bukopin; dan
2. BRMS dilarang untuk menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bukopin.

k. Fasilitas China Development Bank

Pada tanggal 6 Februari 2012, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), China Development Bank Corporation (sebagai "Pemilik Dana dan Arranger"), Bank of China Limited, cabang Jakarta (sebagai "Facility Agent"), mengadakan perjanjian kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan fasilitas kredit sebesar USD600 juta.

Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang yang dimiliki oleh Perusahaan berdasarkan:

- a) Fasilitas JPMorgan Chase Bank 2011 sebesar USD200 juta;
- b) Fasilitas Barclays Bank 2011 sebesar USD200 juta;
- c) Fasilitas Bank of America 2011 sebesar USD200 juta;

30. LONG-TERM LOANS (*Continued*)

The Company received notification of default on April 16, 2014 due to non-payment of its outstanding principal installment and interest amounts on due dates. Also, on October 3, 2014, the Company received notification of default in connection with non-payment of loan and interest amounts on due dates.

j. Bank Bukopin Facility

On July 1, 2011, BRMS and PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) entered into a Financing Agreement, whereby Bank Bukopin agreed to lend Rp10 billion (equivalent to USD1.09 million) to purchase office space in Bakrie Tower. The loan bears a fixed interest rate of 12% per annum and shall be repaid in sixty (60) equal monthly installments until July 1, 2016. The office space purchased was used as collateral for the loan.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. BRMS will not be entered into loans with other banks, other financial institutions, other people, or whatever the name as long as the rights granted bail collateral fate into BRMS to Bukopin; and
2. BRMS not allowed to lease, transfer/move items that have been pledged without the prior written permission of Bukopin.

k. China Development Bank Facility

On February 6, 2012, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner. (the "Original Guarantors"), China Development Bank Corporation (the "Original Lender and Arranger"), Bank of China Limited, Jakarta branch (the "Facility Agent"), entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lender agreed to provide the Company a credit facility amounting to USD600 million.

The proceeds of the loan facility will be used to repay certain existing financial indebtedness of the Company under:

- a) JPMorgan Chase Bank Facility 2011 of USD200 million;
- b) Barclays Bank Facility 2011 of USD200 million;
- c) Bank of America Facility 2011 of USD200 million;

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (*Lanjutan*)

- d) pembayaran kepada *Arranger* atas biaya *Arrangement* (yang akan dikurangkan dari penerimaan pinjaman tersebut); dan
- e) pembayaran biaya transaksi lainnya.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga LIBOR plus 6,7% per tahun. Pinjaman ini harus dibayar dalam empat (4) cicilan dengan jumlah yang sama setiap enam (6) bulan mulai bulan kalender ke tiga puluh (30) setelah tanggal penggunaan dan harus dibayar penuh dalam jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan setelah tanggal penggunaan.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- penyerahan (*assignment*) hak penerimaan;
- penyerahan (*assignment*) hak pinjaman antar perusahaan;
- pembebanan atas rekening penerimaan Dolar Amerika Serikat;
- jaminan atas rekening penerimaan Rupiah Indonesia;
- surat kuasa untuk menarik dana;
- dokumen penjaminan atas Perusahaan Batubara;
- *subordination deed*; dan
- dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi aset Perusahaan.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Apabila Perusahaan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka Perusahaan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan;
3. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan didepositkan dalam akun yang telah ditetapkan; dan
4. Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran angsuran pokok saat jatuh tempo pada bulan Agustus 2014 dan bunganya saat jatuh tempo pada bulan Desember 2014.

Pada tanggal 30 Desember 2014, fasilitas pinjaman sebesar USD50 juta diserahkan (*assigned*) kepada Castleford Investment Holdings Ltd. (Catatan 22c).

30. LONG-TERM LOANS (*Continued*)

- d) payment to the *Arranger* of the *Arrangement Fee* (which shall be deducted from the proceeds thereof); and
- e) payment of any other transaction expenses.

The loan is subject to LIBOR plus 6.7% interest rate per annum. The loan shall be repaid in four (4) equal semi-annual installments commencing on the thirtieth (30th) calendar month after the utilization date and shall be fully repaid on the forty-eighth (48th) calendar month after the utilization date.

The loan is secured by:

- the assignment of rights to proceeds;
- the assignment of inter-company loans;
- the charge over United States Dollar proceeds accounts;
- the pledge over Indonesian Rupiah proceeds accounts;
- the power of attorney to withdraw funds;
- the Coal Companies security documents;
- the subordination deed; and
- any other document evidencing security over any assets of the Company.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is prohibited from amending the articles of association that can provide a material adverse effect without prior notice;
2. If the Company enters into merger or business reconstruction, then the Company shall act as the surviving entity;
3. The Company must ensure that any cash dividends of each subsidiary are parties to the agreement will be deposited in an account that has been set; and
4. The Company is not permitted to dispose its interest in (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

The loan is in default due to non-payment by the Company of its outstanding principal installment amount due in August 2014 and interest amount due in December 2014.

On December 30, 2014, USD50 million of the loan facility was assigned to Castleford Investment Holdings Ltd. (Note 22c).

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

I. Fasilitas Bank Muamalat

Pada tanggal 11 April 2011, BRMS dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah dengan jangka waktu enam puluh (60) bulan, dimana Bank Muamalat setuju untuk menyediakan pendanaan kepada BRMS sebesar Rp20 miliar (setara dengan USD2,18 juta) untuk pembelian ruang kantor di Bakrie Tower.

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah BRMS sepakat untuk tidak melakukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan konsolidasi atau penggabungan ke dalam suatu badan hukum lain atau menjual saham-sahamnya kepada pihak ketiga;
2. Memindahkan hak atas barang-barang yang sudah dijaminkan kepada Bank Muamalat; dan
3. Mengadakan perubahan pada susunan pengurusan dan perubahan anggaran dasar, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Bank Muamalat.

Pinjaman memiliki jumlah pengembalian sebesar Rp26,69 miliar dan akan dibayar dengan angsuran bulanan sebanyak enam puluh (60) angsuran sampai dengan tanggal 11 April 2016. Ruang kantor yang dibeli digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit.

m. Fasilitas UBS AG 2012 - 1

Pada tanggal 5 Maret 2012, Perusahaan (sebagai Peminjam) dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), UBS AG, cabang London, ("Pemilik Dana") dan UBS AG, cabang Singapura, (sebagai "Arranger, Facility Agent dan Security Agent") menandatangani Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar USD75 juta. Tingkat suku bunga pinjaman adalah sebesar LIBOR ditambah 6% per tahun. Pinjaman ini harus dibayar dalam enam (6) cicilan dengan jumlah yang sama mulai bulan kalender ke dua puluh satu (21) setelah tanggal penggunaan dan dibayar penuh dalam jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan setelah tanggal penggunaan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman jangka pendek sebesar USD75 juta dari UBS AG, cabang Singapura.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama seperti pada Surat Beharga Bergaransi Senior (Catatan 30c).

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

I. Bank Muamalat Facility

On April 11, 2011, BRMS and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) entered into a Financing Facility Al Murabahah for a period of sixty (60) months, whereby Bank Muamalat agreed to loan BRMS Rp20 billion (equivalent to USD2.18 million) to purchase an office space in Bakrie Tower.

The major terms (*negative covenant*) of the facility are BRMS agreed not to do these things, among others, as follows:

1. Enter into a consolidation or merger into any other legal entity or sell their shares to third parties;
2. Transfer the right of collaterals that have been pledged to Bank Muamalat; and
3. Make changes in the management composition and amend of article association, unless it has obtained approval from Bank Muamalat.

Total repayment including interest amounted to Rp26.69 billion and shall be repaid in sixty (60) equal monthly installments until April 11, 2016. The office space purchased was used as collateral for the loan.

m. UBS AG Facility 2012 - 1

On March 5, 2012, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Guarantors"), UBS AG, London branch, (the "Original Lender") and UBS AG, Singapore branch, (the "Arranger, Facility Agent and Security Agent") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lender agreed to provide the Company a credit facility amounting to USD75 million. The interest rate of the loan is LIBOR plus 6% per annum. The loan shall be repaid in six (6) equal installments commencing on the twenty-first (21st) calendar month after the utilization date and shall be fully repaid on the thirty-sixth (36th) calendar month after the utilization date.

The proceeds of the loan were used to refinance the outstanding balance of its short-term loan from UBS AG, Singapore branch, amounting to USD75 million.

This facility was secured by the same security instruments as stated in the Guaranteed Senior Secured Notes (Note 30c).

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Persyaratan penting (*negative covenant*) atas fasilitas adalah:

1. Perusahaan dilarang mengamandemen anggaran dasar yang dapat memberikan dampak negatif yang material tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Apabila Perusahaan melakukan penggabungan atau rekonstruksi perusahaan, maka Perusahaan harus bertindak sebagai entitas yang menerima penggabungan;
3. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap dividen tunai dari setiap entitas anak yang menjadi pihak dalam perjanjian ini akan disimpan dalam akun yang telah ditetapkan; dan
4. Perusahaan tidak diizinkan untuk melepaskan kepemilikannya di (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran angsuran pokok dan bunga saat jatuh tempo. Pada tanggal 1 Desember 2014 dan 11 Desember 2014, Perusahaan menerima pemberitahuan *default* terkait dengan gagal bayar sejak bulan Maret 2014.

n. Fasilitas JP Morgan Chase N.A., cabang Singapura

Pada tanggal 6 Juli 2012, PT Fajar Bumi Sakti (FBS) (saat ini PT Kutai Bara Nusantara (KBN)) (sebagai "*Seller*"), Entitas Anak, dan Entitas Anak yaitu PT Guruh Putra Bersama (GPB) dan PT Ade Putra Tanrajeng (APT) (sebagai "*Guarantors*"), JP Morgan Energy Ventures Corporation (sebagai "*Buyer*") dan JP Morgan Chase Bank N.A., cabang Singapura (sebagai "*Lender*"), menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sehubungan dengan Perjanjian Pembelian dan Penjualan Batubara antara Penjual dan Pembeli sebesar USD30 juta (Catatan 49aa). Pinjaman ini ditujukan untuk modal kerja dan pengeluaran operasi dalam mengembangkan tambang Ulung, Gunung Sari dan Buluk Seng serta membayar biaya pertukaran lahan. Pinjaman ini dikenakan bunga 9% per tahun ditambah *LIBOR* dan dibayarkan setiap tiga bulan mulai tanggal 31 Maret 2013. Fasilitas ini akan dibayarkan setiap tiga bulan mulai tanggal 31 Maret 2013 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014.

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

The major terms (*negative covenant*) of the facility are:

1. The Company is prohibited from amending the articles of association that can provide a material adverse effect without prior notice;
2. If the Company enters into merger or business reconstruction, then the Company shall act as the surviving entity;
3. The Company must ensure that any cash dividends of each subsidiary are parties to the agreement will be deposited in an account that has been set; and
4. The Company is not permitted to dispose its interest in (i) IndoCoal Kalsel, (ii) IndoCoal Kaltim, (iii) Arutmin, (iv) KPC, (v) SHL, (vi) KCL, (vii) Sitrade, (viii) Forerunner, (ix) ICRL.

The loan is in default due to non-payment by the Company of its outstanding principal installment and interest amounts on due dates. On December 1, 2014 and December 11, 2014, the Company received notification of default in connection with payment default since March 2014.

n. JP Morgan Chase N.A., Singapore branch Facility

On July 6, 2012, PT Fajar Bumi Sakti (FBS) (currently PT Kutai Bara Nusantara (KBN)) (the "*Seller*"), a Subsidiary, and its Subsidiaries PT Guruh Putra Bersama (GPB) and PT Ade Putra Tanrajeng (APT) (the "*Guarantors*"), JP Morgan Energy Ventures Corporation (the "*Buyer*") and JP Morgan Chase Bank N.A., Singapore branch (the "*Lender*"), entered into a USD30 million term loan facility agreement in connection with the Coal Sale and Purchase Agreements between the Seller and the Buyer (Note 49aa). This loan facility is intended for working capital and operating expenditures in developing the Ulung, Gunung Sari and Buluk Seng mines and to pay for the costs of land swap. The loan bears an interest of 9% per annum plus *LIBOR* and is payable quarterly starting March 31, 2013. The facility will be payable quarterly starting March 31, 2013 and will mature on December 31, 2014.

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG *(Lanjutan)*

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: (i) penjaminan saham yang diberikan oleh Ancara Resources Limited kepada Pembeli dan Kreditur, atas 4,87% saham yang diterbitkan oleh Leap-Forward Resources Ltd. (Leap-Forward) atau persentase dari modal saham yang diterbitkan dengan nilai agregat penjualan tidak kurang dari USD75 juta; (ii) Pengalihan atas Perjanjian Pengadaan Batubara; dan (iii) dokumen lain yang membuktikan sekuritisasi aset KBN.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, pinjaman ini diklasifikasikan sebagai "Liabilitas yang Secara Langsung Berhubungan dengan Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

o. Fasilitas Raiffeisen Bank International, cabang Labuan

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), dan Raiffeisen Bank International (RBI), cabang Labuan, (sebagai "Pemilik Dana") mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan pinjaman sebesar USD80 juta. Pinjaman ini bertujuan untuk pembayaran klaim ke PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) terkait dengan Transfer KTS (Catatan 41b dan 49ff).

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga LIBOR ditambah 8% per tahun. Pinjaman akan dilunasi secara angsuran bulanan dimulai pada bulan kalender kesebelas (11) setelah tanggal penarikan dan harus dilunasi pada bulan kalender ketiga puluh enam (36) setelah tanggal penarikan dana.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) karena gagal bayar oleh Perusahaan atas pembayaran bunga saat jatuh tempo. Pada tanggal 14 November 2014, Perusahaan menerima pemberitahuan *default* terkait dengan gagal bayar pembayaran bunga.

p. Fasilitas Credit Suisse - 2014

Pada tanggal 12 Juni 2014, Perusahaan (sebagai "Peminjam") dan Entitas Anaknya, Sitrade, KCL, SHL dan Forerunner (sebagai "Original Guarantors"), dan Credit Suisse, cabang Singapura, (sebagai "Pemilik Dana") mengadakan Perjanjian Kredit, dimana Pemilik Dana menyetujui untuk memberikan Perusahaan pinjaman sebesar USD114 juta. Pinjaman ini terkait dengan reorganisasi KPC. Pinjaman ini bertujuan untuk pembayaran klaim ke KTS terkait dengan Transfer KTS (Catatan 41b dan 49ff).

30. LONG-TERM LOANS *(Continued)*

The loan facility is secured with: (i) pledge of shares granted by Ancara Resources Limited in favor of the Buyer and the Lender, over the 4.87% shares in issued share capital of Leap-Forward Resources Ltd. or any such percentage of its issued share capital with aggregate immediate sales value of not less than USD75 million; (ii) Assignment of Coal Supply Agreement; and (iii) any other document evidencing or security over any assets of KBN.

As of December 31, 2014 and 2013, the loan was reclassified to "Liabilities Directly Associated with Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

o. Raiffeisen Bank International, Labuan branch Facility

On June 12, 2014, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Guarantors"), and Raiffeisen Bank International (RBI), Labuan branch, (the "Original Lender") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lender agreed to provide the Company a credit facility amounting to USD80 million. The loan is intended to pay claims to PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) in connection with the KTS Transfer (Notes 41b and 49ff).

The loan is subject to LIBOR plus 8% interest rate per annum. The loan shall be repaid in monthly installments commencing on the eleventh (11th) calendar month after the utilization date and shall be fully repaid on the thirty-sixth (36th) calendar month after the utilization date.

The loan is in default due to non-payment by the Company of its outstanding principal installment and interest amounts on due dates. On November 14, 2014, the Company received notification of default in connection with the default payment of interest.

p. Credit Suisse Facility - 2014

On June 12, 2014, the Company (the "Borrower") and its Subsidiaries, Sitrade, KCL, SHL and Forerunner (the "Original Guarantors"), and Credit Suisse, Singapore branch, (the "Original Lender") entered into a Credit Agreement, wherein the Original Lender agreed to provide the Company a credit facility amounting to USD114 million. The loan is intended to pay claims to KTS in connection with the KTS Transfer (Notes 41b and 49ff).

30. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga LIBOR ditambah 8% per tahun. Pinjaman akan dilunasi secara angsuran bulanan dimulai pada bulan kalender kesebelas (11) setelah tanggal penarikan dan harus dilunasi pada bulan kalender ketiga puluh enam (36) setelah tanggal penarikan dana.

Pinjaman ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) berdasarkan ketentuan *cross default* seperti yang disebutkan dalam perjanjian karena gagal bayar oleh Kelompok Usaha atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman lainnya saat jatuh tempo.

Sebagai akibat yang diuraikan di atas, Kelompok Usaha telah kehilangan hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian pinjaman setidaknya 12 bulan setelah tanggal 31 Desember 2014 dan akibatnya hak-hak tanpa syarat terletak pada pemberi pinjaman yang dapat setiap saat menuntut pembayaran segera atas seluruh dan/atau sebagian saldo pinjaman berdasarkan kebijakan dari kreditur. Dengan demikian, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, manajemen mengklasifikasikan semua pinjaman dalam keadaan *default* (terdiri dari saldo pinjaman belum jatuh tempo dan pinjaman yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar) dengan nilai tercatat sebesar USD3,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi liabilitas lancar. Selain itu, semua biaya pinjaman yang belum diamortisasi dari pinjaman yang *default* dibebankan langsung ke laba atau rugi. Namun demikian, pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha belum menerima pemberitahuan dari krediturnya untuk menuntut pembayaran segera atas pinjaman yang *default*.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan sedang dalam diskusi dengan para kreditur untuk merestrukturisasi pinjaman, termasuk pinjaman CFL, *Senior Secured Notes* dan Obligasi Konversi yang diperoleh oleh Kelompok Usaha melalui entitas anak Perusahaan.

31. OBLIGASI KONVERSI

Akun ini terdiri dari:

	2014			
Pokok/ <i>Principal</i>	Diskonto Obligasi yang Belum Diamortisasi/ <i>Unamortized Bond Discount</i>	Saldo Obligasi setelah Dikurangi Diskonto Obligasi yang Belum Diamortisasi/ <i>Bond Balance, Net of Unamortized Bond Discount</i>		
Pihak ketiga - Dolar AS				Third party - US Dollar
Obligasi Konversi Berjamin	375.000.000	-	375.000.000	Guaranteed Convertible Bond
Dikurangi: jangka pendek	375.000.000	-	375.000.000	Less: current
Jangka Panjang	-	-	-	Non-Current

30. LONG-TERM LOANS (Continued)

The loan is subject to LIBOR plus 8% interest rate per annum. The loan shall be repaid in monthly installments commencing on the eleventh (11th) calendar month after the utilization date and shall be fully repaid on the thirty-sixth (36th) calendar month after the utilization date.

The loan is in default under the cross default provision of the agreement due to non-payment by the Group of its outstanding principal and/or interest amounts on due dates on other loans.

As a consequence of the defaults described above, the Group has lost its unconditional right to defer settlement of the loans of at least 12 months after December 31, 2014 and that unconditional right rests with the lenders who can demand immediate repayment of the entire balance and/or a portion of the loan at any time at its sole discretion. Thus, in line with the generally accepted accounting principles in Indonesia, management classified all defaulted loans (consisting of outstanding loan balances not yet due and already due and unpaid) with carrying amount of USD3.2 billion as of December 31, 2014 to current liabilities. Furthermore, all unamortized costs of the defaulted loans following their default were charged directly to profit or loss. Nevertheless, as of December 31, 2014, the Group has not received any notification from its lenders demanding immediate repayment of the defaulted loans.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company is in discussions with the lenders to restructure its loans, including the CFL loan, Senior Secured Notes and Convertible Bonds obtained by the Group through the Company's Subsidiaries.

31. CONVERTIBLE BONDS

This account consists of:

31. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

31. CONVERTIBLE BONDS (Continued)

	2013			
	Pokok/ <i>Principal</i>	Diskonto Obligasi yang Belum Diamortisasi/ <i>Unamortized Bond Discount</i>	Saldo Obligasi setelah Dikurangi Diskonto Obligasi yang Belum Diamortisasi/ <i>Bond Balance, Net of Unamortized Bond Discount</i>	
Pihak ketiga - Dolar AS				Third party - US Dollar
Obligasi Konversi Berjamin	375.000.000	(3.164.591)	371.835.409	Guaranteed Convertible Bond
Dikurangi: jangka pendek	375.000.000	(3.164.591)	371.835.409	Less: current
Jangka Panjang	-	-	-	Non-Current

Pada tanggal 5 Agustus 2009, Perusahaan (sebagai "Penjamin") melalui Enercoal Resources Pte. Ltd. (Enercoal) (sebagai "Penerbit"), Entitas Anak yang dimiliki seluruhnya, menandatangani Perjanjian Pembelian berkaitan dengan Obligasi Konversi Berjamin sebesar USD375 juta dengan suku bunga 9,25% ("Obligasi Berjamin") dengan Credit Suisse Limited, Singapura, yang bertindak sebagai *Placement Agent* tunggal.

On August 5, 2009, the Company (the "Guarantor"), through Enercoal Resources Pte. Ltd. (Enercoal) (the "Issuer"), a wholly-owned Subsidiary, entered into a Purchase Agreement relating to USD375 million 9.25% Guaranteed Convertible Bonds ("Guaranteed Bonds") with Credit Suisse Limited, Singapore, acting as the sole Placement Agent.

Obligasi Berjamin ini, akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2014, merupakan obligasi yang pada awalnya dapat dikonversi menjadi saham biasa Perusahaan dengan nilai Rp3.366,90 per saham. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, perubahan nilai nominal saham, konsolidasi atau reklasifikasi saham, kapitalisasi laba atau cadangan modal, distribusi modal, penawaran umum terbatas dan peristiwa lainnya yang mempunyai efek dilutif.

These Guaranteed Bonds, maturing on August 5, 2014, are initially convertible into ordinary shares of the Company at Rp3,366.90 per share. The conversion price will be subject to adjustment for, among other things, subdivisions, consolidations or reclassifications of shares; capitalization of profits or reserves; capital distribution; right issues and other standard dilutive events.

Obligasi Berjamin dengan nilai nominal sebesar USD100.000 dapat dikonversi setiap saat dalam periode empat puluh satu (41) hari setelah tanggal penerbitan sampai dengan sepuluh (10) hari sebelum tanggal jatuh tempo, kecuali sebelumnya telah ditebus, dikonversi, dibeli kembali atau dibatalkan.

The Guaranteed Bonds with par value of USD100,000 each are convertible any time on or forty-one (41) days after the closing date, until the close of business on the date that falls ten (10) business days prior to maturity, unless previously redeemed, converted, purchased or cancelled.

Hasil penerimaan bersih dari penerbitan obligasi digunakan Perusahaan untuk mendanai Equity Swap sebesar USD115 juta dan premi atas transaksi Capped Call sebesar USD51,28 juta dan sisanya untuk keperluan umum perusahaan.

The net proceeds from bonds issuance were used by the Company to fund the Equity Swap deposit amounting to USD115 million and premium on the Capped Call transactions amounting to USD51.28 million and the remainder for general corporate purposes.

Pada tanggal 22 Agustus 2014, syarat dan kondisi dari Obligasi Konversi Berjamin sebesar USD375 juta yang jatuh tempo pada tahun 2014 telah diubah melalui Rapat Pemegang Obligasi. Pokok perubahan tersebut dijelaskan di bawah ini:

On August 22, 2014, bondholders approved the amendments of the terms and conditions of the USD375 million Guaranteed Convertible Bonds through Bondholder Meeting. Key terms of the amendments were as follows:

- Jumlah Pokok Utang: USD374,9 juta
- Tanggal Jatuh Tempo: 7 April 2018

- Principal Bond Amount: USD374.9 million
- Maturity Date: April 7, 2018

31. OBLIGASI KONVERSI (Lanjutan)

- Ketentuan Pembayaran Bunga: 6% per tahun terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014
- Periode Konversi: Periode konversi dimulai dari tanggal 7 September 2015 hingga 23 Maret 2018
- Harga konversi: Rp250
- Jaminan (*security*): paket jaminan berdasarkan Perjanjian Antar Kreditur
- Jaminan (*guarantee*): Perusahaan menjamin segala kewajiban Enercoal

Meskipun persetujuan perubahan syarat dan kondisi atas Obligasi Konversi Berjamin telah diperoleh, namun demikian, persetujuan secara tertulis belum selesai, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian.

Obligasi Konversi Berjamin ini dalam kondisi *default* (wanprestasi) berupa penundaan pembayaran bunga yang jatuh tempo pada bulan September 2014 dan seterusnya.

32. DERIVATIF

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas derivatif Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	Tanggal/ Date	Nilai Nosional/ Premium/ Notional Amount/ Premium	Nilai Wajar/Fair Value		
			2014	2013	
Aset derivatif					Derivative assets
Opsi atas pembayaran dimuka			-	-	Prepayment options
Perjanjian <i>Equity Swap 1</i>	5 Agustus 2009/ August 5, 2009	115.000.000	-	10.891.082	Equity Swap Agreement 1
Perjanjian <i>Capped Call</i>	5 Agustus 2009/ August 5, 2009	288.461.538	-	-	Capped Call Agreement
Perjanjian <i>Capped Call</i> dan <i>Call Option</i>	23 Oktober 2009/ October 23, 2009	95.000.000	-	-	Capped Call and Call Option Agreement
Total			-	10.891.082	Total

- a. Opsi atas pembayaran di muka terkait dengan hak pelunasan dini dalam ketentuan Pinjaman CFL (Catatan 30a) sebesar USD1,9 miliar. Pada tanggal 8 November 2011, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk melakukan pembayaran dimuka atas Fasilitas *Commitment A* yang sudah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan menggunakan teknik penilaian untuk mengukur nilai wajar dari opsi tersebut di atas. Teknik penilaian tersebut berdasarkan model binomial. Parameter utama yang digunakan untuk penilaian opsi pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

31. CONVERTIBLE BONDS (Continued)

- *Interest Payment Terms: 6.00% per annum from August 25, 2014*
- *Conversion Period: from September 7, 2015 up to March 28, 2018*
- *Conversion price: Rp250*
- *Security: security package under Intercreditor Agreement*
- *Guarantee: the Company guarantees Enercoal's obligation*

Although approval has been obtained on the amendments of the Guaranteed Convertible Bonds, the necessary approval in writing has not yet been finalized as of the completion date of the consolidated financial statements.

The Guaranteed Convertible Bonds was in default due to non-payment of interest amounts due in September 2014 and onwards.

32. DERIVATIVES

The following table sets forth the derivative assets and liabilities of the Group as of December 31, 2014 and 2013:

- a. *Prepayment options are related to the early repayment rights within the terms of USD1.9 billion CFL Loan (Note 30a). On November 8, 2011, the Company used its prepayment option right to early repay the Facility A Commitment, which originally was due on September 30, 2013.*

As of December 31, 2013, the Company has used valuation technique to measure the fair value of the above options. The valuation technique is based on the binomial model. Key parameters used for the valuation of the options as of December 31, 2013 were as follows:

32. DERIVATIF (Lanjutan)

32. DERIVATIVES (Continued)

	<u>2013</u>	
Panjang interval waktu	1 tahun/year	<i>Length of time interval</i>
Probabilitas pergerakan naik	50%	<i>Probability of up movement</i>
Tingkat diskonto	25,41%	<i>Discount rate</i>
Tingkat bebas risiko		<i>Risk free rate</i>
Fasilitas B	0,13%	<i>Facility B</i>
Fasilitas C	0,40%	<i>Facility C</i>

Pada tahun 2014, sejalan dengan penyelesaian transaksi utama Master Deed (Catatan 49ff) untuk penyelesaian sebagian Pinjaman CFL (Catatan 30a), opsi pembayaran dimuka sebesar nihil telah dihentikan pengakuannya.

In 2014, in line with the completion of the first main transaction of the Master Deed (Note 49ff) to settle a portion of CFL Loan (Note 30a), the prepayment option with nil value was derecognized.

- b. Sehubungan dengan terbitnya Obligasi Konversi Berjamin dengan suku bunga 9,25% (Catatan 31), pada tanggal 5 Agustus 2009, Enercoal menandatangani perjanjian *Equity Swap* yang pertama dengan Credit Suisse International. Nilai nosional transaksi *Equity Swap* 1 ini adalah sebesar USD115 juta. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2014.

- b. *In connection with the issuance of 9.25% Guaranteed Convertible Bonds (Note 31), on August 5, 2009, Enercoal entered into the first Equity Swap Agreement with Credit Suisse International. The notional amount of this Equity Swap 1 is USD115 million. This agreement will mature on August 5, 2014.*

Berdasarkan ketentuan *Equity Swap*, (a) jika harga akhir lebih tinggi dari harga awal yaitu USD0,26029, Credit Suisse harus membayar Enercoal sebesar sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan selisih tersebut dan (b) jika harga akhir lebih rendah dari harga awal, Enercoal akan membayar Credit Suisse International sejumlah nilai yang dihitung berdasarkan selisih tersebut.

Under the terms of the Equity Swap, (a) if the final price is higher than the initial price of USD0.26029, Credit Suisse will have to pay Enercoal an amount calculated by reference to the difference and (b) if the final price is lower than the initial price, Enercoal will pay Credit Suisse International an amount calculated in reference to the difference.

Sebagai bagian dari transaksi *Equity Swap*, Enercoal menempatkan USD115 juta pada Credit Suisse selama jangka waktu transaksi *Equity Swap*.

As part of the Equity Swap transaction, Enercoal deposited USD115 million in Credit Suisse during the term of the Equity Swap transaction.

Pada tanggal 31 Desember 2014, *Equity Swap* 1 telah ditebus.

As of December 31, 2014, the Equity Swap 1 has been redeemed.

- c. Pada tanggal 5 Agustus 2009, Enercoal menandatangani Perjanjian *Capped Call* dengan Credit Suisse International. Nilai nosional transaksi *Capped Call* ini adalah sebesar USD288.461.538. Berkaitan dengan perjanjian tersebut, Enercoal membayar premium sebesar USD51.276.947 kepada Credit Suisse. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal pada bulan Desember 2013, Februari 2014, April 2014, Juni 2014 dan Agustus 2014. Harga pelaksanaan per opsi adalah sebesar USD0,33838, sementara harga *cap* sebesar USD0,45551.

- c. *On August 5, 2009, Enercoal entered into a Capped Call Agreement with Credit Suisse International. The notional amount of the Capped Call is USD288,461,538. Enercoal paid a premium of USD51,276,947 to Credit Suisse relating to this agreement. This agreement will mature on various dates in December 2013, February 2014, April 2014, June 2014 and August 2014. The strike price per option is USD0.33838, while the cap price is USD0.45551.*

Pada tanggal 31 Desember 2014, *capped call* telah ditebus.

As of December 31, 2014, the capped call has been redeemed.

32. DERIVATIF (Lanjutan)

- d. Pada tanggal 23 Oktober 2009, Enercoal menandatangani Perjanjian *Capped Call* dan *Call Option* dengan Credit Suisse International. Berkaitan dengan perjanjian tersebut, Enercoal membayar premium sebesar USD95 juta kepada Credit Suisse. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal pada bulan Oktober 2011, Oktober 2013, Oktober 2014 dan Oktober 2015 dengan harga pelaksanaan per opsi masing-masing sebesar USD0,36806, USD0,36806, USD0,41407 dan USD0,46008. Sedangkan *cap price* per opsi pada saat jatuh tempo pada bulan Oktober 2013, Oktober 2014 dan Oktober 2015 masing-masing sebesar USD0,58277, USD0,62878 dan USD0,67478.

32. DERIVATIVES (Continued)

- d. On October 23, 2009, Enercoal entered into a *Capped Call* and *Call Option Agreement* with Credit Suisse International. Enercoal paid a premium of USD95 million to Credit Suisse relating to this agreement. This agreement will mature on various dates in October 2011, October 2013, October 2014 and October 2015 with strike price per option of USD0.36806, USD0.36806, USD0.41407 and USD0.46008, respectively. Meanwhile, the cap price per option upon each maturity in October 2013, October 2014 and October 2015 amounted to USD0.58277, USD0.62878 and USD0.67478, respectively.

33. MODAL SAHAM

Mutasi modal saham pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Nominal/ Nominal (Rp)	Jumlah Modal/ Amount	Descriptions
Jumlah saham 1 Januari 2014	20.773.400.000	500	1.476.792.700	Total shares as of January 1, 2014
Penambahan melalui HMTD IV	15.853.620.427	100	137.857.569	Preemptive Rights IV
Jumlah saham 31 Desember 2014	36.627.020.427		1.614.650.269	Total shares as of December 31, 2014

33. CAPITAL STOCK

Movements of shares in 2014 were as follows:

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Ficomindo Buana Registrar adalah sebagai berikut:

Composition of shareholders as of December 31, 2014 and 2013 based on registration by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and PT Ficomindo Buana Registrar was as follows:

2014				
Keterangan	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Descriptions	
Credit Suisse AG SG qq Longhaul Holdings Ltd.	8.477.485.702	23,15	Credit Suisse AG SG qq Longhaul Holdings Ltd.	
PT Karsa Daya Rekatama	4.000.000.000	10,92	PT Karsa Daya Rekatama	
PT Damar Reka Energi Masyarakat	2.300.000.000	6,28	PT Damar Reka Energi Public	
(masing-masing di bawah 5%)	21.849.534.725	59,65	(each below 5%)	
Total	36.627.020.427	100,00	Total	

33. MODAL SAHAM (Lanjutan)

33. CAPITAL STOCK (Continued)

2013				
Pemegang Saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount	Shareholders
Vallar Investments UK Limited	6.061.699.637	29,18	430.774.722	Vallar Investments UK Limited
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	14.238.487.756	68,54	1.011.858.219	Public (each below 5%)
Sub-total	20.300.187.393	97,72	1.442.632.941	Sub-total
Saham beredar yang diperoleh kembali	473.212.607	2,28	34.159.759	Treasury stock
Total	20.773.400.000	100,00	1.476.792.700	Total

Perubahan susunan pemegang saham tersebut timbul karena transaksi jual beli saham yang dilakukan di bursa saham.

Changes in the composition of shareholders are due to the sale and purchase transactions of shares carried out on the stock exchange.

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1/1995 yang diterbitkan pada bulan Maret 1995, dan telah diubah dengan Undang-undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba neto sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

The Limited Liability Company Law No. 1/1995 introduced in March 1995, which has been amended by Law No. 40/2007 issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga pada tanggal 3 April 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain, resolusi sebagai berikut:

During the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 3, 2014, the Company's shareholders approved, among others, the following resolutions:

- 1) Rencana untuk melakukan pengalihan saham-saham milik Perusahaan di KPC dan BRMS sebagai bagian dari penyelesaian pelunasan Utang CFL dan pembelian saham-saham KPC milik KTS oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya;
- 2) Rencana untuk menjaminkan atau mengagunkan dan mengalihkan sebagian besar harta kekayaan Perusahaan
- 3) Rencana untuk mengubah struktur modal saham sebagai berikut:
 - (a) Modal dasar - Rp38.750.000.000.000 yang terdiri dari 20.773.400.000 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 per saham, dan 283.633.000.000 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per saham, dan
 - (b) Modal ditempatkan dan disetor - Rp10.386.700.000.000 yang terdiri dari 20.773.400.000 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 per saham; dan

- 1) *Plan to assign the Company's shares in KPC and BRMS as part of CFL Loan settlement, and purchase of shares of KTS in KPC by the Company and its Subsidiary;*
- 2) *Plan for securitization and collateralization and assignment of a major portion of the Company's assets;*
- 3) *Plan to change its capital stock structure to be as follows:*
 - (a) *Authorized capital - Rp38,750,000,000,000 consisting of 20,773,400,000 Series A shares, each with a nominal value of Rp500 per share, and 283,633,000,000 Series B shares, each with a nominal value of Rp100 per share, and*
 - (b) *Issued and fully paid-in capital - Rp10,386,700,000,000 consisting of 20,773,400,000 Series A shares, each with a nominal value of Rp500 per share; and*

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

33. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- 4) Perubahan beberapa Anggaran Dasar Perusahaan.

33. CAPITAL STOCK (Continued)

- 4) Amendment to several articles of the Company's Articles of Association.

34. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

34. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Agio saham	561.699.725	354.913.372	Share premium
Selisih nilai transaksi dari kombinasi bisnis entitas sepengendali	<u>(1.233.700.656)</u>	<u>(1.233.700.656)</u>	Difference in value from transaction with entities under common control
Tambahan Modal Disetor - Neto	<u>(672.000.931)</u>	<u>(878.787.284)</u>	Additional Paid-in Capital - Net

- a. Agio saham terdiri dari:

- a. Share premium consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kelebihan harga saham sehubungan dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atas nilai nominal saham	535.101.836	283.922.222	Excess of non-preemptive rights issuance price over par value of shares
Kelebihan harga pelaksanaan obligasi konversi atas nilai nominal saham diperoleh kembali	273.139.707	273.139.707	Excess of bond's conversion price over par value of treasury stock
Saham beredar yang diperoleh kembali	<u>(200.318.190)</u>	<u>(200.318.190)</u>	Buy-back of Company's shares
Biaya emisi saham	<u>(46.223.628)</u>	<u>(1.830.367)</u>	Share issuance cost
Agio Saham - Neto	<u>561.699.725</u>	<u>354.913.372</u>	Share Premium - Net

- b. Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali terdiri dari:

- b. Difference in value from transaction with entities under common control consists of:

2014 dan/and 2013					
	<u>Tanggal/ Date</u>	<u>Entitas Asal/ Original Entities</u>	<u>Entitas Tujuan/ Destination Entities</u>	<u>Nilai Buku/ Book Value</u>	
Aset					Assets
Blok R2	21 Oktober 1999/ October 21, 1999	Minarak Labuan Ltd.	PT Bumi Resources Tbk	25.182.155	Block R2
Blok 13	21 Oktober 1999/ October 21, 1999	Minarak Labuan Ltd.	PT Bumi Resources Tbk	<u>12.042.693</u>	Block 13
Total nilai buku				37.224.848	Total book value
Nilai perolehan				<u>1.270.925.504</u>	Acquisition cost
Selisih				<u>(1.233.700.656)</u>	Difference

35. SAHAM BEREDAR YANG DIPEROLEH KEMBALI

Transaksi saham beredar yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

35. TREASURY STOCK

Transactions regarding treasury stock were as follows:

Keterangan	2014 dan/and 2013				Description
	Tahun/ Year	Total Saham/ Number of Shares	Realisasi/ Realization (%)	Harga Nominal/ Par Value	
Disetujui Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (Pembelian kembali saham yang pertama) (Catatan 1c)	2006	1.940.400.000			Approved at Extraordinary General Meeting of Shareholders (first buy-back) (Note 1c)
Pembelian kembali	2006	885.734.500	45,65	63.938.442	Buy-back
Pembelian kembali	2007	479.231.500	24,70	34.594.243	Buy-back
Sub-total		1.364.966.000	70,35	98.532.685	Sub-total
Konversi obligasi	2007	(1.068.857.428)		(76.353.023)	Conversion of bonds
Konversi obligasi	2008	(235.809.465)		(17.826.856)	Conversion of bonds
Sub-total		(1.304.666.893)		(94.179.879)	Sub-total
Neto		60.299.107		4.352.806	Net
Disetujui Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (Pembelian kembali saham yang kedua) (Catatan 1c)	2008	582.120.000			Approved at Extraordinary General Meeting of Shareholders (second buy-back) (Note 1c)
Pembelian kembali	2008	412.913.500	70,93	29.806.953	Buy-back
Disetujui Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (Pembelian kembali saham yang ketiga) (Catatan 1c)	2011	780.000.000			Approved at Extraordinary General Meeting of Shareholders (third buy-back) (Note 1c)
Saldo		473.212.607		34.159.759	Balance

Saham beredar yang diperoleh kembali sejumlah 1.304.666.893 saham digunakan untuk pelaksanaan obligasi konversi.

Treasury stock amounting to 1,304,666,893 shares was used for execution of convertible bonds.

36. CADANGAN MODAL LAINNYA

36. OTHER CAPITAL RESERVES

Rincian dan mutasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

Details and movements of this account were as follows:

		2014			
		Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Exchange Differences due to Financial Statements Translation	Laba yang Belum Direalisasi atas Kenaikan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ Unrealized Gain on Increase in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	Total	
Saldo 1 Januari 2014	13.318.770	-	-	13.318.770	<i>Balance as of January 1, 2014</i>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.725.539)	-	-	(1.725.539)	<i>Exchange differences due to financial statements translation</i>
Saldo 31 Desember 2014	11.593.231	-	-	11.593.231	<i>Balance as of December 31, 2014</i>
		2013			
		Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan/ Exchange Differences due to Financial Statements Translation	Laba yang Belum Direalisasi atas Kenaikan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/ Unrealized Gain on Increase in Fair Value of Available-for-sale Financial Assets	Total	
Saldo 1 Januari 2013	14.994.688	32.870.726	-	47.865.414	<i>Balance as of January 1, 2013</i>
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(1.675.918)	-	-	(1.675.918)	<i>Exchange differences due to financial statements translation</i>
Kenaikan neto nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	5.793.835	-	5.793.835	<i>Net increase in fair value of available-for-sale financial assets</i>
Penyelesaian aset keuangan tersedia untuk dijual	-	(38.664.561)	-	(38.664.561)	<i>Settlement of available-for-sale financial assets</i>
Saldo 31 Desember 2013	13.318.770	-	-	13.318.770	<i>Balance as of December 31, 2013</i>

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian atas akun ini adalah sebagai berikut:

37. NON-CONTROLLING INTEREST

Details of this account were as follows:

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2014	Bagian Rugi Neto/ Share in Net Loss	Bagian Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income (Loss)	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2014	
PT Bumi Resources Minerals Tbk	234.337.495	(12.121.410)	(281.312)	-	221.934.773	PT Bumi Resources Minerals Tbk
Leap-Forward Resources Ltd.	(17.736.448)	(9.450.852)	-	-	(27.187.300)	Leap-Forward Resources Ltd.
PT Daerah Maju Bersaing	(25.779.565)	(56.222.555)	-	-	(82.002.120)	PT Daerah Maju Bersaing
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	(1.134.525)	(121.690)	18.790	-	(1.237.425)	Others (each below USD1,000,000)
Net	189.686.957	(77.916.507)	(262.522)	-	111.507.928	Net

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2013	Bagian Rugi Neto/ Share in Net Loss	Bagian Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income (Loss)	Akuisisi Entitas Anak/ Acquisition of Subsidiaries	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2013	
PT Bumi Resources Minerals Tbk	250.948.076	(16.145.892)	(464.689)	-	234.337.495	PT Bumi Resources Minerals Tbk
Leap-Forward Resources Ltd.	(8.089.655)	(9.650.456)	3.663	-	(17.736.448)	Leap-Forward Resources Ltd.
PT Daerah Maju Bersaing	(1.034.714)	(24.744.851)	-	-	(25.779.565)	PT Daerah Maju Bersaing
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.000.000)	(588.074)	(548.360)	1.931	(22)	(1.134.525)	Others (each below USD1,000,000)
Net	241.235.633	(51.089.559)	(459.095)	(22)	189.686.957	Net

38. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

38. REVENUES

This account consists of:

	2014	2013	
Penjualan batubara (Catatan 49a)			Coal sales (Note 49a)
<u>Ekspor</u>			<u>Export</u>
Pihak ketiga	1.801.253.378	2.843.084.132	Third parties
<u>Lokal</u>			<u>Local</u>
Pihak ketiga	968.663.739	684.714.160	Third parties
Sub-total	2.769.917.117	3.527.798.292	Sub-total
Jasa			Service
<u>Lokal</u>			<u>Local</u>
Pihak ketiga	16.149.978	19.626.135	Third parties
Total	2.786.067.095	3.547.424.427	Total

Pendapatan jasa ini merupakan jasa yang dilakukan oleh Bumi Resources Japan Company Limited, Entitas Anak, dan Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. untuk memasarkan batubara yang diproduksi oleh PT Kaltim Prima Coal, entitas pengendalian bersama (Catatan 49z).

Service revenues pertain to the services rendered by Bumi Resources Japan Company Limited, a Subsidiary, and Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. to market coal produced by PT Kaltim Prima Coal, a jointly controlled entity (Note 49z).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

38. PENDAPATAN (Lanjutan)

Rincian pelanggan yang mempunyai transaksi lebih dari 10% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Jhonlin Group	388.977.397	168.512.441
Adani Global Pte. Ltd., Singapura	348.489.209	509.584.390
Total	<u>737.466.606</u>	<u>678.096.831</u>

38. REVENUES (Continued)

Details of customers having transactions more than 10% of total revenues for the years ended December 31, 2014 and 2013 were as follows:

PT Jhonlin Group
Adani Global Pte. Ltd., Singapore
Total

39. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pengupasan dan penambangan	1.643.328.381	1.945.137.141
Pemrosesan batu bara	484.723.173	620.362.628
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 16 dan 17)	145.775.225	218.636.211
Sub-total	2.273.826.779	2.784.135.980
Ditambah: Persediaan batubara awal	128.147.711	205.232.008
Dikurangi: Persediaan batubara akhir	76.559.408	128.147.711
Penyesuaian	26.807.325	-
Total	<u>2.298.607.757</u>	<u>2.861.220.277</u>

39. COST OF REVENUES

This account consists of:

Stripping and mining
Coal processing
Depreciation and amortization (Notes 16 and 17)
Sub-total
Add: Beginning coal inventory
Less: Ending coal inventory
Adjustment
Total

Rincian pemasok yang mempunyai transaksi lebih dari 10% dari total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Petromine Energy Trading	438.398.420	552.612.487

Details of supplier having transactions more than 10% of total revenues for the years ended December 31, 2014 and 2013 were as follows:

PT Petromine Energy Trading

Jumlah untuk setiap pemasok seperti yang dinyatakan di atas adalah setelah pengaruh dari metode konsolidasian proporsional.

The amount for each supplier as stated above was after the effect of proportionate consolidation method.

40. BEBAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Penjualan		
Beban dan komisi pemasaran (Catatan 49z)	154.971.777	194.662.432
Pengangkutan	64.960.613	67.136.482
Lain-lain (masing-masing dibawah USD2.000.000)	531.089	1.492.361
Sub-total	220.463.479	263.291.275

40. OPERATING EXPENSES

This account consists of:

Selling
Marketing commissions and expenses (Note 49z)
Freight
Others
(each below USD2,000,000)
Sub-total

40. BEBAN USAHA (Lanjutan)

40. OPERATING EXPENSES (Continued)

	2014	2013	
Umum dan administrasi			General and administrative
Jasa profesional	116.885.303	90.846.521	Professional fees
Gaji dan upah	25.124.444	25.094.295	Salaries and wages
Beban pajak	19.632.011	17.592.335	Tax expense
Penyusutan (Catatan 16)	7.537.063	14.418.790	Depreciation (Note 16)
Transportasi	7.025.775	8.728.866	Transportation
Asuransi	4.776.505	5.808.390	Insurance
Lain-lain (masing-masing dibawah USD2.000.000)	23.058.293	30.376.563	Others (each below USD2,000,000)
Sub-total	204.039.394	192.865.760	Sub-total
Total	424.502.873	456.157.035	Total

41. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

41. OTHER INCOME (EXPENSES)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Beban bunga dan keuangan

a. Interest expenses and finance charges

	2014	2013	
Beban bunga dan amortisasi beban keuangan neto	(744.750.340)	(503.950.875)	Interest charges and amortization of net financial charges
Guaranteed Senior Secured Notes	(76.922.222)	(111.250.000)	Guaranteed Senior Secured Notes
Obligasi konversi	(34.687.500)	(34.687.500)	Convertible bonds
Sewa pembiayaan	(7.732.744)	(10.908.698)	Finance lease
Administrasi bank	(67.713)	(157.571)	Bank charges
Total	(864.160.519)	(660.954.644)	Total

b. Klaim

b. Claims

Klaim sebesar USD195.153.606 merupakan klaim dari Thiess kepada PT Arutmin Indonesia (Catatan 50t) dan pembayaran klaim kepada PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) sehubungan dengan manfaat ekonomi tertentu yang dinikmati oleh Perusahaan, bukan KTS, di PT Kaltim Prima Coal pada periode sebelumnya (selanjutnya disebut sebagai "Klaim KTS"). Penyelesaian Transfer KTS (Catatan 49ff) tergantung pada tanggal penyelesaian Klaim KTS.

Claims of USD195,153,606 pertains to claim from Thiess to PT Arutmin Indonesia (Note 50t) and payment of claims to PT Kutai Timur Sejahtera (KTS) in connection with certain economic benefits enjoyed by the Company, instead of KTS, in PT Kaltim Prima Coal in previous periods (referred to as the "KTS Claims"). The completion of KTS Transfer (Note 49ff) was dependent on the settlement of KTS Claims.

41. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN *(Lanjutan)*

41. OTHER INCOME (EXPENSES) *(Continued)*

c. Lain-lain - neto

c. Others - net

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pendapatan dividen	26.207.892	-	<i>Dividend income</i>
Biaya pelabuhan	759.500	2.016.840	<i>Port fee</i>
Rugi atas pelepasan/penjualan aset tetap	(153.437)	(93.627)	<i>Loss on disposal/retirement of fixed assets</i>
Laba yang direalisasi atas penyelasaan aset keuangan tersedia untuk dijual	-	48.330.702	<i>Realized gain on settlement of available-for-sale financial assets</i>
Pembalikan penyisihan penurunan nilai biaya proyek pengembangan usaha	-	31.305.000	<i>Recovery from provision of impairment of business development project costs</i>
Penghapusan piutang	-	(19.297.846)	<i>Write-off of receivable</i>
Lain-lain - neto	<u>(15.982.363)</u>	<u>9.444.147</u>	<i>Others - net</i>
Neto	<u>10.831.592</u>	<u>71.705.216</u>	Net

Pendapatan dividen berkaitan dengan pembebasan Mountain Netherlands Investments B.V. atas haknya untuk menerima bagian dari Dividen Interim PT Kaltim Prima Coal yang diumumkan pada tanggal 30 Juli 2014.

The dividend income pertains to the waiver of Mountain Netherlands Investments B.V. of its right to receive its portion of PT Kaltim Prima Coal Interim Dividends declared on July 30, 2014.

42. RUGI PER 1.000 SAHAM DASAR/DILUSIAN

42. BASIC/DILUTED LOSS PER 1,000 SHARES

Berikut adalah perhitungan rugi per 1.000 saham dasar/dilusian:

The following is the computation of basic/diluted loss per 1,000 shares:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Rugi neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(387.988.157)	(609.013.918)	<i>Net loss attributable to the owners of the parent</i>
Total rata-rata tertimbang saham dasar/dilusian (angka penuh)	<u>25.314.621.723</u>	<u>20.300.187.393</u>	<i>Weighted average number of ordinary shares/diluted shares (full amount)</i>
Rugi per 1.000 saham Dasar/Dilusian	<u>(15,33)</u>	<u>(30,00)</u>	Basic/Diluted loss per 1,000 shares

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, potensi konversi dari Obligasi Konversi Berjamin sebesar USD375 juta dengan suku bunga 9,25% yang diterbitkan oleh Enercoal Resources Pte. Ltd., Entitas Anak, (Catatan 31) menjadi saham biasa dari Perusahaan bersifat antidilutif, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan rugi per saham dilusian.

For the years ended December 31, 2014 and 2013, the potential conversion of the USD375 million 9.25% Guaranteed Convertible Bonds issued by Enercoal Resources Pte. Ltd., a Subsidiary, (Note 31) into ordinary shares of the Company is considered antidilutive, thus not included in the calculation of the diluted loss per share.

43. PERPAJAKAN

a. Tagihan Pajak

Akun ini terdiri dari:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	603.822.413	664.052.620	Value-Added Tax
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81.306.915	72.706.990	Vehicle Fuel Tax
Total	<u>685.129.328</u>	<u>736.759.610</u>	Total

Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan tagihan kepada Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) sehubungan dengan Tagihan PPN Masukan yang dibayar oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin), entitas pengendalian bersama, dalam pembelian impor maupun lokal atas bahan baku, perlengkapan dan lainnya yang diperlukan bagi produksi batubara. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 144/2000 tanggal 22 Desember 2000, terdapat ketidakpastian apakah PPN Masukan tersebut dapat direstitusi atau dikreditkan ke utang pajak lainnya. Namun demikian, manajemen KPC dan Arutmin berkeyakinan bahwa PPN Masukan yang telah dibayarkan tersebut akan dapat ditagih kembali, sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) (Catatan 49a).

Berdasarkan pembahasan dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) dan perusahaan-perusahaan penghasil batubara generasi pertama lainnya, manajemen Kelompok Usaha yakin bahwa lebih memungkinkan apabila Pajak Pertambahan Nilai Masukan dikembalikan dalam bentuk moneter dalam Rupiah Indonesia dan oleh karena itu tidak ada penggantian atas dana hasil produksi batubara (DHPB). Oleh sebab itu, pada akhir periode pelaporan, tagihan Pajak Pertambahan Nilai dihitung berdasarkan kurs nilai tukar pada setiap akhir periode pelaporan.

Tagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2013, Arutmin dan KPC mengkompesasi tagihan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap utang kepada Pemerintah Indonesia - Royalti [Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)] (Catatan 50b). Manajemen berkeyakinan bahwa PBBKB merupakan pajak daerah dan oleh karena itu, merupakan kelebihan pembayaran pajak.

43. TAXATION

a. Taxes Recoverable

This account consists of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Value-Added Tax	603.822.413	664.052.620	Value-Added Tax
Vehicle Fuel Tax	81.306.915	72.706.990	Vehicle Fuel Tax
Total	<u>685.129.328</u>	<u>736.759.610</u>	Total

Value-Added Tax Recoverable

Value-Added Tax (VAT) recoverable represents claims to the Government of Indonesia (GOI) (through the Ministry of Energy and Mineral Resources) in connection with the VAT-in that was paid by PT Kaltim Prima Coal (KPC) and PT Arutmin Indonesia (Arutmin), jointly controlled entities, in relation to imports and local purchases of materials, supplies, and other items necessary to produce coal. After Government Regulation No. 144/2000 dated December 22, 2000 became effective, there is uncertainty as to whether the VAT-in is refundable or creditable against other tax liability. The managements of KPC and Arutmin, however, believe that based on the Coal Contract of Work (CCoW), the VAT-in is recoverable (Note 49a).

From the discussions with the Indonesian Mining Association (IMA) and other first-generation coal producing companies, the Group's management now believes that it is more likely that the VAT-in will be refunded in monetary form in Indonesian Rupiah and, therefore, not offset against coal production proceeds ("DHPB"). Therefore, the VAT recoverable at the end of each reporting period was recomputed based on the closing exchange rate.

Vehicle Fuel Tax Recoverable

In 2013, Arutmin and KPC offset the claims for vehicle fuel tax or Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) against Due to GOI - Royalty [Coal Production Proceeds/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)] (Note 50b). Management believes that PBBKB is a regional tax and therefore represents a tax overpayment.

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan No. 194/PMK.03/2012 tanggal 6 Desember 2012, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan bagi pemegang PKP2B generasi pertama, termasuk Arutmin dan KPC, yang mengatur tata cara pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penjualan dan perlakuan PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Berdasarkan peraturan tersebut, pemegang PKP2B generasi pertama harus memungut, membayar, dan melaporkan Pajak Penjualan atas penggunaan jasa tertentu seperti yang diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa atas penyerahaan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada kontraktor PKP2B generasi pertama, PPN dan PPn BM terutang tidak dipungut. Arutmin dan KPC mengakui Pajak Penjualan ini sebagai bagian dari tambahan biaya atau beban pada laba rugi.

b. Tagihan Pajak Penghasilan

Tagihan pajak terdiri dari klaim pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang sebagian telah diselesaikan oleh Kelompok Usaha melalui proses keberatan dan banding (Catatan 43c).

c. Surat Ketetapan dan Tagihan Pajak

Kelompok Usaha telah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut:

Perusahaan

1. Pada tanggal 15 Februari 2008, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 23, pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2006 masing-masing sebesar Rp33.041.431.422, Rp46.490.286.487, Rp26.629.145.251 dan USD650.237. Pada tahun 2008, Perusahaan telah membayar seluruh kurang bayar pajak dan pajak terutang tersebut. Selanjutnya Perusahaan menyampaikan surat keberatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat kurang bayar dan pajak terutang untuk seluruh pajak tersebut. Pembayaran atas SKPKB yang disampaikan surat keberatannya, diakui Perusahaan sebagai bagian dari Tagihan Pajak.

43. TAXATION (Continued)

Under Regulation No. 194/PMK.03/2012 dated December 6, 2012, effective January 1, 2013, the Ministry of Finance issued a regulation for first generation CCoW holders, which include Arutmin and KPC, that governs procedures of collection, remittance and reporting of Sales Tax, treatment of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods. Under this regulation, first generation CCoW holders must collect, remit and report Sales Tax for its acquisition of specific services identified in the regulation. The regulation further stipulates that delivery of VAT-able goods and/or services by Taxable Entrepreneur to contractors of first generation CCoW holders, VAT and Sales Tax on Luxury Goods payables are not collected. Arutmin and KPC recognized the Sales Tax as part of additional costs or expenses in profit or loss.

b. Claims for Income Tax Refund

Claims for tax refund consist of claims based on the Tax Assessment Letters and Tax Collection Letters issued by the Directorate General of Tax, which have been partially settled by the Group through the process of objection and appeal (Note 43c).

c. Tax Assessments and Collection Letters

The Group received Tax Assessment Letters (SKP) and Tax Collection Letters (STP) as follows:

The Company

1. *On February 15, 2008, the Company received Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) relating to Income Tax article 23, article 26, Value-Added Tax and Corporate Income Tax for the fiscal year 2006 confirming underpayment of Rp33,041,431,422, Rp46,490,286,487, Rp26,629,145,251 and USD650,237, respectively. During 2008, the Company paid all those underpayments of taxes and tax payables. Subsequently, objection letters were issued claiming that there was no underpayment and tax payable for those taxes. Payments of SKPKB in respect of which objection letters have been issued, have been recognized as part of Claims for Tax Refund.*

43. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

Pada tanggal 17 Maret 2009, Kantor Pajak memutuskan menolak keberatan yang diajukan Perusahaan. Pada tanggal 12 Juni 2009, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2011, Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima sebagian permohonan banding Perusahaan atas Pajak Penghasilan Badan tetapi menolak permohonan banding Perusahaan atas Pajak Penghasilan pasal 23, 26 dan Pajak Pertambahan Nilai. Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan menerima Salinan Putusan Pengadilan atas keputusannya pada tanggal 31 Januari 2011. Pada tanggal 7 Juni 2011, Kantor Pajak mentransfer dana ke Perusahaan sebesar Rp27.135.051.653 (setara dengan USD3.001.333) sesuai dengan putusan Pengadilan Pajak yang menerima sebagian permohonan banding Perusahaan atas Pajak Penghasilan Badan.

Pada tanggal 8 Juli 2011, Perusahaan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terkait putusan Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan pasal 26 tahun 2006 sebesar Rp22.391.418.016 dan menerima sebagian putusan pengadilan sebesar Rp24.098.868.471, dan jumlah tersebut telah dibebankan pada bulan Desember 2011. Perusahaan tidak melakukan Peninjauan Kembali terkait putusan Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2006. Tagihan pajak tahun 2006 yang sebagian telah diselesaikan keputusannya atau yang tidak dilanjutkan ke proses peninjauan kembali sebesar Rp59.670.576.673 telah dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2011.

Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali dari Pengadilan Pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait putusan Pengadilan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2006. Pada tanggal 9 September 2011, Perusahaan menyampaikan surat Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Pada tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan dan penyerahan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dari Pengadilan Pajak yang menerangkan bahwa, pada tanggal 2 Mei 2013, MA telah menolak Peninjauan Kembali tersebut.

43. TAXATION *(Continued)*

On March 17, 2009, the Tax Office decided to decline the objection issued by the Company. On June 12, 2009, the Company filed its appeal at the Tax Court. Subsequently, on January 31, 2011, the Tax Court decided to partially grant the Company's appeal on Corporate Income Tax, but denied the appeal for Income Tax articles 23, 26 and Value-Added Tax. On April 20, 2011, the Company received a copy of the decision pronounced on January 31, 2011. On June 7, 2011, the Tax Office transferred funds to the Company in the amount of Rp27,135,051,653 (equivalent to USD3,001,333) in respect of the Tax Court ruling on the partially successful tax appeals made by the Company in regard to Corporate Income Tax.

On July 8, 2011, the Company filed a Request for Review in respect of the Tax Court's decision relating to Income Tax under article 26 for the year 2006 amounting to Rp22,391,418,016 and partially received the court decision amounting to Rp24,098,868,471 that has been charged in December 2011. The Company did not request a Review in respect of the Tax Court's decision relating to Income Tax article 23 and Value-Added Tax for fiscal year 2006. Claims for tax refund for year 2006 that have been partially settled or for which judicial review has not been requested, amounting to Rp59,670,576,673 have been charged to the consolidated statement of income in 2011.

In August 2011, the Company received a Notice of Request for Review and submission of the Memorandum of Review from the Tax Court delivered by the Directorate General of Tax in relation to the decision of the Tax Court on Corporate Income Tax for the year 2006. On September 9, 2011, the Company submitted a Counter-Memorandum of Review.

In August 27, 2014, the Company received a Letter Notice for Notification and submission of a Copy of the Decision from Supreme Court of the Republic of Indonesia delivered by Tax Court explains that, in May 2, 2013, the Supreme Court declined the Company Judicial Review.

43. PERPAJAKAN *(Lanjutan)*

2. Kantor Pajak melaksanakan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Perusahaan untuk tahun pajak 2007. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima hasil pemeriksaan tersebut.
3. Pada tanggal 25 April 2013, Perusahaan menerima STP dan SKPKB untuk tahun pajak 2011 atas Pajak Penghasilan pasal 15, pasal 21, pasal 26, dan PPN, serta menyepakati dan menerima masing-masing sebesar Rp5.168.337, Rp9.048.613.597, Rp173.833.536.886 dan Rp6.046.975.754 dengan jumlah denda administrasi sebesar Rp61.190.004.309. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2013, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp104.827.931.307. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp92.946.442.988.

Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) untuk Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2011 sebesar USD26.680.324 yang diakui sebagai bagian dari tagihan pajak penghasilan.

4. Pada tanggal 23 September 2014, Perusahaan menerima SKPKB terkait dengan kurang bayar Pajak Penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2012 dan denda administrasi masing-masing sebesar Rp388.148.692.865 dan Rp176.136.605.371.

43. TAXATION *(Continued)*

2. The Tax Office conducted a tax examination of the Company's corporate income tax for fiscal year 2007. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not yet received the results of the examination.
3. On April 25, 2013, the Company received STPs and SKPKBs relating to income tax article 15, article 21, article 26 and Value-Added Tax for the fiscal year 2011, and agreed and accepted the underpayments of Rp5,168,337, Rp9,048,613,597, Rp173,833,536,886 and Rp6,046,975,754, respectively, with total administration fines of Rp61,190,004,309. Furthermore, on May 8, 2013, the Company received Tax Overpayment Refund Instruction (SPMKP) amounting Rp104,827,931,307. As of December 31, 2014, the Company has paid a total amount of Rp92,946,442,988.

The Company also received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for corporate income tax for fiscal year 2011 amounting to USD26,680,324, which is recognized as part of claims for income tax refund.

4. On September 23, 2014, the Company received SKPKB related to 2012 article 26 Income Tax Underpayment of principal and administration penalty amounting to Rp388,148,692,865 and Rp176,136,605,371.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)**

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

PT Arutmin Indonesia

Jenis Pajak dan Masa Fiskal	Total Ketetapan dalam/ Amount of Assessment in		Pembayaran/ Payments (USD)	Jumlah Keberatan (Dalam USD atau setara)/ Amount in Dispute (In USD or its Equivalent)	Dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014 (Setara dengan USD)/ Accrual as of December 31, 2014 (Equivalent in USD)	Type of Tax and Fiscal Period
	(Rupiah)	(USD)				
<u>Pajak Penghasilan Badan</u>						
2007 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	24.806.347	19.827	-	24.786.520	2007 (Underpayment and
2008 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	6.256.747	822.504	-	5.434.243	2008 (Underpayment and
2009 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	22.896.578	-	22.471.867	424.711	2009 (Underpayment and
2010 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	29.182.017	-	28.324.903	857.114	2010 (Underpayment and
2011 (Bunga)	-	4.554.000	1.419.188	-	3.134.812	2011 (Interest)
<u>Pajak Pertambahan Nilai</u>						
Januari-Desember 2007	23.892.135.409	-	539.622	-	1.391.595	January-December 2007
Agustus-December 2009	10.396.063.421	-	-	435.379	400.317	August-December 2009
Januari-Desember 2010	22.321.566.468	-	-	1.517.698	276.640	January-December 2010
<u>Pajak Penghasilan Pasal 25</u>						
April-Mei 2011	-	18.985.711	18.080.139	905.572	-	April-May 2011
Januari-Desember 2012	-	205.217.113	16.300.000	6.304.719	-	January-December 2012

43. TAXATION (Continued)

PT Arutmin Indonesia

PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

43. TAXATION (Continued)

Jenis Pajak dan Masa Fiskal	Total Ketetapan dalam/ Amount of Assessment in		Pembayaran/ Payments (USD)	Jumlah Keberatan (Dalam USD atau setara)/ Amount in Dispute (In USD or its Equivalent)	Dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014 (Setara dengan USD)/ Accrual as of December 31, 2014 (Equivalent in USD)	Type of Tax and Fiscal Period
	(Rupiah)	(USD)				
Januari-Februari 2013	-	29.318.425	-	29.318.425	-	January-February 2013
Agustus-Desember 2013	-	4.572.550	-	-	130.132	August-December 2013
Januari-Desember 2014	-	11.232.662	-	-	719.794	January-December 2014
Keterlambatan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 25 Maret-April 2013	-	57.580	-	-	57.580	Late payment of Income Tax Article 25 March-April 2013
<u>Pajak Penghasilan</u>						<u>Withholding Taxes</u>
Pajak Penghasilan Pasal 15	10.458.828.090	-	320.930	-	528.154	Withholding Tax Article 15
Pajak Penghasilan Pasal 21	11.058.530	-	906	-	-	Withholding Tax Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.431.576.517	-	139.508	-	782.632	Withholding Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 26	6.126.268.418	-	502.599	-	-	Withholding Tax Article 26
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	12.313.506	-	1.008	-	-	Withholding Tax Article 4(2)

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)**

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

PT Kaltim Prima Coal

<u>Jenis Pajak dan Masa Fiskal</u>	<u>Total Ketetapan dalam/ Amount of Assessment in</u>		<u>Pembayaran/ Payments (USD)</u>	<u>Jumlah Keberatan (Dalam USD atau setara)/ Amount in Dispute (In USD or its Equivalent)</u>	<u>Dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014 (Setara dengan USD)/ Accrual as of December 31, 2014 (Equivalent in USD)</u>	<u>Type of Tax and Fiscal Period</u>
	<u>(In Rupiah)</u>	<u>(USD)</u>				
<u>Pajak Penghasilan Badan</u>						
<u>Corporate Income Tax</u>						
2006 (Kurang Bayar dan Bunga)	63.760.232.089	-	-	5.125.421	5.125.421	2006 (Underpayment and Interest)
(4) 2011 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	134.105.502	-	134.105.502	-	2011 (Underpayment and Interest)
2012 (Kurang Bayar, Bunga dan Pasal 25)	-	3.339.915	3.339.915	-	-	2012 (Underpayment, Interest and Article 25)
(5) 2009 (Kurang Bayar, Bunga dan Pasal 21, 23 dan 26)	-	50.516.581	12.247.849	49.268.732	38.268.732	2009 (Underpayment, Interest and Articles 21, 23 and 26)
2008 (Kurang Bayar dan Bunga)	-	7.116.582	7.116.582	-	-	2008 (Underpayment and Interest)
<u>Pajak Pertambahan Nilai</u>						
<u>Value-Added Tax</u>						
(3) 2006 - Juni 2010	344.263.410.842	-	-	27.673.908	-	2006 - June 2010

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)**

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

43. TAXATION (Continued)

Jenis Pajak dan Masa Fiskal	Total Ketetapan dalam/ Amount of Assessment in		Pembayaran/ Payments (USD)	Jumlah Keberatan (Dalam USD atau setara)/ Amount in Dispute (In USD or its Equivalent)	Dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014 (Setara dengan USD)/ Accrual as of December 31, 2014 (Equivalent in USD)	Type of Tax and Fiscal Period
	(In Rupiah)	(USD)				
(2) Pajak Penghasilan Pasal 25						
Desember 2010	-	8.154.943	-	-	-	December 2010
Januari-Maret 2011	-	25.104.933	24.001.758	-	-	January-March 2011
April-Mei 2011	-	34.503.739	32.855.407	1.648.332	-	April-May 2011
Februari-April dan Juni-Oktober	-	109.099.551	300.000	108.799.551	-	February-April and June-October
November dan Desember 2012	-	52.099.320	-	1.421.477	-	November and December 2012
Mei dan Desember 2012, dan Januari dan Februari 2013	-	42.115.680	-	42.115.680	-	May and December 2012, and January and February 2013
<u>Pajak Penghasilan</u>						
<u>Withholding Taxes</u>						
2009 Pajak Penghasilan Pasal 21	211.419.768	-	17.312	-	-	2009 Withholding Tax Article 21
2009 Pajak Penghasilan Pasal 23	9.646.513.213	-	796.673	795.736	-	2009 Withholding Tax Article 23
2009 Pajak Penghasilan Pasal 26	42.808.513.153	-	3.660.099	-	-	2009 Withholding Tax Article 26

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- (1) Pada tanggal 23 September 2014, Arutmin menerima SKPKB terkait dengan kurang bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2009 dan denda administrasi masing-masing sebesar USD15.470.661 dan USD7.425.917. Arutmin telah setuju dan telah mencadangkan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD286.967 dan 137.744. Selanjutnya, pada bulan Agustus dan September 2014, Arutmin menerima lima (5) SKPKB dan satu (1) STP terkait dengan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai dan denda administrasi masing-masing sebesar Rp6.188.133.005 (USD506.726) dan Rp4.207.930.416 (USD344.574). Arutmin telah setuju dan mencadangkan kurang bayar pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD203.263 dan USD197.054.

Pada tanggal 11 Desember 2014, Arutmin mengirimkan surat tanggapan keberatan atas temuan Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan sisa kurang bayar pokok yang belum dibayar dan denda administrasinya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu tanggapan dari Kantor Pajak.

- (2) Pada tanggal 5 September 2013, Arutmin dan KPC, bersama-sama dengan perusahaan batubara lain di Indonesia yang termasuk dalam PKP2B "generasi pertama", mengadakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pembayaran angsuran pasal 25 untuk pemegang PKP2B generasi pertama. Berdasarkan pertemuan tersebut, para pihak sepakat bahwa pemegang PKP2B generasi pertama akan membayar angsuran bulanan pasal 25 dihitung sebesar 1% dari peredaran usaha ditambah pembayaran berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sendiri ("top-up"). Selanjutnya, sehubungan dengan STP yang telah diterbitkan, pembatalan akan dilakukan oleh Kantor Pajak untuk jumlah pokok, sepanjang jumlah pokok tidak dikreditkan sebagai Pajak Penghasilan pasal 25 atau sudah rampung dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 29 di SPT Tahunan PPh Badan, sedangkan pembatalan sanksi administrasi bunga akan ditinjau ulang bersama Kepala Bidang Keberatan dan Banding. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin dan KPC sedang menunggu pembatalan STP dari Kantor Pajak untuk jumlah pokok yang belum dibatalkan dan hasil tinjau ulang dari Kepala Bidang Keberatan dan Banding untuk pembatalan sanksi administrasi bunga.

43. TAXATION (Continued)

- (1) On September 23, 2014, Arutmin received SKPKB related to 2009 Corporate Income Tax underpayment of principal and administration fines amounting to USD15,470,661 and USD7,425,917, respectively. Arutmin has agreed and accrued principal and administration fine amounting to USD286,967 and 137,744, respectively. Furthermore, in August and September 2014, Arutmin received five (5) SKPKBs and one (1) STP related to Value-Added Tax underpayment of principal and administration fines amounting to Rp6,188,133,005 (USD506,726) and Rp4,207,930,416 (USD344,574) respectively. Arutmin has agreed and accrued principal and administration fine amounting to USD203,263 and USD197,054, respectively.

On December 11, 2014, Arutmin sent its response letter objecting the findings of the Tax Office relating to the remaining unpaid principal underpayment and administration fines. As of the completion date of the financial statements, Arutmin is awaiting response from the Tax Office.

- (2) On September 5, 2013, Arutmin and KPC, together with the other coal companies in Indonesia that have entered into "first generation" CCoWs, held a meeting with the Directorate General of Tax regarding the installment payment of the article 25 for the first generation CCoW holders. Based on the meeting, the parties agreed that the first generation CCoW holders will pay the monthly installment of article 25 calculated at 1% of gross operating revenue plus a voluntary "top-up" to be calculated by the taxpayer. Furthermore, in connection with the STPs that have been issued, cancellation will be made by the Tax Office for the principal amount, as long as the principal amount has not been credited as Income Tax article 25 or has completed in calculating Income Tax article 29 on the Annual Corporate Income Tax Return, while the cancellation of the interest administration fines will be reviewed further by the Head of Complaints and Appeals. As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC and Arutmin are waiting for the cancellation of the STPs issued for the principal amount from the Tax Office and the review results of the Head of Complaints and Appeals for the cancellation of the interest administration fines.

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- (3) Pada tanggal 28 Juli 2010 dan 25 Agustus 2010, KPC menerima Surat Himbauan Pemenuhan PPN impor sehubungan dengan terdapatnya kekurangan penyetoran atas PPN impor untuk tahun pajak 2006 sampai dengan Juni 2010 sebesar Rp344.263.410.842. Pada tanggal 5 Oktober 2010, KPC mengirim surat balasan kepada Kantor Pajak, dimana KPC menjelaskan bahwa KPC memiliki fasilitas pembebasan PPN impor berdasarkan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (DPPMB) serta sudah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PKP2B. Dalam hal, Kantor Pajak mengharuskan KPC untuk membayar PPN impor, maka KPC akan mengkompensasikan antara PPN impor dengan Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia.
- (4) Pada tahun 2011, KPC memutuskan untuk menanggung biaya pengupasan selama periode produksi hanya jika secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata rasio pengupasan. Laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali dan akibatnya, KPC mengurangi kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar USD134.105.502 dengan utang Pajak Penghasilan Badan tahun 2011. Manajemen berkeyakinan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 12 Juni 2012, KPC menerima surat himbauan dari Kantor Pajak sehubungan dengan selisih Pajak Penghasilan Badan tahun 2011. Berdasarkan surat tersebut, Kantor Pajak meminta KPC secara sukarela untuk merevisi Surat Pemberitahuan (SPT) atas Pajak Penghasilan Badan sehubungan dengan selisih tersebut sebesar USD134.105.502. Pada tanggal 19 Juli 2012, KPC menerima surat kedua dari Kantor Pajak meminta untuk merevisi SPT 2011. Pada tanggal 9 Agustus 2012, KPC menanggapi surat dari Kantor Pajak yang menyatakan bahwa selisih tersebut terdiri dari biaya pengupasan tanggahan yang tidak termasuk dalam koreksi fiskal tahun 2011, dimana manajemen berkeyakinan jumlah tersebut merupakan beban operasi yang terjadi yang dapat dibebankan ke penghasilan kena pajak. Pada tanggal 4 September 2012, Kantor Pajak memberi tanggapan yang meminta pembetulan SPT tahun 2011. KPC juga menerima pemberitahuan dari Kantor Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak tahun pajak 2009 sampai tahun 2011. Sebagai akibatnya, manajemen menunggu hasil dari pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh Kantor Pajak untuk tahun pajak 2009 sampai 2011 sebelum mengambil tindakan selanjutnya terhadap surat tertanggal 4 September 2012.

43. TAXATION (Continued)

- (3) On July 28, 2010 and August 25, 2010, KPC received tax letters on VAT import regarding its obligation in respect of underpayment of VAT import for the fiscal years 2006 until June 2010 amounting to Rp344,263,410,842. On October 5, 2010, KPC sent letters in reply to the Tax Office, wherein KPC explained that they have exemption facilities for VAT import based on the letter from Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) and Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (DPPMB) and as arranged in CCoW. In case the Tax Office compels KPC to pay the VAT import, KPC intends to offset the VAT import against Royalty (Coal Production Proceeds) Payables to GOI.
- (4) In 2011, KPC decided to defer stripping costs incurred during production only if these were significantly higher than the average stripping ratio. The prior periods' financial statements have been restated to reflect this, and, as a consequence, KPC offset prior periods' overpayment of its Corporate Income Tax amounting to USD134,105,502 with the 2011 Corporate Income Tax payable. The management believed this is based on prevailing Indonesian tax regulations. On June 12, 2012, KPC received a letter from the Tax Office regarding the difference in the Corporate Income Tax in 2011. Based on the letter, the Tax Office requested KPC to voluntarily revise its Corporate Income Tax Return (SPT) due to the difference, which amounted to USD134,105,502. On July 19, 2012, KPC received a second letter from the Tax Office requesting it to revise the 2011 SPT. On August 9, 2012, KPC responded to the letters from the Tax Office stating that the difference pertains to deferred stripping costs that were not included in the fiscal correction in 2011, which in management's belief are valid operating costs that are chargeable against taxable income. On September 4, 2012, the Tax Office responded requesting again the revision of the 2011 SPT. KPC received notification of regular tax audits from the Tax Office for the years 2009 to 2011. As a result, the management is waiting the outcome of the regular tax audits from Tax Office for the years 2009 to 2011 before taking further actions in respect to the letter dated September 4, 2012.

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- (5) Pada tanggal 27 Agustus 2014, KPC menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2009. Berdasarkan SKPKB tersebut, kurang bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2009 dan denda administrasinya masing-masing sebesar USD34.132.825 dan USD16.383.756. KPC telah setuju dan membayar pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD843.142 dan USD404.707. Pada tanggal 1 Desember 2014, KPC mengirimkan surat tanggapan keberatan atas temuan Kantor Pajak yang berkaitan dengan kurang bayar pokok dan denda administrasi yang belum dibayar, dimana Direktorat Jenderal Pajak menaggapinya pada tanggal 22 Desember 2014 bahwa surat keberatan yang dikirim diluar periode tiga (3) bulan. Akibatnya, KPC melakukan pembayaran uang muka cicilan sebesar USD1,0 juta dan USD11,0 juta masing-masing pada bulan November dan Desember 2014, dan sisanya diakui sebagai bagian dari "Utang Pajak". Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang dalam proses mempersiapkan surat keberatan.
- (6) Pada tanggal 23 Oktober 2014, KPC menerima Surat Pemberitahuan tertanggal 10 Oktober 2014 dari Kantor Pajak terkait hasil pemeriksaan untuk tahun fiskal 2012. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tersebut, terdapat kurang bayar pokok pajak penghasilan badan dan denda administrasi masing-masing sebesar USD25,53 juta dan USD11,74 juta. Pada bulan November 2014, KPC telah membayar uang muka cicilan sebesar USD5,0 juta dan diakui pada akun "Aset lancar lainnya". Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang dalam proses mempersiapkan surat tanggapannya.

PT Dairi Prima Mineral

Pada tanggal 5 Mei 2010, Dairi menerima SKP yang menyatakan PPN Masukan tahun 2009 sebesar Rp9,9 miliar dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Sampai dengan tanggal pelaporan laporan keuangan konsolidasian Dairi telah mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2010 dan 2011. PPN lebih bayar ini dicatat dalam akun perkiraan "Aset tidak lancar lainnya" pada laporan keuangan konsolidasian.

43. TAXATION (Continued)

- (5) On August 27, 2014, KPC received SKPKB fiscal year 2009 for Corporate Income Tax. Based on the SKPKB, there was a 2009 Corporate Income Tax underpayment with principal and administration fines amounting to USD34,132,825 and USD16,383,756, respectively. KPC has agreed and paid principal and administration fines amounting to USD843,142 and USD404,707, respectively. On December 1, 2014, KPC sent its response letter objecting to the findings of the Tax Office relating to the unpaid principal and administration fines, to which the Directorate General of Tax responded on December 22, 2014 that the objection letter was sent outside the prescriptive period of three (3) months. As a result, KPC made advance payments in the amount of USD1.0 million and USD10.0 million in November and December 2014, respectively, and recognized the remainder as part of "Taxes payable". As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC is in the process of preparing its objection letter.
- (6) On October 23, 2014, KPC received a Notification of examination result of the Tax Office dated October 10, 2014 from the regular tax audits for the fiscal year 2012. Based on the Notification Letter, there was a Corporate income tax underpayment of principal and administration fine amounting to USD25.53 million and USD11.74 million, respectively. In November 2014, KPC made an advance payment of USD5.0 million and recognized under "Other current assets". As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC is in the process of preparing its response letter.

PT Dairi Prima Mineral

On May 5, 2010, Dairi received the SKP stating that VAT Input for the year 2009 amounting to Rp9.9 billion that could be compensated to the next taxable period.

As of completion date of the consolidated financial statements, Dairi has also filed VAT refund for the fiscal years 2011 and 2010. The over payment of VAT is recorded as part of "Other non-current assets" in the consolidated statements of financial position.

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

PT Multi Daerah Bersaing

Pada tanggal 6 September 2012, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), Entitas Anak, menerima Surat Pemeriksaan Pajak dengan nomor Surat No. ST-105/WPJ.04/RIK.SIS/2012 terkait dengan lebih bayar pajak penghasilan sejumlah Rp14 miliar untuk tahun buku 2011.

Pada tanggal 25 Juni 2013 dan 16 Juli 2013, MDB telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas pajak penghasilan lebih bayar sejumlah Rp14 miliar dan SPMKP untuk membayarkan kelebihan pembayaran penghasilan tersebut. Pengembalian diterima tanggal 25 Juli 2013.

d. Utang Pajak

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bunga atas keterlambatan pembayaran pajak	27.246.972	35.959.264
Pajak Penjualan	22.377.181	5.028.959
Pajak Pertambahan Nilai	4.526.240	3.919.573
Pajak Bumi dan Bangunan	31.387	8.282
Pajak Penghasilan:		
Pajak penghasilan luar negeri	180.148.275	95.056.833
Pajak penghasilan badan	25.443.045	11.756.263
Pajak penghasilan dalam negeri	39.879.863	12.217.696
Pajak penghasilan karyawan	6.812.178	3.274.502
Angsuran bulanan atas pajak penghasilan badan	10.468.699	3.109.692
Pajak final	13.223	22.837
Total	<u>316.947.063</u>	<u>170.353.901</u>

e. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pajak kini		
Perusahaan	-	-
Entitas Anak	(60.931.387)	(54.776.852)
Total pajak kini	<u>(60.931.387)</u>	<u>(54.776.852)</u>
Pajak tangguhan		
Perusahaan	(96.705.526)	42.415.282
Entitas Anak	1.750.669	97.497.006
Pajak tangguhan neto	<u>(94.954.857)</u>	<u>139.912.288</u>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	<u>(155.886.244)</u>	<u>85.135.436</u>

43. TAXATION (Continued)

PT Multi Daerah Bersaing

On September 6, 2012, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), a Subsidiary, received Tax Examination Letter No. ST-105/WPJ.04/RIK.SIS/2012 for overpayment of income taxes amounting to Rp14 billion for fiscal year 2011.

On June 25, 2013 and July 16, 2013, MDB has received Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) for income tax overpayment amounting to Rp14 billion and SPMKP to pay the income tax overpayment. The refund was received on July 25, 2013.

d. Taxes Payable

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Bunga atas keterlambatan pembayaran pajak	27.246.972	35.959.264
Pajak Penjualan	22.377.181	5.028.959
Pajak Pertambahan Nilai	4.526.240	3.919.573
Pajak Bumi dan Bangunan	31.387	8.282
Pajak Penghasilan:		
Pajak penghasilan luar negeri	180.148.275	95.056.833
Pajak penghasilan badan	25.443.045	11.756.263
Pajak penghasilan dalam negeri	39.879.863	12.217.696
Pajak penghasilan karyawan	6.812.178	3.274.502
Angsuran bulanan atas pajak penghasilan badan	10.468.699	3.109.692
Pajak final	13.223	22.837
Total	<u>316.947.063</u>	<u>170.353.901</u>

e. Income Tax Benefit (Expense)

Income tax benefit (expense) of the Group was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Pajak kini		
Perusahaan	-	-
Entitas Anak	(60.931.387)	(54.776.852)
Total pajak kini	<u>(60.931.387)</u>	<u>(54.776.852)</u>
Pajak tangguhan		
Perusahaan	(96.705.526)	42.415.282
Entitas Anak	1.750.669	97.497.006
Pajak tangguhan neto	<u>(94.954.857)</u>	<u>139.912.288</u>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	<u>(155.886.244)</u>	<u>85.135.436</u>

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

43. TAXATION (Continued)

Rekonsiliasi antara rugi komersial dan rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between accounting loss and fiscal loss for the years ended December 31, 2014 and 2013 was as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Rugi konsolidasian sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	(310.018.420)	(745.238.913)	Consolidated loss before income tax benefit (expense)
Dikurangi: Rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Entitas Anak	<u>(358.968.488)</u>	<u>(381.818.700)</u>	Less: Subsidiaries' loss before income tax benefit (expense)
Laba (rugi) Perusahaan sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	<u>48.950.068</u>	<u>(363.420.213)</u>	The Company's income (loss) before income tax benefit (expense)
Beda temporer			Temporary differences
Amortisasi biaya pinjaman dan keuangan	78.173.055	90.693.169	Amortization of debt and financing costs
Penyusutan aset tetap	(56.547)	912.235	Depreciation of fixed assets
Penyisihan untuk imbalan pasti pascakerja	54.298	201.525	Provision for post-employment benefits
Penyusutan aset sewa	138.210	104.962	Depreciation of leased assets
Pembayaran sewa pembiayaan	<u>(70.972)</u>	<u>(85.718)</u>	Payments of finance lease
Beda temporer neto	<u>78.238.044</u>	<u>91.826.173</u>	Net temporary differences
Beda tetap			Permanent differences
Beban bunga	176.317.054	119.945.392	Interest expense
Pajak penghasilan dan denda pajak	34.615.919	17.511.006	Income tax and tax penalty
Sumbangan dan jamuan	211.196	556.963	Donation and entertainment
Komunikasi	41.804	43.798	Communication
Pendapatan bunga	(14.607)	(17.164)	Interest income
Lain-lain	<u>124.017.506</u>	<u>12.044.834</u>	Others
Beda tetap neto	<u>335.188.872</u>	<u>150.084.829</u>	Net permanent differences
Penghasilan kena pajak (rugi fiskal) sebelum kompensasi rugi fiskal yang digunakan	462.376.984	(121.509.211)	Taxable income (fiscal loss) before applied fiscal loss carry-forward
Dikurangi: Kompensasi rugi fiskal yang digunakan			Less: Applied fiscal loss carry-forward
Tahun 2011	(303.747.114)	-	Year 2011
Tahun 2012	(136.509.356)	-	Year 2012
Tahun 2013	<u>(22.120.514)</u>	<u>-</u>	Year 2013
Penghasilan kena pajak (Rugi fiskal) - neto	<u>-</u>	<u>(121.509.211)</u>	Taxable income (Fiscal loss) - net
Beban Pajak Penghasilan Perusahaan	<u>-</u>	<u>-</u>	Income Tax Expense for the Company

Penghasilan kena pajak (rugi fiskal) hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan).

Taxable income (fiscal loss) from reconciliation will be used as a basis of Corporate Income Tax filling (SPT PPh Badan).

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku yang dihitung dari rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dan manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Laba (rugi) Perusahaan sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	48.950.068	(363.420.213)
Manfaat (beban) pajak penghasilan menurut tarif pajak yang berlaku sebesar 20%	(9.790.014)	72.684.043
Penurunan nilai kompensasi rugi fiskal	(19.877.738)	-
Pengaruh pajak penghasilan dengan tarif 20% atas beda tetap	(67.037.774)	(30.016.966)
Koreksi penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain	-	(251.795)
Manfaat (beban) pajak penghasilan:		
Perusahaan	(96.705.526)	42.415.282
Entitas Anak	(59.180.718)	42.720.154
Neto	(155.886.244)	85.135.436

43. TAXATION (Continued)

Reconciliation between income tax benefit (expense) calculated by applying the applicable tax rate to loss before income tax benefit (expense) and income tax benefit (expense) as shown in the consolidated statements of comprehensive income was as follows:

The Company's income (loss) before income tax benefit (expense)
Income tax benefit (expense) at prevailing tax rate of 20%
Impairment loss on fiscal loss carry-forward
Tax effects at tax rate of 20% on permanent differences
Correction on allowance for impairment loss on other receivables
Income tax benefit (expense):
Company
Subsidiaries
Net

Perhitungan manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Calculation of deferred income tax benefit (expense) of the Group for the years ended December 31, 2014 and 2013 was as follows:

	2014	2013	
Laba atau rugi			Profit or loss
Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan Perusahaan			Deferred income tax benefit (expense) for the Company
Amortisasi biaya pinjaman dan keuangan	15.634.611	18.138.634	Amortization of debt and financing costs
Penyisihan imbalan pasti pasti pascakerja	10.860	40.305	Provision for post-employment benefits
Transaksi sewa pembiayaan	13.447	3.849	Finance lease transactions
Penyusutan aset tetap	(11.309)	182.447	Depreciation of fixed assets
Kompensasi rugi fiskal	(112.353.135)	24.301.842	Fiscal loss carry-forward
Penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain	-	(251.795)	Allowance for impairment loss on other receivables
Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan Perusahaan - neto	(96.705.526)	42.415.282	Deferred income tax benefit (expense) for the Company - net
Manfaat pajak penghasilan tangguhan Entitas Anak	1.750.669	97.497.006	Deferred income tax benefit for Subsidiaries
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan - Neto	(94.954.857)	139.912.288	Deferred Income Tax Benefit (Expense) - Net

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

43. PERPAJAKAN (Lanjutan)

43. TAXATION (Continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred tax

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets and liabilities of the Group as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Aset pajak tangguhan -			Deferred tax assets -
Perusahaan:			Company:
Amortisasi biaya pinjaman dan keuangan	89.132.032	73.497.421	Amortization of debt and financing costs
Liabilitas imbalan pasti pascakerja	438.678	427.818	Post-employment benefit obligations
Transaksi sewa pembiayaan	38.008	24.561	Finance lease transactions
Kompensasi rugi fiskal	-	112.353.135	Fiscal loss carry-forward
Sub-total	<u>89.608.718</u>	<u>186.302.935</u>	Sub-total
Liabilitas pajak tangguhan -			
Perusahaan:			Deferred tax liability - Company:
Aset tetap	<u>(35.107)</u>	<u>(23.798)</u>	Fixed assets
Aset pajak tangguhan neto - Perusahaan	89.573.611	186.279.137	Net deferred tax assets - Company
Aset pajak tangguhan - Entitas Anak	<u>99.661.816</u>	<u>103.231.066</u>	Deferred tax assets - Subsidiaries
Aset Pajak Tangguhan - Neto	<u>189.235.427</u>	<u>289.510.203</u>	Deferred Tax Assets - Net
Liabilitas pajak tangguhan - Entitas Anak	<u>(76.390.366)</u>	<u>(103.072.761)</u>	Deferred tax liabilities - Subsidiaries
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	<u>(76.390.366)</u>	<u>(103.072.761)</u>	Deferred Tax Liabilities - Net

Pada tanggal dan 31 Desember 2014 dan 2013, aset pajak tangguhan Leap-Forward Resources Ltd. diklasifikasikan sebagai "Kelompok Lepas yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual" (Catatan 13).

As of December 31, 2014 and 2013, deferred tax assets of Leap-Forward Resources Ltd. were reclassified to "Disposal Group Classified as Held for Sale" (Note 13).

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat direalisasikan pada periode mendatang.

Management believes that the deferred tax assets will be recoverable in future periods.

44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Related Parties

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Relasi/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transactions
PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, IndoCoal Resources (Cayman) Limited, PT IndoCoal Kalsel Resources, dan/and PT IndoCoal Kaltim Resources	Entitas pengendalian bersama/ Jointly controlled entities	Piutang/utang akibat efek metode konsolidasian proporsional/ Receivables/payables due to the effect of proportionate consolidation method.

**44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)**

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Relasi/ Nature of Relationship	Sifat Transaksi/ Nature of Transactions
PT Petromine Energy Trading	Perusahaan afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Pembelian bahan bakar dan pinjaman untuk modal kerja/ <i>Purchases of fuel and loan for working capital</i>
PT Bakrie Capital Indonesia	Perusahaan afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Beban-beban tertentu perusahaan afiliasi/ entitas asosiasi/entitas induk yang dibayar di muka oleh Kelompok Usaha/ <i>Certain expenses paid in advance by the Group in behalf of affiliates/associates/parent</i>
PT Artha Widya Persada dan/ <i>and</i> PT Visi Multi Artha	Entitas asosiasi/ <i>Associates</i>	
PT Darma Henwa Tbk	Entitas asosiasi/ <i>Associate</i>	Uang muka untuk alat berat dan modal kerja dan utang untuk kontraktor pertambangan/ <i>Advances for acquisitions of heavy machinery and working capital and payables as mining contractor</i>
PT Citra Kusuma Perdana	Perusahaan afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Biaya jasa untuk penggunaan aset tertentu dari afiliasi/ <i>Service fees for use of certain assets of the affiliate</i>
Dana Pensiun Kaltim Prima Coal	Perusahaan afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Administrasi untuk program pensiun imbalan pasti/ <i>Administration to defined benefit pension plan</i>

Perusahaan afiliasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham dan/atau anggota direksi dan dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan, atau entitas yang memiliki pengaruh signifikan atau pengendalian bersama atas Perusahaan atau entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau pengendalian bersama.

Karena memiliki sifat hubungan tersebut, hal ini memungkinkan syarat dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi menjadi tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

a. Piutang karyawan

PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan PT Bumi Resources Investments (BRI) memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para karyawan. Pinjaman ini akan dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Pinjaman ini disajikan sebagai bagian dari "Piutang Lain-Lain" dan "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 10 dan 21).

The affiliates are either under common control of the same shareholders and/or same members of the board of directors and board of commissioners as the Company, or entities that have significant influence or joint control over the Company or entities over which the Company has significant influence or joint control.

Because of these relationships, it is possible that the terms of transactions are not the same as those that would result from transactions between third parties.

Transactions with Related Parties

a. Employee receivables

PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia (Arutmin) and PT Bumi Resources Investment (BRI) granted non-interest bearing loans to their employees. The loans will be collected through monthly salary deductions. These loans are presented as part of "Other Receivables" and "Other Non-current Assets" in the consolidated statements of financial position (Notes 10 and 21).

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

**44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)**

b. Piutang pihak berelasi

b. Due from related parties

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Entitas pengendalian bersama			Jointly controlled entities
PT Arutmin Indonesia	36.524.486	35.748.608	PT Arutmin Indonesia
PT Kaltim Prima Coal	6.395.898	33.836.553	PT Kaltim Prima Coal
IndoCoal Resources (Cayman) Limited	207.452	195.541	IndoCoal Resources (Cayman) Limited
PT IndoCoal Kassel Resources	4.748	3.925	PT IndoCoal Kassel Resources
PT IndoCoal Kaltim Resources	-	3.851	PT IndoCoal Kaltim Resources
Entitas asosiasi			Associates
PT Visi Multi Artha	2.725.901	2.729.350	PT Visi Multi Artha
PT Artha Widya Persada	2.540.326	2.543.776	PT Artha Widya Persada
Perusahaan afiliasi			Affiliates
PT Bakrie Capital Indonesia	98.242	104.764	PT Bakrie Capital Indonesia
PT Citra Kusuma Perdana	-	1.908.602	PT Citra Kusuma Perdana
Total	<u>48.497.053</u>	<u>77.074.970</u>	Total
Persentase terhadap Total Asset	<u>0,75%</u>	<u>1,10%</u>	Percentage to Total Assets

Piutang pihak berelasi merupakan piutang tanpa bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap.

Due from related parties represent non-interest-bearing receivables with no fixed repayment schedule.

c. Investasi pada saham (Catatan 15 dan 21)

c. Investments in shares (Notes 15 and 21)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas			Investments in associates under equity method
PT Newmont Nusa Tenggara	965.923.506	1.009.961.865	PT Newmont Nusa Tenggara
PT Darma Henwa Tbk	180.562.942	180.445.622	PT Darma Henwa Tbk
PT Visi Multi Artha	27.574	27.574	PT Visi Multi Artha
PT Artha Widya Persada	27.574	27.574	PT Artha Widya Persada
Total	<u>1.146.541.596</u>	<u>1.190.462.635</u>	Total
Persentase terhadap Total Asset	<u>17,64%</u>	<u>17,00%</u>	Percentage to Total Assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual			Available-for-sale financial assets
Konblo Bumi, Inc.	2.614.701	2.614.701	Konblo Bumi, Inc.
PT Coalindo Energy	55.995	55.995	PT Coalindo Energy
Westside Corporation Ltd.	933	933	Westside Corporation Ltd.
Total	<u>2.671.629</u>	<u>2.671.629</u>	Total
Persentase terhadap Total Asset	<u>0,04%</u>	<u>0,04%</u>	Percentage to Total Assets

44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)

44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

d. Utang usaha pihak berelasi (Catatan 23)

d. Trade payables to related parties (Note 23)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Dolar AS			US Dollar
PT Petromine Energy Trading	69.197.447	58.378.538	PT Petromine Energy Trading
PT Darma Henwa Tbk	21.975.138	17.535.382	PT Darma Henwa Tbk
Total	<u>91.172.585</u>	<u>75.913.920</u>	Total
Persentase terhadap Total Liabilitas	<u>1,26%</u>	<u>1,04%</u>	Percentage to Total Liabilities

e. Utang pihak berelasi

e. Due to related parties

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Dolar AS			US Dollar
Entitas pengendalian bersama			Jointly controlled entities
PT Arutmin Indonesia	52.870.448	34.355.785	PT Arutmin Indonesia
PT Kaltim Prima Coal	9.835.534	44.198.456	PT Kaltim Prima Coal
PT IndoCoal Kaltim Resources	23.222	-	PT IndoCoal Kaltim Resources
Perusahaan afiliasi			Affiliates
PT Petromine Energy Trading	5.086.378	-	PT Petromine Energy Trading
PT Bakrie Capital Indonesia	-	13.946	PT Bakrie Capital Indonesia
Total	<u>67.815.582</u>	<u>78.568.187</u>	Total
Persentase terhadap Total Liabilitas	<u>0,94%</u>	<u>1,08%</u>	Percentage to Total Liabilities

Utang pihak berelasi merupakan utang tanpa dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu pembayaran tetap.

Due to related parties represent non-interest bearing payables with no fixed repayment schedule.

f. Beban pokok pendapatan (Catatan 39)

f. Cost of revenues (Note 39)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
PT Petromine Energy Trading	438.398.420	552.612.487	PT Petromine Energy Trading
PT Darma Henwa Tbk	124.093.729	123.173.986	PT Darma Henwa Tbk
PT Citra Kusuma Perdana	19.533.938	10.993.125	PT Citra Kusuma Perdana
Total	<u>582.026.087</u>	<u>686.779.598</u>	Total
Persentase terhadap Total Beban Pokok Pendapatan	<u>25,32%</u>	<u>24,00%</u>	Percentage to Total Cost of Revenues

Jumlah untuk setiap pemasok seperti yang dinyatakan di atas adalah setelah pengaruh dari metode konsolidasian proporsional.

The amount for each supplier as stated above was after the effect of proportionate consolidation method.

44. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)

44. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)

g. Beban usaha (Catatan 40)

g. Operating expenses (Note 40)

	2014	2013	
PT Citra Kusuma Perdana	7.086.167	3.886.459	PT Citra Kusuma Perdana
Persentase terhadap Total Beban Usaha	1,67%	0,85%	Percentage to Total Operating Expenses

Jumlah untuk pemasok seperti yang dinyatakan di atas adalah setelah pengaruh dari metode konsolidasian proporsional.

The amount for the supplier as stated above was after the effect of proportionate consolidation method.

h. Piutang jangka panjang (Catatan 20)

h. Long-term receivables (Note 20)

IndoCoal Resources (Cayman) Limited menandatangani Perjanjian *Equity Partner Loan* dengan PT Citra Kusuma Perdana.

IndoCoal Resources (Cayman) Limited entered into an *Equity Partner Loan Agreement* with PT Citra Kusuma Perdana.

	2014	2013	
Dolar AS			US Dollar
Perusahaan afiliasi			Affiliate
PT Citra Kusuma Perdana	22.405.721	15.894.016	PT Citra Kusuma Perdana
Persentase terhadap Total Asset	0,34%	0,23%	Percentage to Total Assets

i. Dana kontribusi dari KPC untuk menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Kaltim Prima Coal (Catatan 29).

i. KPC's funds for contribution to its defined benefits pension plan are partly administered by Dana Pensiun Kaltim Prima Coal (Note 29).

j. Entitas Anak memiliki komitmen dan perjanjian penting dengan pihak berelasi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 49.

j. The Subsidiaries have commitments and agreements with related parties as disclosed in Note 49.

k. Imbalan yang diberikan ke Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

k. Compensations paid to Board of Commissioners and Board of Directors of the Group were as follows:

	2014	2013	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan jangka pendek	564.641	664.379	Short-term benefits
Imbalan pascakerja	127.291	119.694	Post-employment benefits
Sub-total	691.932	784.073	Sub-total
Direksi			Board of Directors
Imbalan jangka pendek	3.693.244	3.689.717	Short-term benefits
Total	4.385.176	4.473.790	Total

Jumlah untuk setiap kompensasi seperti yang dinyatakan di atas adalah sebelum pengaruh dari metode konsolidasian proporsional.

The amount of compensations as stated above was before the effect of proportionate consolidation method.

45. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen Usaha

Kelompok Usaha membagi usahanya dalam lima (5) segmen utama yaitu usaha: batubara, jasa, minyak dan gas bumi, serta emas.

Informasi tentang Kelompok Usaha menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

Segmen	Aktivitas/Activities	Segment
Perusahaan induk	Ini termasuk Perusahaan dan perusahaan induk lainnya/ <i>This includes the Company and other holding companies.</i>	Holding company
Batubara	Usaha penambangan batubara meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan batubara (termasuk penambangan dan penjualan batubara)/ <i>The coal mining activities comprise exploration and exploitation of coal deposits (includes mining and selling coal).</i>	Coal
Jasa	Aktivitas jasa merupakan jasa pemasaran dan manajemen/ <i>The activity of services represents marketing and management services.</i>	Services
Minyak dan gas bumi	Usaha dibidang perminyakan dan gas bumi masih dalam tahap eksplorasi/ <i>The activity of oil and gas is under exploration stage.</i>	Oil and gas
Emas	Usaha dibidang emas masih dalam tahap eksplorasi/ <i>The activity of gold is under exploration stage.</i>	Gold

Lainnya terdiri dari akun-akun yang tidak termasuk dalam analisis segmen di atas.

The Group classifies its products and services into five (5) core business segments: coal, services, oil and gas, and gold.

Information concerning the Group's business segments was as follows:

Others consist of accounts that are excluded in the analysis of segments above.

b. Informasi menurut segmen usaha

b. Information by business segment

	2014				
	Batubara/ Coal	Jasa/ Services	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan					Revenues
Pihak eksternal	2.769.917.117	16.149.978	-	2.786.067.095	External
Antar segmen	270.289.593	44.000.000	(314.289.593)	-	Inter-segments
Total	3.040.206.710	60.149.978	(314.289.593)	2.786.067.095	Total
Beban pokok pendapatan dan beban usaha				2.723.110.630	Cost of revenues and operating expenses
Laba usaha				62.956.465	Operating income
Laba atas penjualan Entitas Anak				949.520.959	Gain on sale of a Subsidiary
Rugi selisih kurs - neto				127.098.786	Loss on foreign exchange - net
Penghasilan bunga				59.325.906	Interest income
Beban bunga dan keuangan				(864.160.519)	Interest expenses and finance charges
Penurunan nilai Klaim				(238.456.830)	Impairment losses
Denda dan koreksi pajak				(195.153.606)	Claims
Beban amortisasi				(120.308.938)	Tax penalties and corrections
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(54.304.695)	Amortization expenses
Rugi atas transaksi derivatif - neto				(43.921.039)	Equity in net loss of associates
Lain-lain - neto				(3.446.501)	Loss on derivative transactions - net
Rugi sebelum beban pajak penghasilan				10.831.592	Others - net
Beban pajak penghasilan - neto				(310.018.420)	Loss before income tax expense
Rugi Neto				(155.886.244)	Income tax expense - net
				(465.904.664)	Net Loss

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

45. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

45. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2013				
	Batubara/ Coal	Jasa/ Services	Eliminasi/ Eliminations	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan					Revenues
Pihak eksternal	3.527.798.292	19.626.135	-	3.547.424.427	External
Antar segmen	2.153.123.213	110.000.000	(2.263.123.213)	-	Inter-segments
Total	5.680.921.505	129.626.135	(2.263.123.213)	3.547.424.427	Total
Beban pokok pendapatan dan beban usaha				3.317.377.312	Cost of revenues and operating expenses
Laba usaha				230.047.115	Operating income
Penghasilan bunga				56.942.150	Interest income
Beban bunga dan keuangan				(660.954.644)	finance charges
Rugi selisih kurs - neto				(136.806.919)	Loss on foreign exchange - net
Rugi atas transaksi derivatif				(100.782.434)	Loss on derivative transactions
Rugi neto atas penjualan Entitas Anak				(50.429.227)	Net loss on sale of Subsidiaries
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi				(40.340.672)	Equity in net loss of associates
Klaim				(30.748.622)	Claims
Denda dan koreksi pajak				(29.882.415)	Tax penalties and corrections
B+A&3beban amortisasi				(27.545.179)	Amortization expenses
Penghapusbukuan aset				(26.443.282)	Asset write-off
Lain-lain - neto				71.705.216	Others - net
Rugi sebelum manfaat pajak penghasilan				(745.238.913)	Loss before income tax benefit
Manfaat pajak penghasilan - neto				85.135.436	Income tax benefit - net
Rugi Neto				(660.103.477)	Net Loss

c. Informasi menurut segmen geografis

c. Information by geographical segment

	2014		2013		
	USD	%	USD	%	
Total aset					Total assets
Perusahaan induk	1.797.109.923	10,68	1.620.205.979	9,34	Holding company
Batubara	5.230.584.587	31,10	5.241.003.463	30,20	Coal
Minyak dan gas bumi	117.311.100	0,70	182.982.470	1,05	Oil and gas
Emas	681.934.200	4,05	691.254.868	3,98	Gold
Jasa	624.507.696	3,71	605.211.117	3,49	Services
Lain-lain	8.371.822.450	49,76	9.015.205.153	51,94	Others
	16.823.269.956	100,00	17.355.863.050	100,00	
Eliminasi	(10.322.741.038)		(10.351.954.935)		Eliminations
Total	6.500.528.918		7.003.908.115		Total

	2014					
	Indonesia	Asia	Eropa/ Europe	Australia	Total	
Pendapatan						Revenues
Penjualan batubara	967.841.516	1.759.837.195	41.723.063	515.343	2.769.917.117	Coal sales
Lain-lain	16.149.978	-	-	-	16.149.978	Others
Total	983.991.494	1.759.837.195	41.723.063	515.343	2.786.067.095	Total
	2013					
	Indonesia	Asia	Eropa/ Europe	Australia	Total	
Pendapatan						Revenues
Penjualan batubara	684.714.160	2.800.312.030	42.772.102	-	3.527.798.292	Coal sales
Lain-lain	19.626.135	-	-	-	19.626.135	Others
Total	704.340.295	2.800.312.030	42.772.102	-	3.547.424.427	Total

45. INFORMASI SEGMENT (*Lanjutan*)

d. Rincian pelanggan yang mempunyai transaksi penjualan batubara lebih dari 10% dari total pendapatan:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
PT Jhonlin Group	388.977.397	168.512.441
Adani Global Pte. Ltd., Singapura	348.489.209	509.584.390
Total	<u>737.466.606</u>	<u>678.096.831</u>

45. SEGMENT INFORMATION (*Continued*)

d. Details of customers having coal sales transactions of more than 10% of total revenues:

PT Jhonlin Group	168.512.441
Adani Global Pte. Ltd., Singapore	509.584.390
Total	678.096.831

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG YANG BUKAN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang yang bukan Dolar Amerika Serikat sebagai berikut:

46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2014 and 2013, the Group had monetary assets and liabilities denominated in currencies other than United States Dollar as follows:

	<u>2014</u>		
	<u>Dalam Mata Uang Asli/ In Original Currency</u>	<u>Setara dalam Dolar AS/ Equivalent in USD</u>	
Aset			Assets
Kas	Rp 207.682.901.235	16.822.315	Cash
	AUD 410	336	
	JPY 9.192.857	77.220	
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	Rp 917.049.383	74.281	Restricted cash in banks
Piutang usaha	Rp 709.959.765.432	57.506.741	Trade receivables
Piutang lain-lain	Rp 9.461.024.691	766.343	Other receivables
Tagihan Pajak Pertambahan Nilai	Rp 7.454.597.691.358	603.822.413	Value-Added Tax recoverable
Total aset		<u>679.069.649</u>	Total assets
Liabilitas			Liabilities
Utang usaha	Rp 173.748.296.296	14.073.612	Trade payables
	AUD 941.023	771.639	
	EUR 337.005	411.146	
Beban masih harus dibayar	Rp 217.462.174.074	17.614.436	Accrued expenses
Utang pajak	Rp 927.437.927.654	75.122.472	Taxes payable
	JPY 917.681.954	7.708.528	
Pinjaman jangka panjang	Rp 10.324.839.506	836.312	Long-term loans
Total liabilitas		<u>116.538.146</u>	Total liabilities
Aset Neto		<u>562.531.503</u>	Net Assets

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG YANG BUKAN DOLAR AMERIKA SERIKAT
(Lanjutan)**

**46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(Continued)**

	2013		Setara dalam Dolar AS/ Equivalent in USD	
	Dalam Mata Uang Asli/ In Original Currency			
Aset				Assets
Kas	Rp	108.793.207.317	8.921.043	Cash
	AUD	123.373	109.802	
	JPY	6.096.211	57.914	
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	Rp	69.580.536.585	5.705.604	Restricted cash in banks
Piutang usaha	Rp	656.990.865.854	53.873.251	Trade receivables
Piutang lain-lain	Rp	11.677.548.780	957.559	Other receivables
Tagihan Pajak Pertambahan Nilai	Rp	8.098.202.682.927	664.052.620	Value-Added Tax recoverable
Total aset			<u>733.677.793</u>	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	Rp	188.962.524.390	15.494.927	Trade payables
	AUD	1.281.178	1.140.248	
	EUR	429.728	593.025	
Beban masih harus dibayar	Rp	176.272.158.537	14.454.317	Accrued expenses
	JPY	11.367.053	107.987	
Utang pajak	Rp	899.191.548.780	73.733.707	Taxes payable
	JPY	774.063.368	7.353.602	
Pinjaman jangka panjang	Rp	16.734.317.073	1.372.214	Long-term loans
Total liabilitas			<u>114.250.027</u>	Total liabilities
Aset Neto			<u>619.427.766</u>	Net Assets

47. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

47. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets forth the carrying amounts and fair values of financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position as of December 31, 2014 and 2013:

	2014		2013		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Diukur pada nilai wajar					Measured at fair value
Aset keuangan pada FVTPL					Financial asset at FVTPL
Aset derivatif	-	-	10.891.082	10.891.082	Derivatives assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	<u>2.671.629</u>	<u>2.671.629</u>	<u>2.671.629</u>	<u>2.671.629</u>	Available-for-sale financial assets
Sub-total	<u>2.671.629</u>	<u>2.671.629</u>	<u>13.562.711</u>	<u>13.562.711</u>	Sub-total

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

47. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

47. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	2014		2013		
	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Nilai Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					Measured at amortized cost
Kas	32.522.988	32.522.988	45.155.693	45.155.693	Cash
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	35.821.047	35.821.047	72.165.906	72.165.906	Restricted cash in banks
Piutang usaha	644.357.259	644.357.259	429.997.779	429.997.779	Trade receivables
Piutang lain-lain	285.850.629	285.850.629	56.121.038	56.121.038	Other receivables
Aset keuangan lancar lainnya *)	9.455.326	9.455.326	7.825.263	7.825.263	Other current financial assets *)
Wesel tagih	-	-	254.026.670	254.026.670	Notes receivable
Piutang pihak berelasi - tidak lancar	48.497.053	48.497.053	77.074.970	77.074.970	Due from related parties - non-current
Piutang jangka panjang	498.731.957	498.731.957	441.011.938	441.011.938	Long-term receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya **)	46.214.004	46.214.004	44.318.385	44.318.385	Other non-current financial assets **)
Sub-total	1.601.450.263	1.601.450.263	1.427.697.642	1.427.697.642	Sub-total
Total Aset Keuangan	1.604.121.892	1.604.121.892	1.441.260.353	1.441.260.353	Total Financial Assets
Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi					Measured at amortized cost
Pinjaman jangka pendek	193.897.249	199.514.067	195.894.107	198.927.274	Short-term loans
Utang usaha	684.348.936	684.348.936	249.577.080	249.577.080	Trade payables
Utang lain-lain	309.483.194	309.483.194	147.178.079	147.178.079	Other payables
Beban masih harus dibayar	447.918.459	447.918.459	419.751.892	419.751.892	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	3.582.610.252	3.679.367.692	4.030.514.361	4.107.862.993	Long-term loans
Utang sewa pembiayaan	124.251.752	124.251.752	188.288.388	188.288.388	Finance lease payables
Utang pihak berelasi	67.815.582	67.815.582	78.568.187	78.568.187	Due to related parties
Obligasi konversi	375.000.000	375.639.878	371.835.409	375.933.298	Convertible bonds
Total Liabilitas Keuangan	5.785.325.424	5.888.339.560	5.681.607.503	5.766.087.191	Total Financial Liabilities

*) Aset keuangan lancar lainnya hanya termasuk jaminan.

**) Aset keuangan tidak lancar lainnya termasuk uang muka dan jaminan, piutang karyawan - bagian jangka panjang dan lain-lain.

*) Other current financial assets include deposits only.

**) Other non-current financial assets include advances and deposits, employee receivables - non-current portion and others.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi sepanjang nilai tersebut dapat diestimasi:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument measured at amortized cost for which it is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Short-term financial assets and liabilities:

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu (1) tahun atau kurang (kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi - lancar, aset keuangan lancar lainnya, pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban masih harus dibayar dan utang lain-lain)

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one (1) year or less (cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, due from related parties - current, other current financial assets, short-term loans, trade payables, accrued expenses and other payables)

Nilai wajar dari instrumen keuangan ini diperkirakan sebesar nilai tercatat mereka karena sebagian besar merupakan jangka pendek.

The fair value of these financial instruments approximate their carrying amounts mainly due to their short-term maturities.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

Long-term financial assets and liabilities:

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (pinjaman jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan obligasi konversi)

- Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (long-term loans, finance lease payables and convertible bonds)

47. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga variabel ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama. Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang dianggap wajar dan mencerminkan keadaan pasar.

- Aset keuangan jangka panjang lainnya (piutang jangka panjang dan aset keuangan tidak lancar lainnya)

Nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Kelompok Usaha (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) dari instrumen yang serupa.

- Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi pada harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Tabel berikut menganalisa instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar, berdasarkan metode penilaian. Tingkatan-tingkatan yang berbeda dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) dari pasar aktif untuk setiap aset dan liabilitas.
- Tingkat 2: Input selain harga kuotasi selain harga tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

47. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The fair value of long-term variable-rate financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities. The fair value of long-term fixed-rate financial liabilities is determined by discounting future cash flow using applicable rates which are deemed reasonable and reflective of the market conditions.

- Long-term financial assets (long-term receivables and other non-current financial assets)

Fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Group's own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

- For other non-current financial assets which are not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs, they are carried at their nominal amounts less any impairment losses.

The table below analyses financial instruments measured at fair value, by valuation method. The different levels have been defined as follows:

- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3: Inputs for the asset or liability that is not based on observable market data.

		2014				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
Aset keuangan pada FVTPL						Financial assets at FVTPL
Aset derivatif	-	-	-	-	-	Derivative assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	2.671.629	2.671.629	2.671.629	Available-for-sale financial assets
Total	-	-	2.671.629	2.671.629	2.671.629	Total
		2013				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
Aset keuangan pada FVTPL						Financial assets at FVTPL
Aset derivatif	-	10.891.082	-	-	10.891.082	Derivative assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	2.671.629	2.671.629	2.671.629	Available-for-sale financial assets
Total	-	10.891.082	2.671.629	2.671.629	13.562.711	Total

47. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan pergerakan aset dan liabilitas dari Kelompok Usaha yang dinilai berdasarkan nilai wajar:

47. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The following tables represent movements of the Group's financial assets and liabilities measured at fair value:

2014				
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/				
Aset Derivatif/ Derivative Assets	Available- for-sale Financial Assets	Total/ Total		
Saldo 1 Januari 2014	10.891.082	2.671.629	13.562.711	Balance as of January 1, 2014
Penebusan	(7.444.581)	-	(7.444.581)	Redemption
Keuntungan (kerugian): Laba atau rugi	(3.446.501)	-	(3.446.501)	Gains (losses): Profit or loss
Saldo 31 Desember 2014	-	2.671.629	2.671.629	Balance as of December 31, 2014
2013				
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/				
Aset Derivatif/ Derivative Assets	Available- for-sale Financial Assets	Total/ Total		
Saldo 1 Januari 2013	111.673.516	246.841.303	358.514.819	Balance as of January 1, 2013
Reklasifikasi	-	(251.411.968)	(251.411.968)	Reclassification
Keuntungan (kerugian): Laba atau rugi	(100.782.434)	-	(100.782.434)	Gains (losses): Profit or loss
Pendapatan komprehensif lain	-	7.242.294	7.242.294	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2013	10.891.082	2.671.629	13.562.711	Balance as of December 31, 2013

48. MANAJEMEN RISIKO

Implementasi Manajemen Risiko

Selama beberapa tahun terakhir, Kelompok Usaha secara aktif melakukan restrukturisasi, meningkatkan sistem *governance*, dan menempatkan Kelompok Usaha untuk menjadi yang terkemuka dalam industri pertambangan. Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, Kelompok Usaha tidak akan mampu mengelola risiko strategis maupun taktis dengan hanya bersikap pasif. Oleh karena itu, Kelompok Usaha telah mengembangkan berbagai cara dan pendekatan guna menggali berbagai dimensi risiko yang dihadapi terkait dengan kegiatan serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut sehingga Kelompok Usaha mampu mengelola risiko dan menjadikannya sebagai hal yang menguntungkan Kelompok Usaha.

48. RISK MANAGEMENT

Risk Management Implementation

Over the last few years, the Group has actively restructured its business, improved its governance systems, and positioned itself to play a leading role in the mining industry. In a dynamic and competitive world, the Group cannot manage either strategic or tactical risks by adopting a passive stance. Therefore, the Group has developed the mindset and approaches to explore the many dimensions of the challenges associated with each activity and opportunity so that the Group can balance these against the more obvious signs of reward.

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di Kelompok Usaha dimulai pada tahun 2008. Tahap pertama penerapan berlangsung dari 30 April 2008 sampai dengan 8 Juni 2009 dan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta kemampuan atas pentingnya manajemen risiko.

Implementasi manajemen risiko dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Kelompok Usaha sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur - Sistem ERM yang telah disetujui oleh Direksi dan diterbitkan pada tanggal 30 April 2009. Kebijakan dan prosedur ini memberikan arahan dalam penerapan praktik manajemen risiko korporat di Kelompok Usaha dan seluruh unit usahanya.

Tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi risiko di Kelompok Usaha berada pada Dewan Komisaris, Direksi, dan Eksekutif Manajemen melalui suatu struktur organisasi ERM termasuk keberadaan komite-komite penunjang di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Komite Pengelolaan Risiko Lindung Nilai, Sub Komite Ekspansi, Komite Pedoman Perilaku, Komite Teknologi Informasi dan Komite Sumber Daya Manusia.

Kelompok Usaha mengidentifikasi risiko secara berkesinambungan. Setelah tujuan bisnis atau tujuan strategis ditetapkan, risiko yang mungkin berdampak terhadap pencapaian tujuan bisnis diidentifikasi. Kelompok Usaha menggolongkan risiko berdasarkan konsekuensi atau akibat dan kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dievaluasi, manajemen memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengeliminasi, mengurangi, menerima atau memindahkan risiko yang telah diidentifikasi sehingga risiko masih dalam tingkat toleransi yang dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Pembuatan rencana mitigasi risiko akan membantu mengidentifikasi, mengawasi dan melaporkan status tindakan pengawasan terhadap masing-masing risiko. Selain itu, rencana mitigasi risiko membantu untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mengelola risiko yang utama/signifikan/kritikal.

Kelompok Usaha mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko berdasarkan dua (2) tujuan utama yaitu meningkatkan kapasitas produksi batubara dan diversifikasi produk tambang lainnya selain batubara. Sebagai hasil dari proses manajemen risiko terhadap dua (2) tujuan stratejik utama, Kelompok Usaha telah mengidentifikasi beberapa risiko yang paling utama, dan telah membuat dan melaksanakan mitigasi atas risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

The implementation of Enterprise Risk Management (ERM) at the Group started in 2008. The first phase of implementation was carried out from April 30, 2008 to June 8, 2009 and was focused on awareness activities of the importance of risk management to improve the Group's knowledge and capability in the area of risk management.

Risk management at the Company is carried out by the Group's Risk Management Division in accordance with the ERM Systems - Policy and Procedures approved by the Board of Directors and issued on April 30, 2009. These policies and procedures provide guidance in the implementation of the ERM practices at the Company and all its business units.

The responsibility for risk monitoring and evaluation at the Group lies with the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Management through an ERM governance structure that includes a number of committees at the Boards' level, i.e. Risk Management Committee, Remuneration and Nomination Committee, Audit Committee, Hedging Risk Management Committee, Sub-Expansion Committee, Code of Conduct Committee, Information Technology Steering Committee and Human Resources Committee.

The Group conducts on-going risk management tasks of identifying significant risks. Once business or strategic objectives are established, significant risks that may have an adverse effect on the achievement of the business objectives are identified. The Group ranks the risks based on consequence or impact and likelihood or frequency of occurrence. Once the risk is identified and assessed, management decides what action can be taken to eliminate, reduce, accept, or transfer the identified risk such that the level of risk is still within the tolerable levels accepted by the Group. Development of an action plan will help identify, monitor and report on the status of risk management controls treatment initiatives related to each risk. In addition, action plan formulation helps to redirect resources to key/significant/critical risks.

The Group identified and assessed risks based on the two (2) main strategic objectives, which were to increase the coal production and diversification to other mining areas besides coal. As a result of the above risk management process on the two (2) strategic objectives, the Group has identified several risks that matter, and has prepared and conducted mitigation plans of these risks as follows:

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

- Keterlambatan laporan ke Bursa Efek Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (saat ini OJK) dan lembaga pemerintah lainnya - Kelompok Usaha terlibat dalam banyak aksi korporasi yang bersamaan sehingga meningkatkan beban kerja bagi tim pelaporan untuk mengirim laporan kepada lembaga pemerintah yang terkait. Untuk mengelola risiko ini, Perusahaan meningkatkan sumber daya dengan melakukan perekrutan pegawai baru dan meningkatkan kemampuan dalam menyajikan laporan dan informasi keuangan tepat waktu dengan menerapkan paket sistem konsolidasi keuangan.
- Peningkatan harga bahan bakar minyak dalam jangka pendek - Bahan bakar minyak merupakan sumber energi utama dalam proses penambangan batubara sehingga peningkatan harganya akan memberi pengaruh signifikan bagi hasil keuangan Kelompok Usaha. Untuk mengantisipasi dampak peningkatan harga bahan bakar minyak, entitas pengendalian bersama Kelompok Usaha, PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, melakukan kontrak jangka panjang dalam menjamin persediaan minyak dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara sebagai sumber daya tambahan.
- Penghentian produksi akibat perselisihan hukum atas perjanjian - Kelompok Usaha memiliki beberapa perselisihan hukum atas perjanjian dengan kontraktor yang saat ini sedang melalui proses hukum. Perselisihan ini dapat mengganggu atau bahkan menghentikan aktivitas produksi. Untuk mengelola risiko ini, Kelompok Usaha telah menunjuk pengacara dari kantor pengacara ternama untuk mewakili Kelompok Usaha dalam proses pengadilan. Untuk menghindari kasus sama di masa yang akan datang, Kelompok Usaha membuat dan melakukan pembaharuan setiap minggu atas daftar kasus litigasi yang sedang ditempuh Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga melakukan monitor atas kepatuhan terhadap perjanjian.

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

- *Report overdue to Indonesian Stock Exchange (IDX), Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) (currently OJK) or other government bodies - The Group has been involved in many corporate actions at the same time which increased the work load of the reporting team to submit reports to related government agencies. To mitigate this risk, the Company increased resources by recruiting new personnel and improves the capability in providing financial statements and financial information in timely manner by implementing the financial consolidation system package.*
- *Short-term increase in fuel price - Fuel is a main source of energy in the coal mining process, therefore its price increase will have significant impact on the Group's financial performance. To mitigate the impact of an increase in fuel price, the Group's jointly controlled entities, PT Kaltim Prima Coal and PT Arutmin Indonesia, enter into long-term contracts in fuel supply to ensure its supply for production and build a steam power plant with coal as a secondary energy source.*
- *Cessation of production due to legal disputes over the agreement - The Group has several legal disputes over the agreement with the contractor that are currently going through the legal process. These disputes can disrupt or even halt production. To manage this risk, the Group has appointed lawyers from prestigious law firms to represent the Group in litigation. To avoid similar cases in the future, the Group creates and updates every week the list of litigation cases that are being pursued Group. The Group also conducts monitoring of compliance with treaty.*

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

- Tidak tersedianya sistem pelaporan keuangan konsolidasian - Kelompok Usaha masih belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang terkonsolidasi sehingga laporan keuangan masih disusun secara manual dan menimbulkan kemungkinan adanya ketidakakuratan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk memitigasi risiko ini, Kelompok Usaha senantiasa memeriksa semua data keuangan yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian dengan seksama dan teliti sebelum diaudit oleh auditor independen eksternal. Untuk menanggulangi ini di masa yang akan datang, sebuah sistem pelaporan keuangan untuk tujuan konsolidasi yang terintegrasi tengah dikembangkan dan akan diimplementasikan. Selain itu, Kelompok Usaha juga merekrut personil yang tepat untuk mendukung proses ini.
- Kematian atau meningkatnya kasus cedera dalam pekerjaan akibat menurunnya kinerja keselamatan kerja - Meningkatnya aktivitas pekerjaan untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi dapat meningkatkan jumlah pekerja yang ada di lokasi tambang sehingga semakin mempersulit pengendalian atas kinerja dan kepedulian akan keselamatan kerja. Untuk mengelola risiko ini, Kelompok Usaha meningkatkan program induksi keselamatan kerja dan melakukan pelatihan khusus untuk mengubah kebiasaan para *supervisor* dan pekerja, melakukan audit keselamatan kerja internal, inspeksi secara teratur maupun mendadak dan pengawasan ketat dari kustodian dan koordinator *Health, Safety and Environment (HSE)*.
- Tidak tercapainya target produksi akibat penundaan pembebasan lahan - Beberapa area yang masuk ke dalam rencana penambangan berada dekat dengan jalan raya sehingga meningkatkan nilai pasarnya padahal Kelompok Usaha memiliki kebijakan tarif sama untuk semua area. Negosiasi dengan pemilik lahan memakan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Untuk mengelola risiko ini, Kelompok Usaha melakukan beberapa program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mengurangi tekanan para pemilik lahan, melakukan *benchmarking* harga lahan dengan perusahaan lain di area yang berdekatan dan melakukan peninjauan kembali yang menyeluruh bersama dengan pihak ketiga untuk menentukan harga wajar untuk pembebasan lahan.

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

- *There is no financial reporting consolidation system in place - The Group has no financial reporting consolidation system in place therefore the financial reporting is done manually which may cause inaccuracy in the consolidated financial statements. To mitigate this risk, the Group has been thoroughly and prudently checking all the financial data to be included in the consolidated financial statements before they were audited by the external independent auditors. To overcome this, an integrated financial reporting system for consolidation purposes has been developed and will be used to prepare the full year consolidated financial statements. Furthermore, the Group recruited suitable personnel to support this process.*
- *Fatality or increased number of injuries due to declining safety performance - Increase works to achieve higher production targets may increase the number of people working in mine sites which make it more difficult to control the safety performance and awareness. To mitigate this risk, the Group improves the safety inductions and provides specific training to change behaviours of supervisor and employees, conduct internal safety auditing, regular or surprised inspections and close monitoring from custodian and Health, Safety and Environment (HSE) coordinator.*
- *Production not achieving target due to delay in land compensation - Several areas included in mining plan are located near public access roads which increases its market valuation, while the Group has policy of flat price to all areas. Negotiations for land compensations may take longer than originally planned. To mitigate this risk, the Group uses Corporate Social Responsibility (CSR) programs to alleviate the land owners' pressures, conducts benchmarking to other companies in nearby area regarding compensation price and conducts thorough review using independent third party appraisal service to determine the fair price of land compensation.*

48. MANAJEMEN RISIKO *(Lanjutan)*

Risiko Keuangan

Kebijakan Kelompok Usaha sehubungan dengan manajemen risiko keuangan ditetapkan dengan jelas dan diterapkan secara konsisten. Kebijakan tersebut adalah bagian mendasar dari strategi jangka panjang Kelompok Usaha yang meliputi bidang-bidang seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko nilai wajar kontrak derivatif, risiko harga ekuitas, risiko tingkat bunga dan pengelolaan permodalan. Kelompok Usaha sangat bergantung pada batubara yang memiliki hubungan positif dengan siklus ekonomi global.

Manajemen risiko keuangan berada dibawah pengawasan langsung dari Direksi dan terutama *Chief Financial Officer* (CFO). CFO memiliki departemen treasury terpusat yang memuat kebijakan yang disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko dan Direksi. Departemen mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan dalam kerjasama erat dengan unit-unit operasi Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko dan Direksi memberikan prinsip-prinsip tertulis untuk pengelolaan risiko keuangan secara keseluruhan, serta kebijakan tertulis yang mencakup bidang-bidang tertentu, seperti risiko valuta asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas. Kelompok Usaha tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan perdagangan atau spekulatif.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang mengakibatkan kerugian secara finansial. Kelompok Usaha terkena risiko kredit dari kegiatan operasinya (terutama dari piutang pelanggan) dan dari aktivitas pendanaan, termasuk pinjaman bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit dari pelanggan dikelola melalui kebijakan yang ditetapkan, prosedur dan kontrol yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kredit. Dalam hal pelanggan dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit independen, peringkat ini digunakan untuk mengatur batas kredit. Dalam keadaan dimana tidak ada pemeringkat kredit yang independen, manajemen menilai kualitas kredit pihak lain dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada risiko yang signifikan terkait dengan mereka.

Manajemen telah menilai kualitas kredit dari pihak lain yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal dan merasa yakin bahwa tidak ada risiko kredit signifikan yang terkait dengan mereka.

48. RISK MANAGEMENT *(Continued)*

Financial Risks

The Group's policies with regard to financial risk management are clearly defined and consistently applied. They are a fundamental part of the Group's long-term strategy covering areas such as credit risk, liquidity risk, foreign exchange risk, fair value derivative contract risk, equity price risk, interest rate risk and capital management. The Group is heavily dependent on coal which has a positive relationship to the global economic cycle.

Financial risk management is under the direct supervision of the Board of Directors and especially the Chief Financial Officer (CFO). The CFO has a central treasury department which follows policies approved by the Risk Management Division and Board of Directors. The department identifies and evaluates financial risks in close cooperation with the Company's operating units. The Risk Management Division and Board of Directors provide written principles for overall financial risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and investment in excess of liquidity. The Group does not acquire or issue derivative financial instruments for trading or speculative purposes.

Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is exposed to credit risk from its operating activities (primarily from customer receivables) and from its financing activities, including deposits with banks, foreign exchange transactions and other financial instruments. Customer credit risk is managed through established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Where customers are rated by an independent credit rating agency, these ratings are used to set credit limits. In circumstances where no independent credit rating exists, the management assesses the credit quality of the counterparties and satisfies itself that there is no significant risk associated with them.

The management has assessed the credit quality of the counterparties for which no external credit rating is available and is satisfied that there is no significant risk associated with them.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Kualitas kredit dari aset keuangan yang tidak lewat jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai bisa diukur dari pemeringkat kredit eksternal (Moody's) jika tersedia.

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by external credit ratings (Moody's) if available.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Aa2	5.378.415	33.277.493	Aa2
Aa3	-	1.737.630	Aa3
A1	16.146.404	60.248.180	A1
A2	-	11.381.320	A2
A3	25.922.333	5.732.169	A3
Baa2	6.753.222	-	Baa2
Baa3	43.137.372	88.549.125	Baa3
B1	-	20.406.308	B1
Lain-lain dan tidak diperingkat	1.501.509.003	1.133.635.792	Others and not rated
Total	<u>1.598.846.749</u>	<u>1.354.968.017</u>	Total

Eksposur maksimum atas risiko kredit untuk Kelompok Usaha adalah nilai tercatat dari aset keuangan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

The maximum exposure to credit risk for the Group is the carrying value of the financial assets as shown in the table below associated with them:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Aset derivatif	-	10.891.082	Derivative assets
Kas di bank	32.377.616	45.261.196	Cash in banks
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya	35.821.047	72.165.906	Restricted cash in banks
Piutang usaha	644.357.259	429.997.779	Trade receivables
Piutang lain-lain	285.850.629	56.121.038	Other receivables
Aset keuangan lancar lainnya	9.455.326	7.825.263	Other current financial assets
Wesel tagih	-	254.026.670	Notes receivable
Piutang pihak berelasi - tidak lancar	48.497.053	77.074.970	Due from related parties - non-current
Piutang jangka panjang	498.731.957	441.011.938	Long-term receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya	46.214.004	44.318.385	Other non-current financial assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual	2.671.629	2.671.629	Available-for-sale financial assets
Total	<u>1.603.976.520</u>	<u>1.441.365.856</u>	Total

Risiko Likuiditas

Proyeksi arus kas dilakukan oleh Kelompok Usaha dan dikumpulkan oleh bagian keuangan Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengawasi proyeksi kebutuhan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sambil tetap menjaga ruang batas yang memadai sehingga tidak melanggar batas pinjaman atau persyaratan pinjaman (jika berlaku) pada setiap fasilitas pinjaman. Proyeksi tersebut akan dipertimbangkan dalam rencana utang Kelompok Usaha, kepatuhan persyaratan, kepatuhan dengan target laporan posisi keuangan internal dan jika diperlukan, kepatuhan atas peraturan dan hukum yang berlaku.

Liquidity Risk

Cash flow forecasting is performed by the operating entities of the Group and aggregated by the Group's finance. The Group monitors rolling forecasts of its liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom so that it does not breach borrowing limits or covenants (where applicable) on any of its borrowing facilities. Such forecasting takes into consideration the Group's debt financing plans, covenant compliance, compliance with internal statement of financial position targets and, where applicable, external regulatory and legal requirements.

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan profil jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Kelompok Usaha termasuk arus kas yang tidak didiskontokan (yang terdiri dari saldo pokok terutang ditambah pembayaran bunga yang akan dating, jika ada).

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

The table below shows the contractual maturity profile of Group's financial liabilities, including undiscounted cash flows (consisting the outstanding principal balance plus future interest payments, if any).

		2014				
		Arus Kas Kontraktual yang Tidak Didiskontokan/ Contractual Undiscounted Cash flows				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Total	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ More than 1 Year		
Pinjaman jangka pendek	193.897.249	199.514.067	199.514.067	-	Short-term loans	
Utang usaha	684.348.936	684.348.936	684.348.936	-	Trade payables	
Utang lain-lain	309.483.194	309.483.194	309.483.194	-	Other payables	
Beban masih harus dibayar	447.918.459	447.918.459	447.918.459	-	Accrued expenses	
Pinjaman jangka panjang	3.582.610.252	3.840.403.188	2.268.511.019	1.571.892.169	Long-term loans	
Utang sewa pembiayaan	124.251.752	130.466.836	46.884.070	83.582.766	Finance lease payables	
Utang pihak berelasi	67.815.582	67.815.582	-	67.815.582	Due to related parties	
Obligasi konversi	375.000.000	386.562.500	386.562.500	-	Convertible bonds	
Total Liabilitas Keuangan	5.785.325.424	6.066.512.762	4.343.222.245	1.723.290.517	Total Financial Liabilities	

		2013				
		Arus Kas Kontraktual yang Tidak Didiskontokan/ Contractual Undiscounted Cash flows				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	Total	Kurang dari 1 Tahun/ Less than 1 Year	Lebih dari 1 Tahun/ More than 1 Year		
Pinjaman jangka pendek	195.894.107	198.734.007	198.734.007	-	Short-term loans	
Utang usaha	249.577.080	249.577.080	249.577.080	-	Trade payables	
Utang lain-lain	147.178.079	147.178.079	147.178.079	-	Other payables	
Beban masih harus dibayar	419.751.892	419.751.892	419.751.892	-	Accrued expenses	
Pinjaman jangka panjang	4.030.514.361	4.623.322.790	2.254.743.296	2.368.579.494	Long-term loans	
Utang sewa pembiayaan	188.288.388	207.169.570	61.615.164	145.554.406	Finance lease payables	
Utang pihak berelasi	78.568.187	78.568.187	-	78.568.187	Due to related parties	
Obligasi konversi	371.835.409	398.125.000	398.125.000	-	Convertible bonds	
Total Liabilitas Keuangan	5.681.607.503	6.322.426.605	3.729.724.518	2.592.702.087	Total Financial Liabilities	

Risiko Valuta Asing

Manajemen berkeyakinan bahwa Kelompok Usaha telah dengan sendirinya terlindungi terhadap risiko valuta asing. Sebagian besar pendapatan Kelompok Usaha adalah dengan harga, ditagih dan dibayar dalam Dolar Amerika Serikat (USD). Sebagian besar beban pokok pendapatan, beban usaha termasuk biaya pengiriman, komisi penjualan, pengiriman dan biaya berlabuh, dan belanja modal adalah dalam USD. Semua pinjaman jangka panjang dimataungkan dalam USD. Namun demikian, terdapat beberapa biaya dan beban dalam mata uang Rupiah Indonesia (Rp) seperti gaji dan upah.

Karena beberapa biaya produksi yang dibayar secara tunai dengan mata uang Rp dan sebagian besar penjualan yang signifikan dalam USD, melemahnya Rp terhadap USD dapat menyebabkan laba usaha meningkat, sedangkan penguatan Rp terhadap USD dapat menyebabkan laba usaha menurun.

Foreign Exchange Risk

The management believes that the Group is naturally hedged against foreign exchange risk. A significant portion of the Group's revenues are priced, invoiced and paid in United States Dollar (USD). Most of its cost of revenues, operating expenses including the freight costs, sales commissions, dispatch and demurrage expenses, and capital expenditures were denominated and paid in USD. All of the long-term loans are denominated in USD. However, some other costs and expenses are denominated in Indonesian Rupiah (Rp) such as salaries and wages.

Because certain cash production costs are denominated in Rp and a significant portion of the sales are priced in USD, weakening of the Rp against the USD may cause operating income to increase, whereas strengthening of the Rp against the USD may cause operating income to decline.

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan dampak setelah pajak pada laba atau rugi sebagai akibat dari kenaikan/penurunan nilai tukar mata uang asing, dengan mempertimbangkan semua faktor lain tetap konstan:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kenaikan			Increase
Rp meningkat 5%	(22.853.810)	(25.138.196)	Rp increases by 5%
JPY meningkat 5%	305.252	296.147	JPY increases by 5%
AUD meningkat 5%	30.852	41.218	AUD increases by 5%
EUR meningkat 5%	(16.446)	23.721	EUR increases by 5%
Neto	<u>(22.534.152)</u>	<u>(24.777.110)</u>	Net
Penurunan			Decrease
Rp menurun 5%	22.853.810	25.138.196	Rp decreases by 5%
JPY menurun 5%	(305.252)	(296.147)	JPY decreases by 5%
AUD menurun 5%	(30.852)	(41.218)	AUD decreases by 5%
EUR menurun 5%	16.446	(23.721)	EUR decreases by 5%
Neto	<u>22.534.152</u>	<u>24.777.110</u>	Net

Risiko Harga Ekuitas

Kelompok Usaha terekspos risiko harga ekuitas terutama karena investasinya dalam efek ekuitas, termasuk:

- *Call option* yang melekat di dalam obligasi konversi yang di terbitkan oleh Kelompok Usaha.
- Instrumen derivatif, termasuk yang dilakukan dalam rangka lindung nilai obligasi konversi Kelompok Usaha. Namun demikian, transaksi ini tidak memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Kelompok Usaha diminta untuk melakukan perjanjian *Capped Call*. Berdasarkan metode akuntansi yang diterapkan, Kelompok Usaha harus menggunakan nilai wajar untuk pelaporan transaksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan fluktuasi yang signifikan dalam laba atau rugi.

Tabel di bawah ini menunjukan dampak setelah pajak pada laba atau rugi untuk aset derivatif dan pada pendapatan komprehensif lain untuk aset keuangan tersedia untuk dijual sebagai akibat dari kenaikan/penurunan dari harga saham, dengan mempertimbangkan semua faktor lain tetap konstan:

	<u>2014</u>		<u>2013</u>		
	<u>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</u>	<u>Cadangan Modal Lainnya/ Other Capital Reserves</u>	<u>Laba (Rugi)/ Profit (Loss)</u>	<u>Cadangan Modal Lainnya/ Other Capital Reserves</u>	
Kenaikan 10%	-	-	871.287	267.163	Increase by 10%
Penurunan 10%	-	-	(871.287)	(267.163)	Decrease by 10%

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

The table below summarizes the after-tax impact on profit or loss as the result of increase/decrease of foreign exchange rates, considering all other factors are held constant:

Equity Price Risk

The Group is exposed to equity price risk mainly because of its investments in equity securities, including:

- *Call option* embedded in convertible bonds issued by the Group.
- *Derivative instruments*, including those entered into to hedge the Group's convertible bonds. However, these transactions do not qualify for hedge accounting under the prevailing accounting standards.

The Group is requested to enter into a *Capped Call Agreement*. In accordance with the implemented accounting standards, the Group has to use fair value to report the transaction. This condition may create a significant fluctuation in profit or loss.

The table below summarizes the after-tax impact on profit or loss for derivative assets and on other comprehensive income for available-for-sale financial assets as the result of increase/decreases of the share prices, considering all other factors are held constant:

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Tingkat Bunga

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga atas pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang. Kelompok Usaha memiliki fasilitas pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang. Dan Kelompok Usaha berniat untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman tersebut dengan pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang selama kondisi pasar mengizinkan dan secara komersial Kelompok Usaha dapat melakukannya, karena itu manajemen tidak mengharapkan dampak fluktuasi suku bunga atas sebagian besar pinjaman jangka panjang. Kebijakan Kelompok Usaha akan memilih suku bunga tetap jika memungkinkan karena diperkirakan adanya peningkatan LIBOR selama beberapa tahun mendatang.

Tabel di bawah ini menunjukkan dampak setelah pajak pada laba atau rugi sebagai akibat dari kenaikan/penurunan suku bunga yang dianggap tidak signifikan dengan mempertimbangkan semua faktor lain tetap konstan:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Kenaikan 5%	117.048	101.054	Increase by 5%
Penurunan 5%	(117.048)	(101.054)	Decrease by 5%

Pengelolaan Permodalan

Tujuan Kelompok Usaha ketika mengelola permodalannya untuk menjaga kemampuan Kelompok Usaha untuk melanjutkan usahanya dengan berkesinambungan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya, menjaga struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Dalam rangka menjaga atau menyesuaikan struktur modal, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang. Tujuan pengelolaan permodalan tetap sama seperti periode sebelumnya.

Konsisten dengan pihak lain dalam industri, Kelompok Usaha mengawasi modal berdasarkan rasio *gearing*. Rasio ini dihitung sebagai utang neto dibagi dengan total modal. Utang neto dihitung sebagai total pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan obligasi konversi seperti yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian) ditambah jumlah utang pihak berelasi dikurangi kas (termasuk kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya seperti yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian). Total modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang neto. Rasio *gearing* pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

Interest Rate Risk

The Group is subject to fluctuations in interest rates on the floating rate loans. The Group has incurred indebtedness under loan facilities that have floating interest rates. It is the Group's intention to refinance these floating rate loans with longer term fixed rate loans to the extent market conditions permit and the Group is commercially able to do so; therefore, management does not expect that it will be exposed to interest rate fluctuations on a significant portion of its outstanding loans in the long term. The Group's policy will favour fixed rate instruments where possible due to expected increases in LIBOR over the next few years.

The table below summarizes the after-tax impact on profit or loss as the result of increase/decrease of the interest rates, which is considered not significant, considering all other factors are held constant:

Capital Management

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt. The capital management objective remains the same as in the previous period.

Consistent with others in the industry, the Group monitors capital on the basis of gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (include short-term loans, long-term loans, obligations under finance lease, and convertible bonds as shown in the consolidated statements of financial position) and due to related parties less cash (include cash and cash equivalent and restricted cash in banks as shown in the consolidated statements of financial position). Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position plus net debt. The gearing ratios as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

48. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

48. RISK MANAGEMENT (Continued)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Total pinjaman dan utang pihak berelasi	4.343.574.835	4.865.100.452	Total borrowings and due to related parties
Dikurangi kas	<u>68.344.035</u>	<u>117.719.079</u>	Less cash
Utang neto	4.275.230.800	4.747.381.373	Net debt
Defisiensi modal	<u>(733.041.358)</u>	<u>(302.959.535)</u>	Capital deficiency
Modal Neto	<u>3.542.189.442</u>	<u>4.444.421.838</u>	Net Capital
Rasio Gearing	<u>120,69%</u>	<u>106,82%</u>	Gearing Ratio

49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) - PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal

a. Coal Contract of Work (CCoW) - PT Arutmin Indonesia and PT Kaltim Prima Coal

Pada tanggal 2 November 1981 dan 8 April 1982, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), entitas pengendalian bersama, menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan PN Tambang Batubara yang kemudian dialihkan kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) dimana Arutmin dan KPC ditunjuk sebagai kontraktor tunggal untuk melaksanakan operasi penambangan batubara selama tiga puluh (30) tahun sejak dimulainya periode operasi di area pertambangan tertentu di bagian Tenggara Kalimantan yang pada awalnya masing-masing meliputi area seluas 1.260.000 hektar dan 790.900 hektar. PKP2B memberikan hak kepada Arutmin dan KPC sebesar 86,5% dari jumlah batubara yang diproduksi dari proses produksi akhir, dan sisanya sebesar 13,5% merupakan milik PTBA.

On November 2, 1981 and April 8, 1982, respectively, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) and PT Kaltim Prima Coal (KPC), jointly controlled entities, entered into Coal Contracts of Work (CCoW) with PN Tambang Batubara, subsequently transferred to PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA), whereby Arutmin and KPC were appointed as sole contractors for coal operations for thirty (30) years from the start of operations with respect to specific mining areas in the southeastern part of Kalimantan, initially covering 1,260,000 hectares and 790,900 hectares, respectively. The CCoWs give the right to Arutmin and KPC to take 86.5% of the coal produced from the final production process with the balance of 13.5% being retained by PTBA.

Dalam PKP2B tersebut, diatur bahwa Arutmin dan KPC, antara lain, berkewajiban untuk membiayai kegiatan operasi penambangan batubara termasuk pembelian material, suku cadang dan aset tetap yang diperlukan. Namun demikian semua aset tetap dan persediaan suku cadang akan menjadi milik PTBA sejak barang-barang tersebut tiba di pelabuhan Indonesia atau pada saat dibelinya untuk barang-barang yang dibeli secara lokal.

As consideration for such CCoW, Arutmin and KPC shall, among other conditions, finance the acquisition costs of materials, spare parts, and fixed assets required in the contract of work. However, all fixed assets and spare parts inventories shall become the property of PTBA upon arrival at the Indonesian port of import or when purchased locally.

Berdasarkan PKP2B, Arutmin dan KPC tetap berhak untuk menggunakan aset tetap dan persediaan tersebut untuk aktivitas penambangan batubara sepanjang diperlukan, tetapi selain itu juga bertanggung jawab atas pemeliharannya. Oleh karena itu, biaya perolehan tersebut dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan Arutmin dan KPC.

Under the CCoW, Arutmin and KPC continue to have the right to use such fixed assets and inventories for coal operations as long as Arutmin and KPC require, but they are responsible for the maintenance thereof. Accordingly, these costs are reflected as assets in Arutmin and KPC's financial statements.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Arutmin dan KPC bertanggung jawab penuh untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan kegiatan selanjutnya di wilayah pertambangan, yang mana tergantung dari ditemukannya kandungan batubara yang memadai. Arutmin dan KPC juga berkewajiban untuk membayar sewa atas wilayah pertambangan kepada Pemerintah Indonesia melalui PTBA.

Selanjutnya disebutkan dalam PKP2B bahwa apabila pada suatu wilayah yang dieksplorasi tidak ditemukan cadangan batubara yang secara komersial dapat ditambang, Arutmin dan KPC diizinkan untuk menyerahkan kembali wilayah pertambangan tersebut kepada PTBA. Oleh karena itu, sejak tahun 1999, luas wilayah pertambangan Arutmin dan KPC telah berkurang sebesar 1.889.809 hektar atau 92% dari wilayah pertambangannya. Pada tanggal 31 Desember 2014, luas wilayah pertambangan Arutmin dan KPC adalah masing-masing sebesar 70.153 dan 90.938 hektar.

Efektif tanggal 1 Juli 1997, semua hak dan kewajiban PTBA yang tertuang dalam PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Pertambangan dan Energi, sesuai dengan perubahan kontrak tanggal 27 Juni 1997, yang ditandatangani oleh Arutmin dan KPC serta PTBA dan disahkan oleh Kementerian Pertambangan dan Energi pada tanggal 7 Oktober 1997.

PKP2B dari Arutmin akan berakhir di bulan November 2020 dan PKP2B dari KPC akan berakhir di bulan Januari 2022.

Pada tanggal 22 September 2014, sesuai dengan pasal 169 (b) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), masing-masing KPC dan Arutmin serta Pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman untuk melakukan penyesuaian masalah-masalah strategis di PKP2B.

b. Kontrak Karya

PT Dairi Prima Mineral (Dairi), PT Citra Palu Minerals (CPM) dan PT Gorontalo Minerals (GM), Entitas Anak, menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Kontrak Karya, Pemerintah Indonesia menunjuk Dairi, CPM dan GM sebagai Kontraktor tunggal dan memberikan hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menambang, serta mengolah dan memasarkan setiap mineral yang terdapat di dalam Wilayah Kontrak Karya.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Arutmin and KPC are fully responsible for financing the exploration and subsequent operation of the mining area, the latter being dependent on the discovery of adequate coal deposits. Arutmin and KPC are also obligated to pay rent on the mining area to the Government of Indonesia (GOI) through PTBA.

As further stipulated in the CCoW, in the event that any part of the area to be explored does not contain any commercially viable coal deposits, Arutmin and KPC may relinquish such area to PTBA. Accordingly, since 1999, Arutmin and KPC have relinquished 1,889,809 hectares or 92% of their mining areas. As of December 31, 2014, the mining areas of Arutmin and KPC are 70,153 and 90,938 hectares, respectively.

Effective July 1, 1997, all rights and obligations of PTBA under the CCoW were transferred to the GOI represented by the Ministry of Mines and Energy, based on the contract amendments dated June 27, 1997 executed by Arutmin and KPC and PTBA and approved by the Ministry of Mines and Energy on October 7, 1997.

The CCoW of Arutmin will expire in November 2020, while the CCoW of KPC will expire in January 2022.

On September 22, 2014, pursuant to Section 169 (b) of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal (Act No. 4 of 2009), KPC and Arutmin and the GOI each signed a Memorandum of Understanding to make strategic issue adjustments in the CCoW.

b. Contract of Work

PT Dairi Prima Mineral (Dairi), PT Citra Palu Minerals (CPM) and PT Gorontalo Minerals (GM), Subsidiaries, each signed a Contract of Work (CoW) with the GOI. In accordance with the CoW, the GOI designated Dairi, CPM and GM as the sole Contractors and conferred exclusive rights to explore, mine, as well as process and market any and all minerals existing in their CoW area.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
 PENTING (Lanjutan)**

Berdasarkan Kontrak Karya, perusahaan mineral dimulai dengan suatu tahap yang disebut sebagai Tahap Penyelidikan Umum yang dilakukan untuk jangka waktu dua belas (12) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelahnya. Setelah Tahap Penyelidikan Umum diselesaikan, perusahaan mineral akan masuk dalam Tahap Eksplorasi yang dilakukan untuk jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dua (2) kali dua belas (12) bulan. Selanjutnya, setelah Tahap Eksplorasi diselesaikan, kegiatan Kontrak Karya dilanjutkan dengan Tahap Studi Kelayakan kemudian Tahap Konstruksi. Setelah Tahap Konstruksi diselesaikan, tahap kegiatan Kontrak Karya akan masuk dalam Tahap Operasi yang akan berlangsung untuk jangka waktu tiga puluh (30) tahun.

Pada akhir Tahap Penyelidikan Umum, akhir Tahap Eksplorasi dan akhir Tahap Studi Kelayakan, wilayah Kontrak Karya akan ditiadakan dalam beberapa tahap sehingga pada akhirnya wilayah Kontrak Karya yang dipertahankan pada Tahap Operasi hanyalah 25% dari luas wilayah Kontrak Karya pada saat Kontrak Karya ditandatangani.

Berdasarkan Kontrak Karya, Kontraktor berkewajiban untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak dan *deadrent* (kontribusi tetap) atas wilayah Kontrak Karya dan royalti atas mineral yang diproduksi.

Selain kewajiban keuangan, pemegang Kontrak Karya juga memiliki kewajiban lain berupa kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, kewajiban untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal, kewajiban untuk mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri, kewajiban untuk mengutamakan dan memenuhi kebutuhan pasar mineral dalam negeri dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian logam di dalam negeri.

Berikut adalah rincian masing-masing Entitas Anak:

Entitas Anak/Subsidiary	Tanggal Kontrak Karya/ Date of CoW	Wilayah Kontrak Karya/CoW Area
Dairi	19 Februari 1998/ February 19, 1998	Awal : 27.520 hektar Saat ini : 27.420 hektar/ Initially : 27,520 hectares Currently : 27,420 hectares

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
 (Continued)**

In accordance with the CoW, development of minerals shall commence with a stage referred to as the General Survey Stage conducted for a period of twelve (12) months, which may be extended for a further period of twelve (12) months thereafter. Following completion of the General Survey Stage, development of minerals shall enter the Exploration Stage conducted for a period of thirty-six (36) months, which may be extended twice for a period of twelve (12) months each time. Subsequently, following completion of the Exploration Stage, the next phase of activity under the CoW shall be the Feasibility Stage, which is continued by the Construction Stage. Following completion thereof, the final phase under the CoW shall be the Operations Stage, which shall continue for a period of thirty (30) years.

At the end of the Stages of General Survey, Exploration and Feasibility Study, areas under the CoW shall be gradually relinquished in several stages, leaving the total area of the CoW to be maintained during the Operations Stage at only 25% of the size of the CoW area at the initial signing thereof.

In accordance with the CoW, the Contractor shall be obliged to meet payment obligations to the GOI: i.e. taxes and deadrent (fixed contributions) on the CoW area, and royalties on any minerals produced.

In addition to financial obligations, the holders of CoWs shall also have other obligations, e.g. to manage and protect the living environment, to prioritize the use and provide training to local manpower, to prioritize the use of domestically produced goods and services, to prioritize and satisfy domestic market obligation in minerals and to conduct domestic processing and refining of metals.

The following are details of the Subsidiaries:

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

<u>Entitas Anak/Subsidiary</u>	<u>Tanggal Kontrak Karya/ Date of CoW</u>	<u>Wilayah Kontrak Karya/CoW Area</u>
CPM	28 April 1997/ <i>April 28, 1997</i>	Awal : 561.050 hektar Saat ini : 138.889 hektar/ <i>Initially : 561,050 hectares</i> <i>Currently : 138,889 hectares</i>
GM	19 Februari 1998/ <i>February 19, 1998</i>	Awal : 51.570 hektar Saat ini : 36.070 hektar/ <i>Initially : 51,570 hectares</i> <i>Currently : 36,070 hectares</i>

PT Dairi Prima Mineral (Dairi)

Saat ini, kegiatan Kontrak Karya Dairi berada pada Tahap Konstruksi dengan wilayah yang dipertahankan seluas 27.420 hektar yang berada di Propinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Dairi telah memperoleh SK perpanjangan V Tahap Konstruksi sesuai dengan Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 988.K/30/DJB/2013 yang berlaku sampai dengan 7 November 2013. Dairi telah menerima Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Nomor: S.594/Menhut-VII/2011 tanggal 15 November 2011. Selanjutnya Dairi memperoleh IPPKH untuk kegiatan Operasi Produksi area seluas 53,11 hektar pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. SK.387/Menhut-II/2012 berlaku dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 22 Juli 2020. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Dairi sedang menunggu persetujuan Perpanjangan VI Tahap Konstruksi melalui Surat No. L.187/DPM-CGR/X-2013 tanggal 7 Oktober 2013.

Pada tanggal 20 November 2014, Dairi telah menyampaikan Surat No. L.254/DPM-CGR/XI/2014 tentang Revisi Laporan Studi Kelayakan PT Dairi Prima Mineral.

PT Citra Palu Minerals (CPM)

Kegiatan Kontrak Karya CPM saat ini telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan. Pada tanggal 31 Maret 2011, CPM telah memperoleh izin perpanjangan Tahap Studi Kelayakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 722.K/30/DJB/2011 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2012.

PT Dairi Prima Mineral (Dairi)

Currently, Dairi's CoW activities are in the final stage of the Construction Stage with a total maintained area of 27,420 hectares in North Sumatera and Nanggroe Aceh Darussalam Provinces. Dairi has obtained extension Stage of Construction Phase V based on the Decision Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 988.K/30/DJB/2013 until November 7, 2013. Dairi has received Principal Approval to Use Forestry Area No. S.594/Menhut-VII/2011 dated November 15, 2011 from the Ministry of Forestry. Dairi has secured IPPKH area of Production Operations with total area of 53.11 hectares in protected forest area in Dairi Regency, North Sumatera Province based on the Decision Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. SK.387/Menhut-II/2012, valid from July 23, 2012 until July 22, 2020. As of completion date of the consolidated financial statements, Dairi is currently awaiting for the approval of another Extension Stage of Construction phase VI through Letter No. L.187/DPM-CGR/X-2013 dated October 7, 2013.

On November 20, 2014, Dairi submitted Letter No. L.254/DPM-CGR/XI/2014 containing the Revision Report of the Feasibility Study of PT Dairi Prima Mineral.

PT Citra Palu Minerals (CPM)

CPM's CoW activities is currently in the Feasibility Study Stage. On March 31, 2011, CPM obtained an extension permit for the Feasibility Study Stage based on the Decision Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 722.K/30/DJB/2011 until January 28, 2012.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

CPM mengajukan permohonan untuk memperoleh perpanjangan izin Studi Kelayakan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat No. 61/CPM/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Surat No. 042/CPM-EXT/IX-12 tanggal 8 November 2012.

Pada tanggal 18 September 2014, CPM telah menyampaikan draft laporan akhir studi kelayakan penambangan dan pengolahan emas-perak Poboya di wilayah Kontrak Karya blok I kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan Surat CPM No. 031/CPM-EXT/IX-14.

Rekomendasi perpanjangan Tahap ke II Studi Kelayakan telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Tengah kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sesuai Surat No. 541.12/1971/DISENERGI tanggal 4 April 2012 dan No. 540/293/DIS.ESDM tanggal 30 April 2012.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, CPM masih dalam proses mendapatkan izin perpanjangan Studi Kelayakan untuk Tahap Kedua dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

CPM menerima surat persetujuan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. SK.389/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk Kabupaten Luwu Utara (Blok II), Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 21.181,55 hektar sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 dan No. SK.388/Menhut-II/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-toli dan Parigi Moutong (Blok I, IV, V dan VI), Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 29.223 hektar yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2013.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, CPM masih dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan IPPKH dari Kementerian Kehutanan sesuai Surat No. 039/CPM-EXT/X-12 dan No. 040/CPM-EXT/X-12 tertanggal 24 Oktober 2012.

PT Gorontalo Minerals (GM)

Saat ini, kegiatan Kontrak Karya GM telah sampai pada Tahap Studi Kelayakan dengan total wilayah yang dipertahankan seluas 36.070 hektar dengan galian berupa emas dan mineral turunannya.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

CPM submitted the application to obtain the extension of the Feasibility Study permits from the Directorate General of Mineral and Coal based on Letter No. 61/CPM/XII/2011 dated December 27, 2011, and Letter No. 042/CPM-EXT/IX-12 dated November 8, 2012.

On September 18, 2014, CPM has submitted the draft final report of the feasibility study of mining and processing of gold-silver Poboya in the first block of the Contract of Work to the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia with CPM Letter No. 031/CPM-EXT/IX-14.

Recommendation for extension of the Feasibility Study Stage II was already given by the Governor of South Sulawesi and Central Sulawesi to the Directorate General of Mineral and Coal based on Letter No. 541.12/1971/DISENERGI dated April 4, 2012 and No. 540/293/DIS.ESDM dated April 30, 2012.

As of completion date of the consolidated financial statements, CPM is still in the process of obtaining an extension of the Feasibility Study permits for the Second Stage from the Directorate General Mineral and Coal.

CPM received an approval letter from the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia for the IPPKH on its exploration activities in Luwu Utara Regency (Block II), South Sulawesi Province, with an area of 21,181.55 hectares based on Decree No. SK.389/Menhut-II/2012 dated July 23, 2012 valid until January 27, 2013 and Decree No. SK.388/Menhut-II/2012 dated July 23, 2012 for Palu City, Donggala Regency, Toli-Toli Regency, and Parigi Moutong Regency (Block I, IV, V and VI) Central Sulawesi Province, with an area of 29,223 hectares valid until January 28, 2013.

As of completion date of the consolidated financial statements, CPM is still in the process of obtaining extension of the IPPKH from the Ministry of Forestry based on Letter No. 039/CPM-EXT/X-12 and No. 040/CPM-EXT/X-12 dated October 24, 2012.

PT Gorontalo Minerals (GM)

Currently, GM's CoW activities are in the Stage of Feasibility Study with a total area of 36,070 hectares for gold and other supplemental minerals.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

GM telah memperoleh izin perpanjangan Studi Kelayakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 741.K/30/DJB/2012 tertanggal 19 Juli 2012. Izin ini berlaku untuk dua belas (12) bulan dimulai dari tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013.

Untuk mendapatkan izin memasuki Tahap Konstruksi, pada tanggal 12 Agustus 2014, GM telah mengirim perbaikan Final Dokumen Akhir Studi Kelayakan Penambangan dan Pengolahan Tembaga dan Mineral Pengikutnya di Proyek Sungai Mak Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo dengan Surat No. 029/GM-EXT/VIII-14. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, GM masih dalam proses mendapatkan Izin Memasuki Tahap Konstruksi.

GM telah mendapatkan persetujuan Tekno Ekonomi Dokumen Studi Kelayakan Kontrak Karya berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1131/31.02/DBM/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

GM telah berhasil mendapatkan perpanjangan kedua atas IPPKH yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Kementerian Kehutanan No. SK.4160/Menhut-VII/PKH/2013. GM akan melanjutkan rencana untuk mendapatkan IPPKH untuk Tahap Konstruksi setelah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disetujui oleh Pemerintah.

c. Kontrak Karya - PT Pendopo Energi Batubara

Pada tanggal 20 November 1997, PT Pendopo Energi Batubara (PEB), Entitas Anak, menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia dimana PEB ditunjuk sebagai kontraktor tunggal untuk melaksanakan aktivitas penambangan batubara selama tiga puluh (30) tahun sejak dimulainya periode operasi pada area pertambangan tertentu di Sumatera Selatan yang pada awalnya meliputi area seluas 97.330 hektar. PEB memulai aktivitas operasinya pada tanggal 5 Mei 2009. Kontrak Karya memberikan hak kepada PEB sebesar 86,5% dari jumlah batubara yang diproduksi dari proses produksi akhir, dan sisanya sebesar 13,5% merupakan milik Pemerintah Indonesia. PEB memiliki tanggung jawab tunggal dalam hal membiayai operasi penambangan batubara di area konsesi dan diharuskan untuk memelihara kecukupan modal untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak Karya. PEB juga memiliki kewajiban untuk membayar sewa wilayah pertambangan kepada Pemerintah Indonesia.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

GM obtained the extension permit for Feasibility Study based on the Decision Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 741.K/30/DJB/2012 dated July 19, 2012. The extension permit was valid for twelve (12) months from July 19, 2012 until July 18, 2013.

To obtain permit to entering the Construction Stage, on August 12, 2014, GM has submitted revise of Final Document of Feasibility Study for Mining and Mineral Processing Copper and followers at Mak River Project in Bone Bolango Regency, Province of Gorontalo with Letter No. 029/GM-EXT/VIII-14. As of the completion date of the consolidated financial statements, GM is in the process of obtaining the Entering to Construction Stage Permit.

GM obtained the approval of Techno Economic Feasibility Study Documents for CoW based on the Decision Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. 1131/31.02/DBM/2014 dated August 21, 2014.

GM successfully obtained the the second extension of the IPPKH permit valid until July 18, 2015 based on Ministry of Forestry Decree No. SK.4160/Menhut-VII/PKH/2013. GM will plan to obtain the IPPKH for Construction Stage after its Environmental Impact Analysis (AMDAL) is approved by the Government.

c. Contract of Work - PT Pendopo Energi Batubara

On November 20, 1997, PT Pendopo Energi Batubara (PEB), a Subsidiary, entered into a Contract of Work (CoW) with the GOI whereby PEB was appointed as sole contractor for coal operations for thirty (30) years from the start of operations with respect to specific mining areas in South Sumatera, initially covering 97,330 hectares. PEB commenced its operations on May 5, 2009. The CoW gives the right to PEB to take 86.5% of the coal produced from the final production process with the balance of 13.5% being retained by the GOI. PEB has the sole responsibility for the financing of its coal operations in the concession areas and must maintain sufficient capital to carry out its obligations under the CoW. PEB is also obligated to pay rent on the mining area to the GOI.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Selanjutnya disebutkan dalam Kontrak Karya bahwa apabila pada suatu wilayah yang dieksplorasi tidak ditemukan cadangan batubara yang secara komersial dapat ditambang, PEB diizinkan untuk menyerahkan kembali wilayah pertambangan tersebut kepada Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1998, PEB telah menyerahkan 24.330 hektar atau 25% dari area konsesi awal kepada Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2004, PEB juga menyerahkan 55.160 hektar kepada Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2014, luas wilayah pertambangan PEB meliputi 17.840 hektar.

d. Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) – PT Kutai Bara Nusantara (dahulu PT Fajar Bumi Sakti)

Pada tanggal 7 November 1981, PT Kutai Bara Nusantara (KBN) (dahulu PT Fajar Bumi Sakti), Entitas Anak, memperoleh KP Eksploitasi serta KP Pengangkutan dan Penjualan, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan No. 3221/SK-DJ/395 DUP.Tahun 1981 dan No. 3222/SK-DJ/396 DUP.Tahun 1981, yang berlaku selama sepuluh (10) tahun dari tahun 1981 sampai tahun 1991. Wilayah konsesi seluas 538,34 hektar terletak di Kutai, Kalimantan Timur. Pada tanggal 21 Januari 1989, KBN memperoleh revisi cakupan area dan penjelasan tentang wilayah dari 538,34 hektar menjadi 988,34 hektar.

Pada tanggal 31 Maret 1992, KBN memperoleh perpanjangan KP Pengangkutan dan Penjualan dari tanggal 7 November 1991 sampai tanggal 7 November 1996, berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan No. 76K/2015/DDJP/1992. Sementara itu, pada tanggal 11 Oktober 1999, KBN memperoleh perpanjangan KP Eksploitasi sejak tanggal 7 Mei 1999 sampai tanggal 6 Mei 2009, berdasarkan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan No. 721K/23.01/DJP/1999.

Pada tanggal 11 Desember 2006, KBN memperoleh perpanjangan kedua dari KP Pengangkutan dan Penjualan dari tanggal 11 Desember 2006 sampai tanggal 11 Desember 2011, berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540/23/KP-AJ/DPE-V/XII/2006. Sementara itu, pada tanggal 10 Juni 2008, KBN memperoleh perpanjangan kedua dari KP Eksploitasi dari tanggal 10 Juni 2008 sampai tanggal 10 Juni 2018, berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540/051/KP-Ep/DPE-IV/VI/2008.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

As further stipulated in the CoW, in the event that any part of the area to be explored does not contain any commercially viable coal deposits, PEB may relinquish such area to the GOI. Accordingly, on November 20, 1998, PEB relinquished 24,330 hectares or 25% of the initial concession area, to the GOI. In 2004, PEB relinquished a further 55,160 hectares to the GOI. As of December 31, 2014, the mining area consists of 17,840 hectares.

d. Coal Mining Rights (KP)/Mining License (IUP) – PT Kutai Bara Nusantara (formerly PT Fajar Bumi Sakti)

On November 7, 1981, PT Kutai Bara Nusantara (KBN) (formerly PT Fajar Bumi Sakti), a Subsidiary, obtained a KP for Exploitation and a KP for Transport and Sales, based on the Decision Letters from the Directorate General of Mining No. 3221/SK-DJ/395 DUP.Tahun 1981 and No. 3222/SK-DJ/396 DUP.Tahun 1981, respectively, which were valid for ten (10) years from 1981 to 1991. The concession area covering 538.34 hectares is located in Kutai, East Kalimantan. On January 21, 1989, KBN obtained revised coverage area and explanation of territory from 538.34 hectares to 988.34 hectares.

On March 31, 1992, KBN obtained an extension of the KP for Transport and Sales from November 7, 1991 until November 7, 1996, based on the Decision Letter from the Directorate General of Mining No. 76K/2015/DDJP/1992. While on October 11, 1999, KBN obtained an extension of the KP for Exploitation from May 7, 1999 until May 6, 2009, based on the Decision Letter from the Directorate General of Mining No. 721K/23.01/DJP/1999.

On December 11, 2006, KBN obtained a second extension of the KP for Transport and Sales from December 11, 2006 until December 11, 2011, based on the Decision Letter from the Regent of Kutai Kartanegara No. 540/23/KP-AJ/DPE-V/XII/2006. While on June 10, 2008, KBN obtained a second extension of the KP for Exploitation from June 10, 2008 until June 10, 2018, based on the Decision Letter from Regent of Kutai Kartanegara No. 540/051/KP-Ep/DPE-IV/VI/2008.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 10 November 2010, KBN memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540/2819/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2010, yang berlaku selama sepuluh (10) tahun dari tanggal 10 Juni 2008 sampai tanggal 10 Juni 2018, yang merevisi KP Eksploitasi serta KP Pengangkutan dan Penjualan tersebut di atas. Cakupan area konsesi adalah 984,5 hektar, dengan daerah operasi produksi di Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

e. Izin Usaha Pertambangan - PT Mitra Bisnis Harvest

Pada tanggal 5 Agustus 2009, PT Mitra Bisnis Harvest (MBH) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 03/K/IUP-I/XXVII/2009 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Pengandonan dan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas area konsesi 6.972 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama empat (4) tahun sampai dengan 5 Agustus 2013.

Pada tanggal 26 Juni 2012, MBH memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 493/KPTS/TAMBEN/2012 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas area konsesi 18.000 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku sampai dengan 12 Desember 2013.

MBH sedang dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 017/LGL-EXT/MbisH/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 untuk lokasi Banyuasin dan Surat Keputusan No. 010/LGL-EXT/MbisH/VI/2013 tanggal 25 April 2013 untuk lokasi Ogan Komering Ulu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, permintaan untuk peningkatan masih dalam proses.

f. Izin Usaha Pertambangan - PT Buana Minera Harvest

Pada tanggal 9 Mei 2011, PT Buana Minera Harvest (BMH) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 344 TAHUN 2011 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas area konsesi 9.775 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama tiga (3) tahun sampai dengan 9 Mei 2014.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On November 10, 2010, KBN obtained an IUP for Production Operation based on the Decision Letter from the of Regent of Kutai Kartanegara No. 540/2819/IUP-OP/MB-PBAT/XI/2010, which is valid for ten (10) years from June 10, 2008 to June 10, 2018, revising the KP obtained for Exploitation and for Transport and Sales referred to above. The concession coverage area is 984.5 hectares, with production operation area in Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, East Kalimantan.

e. Mining Permit - PT Mitra Bisnis Harvest

On August 5, 2009, PT Mitra Bisnis Harvest (MBH) obtained a Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Ogan Komering Ulu No. 03/K/IUP-I/XXVII/2009 for mining location in Pengandonan and Semidang Aji Subdistrict, Ogan Komering Ulu District, South Sumatera Province, with a concession area of 6,972 hectares. Such permit is valid for four (4) years until August 5, 2013.

On June 26, 2012, MBH obtained an extension of Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Banyuasin No. 493/KPTS/TAMBEN/2012 for mining location in Pulau Rimau Subdistrict, Banyuasin District, South Sumatera Province, with a concession area of 18,000 hectares. Such permit is valid until December 12, 2013.

MBH is in the process obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit based on Decision Letter No. 017/LGL-EXT/MbisH/X/2013 dated October 3, 2013 for Banyuasin location and letter No. 010/LGL-EXT/MbisH/VI/2013 dated April 25, 2013 for Ogan Komering Ulu location. As of the completion date of the consolidated financial statements, the requests for upgrade are still in process.

f. Mining Permit - PT Buana Minera Harvest

On May 9, 2011, PT Buana Minera Harvest (BMH) obtained Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Banyuasin No. 344 TAHUN 2011 for mining location in Pulau Rimau and Tanjung Lago Subdistrict, Banyuasin District, South Sumatera Province, with a concession area of 9,775 hectares. Such permit is is valid for three (3) years until May 9, 2014.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 27 September 2009, BMH memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No. 04/K/IUP-I/XXVII/2009 untuk lokasi pertambangan Lubuk Batang dan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas area konsesi 9.579 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama lima (5) tahun sampai dengan 27 September 2014.

BMH sedang dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 024/LGL-EXT/BMH/IV/2014 tanggal 3 April 2014 untuk lokasi Banyuasin dan Surat Keputusan No. 004/LGL-EXT/BMH/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 untuk lokasi Ogan Komering Ulu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, permintaan untuk peningkatan masih dalam proses.

g. Izin Usaha Pertambangan - PT MBH Mining Resource

Pada tanggal 12 Agustus 2009, PT MBH Mining Resource (MBH Mining) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 598a TAHUN 2009 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 11.380 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama lima (5) tahun sampai dengan 12 Agustus 2014.

MBH Mining sedang dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 025/LGL-EXT/MBHMIR/IV/2014 tanggal 3 April 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, permintaan untuk peningkatan masih dalam proses.

h. Izin Usaha Pertambangan - PT Bintang Mineral Resource

Pada tanggal 6 Desember 2009, PT Bintang Mineral Resource (BMR) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 16/KPTS/TAMBEN/2009 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Buai Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas area konsesi 13.673 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku mulai dari tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan 30 Januari 2015.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On September 27, 2009, BMH obtained Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Ogan Komering Ulu No. 04/K/IUP-I/XXVII/2009 for mining location in Lubuk Batang and Semidang Aji Subdistrict, Ogan Komering Ulu District, South Sumatera Province, with a concession area of 9,579 hectares. Such permit is valid for five (5) years until September 27, 2014.

BMH is in the process obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit based on Decision Letter No. 024/LGL-EXT/BMH/IV/2014 dated April 3, 2014 for Banyuasin location and letter No. 004/LGL-EXT/BMH/VI/2014 dated June 17, 2014 for Ogan Komering Ulu location. As of the completion date of the consolidated financial statements, the requests for upgrade are still in process.

g. Mining Permit - PT MBH Mining Resource

On August 12, 2009, PT MBH Mining Resource (MBH Mining) obtained Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Banyuasin No. 598a TAHUN 2009 for mining location in Tungkal Ilir and Pulau Rimau Subdistrict, Banyuasin District, South Sumatera Province, with concession area of 11,380 hectares. Such permit is valid for five (5) years until August 12, 2014.

MBH Mining is in the process obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit based on Decision Letter No. 025/LGL-EXT/MBHMIR/IV/2014 dated April 3, 2014. As of the completion date of the consolidated financial statements, the request for upgrade is still in process.

h. Mining Permit - PT Bintang Mineral Resource

On December 6, 2009, PT Bintang Mineral Resource (BMR) obtained Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of South Ogan Komering Ulu No. 16/KPTS/TAMBEN/2009 for mining location in Buai Rawan Subdistrict, South Ogan Komering Ulu District, South Sumatera Province, with concession area of 13,673 hectares. Such permit is valid from December 7, 2009 until January 30, 2015.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

BMR sedang dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 001/LGL-EXT/BMR/1/2015 tanggal 12 Januari 2015. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, permintaan untuk peningkatan masih dalam proses.

i. Izin Usaha Pertambangan - PT MBH Minera Resources

Pada tanggal 20 Juli 2011, PT MBH Minera Resources (MBH Minera) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 239/KPTS/TAMBEN/2010 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Muaradua dan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 9.393 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama lima belas (15) tahun sampai dengan 20 Juli 2025.

j. Izin Usaha Pertambangan - PT Citra Jaya Nurcahya

Pada tanggal 30 Desember 2011, PT Citra Jaya Nurcahya (CJN) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat No. 503/335/KEP/PERTAM/2011 untuk lokasi pertambangan di Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan dengan luas area konsesi 5.836 hektar. Izin usaha pertambangan tersebut berlaku selama tiga (3) tahun sampai dengan 30 Desember 2014.

CJN sedang dalam proses mendapatkan peningkatan dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan No. 003/LGL-EXT/CJN/XI/2014 tanggal 11 November 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, permintaan untuk peningkatan masih dalam proses.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

BMR is in the process obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit based on Decision Letter No. 001/LGL-EXT/BMR/1/2015 dated January 12, 2015. As of the completion date of the consolidated financial statements, the request for upgrade is still in process.

i. Mining Permit - PT MBH Minera Resources

On July 20, 2011, PT MBH Minera Resources (MBH Minera) obtained Production Operation Permit based on the Decision Letter from the Regent of South Ogan Komering Ulu No. 239/KPTS/TAMBEN/2011 for mining location in Muaradua dan Buay Sandang Aji Subdistrict, South Ogan Komering Ulu District, South Sumatera Province, with a concession area of 9,393 hectares. Such permit is valid for fifteen (15) years until July 20, 2025.

j. Mining Permit - PT Citra Jaya Nurcahya

On December 30, 2011, PT Citra Jaya Nurcahya (CJN) obtained Mining Exploration Permit based on the Decision Letter from the Regent of Lahat No. 503/335/KEP/PERTAM/2011 for mining location in West Kikim Subdistrict, Lahat District, South Sumatera Province, with concession area of 5,836 hectares. Such permit is valid for three (3) years until December 30, 2014.

CJN is in the process obtaining an upgrade from Mining Exploration Permit to Mining Production Operation Permit based on letter No. 003/LGL-EXT/CJN/XI/2014 dated November 11, 2014. As of the completion date of the consolidated financial statements, the request for upgrade is still in process.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

k. Perjanjian Penjualan Batubara Bersama

Pada tanggal 23 November 2001, Arutmin dan Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral (DJGSM) menandatangani Perjanjian Penjualan Batubara Bersama (PPBB). Pada tanggal 1 Juli 2005, KPC dan DJGSM menandatangani PPBB. PPBB ini terkait dengan penyediaan batubara sesuai dengan PKP2B yang meliputi seluruh jenis batubara yang tersedia untuk dijual oleh Arutmin dan KPC, dan perjanjian ini memiliki jangka waktu lima (5) tahun, yang berakhir pada tanggal 30 September 2006 untuk Arutmin dan 30 Juni 2010 untuk KPC. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, para pihak masih bernegosiasi terkait perubahan perjanjian tersebut.

Sesuai dengan PPBB, jumlah setiap pengapalan masing-masing pihak ditentukan berdasarkan formula tertentu seperti yang tercantum dalam PPBB. PPBB memberikan hak Arutmin dan KPC masing-masing sebesar 86,5% dari hasil penjualan batubara, sedangkan 13,5% untuk dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menunjuk Arutmin dan KPC sebagai agen tunggalnya untuk menjual atas produksi batubara berdasarkan PPBB. Pemerintah Indonesia diharuskan untuk membayar biaya jasa administrasi penjualan sebesar 2,5% dari harga FOB kepada Arutmin untuk porsi setiap pengapalan yang menjadi hak Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diharuskan untuk membayar biaya administrasi penjualan sebesar 1,5% dari harga FOB kepada KPC untuk porsi setiap pengapalan yang menjadi hak Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam PPBB, Arutmin dan KPC bertanggung jawab untuk pemasaran dan menandatangani kontrak untuk penjualan semua batubara, dan menatausahakan dan melaksanakan seluruh kontrak oleh Arutmin dan KPC untuk penjualan batubara. Semua penjualan sehubungan dengan pengiriman ditagih dan semua biaya yang berkaitan dengan pengiriman harus dibayar oleh Arutmin dan KPC. Namun, DJGSM akan menanggung bagiannya atas biaya, sebagaimana didefinisikan dalam PPBB, atas setiap pengapalan dengan rasio yang berlaku untuk setiap pengapalan.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

k. Joint Coal Sales Agreement

On November 23, 2001, Arutmin and the Directorate General of Geology and Mineral Resources (DJGSM) entered into the Joint Coal Sales Agreement (JCSA). On July 1, 2005, KPC and DJGSM entered into the JCSA. These JCSAs are related to the supply of coal produced under the CCoW that covers all types of coal available for sale by Arutmin and KPC, and have a five (5)-year term, which expired on September 30, 2006 for Arutmin and June 30, 2010 for KPC. As of the completion date of the consolidated financial statements, the parties are still in negotiation in respect of a new agreement.

Pursuant to the JCSA, the amount of each shipment deemed to be from each party shall be determined based on a specific formula set forth in the JCSA. The JCSA entitles Arutmin and KPC each to take 86.5% of the coal sales proceeds, while the portion of 13.5% will be for the account of and owned by the GOI. The GOI appointed the Arutmin and KPC as their sole agents to sell their coal entitlement pursuant to JCSAs. The GOI is required to pay a sales administration fee of 2.5% from FOB price to Arutmin for the portion of each shipment to which the GOI is entitled. The GOI is required to pay a sales administration fee of 1.5% from FOB price to KPC for the portion of each shipment to which the GOI is entitled.

As provided in the JCSAs, Arutmin and KPC are responsible for marketing and entering into contracts for the sale of all coal, and administering and performing all contracts entered into by Arutmin and KPC for the sale of coal. All sales with respect to shipments must be collected and all costs with respect to shipments must be paid by Arutmin and KPC. However, DJGSM shall bear its share of the apportionable expenses, as defined in the JCSA, of each shipment in the ratio applicable to such shipments.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

I. Sulawesi Joint Venture Agreement

Pada tanggal 12 Februari 1986, International Minerals Company LLC (IMC) (dahulu bernama Utah Sulawesi Inc.), Entitas Anak, menandatangani *Joint Venture Agreement* ("Sulawesi JVA") dengan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan Placer Development Indonesia Limited (Placer) dengan tujuan kerjasama eksplorasi dan eksploitasi mineral di Sulawesi.

Berdasarkan Sulawesi JVA, IMC memiliki tanggung jawab kepada Antam untuk memenuhi semua kewajiban terkait dengan wilayah Paleleh-Sumalata. Tanggung jawab tersebut meliputi:

- a. menyediakan dana dalam bentuk utang atau modal untuk biaya eksplorasi dengan ketentuan bahwa sejumlah USD1.000.000 akan dianggap sebagai kontribusi modal dan setiap kontribusi dalam bentuk utang tidak akan dikenakan bunga sebelum berakhirnya masa Studi Kelayakan;
- b. menyediakan dana yang diperlukan oleh setiap perusahaan yang akan dibentuk dalam rangka pengembangan wilayah pertambangan;
- c. membebaskan Antam dari setiap kewajiban untuk berkontribusi dalam persiapan eksploitasi dan pengembangan sehubungan dengan kepemilikan sebesar 20% pada perusahaan, sampai dengan fasilitas penambangan mineral telah terbangun; dan
- d. menanggung setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan Kuasa Eksplorasi, namun atas Kuasa Eksploitasi dengan ketentuan bahwa untuk daerah yang telah ditentukan sebagai wilayah Kontrak Karya, biaya tersebut akan ditanggung oleh perusahaan yang menandatangani Kontrak Karya.

Berdasarkan Sulawesi JVA, Antam memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. memasuki wilayah eksplorasi;
- b. menunjuk wakilnya untuk menginspeksi;
- c. mendapatkan data eksplorasi apabila perjanjian ini dihentikan; dan
- d. menunjuk calon untuk menduduki suatu posisi yang diperlukan dalam operasi.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

I. Sulawesi Joint Venture Agreement

On February 12, 1986, International Minerals Company LLC (IMC) (formerly Utah Sulawesi Inc.), a Subsidiary, signed a *Joint Venture Agreement* ("Sulawesi JVA") with PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) and Placer Development Indonesia Limited (Placer) for the purpose of cooperation in the exploration and exploitation of minerals in Sulawesi.

Pursuant to the Sulawesi JVA, IMC shall be responsible to Antam for fulfilling any and all obligations relating to the Paleleh-Sumalata area. Such responsibilities shall include:

- a. advancing funds in the form of loan or capital allocated for exploration costs on the condition that an amount of USD1,000,000 will be deemed as capital contribution and every contribution in the form of loan shall not be charged with interest prior to the expiry of the Feasibility Study period;
- b. advancing funds needed by each and every company that will be set up for the development of the mining area;
- c. releasing and discharging Antam from each and every obligation to contribute in the preparation of exploitation and development in connection with its 20% ownership until mineral mining facilities have been constructed; and
- d. bearing any and all costs incurred in obtaining and maintaining the Exploration License provided, however, that on any exploitation or area determined as the CoW area, such costs will be borne by the company holding the CoW.

Based on the Sulawesi JVA, Antam has certain rights as follows:

- a. to enter the exploration area;
- b. to designate its representative to conduct inspection;
- c. to obtain exploration data in the event of termination of the agreement; and
- d. to designate its candidate to hold a position as required in operations.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Para pihak sepakat untuk membentuk GM untuk menjadi pihak dalam Kontrak Karya. Seluruh hasil eksplorasi yang telah dilakukan, akan dialihkan kepada GM setelah GM terbentuk, 80% saham akan diambil bagian oleh IMC dan 20% oleh Antam. Direksi dan Dewan Komisaris GM tersebut berjumlah lima (5) orang dan Antam, setiap saat dapat menunjuk minimal satu (1) orang sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. Pembiayaan sampai dengan tanggal dimulainya periode operasi produksi akan disediakan oleh IMC.

Apabila memungkinkan, seluruh emas dan perak yang diproduksi akan dimurnikan oleh Antam. Mineral lainnya akan dimurnikan oleh GM dan apabila GM tidak melakukan pemurnian, Antam dapat memilih untuk memurnikan mineral tersebut.

Apabila kepemilikan atas 50% hak suara pada IMC dipegang oleh *juridical entity*, maka induk IMC harus menyampaikan jaminan secara tertulis kepada Antam.

Pada tanggal 22 Oktober 1987, Sulawesi JVA diperbaharui untuk memasukkan persetujuan Kementerian Keuangan No. S-1194/MK.011/1987 tanggal 22 Oktober 1987.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1992, Sulawesi JVA kembali diperbaharui untuk:

- a. membuat IMC satu-satunya *mining party* dalam Sulawesi JVA;
- b. menambahkan beberapa wilayah Kontrak Karya di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai wilayah Sulawesi JVA; dan
- c. menambahkan ketentuan bahwa IMC bertanggung jawab seluruhnya atas wilayah Kotamobagu dan Kwandang-Buroko.

m. Mauritania Joint Venture Agreement

Pada bulan Juli 2007, Forerunner International Pte. Ltd. (Forerunner), Entitas Anak, dan Rubis International Limited (Rubis) menandatangani *Joint Venture Agreement* ("Mauritania JVA") untuk mengatur manajemen dan operasi Bumi Holding S.A.S. (Bumi Holding) dan Bumi Mauritania S.A. (Bumi Mauritania), Entitas Anak.

Berdasarkan Mauritania JVA, para pihak sepakat untuk membentuk Bumi Holding dengan porsi kepemilikan saham 40% pada Rubis dan 60% pada Forerunner. Modal Bumi Holding adalah EUR37.000 terdiri dari 3.700 saham.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

The parties agreed to establish GM to become a party to the CoW. The results of exploration will be transferred to GM upon its establishment, in which IMC will hold 80% of the shares and Antam the remaining 20%. Board of Directors and Board of Commissioners of GM shall consist of five (5) persons and Antam, from time to time, may appoint a minimum of one (1) person to serve on the Board of Directors and Board of Commissioners. The funding for operations up to the date of commencement of the period of production will be provided by IMC.

If possible, all gold and silver produced shall be refined by Antam. Other minerals shall be refined by GM and if it does not carry out such refining process then Antam may opt to do so.

If 50% of the voting rights in IMC are held by a juridical entity, the parent company of IMC must submit a written guarantee to Antam.

On October 22, 1987, the Sulawesi JVA was amended to incorporate the approval of the Ministry of Finance No. S-1194/MK.011/1987 dated October 22, 1987.

Furthermore, on July 1, 1992, the Sulawesi JVA was amended in order to:

- a. *make IMC the sole mining party to the Sulawesi JVA;*
- b. *add certain CoW areas in Regency of Gorontalo and Regency of Bolaang Mongondow Regency as Sulawesi JVA areas; and*
- c. *make IMC wholly responsible for the areas of Kotamobagu and Kwandang-Buroko.*

m. Mauritania Joint Venture Agreement

In July 2007, Forerunner International Pte. Ltd. (Forerunner), a Subsidiary, and Rubis International Limited (Rubis) signed a Joint Venture Agreement ("Mauritania JVA") with respect to the management and operations of Bumi Holding S.A.S. (Bumi Holding) and Bumi Mauritania S.A. (Bumi Mauritania), Subsidiaries.

In accordance with the Mauritania JVA, the parties agreed to set up Bumi Holding with ownership being 40% by Rubis and 60% by Forerunner. Bumi Holding's capital shall amount to EUR37,000 consisting of 3,700 shares.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Forerunner dan Rubis setuju bahwa Bumi Holding didirikan khusus untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi mineral melalui Bumi Mauritania. Terkait dengan ini, Forerunner bertanggung jawab membantu Bumi Mauritania dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi serta menyediakan manajemen yang diperlukan untuk operasi tersebut. Sedangkan Rubis bertanggungjawab atas perizinan dan persetujuan yang diperlukan Bumi Mauritania dalam operasinya.

Berdasarkan Mauritania JVA, modal kerja Bumi Mauritania dapat diperoleh dari kas Forerunner atau pinjaman pemegang saham. Sedangkan modal kerja Bumi Holding dapat diperoleh dari penempatan saham baru, pinjaman pemegang saham secara proporsional atau pinjaman bank. Para pemegang saham tidak dapat mengalihkan tagihan atas pinjaman kepada pihak ketiga tanpa mengalihkan seluruh sahamnya dalam Bumi Holding kepada pihak ketiga tersebut. Apabila ada pemegang saham yang tidak dapat berpartisipasi dalam pemberian pinjaman, pemegang saham lainnya dapat menanggung terlebih dahulu kewajiban tersebut.

Pada tanggal 4 Desember 2013, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) melalui Entitas Anaknya, Lemington Investments Pte. Ltd., telah mengalihkan pengendaliannya terhadap Proyek Mauritania, yang terdiri dari Bumi Holding, Bumi Mauritania serta Tamagot Bumi S.A. kepada Rubis.

n. Perjanjian Pengadaan Jangka Panjang KPC dan Arutmin

Pada tanggal 6 Juli 2005, IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), entitas pengendalian bersama, menandatangani Perjanjian Pengadaan Jangka Panjang (PPJP) masing-masing dengan KPC dan Arutmin, dimana KPC dan Arutmin setuju untuk menyediakan batubara bagi ICRL, dengan harga *fixed forward price* USD34,30 per ton berdasarkan nilai kalori 6.322 kcal/kg (yang disesuaikan dengan variasi nilai kalori). Perjanjian ini akan berakhir saat PKP2B Arutmin dan KPC berakhir (Catatan 49a).

Berdasarkan perjanjian ini, ICRL harus menjamin bahwa agen pemasarannya akan memperhitungkan produksi batubara dari KPC dan Arutmin (termasuk, tanpa terbatas, berkenaan dengan kuantitas, jenis, kualitas dan biaya) dan melakukan perundingan dengan KPC dan Arutmin, apabila menandatangani kontrak dengan pelanggan, dan/atau agen pemasaran akan selalu memberitahukan KPC dan Arutmin mengenai perincian setiap kontrak dan pembaharuannya, variasinya atau penghentiannya.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Forerunner and Rubis agreed that Bumi Holding is specifically set up to explore and exploit minerals through Bumi Mauritania. In relation to this, Forerunner shall be responsible for providing Bumi Mauritania with assistance in conducting such exploration and exploitation, as well as providing the management needed for such operations. In the meantime, Rubis shall be responsible for any and all licenses and approvals required by Bumi Mauritania for its operations.

In accordance with the Mauritania JVA, Bumi Mauritania's working capital may be obtained from Forerunner in cash or by shareholder's loan. Bumi Holding's working capital may be obtained from the placement of new shares, proportional shareholders' loan or bank loans. A shareholder may not assign claims over the loan to any third party without assigning all of its shares in Bumi Holding to such third party. In the event of the inability of a shareholder to participate in the granting of the loan, other shareholders may bear such obligation first.

On December 4, 2013, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) through its Subsidiary, Lemington Investments Pte. Ltd., has transferred its control over the Mauritania Project, which consists of Bumi Holding, Bumi Mauritania and Tamagot Bumi S.A. to Rubis.

n. KPC and Arutmin's Long-term Supply Agreements

On July 6, 2005, IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), a jointly controlled entity, entered into Long-term Supply Agreements (LTSAs) each with KPC and Arutmin under which KPC and Arutmin agreed to provide coal supply to ICRL, at a fixed forward price of USD34.30 per tonne based on a calorific value of 6,322 kcal/kg (as adjusted for variations in the calorific values). The agreements will expire at the termination of Arutmin's and KPC's CCoWs (Note 49a).

Under the agreement, ICRL shall secure that its marketing agents will take into account KPC's and Arutmin's coal productions (including, without limitation, in respect of quantity, type, quality and cost) and consult with KPC and Arutmin when entering into contracts with customers, and/or shall ensure that its marketing agents will keep KPC and Arutmin notified at all times of the details of each contract and any renewal, variation or termination thereof.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 26 Juni 2007, PPJP dari KPC dan Arutmin diubah dan disajikan kembali sehubungan dengan divestasi saham KPC, Arutmin, ICRL, PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kaltim) dan PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kalsel) sebesar 30%.

Pada tanggal 1 Juli 2008, PPJP diubah dengan mengganti harga *fixed forward* USD34,30 per ton menjadi USD60,80 per ton berdasarkan nilai kalori 6.322 kcal/kg (yang disesuaikan dengan variasi nilai kalori batubara). Harga *fixed forward* sebesar USD34,30 per ton dan USD60,80 per ton ditetapkan berdasarkan Index Harga Batubara bulan Mei 2005 dan Mei 2008 dari Barlow Jonker, perusahaan milik Wood Mackenzie, yang digunakan Perusahaan untuk memberikan jasa konsultasi sehubungan dengan penetapan harga batubara jenis *thermal* yang diproduksi Indonesia untuk batubara *bituminous* dan *sub-bituminous*.

Pada tanggal 21 Desember 2009, PPJP diubah untuk mengubah harga beli batubara antara KPC, Arutmin dan ICRL, dari harga *fixed forward* menjadi harga pasar yang wajar untuk setiap pengiriman. Perubahan ini berlaku sejak 1 Januari 2009.

Pada tanggal 30 Juni 2014, KPC dan ICRL setuju untuk mengakhiri PPJB.

o. Perjanjian Distribusi Kas

Pada tanggal 27 Juni 2007, IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim, ICRL, KPC dan Arutmin ("Perusahaan Batubara"), Perusahaan, Bhivpuri Investments Limited (Bhivpuri), Bank of New York, Standard Chartered Bank dan Kontraktor Utama [PT Thiess Contractors Indonesia, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), entitas asosiasi, dan PT Cipta Kridatama] dan Agen Pemasaran Utama (Glencore Coal (Mauritius) Ltd., Mitsubishi Corporation, BHP Billiton Marketing AG dan Enercorp Ltd.) menandatangani Perjanjian Distribusi Kas (CDA). Pada tanggal 30 Juni 2013, Perusahaan Batubara, Perusahaan, Bhivpuri, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG dan Kontraktor Utama (Thiess, PAMA, DEWA dan PT Cipta Kridatama) dan Agen Pemasaran Utama (Glencore, Forestdale Pte. Ltd., Mitsubishi dan BHP Billiton Marketing AG) menandatangani Perjanjian Penyajian Kembali CDA yang telah di amandemen dan disajikan kembali pada tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan perjanjian ini, pihak-pihak tersebut setuju menerapkan rekening administrasi dan pengelolaan kas dalam kaitannya dengan pendapatan KPC dan Arutmin dan pengaturan pembayaran tertentu, termasuk jumlah yang terutang oleh KPC dan Arutmin berdasarkan Perjanjian Kontraktor Utama dan Perjanjian Pemasaran Utama.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On June 26, 2007, KPC's and Arutmin's LTSAs were amended and restated as part of the 30% share divestment of KPC, Arutmin, ICRL, PT IndoCoal Kaltim Resources (IndoCoal Kaltim) and PT IndoCoal Kalsel Resources (IndoCoal Kalsel).

On July 1, 2008, these LTSAs were amended by changing the *fixed forward* price of USD34.30 per tonne to USD60.80 per tonne based on a calorific value of 6,322 kcal/kg (as adjusted for variations in the calorific value of the coal). The *fixed forward* prices of USD34.30 per tonne and USD60.80 per tonne were based on the Index Pricing Advice dated May 2005 and May 2008, respectively, from Barlow Jonker, a Wood Mackenzie company, which was retained by the Company to provide consulting services with respect to thermal coal pricing outcomes in Indonesia for bituminous and sub-bituminous coal.

On December 21, 2009, these LTSAs were amended to change the coal purchase price among KPC, Arutmin and ICRL, from a *fixed forward* price to that of applicable market price for each shipment. This amendment became effective January 1, 2009.

On June 30, 2014, KPC and ICRL agreed to terminate the LTSA.

o. Cash Distribution Agreement

On June 27, 2007, IndoCoal Kalsel, IndoCoal Kaltim, ICRL, KPC and Arutmin (the "Coal Companies"), the Company, Bhivpuri Investments Limited (Bhivpuri), Bank of New York, Standard Chartered Bank, and each Principal Contractors [PT Thiess Contractors Indonesia, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), an associate, and PT Cipta Kridatama] and Principal Marketing Agents (Glencore Coal (Mauritius) Ltd., Mitsubishi Corporation, BHP Billiton Marketing AG and Enercorp Ltd.) entered into a Cash Distribution Agreement (CDA). On June 30, 2013, the Coal Companies, the Company, Bhivpuri, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG and each Principal Contractors (Thiess, PAMA, DEWA and PT Cipta Kridatama) and Principal Marketing Agents (Glencore, Forestdale Pte. Ltd., Mitsubishi and BHP Billiton Marketing AG) entered into a CDA restatement agreement with an amendment and restatement date of July 1, 2013. Under this agreement, the parties have agreed to implement certain account administration and cash management arrangements in relation to the revenue of KPC and Arutmin and certain payment arrangements, including the amounts owed by KPC and Arutmin pursuant to the Principal Contractor Agreements and the Marketing Agreements.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 2 Juli 2014, Arutmin, KPC, ICRL, IndoCoal Kalsel, Bumi, Bhivpuri, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank cabang Singapura, Deutsche Bank AG cabang Jakarta dan Glencore International AG menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali sehubungan dengan CDA pada tanggal 27 Juni 2007 sebagaimana telah diperbaharui dan dinyatakan kembali pada tanggal 1 Juli 2013, dimana para pihak telah sepakat untuk menghapus mekanisme pendistribusian dana terhadap KPC dan IndoCoal Kaltim dari CDA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, para pihak setuju untuk melaksanakan rekening administrasi dan pengaturan manajemen kas tertentu dalam kaitannya dengan pendapatan pengelolaan dari Arutmin dan pengaturan pembayaran tertentu, termasuk jumlah terutang oleh Arutmin sesuai dengan Perjanjian Kontraktor Utama dan Perjanjian Pemasaran Utama.

Pada tanggal yang sama, KPC, IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC), IndoCoal Kaltim, Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank cabang Singapura, Perusahaan, Bhira Investments Limited (Bhira), Bhivpuri, Mountain Netherland, Deutsche Bank AG cabang Jakarta dan Glencore International AG menandatangani CDA baru. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak setuju untuk menerapkan rekening administrasi dan pengelolaan kas dalam kaitannya dengan pendapatan KPC dan pengaturan pembayaran tertentu, termasuk jumlah yang terutang oleh KPC sesuai dengan Perjanjian Kontraktor Utama dan Perjanjian Pemasaran Utama. CDA baru ini akan berakhir pada tanggal dimana PKP2B KPC, atau perpanjangannya, berakhir atau dihentikan.

Pada tanggal 30 September 2014, KPC, IndoCoal KPC, IndoCoal Kaltim, Bank of New York Mellon, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd. (BTMU) cabang Singapura, Perusahaan, Bhira, Bhivpuri, Mountain Netherlands, Deutsche Bank AG cabang Jakarta dan Glencore International AG menandatangani perubahan, penyajian kembali dan penambahan perjanjian CDA KPC untuk menyetujui BTMU sebagai penerus Standard Chartered Bank, sebagai rekening administrasi bank, berdasarkan pemberitahuan penghentian.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On July 2, 2014, Arutmin, KPC, ICRL, IndoCoal Kalsel, Bumi, Bhivpuri, Bank of New York Mellon, Singapore branch of Standard Chartered Bank, Jakarta branch of Deutsche Bank AG and Glencore International AG entered into an amendment and restatement agreement in respect of the CDA dated June 27, 2007 as amended and restated on July 1, 2013, whereby the parties have agreed to remove the mechanism for the distribution of funds attributable to KPC and IndoCoal Kaltim from amended CDA on the terms set forth in the agreement. Furthermore, the parties agreed to implement certain account administration and cash management arrangements in relation to the revenue of Arutmin and certain payment arrangements, including the amounts owed by Arutmin pursuant to the Principal Contractor Agreements and Marketing Agreements.

On the same date, KPC, IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited (IndoCoal KPC), IndoCoal Kaltim, Bank of New York Mellon, Singapore branch of Standard Chartered Bank, the Company, Bhira Investments Limited (Bhira), Bhivpuri, Mountain Netherlands, Jakarta branch of Deutsche Bank AG and Glencore International AG entered into a new CDA. Under this agreement, the parties agreed to implement certain account administration and cash management arrangements in relation to the revenue of KPC and certain payment arrangements, including the amounts owed by KPC pursuant to the Principal Contractor Agreements and the Marketing Agreements. This new CDA will end on the date on which the CCoW granted to KPC, or any extension thereof, expires or is terminated.

On September 30, 2014, KPC, IndoCoal KPC, IndoCoal Kaltim, Bank of New York Mellon, Singapore branch of the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTd. (BTMU), the Company, Bhira, Bhivpuri, Mountain Netherlands, Jakarta branch of Deutsche Bank AG and Glencore International AG entered into an amendment, restatement and accession agreement of the KPC CDA to simultaneously agree with the accession of BTMU as the successor to Standard Chartered Bank, as the account bank, pursuant to the latter's notice of termination.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 5 November 2014, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kalsel, Bank of New York Mellon (BNYM), Deutsche Bank AG cabang Jakarta, Perusahaan, Bhivpuri dan masing-masing Kontraktor Utama dan Agen Pemasaran Utama [Glencore dan Forestdale Pte. Ltd] menandatangani perubahan dan penyajian kembali perjanjian sehubungan dengan CDA tanggal 27 Juni 2007 sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 Juli 2013 dan 2 Juli 2014 untuk secara bersamaan setuju BNYM sebagai penerus SCB, sebagai rekening administrasi bank, berdasarkan berdasarkan pemberitahuan penghentian.

Perjanjian ini akan berakhir pada saat mana yang terjadi lebih dulu, antara saat berakhirnya PKP2B Arutmin dan KPC (Catatan 49a) atau saat perpanjangannya berakhir atau dihentikan.

p. Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan

1. Pada tanggal 26 Juni 2007, ICRL, Forerunner dan Bhivpuri menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana ICRL setuju untuk menyediakan sejumlah dana kepada Forerunner dan Bhivpuri yang nilainya setara dengan jumlah keuntungan arus kas setelah pembayaran yang diperlukan sesuai dengan Perjanjian Distribusi Kas (Catatan 49o). Fasilitas ini tidak dikenai bunga dan akan dibayar kembali melalui pembagian dividen oleh ICRL kepada para pemegang saham, Forerunner dan Bhivpuri.
2. Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan dan KPC menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana KPC telah menyetujui untuk menyediakan pinjaman sewaktu-waktu kepada Perusahaan sampai senilai USD350 juta dimulai dari tanggal 15 Mei 2011. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan kembali sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima Perusahaan dari KPC. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh Perusahaan kepada KPC.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS *(Continued)*

On November 5, 2014, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kalsel, Bank of New York Mellon (BNYM), Jakarta branch of Deutsche Bank AG, the Company, Bhivpuri and each Principal Contractor and Principal Marketing Agent [Glencore and Forestdale Pte. Ltd] entered into an amendment and restatement agreement in respect to the CDA dated June 27, 2007 as amended on July 1, 2013 and July 2, 2014 to simultaneously agree with the accession of BNYM as the successor to SCB, as the account bank, pursuant to the latter's notice of termination.

This agreement will end on the date on which the CCoWs of KPC and Arutmin (Note 49a) or any extension thereof expires or are terminated, whichever is earlier.

p. Intercompany Loan Facility Agreements

1. On June 26, 2007, ICRL, Forerunner and Bhivpuri entered into an Inter-company Loan Facility, whereby ICRL agreed to provide Forerunner and Bhivpuri the amount that is equal to the aggregate amount of surplus cash flows after meeting the payments required to be made pursuant to the Cash Distribution Agreement (Note 49o). This facility is non-interest bearing and will be repaid from dividends declared by ICRL to the shareholders, Forerunner and Bhivpuri.
2. On September 30, 2011, the Company and KPC entered into an Inter-company Loan Facility Agreement, whereby KPC has agreed to provide loans, from time to time, to the Company up to a value of USD350 million starting from May 15, 2011. The loans will be repayable on demand only out of the dividends received by the Company from KPC. These loans shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balance, which shall be payable quarterly by the Company to KPC.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Efektif tanggal 2 Juli 2014, Perusahaan dan KPC setuju untuk penyelesaian Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan sebesar USD350 juta, tertanggal 30 September 2011, dengan pelunasan melalui dividen sebesar USD86.899.853 oleh atau atas nama KPC pada atau sebelum tanggal 31 Juli 2014 yang merupakan penyelesaian penuh dan akhir. Pada tanggal yang sama, Perusahaan dan KPC menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan (Perjanjian Fasilitas) dimana KPC telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan dalam jumlah USD255 juta. Fasilitas pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan kembali sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima Perusahaan dari KPC. Fasilitas pinjaman dikenakan bunga LIBOR satu (1) bulan ditambah 2% per tahun atas jumlah fasilitas yang masih terutang dari waktu ke waktu. Bunga akan dibayar setiap triwulan oleh Perusahaan kepada KPC. Perjanjian Fasilitas USD350 juta, tertanggal 30 September 2011, secara otomatis berakhir setelah pelaksanaan Perjanjian Fasilitas USD255 juta.

3. Pada tanggal 30 September 2011, Bhira dan KPC menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana KPC telah menyetujui untuk memberikan pinjaman setiap saat kepada Bhira sampai senilai USD150 juta dimulai dari tanggal 15 Mei 2011. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima oleh Bhira dari KPC. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh Bhira kepada KPC.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Effective July 2, 2014, the Company and KPC agreed to the settlement of the USD350 million Inter-company Loan Facility Agreement, dated September 30, 2011, by way of set-off against dividends in the amount of USD86,899,853 by or on behalf of KPC on or before July 31, 2014 which constitutes its full and final settlement. On the same date, the Company and KPC entered into an Inter-company Loan Facility Agreement (Facility Agreement) under which KPC has agreed to provide loan to the Company in an amount of USD255 million. The loan facility will be collectible on demand only out of the dividends received by the Company from KPC. The loan facility shall carry interest of one (1) month LIBOR plus 2% per annum on the amount of the facility outstanding from time to time. The interest shall be payable quarterly by the Company to KPC. The USD350 million Facility Agreement, dated September 30, 2011, is automatically terminated upon execution of the USD255 million Facility Agreement.

3. *On September 30, 2011, Bhira and KPC entered into an Inter-company Loan Facility Agreement, whereby KPC has agreed to provide loans, from time to time, to Bhira up to a value of USD150 million starting from May 15, 2011. The loans will be repayable on demand only out of the dividend received by Bhira from KPC. These loans shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balance, which shall be payable quarterly by Bhira to KPC.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Efektif tanggal 2 Juli 2014, KPC dan Bhira setuju untuk penyelesaian USD150 juta Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan sebesar USD150 juta, tertanggal 30 September 2011, dengan pelunasan melalui dividen sebesar USD37,242,793 oleh atau atas nama KPC pada atau sebelum tanggal 31 Juli 2014 yang merupakan penyelesaian penuh dan akhir. Pada tanggal yang sama, KPC dan Bhira menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan (Perjanjian Fasilitas) dimana KPC telah menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Bhira dalam jumlah USD150 juta. Fasilitas pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan kembali sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima Bhira dari KPC. Fasilitas pinjaman dikenakan bunga LIBOR satu (1) bulan ditambah 2% per tahun atas jumlah fasilitas yang masih terutang dari waktu ke waktu. Bunga akan dibayar setiap triwulan oleh Bhira kepada KPC. Perjanjian Fasilitas USD150 juta, tertanggal 30 September 2011 secara otomatis berakhir setelah pelaksanaan Perjanjian Fasilitas USD150 juta.

4. Pada tanggal 2 Juli 2014, KPC dan Mountain Netherlands menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana KPC telah menyetujui untuk menyediakan pinjaman kepada Mountain Netherlands sebesar USD95 juta. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima oleh Mountain Netherlands dari KPC. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR satu (1) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan oleh Mountain Netherlands setiap triwulan kepada KPC.
5. Pada tanggal 14 September 2011, Perusahaan dan Arutmin telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan efektif mulai tanggal 29 Oktober 2010, dimana Arutmin telah menyetujui untuk memberikan pinjaman setiap saat kepada Perusahaan sampai senilai USD350 juta. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima oleh Perusahaan dari Arutmin. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan oleh Perusahaan setiap triwulan kepada Arutmin.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Effective July 2, 2014, KPC and Bhira agreed to the settlement of the USD150 million Inter-company Loan Facility Agreement, dated September 30, 2011, by way of set-off against dividends in the amount of USD37,242,793 by or on behalf of KPC on or before July 31, 2014 which constitutes its full and final settlement. On the same date, KPC and Bhira entered into an Inter-company Loan Facility Agreement (Facility Agreement) under which KPC has agreed to provide loan to Bhira in an amount of USD150 million. The loan facility will be collectible on demand only out of the dividends received by Bhira from KPC. The loan facility shall carry interest of one (1) month LIBOR plus 2% per annum on the amount of the facility outstanding from time to time. The interest shall be payable quarterly by Bhira to KPC. The USD150 million Facility Agreement, dated September 30, 2011, is automatically terminated upon execution of a further USD150 million Facility Agreement.

4. *On July 2, 2014, KPC and Mountain Netherlands entered into an Inter-company Loan Facility Agreement under which KPC has agreed to provide a loan to Mountain Netherlands in the amount of USD95 million. The loan facility will be collectible on demand only out of the dividends received by Mountain Netherlands from KPC. The loan facility shall carry interest of one (1) month LIBOR plus 2% per annum on the amount of the facility outstanding from time to time. The interest shall be payable quarterly by Mountain Netherlands to KPC.*
5. *On September 14, 2011, the Company and Arutmin entered into an Inter-company Loan Facility Agreement effective October 29, 2010, whereby Arutmin has agreed to provide loans, from time to time, to the Company up to a value of USD350 million. The loans will be repayable on demand only out of the dividends received by the Company from Arutmin. These loans shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan amount, which shall be payable quarterly by the Company to Arutmin.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

6. Pada tanggal 25 September 2014, Perusahaan dan Arutmin menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana Perusahaan telah menyetujui untuk menyediakan pinjaman sewaktu-waktu kepada Arutmin sampai senilai USD200 juta dimulai dari tanggal 1 Januari 2014. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai permintaan melalui surplus kas setelah membayar seluruh pajak, royalti, iuran pemerintah lainnya dan kontraktor penambangannya atau melalui metode dan mekanisme lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Arutmin sewaktu-waktu. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh Arutmin kepada Perusahaan.
7. Pada tanggal 14 September 2011, Bhira dan Arutmin menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman antar-Perusahaan, dimana Arutmin telah menyetujui untuk memberikan pinjaman setiap saat kepada Bhira sampai senilai USD150 juta dimulai dari tanggal 29 Oktober 2010. Pinjaman tersebut hanya akan dibayarkan sesuai dengan permintaan melalui dividen yang diterima oleh Bhira dari Arutmin. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah 2% per tahun dari saldo pinjaman dan akan dibayarkan setiap triwulan oleh Bhira kepada Arutmin.

q. Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal 19 Mei 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kobe Steel Ltd. (KSL), dimana KSL akan menyelesaikan pengembangan atas proses peningkatan kalori pada batubara rendah kalori ("Proses UBC") melalui pabrik percontohan. Perusahaan berpartisipasi dalam pengembangan Proses UBC, dan untuk selanjutnya memanfaatkan hasil dari pengembangan tersebut untuk memproduksi dan menjual Produk UBC di bawah lisensi KSL.

Atas lisensi yang diberikan KSL, Perusahaan akan membayar KSL sebesar Yen1.100.000.000 yang akan dibayar dalam empat (4) angsuran. Pada tanggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012, Perusahaan telah membayar sebesar JPY1.100.000.000 atau setara dengan USD9,98 juta.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

6. On September 25, 2014, the Company entered into an Inter-company Loan Facility Agreement with Arutmin, whereby the Company has agreed to provide loans from time to time to Arutmin up to a value of USD200 million starting from January 1, 2014. These loans shall be payable by Arutmin either on demand, only out of the surplus cash flows after paying all taxes, royalty, other government dues and its mining contractors or using method and mechanism to be agreed upon by the Company and Arutmin from time to time. These loans shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balances, which shall be payable quarterly by Arutmin to the Company.
7. On September 14, 2011, Bhira and Arutmin entered into an Intercompany Loan Facility Agreement, whereby Arutmin has agreed to provide loans, from time to time, to Bhira up to a value of USD150 million starting from October 29, 2010. The loans will be repayable on demand only out of the dividends received by Bhira from Arutmin. These loans shall carry interest of three (3) months LIBOR plus 2% per annum based on the outstanding loan balance, which shall be payable quarterly by Bhira to Arutmin.

q. Collaboration Agreement

On May 19, 2006, the Company and Kobe Steel Ltd. (KSL), entered into a Collaboration Agreement, whereby KSL will complete the development of the Upgraded Brown Coal (the "UBC Process") by utilizing a demonstration plant. The Company will participate in the development of the UBC Process, and further utilize the established UBC Process to produce and sell the UBC Products under license from KSL.

Under the license granted by KSL, the Company is required to pay KSL an amount of JPY1,100,000,000, which is payable in four (4) installments. As of June 30, 2013 and December 31, 2012, contributions paid by the Company amounted to JPY1,100,000,000, or equivalent to USD9.98 million.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Pengembangan dari Proses UBC diselesaikan pada bulan Maret 2011 dan pihak-pihak sepakat untuk membongkar pabrik percontohan. Namun, KSL telah menggunakan Proses UBC untuk membangun pabrik peningkatan mutu batubara pada area PEB ("Proyek Peningkatan Mutu Batubara Pendopo"). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proyek tersebut sedang dalam tahap pengembangan.

r. Perjanjian Bagi Hasil Produksi (PBH) antara Gallo Oil (Jersey) Ltd. dan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Republik Yaman

Pada tanggal 25 Februari 1999, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo), Entitas Anak, menandatangani perjanjian penyerahan dengan Minarak Labuan Company Ltd. dari Malaysia, dimana Gallo mengambil alih kuasa penambangan (*participating interest*) atas Perjanjian Bagi Hasil Produksi (PBH) dengan Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Republik Yaman.

Ketentuan-ketentuan utama masing-masing blok dalam PBH adalah sebagai berikut:

- 1. Ruang Lingkup**
Gallo (sebagai Kontraktor) bersedia mengambil alih kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan PBH sebagai Kontraktor sehubungan dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi, penyimpanan dan pengangkutan minyak mentah dalam wilayah PBH, dan menguasai sumber pendanaan yang dibutuhkan serta kemampuan teknis dan profesional untuk melakukan usaha perminyakan sesuai dengan PBH.
- 2. Royalti**
Pemerintah Yaman berhak mendapatkan royalti dari jumlah minyak mentah yang diproduksi dan disimpan dari wilayah PBH dan tidak digunakan dalam operasi perminyakan, sebelum dikurangi biaya perminyakan, jumlah yang tidak dapat diperoleh kembali dari minyak mentah setara dengan 10% dari minyak mentah tersebut dimulai sejak produksi dan penyimpanan barel pertama dari wilayah PBH dan tidak digunakan dalam operasi perminyakan.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

The development of the UBC Process was completed in March 2011 and the parties agreed to dismantle the demonstration plant. However, KSL has utilized the UBC Process for building a coal upgrading plant at PEB' site (the "Pendopo Coal Upgrading Project"). As of the completion date of the consolidated financial statements, such project is under the development stage.

r. Production Sharing Agreement (PSA) between Gallo Oil (Jersey) Ltd. and Ministry of Oil and Mineral Resources of the Republic of Yemen

On February 25, 1999, Gallo Oil (Jersey) Ltd. (Gallo), a Subsidiary, entered into an assignment agreement with Minarak Labuan Company Ltd. of Malaysia under which Gallo took over the participating interest in the Production Sharing Agreement (PSA) with the Ministry of Oil and Mineral Resources (MOMR) of the Republic of Yemen.

The major provisions of each PSA of the related blocks were as follows:

- 1. Scope**
Gallo (as Contractor) is willing to undertake the obligations provided under this PSA as a Contractor with respect to the exploration, development, production, storage and transportation of crude oil in the PSA Area, and possesses all the necessary financial resources together with the technical and professional competence to carry out the petroleum operations according to the PSA.
- 2. Royalties**
The Government of Yemen shall own and be entitled to take royalty from the total crude oil produced and saved from the PSA area and not used in petroleum operations, prior to the deduction of cost of oil, a non-recoverable amount of crude oil equal to 10% of such crude oil commencing from the first barrel produced and saved from the PSA area(s) and not used in petroleum operations.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

3. Jangka Waktu

Jangka waktu (periode) PBH terdiri atas periode Eksplorasi pertama dan kedua dan satu periode Pengembangan. Jangka waktu eksplorasi pertama berlangsung sekitar empat puluh dua (42) bulan dan tiga puluh enam (36) bulan masing-masing untuk Blok 13 dan Blok R2, dimulai dari tanggal efektif, yang terbagi dalam dua (2) fase. Fase I dan II berlangsung selama dua puluh satu (21) bulan dan delapan belas (18) bulan masing-masing untuk Blok 13 dan Blok R2. Fase I dimulai dari tanggal efektif, sedangkan Fase II dimulai dari saat berakhirnya Fase I. Periode Eksplorasi kedua masing-masing berlangsung selama empat puluh dua (42) bulan untuk Blok 13 dan tiga puluh enam (36) bulan untuk Blok R2.

Periode pengembangan akan dimulai pada tanggal ditemukannya minyak pertama kali secara komersial dan berlanjut untuk periode dua puluh (20) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan lima (5) tahun. Periode penemuan minyak secara komersial dapat terdiri dari satu tempat penampungan produksi atau dalam suatu kelompok penampungan produksi yang layak dikembangkan secara komersial.

4. Penyerahan Wilayah

Pada akhir masa eksplorasi pertama, kontraktor harus melepaskan 25% dari wilayah yang dikembangkan pada awalnya. Jika memilih untuk tidak masuk ke dalam masa eksplorasi kedua, Kontraktor akan menyerahkan seluruh wilayah PBH kecuali wilayah pengembangan.

5. Penggantian Biaya Operasi

Kontraktor dapat memperoleh kembali semua biaya, beban dan pengeluaran yang timbul dari semua kegiatan operasi perminyakan dengan maksimum 40% per triwulan dari semua minyak mentah yang diproduksi dan disimpan di wilayah pengembangan dan tidak digunakan dalam kegiatan operasi perminyakan dan setelah pembayaran royalti kepada Pemerintah Yaman. Biaya operasi yang timbul dan dibayar setelah tanggal produksi komersial awal dapat diperoleh kembali dalam tahun pajak dimana biaya dan pengeluaran tersebut telah terjadi dan dibayarkan.

6. Signature Bonus

Perusahaan akan membayarkan sejumlah USD4.500.000 dan USD1.500.000 sebagai *Signature Bonus* kepada Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral masing-masing untuk Blok 13 dan Blok R2.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

3. Term

The term of PSAs shall include first and second Exploration periods and a Development period. The first Exploration period is about forty-two (42) months and thirty-six (36) months for Block 13 and Block R2, respectively, commencing from the effective date, which is divided in two (2) phases. Phase I and II each being twenty-one (21) months and eighteen (18) months for Block 13 and Block R2, respectively. Phase I commences from the effective date, while Phase II commences from the end of Phase I. The second Exploration period covers another forty-two (42) months and thirty-six (36) months for Block 13 and Block R2, respectively.

The development period shall commence on the date of the first commercial discovery of oil and shall continue for the period of twenty (20) years and can be extended for up to a further five (5) years. The commercial discovery of oil may consist of one producing reservoir or a group of producing reservoirs that are worthy of being developed commercially.

4. Relinquishments of Areas

At the end of the first exploration period, the Contractor shall relinquish a total of 25% of the original development area. If it does not elect to enter into the second exploration period, the Contractor shall relinquish the whole of the PSA Area except those areas categorized as in the development stage.

5. Recovery of Operating Cost

The Contractor shall recover all costs, expenses and expenditures incurred for all petroleum operations out of and to the extent of a maximum of 40% per quarter of all the crude oil produced and saved from the development area and not used in petroleum operations and after royalty payments to the Government of Yemen. Operating expenses incurred and paid after the date of initial commercial production shall be recoverable in the fiscal year in which such costs and expenses are incurred and paid.

6. Signature Bonus

The Company shall pay USD4,500,000 and USD1,500,000 as a Signature Bonus to the MOMR for Block 13 and Block R2, respectively.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

7. Bonus Produksi

7. Production Bonuses

<u>Persyaratan</u>	<u>Jumlah (USD)/ Amounts (USD)</u>	<u>Conditions</u>
Dalam 30 hari setelah tanggal pertama produksi secara komersial dari Blok R2 dan Blok 13.	1.000.000	<i>Within 30 days after the date of first commercial production from Block R2 and Block 13.</i>
Dalam 30 hari setelah produksi minyak kumulatif dari wilayah kerja telah berjalan dengan rata-rata produksi 50.000 barel per hari.	2.000.000	<i>Within 30 days after cumulative oil production from agreement area has been sustained at the rate of 50,000 barrels per day.</i>
Dalam 30 hari setelah produksi minyak kumulatif dari wilayah kerja telah berjalan dengan rata-rata produksi 100.000 barel per hari.	3.000.000	<i>Within 30 days after cumulative oil production from agreement area has been sustained at the rate of 100,000 barrels per day.</i>
Dalam 30 hari setelah produksi minyak kumulatif dari wilayah kerja telah berjalan dengan rata-rata produksi 200.000 dan 150.000 barel per hari masing-masing untuk Blok 13 dan Blok R2.	3.000.000	<i>Within 30 days after cumulative oil production from agreement area has been sustained at the rate of 200,000 and 150,000 barrels per day for Block 13 and Block R2, respectively.</i>
Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, bonus produksi belum dapat diberlakukan karena Gallo belum berproduksi.		<i>As of December 31, 2014 and 2013, production bonuses are not yet applicable since Gallo's production has not yet commenced.</i>
8. <u>Sumbangan Pelatihan, Kelembagaan dan Sosial</u> Kontraktor harus membayar secara tahunan kepada Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral untuk biaya pelatihan, kelembagaan dan sosial masing-masing sebesar USD150.000, USD150.000 dan USD300.000, dalam waktu tiga puluh (30) hari setiap awal tahun, dimulai dari tanggal efektif pada awal tahun kalender selama jangka waktu PBH dan perpanjangannya jika ada.		8. <u>Training, Institutional and Social Contributions</u> <i>The Contractor shall pay annually to the MOMR for training, institutional and social costs amounting to USD150,000, USD150,000 and USD300,000, respectively, within thirty (30) days from the start of each year, starting on the effective date and at the beginning of each calendar year thereafter during the term of this PSA and any extension.</i>
9. <u>Bagi Hasil Produksi Minyak</u> Berdasarkan PBH, bagian Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral dan Kontraktor dihitung berdasarkan kuantitas minyak mentah yang tersisa setelah dikurangi dengan royalti dan biaya perolehan atas jumlah minyak mentah yang diproduksi dan yang disimpan di dalam wilayah pengembangan, dan tidak digunakan dalam operasional perminyakan. PBH mengatur jumlah persentase tertentu untuk masing-masing pihak berdasarkan kuantitas produksi.		9. <u>Production Sharing of Oil</u> <i>Based on the PSA, the MOMR and the Contractor's shares are computed based on the remaining quantity of crude oil after deducting royalty and oil costs from the total crude oil produced and saved from the development area, and not used in petroleum operations. The PSA also provides specific percentages for each party's share based on the production quantity.</i>

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

**s. Perjanjian Penyediaan Jasa antara KPC dan
Forestdale Pte. Ltd.**

Pada tanggal 25 Juli 2011, KPC menandatangani Perjanjian Jasa dengan Forestdale Pte. Ltd. (Forestdale). Dalam perjanjian ini, KPC menunjuk Forestdale untuk ruang muat lingkup kerja: (a) mengawasi bongkar muat batubara di tempat tujuan; (b) menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk penyerahan batubara ke PLN; (c) menyimpan faktur penjualan batubara yang dilakukan KPC kepada PLN; (d) memfasilitasi kelancaran pembayaran oleh PLN; dan (e) mendukung usaha KPC dalam menjaga hubungan baik dengan PLN. Perjanjian Jasa ini akan efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**t. Kontrak dengan PLN untuk Batubara Mutu
Rendah**

Pada tanggal 15 Desember 2006, Arutmin, DEWA ("Pemasok") dan PLN menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara Rendah Kalori (PJBB RK). Arutmin memperoleh kontrak pengadaan batubara selama dua puluh (20) tahun untuk tiga belas (13) lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimiliki oleh PLN. Semua pihak telah sepakat atas sepuluh (10) dari tiga belas (13) kontrak, sementara untuk tiga (3) kontrak lainnya, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian masih dalam proses. Perkembangan dari tiga (3) PJBB saat ini tertunda karena penundaan pengembangan tiga (3) PLTU.

u. Kontrak untuk Pasokan Bahan Bakar Solar

Pada tanggal 24 Agustus 2009, Arutmin dan KPC ("Pembeli") dan Bakrie Petroleum International Pte. Ltd. ("Penjual") menandatangani Kontrak untuk Pasokan Bahan Bakar Solar, dimana Penjual bersedia untuk mengirimkan dan menjual kepada Pembeli, dan Pembeli bersedia untuk membeli, menerima pengiriman, dan membayar atas bahan bakar solar sesuai dengan Kontrak. Bahan bakar solar akan dipasok oleh PT Petromine Energy Trading, entitas anak dari Penjual. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 dan dapat diperpanjang untuk lima (5) tahun ke depan setelah syarat dan kondisi disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Pada tanggal 22 Maret 2013, KPC, Arutmin dan PT Petromine Energy Trading menandatangani amandemen Perjanjian Penjualan dan Pembelian Bahan Bakar Solar mengenai penerapan prosedur, perhitungan dan metode pembayaran atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

**s. Service Agreement between KPC and
Forestdale Pte. Ltd.**

On July 25, 2011, KPC entered into a Service Agreement with Forestdale Pte. Ltd. (Forestdale). Under the agreement, KPC appointed Forestdale for the scope of work to: (a) supervise the unloading of coal at the destination points; (b) prepare documentation necessary for delivery of coal to PLN; (c) file invoices of coal sold by KPC to PLN; (d) take actions necessary to facilitate smooth payments by PLN; and (e) support KPC's efforts in maintaining good relations with PLN. The Service Agreement will be effective until December 31, 2021.

t. PLN Contract Agreement for Low Rank Coal

On December 15, 2006, Arutmin, DEWA (the "Supplier") and PLN entered into a Sale Purchase Agreement for Low Rank Coal (SPA LRC). Arutmin was granted a twenty (20)-year contract to supply coal to thirteen (13) locations of Steam Fired Power Plant ("PLTU") owned by PLN. All parties have come to an agreement on ten (10) out of thirteen (13) contracts, while the remaining three (3) contracts were still in process as of the completion date of the consolidated financial statements. The progress of the three (3) SPAs is currently pending due to the delay in the development of the three (3) respective PLTUs.

u. Contract for the Supply of Fuel

On August 24, 2009, Arutmin and KPC (the "Purchasers") and Bakrie Petroleum International Pte. Ltd. (the "Seller") entered into a Contract for the Supply of Diesel Fuel Sale and Purchase Agreement, whereby the Seller agrees to deliver and sell to the Purchasers, and the Purchasers agree to purchase, take delivery, and pay for diesel fuel as required by the Contract. The diesel fuel is to be supplied by PT Petromine Energy Trading, a subsidiary of the Seller. The agreement is valid until August 24, 2014 and can be extended for another five (5) years upon mutual acceptance of the terms and conditions, signed by the parties. On March 22, 2013, KPC, Arutmin and PT Petromine Energy Trading entered into an amendment of the Diesel Fuel Sale and Purchase Agreement to implement procedures, calculations and methods of payment of the vehicle fuel tax/PBBKB.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 16 Desember 2013, KPC dan PT Petromine Energy Trading menandatangani Kontrak untuk Pasokan Bahan Bakar Solar terpisah untuk memperpanjang jangka waktu kontrak sampai dengan berakhirnya masa PKB2B KPC.

Sebagai hasil dari pelaksanaan Kontrak untuk Pasokan Bahan Bakar Solar terpisah antara KPC dan PT Petromine Energy Trading, pada tanggal 14 Juli 2014, Arutmin, KPC dan PT Petromine Energy Trading menandatangani Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Pasokan Bahan Bakar Solar, dimana KPC menarik diri sebagai pihak dalam kontrak dan untuk mengubah dan menyajikan kembali Pasokan Bahan Bakar Solar antara Arutmin dan PT Petromine Energy Trading. Perjanjian baru akan berakhir sampai dengan berakhirnya masa PKB2B Arutmin, kecuali dibatalkan sebelumnya.

v. Perjanjian Operator Tambang

Sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Multi Daerah Bersaing (MDB), Entitas Anak, Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) atas penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), entitas asosiasi, tahun 2008 dan 2009, maka pada tanggal 23 November 2009, MDB menandatangani Perjanjian Operator Tambang dengan NNT, NIL dan NTMC, yang mulai berlaku saat telah selesainya transaksi atas penjualan saham tahun 2009 dilaksanakan. Perjanjian Operator Tambang ini akan mengatur operasi tambang Batu Hijau serta tambang masa depan yang tercakup dalam konsesi pertambangan berdasarkan Kontrak Karya Batu Hijau.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Operator Tambang, NNT akan tetap menerapkan kebijakan, prosedur, praktek dan standar dari NIL dan NTMC yang akan diterapkan setiap saat untuk keperluan perusahaan dan kegiatan operasional tambang Batu Hijau.

Selanjutnya, MDB setuju, antara lain, bahwa selama NIL dan NTMC (atau pihak terafiliasinya) adalah pemegang saham di NNT:

- (1) pengoperasian tambang Batu Hijau serta setiap Tambang Masa Depan akan dilakukan oleh NNT sesuai dengan standar NIL dan NTMC; dan MDB sepakat untuk mengambil segala tindakan (termasuk, tetapi tidak terbatas, pada mendukung dengan memberi suara atas saham mereka dalam NNT) untuk pengoperasian tambang Batu Hijau dan setiap Tambang Masa Depan sesuai dengan standar NIL dan NTMC, serta sesuai dengan nasehat dari NIL dan NTMC;

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On December 16, 2013, KPC and PT Petromine Energy Trading entered into a separate Diesel Fuel Sale and Purchase Agreement to extend the term up to the termination of the KPC's CCoW.

As a result of the execution of the separate Diesel Fuel Sale and Purchase Agreement between KPC and PT Petromine Energy Trading, on July 14, 2014, Arutmin, KPC and PT Petromine Energy Trading entered into Deed of Amendment and Restatement of the Diesel Fuel Sale and Agreement Purchase, whereby KPC withdrew as a party to the contract and to amend and restate the Diesel Fuel Sale and Purchase Agreement between Arutmin and PT Petromine Energy Trading. The amended agreement shall end until the last day of Arutmin's CCoW, unless earlier terminated.

v. Mine Operator Agreement

In connection with the Shares Sale Agreement between PT Multi Daerah Bersaing (MDB), a Subsidiary, Newmont Indonesia Limited (NIL) and Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) in the 2008 Sale Shares and the 2009 Sale Shares of PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), an associate, on November 23, 2009, MDB entered into a Mine Operator Agreement with NNT, NIL and NTMC, which will become effective upon completion of the sale of the 2009 Shares. The Mine Operator Agreement will govern the operation of the Batu Hijau mine and any future mine within the mining concession area under the Batu Hijau CoW.

Under the terms of the Mine Operator Agreement, NNT will maintain all of NIL's and NTMC's policies, procedures, practices and standards applying, from time to time, in respect to corporate and operational matters for the operation of the Batu Hijau mine.

Furthermore, MDB agrees, among others, that for as long as NIL and NTMC (or any of their affiliates) are shareholders in NNT:

- (1) *the operation of the Batu Hijau mine and any Future Mine will be performed by NNT in accordance with the NIL and NTMC standards; and MDB undertakes to take all necessary actions (including, without limitation voting their shares in NNT) to give effect to the operation of the Batu Hijau mine and any Future Mine in line with the NIL and NTMC standards and under the advice of NIL and NTMC;*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

- (2) MDB tidak akan mengubah dan tidak akan berusaha untuk membuat perubahan terhadap cara NNT atau tambang Batu Hijau atau setiap Tambang Masa Depan yang dioperasikan yang dapat mengakibatkan tambang Batu Hijau atau setiap Tambang Masa Depan atau NNT dengan cara yang tidak konsisten dengan standar NIL dan NTMC, dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Kontrak Karya, anggaran dasar NNT, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) MDB akan terus mendukung dan mengambil segala tindakan (termasuk, tetapi tidak terbatas, pada mendukung dengan memberi suara atas saham mereka dalam NNT) untuk mendukung pengoperasian oleh NNT atas setiap Tambang Masa Depan sesuai dengan standar NIL dan NTMC; dan
- (4) MDB dan Pemerintah Daerah berjanji untuk memastikan bahwa pembiayaan atau pengaturan-pengaturan lain yang disepakati oleh MDB dan/atau Pemerintah Daerah untuk membiayai pembelian saham NIL dan/atau saham NTMC tidak akan mengandung kewajiban, ketentuan atau persyaratan yang akan mengharuskan MDB dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengubah cara NNT, tambang Batu Hijau atau setiap Tambang Masa Depan yang dapat mengakibatkan Tambang Batu Hijau, Tambang Masa Depan atau NNT dioperasikan dengan cara yang tidak konsisten dengan standar NIL dan NTMC.

Perjanjian Operator Tambang mulai berlaku saat telah selesainya transaksi atas penjualan saham tahun 2009 dilaksanakan dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan ketentuan bahwa jika pemilik saham MDB (atau pihak terafiliasinya) atas saham-saham dalam modal yang ditempatkan dan disetor penuh NNT menjadi sama dengan atau lebih besar dari kepemilikan saham NIL dan NTMC (atau pihak terafiliasinya) bersama-sama (i) MDB dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada NIL dan NTMC dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari, mengakhiri Perjanjian Operator Tambang; atau (ii) NIL dan NTMC dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada MDB dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari, mengakhiri Perjanjian Operator Tambang.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

- (2) *MDB will not change nor seek to make any change to the manner in which NNT or the Batu Hijau mine or any Future Mine are operated which could result in the Batu Hijau mine or any Future Mine or NNT being operated in a manner that is inconsistent with the NIL and NTMC standards, observing and subject to the provisions of the Contract of Work, NNT's articles of association and the applicable laws and regulations;*
- (3) *MDB will continue to support and take all necessary actions (including, without limitation voting their shares in NNT) to support the operation by NNT of any Future Mines in accordance with the NIL and NTMC standards; and*
- (4) *MDB and the Regional Governments undertake to ensure that any financing or other arrangements that either MDB and/or the Regional Governments enter into to finance the purchase of the NIL shares and/or the NTMC shares will not contain any obligation, provision or condition which would require MDB and/or the Regional Governments to make any change the manner in which NNT, the Batu Hijau mine or any Future Mine is operated which could result in the Batu Hijau mine, a Future Mine or NNT being operated in a manner that is inconsistent with the NIL and NTMC standards.*

The Mine Operator Agreement shall become effective upon completion of the sale of the 2009 Shares and be applicable for an indefinite period, provided that if the shareholding of MDB (or its affiliates) in the issued and paid-up share capital of NNT is equal to or more than the shareholding of NIL and NTMC (or their affiliates) jointly (i) MDB may, by ninety (90) days prior written notice to NIL and NTMC, terminate the Mine Operator Agreement, or (ii) NIL and NTMC may, by ninety (90) days prior written notice to MDB, terminate the Mine Operator Agreement.

49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)

w. *Intercreditor Agreement*

Pada tanggal 1 Oktober 2009, Kelompok Usaha, PT Sitrade Coal (Sitrade), Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) dan Forerunner (“Original Subsidiary Guarantors”) (sebagai “initial obligors”), The Bank of New York Mellon, sebagai *administrative agent* dan *security agent* berdasarkan Pinjaman CFL, *offshore account bank* dan *offshore common security agent* (“the Offshore Common Security Agent”), dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai *onshore account bank* dan *onshore common security agent* (“the Onshore Common Security Agent” bersama-sama dengan *Offshore Common Security Agent*, “the Common Security Agents”) menandatangani *intercreditor agreement* yang mengatur pembagian jaminan untuk kepentingan para pemilik dana berdasarkan Pinjaman CFL (“the *Intercreditor Agreement*”) dan bersama-sama dengan kreditur lainnya yang telah memberikan pinjaman dana kepada Entitas Anak lainnya (yang selanjutnya diperbaharui dan dinyatakan kembali pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan menambahkan CFL, para pemilik dana awal berdasarkan Pinjaman CFL, sebagai pihak yang dijamin dan untuk menyediakan resolusi atas beberapa pertikaian berdasarkan *Intercreditor Agreement* melalui arbitrase).

Intercreditor Agreement mengatur hak suara para kreditur yang terlibat di dalam perjanjian sebagai “Secured Creditors” dan instruksi-instruksi yang dapat mereka berikan kepada *Common Security Agents* sehubungan dengan, antara lain:

- tingkat yang sama (*pari passu*) untuk beberapa utang Kelompok Usaha yang menjadi bagian pada *Intercreditor Agreement* sebagai *obligor* yang baru (“*Bumi Obligors*”);
- penegakan batasan-batasan;
- pemulihan kembali;
- jaminan;
- penambahan utang;
- utang lindung nilai; dan
- pemeliharaan akun-akun bank yang terdapat di dalam *Intercreditor Agreement* dan pembayaran atas *Intercreditor Debt*.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

w. *Intercreditor Agreement*

On October 1, 2009, the Group, PT Sitrade Coal (Sitrade), Kalimantan Coal Limited (KCL), Sangatta Holdings Limited (SHL) and Forerunner (the “Original Subsidiary Guarantors”) (as “initial obligors”), The Bank of New York Mellon, as *administrative agent* and *security agent* under the CFL Loan, *offshore account bank* and *offshore common security agent* (the “Offshore Common Security Agent”), and Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as *onshore account bank* and *onshore common security agent* (the “Onshore Common Security Agent,” and together with the *Offshore Common Security Agent*, the “Common Security Agents”) entered into an *intercreditor agreement* governing the sharing of collateral for the benefit of the lender under the CFL Loan (the “*Intercreditor Agreement*”) and other creditors who have provided financial indebtedness to other Subsidiaries of the Company (which was subsequently amended and restated on October 29, 2009 to add CFL, the original lender under the CFL Loan, as a secured party and to provide for the resolution of certain disputes under the *Intercreditor Agreement* by arbitration).

The *Intercreditor Agreement* sets forth the voting rights of creditors who are parties to the agreement as “Secured Creditors” and the instructions they may give to the *Common Security Agents* regarding, among other things:

- the *pari passu* ranking of certain debts of the Group, which accedes to the *Intercreditor Agreement* as a new obligor (the “*Bumi Obligors*”);
- enforcement restrictions;
- application of recoveries;
- enforcement of security;
- incurrence of additional debt;
- incurrence of hedging debt; and
- maintenance of bank accounts under the *Intercreditor Agreement* and payments of *Intercreditor Debt*.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2014, *Intercreditor Debt* meliputi Pinjaman CFL (Catatan 30a), Fasilitas Credit Suisse 2010 - 2 senilai USD150 juta (Catatan 30e), 12% Surat Beharga Bergaransi Senior senilai USD300 juta (Catatan 30c) 10,75% Surat Beharga Bergaransi Senior II senilai USD700 juta (Catatan 30b), Fasilitas Axis Bank Limited 2011 (Catatan 30d), Fasilitas Deutsche Bank 2011 (Catatan 30i), Fasilitas China Development Bank (Catatan 30k), Fasilitas UBS AG 2012 - 1 (Catatan 30m), Fasilitas Raiffeisen Bank International, cabang Labuan (Catatan 30o), dan Fasilitas Credit Suisse - 2014 (Catatan 30p). Para kreditur dan pemegang surat utang serta *administrative agents*, *security agents* dan *trustees* mereka, memiliki hak atas pengaturan jaminan di dalam *Intercreditor Agreement*, termasuk diantaranya tingkat yang sama (*pari passu*) dengan *Common Security* dan berbagi manfaat sama rata atas *Common Security*.

Golongan utang lainnya dapat mengikuti *Intercreditor Agreement* setiap saat di masa yang akan datang, tergantung pada prosedur dan batasan-batasan yang telah diatur di dalam *Intercreditor Agreement*.

x. Perusahaan Batubara

Perusahaan, Perusahaan Batubara dan The Tata Power Company Limited (Tata Power) melakukan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2007. Dalam perjanjian tersebut baik Perusahaan dan Tata Power menyetujui ketentuan perjanjian, untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka di Perusahaan Batubara berdasarkan pada proporsi berikut:

- Perusahaan akan terus memegang kepemilikan atas 65% saham KPC (13,6% melalui Perusahaan, 32,4% melalui Sitrade, 9,5% melalui KCL dan 9,5% melalui SHL), 70% saham Arutmin, 70% saham ICRL (semua melalui Forerunner), 70% saham IndoCoal Kalsel, dan 70% saham IndoCoal Kaltim; dan
- Tata Power akan terus memegang kepemilikan atas 30% saham dari tiap Perusahaan Batubara.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

As of December 31, 2014, the *Intercreditor Debt* consists of CFL Loan (Note 30a), the USD150 million Credit Suisse Facility 2010 - 2 (Note 30e), the USD300 million 12% Guaranteed Senior Secured Notes (Note 30c), USD700 million 10.75% Guaranteed Senior Secured Notes II (Note 30b), Axis Bank Limited Facility 2011 (Note 30d), Deutsche Bank 2011 Facility (Note 30i), China Development Bank Facility (Note 30k), UBS AG Facility 2012 - 1 (Note 30m), Raiffeisen Bank International, Labuan branch Facility (Note 30o), and Credit Suisse Facility - 2014 (Note 30p). The lenders under the credit facilities and holders of the notes and their administrative agents, security agents and trustees, as the case may be are entitled to the security arrangements of the *Intercreditor Agreement*, which include among others the *pari passu* ranking with respect to the *Common Security* and share in the benefit of the *Common Security* on a *pro rata* basis.

Other classes of debt may accede to the *Intercreditor Agreement* from time to time in the future, subject to the procedures and limitations provided in the *Intercreditor Agreement*.

x. Coal Companies

The Company, the Coal Companies and The Tata Power Company Limited (Tata Power) entered into a Shareholders' Agreement on March 30, 2007. Among others, the Company and Tata Power have agreed, subject to the terms of the agreement, to maintain their shareholdings in the Coal Companies in the following proportions:

- The Company shall continue to hold 65% of the shares of KPC (13.6% through the Company itself, 32.4% through Sitrade, 9.5% through KCL and 9.5% through SHL), 70% of the shares of Arutmin, 70% of the shares of ICRL (all through Forerunner), 70% of the shares of IndoCoal Kalsel, and 70% of the shares of IndoCoal Kaltim; and
- Tata Power shall continue to hold 30% of the shares in each of the Coal Companies.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Sensuai dengan *Master Deed* (Catatan 49ff), pada tanggal 2 Juli 2014, Perusahaan, KPC, Sitrade, KCL, SHL, Forerunner, Bhira, Bhivpuri, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kaltim, IndoCoal Kalsel dan KTS menandatangani Perjanjian Perubahan, Penyajian dan Aksesori sehubungan dengan Perjanjian Pemegang Saham sebelumnya, dimana para pihak telah sepakat untuk menghapus mekanisme untuk kontrol, manajemen dan administrasi dalam kaitannya dengan KPC dan IndoCoal Kaltim dari Perjanjian Pemegang Saham sebelumnya, dan untuk mengubah serta menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham sebelumnya untuk mengatur hubungan antar pihak-pihak tertentu sebagai pemegang saham sehubungan dengan ICRL, Arutmin dan IndoCoal Kalsel saja (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian pemegang Saham yang Diubah dan Dinyatakan Kembali") efektif sejak tanggal penyelesaian. Perjanjian pemegang saham yang terpisah akan dibuat untuk mengatur hubungan pihak-pihak tertentu dan Country Forest Limited (CFL) sebagai pemegang saham KPC dan IndoCoal Kaltim.

Pada tanggal yang sama, Perusahaan, KPC, Sitrade, Bhira, Bhivpuri, IndoCoal KPC, IndoCoal Kaltim dan Mountain Netherlands Investments B.V. (Mountain Netherlands) menandatangani perjanjian pemegang saham untuk mengatur hubungan antar mereka sebagai pemegang saham sehubungan dengan KPC, IndoCoal KPC dan IndoCoal Kaltim efektif sejak tanggal penyelesaian (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pemegang Saham KPC").

Setelah Perjanjian Addendum, Penyajian Kembali dan Aksesori serta Perjanjian Pemegang Saham KPC, antara lain, Perusahaan dan Tata Power serta Mountain Netherlands telah sepakat, tunduk pada syarat-syarat perjanjian, untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka di Perusahaan Batubara dalam proporsi sebagai berikut:

- Perusahaan akan terus memegang kepemilikan atas 51% saham KPC (25% melalui Perusahaan dan 26% melalui Sitrade), 51% saham IndoCoal Kaltim dan 51% saham IndoCoal KPC dan akan terus memegang 70% saham Arutmin, 70% saham ICRL (semua melalui Forerunner) dan 70% saham IndoCoal Kalsel;
- Tata Power akan terus memegang kepemilikan atas 30% saham dari setiap Perusahaan Batubara.
- Mountain Netherlands akan memegang 19% saham masing-masing di KPC, IndoCoal Kaltim dan IndoCoal KPC.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

In accordance with the Master Deed (Note 49ff), on July 2, 2014, the Company, KPC, Sitrade, KCL, SHL, Forerunner, Bhira, Bhivpuri, Arutmin, ICRL, IndoCoal Kaltim, IndoCoal Kalsel and KTS entered into an Amendment, Restatement and Accession Agreement in respect of the original Shareholders' Agreement, whereby the parties have agreed to remove the mechanics for the control, management and administration in relation to KPC and IndoCoal Kaltim from the original Shareholders' Agreement, and to amend and restate the original Shareholders' Agreement to regulate the relationship of certain parties inter-se as shareholders in relation to ICRL, Arutmin and IndoCoal Kalsel only (referred to as the "Amended and Restated Shareholders' Agreement") with effect from the completion date. A separate shareholders' agreement shall be entered into to regulate the relationship of certain parties and Country Forest Limited (CFL) inter-se as shareholders of KPC and IndoCoal Kaltim.

On the same date, the Company, KPC, Sitrade, Bhira, Bhivpuri, IndoCoal KPC, IndoCoal Kaltim and Mountain Netherlands Investments B.V. (Mountain Netherlands) entered into a shareholders' agreement to regulate their relationships inter-se as shareholders in relation to KPC, IndoCoal KPC and IndoCoal Kaltim with effect from the completion date (referred to as the "KPC Shareholders' Agreement").

Following the Amendment, Restatement and Accession Agreement and the KPC Shareholders' Agreement, among others, the Company and Tata Power and Mountain Netherlands have agreed, subject to the terms of the agreements, to maintain their shareholdings in the Coal Companies in the following proportions:

- *The Company shall hold 51% of the shares of KPC (25% through the Company itself and 26% through PT Sitrade Coal), 51% of the shares of IndoCoal Kaltim and 51% of the shares of IndoCoal KPC, and shall continue to hold 70% of the shares of Arutmin, 70% of the shares of ICRL (all through Forerunner) and 70% of the shares of IndoCoal Kalsel;*
- *Tata Power shall continue to hold 30% of the shares in each of the Coal Companies.*
- *Mountain Netherlands shall hold 19% of the shares in each of KPC, IndoCoal Kaltim and IndoCoal KPC.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Meskipun Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memegang lebih dari 50% kepemilikan dari tiap Perusahaan Batubara, tetapi kendali untuk keputusan operasional dan keuangan penting sehubungan dengan Perusahaan Batubara tetap dalam kendali bersama dari dua pihak baik dari Perusahaan maupun Tata Power.

Investasi Perusahaan pada Perusahaan Batubara sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham antara Perusahaan dan Tata Power sebagai mitra usaha patungan memenuhi definisi "entitas pengendalian bersama" seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 12 (Revisi 2009). Akibatnya, Perusahaan Batubara dicatat sebagai entitas pengendalian bersama, sehingga laporan keuangan Perusahaan Batubara dikonsolidasi dengan metode konsolidasian proporsional.

Jumlah berikut ini merupakan bagian Kelompok Usaha atas total aset dan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, serta pendapatan dan laba (rugi) neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 atas entitas pengendalian bersama, dan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

	2014	2013	
PT Kaltim Prima Coal			PT Kaltim Prima Coal
Total aset	1.261.938.923	1.709.009.882	Total assets
Total liabilitas	1.132.234.804	1.377.926.670	Total liabilities
Pendapatan	2.030.866.990	2.625.344.998	Revenues
Laba neto	46.111.301	70.412.601	Net income
PT Arutmin Indonesia			PT Arutmin Indonesia
Total aset	1.367.861.229	1.102.846.769	Total assets
Total liabilitas	1.098.161.147	857.744.456	Total liabilities
Pendapatan	737.271.650	898.385.711	Revenues
Laba (rugi) neto	24.597.770	(89.970.533)	Net income (loss)
IndoCoal Resources (Cayman) Limited			IndoCoal Resources (Cayman) Limited
Total aset	319.634.120	411.049.674	Total assets
Total liabilitas	92.891.132	185.890.171	Total liabilities
Pendapatan	189.202.715	1.507.186.249	Revenues
Laba neto	1.583.485	184.385	Net income
PT IndoCoal Kalsel Resources			PT IndoCoal Kalsel Resources
Total aset	351	382	Total assets
Total liabilitas	11.804	9.162	Total liabilities
Rugi neto	(2.130)	(303)	Net loss

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Although the Company, directly or indirectly, holds more than 50% ownership interest in each of the Coal Companies, control over the key operational and financial decisions in regard to the Coal Companies are jointly exercised by the Company and Tata Power.

The Company's investments in the Coal Companies pursuant to the Shareholders' Agreement between the Company and Tata Power as joint venture partners meet the definition of "jointly controlled entities" under PSAK No. 12 (Revised 2009). As a result, the Coal Companies are accounted for as jointly controlled entities, their financial statements thus being consolidated using the proportionate consolidation method.

The following amounts represent the Group's share of the total assets and total liabilities as of December 31, 2014 and 2013, and revenues and net income (loss) for the years ended December 31, 2014 and 2013 of the jointly controlled entities, which were included in the consolidated financial statements of the Group:

49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
 PENTING (Lanjutan)

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
 (Continued)

	2014	2013	
PT IndoCoal Kaltim Resources			PT IndoCoal Kaltim Resources
Total aset	25.118	228	Total assets
Total liabilitas	4	8.988	Total liabilities
Rugi neto	(892)	(304)	Net loss
IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited			IndoCoal KPC Resources (Cayman) Limited
Total aset	8.937.264	-	Total assets
Total liabilitas	9.069.167	-	Total liabilities
Rugi neto	(86.941)	-	Net loss

y. Perjanjian Operasi

y. Operating Agreements

Pihak Terkait di Perjanjian/ Parties in the Agreement	Area Kontrak/ Contract Area	Jenis Jasa/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
Arutmin, IndoCoal Kalsel dan/and PT Thiess Contractors Indonesia (Thiess)	Satui dan/and Senakin	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	19 Oktober 2000 sampai mana yang terjadi lebih dulu antara masa PKP2B atau umur tambang Arutmin/October 19, 2000 up to earlier occurrence of the CCoW term or life of mine of Arutmin (1)
Arutmin, dan/and PT Cipta Kridatama Mining	Batulicin	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 Juli 2006 sampai umur tambang/ July 1, 2006 up to mine life
Arutmin, dan/and DEWA	Asam Asam	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	22 Maret 2007 sampai 31 Desember 2019/ March 22, 2007 up to December 31, 2019
Arutmin, dan/and PT Wahana Baratama (WBM)	Perbatasan area penambangan Satui/ Common boundary in Satui area	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	24 Agustus 2007 sampai mana yang terjadi lebih dulu antara penghentian perjanjian kerjasama penambangan batubara WBM atau PKP2B Arutmin/ August 24, 2007 up to the earlier occurrence of termination of WBM's work agreement for coal mining or Arutmin's CCoW
Arutmin, dan/and DEWA	Sarongga	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	28 Juni 2011 sampai 31 Desember 2013 (kadaluwarsa)/ June 28, 2011 up to December 31, 2013 (expired)
Arutmin, dan/and DEWA	Jumbang, Satui	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	22 November 2012 sampai 21 November 2013 (kadaluwarsa)/ November 22, 2012 up to November 21, 2013 (expired)
Arutmin, dan/and DEWA	Perintis, Satui	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 Desember 2012 sampai 28 Februari 2013 (kadaluwarsa)/ December 1, 2012 up to February 28, 2013 (expired)
Arutmin, dan/and PT Pamapersada Nusantara (PAMA)	Mulia Barat/ West Mulia	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 November 2011 sampai tiga (3) tahun dengan opsi perpanjangan dua (2) tahun/ November 1, 2011 up to three (3) years with extension option two (2) years
Arutmin dan/and PT Anugerah Tambang Mulia	Kintap	Jasa pengoperasian tambang batubara lainnya/ Coal mining service operation	1 Januari sampai 31 Desember 2013 (kadaluwarsa)/ January 1 up to December 31, 2013 (expired)
Arutmin, dan/and BUMA	Pit 4 - 7 Senakin	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	28 Oktober 2010 sampai 30 April 2015/ October 28, 2010 up to April 30, 2015 (5)
Arutmin, dan/and PT Bahtera Adhiguna	Pulau Laut Utara/ North Pulau Laut	Jasa pengoperasian penanganan pelabuhan/ Port handling services operation	1 Oktober 2011 sampai 30 September 2015/ October 1, 2011 up to September 30, 2015 (6)

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Pihak Terkait di Perjanjian/ Parties in the Agreement	Area Kontrak/ Contract Area	Jenis Jasa/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
Arutmin dan/and Puskopad B Kodam VI Tanjungpura	Senakin	Jasa pengoperasian tambang batubara untuk mengatasi aktivitas penambangan ilegal/ Coal mining services operation to overcome illegal mining activities	22 September 2011 sampai 31 Desember 2014/ September 22, 2011 up to December 31, 2014
Arutmin dan/and PT Nusa Tambang Pratama (NTP)	Asam Asam	Jasa pengoperasian crushing plant dan overland conveyor/ Crushing plant and overland conveyor services operation	26 Mei 2011 sampai 25 Mei 2018/ May 26, 2011 up to May 25, 2018
Arutmin dan/and NTP	Pulau Laut Utara/ North Pulau Laut	Jasa pengoperasian barge unloader/ Barge unloader services operation	25 Agustus 2011 sampai 24 Agustus 2018/ August 25, 2011 up to August 24, 2018
Arutmin dan/and NTP	Mulia Barat/ West Mulia	Jasa pengoperasian crushing plant dan overland conveyor Crushing plant and overland conveyor services operation	15 September 2011 sampai 14 September 2018/ September 15, 2011 up to September 14, 2018
Arutmin dan/and PT Multi Mitra Tambang	Asam Asam	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 November 2013 sampai 31 Oktober 2014/ November 1, 2013 up to October 31, 2014
Arutmin dan/and PT Putra Perkasa Abadi	Asam Asam	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 Januari 2012 sampai 31 Maret 2014 (kadaluwarsa)/ January 1, 2012 up to March 31, 2014 (expired)
Arutmin, dan/and PT Rizqi Awlad	Asam Asam	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 November 2011 sampai 31 Oktober 2013 (kadaluwarsa)/ November 1, 2011 up to October 31, 2013 (expired)
Arutmin dan/and PT Rian Pratama Mandiri	Asam Asam	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	27 Januari 2014 sampai 26 Januari 2015 dan di perpanjang secara otomatis sampai akhir PKP2B/ January 27, 2014 up to January 26, 2015 and will be automatically extended until CCoW term
Arutmin dan/and PT Bokormas Wahana Makmur	Kintap	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	2 April 2013 sampai 2 April 2014 (kadaluwarsa)/ April 2, 2013 up to April 2, 2014 (expired)
Arutmin dan/and PT Jhonlin Baratama	Sarongga	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	2 Januari 2013 sampai tujuh (7) tahun/ January 2, 2013 up to seven (7) years
Arutmin dan/and PT Jhonlin Baratama	Sungai Danau	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	2 Februari 2013 sampai tujuh (7) tahun/ February 2, 2013 up to seven (7) years
Arutmin dan/and PT Jhonlin Baratama	Kintap	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	31 Agustus 2013 sampai tujuh (7) tahun/ August 30, 2013 up to seven (7) years
Arutmin dan/and PT Indo Sejahtera Manunggal	Sarongga	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 Desember 2014 sampai lima (5) tahun/ December 1, 2014 up to five (5) years
KPC, IndoCoal Kaltim dan/and Thiess	Melawan dan/and Sangatta	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	10 Oktober 2003 sampai mana yang terjadi lebih dulu, antara berakhirnya PKP2B KPC atau saat seluruh cadangan ekonomis tambang batubara telah habis/ October 10, 2003 up to the termination of KPC's CCoW or when all of the economical coal reserves at the mine are exhausted, whichever is earlier
KPC dan/and PAMA	Bendili dan/and Pelikan	Jasa pengoperasian tambang batubara/ Coal mining services operation	1 Juli 2004 sampai 31 Desember 2015/ July 1, 2004 up to December 31, 2015
		Surat tambahan dan kerangka perjanjian serta perjanjian bantuan teknik/ Amendment on framework agreement and technical assistance agreement	1 Juli 2004 sampai Desember 31, 2015/ July 1, 2004 up to December 31, 2015

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Pihak Terkait di Perjanjian/ Parties in the Agreement	Area Kontrak/ Contract Area	Jenis Jasa/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
KPC dan/and DEWA	Bengalon	Surat tambahan dan kerangka perjanjian serta perjanjian bantuan teknik/ <i>Amendment on framework agreement and technical assistance agreement</i> Perjanjian variasi untuk tambahan jasa/ <i>Variation agreement for additional services</i>	27 Mei 2004 sampai 27 Mei 2014/ <i>May 27, 2004 up to May 27, 2014</i> 23 Januari 2014 sampai pengakhiran PKP2B KPC/ <i>January 23, 2014 up to the termination of KPC'S CCoW</i>
KPC, IndoCoal Kaltim dan/and DEWA	Bengalon	Jasa pengoperasian tambang batubara/ <i>Coal mining services operation</i>	27 Mei 2004 sampai 27 Mei 2014 (kadaluwarsa)/ <i>May 27, 2004 up to May 27, 2014 (expired)</i>
KPC dan/and NTP	Sanggatta	Jasa pengoperasian <i>crushing plant</i> dan <i>overland conveyor</i> / <i>Crushing plant and overland conveyor services operation</i>	17 Desember 2010 sampai 16 Desember 2017/ <i>December 17, 2010 up to December 16, 2017</i>
KPC dan/and NTP	Sanggatta	Jasa pengoperasian <i>overland conveyor</i> , <i>stockpile</i> dan <i>reclaimer</i> / <i>Overland conveyor, stockpile and reclaimer services operation</i>	28 Oktober 2010 sampai 27 Oktober 2017/ <i>October 28, 2010 up to October 27, 2017</i>
KPC dan/and BUMA	Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur/ <i>Bengalon, Kutai Timur Regency and East Kalimantan</i>	Jasa pengoperasian tambang batubara/ <i>Coal mining services operation</i> Surat tambahan dan kerangka perjanjian serta perjanjian bantuan teknik/ <i>Amendment on framework agreement and technical assistance agreement</i>	1 April 2011 sampai 30 September 2016/ <i>April 1, 2011 up to September 30, 2016</i> (2) 1 April 2011 sampai 30 September 2016/ <i>April 1, 2011 up to September 30, 2016</i>
KPC dan/and Thiess	Melawan dan/and Sanggatta	Perjanjian penyewaan <i>Wet</i> dan jasa pengoperasian tambang batubara lainnya/ <i>Wet rental agreement and coal mining service variation.</i>	1 Oktober 2012 sampai 30 Juni 2015/ <i>October 1, 2012 up to June 30, 2015</i> (3)
KPC dan/and PT Citra Kusuma Perdana	Sanggatta	Perjanjian layanan listrik/ <i>Power service agreement</i>	27 September 2011 sampai 31 Desember 2021/ <i>September 27, 2011 up to December 31, 2021</i> (4)

- (1) Tergantung pada pemenuhan beberapa kondisi dalam Akta yang ditandatangani oleh Thiess, IndoCoal Kalsel dan Arutmin, AROAMS dengan Thiess telah dihentikan (Catatan 50t).
- (2) Perjanjian ini awalnya berlaku sampai tanggal 1 April 2014 atau ketika volume pengupasan tanah yang disetujui telah tercapai, mana yang lebih dulu tercapai. Pada bulan Agustus 2013, volume pengupasan tanah yang disetujui telah tercapai dan pada bulan September 2013, perjanjian ini diperpanjang kembali.
- (3) Perjanjian ini diubah beberapa kali untuk memperpanjang jangka waktu, perjanjian terakhir tertanggal 16 Desember 2014.
- (4) Perjanjian ini awalnya berlaku sampai tanggal 27 September 2018 tetapi telah direvisi dan diperpanjang pada tahun 2014.
- (5) Perjanjian ini diubah beberapa kali untuk memperpanjang jangka waktu, perjanjian terakhir tertanggal 14 Oktober 2014.
- (6) Perjanjian ini diubah beberapa kali untuk memperpanjang jangka waktu, perjanjian terakhir tertanggal 1 Oktober 2013.

- (1) *Subject to performance of the terms of the Deed entered into by Thiess, IndoCoal Kalsel and Arutmin, the AROAMS with Thiess has been terminated (Note 50t).*
- (2) *This agreement was initially until April 1, 2014 or when the agreed volume of overburden is already achieved, whichever is earlier. In August 2013, the agreed volume or overburden was achieved and in September 2013, the agreement was further extended.*
- (3) *This agreement was amended several times to extend the term, the latest agreement was dated December 16, 2014.*
- (4) *This agreement was initially until September 27, 2018 but the agreement was revised and extended in 2014.*
- (5) *This agreement was amended several times to extend the term, the latest agreement was dated October 14, 2014.*
- (6) *This agreement was amended several times to extend the term, the latest agreement was dated October 1, 2013.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

z. Perjanjian Pemasaran

z. Marketing Agreements

Pihak Terkait di Perjanjian/ Parties in the Agreement	Jenis Jasa/ Description of Services	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
Arutmin, IndoCoal Kalsel, ICRL dan/ and Forestdale	Forestdale sebagai agen pemasaran penjualan batubara di Indonesia dengan komisi sebesar 4% dari hasil penjualan, neto setelah dipotong pajak/ <i>Forestdale acts as the marketing agent of coal sales within Indonesia with a commission of 4% of the sales proceeds, net of withholding tax</i>	25 Juli 2011 sampai 31 Desember 2015/ <i>July 25, 2011 up to December 31, 2015</i>
Arutmin dan/ and Forestdale	Forestdale sebagai agen pemasaran penjualan batubara ke PLN dengan komisi sebesar 7.5% dari seluruh penjualan FOB yang dihasilkan/ <i>Forestdale acts as the marketing agent of coal sales to PLN with a commission of 7.5% of all FOB sales proceeds</i>	25 Juli 2011 sampai 31 Desember 2015/ <i>July 25, 2011 up to December 31, 2015</i>
Arutmin, ICRL, dan/ and Glencore International AG (Glencore)	Glencore sebagai agen pemasaran penjualan batubara dengan komisi sebesar 2,5% dari nilai penjualan neto dimana Arutmin harus memastikan penjualan Glencore minimal mencapai 9 juta ton per tahun/ <i>Glencore acts as the marketing agent of coal sales with a commission of 2.5% of net sales value and Arutmin must ensure that Glencore sales will be at least 9 million tonnes annually</i>	30 November 2011 sampai 30 September 2019/ <i>November 30, 2011 up to September 30, 2019</i>
Arutmin dan/and Trust Energy Resources Pte. Ltd. (Trust Energy)	Trust Energy sebagai agen pemasaran penjualan batubara untuk kontrak Grup Tata dengan komisi 4% atas nilai penjualan neto dari 1 Januari 2012 sampai 10 Oktober 2015 dan 2,5% atas nilai penjualan neto dari 11 Oktober 2015 sampai 30 September 2019/ <i>Trust Energy acts as the marketing agent of coal sales under Tata Group contracts with a commission of 4% of net sales value from January 1, 2012 to October 10, 2015 and 2.5% of net sales value from October 11, 2015 until September 30, 2019</i>	1 Januari 2012 sampai 30 September 2019/ <i>January 1, 2012 up to September 30, 2019</i>
KPC, ICRL IndoCoal Kaltim dan/and Glencore Coal (Mauritius) Ltd. (Glencore Coal)	Glencore Coal sebagai agen pemasaran penjualan batubara ke seluruh dunia kecuali Jepang dengan komisi 5% dari penjualan/ <i>Glencore Coal acts as the marketing agent of coal sales worldwide excluding Japan with a commission of 5% of the sales</i> Perjanjian novasi dengan mengalihkan seluruh hak, kepentingan, manfaat, kewajiban dan liabilitas dari ICRL kepada KPC/ <i>Novation of the agreement by transferring all rights, interests, benefits, obligations and liabilities from ICRL to KPC</i>	10 Oktober 2003 sampai 10 Oktober 2015/ <i>October 10, 2003 up to October 10, 2015</i> ⁽¹⁾ 2 Juli 2014 sampai 10 Oktober 2015/ <i>July 2, 2014 up to October 10, 2015</i>
KPC, IndoCoal Kaltim, ICRL dan/and Mitsubishi Corporation (Mitsubishi)	Mitsubishi sebagai agen pemasaran penjualan batubara di Jepang dengan komisi 5% dari penjualan/ <i>Mitsubishi acts as the marketing agent of coal sales within Japan with a commission of 5% of the sales</i> Perjanjian novasi dengan mengeluarkan ICRL sebagai pihak dalam perjanjian/ <i>Novation of the agreement by withdrawal by ICRL as a party in the agreement</i>	9 Januari 2004 sampai 9 Januari 2016/ <i>January 9, 2004 up to January 9, 2016</i> ⁽²⁾ 26 Juni 2014 sampai 9 Januari 2016/ <i>June 26, 2014 up to January 9, 2016</i>
Bumi Resources Japan Co Ltd. (BRJ) dan/and Mitsubishi	BRJ membantu Mitsubishi dalam memasarkan batubara yang diproduksi KPC dengan komisi 45% dari komisi pemasaran aktual yang diterima Mitsubishi dari KPC/ <i>BRJ assists Mitsubishi in marketing coal produced by KPC with a commission of 45% of the actual marketing commissions received by Mitsubishi from KPC</i>	1 September 2010 sampai 8 Januari 2016/ <i>September 1, 2010 up to January 8, 2016</i> ⁽³⁾
KPC dan/and Trust Energy	Trust Energy sebagai agen pemasaran penjualan batubara untuk kontrak Grup Tata dengan komisi 2,5% dari jumlah penjualan neto/	11 Oktober 2015 sampai 5 Agustus 2021/ <i>October 11, 2015 up to August 5, 2021</i> ⁽⁴⁾

- (1) Perjanjian ini telah dinovasi dengan perjanjian tertanggal 2 Juli 2014.
(2) Perjanjian ini telah dinovasi dengan perjanjian tertanggal 26 Juni 2014.

- (1) This agreement was novated by the agreement made on July 2, 2014.
(2) This agreement was novated by the agreement made on June 26, 2014.

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

- (3) Sebagai bagian dari reorganisasi internal, Mitsubishi Corporation (MC) bermaksud untuk melakukan novasi *Marketing Advisory Agreement* (MAA) kepada Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd (RtM Japan), dimana seluruh hak dan kewajiban MC beralih kepada RtM Japan sehingga BRJ untuk selanjutnya terikat dengan RtM Japan terhitung efektif sejak tanggal 1 April 2013.
- (4) Kontrak ditandatangani tanggal 13 Agustus 2012 tetapi akan berlaku efektif tanggal 11 Oktober 2015.

aa. Perjanjian Jual Beli Batubara

Pihak Terkait di Perjanjian/ Parties in the Agreement	Jenis Penjualan/ Description of Sales	Jangka Waktu Kontrak/ Contract Duration
Arutmin, KPC, ICRL (Penjual/Sellers) dan/and Enercorp (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara/ Sales of coal KPC dan Arutmin setuju untuk menjamin kewajiban ICRL kepada Enercorp/ KPC and Arutmin agreed to guarantee the obligation of ICRL to Enercorp	1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2016 atau saat seluruh kewajiban ICRL dan Enercorp terpenuhi, mana yang lebih awal. January 1, 2007 up to December 31, 2016 or when all obligations of ICRL and Enercorp have been completed, whichever is earlier.
ICRL (Penjual/Seller) dan/and Tata Power (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara sebesar 89,5 juta ton untuk tiga (3) pembangkit listrik Tata Power yaitu Mundra, Coastal dan Trombay /Sales of 89.5 million tonnes of coal for three (3) power plants owned by Tata Power consisting of Mundra, Coastal and Trombay	30 Maret 2007 sampai 26 Juni 2007 atau berakhirnya PKP2B KPC mana yang lebih awal/ March 30, 2007 up to June 26, 2007 or the end of KPC's CCoW, whichever is earlier.
ICRL (Pemasok/Supplier) dan/and Trust Energy (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara/ Sales of coal	31 Oktober 2008 sampai awal tanggal kadaluarsa PKP2B atau 10 tahun setelah dimulai fasilitas Trombay, Tata Power memiliki opsi memperpanjang jangka waktu perjanjian selama 20 tahun October 31, 2008 up to earlier of the date of expiration or termination of CCoW or 10 years after commencement of the Trombay facility, Tata Power has option to extend the term of agreement until 20 years
KPC (Penjamin/Guarantor), ICRL (Penjual/Seller) dan/and Trust Energy (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara ke FINOLEX Industries Limited di India secara khusus/ Sales of coal exclusively to FINOLEX Industries Limited in India	1 September 2009 sampai 30 Oktober 2014 September 1, 2009 up to October 30, 2014 (1)
KPC (Penjual/Seller) dan/and Candice (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara jangka panjang/ Long-term sales of coal	1 Februari 2008 sampai disepakati untuk diakhiri secara tertulis oleh Pihak-pihak terkait/ February 1, 2008 until mutually terminated in writing by the Parties
KPC, Candice (Penjual/Sellers) dan/and Enel Trade S.P.A. (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara/ Sales of coal	5 Februari 2008 sampai 31 Desember 2021 dan dapat diperbaharui untuk dua (2) tahun berikutnya/ February 5, 2008 up to December 31, 2021 and is renewable for another two (2) years
KPC (Pembeli/Buyer) dan/and Kutai Bara Nusantara (KBN) (Penjual/Seller)	Penyediaan batubara/ Supply of coal	1 Agustus 2010 sampai 31 Juli 2014 (kadaluarsa)/ August 1, 2010 up to July 31, 2014 (expired)
PT Fajar Bumi Sakti (Penjual/Seller) dan/and JP Morgan Ventures Energy Corporation (Pembeli/Buyer)	Penjualan batubara/ Sales of coal	6 Juli 2012 sampai 31 Desember 2014, kecuali ada keputusan di awal/ July 6, 2012 up to December 31, 2014, unless earlier terminated

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

- (3) As part of Mitsubishi Corporation (MC) internal reorganization, it intends to novate *Marketing Advisory Agreement* (MAA) with BRJ to Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd (RtM Japan), in which all rights and obligation under MAA assigned to RtM Japan. Therefore BRJ shall be bound with RtM Japan effective April 1, 2013.
- (4) Contract was entered on August 13, 2012, but the effectivity will be on October 11, 2015.

aa. Coal Sale and Purchase Agreements

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

- (1) Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 6 Maret 2014.
- (2) Perjanjian ini awalnya untuk satu (1) tahun dan pada tahun 2012, diperpanjang hingga 31 Juli 2013, kemudian pada tahun 2013, diperpanjang kembali untuk satu (1) tahun (kadaluwarsa).

bb. Perjanjian Jasa Manajemen

Pada tanggal 1 Juli 2012, KPC menandatangani Perjanjian Jasa Manajemen dengan PT Kutai Timur Sejahtera (KTS). Dalam Perjanjian tersebut, KTS diharuskan memberikan jasa manajemen kepada KPC dengan biaya jasa manajemen sebesar USD555.556 setiap bulan, mulai tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut, yang dapat berubah melalui persetujuan tertulis dari para pihak. Efektif sejak tanggal 30 Juni 2014, perjanjian ini telah dihentikan terkait dengan *KTS Transfer* (Catatan 49ff).

cc. Perjanjian Sewa dengan PT Mitratama Perkasa

1. Pada tanggal 18 April 2008, KPC menandatangani Perjanjian Sewa Sangatta dan Perjanjian Sewa Bengalon dengan PT Mitratama Perkasa (PTMP) dimana PTMP telah sepakat untuk menyewakan aset kepada KPC; aset tersebut meliputi fasilitas gudang penghancur batubara dan fasilitas penanganan serta fasilitas tempat penyimpanan batubara, dimana KPC telah setuju untuk membayar USD1.050.000 per bulan untuk masing-masing perjanjian. Kedua perjanjian tersebut akan dimulai pada tanggal efektif dan akan berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat berakhirnya kecuali masing-masing pihak telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya setidaknya satu (1) bulan sebelum tanggal berakhirnya untuk memperbaharui perjanjian tersebut untuk jangka waktu lima (5) tahun (atau periode lain yang disepakati antara para pihak).

Pada tanggal 2 Desember 2010, KPC dan PTMP menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Sangatta dan Perjanjian Sewa Bengalon, antara lain, memperpanjang jangka waktu kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Sejak saat itu dan seterusnya, salah satu pihak secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS *(Continued)*

- (1) This agreement was terminated on March 6, 2014.
- (2) The agreement was initially for a period one (1) year and was extended to July 31, 2013 in 2012 but was further extended for additional one (1) year in 2013 (expired).

bb. Management Service Agreement

On July 1, 2012, KPC entered into Management Service Agreement with PT Kutai Timur Sejahtera (KTS). Under the agreement, KTS shall provide certain management support services to KPC in consideration of management service fees of USD555,556, payable monthly, starting July 1, 2012 until the termination of the agreement, which is subject to further mutual written consent of the parties. Effective June 30, 2014, this agreement was terminated following the *KTS Transfer* (Note 49ff).

cc. Rental Agreements with PT Mitratama Perkasa

1. On April 18, 2008, KPC entered into the Sangatta Rental Agreement and Bengalon Rental Agreement with PT Mitratama Perkasa (PTMP) under which PTMP has agreed to rent its asset to KPC; asset means the coal crushing storage and handling facility and stockpiling facility, for which KPC has agreed to pay USD1,050,000 per month for each agreement. Both agreements shall commence on the effective date and shall terminate automatically without notice on the expiry of the term unless either party shall have given written notice to the other party at least one (1) month prior to the date of expiry of the term that it wishes to renew this agreement for a period of five (5) years (or any other period as agreed between the parties).

On December 2, 2010, KPC and PTMP entered into an Amendment and Restated Sangatta Rental Agreement and Bengalon Rental Agreement to, among others, extend the term of both contracts until December 31, 2017. From then onwards, either party may unilaterally terminate the agreement by giving written notice to the other party.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 8 Juni 2012, kedua perjanjian di atas dihentikan oleh KPC dan PTMP, kemudian perjanjian baru ditandatangani tanggal 12 Juni 2012 untuk aset yang sama. Berdasarkan Perjanjian Sewa Sangatta dan Perjanjian Sewa Bengalon yang baru, KPC setuju untuk membayar USD1.500.000 per bulan. Kedua perjanjian akan dimulai pada tanggal efektif dan akan, tergantung pada diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat berakhirnya jangka waktu. Tanggal berakhir perjanjian ini tidak akan terjadi sebelum tanggal 31 Desember 2018.

2. Pada tanggal 4 Januari 2010, Arutmin mengadakan Perjanjian Layanan Pelabuhan Asam Asam ("Perjanjian Asam Asam") dengan PTMP, dimana PTMP telah sepakat untuk menyediakan layanan pelabuhan kepada Arutmin, Pelabuhan tersebut adalah pelabuhan pemuatan batubara di Desa Muara Asam Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan semua peralatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pelabuhan. Arutmin setuju untuk membayar USD3,03 untuk setiap ton batubara yang akan dimuat di pelabuhan tersebut dengan jumlah sewa minimum untuk setiap tagihan per bulan setara dengan 1 juta ton. Tanggal berakhirnya perjanjian ini adalah mana yang lebih awal dari: (i) dua puluh (20) tahun setelah tanggal efektif; (ii) akhir konsesi pertambangan Arutmin; atau (iii) jika dihentikan secara tertulis oleh para pihak yang berkepentingan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pemutusan perjanjian ini. Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal efektif dan akan berakhir secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat berakhirnya jangka waktu. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan tertulis setelah lima (5) tahun dari tanggal efektif dan sejak tanggal 31 Desember 2017, setiap pihak secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis ke pihak lainnya. Pada tanggal 2 Desember 2010, Arutmin dan PTMP menandatangani perjanjian perubahan yang terkait dengan Perjanjian Asam Asam untuk mengubah dan menyajikan kembali ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Asam Asam yang dinyatakan dalam perjanjian perubahan tersebut.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On June 8, 2012, the above agreements were pre-terminated by KPC and PTMP and new agreements were entered into on June 12, 2012 for the same assets. Based on the new Sangatta Rental Agreement and Bengalon Rental Agreement, KPC agreed to pay USD1,500,000 per month. Both new agreements shall commence on the effective date and shall, subject to earlier termination in accordance with their terms, terminate automatically without notice on the expiry of the term. The expiry date as described in the agreements shall not occur before December 31, 2018.

2. *On January 4, 2010, Arutmin entered into Asam-Asam Port Service Agreement (the "Asam-Asam Agreement") with PTMP, under which PTMP has agreed to provide port services to Arutmin; Port means coal loading port at Muara Asam-Asam Village, Jorong Sub-district, Tanah Laut District, with all of the equipment required for the port to operate. Arutmin has agreed to pay USD3.03 per tonne of coal the port will handle, of which minimum rental amount for each monthly billing period shall be equivalent to 1 million tonnes. The expiration date of this agreement will be the earlier of: (i) twenty (20) years after the effective date; (ii) end of the Arutmin's mining concession; or (iii) if terminated in writing by the parties hereto or based on provisions on termination of agreement hereunder. The agreement shall commence on the effective date and shall terminate automatically without notice on the expiry of the term. The parties may mutually agree in writing to terminate this agreement after a period of five (5) years from the effective date and from December 31, 2017, either party may unilaterally terminate this agreement by giving written notice to the other party. On December 2, 2010, Arutmin and PTMP entered into an amendment agreement relating to the Asam-Asam Agreement to amend and restate the terms of the Asam-Asam Agreement in the form set out in the amendment agreement.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 8 Juni 2012, perjanjian tersebut di atas dihentikan oleh Arutmin dan PTMP, kemudian perjanjian yang baru ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2012 untuk aset yang sama. Arutmin setuju untuk membayar jumlah sewa yang sama seperti yang ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal efektif dan akan diakhiri secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat jatuh tempo. Para pihak dapat saling menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini setelah tujuh (7) tahun dari tanggal efektif dan sejak tanggal 31 Desember 2018, setiap pihak secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis ke pihak lainnya.

3. Pada tanggal 8 Juni 2012, Arutmin dan PTMP mengadakan Perjanjian Sewa Mulia Barat, dimana PTMP telah setuju untuk menyewakan aset kepada Arutmin; aset dalam hal ini adalah pelabuhan pemuatan batubara yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Arutmin setuju untuk membayar USD4,6 untuk setiap ton batubara yang akan dimuat di pelabuhan tersebut, dengan jumlah sewa minimum untuk setiap tagihan per bulan setara dengan 857.143 ton untuk tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 833.333 ton untuk tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan satu (1) juta ton dari tanggal 1 Januari 2014 dan seterusnya. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal efektif dan akan diakhiri secara otomatis tanpa pemberitahuan pada saat jatuh tempo. Para pihak dapat saling menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini setelah tujuh (7) tahun dari tanggal efektif dan sejak tanggal 31 Desember 2018, setiap pihak secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis ke pihak lainnya.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On June 8, 2012, the above agreement was pre-terminated by Arutmin and PTMP and a new agreement was entered into on June 12, 2012 for the same asset. Arutmin has agreed to pay the same rental amount as that of the previous agreement. The agreement shall commence on the effective date and shall terminate automatically without notice on the expiry of the term. The parties may mutually agree in writing to terminate this agreement after a period of seven (7) years from the effective date and from December 31, 2018, either party may unilaterally terminate this agreement by giving written notice to the other party.

3. *On June 8, 2012, Arutmin and PTMP entered into West Mulia Rental Agreement, under which PTMP has agreed to rent its asset to Arutmin; asset means the coal loading port located in Mekarsari Village, Kintap Sub-district, Tanah Laut Regency. Arutmin has agreed to pay USD4.6 per tonne of coal the port will handle, of which minimum rental amount for each monthly billing period shall be equivalent to 857,143 tonnes for the calendar year ending December 31, 2012, 833,333 tonnes for the calendar year ending December 31, 2013 and one (1) million tonnes from January 1, 2014 onwards. The agreement shall commence on the effective date and shall terminate automatically without notice on the expiry of the term. The parties may mutually agree in writing to terminate this agreement after a period of seven (7) years from effective date and from December 31, 2018, either party may unilaterally terminate this agreement by giving written notice to the other party.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

dd. Perjanjian Peminjaman Saham

Pada tahun 2012, Perusahaan dan pihak tertentu ("Para Pihak") menandatangani Perjanjian Peminjaman Saham, dimana Perusahaan setuju meminjamkan saham BRMS yang dimiliki oleh dan tercatat atas nama Perusahaan kepada Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Pihak. Perusahaan dan Para Pihak sepakat bahwa segala hak dan kewajiban yang melekat pada saham BRMS yang dipinjamkan kepada Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Pihak (termasuk namun tidak terbatas hak atas dividen, hak suara, hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Luar Biasa BRMS) akan tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Perusahaan dan tidak pernah beralih atau dialihkan kepada Para Pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Pihak.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu dua belas (12) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan dan Para Pihak.

Sebagai imbalan, Para Pihak setuju untuk membayar biaya pinjaman ke Perusahaan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. Disamping itu, Para Pihak juga setuju untuk membayar biaya tambahan.

ee. Perjanjian Subordinasi dan *Equity Shortfall Undertakings*

1. Pada tanggal 25 Juni 2010, ICRL ("Kreditor Junior"), Candice ("Peminjam"), PT Dwikarya Prima Abadi, PT Marvel Capital Indonesia dan PT Nusa Tambang Pratama ("Penjamin"), dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura ("Agen dari Kreditor Senior") menandatangani Perjanjian Subordinasi. ICRL sepakat akan tunduk pada syarat dan kondisi dari Perjanjian Subordinasi, utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman *Equity Partner* (Catatan 20b) harus disubordinasikan terhadap hak pembayaran Utang Senior sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian fasilitas sebesar USD300.000.000. Pada bulan Oktober tahun 2013, perjanjian tersebut otomatis dihentikan setelah pelunasan fasilitas pinjaman sebesar USD300.000.000.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

dd. Stock Loan Agreements

In 2012, the Company and certain parties ("the Parties") signed a Stock Loan Agreement, whereby the Company agreed to lend shares of BRMS owned by and registered in the name of the Company to the Parties or other party appointed by the Parties. The Company and the Parties agree that any rights and obligations attached to BRMS shares lent to the Parties or other party appointed by the Parties (including but not limited to dividend rights, vote, rights to attend Annual/Extraordinary General Meeting of BRMS) will remain in possession and full control of the Company and will never pass or be transferred to the Parties or other party appointed by the Parties.

The agreement is for a period of twelve (12) months from the signing of the agreement and can be extended with the written consent of the Company and the Parties.

As consideration, the Parties have agreed to pay to the Company the fee as stated in the agreement. The Parties also agreed to pay an additional fee.

ee. Subordination Agreements and *Equity Shortfall Undertakings*

1. *On June 25, 2010, ICRL (the "Junior Creditor"), Candice (the "Borrower"), PT Dwikarya Prima Abadi, PT Marvel Capital Indonesia and PT Nusa Tambang Pratama (the "Original Guarantors"), and ICICI Bank Limited, Singapore branch (the "Agent of the Senior Creditors") entered into a Subordination Agreement. ICRL agreed that, subject to the terms and conditions of the Subordination Agreement, the debt under the Equity Partner Loan Agreement (Note 20b) shall be subordinated in right of payment to the Senior Debt as defined in the USD300,000,000 facility agreement. In October 2013, the agreement was automatically terminated upon full repayment of the USD300,000,000 loan facility.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

Pada tanggal 1 November 2010, ICRL, Candice dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura ("Agen") menandatangani Equity Shortfall Undertaking, dimana ICRL memberikan dukungan usaha tertentu seperti dalam perjanjian, terkait dengan pendanaan sebesar USD300.000.000 berdasarkan perjanjian fasilitas Candice untuk pembangunan aset tertentu. Dukungan ini akan terus berlaku sepenuhnya sampai Tanggal Rilis seperti tercantum dalam perjanjian. Pada bulan Oktober 2013, perjanjian tersebut otomatis dihentikan setelah pelunasan fasilitas pinjaman sebesar USD300.000.000.

On November 1, 2010, ICRL, Candice and ICICI Bank Limited, Singapore Branch (the "Agent") entered into an Equity Shortfall Undertaking, whereby ICRL gives certain undertakings provided in the agreement, in consideration of the finance parties making available the USD300,000,000 facility agreement to Candice for the construction of certain assets. This undertaking shall continue in full force and effect until the Release Date stated in the agreement. In October 2013, the agreement was automatically terminated upon full repayment of the USD300,000,000 loan facility.

2. Pada tanggal 28 Juni 2011 ICRL ("Kreditor Junior"), CKP ("Peminjam"), PT Guruh Agung dan PT Citra Prima Buana ("Penjamin"), dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura ("Agen dari Kreditor Senior") menandatangani Perjanjian Subordinasi. ICRL sepakat tunduk pada syarat dan kondisi dari Perjanjian Subordinasi, utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman *Equity Partner* (Catatan 20c) harus disubordinasikan terhadap hak pembayaran Utang Senior sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian fasilitas sebesar USD75.000.000. Pada bulan Maret 2014, Perjanjian Subordinasi secara otomatis dihentikan setelah pelunasan fasilitas pinjaman sebesar USD75,000,000.

2. On June 28, 2011, ICRL (the "Junior Creditor"), CKP (the "Borrower"), PT Guruh Agung and PT Citra Prima Buana (the "Original Guarantors"), and ICICI Bank Limited, Singapore branch (the "Agent of the Senior Creditors") entered into a Subordination Agreement. ICRL agreed that, subject to the terms and conditions of the Subordination Agreement, the debt under the Equity Partner Loan Agreement (Note 20c) shall be subordinated in right of payment to the Senior Debt as defined in the USD75,000,000 facility agreement. In March 2014, the Subordination Agreement was automatically terminated upon full repayment of the USD75,000,000 loan facility.

Pada tanggal 26 Februari 2014, ICRL ("Kreditor Junior"), CKP ("Peminjam"), PT Guruh Agung dan PT Citra Prima Buana ("Penjamin"), dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura, ("Agen dari Kreditor Senior") menandatangani Perjanjian Subordinasi lain. ICRL sepakat tunduk pada syarat dan kondisi dari Perjanjian Subordinasi, utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman *Equity Partner* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali harus disubordinasi terhadap hak pembayaran Utang Senior sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian fasilitas sebesar USD105.000.000.

On February 26, 2014, ICRL (the "Junior Creditor"), CKP (the "Borrower"), PT Guruh Agung and PT Citra Prima Buana (the "Guarantors"), and ICICI Bank Limited, Singapore branch (the "Agent of the Senior Creditors") entered into another Subordination Agreement. ICRL agreed that, subject to the terms and conditions of the Subordination Agreement, the debt under the Amended and Restated Equity Partner Loan Agreement (Note 20c) shall be subordinated in right of payment to the Senior Debt as defined in the USD105,000,000 facility agreement.

Pada tanggal 28 Juni 2011, ICRL, CKP dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura ("Agen") menandatangani *Equity Shortfall Undertaking*, dimana ICRL memberikan dukungan usaha tertentu seperti dalam perjanjian, terkait pendanaan sebesar USD75.000.000 berdasarkan perjanjian fasilitas CKP untuk pembangunan pembangkit listrik dan aset terkait. Dukungan ini akan terus berlaku sepenuhnya sampai Tanggal Rilis seperti tercantum dalam perjanjian. Pada bulan Maret 2014, *Equity Shortfall Undertaking* secara otomatis dihentikan setelah pelunasan fasilitas pinjaman sebesar USD75.000.000.

On June 28, 2011, ICRL, CKP and ICICI Bank Limited, Singapore branch (the "Agent") entered into an Equity Shortfall Undertaking, whereby ICRL gives certain undertakings provided in the agreement, in consideration of the finance parties making available the USD75,000,000 facility agreement to CKP for the construction of a power station and related assets. This undertaking shall continue in full force and effect until the Release Date stated in the agreement. In March 2014, the Equity Shortfall Undertaking was automatically terminated upon full repayment of the USD75,000,000 loan facility.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Pada tanggal 26 Februari 2014, ICRL, CKP dan ICICI Bank Limited, cabang Singapura, ("Agen") menandatangani *Equity Shortfall Undertaking* lain, dimana ICRL memberikan dukungan usaha tertentu seperti dalam perjanjian, terkait dengan pendanaan sebesar USD105.000.000 berdasarkan perjanjian fasilitas CKP untuk pembangunan pembangkit listrik dan aset terkait. Dukungan ini akan terus berlaku sepenuhnya sampai Tanggal Rilis seperti tercantum dalam perjanjian.

ff. Master Deed

Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan, CFL, BRMS, KCL, SHL dan Bumi Netherlands B.V. (Bumi Netherlands) menandatangani *Master Deed* untuk menyelesaikan sebagian dari sisa pokok pinjaman dengan CFL sebesar USD1,3 miliar ("Utang CFL") melalui serangkaian transaksi-transaksi utama. Namun demikian, pada tanggal 28 Januari 2014, *Master Deed* diubah dan dinyatakan kembali untuk merevisi transaksi utama tertentu ("*Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali").

Berikut ini adalah transaksi utama *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali:

- 1) Akuisisi oleh CFL sebesar 19% kepemilikan saham yang beredar di KPC, IndoCoal Kaltim dan IndoCoal KPC

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

- i. KPC Reorganisasi - KPC akan menerbitkan tambahan 111.800 lembar saham dengan total harga pemesanan sebesar Rp7.096.505.000 (disebut sebagai "HMETD KPC"), dan IndoCoal Kaltim akan menerbitkan tambahan 74.600 lembar saham dengan total harga pemesanan sebesar Rp746.000.000 (disebut sebagai "HMETD Kaltim"). Selanjutnya Perusahaan dan setiap pemegang saham KPC, IndoCoal Kaltim dan IndoCoal KPC akan menyetujui atas penerbitan tambahan jumlah lembar saham setara dengan 19% modal saham di masing-masing perusahaan kepada Mountain Netherlands, sebagai Newco. Sebagai tambahan, Sitrade, SHL dan KCL harus mengalihkan saham milik mereka di KPC kepada Perusahaan dengan jumlah lembar saham yang telah ditentukan.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

On February 26, 2014, ICRL, CKP and ICICI Bank Limited, Singapore branch (the "Agent") entered into another *Equity Shortfall Undertaking*, whereby ICRL gives certain undertakings provided in the agreement, in consideration of the finance parties making available the USD105,000,000 facility agreement to CKP for the construction of a power station and related assets. This undertaking shall continue in full force and effect until the Release Date stated in the agreement.

ff. Master Deed

On October 8, 2013, the Company, CFL, BRMS, KCL, SHL and Bumi Netherlands B.V. (Bumi Netherlands) entered into a *Master Deed* in order to settle a portion of the remaining USD1.3 billion outstanding principal amount with CFL ("CFL Loan") through a series of main transactions. However, on January 28, 2014, the *Master Deed* was amended and restated to revise certain main transactions (the "*Amended and Restated Master Deed*").

The following main transactions of the *Amended and Restated Master Deed* are as follows:

- 1) Acquisition by CFL of 19% of the outstanding share capital in each of KPC, IndoCoal Kaltim and IndoCoal KPC

Transactions contemplated under this acquisition will be as follows:

- i. KPC Reorganization - KPC will issue additional 111,800 shares at a total subscription price of Rp7,096,505,000 (referred to as the "*KPC Rights Issue*"), and IndoCoal Kaltim will issue additional 74,600 shares at a total subscription price of Rp746,000,000 (referred to as the "*Kaltim Rights Issue*"). Furthermore, the Company and each of the other shareholders of KPC, IndoCoal Kaltim and IndoCoal KPC shall consent the issuance of all additional shares, including the shares constituting 19% of the outstanding share capital to each entity, to Mountain Netherlands, as the Newco. In addition, Sitrade, SHL and KCL shall transfer all its shares in KPC to the Company at specified number of shares.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Sebelum penyelesaian Reorganisasi KPC, KTS juga akan mentransfer ke Sitrade seluruh kepemilikan sahamnya di KPC sebesar 5%, transaksi ini sehubungan dengan akuisisi Perusahaan terhadap kepemilikan KTS di KPC berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dengan PT Recapital Asset Management (Catatan 7) (disebut sebagai "Peralihan KTS").

ii. Penjualan atas Newco - Perusahaan akan menjual kepada CFL sebesar 100% jumlah lembar saham yang beredar di Newco pada harga USD950.000.000.

2) Akuisisi oleh CFL atas 42% kepemilikan di BRMS ("Transaksi BRMS")

Perusahaan akan menjual 10.739.463.720 lembar saham BRMS yang setara dengan 42% modal saham BRMS, kepada CFL dengan harga USD257.400.000. Selanjutnya, Perusahaan akan memberikan *put* dan *call options* sehubungan dengan saham di BRMS.

3) Akuisisi oleh CFL atas saham tertentu yang diterbitkan oleh Perusahaan ("Transaksi Bumi")

Perusahaan akan menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan saham seri baru yang berbeda dari saham saat ini beredar ("Saham Bumi Seri B") ke Nominator Bumi, dan Nominator Bumi akan mengalihkan seluruh saham tersebut akhirnya ke CFL. Harga beli agregat untuk saham tersebut tidak akan melebihi USD150.000.000 seperti yang disepakati antara Bumi Netherlands dan CFL.

Penyelesaian transaksi-transaksi dan pihak-pihak yang disebutkan dalam *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali membutuhkan persetujuan dan pembebasan dari pihak-pihak peminjam tertentu, pemegang obligasi dan pemegang saham Perusahaan dan afiliasinya, serta persetujuan dan pembebasan dari pihak-pihak ketiga tertentu dan instansi pemerintahan.

Selanjutnya, setiap transaksi-transaksi di atas akan diselesaikan dan/atau ditutup dengan ketentuan, kondisi dan prosedur yang telah ditetapkan di dalam *Master Deed* yang Diubah dan Dinyatakan Kembali.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS *(Continued)*

Prior to the closing of the KPC Reorganization, KTS will also transfer to Sitrade all its shares in KPC, representing 5% ownership interest, in relation to the Company's acquisition of ownership interest of KTS in KPC under the Settlement Agreement with PT Recapital Asset Management (Note 7) (referred to as the "KTS Transfer").

ii. *Newco Sale - The Company will sell to CFL 100% of the outstanding share capital of Newco at a price of USD950,000,000.*

2) *Acquisition by CFL of 42% ownership interest in BRMS (the "BRMS Transaction")*

The Company will sell 10,739,463,720 shares of BRMS, constituting 42% of the outstanding share capital of BRMS, to CFL at a price of USD257,400,000. Furthermore, the Company will grant certain put and call options in relation to the shares in BRMS.

3) *Acquisition by CFL of certain shares to be issued by the Company (the "Bumi Transaction")*

The Company will issue new shares without preemptive rights and of a different class than the currently outstanding shares ("Bumi Class B Shares") to a Bumi Nominee, and the latter will transfer all those shares ultimately to CFL. The aggregate purchase price for those shares shall not exceed USD150,000,000 as agreed between Bumi Netherlands and CFL.

The foregoing transactions will require, and the parties in the Amended and Restated Master Deed will obtain, the necessary consents, approvals and waivers of certain lenders to, bondholders of and shareholders of the Company and its affiliates, and the consents, approvals and waivers of certain other third parties and government authorities.

Furthermore, each of the foregoing transactions will be settled and/or closed in the manners, conditions and procedures set forth in the Amended and Restated Master Deed.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Setelah penyelesaian atas semua transaksi utama, Perusahaan dan CFL akan menyiapkan rencana untuk pembiayaan kembali atas Sisa Pinjaman Bumi ("Jumlah Sisa Utang") yang mana tergantung pada ketentuan dan kondisi tertentu. Pembiayaan kembali atas utang tersebut akan memiliki masa jatuh tempo selama tiga (3) tahun dan tingkat suku bunga sebesar 6,7% ditambah LIBOR yang dibayarkan secara bulanan. Untuk periode dua belas (12) bulan dimulai dari penyelesaian awal atas perjanjian utang, utang bunga akan dikapitalisasi dan terutang pada saat jatuh tempo. Pinjaman yang dibiayai kembali akan dibayar kembali dalam empat (4) cicilan dengan jumlah yang sama setiap enam (6) bulan mulai bulan kalender ke delapan belas (18) setelah tanggal awal penyelesaian dari perjanjian dan akan dibayar penuh dalam jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan (termasuk bunga yang dikapitalisasi).

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Reorganisasi KPC dan Penjualan Newco sudah selesai (Catatan 4h dan 4e), sedangkan Transaksi BRMS dan Transaksi Bumi masih berlangsung.

gg. Penjualan Arutmin

Pada tanggal 30 Januari 2014, Bhira menandatangani perjanjian untuk menjual 30% kepemilikan di Arutmin dengan imbalan sebesar USD390 juta ditambah bunga dari tanggal 26 November 2013, tanggal efektif penjualan, sampai dengan tanggal penyelesaian penjualan, tergantung pada pemotongan pajak tertentu dan penyesuaian saat penutupan. Penyelesaian penjualan tergantung pada pemenuhan kondisi atau pembebasan tertentu, perolehan persetujuan yang diperlukan dan tindakan restrukturisasi tertentu. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, penyelesaian penjualan masih dalam tahap perkembangan.

hh. Perjanjian Kerjasama Strategis dengan China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. (NFC) untuk pengembangan Dairi

Pada tanggal 22 Oktober 2013, BRMS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Strategis dengan NFC untuk pengembangan tambang timah hitam dan seng Dairi. Perjanjian tersebut mengatur antara lain NFC akan membantu BRMS dalam penyediaan dana dengan nilai pendanaan sebesar 85% dari biaya yang diperlukan untuk pengembangan tambang timah hitam dan seng di Dairi.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

After the closing of all the main transactions, the Company and CFL shall arrange for the refinancing of any remaining Outstanding Bumi Liabilities (the "Residual Amount") subject to certain terms and conditions. The refinanced loan shall have a maturity of three (3) years and interest is payable monthly subject to a rate of 6.7% plus LIBOR. For a period of twelve (12) months commencing from the initial closing of the loan agreement, interest will be capitalized and payable at maturity. The refinanced loan will be repaid in four (4) equal semi-annual installments commencing on the eighteenth (18th) calendar month after the initial closing of the loan agreement and shall be fully repaid on the thirty-sixth (36th) month (inclusive of any capitalized interest).

As of the completion date of the consolidated financial statements, the KPC Reorganization and Newco Sale were already completed (Notes 4h and 4e, respectively), while the BRMS Transaction and the Bumi Transaction are still ongoing.

gg. Sale of Arutmin

On January 30, 2014, Bhira, entered into an agreement to sell its 30% ownership interest in Arutmin for a total consideration of USD390 million plus interest from November 26, 2013, the effective date of the sale, up to the completion date of the sale, subject to certain tax deductions and closing adjustments. The completion of the sale is conditional upon the satisfaction or waiver of certain conditions, obtaining requisite consents and certain restructuring actions. As of completion date of consolidation of financial statement, the completion of sales is still progress.

hh. Strategic Cooperation Agreement with China Non-Ferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. (NFC) to develop Dairi

On October 22, 2013, BRMS has signed a Strategic Cooperation Agreement with NFC to develop lead and zinc mines of Dairi. The agreement stipulated among others that NFC will assist BRMS to arrange approximately 85% of the total funding required to develop the Dairi's lead and zinc mines, among others.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Pada tanggal 17 April 2014, Dairi telah menandatangani Kontrak *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) dengan China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur tambang seng dan timah hitam yang dioperasikan oleh Dairi di Sumatera Utara, yang dapat memproses 1 juta ton bijih per tahunnya. Kontrak EPC tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerjasama strategis yang telah di tandatangani Perusahaan dan NFC.

ii. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Dairi Prima Minerals, PT Citra Palu Minerals dan PT Gorontalo Minerlas tentang Penyesuaian Kontrak Karya (KK)

Pada tanggal 29 September 2014, Dairi, CPM dan GM telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyesuaian Kontrak Karya dimana telah disepakati enam (6) isu strategis amandemen KK, yaitu: (i) luas wilayah KK Tahap Produksi maksimal 25.000 Ha, (ii) kelanjutan operasi pertambangan, (iii) Penerimaan Negara Bukan Pajak, (iv) kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, (v) kewajiban divestasi, (vi) kewajiban pengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri. Nota Kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti dengan amandemen KK yang akan ditandatangani oleh masing-masing Dairi, CPM dan GM dengan Pemerintah.

jj. Perjanjian Gallo

Pada tanggal 17 April 2014, Gallo dan Profex Energi Pvt Ltd. (Profex) menandatangani perjanjian dimana Gallo menunjuk Profex untuk mengebor sumur milik Gallo yang ada di darat pada Blok 13 untuk periode satu (1) tahun yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Total pembayaran terkait dengan proyek ini dihitung secara *lumpsum* sebesar USD48.000.000. Perjanjian ini telah diubah pada tanggal 25 Agustus 2014 atas kaitannya dengan perubahan termin pembayaran.

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

On April 17, 2014, Dairi has entered into *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) Contract with China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co. Ltd. (NFC) to develop facilities and infrastructure of zinc and lead mine that can process up to one (1) million tonnes capacity of ores per year, operated by Dairi in North Sumatera. This EPC Contract is a follow-up of Cooperation Agreement which had been signed by BRMS and NFC.

ii. Signing of Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and PT Dairi Prima Minerals, PT Citra Palu Minerals and PT Gorontalo Minerals on Contract of Work Renegotiation

On September 29, 2014, Dairi, CPM and GM have signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Contract of Work renegotiation which has agreed upon six (6) strategic issues, which consists of: (i) the total area maintained for production stage maximum 25,000 Ha, (ii) continuation of mining operations, (iii) Non-Tax Government Revenue, (iv) domestic obligation related to processing and refining, (v) divestment obligations, (vi) obligations to use domestic labor, goods and services. The Memorandum of Understanding will be followed by an amendment to Contract of Work which will be signed by each of Dairi, CPM and GM and the Government.

jj. Gallo's Service Agreement

On April 17, 2014, Gallo and Profex Energy Pvt Ltd. (Profex) entered into agreement, wherein Gallo appointed Profex to drill Gallo's onshore wells in Block 13 for a period of one (1) year but may be amended from time to time. The total consideration in relation to this project will be calculated on a *lumpsum* basis in the amount of USD48,000,000. This agreement was amended on August 25, 2014 in relation to the terms of payment.

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING (Lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian tersebut, pada 27 Agustus 2014, Gallo mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada Perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pengakuan Utang dengan Profex untuk mengakui kewajiban pembayaran dan kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan dimuka dengan menerbitkan saham baru. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, saham masih belum diterbitkan dan Proyek masih dalam pengerjaan untuk tahap selanjutnya.

kk. Proyek Gorontalo Minerals

1. Pada tanggal 28 April, 2014, GM menandatangani Perjanjian Eksplorasi Lanjut dan Analisa Teknis dengan PT Sumagud Sapta Sinar (SSS). SSS akan melaksanakan pengerjaan Pengeboran Lanjutan di Prospek Motomboto Utara dan Prospek Motomboto Timur untuk jangka waktu dua (2) tahun sejak tanggal dimulainya proyek tersebut yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Total pembayaran terkait dengan proyek ini dihitung secara *lumpsum* sebesar USD9.826.521.

Berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 27 Agustus 2014, GM menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Eksplorasi Lanjut dan Analisa Teknis kepada BRMS, selanjutnya BRMS menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kepada Perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal yang sama, Perusahaan menandatangani Perjanjian

Pengakuan Utang dengan SSS untuk mengakui kewajiban pembayaran dan kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan dimuka dengan menerbitkan saham baru. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, saham masih belum diterbitkan dan Proyek masih dalam pengerjaan untuk tahap selanjutnya.

2. Pada tanggal 2 Mei 2014, GM menandatangani Perjanjian Jasa Studi Kelayakan Penambangan dan Pengembangan Infrastruktur dengan PT Simo Makmur (SM). SM akan melaksanakan kegiatan persiapan dan pengembangan Prospek Motomboto untuk jangka waktu lima belas (15) bulan sejak tanggal dimulainya proyek tersebut yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Total pembayaran terkait dengan proyek ini dihitung secara *lumpsum* sebesar USD22.752.390.

**49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)**

Pursuant to the Novation Agreement on August 27, 2014, Gallo novated, assigned and transferred its payment obligation to the Company. Furthermore, on August 28, 2014, the Company entered into Acknowledgment of Indebtedness Agreement with Profex to acknowledge the payment obligation and both parties agreed that such payment will be made in advance by issuing new shares. As of the completion date of the consolidated financial statements, shares have not yet been issued and the Project is on going progress for further stages.

kk. Gorontalo Mineral's Projects

1. *On April 28, 2014, GM entered into Agreement of Advance Exploration and Technical Analysis with PT Sumagud Sapta Sinar (SSS). SSS will conduct Advance Drilling works in North Motomboto Prospect as well as in East Motomboto Prospect for a period of two (2) years from the commencement date of such project but may be amended from time to time. The total consideration in relation to this project will be calculated on a lumpsum basis in the amount of USD9,826,521.*

Pursuant to Novation Agreement dated August 27, 2014, GM novated, assigned and transferred its payment obligation under Advance Exploration and Technical Analysis Agreement to BRMS which was subsequently novated, assigned and transferred by BRMS to the Company. Furthermore, on the same date, the Company entered into Acknowledgment of Indebtedness Agreement with SSS to

acknowledge the payment obligation and both parties agreed that such payment will be made in advance by issuing new shares. As of the completion date of the consolidated financial statements, shares have not yet been issued and the Project is on going progress for further stages.

2. *On May 2, 2014, GM entered into Agreement of Feasibility Studies and Infrastructure Development Services with PT Simo Makmur (SM). SM will conduct preparation activities for mining and development works in the Motomboto Prospect for a period of fifteen (15) months from the commencement date of such project but may be amended from time to time. The total consideration in relation to this project will be calculated on a lumpsum basis in the amount of USD22,752,390.*

**49. KOMITMEN DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN
PENTING** *(Lanjutan)*

Berdasarkan Perjanjian Novasi tertanggal 26 Agustus 2014, GM menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Jasa Studi Kelayakan Penambangan dan Pengembangan Infrastruktur kepada BRMS, selanjutnya BRMS menovasikan, mengalihkan dan menyerahkan kepada Perusahaan. Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang dengan SM untuk mengakui kewajiban pembayaran dan kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan dimuka dengan menerbitkan saham baru. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, saham masih belum diterbitkan dan Proyek masih dalam pengerjaan untuk tahap selanjutnya.

**II. Rencana NFC untuk pengembangan
PT Gorontalo Minerals**

Pada tanggal 24 Juni 2014, BRMS telah menerima *Letter of Intent* (LoI) dari NFC berkenaan dengan maksud kerjasama pengembangan tambang tembaga dan emas yang dioperasikan oleh GM di Sulawesi. Belum ada bentuk kerjasama yang rinci dalam LoI tersebut, namun demikian kerjasama akan meliputi antara lain:

- (i) Pendanaan belanja modal;
- (ii) Seleksi kontraktor/pemasok untuk kontrak mekanik dan konstruksi; dan
- (iii) Calon pembeli untuk jumlah volume yang akan diproduksi masa yang akan datang.

50. KONTINJENSI

Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjensi berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnis normal, termasuk pemeriksaan perpajakan, yang kini masih tertunda hasilnya atau sedang dalam proses di pengadilan atau otoritas pajak, dan hasil akhirnya mungkin substansial, tetapi belum dapat ditentukan saat ini. Di samping itu, Kelompok Usaha juga melakukan tuntutan kepada pihak ketiga yang hasilnya belum dapat ditentukan pada saat ini, menunggu putusan pengadilan. Berikut adalah kontinjensi pada tanggal pelaporan:

49. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(Continued)

Pursuant to Novation Agreement dated August 26, 2014, GM novated, assigned and transferred its payment obligation under Feasibility Studies and Infrastructure Development Services Agreement to the Company which was subsequently novated, assigned and transferred by BRMS to the Company. Furthermore, on August 27, 2014, the Company entered into Acknowledgment of Indebtedness Agreement with SM to acknowledge the payment obligation and both parties agreed that such payment will be made in advance by issuing new shares. As of the completion date of the consolidated financial statements, shares have not yet been issued and the Project is on going progress for further stages.

**II. Proposed corporation arrangement by NFC to
develop PT Gorontalo Minerals**

On June 24, 2014, BRMS has received a Letter of Intent (LoI) from NFC related to cooperation of gold and cooper mining development which is operated by GM in Sulawesi. No specific cooperation is stated in the LoI, however the cooperation shall include among others:

- (i) Raising of funds for the respective capital expenditure;*
- (ii) Selection of vendors for engineering, procurement, and construction contracts; and*
- (iii) Identifying the off takers for the final outputs to be produced.*

50. CONTINGENCIES

The Group is contingently liable for various claims from third parties arising from the ordinary conduct of business, including tax assessments, the results of which are either pending or being processed by the courts or tax authorities, and while those outcomes may be substantial, but they are not presently determinable. In addition, the Group has various claims to third parties, the outcomes of which are not presently determinable pending decision by the courts. The following are the contingencies as of the reporting date:

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

a. Penambangan Tanpa Izin dalam Wilayah Pertambangan Arutmin dan Kuasa Pertambangan yang Tumpang Tindih dengan Wilayah Pertambangan Arutmin

Terdapat beberapa kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Arutmin Indonesia (Arutmin), entitas pengendalian bersama, maupun konsesi pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2B Arutmin ("KP Tumpang Tindih"). Keberadaan PETI dan KP Tumpang Tindih ini telah menyebabkan kenaikan dalam biaya produksi karena tiga (3) hal. Pertama, para pelaku PETI dan KP Tumpang Tindih telah melakukan penambangan tanpa memperhatikan kewajiban untuk merehabilitasi wilayah setelah selesai dilakukan penambangan. Kedua, para pelaku PETI dan KP Tumpang Tindih menggali batubara yang lebih mudah diperoleh di permukaan tanah dengan rasio pengupasan yang rendah dan meninggalkan area batubara yang memerlukan biaya yang lebih tinggi. Ketiga, kegiatan PETI dan KP Tumpang Tindih mengharuskan Arutmin untuk mengubah rencana penambangannya untuk area yang terkena dampak dan menimbulkan biaya-biaya tambahan yang berhubungan dengan kerusakan yang disebabkan oleh PETI dan KP Tumpang Tindih, seperti biaya perbaikan jalan dan rehabilitasi.

Pada tahun 2004, Arutmin memperoleh laporan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara di Indonesia, sebuah lembaga penelitian independen yang bergerak dalam industri penambangan batubara, untuk memeriksa perhitungan atas penambahan biaya pertambangan di area PETI. Arutmin telah menyampaikan laporan tersebut kepada Pemerintah Indonesia sebagai bukti adanya penambahan biaya yang diakibatkan oleh PETI.

Karena Arutmin mempunyai hak untuk melakukan penambangan di area yang disebutkan dalam PKP2B, Arutmin berkeyakinan bahwa biaya yang timbul akibat dari adanya PETI seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2004, Arutmin mengajukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengkompensasikan kenaikan biaya tersebut dengan pembayaran batubara yang merupakan hak Pemerintah Indonesia. Permohonan ini ditolak oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui suratnya tanggal 23 Juli 2004.

50. CONTINGENCIES (Continued)

a. Illegal Mining in Arutmin's Mining Concession and the Issuance of Other Mining Concessions that Overlap with That of Arutmin

Activities of illegal mining ("PETI") and activities of other mining concessions that overlap with that of PT Arutmin Indonesia (Arutmin), a jointly controlled entity, ("Overlapping Mining Concessions") are currently occurring in Arutmin's mining concession. PETI and Overlapping Mining Concession have increased the production costs of mining coal in the area in three (3) ways. Firstly, PETI and Overlapping Mining Concessions miners disturb areas without regard to the measures necessary to properly reclaim and rehabilitate the area after mining is completed. Secondly, PETI and Overlapping Mining Concessions miners extract the coal that is most accessible to the land surface with the lowest strip ratio, leaving the area that can be extracted a higher cost. Thirdly, PETI and Overlapping Mining Concessions mining require Arutmin to alter its mine plans for the area affected and incur additional incidental costs related to damage caused by illegal miners, such as road maintenance and rehabilitation costs.

In 2004, Arutmin commissioned a report from the Center of Research and Development of Mineral and Coal Technology in Indonesia, an independent research institute involved in the coal mining industry, to verify its calculation of the incremental cost of mining in illegally mined areas. Arutmin has provided a copy of this report to the Government of Indonesia (GOI) as evidence of the incremental costs it faces due to illegal mining.

Because Arutmin has the right to mine the entire area covered by its Coal Contract of Work (CCoW), it believes that the incremental costs it will face in mining areas illegally mined should be borne by the GOI. On June 30, 2004, Arutmin requested the GOI to compensate Arutmin for the incremental cost from the entitlement payments due to the GOI. This request was rejected in a letter from the Directorate General of Geology and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources dated July 23, 2004.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Sejak itu, Arutmin telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menyelesaikan masalah PETI.

Sehubungan dengan keberadaan KP Tumpang Tindih, Arutmin senantiasa aktif memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai batas-batas wilayah pertambangan Arutmin serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan guna melindungi hak-haknya. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses hukum terhadap beberapa KP Tumpang Tindih masih berlangsung.

b. Kompensasi atas Dana Hasil Produksi Batubara/Royalti dengan PPN Masukan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Kompensasi dengan PPN Masukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 144/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001, batubara yang belum diproses merupakan barang tidak kena pajak (tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sebagai akibat dari peraturan ini muncul ketidakpastian mengenai apakah PPN Masukan yang dibayar Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal (KPC), entitas pengendalian bersama, dalam pembelian bahan baku impor dan lokal, perlengkapan dan barang lainnya yang diperlukan untuk memproduksi batubara dapat dikreditkan dengan pajak lainnya. Sampai dengan tahun 2000, semua PPN Masukan untuk produksi yang diklaim oleh Arutmin dan KPC telah dikembalikan oleh Pemerintah Indonesia. Sejak tanggal 1 Januari 2001, permohonan Arutmin dan KPC untuk memperoleh restitusi PPN Masukan ditolak oleh Otoritas Pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B, kecuali untuk pajak yang secara tegas disebutkan dalam PKP2B, Pemerintah Indonesia telah setuju untuk mengganti semua pajak, cukai, sewa dan royalti Arutmin dan KPC yang dipungut Pemerintah Indonesia, termasuk PPN. Selain itu dalam hal Arutmin dan KPC (atau pihak lain atas namanya) membayar berapapun jumlah angsuran pajak dimana mereka berhak untuk ganti rugi, Pemerintah Indonesia telah setuju untuk membayar kembali pajak tersebut dalam waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan surat penagihan.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Since then, Arutmin has held numerous meetings with representatives of the Ministry of Energy and Mineral Resources and other government agencies to resolve the PETI issue.

With regard to the existence of Overlapping Mining Concessions, Arutmin has always been active in providing clarification to the relevant parties concerning the boundaries of Arutmin's mining concession area and taking necessary legal action to protect its mining area. As of the completion date of the consolidated financial statements, legal actions against several Overlapping Mining Concessions are still ongoing.

b. Offset of Coal Production Proceeds/Royalty with VAT Input and Vehicle Fuel Tax

Offset with VAT Input

Based on Government Regulation No. 144/2000 dated December 22, 2000 effective January 1, 2001, which provides that unprocessed coal is not subject to VAT. As a result of the VAT Regulation, uncertainty has arisen as to whether VAT paid by Arutmin and PT Kaltim Prima Coal (KPC), a jointly controlled entity, in relation to imports and local purchases of materials, supplies and other items necessary to produce coal are creditable against their other taxes. Until year 2000, all VAT Inputs for production inputs claimed by Arutmin and KPC had been refunded by the GOI. Since January 1, 2001, however, Arutmin and KPC's requests for VAT-input refunds have been rejected by the Tax Authorities.

Under the terms of the CCoW, except for taxes expressly imposed under the terms of the agreement, the GOI has agreed to indemnify Arutmin and KPC against all Indonesian taxes, duties, rentals and royalties levied by the GOI, including VAT. Moreover, in the event that Arutmin or KPC (or any other party on their behalf) pays any amount on account of those taxes from which they are entitled to be indemnified, the GOI has agreed to reimburse them for such tax within sixty (60) days after receipt of the invoice.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Arutmin dan KPC telah menyampaikan tagihan kepada Direktorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral untuk semua PPN yang telah berumur lebih dari enam puluh (60) hari. Tagihan tersebut belum diselesaikan oleh pihak Ditjen ESDM. Pada bulan April 2004, Mahkamah Agung, atas permintaan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, suatu asosiasi perusahaan-perusahaan penghasil batubara di Indonesia telah mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tentang PPN adalah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun pendapat tersebut secara hukum tidak mengikat Pemerintah Indonesia, namun Arutmin dan KPC berkeyakinan bahwa pendapat tersebut dapat mendukung tagihan yang telah diajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memperoleh kembali PPN yang telah dibayar.

Arutmin dan KPC berkeyakinan akan dapat memperoleh kembali semua PPN yang tercermin dalam laporan keuangan mereka berdasarkan ketentuan dalam PKP2B dan fatwa dari Mahkamah Agung pada bulan April 2004. Manajemen Arutmin dan KPC berkeyakinan bahwa perusahaan batubara lain di Indonesia yang termasuk dalam PKP2B "generasi pertama" mengikuti prosedur yang serupa. Sementara itu, Arutmin dan KPC telah mengkompensasikan pembayaran PPN Masukan dengan pembayaran batubara yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia (Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)/Royalti). Apabila Pemerintah Indonesia memaksakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang PPN, Arutmin dan KPC harus membayar royalti yang belum dikompensasikan dengan klaim PPN.

Namun, pada tanggal 9 Februari 2006, Arutmin dan KPC bersama dengan perusahaan pertambangan batubara generasi pertama menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang ditujukan kepada semua perusahaan pertambangan batubara generasi pertama tentang peringatan untuk menyerahkan pembayaran DHPB dan pembayaran royalti terutang, yang diyakini Pemerintah Indonesia telah ditahan oleh perusahaan pertambangan batubara generasi pertama. Disebutkan juga perusahaan pertambangan batubara generasi pertama diharuskan untuk membayar royalti dan setelah itu mengajukan pengembalian PPN Masukan yang telah mereka bayar, bukan dengan mengkompensasikan keduanya.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Arutmin and KPC have submitted claims to the Directorate General of Energy and Mineral Resources for all VAT amounts that have been outstanding for more than sixty (60) days. Those claims have not been settled by the Directorate General. In April 2004, the Supreme Court, at the request of the Indonesian Coal Mining Association, a federation of coal producers in Indonesia issued an advisory opinion that the VAT Regulation is invalid under Indonesian law. Although this advisory opinion is not legally binding on the GOI, Arutmin and KPC believe it will provide support to their claims submitted to the GOI to be reimbursed for VAT paid.

Arutmin and KPC expect to recover all VAT amounts reflected in their financial statements based on the provisions of the CCoW and the Supreme Court advisory opinion in April 2004. In addition, Arutmin's and KPC's managements believe that other coal companies in Indonesia that have entered into "first generation" CCoWs are following similar procedures. In the meantime, Arutmin and KPC have offset their VAT payments against the coal entitlement payments to the GOI (Coal Production Proceeds (DHPB)/Royalty). Should the GOI impose the VAT Regulation, Arutmin and KPC should pay the royalty that has not been offset against the VAT payments.

However, on February 9, 2006, Arutmin and KPC, together with the other first generation coal mining companies, received a letter from the General Directorate of Mineral, Coal and Geothermal addressed to all first generation coal mining companies regarding a warning to submit the outstanding Coal Production Proceeds and the outstanding royalty that the GOI believes the first generation coal mining companies have withheld. It also specified that the first generation coal mining companies should first remit the royalty and subsequently apply for a refund on the VAT-in that they have paid instead of offsetting these amounts.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Konsultan hukum Arutmin dan KPC mengeluarkan pendapat hukum masing-masing pada tanggal 23 Mei 2006 yang menyatakan Arutmin dan KPC berhak untuk mengkompensasikan utang DHPB dan utang royalti dengan PPN yang telah dibayar dan bahwa tindakan Pemerintah Indonesia yang menyatakan gagal bayar hanya dapat dilakukan jika telah diselesaikan melalui arbitrase seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 PKP2B Arutmin dan KPC. Selanjutnya semua konsultan hukum dari perusahaan pertambangan batubara generasi pertama mempunyai pendapat hukum yang sama tentang hal tersebut.

Kemudian, pada tanggal 7 September 2006, sebagai tanggapan terhadap surat yang dikirim oleh Arutmin dan KPC kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BKPM menyatakan bahwa menurut Undang-Undang No. 11/1994 tentang PPN atas Penjualan Barang dan Jasa Kena Pajak, Pasal 11 (b), PPN untuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lain yang berdasarkan pada kontrak bagi hasil, akan ditentukan berdasarkan kontrak bagi hasil PKP2B dan perjanjian lainnya sampai dengan tanggal jatuh tempo dari perjanjian.

Selanjutnya, berdasarkan PKP2B No. J2/Ji.Du/45/81 dan J2/Ji Dn/16/82 masing-masing antara Arutmin dan Pemerintah Indonesia serta antara KPC dan Pemerintah Indonesia, Pasal 11.3 menetapkan Pemerintah Indonesia akan membayar dan membebaskan kontraktor dari segala pajak, bea, sewa dan royalti untuk saat ini dan yang akan datang, dengan pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 11.2. Oleh karena itu, pembebanan PPN kepada Arutmin dan KPC adalah tidak konsisten dengan UU No. 11/1994 dan PKP2B, sehingga pembayaran PPN dapat diganti atau dikompensasikan dengan DHPB terutang terhadap Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudit pembayaran KPC dan Arutmin atas DHPB untuk tahun 2001-2007. Pada tanggal 1 Desember 2008, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) dari BPKP mengeluarkan kesimpulan hasil audit sebagai berikut:

1. Kurang bayar atas DHPB dari Arutmin dan KPC dari tanggal 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2007 masing-masing sebesar USD113.826.488 dan USD238.023.726, di luar denda atas keterlambatan pembayaran;

50. CONTINGENCIES (Continued)

Arutmin's and KPC's legal consultants each issued legal opinions dated May 23, 2006, stating that Arutmin and KPC have the legal right to offset VAT payment against DHPB payables and royalty payable and that action by the GOI in respect of a default can only be taken after the dispute has been settled by arbitration, as stated in Article 23 of Arutmin's and KPC's CCoWs. Furthermore, all the legal consultants to the first generation coal producing companies shared that opinion.

Subsequently, on September 7, 2006, in response to the letter sent by Arutmin and KPC to the Investing Coordinating Board ("BKPM"), BKPM stated that based on Law No. 11/1994, "VAT on Sale of Taxable Goods and Services", Article 11 (b), VAT for mining of oil and gas business, general mining and other mining based on profit-sharing contracts, shall be determined based on the profit-sharing contract CCoW and other outstanding agreements until the due dates of the agreements.

Furthermore, based on CCoW Nos. J2/Ji.Du/45/81 and J2/Ji Dn/16/82 between Arutmin and the GOI, and between KPC and the GOI, respectively, Article 11.3 stipulated that the GOI will pay and free the contractors from all taxes, duties, rent and royalties at present and in the future, except those taxes stipulated in Article 11.2. Therefore, charges of VAT to Arutmin and KPC are inconsistent with Law No. 11/1994 and the CCoW, thus payment of VAT can be reimbursed or offset against royalty payables to GOI (Coal Production Proceeds).

As requested by the GOI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) audited KPC's and Arutmin's payments of Coal Production Proceeds for the years 2001-2007. On December 1, 2008, Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) from BPKP issued the audit results as follows:

1. *Underpayment of Coal Production Proceeds from Arutmin and KPC from January 1, 2001 to December 31, 2007 amounting to USD113,826,488 and USD238,023,726, respectively, excluding penalties for late payment;*

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

2. Kurang bayar atas Pajak Penjualan dari Arutmin dan KPC dari tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp408.374.038.322 dan Rp384.052.996.631 di luar denda; dan
3. Penundaan atas pengajuan dari pengembalian PPN kepada Arutmin dan KPC untuk periode tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp1.107.395.463.003 dan Rp2.189.194.014.590.

Pada tanggal 5 Desember 2008, Arutmin dan KPC mengirimkan surat keberatan dimana kedua entitas pengendalian bersama tidak setuju dengan hasil audit dari BPKP.

Tim OPN melakukan pemeriksaan terhadap Arutmin untuk tahun 2008 seperti yang tertera dalam suratnya tertanggal 22 Juli 2009. Pada tanggal 15 Januari 2010, Tim OPN mengeluarkan kesimpulan audit kepada Arutmin yang menyatakan bahwa kurang bayar atas DHPB untuk tahun 2008 sebesar USD8.355.752 berasal dari beberapa biaya gabungan yang merupakan pengurangan yang tidak diperkenankan yang dikurangkan oleh Arutmin dari bagian yang merupakan hak Pemerintah Indonesia dan koreksi atas perhitungan biaya administrasi. Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada Tim OPN pada tanggal 20 Januari 2010, yang menyatakan ketidaksetujuan atas temuan audit tersebut kecuali koreksi atas perhitungan biaya administrasi sebesar USD196.799.

50. CONTINGENCIES (Continued)

2. Underpayment of Sales Tax from Arutmin and KPC from January 1, 2001 to December 31, 2007 amounting to Rp408,374,038,322, and Rp384,052,996,631, respectively, excluding penalties; and
3. Pending submission for reimbursement of VAT from Arutmin and KPC for the period of January 1, 2001 to December 31, 2007 amounting to Rp1,107,395,463,003 and Rp2,189,194,014,590, respectively.

On December 5, 2008, Arutmin and KPC submitted their objection/response letters wherein both jointly controlled entities disagreed with the audit result of BPKP.

Tim OPN performed another assessment on Arutmin for the year 2008 as stated in its letter dated July 22, 2009. On January 15, 2010, Tim OPN issued the audit result stating an underpayment of Coal Production Proceeds in 2008 amounting to USD8,355,752 arising from disallowance of some joint costs deducted by Arutmin from the GOI entitlement and correction on the calculation of administration cost. Arutmin sent a response letter to Tim OPN on January 20, 2010, disagreeing with the audit result except for the correction on the calculation of administration cost amounting to USD196,799.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan terhadap Arutmin untuk tahun 2008 sampai dengan triwulan kedua tahun 2010. Pada tanggal 16 Desember 2010, BPK mengeluarkan temuan audit untuk tahun 2009 yang menyatakan kurang bayar atas DHPB termasuk denda atas keterlambatan pembayaran dari beberapa biaya gabungan yang merupakan pengurangan yang tidak diperkenankan yang dikurangkan oleh Arutmin dari bagian yang merupakan hak Pemerintah Indonesia dan koreksi atas perhitungan biaya administrasi sejumlah USD3.257.183. Pada tanggal 27 Desember 2010, Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada BPK yang menerima temuan audit untuk tahun 2009, kecuali beberapa biaya gabungan yang dikurangkan Arutmin dari bagian yang merupakan hak Pemerintah Indonesia sejumlah USD2.486.819. Kemudian, pada tanggal 7 Februari 2011, Arutmin menerima surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Mineral, Geologi, Batubara dan Panas Bumi yang mengklaim bahwa Arutmin harus membayar atas kekurangan pembayaran DHPB sejumlah USD1.012.233. Arutmin menerima klaim tersebut dan membayar kekurangan pembayaran tersebut pada tanggal 21 Februari 2011.

Tim OPN melakukan pemeriksaan terhadap KPC untuk tahun 2008 pada tanggal 15 Januari 2010, dimana biaya administrasi sejumlah USD8.459.687 yang dikurangkan oleh KPC dari bagian yang merupakan hak Pemerintah Indonesia merupakan pengurangan yang tidak diperkenankan. Pada tanggal 21 Januari 2010, KPC mengirimkan surat tanggapan kepada Tim OPN, atas ketidaksetujuan dengan "Notisi Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBPN tahun 2008" kecuali atas koreksi biaya pengiriman dan bongkar muat sejumlah USD534.122, termasuk denda, yang telah dicatat KPC sebagai liabilitas. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang menunggu tanggapan dari Tim OPN.

Kemudian, BPK juga melakukan pemeriksaan lainnya terhadap KPC untuk tahun 2009 yang dinyatakan dalam surat tanggal 14 Januari 2011, dimana sebagian biaya administrasi sejumlah USD3.641.635 yang dikurangkan oleh KPC dari bagian yang merupakan hak Pemerintah Indonesia merupakan pengurangan yang tidak diperkenankan. Pada tanggal 18 Januari 2011, KPC mengirimkan surat tanggapan kepada BPK yang menyetujui temuan audit tahun 2009, kecuali koreksi atas komisi agen lokal sejumlah USD386.148 yang juga masih menjadi perdebatan untuk tahun 2008. Jumlah yang telah disetujui KPC sebesar USD3,6 juta telah dibayar pada tahun 2011.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Subsequently, on October 18, 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) also performed another examination on Arutmin for the year 2008 until the second quarter of 2010. On December 16, 2010, BPK issued the audit findings for 2009 stating an underpayment of Coal Production Proceeds including penalties for late payment arising from disallowance of some joint costs deducted by Arutmin from the Government entitlement and correction on the calculation of administration cost amounting to USD3,257,183. On December 27, 2010, Arutmin sent a response letter to BPK accepting the audit findings for the year 2009, except for the disallowance of some joint costs deducted by Arutmin from the Government entitlement amounting to USD2,486,819. Then, on February 7, 2011, Arutmin received a response letter from the Directorate General of Mineral, Geology, Coal and Geothermal claiming an underpayment of Coal Production Proceeds of USD1,012,233 only. Arutmin accepted the claim and paid the underpayment on February 21, 2011.

Tim OPN performed another assessment on KPC for the year 2008 dated January 15, 2010, wherein some administrative costs amounting to USD8,459,687 deducted by KPC from the Government entitlement were not allowable deductions. On January 21, 2010, KPC sent a response letter to Tim OPN, which disagreed with "Notisi Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBPN tahun 2008" except for the correction on dispatch and demurrage expense amounting to USD534,122, including penalties, that KPC recognized under liabilities. As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC was still awaiting for the response of Tim OPN.

Subsequently, BPK also performed another assessment for the year 2009 as stated in the letter dated January 14, 2011, wherein certain administrative costs amounting to USD3,641,635 deducted by KPC from the Government entitlement were not allowable deductions. On January 18, 2011, KPC sent a response letter to BPK accepting the audit findings for the year 2009, except for the correction on local agent commission amounting to USD386,148 that is also still in dispute for the year 2008. The amount of USD3.6 million accepted by KPC has been paid in 2011.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Tim OPN telah melakukan pemeriksaan terhadap Arutmin untuk tahun 2012 dan 2011 sebagaimana tercantum dalam suratnya tanggal 19 April 2013. Pada tanggal 24 Maret 2014, Tim OPN mengeluarkan hasil audit yang menyatakan kurang bayar atas DHPB ditambah denda administrasi untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD122.491.499 dan USD118.143.352, yang terdiri dari:

1. Kurang bayar DHPB ditambah denda administrasi yang disebabkan oleh kompensasi PPN Masukan terhadap DHPB untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD110.827.968 dan USD108.797.643.
2. Kurang bayar DHPB ditambah denda administrasi yang timbul atas pengurangan yang tidak diperkenankan atas beberapa biaya gabungan dari hak Pemerintah Indonesia untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD3.617.706 dan USD4.307.676.
3. Denda administrasi atas keterlambatan pembayaran DHPB untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD8.045.825 dan USD5.038.033.

Pada tanggal 28 April 2014, Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada Tim OPN atas ketidaksetujuannya dengan hasil audit kecuali untuk denda atas keterlambatan pembayaran DHPB untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar USD4.022.913 dan USD2.519.017. Denda tersebut telah dicadangkan dan dicatat dalam "Beban masih harus dibayar" pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu jawaban dari Tim OPN.

Sebagaimana yang telah diminta oleh Pemerintah Indonesia, BPKP melakukan audit di KPC atas pembayaran DHPB untuk tahun 2011 dan 2012. Pada tanggal 7 April 2014, BPKP mengeluarkan hasil audit yang menyatakan kurang bayar DHPB ditambah dengan denda administrasi untuk tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar USD258.937.861 dan USD96.186.335.

Pada tanggal 5 Mei 2014, KPC mengirimkan surat tanggapan kepada BPKP, yang menyatakan ketidaksetujuan atas hasil audit. Akan tetapi, pihak manajemen setuju atas beberapa hasil audit, termasuk denda keterlambatan pembayaran, dan telah mencadangkan sebesar USD4,8 juta pada bulan Maret 2014. Denda tersebut dicadangkan dan dicatat dalam "Beban masih harus dibayar" pada tanggal 31 Desember 2014.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Tim OPN has performed assessment to Arutmin for the years 2012 and 2011 as stated in its letter dated April 19, 2013. On March 24, 2014, Tim OPN issued the audit results stating an underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fines for the years 2012 and 2011 amounting to USD122,491,499 and USD118,143,352, respectively, which consist of:

1. *Underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fine caused by offsetting VAT-in against Coal Production Proceeds for the years 2012 and 2011 amounting to USD110,827,968 and USD108,797,643, respectively.*
2. *Underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fine caused by the disallowance of some joint cost deducted from the Government entitlement for the years 2012 and 2011 amounting to USD3,617,706 and USD4,307,676, respectively.*
3. *Administration fine for late payment of Coal Production Proceeds for the years 2012 and 2011 amounting to USD8,045,825 and USD5,038,033, respectively.*

On April 28, 2014, Arutmin sent a response letter to Tim OPN, disagreeing with the audit result except for the penalty for late payment of Coal Production Proceeds for the years 2012 and 2011 amounting to USD4,022,913 and USD2,519,017, respectively. These penalties were accrued and included under "Accrued expenses" as of December 31, 2014 and 2013, respectively. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting response from Tim OPN.

As requested by the GOI, BPKP audited KPC's payments of Coal Production Proceeds for the years 2011 and 2012. On April 7, 2014, BPKP issued the audit results stating an underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fines for years 2011 to 2012 amounting to USD258,937,861 and USD96,186,335, respectively.

On May 5, 2014, KPC sent a response letter to BPKP, disagreeing with the audit result. However, the management agreed with some of the findings, including some of penalty for late payment, and has accrued USD4.8 million in March 2014. These penalties were accrued and included under "Accrued expenses" as of December 31, 2014.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) mengeluarkan pemberitahuan pertama kurang bayar DHPB KPC untuk tahun 2011 sampai 2012 sehubungan dengan pertemuan pada tanggal 10 Juli 2014, dengan hasil sebagai berikut:

1. Kurang bayar DHPB untuk tahun 2011 sampai 2012 sebesar USD345.859.257;
2. Kurang bayar yang disebabkan oleh pengurangan yang tidak diperkenankan atas beberapa biaya gabungan dari hak Pemerintah untuk tahun 2011 sampai 2012 sebesar USD4.140.498; dan
3. Denda administrasi untuk keterlambatan pembayaran untuk tahun 2012 sebesar USD5.160.441.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, Arutmin menerima surat pemberitahuan dari DJMB terkait dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tim OPN untuk tahun 2012 dan 2011. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2014, Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada DJMB dengan ketidaksepakatan yang sama sebagaimana tercantum dalam surat jawaban yang dikirim ke Tim OPN. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu tanggapan dari DJMB.

Tim BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Arutmin untuk tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 18 Juli 2014. Pada tanggal 3 November 2014, Tim BPK mengeluarkan hasil audit yang menyatakan kurang bayar DHPB ditambah denda administrasi untuk tahun 2013 masing-masing sebesar USD47.183.666 dan USD11.751.801.

Pada tanggal 11 September 2014, Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada Tim BPK, atas ketidaksetujuannya dengan hasil audit kecuali untuk kurang bayar DHPB ditambah denda administrasi masing-masing sebesar USD1.689.563 dan USD10.632.487, yang telah dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tahun 2014, Arutmin telah membayar Utang Royalti kepada Pemerintah Indonesia untuk tahun 2013 sebesar USD40.802.067. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu tanggapan dari Tim BPK.

50. CONTINGENCIES (Continued)

On August 19, 2014, the Directorate General of Mineral and Coal (DJMB) issued the first notice of underpayment of KPC's Coal Production Proceeds for the years 2011 to 2012 in relation with the meeting held on July 10, 2014, with results as follows:

1. *Underpayment of Coal Production Proceeds for the periods from 2011 to 2012 amounting to USD345,859,257;*
2. *Underpayment caused by the disallowance of some joint costs deducted from the Government entitlement for the periods from 2011 to 2012 amounting to USD4,140,498; and*
3. *Administration fine for late payment for the year 2012 amounting to USD5,160,441.*

Also, on August 19, 2014, Arutmin received a notification letter from the DJMB following the audit result issued by Tim OPN for the years 2012 and 2011. Subsequently, on December 29, 2014, Arutmin sent a response letter to the DJMB with the same disagreement as stated in the response letter sent to Tim OPN. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting a response from DJMB.

Tim BPK has performed assessment on Arutmin for the year 2013 as stated in its letter dated July 18, 2014. On November 3, 2014, Tim BPK issued the audit results stating an underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fines for the year 2013 amounting USD47,183,666 and USD11,751,801, respectively.

On September 11, 2014, Arutmin sent its response letter to Tim BPK, disagreeing with the audit result except for the underpayment of Coal Production Proceeds plus administration fines amounting to USD1,689,563 and USD10,632,487, respectively, which were accrued as of December 31, 2014. In 2014, Arutmin has paid Due to GOI/Royalty for the year 2013 amounting to USD40,802,067. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting response from Tim BPK.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Arutmin menerima surat pemberitahuan dari DJMB terkait dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh Tim BPK. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2014, Arutmin mengirimkan surat tanggapan kepada DJMB dengan ketidaksepakatan yang sama seperti yang dinyatakan dalam surat jawaban yang dikirim ke Tim BPK. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu tanggapan dari DJMB.

Direktorat Jendral Pajak Indonesia, bersama dengan perusahaan batubara yang termasuk dalam PKP2B "generasi pertama", dalam pertemuan pada tanggal 22 Juli 2014, menghasilkan penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia dan perusahaan batubara yang termasuk dalam PKP2B "generasi pertama" dimana Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan metode penyelesaian Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia, PPN, Pajak Penjualan (PPn) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara.

Mengenai Pajak Penjualan, pada tanggal 24 September 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat lain sehubungan dengan surat tanggal 5 September 2014, meminta KPC dan Arutmin membayar Kurang Bayar Pajak Penjualan (PPn) untuk periode dari tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp239.725.977.788 untuk KPC dan Rp88.201.373.260 untuk Arutmin.

Arutmin mengajukan surat tanggapannya pada tanggal 10 Oktober 2014, dimana Arutmin mencari klarifikasi atas dasar hukum pengenaan Pajak Penjualan untuk periode dari tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. Sementara itu KPC mengajukan surat keberatan/surat tanggapan pada tanggal 30 September 2014, dimana KPC tidak setuju dengan validitas Pajak Penjualan untuk periode dari tanggal 1 Januari 2001 sampai tanggal 31 Desember 2007.

Pada tanggal 22 Desember 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengirim notulen rapat yang diadakan pada tanggal 15 dan 17 Desember 2014 sehubungan dengan penyelesaian Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia, PPN, Pajak Penjualan dan biaya administrasi pengurusan piutang negara. Hal-hal yang signifikan dalam notulen rapat adalah sebagai berikut:

50. CONTINGENCIES (Continued)

On October 24, 2014, Arutmin received a notification letter from the DJMB following the audit result issued by Tim BPK. Subsequently, on December 29, 2014, Arutmin sent a response letter to the DJMB with the same disagreement as stated in the response letter sent to Tim BPK. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting a response from the DJMB.

The Indonesian Directorate General of Tax, together with the first generation CCoW holders, from the minutes of meeting dated July 22, 2014, delivered the settlement of rights and obligations of the Government and the first generation CCoW holders, wherein the Directorate General of Tax described the settlement methods for Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds), VAT, Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] and administration fees of state receivables.

Regarding the Sales Tax, on September 24, 2014, the Directorate General of Tax issued another letter in connection with its letter dated September 5, 2014, requesting KPC and Arutmin the payment for Underpayment of sales tax [Pajak Penjualan (PPn)] for the period from January 1, 2001 to December 31, 2007 amounting to Rp239,725,977,788 for KPC and Rp88,201,373,260 for Arutmin, respectively.

Arutmin submitted its response letter on October 10, 2014, wherein Arutmin sought clarification on the legal basis of the imposition of Sales Tax for the period from January 1, 2001 to December 31, 2007. Meanwhile, KPC submitted its objection/response letter on September 30, 2014, wherein it disagreed with the validity of the Sales Tax for the period from January 1, 2001 to December 31, 2007.

On December 22, 2014, the Directorate General of Tax sent the minutes of meetings held on December 15 and 17, 2014 in connection with the settlement of Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds), VAT, Sales Tax and administration fees of state receivables. Significant items on the minutes were as follows:

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

1. Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia dan tagihan *reimbursement* PPN disaling hapus. Jika Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah melebihi tagihan *reimbursement*, PPN maka Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah harus dibayar dengan denda.
2. Sehubungan dengan mata uang yang akan digunakan untuk saling hapus, jika penagihan dilakukan dalam USD, saling hapus juga dilakukan dalam USD dan sebaliknya.
3. Kekurangan Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan sampai dengan maksimum sebesar 48%, sedangkan kekurangan kewajiban Pemerintah atas tagihan *reimbursement* PPN dikenakan bunga sebesar 6% per tahun sampai dengan maksimum sebesar 48%.
4. Pajak Penjualan (PPn) tidak dikenakan denda karena bersifat *official assessment*.
5. Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%.

Berdasarkan notulen rapat, Kementerian Keuangan telah meminta BPKP untuk perhitungan hak dan kewajiban Pemerintah dan pemegang PKP2B generasi pertama berdasarkan hasil diskusi di atas. Berikut ini adalah ringkasan dari perhitungan yang dibuat untuk periode 2001-2007:

1. Kurang bayar DHPB untuk periode 2001-2005 dan 2007 sebesar USD4.969.348 ditambah denda sebesar USD2.385.287 untuk Arutmin;
2. Kurang bayar DHPB untuk periode 2003- 2005 and 2007 sebesar USD3.762.412 ditambah denda sebesar USD1.805.958 untuk KPC;
3. Lebih bayar PPN untuk periode 2006 sebesar USD4.150.049 ditambah bunga sebesar USD1.992.023 untuk Arutmin;
4. Lebih bayar PPN untuk periode 2001-2002 dan 2006 sebesar USD1.255.315 ditambah bunga sebesar USD602.551 untuk KPC;
5. Pajak Penjualan (PPn) sebesar Rp7.090.118 untuk Arutmin dan Rp239.725.977.788 untuk KPC;
6. Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar USD483.704 untuk Arutmin dan USD2.624.117 untuk KPC; dan
7. Pendapatan bunga dari uang jaminan royalti sebesar USD1.005.668 untuk Arutmin dan USD1.500.000 untuk KPC.

Dalam hal ada perbedaan kurs yang digunakan, hasil diskusi di atas akan dilakukan rekonsiliasi lebih lanjut dengan BPKP, menunggu hasil dari periode 2008-2012 yang saat ini masih berlangsung.

50. CONTINGENCIES (Continued)

1. Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) and VAT reimbursement are set-off. If Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) is higher than VAT reimbursement, then Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) must be paid with penalties.
2. In relation to the currency to be used for set-off, if the billing is done in USD, the set-off is also done in USD and vice-versa.
3. Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) deficiency will be subject to penalty at the rate of 2% per month up to 48% maximum, while deficiency of GOI's obligation over VAT reimbursement will be subject to interest of 6% per annum up to 48% maximum.
4. Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] is not subject to penalty as it is an official assessment.
5. Administration fees of state receivables are subject to 10%.

Based on the minutes of meeting, the Ministry of Finance has requested BPKP for the recalculation of the rights and obligations of the Government and the first generation CCoW holders based on the above results of discussion. The following is the summary of the recalculation made for the periods 2001-2007:

1. Underpayment of Coal Production Proceeds for the periods 2001-2005 and 2007 amounting to USD4,969,348 plus penalty of USD2.385.287 for Arutmin;
2. Underpayment of Coal Production Proceeds for the periods 2003-2005 and 2007 amounting to USD3,762,412 plus penalty of USD1.805.958 for KPC;
3. Overpayment of VAT for the period 2006 amounting to USD4,150,049 plus interest of USD1,992,023 for Arutmin;
4. Overpayment of VAT for the periods 2001-2002 and 2006 amounting to USD1,255,315 plus interest of USD602,551 for KPC;
5. Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] amounting to Rp7,090,118 for Arutmin and Rp239,725,977,788 for KPC;
6. Administration fees of state receivables amounting to USD483,704 for Arutmin and USD2,624,117 for KPC; and
7. Interest income from royalty deposit amounting to USD1,005,668 for Arutmin and USD1,500,000 for KPC.

In the event of differences in exchange rates used, the above results of discussion may be further reconciled with BPKP awaiting the results of the periods 2008-2012 that are still ongoing.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2014, Pemerintah menandatangani Perjanjian Penyelesaian masing-masing dengan Arutmin dan KPC sehubungan dengan hal tersebut di atas. Selain itu, Arutmin dan KPC menyatakan bahwa Arutmin dan KPC tidak dikenakan Pajak Penjualan (PPn) untuk periode 2001-2007. Namun, Arutmin dan KPC tidak keberatan jika uang jaminan royalti dan akumulasi bunganya digunakan oleh Pemerintah untuk mendanai penyelesaian Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia, tagihan *reimbursement* PPN, Pajak Penjualan (PPn) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk tahun 2001-2007. Dalam kasus Arutmin, hak dan kewajiban Pemerintah untuk tahun 2001-2007 di atas berdasarkan perhitungan dari BPKP telah diselesaikan semua melalui uang jaminan royalti milik Arutmin dan akumulasi bunganya.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Arutmin dan KPC mengakui berikut ini dalam kaitannya untuk periode 2001-2014:

Arutmin:

1. Kurang bayar DHPB untuk periode 2001-2005, 2007-2008 dan 2012-2013 sebesar USD6.470.174, ditambah denda sebesar USD3.009.903;
2. Lebih bayar PPN untuk periode 2006, 2009-2011 dan 2014 sebesar USD6.136.583, ditambah bunga USD2.556.532;
3. Pajak Penjualan (PPn) sebesar USD25.711.813 untuk periode 2001-2012;
4. Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar USD483.704; dan
5. Pendapatan bunga dari uang jaminan royalti sebesar USD1.005.668.

KPC:

1. Kurang bayar DHPB untuk periode 2003, 2004, 2007, 2008 dan 2011-2014 sebesar USD14.918.257, ditambah denda sebesar USD6.932.213;
2. Lebih bayar PPN untuk periode 2001-2002, 2005-2006 dan 2009-2010 sebesar USD10.563.798, ditambah bunga sebesar USD2.624.117; dan
3. Pajak Penjualan (PPn) sebesar USD58.291.753 untuk periode 2001-2012.

Denda dan bunga diakui secara neto pada akun "Beban Bunga" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014 dan akun "Beban masih harus dibayar" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2014. Koreksi Pajak Penjualan disajikan dalam "Utang Pajak" dalam laporan posisi keuangan tahun 2014 setelah dikurangi uang jaminan royalti. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin dan KPC sedang menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Pajak.

50. CONTINGENCIES (Continued)

On December 29, 2014, the Government signed a Settlement Agreement each with Arutmin and KPC in relation to the foregoing matters. In addition, Arutmin and KPC stated that they are not subject to Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] for the periods from 2001-2007. However, Arutmin and KPC have no objection if the royalty deposit and its accumulated interest are used by the Government to fund the completion of this settlement of Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds), VAT reimbursement, Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] and administration fees of state receivables for the years 2001-2007. In the case of Arutmin, above rights and obligation of the Government from 2001-2007 based on the calculation from BPKP were all settled through the Arutmin's royalty deposit and its accumulated interest.

As of December 31, 2014, Arutmin and KPC recognized the following in relation to the foregoing for the periods 2001-2014:

Arutmin:

1. Underpayment of Coal Production Proceeds for the periods 2001-2005, 2007-2008 and 2012-2013 amounting to USD6,470,174, plus penalty of USD3,009,903;
2. Overpayment of VAT for the periods 2006, 2009-2011 and 2014 amounting to USD6,136,583, plus interest of USD2,556,532;
3. Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] amounting to USD25,711,813 for the periods 2001-2012;
4. Administration fees of state receivables amounting to USD483,704; and
5. Interest income from royalty deposit amounting to USD1,005,668.

KPC:

1. Underpayment of Coal Production Proceeds for the periods 2003, 2004, 2007, 2008 and 2011-2014 amounting to USD14,918,257, plus penalty of USD6,932,213;
2. Overpayment of VAT for the periods 2001-2002, 2005-2006 and 2009-2010 amounting to USD10,563,798, plus interest of USD2,624,117; and
3. Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] amounting to USD58,291,753 for the periods 2001-2012.

The penalty and the interest are recognized net under "Interest expense" in the 2014 consolidated statement of comprehensive income and under "Accrued expenses" in the 2014 consolidated statement of financial position. The Sales Tax corrections were presented under "Taxes payable" in the 2014 consolidated statement of financial position net of the utilization of the royalty deposit. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin and KPC are awaiting further discussions with the Directorate General of Tax.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014, KPC menerima Surat Pemberitahuan dari Panitia Urusan Piutang Negara bahwa Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia dan tagihan *reimbursement* PPN untuk periode 2001-2005 telah dibayar melalui saling hapus sebesar USD115.628.533. Selain itu, piutang negara ditetapkan sebesar USD2.362.953 ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar USD236.295. Akibatnya, KPC melakukan saling hapus Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia dan tagihan *reimbursement* PPN pada tanggal 31 Desember 2014. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang menunggu hasil rekonsiliasi dengan BPKP dan sedang menunggu hasil untuk periode 2008-2012 yang saat ini masih berlangsung.

Kompensasi dengan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pada tahun 2013, Arutmin dan KPC telah mengkompensasi tagihan atas PBBKB dengan pembayaran Royalti yang terutang kepada Pemerintah Indonesia (Catatan 43). Manajemen berkeyakinan bahwa PBBKB merupakan pajak daerah dan oleh karena itu, merupakan kelebihan pembayaran pajak, serta didukung oleh konsultan hukum Arutmin dan KPC melalui pendapat hukumnya tanggal 28 Juni 2013, menyatakan bahwa Arutmin dan KPC membayar semua pajak daerah yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada semua pajak ditetapkan di Kontrak untuk Pasokan Bahan Bakar Solar. Arutmin dan KPC telah mengajukan surat permohonan pengembalian pajak kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kaitannya dengan kelebihan pembayaran pajak daerah. Bahwa baik Royalti maupun kewajiban pengembalian pajak, diatur dalam Pasal 11 PKP2B Arutmin dan KPC sehingga Arutmin dan KPC dapat melakukan kompensasi pembayaran Royalti kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan kewajiban pengembalian pajak oleh Pemerintah Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 1425, Pasal 1426 dan Pasal 1427 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan No. 194/PMK.03/2012, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013, pada bagian pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan PKP2B generasi pertama yang telah ditandatangani sebelum tanggal 1 April 1985, kontraktor diwajibkan membayar pajak-pajak yang disebutkan dalam perjanjian, antara lain, Pajak Penjualan sesuai dengan Undan-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

50. CONTINGENCIES (Continued)

On December 30 and 31, 2014, KPC received Notification Letters from the Panitia Urusan Piutang Negara that the Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) and reimbursement VAT for the periods of 2001-2005 have been paid through set-off, which amounted to USD115,628,533. In addition, the state receivables were USD2,362,953 plus administration fees on state receivables amounting to USD236,295. As a result, KPC set-off its Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) and VAT reimbursement as of December 31, 2014. As of the completion date of the financial statements, KPC is awaiting the reconciliation with BPKP and pending the results of the period 2008-2012 that is still ongoing.

Offset with Vehicle Fuel Tax (Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB))

In 2013, Arutmin and KPC have offset the claim for PBBKB against Royalty payments due to GOI (Note 43). Management believes that PBBKB is a regional tax and therefore represents a tax overpayment and supported by Arutmin and KPC's legal consultant through its legal opinion dated June 28, 2013, stating that Arutmin and KPC paid all relevant regional taxes, including but not limited to all the taxes stipulated in the Diesel Fuel Sale and Purchases Agreement. Arutmin and KPC have submitted the application letter for tax reimbursement to the Ministry of Energy and Mineral Resources in relation to the overpayments of the regional taxes. Both of the Royalty and tax reimbursement obligations were stipulated under Article 11 of Arutmin and KPC's CCoW and therefore, Arutmin and KPC may perform set off to the Royalty payment for Indonesia Government in relation to the tax reimbursement obligation of the Indonesian Government in accordance with the Article of 1425, Article 1426 and Article 1427 of Indonesia Civil Code.

Futhermore, the Regulation No. 194/PMK.03/2012, which is effective January 1, 2013, at its recitals mentioned that based on the first generation CCoW that had been signed prior to April 1, 1985, the contractors are required to pay taxes as stated in the agreement, among others, the Sales Tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations in Indonesia.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- c. Pada tanggal 9 Mei 2008, KPC menerima Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) terkait pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2007. Pada tanggal 5 Maret 2009, KPC menerima SPP lain mengenai penyelidikan bukti awal untuk indikasi pidana atas kewajiban pajak untuk tahun pajak 2007, tanpa penghentian pemeriksaan sebelumnya yang sedang berlangsung, sehingga KPC memiliki dua (2) pemeriksaan pajak pada saat yang bersamaan dan untuk tahun pajak yang sama. Berdasarkan pertimbangan itu, KPC mengirimkan permintaan untuk menolak SPP terkait dengan penyelidikan bukti awal untuk indikasi pidana atas kewajiban pajak untuk tahun pajak 2007 kepada Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 8 Desember 2009, KPC menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menyetujui keberatan KPC dan membatalkan SPP tanggal 5 Maret 2009. Pada tanggal 24 Mei 2010, KPC menerima Surat Keputusan dari Mahkamah Agung yang mendukung Surat Keputusan Pengadilan Pajak yang menyetujui keberatan KPC. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC belum menerima perkembangan lebih lanjut dari kasus ini.

- d. Pada tanggal 7 Maret 2007, KPC, sebagai Penggugat, mengajukan perkara gugatan terhadap Kelompok Tani Masyarakat Bengalon, sebagai Tergugat, atas kerusakan terkait dengan penutupan jalan menuju pelabuhan pengangkutan batubara di Bengalon. KPC berhasil di Pengadilan Negeri Sangatta. Pada tanggal 8 Mei 2007, Kelompok Tani Masyarakat Bengalon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Pada tanggal 1 Juli 2011, Pengadilan Tinggi memutuskan mendukung KPC. Pada tanggal 4 Maret 2014, berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, status kasus tersebut adalah final.
- e. Pada tahun 2004, tuntutan ganti rugi sebesar Rp21,7 miliar diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta oleh kelompok petani setempat, Kelompok Tani Bersatu (KTB), terhadap KPC yang mengklaim kepemilikan tanah seluas 3.000.000 meter persegi di area tambang Pit-J milik KPC. Pada tahun 2005, Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan denda di mana KPC harus membayar sebesar Rp21,0 miliar kepada KTB, dan KPC telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 21 Maret 2006, KPC berhasil di Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 23 Januari 2007, KTB mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Memori Kasasi diajukan pada tanggal 5 Februari 2007 dan pada tanggal 25 Juli 2007, Kontra Memori Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Juni 2009, Mahkamah Agung memutuskan mendukung KPC. Pada tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sangatta status kasus tersebut adalah final.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- c. On May 9, 2008, KPC received a Tax Audit Instruction Letter ("Surat Perintah Pemeriksaan"/ SPP) concerning tax audit for fiscal year 2007. On March 5, 2009, KPC received another SPP concerning the preliminary evidence investigation for criminal indication on tax obligation for tax year 2007, without terminating the previous investigation that was already underway; thus KPC had two (2) tax audits at the same time and for the same taxable year. Based on that consideration, KPC sent a request to object to SPP related to the preliminary evidence investigation for criminal indication on tax obligation for taxable year 2007 to the Tax Court.

On December 8, 2009, KPC received a Decision Letter from the Tax Court that approved KPC's objection and cancelled the SPP dated March 5, 2009. On May 24, 2010, KPC received the Decision Letter from the Supreme Court supporting the Decision Letter of the Tax Court, which approved KPC's objection. As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC has not received further notice in regard to the status of this case.

- d. On March 7, 2007, KPC, as the Plaintiff, filed a case against the Farmers Group of Bengalon People, as the Defendant, for damages resulting from blocking the road heading to the coal loading harbor at Bengalon. KPC was successful in the District Court of Sangatta. On May 8, 2007, the Farmers Group of Bengalon People lodged an appeal to the High Court of East Kalimantan in Samarinda. On July 1, 2011, the High Court ruled in favor of KPC. On March 4, 2014, based on the letter from the Registrar of Sangatta District Court the case status is final.
- e. During 2004, a claim for Rp21.7 billion was lodged in the District Court of Sangatta by the group of local farmers, Kelompok Tani Bersatu (KTB), against KPC claiming 3,000,000 square meters of KPC's Pit-J area. In 2005, the Sangatta District Court granted an award stating that KPC shall pay Rp21.0 billion to KTB, which KPC made an appeal to the High Court. On March 21, 2006, KPC was successful in the High Court. On January 23, 2007, KTB filed a cassation to the Supreme Court, the Memorandum of Cassation being filed on February 5, 2007 and, on July 25, 2007, a Contra-Memorandum of Cassation was filed. On June 26, 2009, the Supreme Court ruled in favor of KPC. On March 4, 2014, based on the letter from the Registrar of Sangatta District Court the case status is final.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- f. Pada tahun 2011, PT Thiess Contractors Indonesia (Thiess) dan KPC melakukan arbitrase di Singapura untuk penentuan dan peninjauan atas pengaturan harga di kontrak jasa pertambangan. Tinjauan pengaturan harga itu dijadwalkan akan efektif dari tanggal 1 Juli 2009 sampai lima (5) tahun ke depan. Pada tanggal 18 dan 19 Desember 2011, sidang dilakukan oleh Pengadilan. Pada tanggal 12 Maret 2012, Majelis dari arbitrase pengaturan harga memutuskan dan menyatakan bahwa tarif yang diterapkan sebelum tanggal 1 Juli 2009 harus terus berlanjut diterapkan sampai dengan penyelesaian pengaturan harga di arbitrase ini. Pengadilan juga memutuskan bahwa tagihan faktur harus sesuai dengan tarif yang berlaku sebelum tanggal 1 Juli 2009, dengan demikian, tarif yang ditentukan dari para ahli menjadi tidak berlaku. Pada tahun 2013 dan 2014, KPC melakukan pembayaran sementara masing-masing sebesar USD37,1 juta dan USD2,2 juta kepada Thiess.

Pada tanggal 31 Januari 2014, Pengadilan mengeluarkan penolakan Sebagian Keputusan Kedua tentang pengaturan harga untuk tarif produksi batubara, variasi tarif dan tarif harian yang diajukan oleh Thiess yang telah diatur dalam Lampiran 2, Bagian 1, 2, dan 3 dari Perubahan Pembelaan dan Tuntutan Balasan serta mengumumkan bahwa penyusunan harga harus diterapkan untuk lima (5) tahun mulai tanggal 1 Juli 2009 dengan tarif yang akan menghasilkan Thiess untuk mendapatkan bayaran sebesar 14% dari biaya dan beban selama periode lima tahun.

Selanjutnya, Pengadilan memutuskan bahwa pembayaran klaim Thiess berikutnya akan mencakup semua penyesuaian yang diperlukan untuk memberika pengaruh atas penerapan pengaturan harga baru dari tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 1 Juli 2009 dan penyesuaian tersebut termasuk bunga atas nilai pokok dari setiap penyesuaian sampai dengan tanggal dimana KPC melakukan pembayaran penuh kepada Thiess.

Pada tanggal 28 dan 29 Mei 2014, Pengadilan menggelar sidang lanjutan dan dengan pendapat terakhir untuk menentukan jumlah pembayaran lanjutan dan bunga terutang dan biaya klaim masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa sejumlah USD69.5 juta harus dibayar oleh KPC kepada Thiess. Pada tanggal 22 Agustus 2014, Pengadilan mengeluarkan keputusan akhir. Pada tahun 2014, KPC telah melunasi seluruh saldo terutang kepada Thiess.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- f. In 2011, PT Thiess Contractors Indonesia (Thiess) and KPC sought an arbitration in Singapore for the determination and review of pricing arrangements under the mining service contract. The review of pricing arrangements was due to be effective from July 1, 2009 up to the next five (5) years. On December 18 and 19, 2011, hearings were conducted by the Tribunal. On March 12, 2012, the Tribunal for the pricing arrangement arbitration awarded and declared that the rates applied prior to July 1, 2009 shall continue to apply until the resolution of the pricing arrangements in this arbitration. It is also determined that the invoice payment claims shall be based on the rates that applied prior to July 1, 2009, thus, the rates set out in the expert determination are not yet applicable. In 2013 and 2014, KPC made payments of USD37.1 million and USD2.2 million, respectively, to Thiess.

On January 31, 2014, the Tribunal issued the Second Partial Award rejecting the pricing arrangement on the rates for coal production, rates for variation and rates for dayworks proposed by Thiess as set out in Schedule 2, Parts 1, 2 and 3 of the Amended Defense and Counterclaim and declares that the pricing arrangements shall apply for the five (5) years commencing from July 1, 2009 with representative rates that would yield Thiess to earn 14% margin on its costs and expenses over the five-year period.

Furthermore, the Tribunal awarded that Thiess' next payment claim shall include all necessary adjustments to give effect to the application of such new pricing arrangements from the review date of July 1, 2009 and that such necessary adjustments shall include interest on the principal amount of any adjustment up to the date that KPC makes full payment to Thiess.

On May 28 and 29, 2014, the Tribunal held a further and final hearing to determine quantum of catch-up payment and interest payable and parties' respective claims for costs. Both parties have come to an agreement that the sum of USD69.5 million is payable from KPC to Thiess. On August 22, 2014, the Tribunal has issued its final award. In 2014, KPC has paid all the outstanding amounts to Thiess.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- g. Pada tahun 2012, Thiess mengajukan arbitrase di Singapura melawan KPC sehubungan dengan serangkaian klaim yang timbul dari Pasal 7.10(a) dari Jasa Penambangan Batubara antara Thiess dan KPC. Berdasarkan pasal ini, masing-masing pihak dalam perjanjian diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis yang dikenal sebagai "Operating Year Notice" yang menyatakan isu-isu yang muncul dalam Tahun Operasi, termasuk klaim dan tuntutan yang dibuat oleh satu pihak terhadap pihak lain dalam Tahun Operasi. Thiess dan KPC tidak mampu menyelesaikan masalah untuk Tahun Operasi ke 8 (Juli 2010-Juni 2011) dan sebagai akibatnya, sebuah pengadilan dibentuk pada bulan Desember 2012. Pada tanggal 16 September 2013, para pihak mencapai kesepakatan sejumlah klaim sebesar USD6.4 juta, yang dibayarkan oleh KPC pada bulan November 2013. Pada bulan Februari 2014, KPC melakukan pembayaran sebesar USD6.0 juta. Pada bulan September 2014, perkara ini telah disimpulkan dan Pengadilan telah diinformasikan.
- h. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) [PLN] memalui suratnya tertanggal 13 Agustus 2013, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkompensasi faktur KPC secara bertahap mulai dari bulan Agustus 2013 untuk mengikuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK, dalam auditnya, menyatakan bahwa PLN telah melakukan kelebihan pembayaran sebesar Rp41.391.617.765 dari penjualan batubara triwulan 1 tahun 2012. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan PLN harus mengklaim kelebihan pembayaran kepada KPC. Pada tanggal 9 September 2013, KPC mengajukan surat keberatan kepada PLN yang menyatakan bahwa penjualan dan pembayaran yang dilakukan didasarkan pada spesifikasi batubara yang disesuaikan dan harga yang telah disepakati oleh PLN dan KPC melalui *Memorandum of Understanding*. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PLN telah mengkompensasi faktur KPC. Sementara itu, kedua belah pihak masih mencari penyelesaian damai bagi masalah ini.
- i. Pada tanggal 9 Juni 2009, Arutmin mengajukan dua (2) tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTUN Banjarmasin) terhadap keputusan Bupati Tanah Bumbu mengenai terbitnya izin eksplorasi dan eksploitasi kepada PT Anzawara Satria dan CV Putra Parahyangan Mandiri yang melewati wilayah PKP2B DU-314/Kalsel dan DU-322/Kalsel.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- g. In 2012, Thiess sought an arbitration in Singapore against KPC in respect of a series of claims arising from Clause 7.10(a) of the Coal Mining Services Operation between Thiess and KPC. Pursuant to this clause, each party in the agreement is required to issue written notice known as the "Operating Year Notice" stating the issues that have arisen in a given Operating Year, including the claims and demands made by the party against the other party in the given Operating Year. Thiess and KPC were unable to resolve issues for the Operating Year 8 (July 2010-June 2011) and as a result, a Tribunal was constituted in December 2012. On September 16, 2013, the parties reached settlement on a number of claims in the total amount of USD6.4 million, which was paid by KPC in November 2013. In February 2014, KPC made additional payment in the amount of USD6.0 million. In September 2014, this matter has been concluded and the Tribunal has been informed accordingly.
- h. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) [PLN] on its letter dated August 13, 2013, conveyed that it will set off the KPC's invoices gradually starting from August 2013 following the recommendation from Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK, from its audit, claimed that PLN has made an overpayment in the amount of Rp41,391,617,765 from the Quarter 1-2012 coal sales. Therefore, BPK recommended that PLN should claim the overpayment from KPC. On September 9, 2013, KPC sent an objection letter to PLN stating that the sales and payment made were based on the adjusted coal specifications and price agreed by PLN and KPC through a Memorandum of Understanding. As of the completion date of the consolidated financial statements, PLN has set off KPC's invoices. Meanwhile, both parties are still seeking an amicable settlement for this issue.
- i. On June 9, 2009, Arutmin filed two (2) lawsuits in the State Administrative Court of Banjarmasin against the decrees of the Regent of Tanah Bumbu concerning the issuance of exploration and exploitation mining rights to PT Anzawara Satria and CV Putra Parahyangan Mandiri that overlap Arutmin's CCoW areas of No. DU 314/Kalsel and DU-322/Kalsel, respectively.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2009 melalui putusan sela, PTUN Banjarmasin menerima permohonan PT Anzawara Satria untuk menjadi pihak intervensi yang selanjutnya diikuti oleh CV Putra Parahyangan Mandiri pada tanggal 28 Juli 2009.

Pada tanggal 4 Agustus 2009, melalui putusan sela, PTUN Banjarmasin menolak tuntutan balik yang diajukan oleh Bupati Tanah Bumbu dan PT Anzawara Satria. Pada tanggal 11 Agustus 2009, PT Anzawara Satria mengajukan keberatan terhadap putusan sela yang ditolak oleh Pengadilan.

Pada tanggal 3 November 2009, PTUN Banjarmasin mengeluarkan dua (2) putusan yang memenangkan Arutmin. PTUN Banjarmasin memutuskan untuk mencabut izin eksplorasi dan eksploitasi atas nama PT Anzawara Satria dan CV Putra Parahyangan Mandiri serta memerintahkan Bupati Tanah Bumbu untuk membatalkan izin-izin tersebut. Pada hari yang sama, PTUN Banjarmasin menerbitkan dua (2) keputusan yang menunda pemberlakuan dari izin eksplorasi dan eksploitasi atas nama PT Anzawara Satria dan CV Putra Parahyangan Mandiri.

Sehubungan dengan putusan dan keputusan pengadilan tersebut, PT Anzawara Satria, CV Putra Parahyangan Mandiri dan Bupati Tanah Bumbu mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana Arutmin kalah melawan PT Anzawara Satria, tetapi menang melawan CV Putra Parahyangan Mandiri dan Bupati Tanah Bumbu.

Setelah itu, Arutmin mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap PT Anzawara Satria. Sebaliknya, pengajuan kasasi juga dilakukan Bupati Tanah Bumbu dan CV Putra Parahyangan Mandiri terhadap Arutmin. Pada 18 Januari 2011, Arutmin memenangkan perkara melawan Bupati Tanah Bumbu dan CV Putra Parahyangan Mandiri dan putusan yang sama diberikan kepada Arutmin pada tanggal 19 Januari 2011 terhadap PT Anzawara Satria.

Bupati Tanah Bumbu dan PT Anzawara Satria telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 20 Juli 2011 dan 16 Agustus 2011. Pada tanggal 21 Februari 2012, Mahkamah Agung mengumumkan keputusan yang mendukung Arutmin, oleh karena itu, Bupati Tanah Bumbu membatalkan eksplorasi dan eksploitasi hak pertambangan kepada PT Anzawara Satria.

50. CONTINGENCIES (Continued)

On June 30, 2009, through an interlocutory judgment, the Court granted the request of PT Anzawara Satria to be an intervening party of the proceedings, which was subsequently followed by CV Putra Parahyangan Mandiri on July 28, 2009.

On August 4, 2009, through an interlocutory judgment, the Court denied the counterclaim proposed by the Regent of Tanah Bumbu District and PT Anzawara Satria. On August 11, 2009, PT Anzawara Satria appealed the interlocutory judgment that was dismissed by the Court.

On November 3, 2009, the Court issued two (2) decisions that approved Arutmin's claims. The decisions terminated the exploration and exploitation permits of PT Anzawara Satria and CV Putra Parahyangan Mandiri, and ordered the Regent of Tanah Bumbu District to revoke such permits. At the same time, the Court also issued two (2) decrees postponing the validity of the exploration and exploitation permit of PT Anzawara Satria and CV Putra Parahyangan Mandiri.

Due to the issuance of such court decisions and decrees, PT Anzawara Satria, CV Putra Parahyangan Mandiri and the Regent of Tanah Bumbu District filed appeals to the High Administrative Court of Jakarta, wherein Arutmin lost the case against PT Anzawara Satria, but won the cases against CV Putra Parahyangan Mandiri and the Regent of Tanah Bumbu District.

Subsequently, Arutmin filed cassation to the Supreme Court for its case with PT Anzawara Satria. In the other cases, the Regent of Tanah Bumbu District and CV Putra Parahyangan Mandiri filed cassation to the Supreme Court. On January 18, 2011, Arutmin was awarded judgment for the Regent of Tanah Bumbu District and CV Putra Parahyangan Mandiri case, followed by that in the PT Anzawara Satria case on January 19, 2011.

The Regent of Tanah Bumbu District and PT Anzawara Satria have filed a memo for judicial review to the Supreme Court on July 20, 2011 and August 16, 2011, respectively. On February 21, 2012 the Supreme Court issued a decision in favor of Arutmin, hence, the Regent of Tanah Bumbu District revoked the exploration and exploitation mining right issued to PT Anzawara Satria.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Sesuai dengan pembatalan, CV Putra Parahyangan Mandiri mengajukan tuntutan baru pada PTUN Banjarmasin terhadap Bupati Tanah Bumbu ("terdakwa"). Arutmin bergabung dengan terdakwa dan bertindak sebagai intervenor atas gugatan yang diajukan.

Pada tanggal 10 Juli 2014, PTUN Banjarmasin mengeluarkan keputusan yang memenangkan CV Putra Parahyangan Mandiri. Pada tanggal 2 Oktober 2014, Bupati Tanah Bumbu ("Pemohon") mengajukan banding ke PTUN Jakarta. Arutmin bergabung dengan Pemohon dan bertindak sebagai intervenor atas banding yang diajukan. Pada tanggal 8 Desember 2014, PTUN Jakarta mengeluarkan keputusan yang memenangkan Arutmin (Catatan 53e).

- j. Pada tanggal 3 Juni 2010, Arutmin mengajukan gugatan pada PTUN Banjarmasin terhadap Bupati Kotabaru karena menerbitkan dua (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, masing-masing terhadap PT Sebuku Batubai Coal dan PT Sebuku Tanjung Coal. Kedua IUP Eksplorasi tersebut tumpang tindih dengan salah satu wilayah PKP2B Arutmin yaitu DU-314/Kalsel (Sungup Sembuluan).

Pada tanggal 30 November 2010, PTUN Banjarmasin menerbitkan putusan yang menyatakan gugatan Arutmin tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 9 Desember 2010, Arutmin mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pada tanggal 25 Maret 2011, PTTUN menerbitkan putusan yang memihak kepada PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal. Arutmin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 22 Agustus 2011. Pada tanggal 12 Oktober 2011, Mahkamah Agung memutuskan yang memenangkan PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal. Pada tanggal 16 Agustus 2012, Arutmin mengajukan memo sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung, namun kemudian memutuskan untuk mencabut memo tersebut pada tanggal 2 Januari 2013.

- k. Pada tanggal 1 November 2012, Antung Mulian, penduduk setempat, mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Arutmin dan PT Darma Henwa Tbk, entitas asosiasi, dengan tuduhan bahwa Arutmin memperoleh secara ilegal kepemilikan tanah atas nama Mulian dengan luas area 2.000 meter persegi di Kabupaten Tanah Laut. Pada tanggal 4 April 2013, Mulian memutuskan untuk mencabut tuntutannya.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Pursuant to the revocation, CV Putra Parahyangan Mandiri filed a new lawsuit at the Administrative Court of First Instance of Banjarmasin against the Regent of Tanah Bumbu District ("the defendant"). Arutmin joined the defendant and acts as intervenor on the lawsuit filed.

On July 10, 2014, the Administrative Court of First Instance of Banjarmasin released a decision in favor of CV Putra Parahyangan Mandiri. On October 2, 2014, the Regent Tanah Bumbu (the "appellant") filed an appeal to the High Administrative Court of Jakarta. Arutmin joined the appellant and acts as an intervenor on the appeal filed. On December 8, 2014, High Administrative Court of Jakarta issued a decision in favor of Arutmin (Note 53e).

- j. *On June 3, 2010, Arutmin filed lawsuits at the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin against the Regent of Kotabaru, for the issuance of two (2) Mining Exploration Permits (IUP) to PT Sebuku Batubai Coal and PT Sebuku Tanjung Coal, respectively. The Mining Exploration Permits overlap with one of Arutmin CCoW areas, DU-314/Kalsel (Sungup Sembuluan).*

On November 30, 2010, the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin issued decisions that revoked the lawsuits of Arutmin. In response to these decisions, on December 9, 2010, Arutmin filed applications of appeal to the High Administrative Court. On March 25, 2011, the High Administrative Court issued a decision in favor of PT Sebuku Tanjung Coal and PT Sebuku Batubai Coal. Arutmin filed for cassation to the Supreme Court on August 22, 2011. On October 12, 2011, the Supreme Court decided in favor of PT Sebuku Tanjung Coal and PT Sebuku Batubai Coal. On August 16, 2012, Arutmin filed a memo for consideration to the Supreme Court but decided to revoke the memo for consideration on January 2, 2013.

- k. *On November 1, 2012, Antung Mulian, a local resident, filed a lawsuit at the District Court of Pelaihari against Arutmin and PT Darma Henwa Tbk, an associate, based on the accusation that Arutmin had illegally obtained possession of Mr. Mulian's plots of land with a total area of 2,000 square meters in Tanah Laut District. On April 4, 2013, however, Mr. Mulian decided to revoke the claim.*

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- i.** Pada tanggal 20 Agustus 2010, PT Malindo Jaya Diraja, perusahaan perkebunan yang mengaku sebagai pemilik lahan yang tumpang tindih dengan 2 (dua) wilayah PKP2B Arutmin yaitu DU-308/Kalsel (Karuh) dan DU-318/Kalsel (Satui), mengajukan gugatan terhadap Arutmin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Gubernur Kalimantan Selatan, sehubungan dengan diterbitkannya PKP2B Arutmin, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Arutmin dan rekomendasi bagi diterbitkannya IPPKH Arutmin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai keseluruhan gugatan yang diajukan adalah sebesar Rp11.066.099.500.000. Pada tanggal 5 Juli 2011, Arutmin memenangkan gugatan pada tingkat pengadilan ini. Namun demikian, pada tanggal 18 Juli 2011, PT Malindo Jaya Diraja mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal 17 September 2013, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan keputusan untuk mengesampingkan banding PT Malindo Jaya Diraja dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri.

- m.** Pada tanggal 7 April 2011, Abdul Hadi, penduduk setempat, mengajukan gugatan terhadap Arutmin, PT Cipta Kridatama dan H. Darmansyah di PTUN Kotabaru dengan tuduhan Arutmin telah membayar H. Darmansyah atas kompensasi sebidang tanah di area pertambangan, yang kepemilikannya masih menjadi sengketa antara Abdul Hadi dan H. Darmansyah.

Pada tanggal 11 Mei 2011 dan 22 Juni 2011, PTUN Kotabaru mengadakan proses mediasi namun hal tersebut gagal untuk menyelesaikan sengketa tanah. Pada tanggal 7 Maret 2012, PTUN Kotabaru mengeluarkan keputusan yang memenangkan Abdul Hadi dalam perkara ini. Pada tanggal 16 Maret 2012, Arutmin mengajukan permohonan banding ke PTTUN Jakarta yang menerbitkan keputusan pada tanggal 12 September 2012, yang memenangkan Abdul Hadi. Pada tanggal 12 November 2012, Arutmin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 2 Juli 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang mendukung Abdul Hadi. Arutmin tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, meskipun keputusan tersebut tidak menguntungkannya karena kegiatan pertambangan di tanah sengketa telah selesai. Selain itu, kewajiban untuk mengkompensasi Abdul Hadi dikenakan kepada H. Darmansyah.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- i.** On August 20, 2010, PT Malindo Jaya Diraja, a plantation company claiming to own plots of land that overlap with two (2) of Arutmin's CCoW areas, DU-308/Kalsel (Karuh) and DU-318/Kalsel (Satui), filed lawsuit against Arutmin, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Forestry and the Governor of South Kalimantan, because of the issuance of Arutmin's mining concession, Arutmin's Forestry Area Land-Use Permit (IPPKH) and recommendation for Arutmin's Forestry Area Land-Use Permit, at the District Court of South Jakarta. The total amount of the claim is Rp11,066,099,500,000. On July 5, 2011, Arutmin was awarded at this level. However, on July 18, 2011, PT Malindo Jaya Diraja filed an appeal to the High Court of Jakarta. On September 17, 2013, the High Court of Jakarta released a decision overruling PT Malindo Jaya Diraja's appeal and affirmed the District Court's decision.

- m.** On April 7, 2011, Mr. Abdul Hadi, a local resident, filed a lawsuit against Arutmin, PT Cipta Kridatama and H. Darmansyah at the Administrative Court of Kotabaru, based on the accusation that Arutmin has been paying Mr. H. Darmansyah compensation for mining a plot of land, the ownership of which is still being disputed between Mr. Abdul Hadi and Mr. H. Darmansyah.

On May 11, 2011 and June 22, 2011, the Administrative Court of Kotabaru arranged mediation processes; however, these failed to settle the land dispute. On March 7, 2012, a decision was issued by the Administrative Court of Kotabaru in favor of Mr. Abdul Hadi. On March 16, 2012, Arutmin filed an appeal to High Administrative Court of Jakarta which issued a decision on September 12, 2012, in favor of Mr. Abdul Hadi. On November 12, 2012, Arutmin filed an appeal to the Supreme Court. On July 2, 2013, the Supreme Court issued a decision in favor of Mr. Abdul Hadi. Arutmin did not file application for judicial review, although the decision is not in its favor since the mining activities in the disputed land had been completed. Furthermore, the obligation to compensate Mr. Abdul Hadi was levied to Mr. H. Darmansyah.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- n. Pada tanggal 28 Juni 2012, Rusdiansyah, warga setempat dari Tanah Bumbu mengajukan gugatan terhadap Arutmin di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Batulicin berdasarkan tuduhan bahwa Arutmin telah secara ilegal memperoleh kepemilikan atas tanah seluas 140 hektar milik Rusdiansyah. Pada tanggal 29 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dari Batulicin menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Akibatnya, pada tanggal 22 November 2012, Rusdiansyah, bersama dengan tujuh puluh satu (71) warga setempat mengajukan gugatan revisi terhadap Arutmin. Pada tanggal 5 Juli 2013, Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Batulicin menerbitkan keputusan yang menguntungkan Arutmin.
- o. Pada tanggal 13 Juni 2013, PT Autum Bara Energi, pemegang IUP No. 545/44/PIUP-O/D.PE/2010, mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap keputusan Bupati tanah Bumbu atas pencabutan izin pertambangan yang melewati wilayah PKP2B DU-322/Kalsel (Asam Asam). Pada tanggal 27 Maret 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengeluarkan sebuah keputusan yang mendukung PT Autum Bara Energi. Arutmin telah mencatat keputusan pengadilan tanpa banding.
- p. Pada tanggal 20 Januari 2014, Arutmin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menggugat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengeluarkan keputusan pelepasan sebagian area tambang PKP2B milik Arutmin di Masa Operasi Produksi KW 00PB0192 (DU316/Kalsel) setara dengan 10.610 hektar atau 97,41% dari DU316/Kalsel. Selain itu, Arutmin meminta pengadilan untuk membatalkan keputusan sebelumnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyesuaikan DU316/Kalsel dimana DU316/Kalsel telah dikurangi menjadi 10.610 hektar atau 97,41%. Arutmin berkeyakinan bahwa seluruh wilayah pertambangan DU316/Kalsel seharusnya tidak lagi menjadi milik Arutmin sebagai akibat keputusan sebelumnya dari kasus tumpang tindih lain yang terkait dengan DU316/Kalsel.

Pada tanggal 17 Juni 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang memenagkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tanggal 30 Juni 2014, Arutmin mengajukan banding atas keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tanggal 25 November 2014, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang memenagkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Catatan 53g).

50. CONTINGENCIES (Continued)

- n. On June 28, 2012, Rusdiansyah, a local resident of Tanah Bumbu filed lawsuit against Arutmin at the District Court of First Instance of Batulicin based on the accusation that Arutmin had illegally obtained possession of the Rusdiansyah's plot of land of 140 hectares in area. On October 29, 2012, the District Court of First Instance of Batulicin declared that the petition was inadmissible (*niet ontvankelijk verklaard*). Consequently, on November 22, 2012, Rusdiansyah, together with seventy-one (71) local residents filed a revised lawsuit against Arutmin. On July 5, 2013, the District Court of First Instance of Batulicin issued a decision in favor of Arutmin.
- o. On June 13, 2013, PT Autum Bara Energi, an IUP holder No.545/44/PIUP-O/D.PE/2010, filed a lawsuit at the Administrative Court of First Instance of Banjarmasin against the Regent of Tanah Bumbu for revoking the mining permit that overlaps with Arutmin's CCoW area of DU-322/Kalsel (Asam Asam). On March 27, 2014, Administrative Court of First Instance of Banjarmasin released a decision in favor of PT Autum Bara Energi. Arutmin has noted the court's decision without appeal.
- p. On January 20, 2014, Arutmin filed a lawsuit at the Administrative Court of First Instance in Jakarta against the Ministry of Energy and Mineral Resources to oblige the latter to issue a release decision on a portion of Arutmin's CCoW mine area at Production Operating Period KW 00PB0192 (DU316/Kalsel) equivalent to 10,610 hectares or 97.41% of DU316/Kalsel. Furthermore, Arutmin asked the court to revoke the earlier decision of the Ministry of Energy and Mineral Resources adjusting DU316/Kalsel wherein DU316/Kalsel has been reduced by 10,610 hectares or 97.41%. Arutmin believes that the whole mining area of DU316/Kalsel should no longer belong to Arutmin as regards to the previous decisions from other overlapping cases related to DU316/Kalsel.

On June 17, 2014, the Administrative Court of First Instance in Jakarta released a decision in favor of the Ministry of Energy and Mineral Resources. On June 30, 2014, Arutmin filed an appeal against the decision at the High Administrative Court of Jakarta. On November 24, 2014, the High Administrative Court of Jakarta issued a decision in favor of the Ministry of Energy and Mineral Resources (Note 53g).

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- q. Pada tanggal 20 Januari 2014, Arutmin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengeluarkan keputusan tentang penyesuaian area PKP2B milik Arutmin di Masa Produksi Operasi KW 00PB0192 (DU314) yang mengurangi area PKP2B Arutmin seluas 643,98 hektar atau 87,26% dari area tambang sebelumnya.

Pada tanggal 17 Juni 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang memenagkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tanggal 30 Juni 2014, Arutmin mengajukan banding atas keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pada tanggal 25 November 2014, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin dalam proses penyusunan ulasan memo peradilan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta.

- r. Pada tanggal 13 Maret 2014, Arutmin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhadap Bupati Tanah Laut yang mengeluarkan IUP kepada PT Alam Duta Kalimantan yang tumpang tindih dengan area PKP2B milik Arutmin di DU-322/Kalsel. Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengeluarkan keputusan yang memenangkan PT Alam Kalimantan Duta. Pada tanggal 6 November 2014, Arutmin mengajukan banding atas keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Catatan 53h).
- s. Pada tanggal 13 Maret 2014, Arutmin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melawan Bupati Tanah Laut yang mengeluarkan IUP untuk CV Akbar Mitra Jaya yang tumpang tindih dengan area PKP2B milik Arutmin di DU-322/Kalsel. Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin mengeluarkan keputusan yang memenangkan Bupati Tanah Laut. Pada tanggal 6 November 2014, Arutmin mengajukan banding atas keputusan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Catatan 53i).

50. CONTINGENCIES (Continued)

- q. On January 20, 2014, Arutmin filed a lawsuit at the Administrative Court of First Instance in Jakarta against the Ministry of Energy and Mineral Resources for issuing a decision on the adjustment of Arutmin's CCoW area at Production Operating Period KW 00PB0192 (DU314) which reduced Arutmin's CCoW area by 643.98 hectares or by 87.26% of the previous mine area.

On June 17, 2014, the Administrative Court of First Instance in Jakarta released a decision in favor of the Ministry of Energy and Mineral Resources. On June 30, 2014, Arutmin filed an appeal against the decision at the High Administrative Court of Jakarta. On November 25, 2014, the High Administrative Court of Jakarta issued a decision in favor of the Ministry of Energy and Mineral Resources. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is in the process of drafting a judicial review memo against the decision of the High Administrative Court of Jakarta.

- r. On March 13, 2014, Arutmin filed a lawsuit at the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin against the Regent of Tanah Laut for issuing IUP to PT Alam Duta Kalimantan that overlaps Arutmin's CCoW area in DU-322/Kalsel. On October 22, 2014, the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin issued a decision in favor of PT Alam Duta Kalimantan. On November 6, 2014, Arutmin filed an appeal against the decision at the High Administrative Court of Jakarta (Note 53h).
- s. On March 13, 2014, Arutmin filed a lawsuit at the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin against Regent of Tanah Laut for issuing IUP to CV Akbar Mitra Jaya that overlaps with Arutmin's CCoW area in DU-322/Kalsel. On October 22, 2014, the Administrative Court of First Instance in Banjarmasin issued a decision in favor of Regent of Tanah Laut. On November 6, 2014, Arutmin filed an appeal against the decision at the High Administrative Court of Jakarta (Note 53i).

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

t. Perselisihan antara Arutmin dan Thiess

Arutmin terlibat dalam isu-isu utama berikut ini dengan salah satu kontraktornya, Thiess:

1. Pada tanggal 2 April 2013, Arutmin mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Queensland atas BS3007 tahun 2013 mencari pernyataan bahwa peristiwa penghentian adalah sesuai dengan pasal 14.3 dari AROAMS antara Arutmin dan Thiess tanggal 9 Februari 2009. Thiess telah mengajukan balasan, antara lain, pernyataan bahwa Arutmin tidak boleh melakukan perikatan dengan pihak ketiga untuk melakukan jasa pertambangan di proyek Senakin sampai sengketa antara para pihak terkait dengan klaim kontraktor utama 151 dan 152 bisa teratasi. Para pihak bersidang pada bulan November 2013 sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Arutmin atas BS3007 tahun 2013. Permohonan klaim Arutmin dihentikan oleh Mahkamah Agung Queensland sedangkan balasan yang diajukan oleh Thiess masih tertunda.
2. Thiess mengajukan klaim terhadap Arutmin, dimana Arutmin menanggapi dengan mengajukan tuntutan balik terhadap Thiess. Klaim dan tuntutan balik ini sehubungan dengan berbagai isu terkait dengan pelaksanaan AROAMS.

Menurut klausul penyelesaian sengketa AROAMS, sengketa yang berkaitan dengan AROAMS harus dicoba untuk diselesaikan oleh para pihak melalui proses pertemuan dan mediasi di *Project Management Group (PMG)* sebelum akhirnya di Mahkamah Agung Queensland. Arutmin dan Thiess telah mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus melalui proses pertemuan dan mediasi di PMG namun gagal mencapai penyelesaian. Akibatnya, kasus tersebut kemudian didaftarkan di Mahkamah Agung Queensland sebagai forum untuk sengketa sesuai dengan klausul penyelesaian sengketa di atas. Rincian klaim tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Untuk *End of Year Notice (EOYN)* tahun 2010, Thiess telah mengklaim USD16,22 juta. Sehubungan dengan EOYN yang sama, Arutmin telah menuntut balik terhadap Thiess sebesar USD57,48 juta. Akan tetapi, dalam pernyataan klaim yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung Queensland dibawah BS11698/12, Thiess hanya mengklaim USD14,1 juta ditambah bunga sebesar 10% sejak tanggal 1 Januari 2011. Klaim kepada Arutmin dilakukan pada tanggal 11 April 2013.

50. CONTINGENCIES (Continued)

t. Disputes between Arutmin and Thiess

Arutmin is involved in the following main issues with one of its contractor, Thiess:

1. On April 2, 2013, Arutmin filed an application to the Supreme Court of Queensland under BS3007 of 2013 seeking declaration that a termination event exists pursuant to clause 14.3 of the AROAMS between Arutmin and Thiess dated February 9, 2009. Thiess has filed a counterclaim seeking, *inter alia*, a declaration that Arutmin may not engage any third party to perform services at the Senakin project until the dispute between the parties in relation to principal contractor claims 151 and 152 are resolved. The parties went through a trial in November 2013 in respect to the application filed by Arutmin under BS3007 of 2013. Arutmin's claim for a declaration was dismissed by the Supreme Court of Queensland while the counterclaim filed by Thiess is still pending.
2. Thiess has filed claims against Arutmin, in which Arutmin responded by filing counterclaims against Thiess. The claims and counterclaims are on various issues related to the implementation of the AROAMS.

According to the dispute resolution clause of the AROAMS any dispute on the issues related to AROAMS must be tried to be settled by the parties at the *Project Management Group (PMG)* meetings and mediations before finally settling in the Supreme Court of Queensland. Arutmin and Thiess had tried to settle the cases at the PMG meetings and mediations but failed to reach a settlement. Consequently, the cases were then registered at the Supreme Court of Queensland as the forum for dispute in line with the above resolution clause. The details of the claims were as follows:

- i. For *End of Year Notice (EOYN)* in 2010, Thiess had claimed USD16.22 million. In relation to the same EOYN, Arutmin had filed counterclaims against Thiess amounting to USD57.48 million. In its statement of claim which was registered in the Supreme Court of Queensland under BS11698/12, however, Thiess had claimed only USD14.1 million plus interest at 10% commencing January 1, 2011. The claim was served on Arutmin on April 11, 2013.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Arutmin mengajukan Pembelaan dan Tuntutan Balik atas klaim Thiess pada tanggal 25 Juli 2013 sebesar USD57,48 juta dan hal ini tertunda oleh jawaban Thiess atas Pembelaan dan Tuntutan Balik tersebut.

- ii. Untuk EOYN tahun 2011, Thiess telah mengklaim USD4,64 juta. Sehubungan dengan EOYN yang sama, Arutmin telah menuntut balik terhadap Thiess sebesar USD70,27 juta. Dalam pernyataannya klaim yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung Queensland dibawah BS5461/13, Thiess mengklaim USD4,7 juta ditambah bunga sebesar 10% sejak tanggal 1 Januari 2012. Klaim kepada Arutmin dilakukan pada tanggal 14 Juni 2013. Arutmin masih harus mengajukan Pembelaan dan Tuntutan Balik di Mahkamah Agung Queensland.
- iii. Untuk klaim bahwa Arutmin belum dapat memperoleh beberapa bidang tanah yang cukup di Pit Selatan pada tahun 2012, Thiess telah mengklaim USD12,25 juta. Akan tetapi dalam pernyataannya klaim yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung Queensland dibawah BS05460/13, Thiess hanya mengklaim USD7,9 juta ditambah bunga sebesar 10% dimulai sejak tanggal 30 Juni 2012. Arutmin masih harus mengajukan Pembelaan dan Tuntutan Balik di Mahkamah Agung Queensland.
- iv. Untuk EOYN tahun 2012, Thiess telah mengklaim USD13,15 juta terhadap berbagai klaim lain selain klaim di Pit Selatan seperti dijelaskan di atas. Arutmin telah mengajukan tuntutan balik kepada Thiess sebesar USD239,74 juta. Sengketa ini telah melalui proses pertemuan dan mediasi di PMG tanpa hasil apapun.

Arutmin mengajukan tuntutan balik untuk menunjukkan bahwa Arutmin telah mengalami kerugian yang tidak terpulihkan dan defisit arus kas karena kinerja yang buruk dari Thiess.

3. Pada tanggal 26 April 2013, Thiess menangguhkan kegiatan operasinya di wilayah pertambangan Senakin, Satui dan Mulia terkait permintaan pembayaran kepada Arutmin, seperti yang disebutkan sebagai, "underclaims". Thiess telah berhenti bekerja di bawah AROAMS, klausul 15.5 - penghentian pembayaran atas jumlah yang disengketakan ke rekening sengketa sesuai CDA. Menurut pendapat Arutmin, Thiess telah menghentikan operasinya secara sepihak dan keliru karena alasan berikut:

50. CONTINGENCIES (Continued)

Arutmin filed a Defence and Counterclaim to Thiess' claim on July 25, 2013 amounting to USD57.48 million and the matter is pending Thiess' Reply and Defence to Counterclaim.

- ii. For EOYN in 2011, Thiess had claimed USD4.64 million. In relation to the same EOYN, Arutmin had filed counterclaims against Thiess amounting to USD70.27 million. In its statement of claim that was registered in the Supreme Court of Queensland under BS5461/13, Thiess claimed USD4.7 million plus interest at 10% commencing January 1, 2012. The claim was served on Arutmin on June 14, 2013. Arutmin is yet to file its Defence and Counterclaim in the Supreme Court of Queensland.
- iii. For claims that Arutmin has not been able to acquire sufficient plots of land at Pit Selatan in 2012, Thiess had claimed USD12.25 million. In its statement of claim which was registered in the Supreme Court of Queensland under BS05460/13, however, Thiess claimed only USD7.9 million plus interest at 10% commencing June 30, 2012. Arutmin is yet to file its Defence and Counterclaim in the Supreme Court of Queensland.
- iv. For EOYN in 2012, Thiess had claimed USD13.15 million against various other items in addition for the claim at Pit Selatan as described above. Arutmin had submitted counterclaims to Thiess amounting to USD239.74 million. The dispute had gone through the process at the PMG meeting and mediation without any success.

Arutmin submitted its counterclaims to demonstrate that Arutmin has experienced unrecoverable losses and cash flow deficit due to poor performance of Thiess.

3. On April 26, 2013, Thiess suspended operations in Senakin, Satui and Mulia mining areas stating that it was pursuing Arutmin for payment of, what it describes as, "underclaims". Thiess has stopped the work under AROAMS, Clause 15.5 - non-payment of disputed amount to dispute account as per CDA. In Arutmin's opinion, Thiess has suspended services unilaterally and wrongfully due to the following reasons:

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- i. Arutmin telah membayar dan terus membayar semua jumlah yang menjadi hak Thiess sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- ii. Thiess belum mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang telah ditetapkan dan berdasarkan praktek dimasa lalu menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi.

Pada tanggal 23 Desember 2013, Thiess, IndoCoal Kalsel dan Arutmin menandatangani Akta Penyelesaian dan Penghentian (selanjutnya disebut "Akta"), dimana para pihak sepakat untuk sepenuhnya dan akhirnya menyelesaikan proses pengadilan dan klaim yang diusulkan serta untuk menyelesaikan penuh perintah *Justice Jackson* BS3007 tahun 2013 sesuai dengan ketentuan dalam Akta. Para pihak juga menyetujui, tergantung pada pelaksanaan dari ketentuan Akta, bahwa AROAMS akan berakhir lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Akta. Selain itu, tergantung pada dan sesuai dengan ketentuan Akta, Arutmin akan mengakuisisi dari Thiess atas pabrik dan peralatan tertentu terkait dengan pengolahan batubara dan operasi pelabuhan baik melalui perolehan pabrik dan peralatan yang tersisa atau mendapatkan pembeli untuk memperoleh pabrik dan peralatan yang tersisa dari Thiess.

Sesuai dengan ketentuan dalam Akta, jumlah penyelesaian dan penghentian terdiri dari, antara lain sebagai berikut:

- i. Arutmin akan membayar kepada Thiess sebesar USD37,5 juta sebagai penyelesaian penuh dan akhir dari proses pengadilan dan klaim yang diajukan.
- ii. Pembayaran penghentian lebih awal kepada Thiess sejumlah USD62,54 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - USD30,04 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin untuk jasa yang dilakukan oleh Thiess terkait AROAMS sampai dengan tanggal Akta
 - USD2,55 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin untuk pembelian persediaan Thiess terkait dengan kegiatan pengolahan batubara dan pelabuhan
 - USD23,52 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin atau pembeli sebagai pengganti Arutmin untuk pembelian persediaan Thiess yang tidak terkait dengan kegiatan pengolahan batubara dan pelabuhan
 - USD2,94 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin untuk perbaikan infrastruktur tetap

50. CONTINGENCIES (Continued)

- i. Arutmin has paid and continues to pay all sums that Thiess is entitled to as per terms of the Contract.
- ii. Thiess has not followed the dispute resolution mechanism established and the past practice of resolving such issues through discussion.

On December 23, 2013, Thiess, IndoCoal Kalsel and Arutmin entered into a Deed of Settlement and Termination (referred to as "Deed"), where the parties agreed to fully and finally settle the court proceedings and proposed claims and to vacate the orders of Justice Jackson in BS3007 of 2013 in accordance with the terms of the Deed. The parties also agreed, subject to performance of the terms of the Deed, that the AROAMS will terminate early in accordance with the terms of the Deed. Furthermore, subject to and in accordance with the terms of the Deed, Arutmin will acquire certain plant and equipment related to coal processing and port operation from Thiess and either acquire the remaining plant and equipment or procure a buyer to acquire the remaining plant and equipment from Thiess.

Subject to the terms of the Deed, the settlement and termination sum comprises, among others, are the following:

- i. Arutmin will pay to Thiess amounting to USD37.5 million in full and final settlement of the court proceedings and the proposed claims.
- ii. Early termination payment to Thiess with a total amount of USD62.54 million detailed as follows:
 - USD30.04 million as payment by Arutmin for services performed by Thiess under the AROAMS up to the date of the Deed
 - USD2.55 million as payment by Arutmin for the purchase of Thiess' inventory associated with coal processing and port activities
 - USD23.52 million as payment by Arutmin or buyer in lieu of Arutmin for the purchase of Thiess' inventory not associated with coal processing and port activities
 - USD2.94 million as payment by Arutmin for improvement to fixed infrastructures

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- USD3 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin sehubungan dengan biaya Thiess terkait dengan demobilisasi armada siaga
 - USD0,49 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin kepada Thiess untuk biaya yang terkait dengan penghentian lebih awal atas kesepakatan sewa peralatan dengan pihak lain
- iii. Arutmin akan membayar kepada Thiess jumlah yang diperkirakan sebesar USD3,1 juta untuk pekerjaan interim yang dilakukan oleh Thiess, yang akan direkonsiliasi dan diselesaikan berdasarkan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh Thiess.
- iv. Pembelian pabrik dan peralatan Thiess sejumlah USD175,24 juta dengan rincian sebagai berikut:
- USD4,4 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin untuk pembelian tambahan alat pengolahan dan pelabuhan serta pabrik dan peralatan mobile,
 - USD170,84 juta yang merupakan pembayaran oleh Arutmin atau oleh pembeli sebagai pengganti Arutmin untuk pembelian tambahan alat pengolahan dan pelabuhan serta pabrik dan peralatan mobile yang tidak terkait dengan kegiatan pengolahan batubara dan pelabuhan.

Setelah penghentian AROAMS berdasarkan Akta ini, Thiess melepaskan dan membebaskan selamanya Arutmin dan IndoCoal Kalsel dari setiap dan seluruh kewajiban sehubungan dengan semua klaim yang timbul dari atau terkait dengan atau sehubungan dengan AROAMS dan kinerja atau non-kinerja dibawah AROAMS, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Strategis (DARSA), CDA dan kinerja pekerjaan dibawah Akta ini dan sebaliknya. AROAMS dan DARSA akan terus berlanjut dan berlaku sampai jumlah yang harus dilunasi sesuai Akta dibayar penuh.

Pada tanggal 4 Juni 2014, Mahkamah Agung Queensland mengeluarkan perintah yang mempengaruhi proses persidangan yang sedang berlangsung ini, yang antara lain termasuk sebagai berikut:

1. untuk mendahulukan proses persidangan dari BS5207/14 sebelum tindakan yang lainnya;
2. untuk tetap pada dan tidak mengambil langkah-langkah untuk proses BS3007/13, BS11698/12, BS5460/13 dan BS5461/13; dan
3. untuk melakukan tindakan nomor BS11698/12, BS5460/13, BS5461/13 dan BS 5207/14 dalam daftar komersial.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- USD3 million as payment by Arutmin related to Thiess' costs of demobilizing the idle fleet
 - USD0.49 million as payment by Arutmin to Thiess for the cost associated with the early termination of its equipment rental agreement with another party
- iii. Arutmin will pay to Thiess pre-estimated amount of USD3.1 million for the interim works to be carried out by Thiess which will be reconciled and settled based on actual work by Thiess.
- iv. Purchase of Thiess' supplied plant and equipment with a total amount of 175.24 million with details are as follows:
- USD4.4 million as payment by Arutmin for the purchase of processing and port ancillary and mobile plant and equipment,
 - USD170.84 million as payment by Arutmin or buyer in lieu of Arutmin for the purchase of processing and port ancillary and mobile plant and equipment not associated with coal processing and port activities.

Upon termination of the AROAMS under this Deed, Thiess releases and forever discharges Arutmin and IndoCoal Kalsel from any and all liabilities in respect of all claims arising from or related to or connected with the AROAMS and the performance or non-performance of the services under AROAMS, Deed of Amendment and Restatement of Strategic Agreement (DARSA), CDA and performance of works under this Deed and vice versa. The AROAMS and DARSA will continue with full force and effect until sums due under the Deed are fully paid.

On June 4, 2014, the Supreme Court of Queensland issued an order that affected the process of the existing proceedings, which included among others the following:

1. to precede the proceeding of BS5207/14 before other proceedings;
2. to stand over and take no steps in the proceedings of BS3007/13, BS11698/12, BS5460/13 and BS5461/13; and
3. to place proceedings number BS11698/12, BS5460/13, BS5461/13 and BS5207/14 in the commercial list.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Oleh karena itu, penyelesaian semua tuntutan tersebut di atas antara Arutmin dan Thiess tergantung pada penyelesaian persidangan dan pelaksanaan Akta.

Pada tanggal 5 Juni 2014, Thiess mengajukan gugatan terhadap Arutmin di Mahkamah Agung Queensland dibawah BS5207/14 yang disebabkan pembayaran yang belum diselesaikan sesuai dengan Akta dimana Thiess mengklaim Arutmin sebesar USD265.29 juta ditambah tambahan bunga sesuai dengan Akta. Pada tanggal 3 Juli 2014, Arutmin mengajukan dan melakukan Pembelaan sesuai dengan perintah dari Yang Terhormatan Mr Justice Jackson. Pada tanggal 18 Juli 2014, Thiess merubah pernyataannya atas klaim dan jawabannya. Pada dengar pendapat tanggal 12 Agustus 2014, Yang Terhormatan Mr Justice Jackson membuat perintah sebagai berikut: (i) Arutmin untuk mengajukan dan memperbaiki pembelaannya pada tanggal 12 Agustus 2014; (ii) Thiess untuk mengajukan dan memperbaiki jawabannya pada tanggal 14 Agustus 2014; (iii) Arutmin untuk mengajukan dan memperbaiki jawaban yang telah diubah pada tanggal 19 Agustus 2014; (iv) Thiess untuk memberikan pengungkapan terbatas pada tanggal 29 Agustus 2014; (v) Arutmin untuk mengajukan dan menyediakan bukti pada tanggal 18 September 2014; (vi) Thiess untuk mengajukan dan menyediakan bukti pada tanggal 2 Oktober 2014; (vii) Arutmin dan Thiess untuk bertukar pendapat pada tanggal 16 Oktober 2014; dan (viii) sidang 2 hari yang dimulai pada tanggal 30 Oktober 2014. Sidang selesai pada tanggal 17 Desember 2014 dan putusan Mahkamah Agung diharapkan akan terbit. Dalam waktu dekat, Arutmin akan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk langkah selanjutnya.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sehubungan dengan penyelesaian dan keputusan jumlah yang harus dibayar oleh Arutmin, Arutmin mengakui utang sebesar USD122,95 juta dimana masing-masing sebesar USD121,4 juta dan USD1,55 juta diakui sebagai utang kepada Thiess dan utang pajak. Utang kepada Thiess termasuk tambahan klaim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD42,02 juta yang dicatat sebagai "Klaim" pada akun penghasilan (beban) lain-lain. Pada tahun 2013, Arutmin mengakui utang sebesar USD80,9 juta, yang terdiri dari USD43,9 juta dicatat sebagai "Klaim" di akun penghasilan (beban) lain-lain, USD0,6 juta dicatat sebagai bagian dari beban pokok penjualan, USD6,9 juta dicatat sebagai bagian dari persediaan dan sebesar USD29,5 juta dicatat sebagai bagian dari aset tetap. Namun demikian, terkait dengan penyelesaian dan penghentian sejumlah USD194,36 juta yang harus dibayar oleh Arutmin atau pembeli sebagai pengganti Arutmin, Arutmin akan mendapatkan pembeli untuk membeli aset-aset yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Akta.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Therefore, the settlement of all of the above mentioned lawsuits between Arutmin and Thiess depends on the settlement proceeding and the execution of the Deed.

On June 5, 2014, Thiess filed a lawsuit against Arutmin in the Supreme Court of Queensland under BS5207/14 due to the uncompleted payment as per the Deed wherein Thiess claimed from Arutmin USD265.29 million plus additional interest in line with the Deed. On July 3, 2014, Arutmin filed and served a Defence, in compliance with His Honour Mr Justice Jackson's orders. On July 18 2014, Thiess served an amended statement of claim and reply. At the directions hearing on August 12, 2014, His Honour Mr Justice Jackson issued the following orders: (i) Arutmin to file and serve its amended defence by August 12, 2014; (ii) Thiess to file and serve its amended reply by August 14, 2014; (iii) Arutmin to file and serve its amended rejoinder by August 19, 2014; (iv) Thiess to provide limited disclosure by August 29, 2014; (v) Arutmin to file and serve its evidence by September 18, 2014; (vi) Thiess to file and serve its evidence by October 2, 2014; (vii) Arutmin and Thiess to exchange submissions by October 16, 2014; and (viii) the 2-day trial to commence on October 30, 2014. The trial was completed on December 17, 2014 and the judgment of the Supreme Court is expected to be released in the near future. Arutmin will seek approval from the shareholders for the next step.

As of December 31, 2014, in relation to the settlement and termination sum to be paid by Arutmin, Arutmin recognized payable totaling USD122.95 million wherein USD121.4 million and USD1.55 million were recognized as payable to Thiess and withholding tax payable, respectively. The payable to Thiess includes additional claims recognized for the year ended December 31, 2014 amounting to USD42.02 million reported as "Claims" under other income (expense). In 2013, Arutmin recognized payables totaling USD80.9 million, which consist of USD43.9 million reported as "Claims" account under other income (expenses), USD0.6 million recorded as part of cost of sales, USD6.9 million included under inventory and USD29.5 million under fixed assets. However, in relation to the settlement and termination sum totaling USD194.36 million to be paid by Arutmin or buyer in lieu of Arutmin, Arutmin will procure a buyer to purchase those pertinent assets as provided in the Deed.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, dana untuk pembayaran utang Arutmin kepada Thiess sedang diatur oleh Arutmin. Disamping itu, Arutmin sedang mencari pembeli untuk menggantikan Thiess untuk membeli sisa pabrik dan peralatan Thiess; oleh karena itu, aset tersebut belum dialihkan kepada pembeli atau Arutmin.

u. Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk Dairi

Sebagian wilayah Kontrak Karya PT Dairi Prima Mineral (Dairi), Entitas Anak, berada pada kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-undang Kehutanan No. 41, yang berlaku efektif tahun 1999, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.

Pada tanggal pelaporan ini, Dairi telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk penambangan seng, timbal dan mineral turunannya dengan metode penambangan bawah tanah dan pembangunan sarana penunjangnya untuk area seluas 53,11 hektar dalam hutan lindung di Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.387/Menhut-II/2012 berlaku dari tanggal 23 Juli 2012 selama delapan (8) tahun.

Dairi menerima persetujuan untuk perpanjangan Tahap V Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.988.K/30/DJB/2013 yang berlaku sampai dengan 7 November 2013. Dairi saat ini menunggu persetujuan untuk perpanjangan izin Tahap Konstruksi melalui Surat No.L.187/DPM-CGR/X-2013 tanggal 7 Oktober 2013.

Manajemen berkeyakinan bahwa Dairi akan melanjutkan kegiatannya di wilayah kontrak karena mereka memiliki dukungan dari Pemerintah setempat serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kenyataan bahwa proyek tersebut didukung penuh oleh pemegang saham utama, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai aset terhadap nilai tercatat untuk properti pertambangan dalam pengembangan, aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetapnya. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan izin Tahap Konstruksi.

50. CONTINGENCIES (Continued)

As of the completion date of the consolidated financial statements, the fund for the payment of Arutmin's payable to Thiess is being arranged by Arutmin. Furthermore, Arutmin is working towards procuring a buyer to replace Thiess and who will purchase Thiess' remaining plant and equipment; hence these assets have not been transferred to the buyer or to Arutmin.

u. Exploration and Exploitation within Restricted Forest Areas for Dairi

Certain contract areas under the CoW of PT Dairi Prima Mineral (Dairi), a Subsidiary, fall within a protected forest. Forestry Law No. 41, which became effective in 1999, prohibits open-cast mining within areas of protected forest.

At reporting date, Dairi has secured a Land-Use Permit for forest areas for zinc, lead and associated minerals with mining activities by means of underground mining and construction of support facility method for the area size of 53.11 hectares in a protected forest area in Dairi Regency of the Province of North Sumatra based on Forestry Ministry Decree No. SK.387/Menhut-II/2012, which is valid from July 23, 2012 for eight (8) years.

Dairi obtained the approval for the extension of Stage Phase V of Construction, based on Letter No.988.K/30/DJB/2013 from the Ministry of Energy and Mineral Resources until November 7, 2013. Dairi is currently awaiting for the approval of the extension permit for the Construction Stage through Letter No.L.187/DPM-CGR/X-2013 dated October 7, 2013.

Management believes that Dairi will be able to continue its activities in the CoW area since they have the support of the local government and the Ministry of Energy and Mineral Resources. Based on the foregoing facts and that the project is fully supported by the ultimate holding company, management believes that no impairment is required on the carrying values of its mining properties in development stage, exploration and evaluation assets as well as its fixed assets. The management plans to continue to obtain extension of the Construction Stage permit.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

v. Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk CPM

PT Citra Palu Minerals (CPM), Entitas Anak, melakukan perjanjian Kontrak Karya yang meliputi sebuah area konsesi yang terletak di dalam Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan di luar kawasan hutan. Undang-undang Kehutanan No. 41 yang mulai berlaku sejak tahun 1999 melarang eksploitasi sumber daya alam di area hutan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, CPM masih dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan tahapan studi kelayakan dan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi. CPM yakin dapat melanjutkan aktivitas di area konsesi karena mereka memiliki dukungan dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Selanjutnya, pemulihan atas biaya eksplorasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial di masa mendatang. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan Tahap Studi Kelayakan dan IPPKH untuk aktivitas eksplorasi.

w. Eksplorasi dan Eksploitasi di Kawasan Hutan Lindung untuk GM

PT Gorontalo Minerals (GM), Entitas Anak, melakukan perjanjian Kontrak Karya yang sebagian wilayahnya terletak didalam wilayah hutan dan sebagian kecil Taman Nasional. Undang-undang Kehutanan No. 41 yang mulai berlaku sejak tahun 1999, melarang eksploitasi sumber daya alam di area hutan dan Taman Nasional, termasuk wilayah Kontrak Karya yang diberikan sebelumnya. Selanjutnya, pemulihan atas biaya eksplorasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial di masa mendatang. Untuk mengatasi hal ini, manajemen telah mendapatkan izin pinjam pakai (Catatan 49b) untuk melakukan kegiatan di wilayah hutan termasuk hutan lindung sampai dengan tanggal 18 Juli 2015. Manajemen berencana untuk melanjutkan permohonan untuk mendapatkan izin memasuki Tahap Kontruksi.

x. Iuran Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/2008 tanggal 4 Februari 2008, semua perusahaan yang memiliki kegiatan dalam area hutan produksi dan hutan lindung yang tidak berhubungan dengan kegiatan kehutanan berkewajiban untuk membayar iuran kehutanan antara Rp1,2 juta sampai dengan Rp3 juta per hektar setiap tahunnya dan berlaku efektif sejak tahun 2008.

50. CONTINGENCIES (Continued)

v. Exploration and Exploitation within Restricted Forest Areas for CPM

PT Citra Palu Minerals (CPM), a Subsidiary, entered into a CoW that includes a concession area located within Protected Forest, Limited Production Forest, Production Forest and beyond the forestry area. Forestry Law No. 41, which became effective in 1999, prohibits the exploitation of natural resources within forestry area. As of the completion date of the consolidated financial statements, CPM is still in the process of obtaining extension of the Feasibility Study Stage permit and IPPKH for exploration activities. CPM believes its ability to continue its activities in the contract area as it has the continuous support and recommendation from the local government. Furthermore, the ultimate recovery of exploration expenditure carried forward is dependent on successful development and commercial exploitation in the future. The management plans to continue to obtain extension of Feasibility Study Stage and IPPKH for exploration activities.

w. Exploration and Exploitation within Restricted Forest Areas for GM

PT Gorontalo Minerals (GM), a Subsidiary, entered into a CoW that includes a concession area located within forestry area and a small portion in a National Park. Forestry Law No. 41, which became effective in 1999, prohibits the exploitation of natural resources within areas of National Park, including CoWs that were granted prior to the declaration. Furthermore, the ultimate recovery of exploration expenditure carried forward is dependent on successful development and commercial exploitation in the future. In response to these matters, management has obtained land-use permit (Note 49b) to undertake activities in forest including for restricted forest areas up to July 18, 2015. The management plans to continue to obtain entering Construction Stage permit.

x. Forestry Fee

Based on Government Regulation No. 2/2008 dated February 4, 2008, all companies that have activities in production and protected forest areas that are not related to forestry activities will have an obligation to pay a forestry fee ranging from Rp1.2 million to Rp3 million per hectare annually effective from 2008.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

y. Reklamasi dan Pascatambang

Berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18/2008 yang diterbitkan pada tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2010 yang diterbitkan pada bulan Desember 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pemegang Kontrak Karya, PKP2B, dan IUP Eksplorasi yang belum menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut harus memberikan baik jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam waktu tiga (3) bulan setelah tanggal efektif peraturan pemerintah tersebut.

Arutmin telah membukukan jaminan reklamasi pada tanggal 31 Desember 2014, sedangkan KPC telah membuat jaminan reklamasi dalam bentuk "Cadangan Akuntansi" yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi melalui surat tanggal 14 Juni 2010.

Arutmin mengajukan rencana pascatambang untuk semua area tambangnya yaitu Satui, Senakin, Asam Asam, Batulicin dan Pulau Laut Utara pada tanggal 30 Juni 2009 melalui surat No. 300/AI/VI/09 ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2012, rencana pascatambang untuk semua area tambang telah disetujui oleh Pemerintah, dimana Arutmin harus menyediakan jaminan pascatambang sebesar USD53.170.072 yang secara bertahap harus dibayar dari tahun 2013 hingga tahun 2017.

Pada tanggal 23 April 2013, Arutmin telah mengirim surat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk membuka rekening atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Arutmin untuk jaminan tersebut. Pada tanggal 3 Juli 2013, Arutmin menerima persetujuan atas surat kuasa tersebut dan pembukaan rekening dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pada 30 Juli 2013, Arutmin telah menyediakan jaminan untuk tahun 2013 sebesar USD1.595.102.

KPC mengajukan rencana pasca tambang pada tanggal 30 Juni 2009 kepada Direktorat Teknik Mineral dan Lingkungan, Batubara dan Panas Bumi. Pada tanggal 22 Agustus 2011, Pemerintah Indonesia menyetujui rencana pasca tambang sejumlah USD39.050.817 yang akan dibayar secara bertahap dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

50. CONTINGENCIES (Continued)

y. Reclamation and Mine Closure

Under the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18/2008 issued in 2008 and Government Regulation No. 78/2010 issued in December 2010 regarding the Reclamation and Mine Closure, the holder of a CoW, CCoW, and IUP Exploration that has not yet provided a reclamation deposit and mine closure deposit in accordance with the government regulation should provide both reclamation deposit and mine closure deposit within three (3) months following the effective date of the government regulation.

Arutmin has already provided reclamation deposits as of December 31, 2014, while KPC has provided its reclamation deposits in the form of "Accounting Reserve" that was approved by the Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal through its letter dated June 14, 2010.

Arutmin submitted its mine closure plans for all its sites namely Satui, Senakin, Asam Asam, Batulicin and North Pulau Laut Terminal on June 30, 2009 through letter No. 300/AI/VI/09 to the Ministry of Energy and Mineral Resources. In 2012, the mine closure plans for all the sites mentioned had been approved by the Government, wherein Arutmin has to provide mine closure deposits in the amount of USD53,170,072 to be paid gradually from 2013 up to 2017.

On April 23, 2013, Arutmin has sent letters of authority to Directorate General of Mineral and Coal, which represents the Ministry of Energy and Mineral Resources to open an account on behalf of the latter and Arutmin for the aforementioned deposits. On July 3, 2013, Arutmin received the approval of the letters of authority and the opening of the account by the Directorate General of Mineral and Coal and on July 30, 2013, Arutmin has made the deposit for 2013 amounting to USD1,595,102.

KPC submitted its mine closure plan on June 30, 2009 to the Technical and Environment Directorate of Mineral, Coal and Geothermal. On August 22, 2011, the GOI approved the mine closure plan in the amount of USD39,050,817 to be paid gradually from 2013 up to 2019.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Pada tanggal 10 April 2013, KPC menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sehubungan dengan jaminan reklamasi sesuai dengan juncto Peraturan Kementerian Kehutanan No. 7/2014 yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010, dimana KPC harus menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk "Cadangan Akuntansi" sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Penyisihan jaminan reklamasi sebesar USD7.253.680 pada tanggal 31 Desember 2014.

Pada bulan Juni 2014, akrual telah dibatalkan terkait dengan surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 25 April 2014 berkenaan dengan PP 78/2010 jo. MoEMR7/2014, dimana KPC harus menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi.

z. Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Kelompok Usaha menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh (10) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima (5) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Kelompok Usaha memiliki beberapa Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak (Catatan 43c). Kelompok Usaha telah mengajukan keberatan dan/atau banding yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian sedang dalam proses atau masih tertunda putusannya, yang hasil akhirnya mungkin substansial, tetapi saat ini belum bisa ditentukan.

aa. Harga Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Jangka Panjang (PPJP)

Seperti diungkapkan pada Catatan 49n, pada tanggal 26 Juni 2007, setelah berakhirnya Transaksi Sekuritisasi IndoCoal, Entitas Anak dan IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), entitas pengendalian bersama, menandatangani PPJP. Dalam PPJP, Entitas Anak melakukan sebagian dari penjualan batubara melalui ICRL, yang bertindak sebagai agen pemasaran internasional, dengan harga yang ditentukan dari harga *fixed forward* yang telah disepakati dalam PPJP tersebut.

50. CONTINGENCIES (Continued)

On April 10, 2013, KPC received a letter from the Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal regarding reclamation deposits in accordance with the juncto Ministry of Forestry Regulation No. 7/2014 issued in 2014 and Government Regulation No. 78 Year 2010, wherein KPC has to provide reclamation deposits in the form of an "Accounting Reserve" for the years 2009 to 2012. The accrual of reclamation deposits amounted to USD7,253,680 as of December 31, 2014.

In June 2014, the accrual was reversed in accordance with the letter received from the Directorate General of Mineral and Coal dated April 25, 2014 in accordance with GR 78/2010 jo. MoEMR7/2014, wherein KPC has to provide reclamation deposits in the form of a Bank Guarantee.

z. Taxation

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within ten (10) years from the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. Under new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years, the DGT may assess or amend taxes within five (5) years of the time the tax becomes due.

The Group has several Tax Assessment Letters/Tax Collection Letters (Note 43c). The Group has filed objections and/or appeals that, as of the completion date of the consolidated financial statements, were still in process or pending decision, the outcomes of which could be substantial but are not presently determinable.

aa. Pricing under the Long-term Supply Agreements (LTSA)

As disclosed in Note 49n, on June 26, 2007, subsequent to the termination of the IndoCoal Securitization Transaction, Subsidiaries and IndoCoal Resources (Cayman) Limited (ICRL), a jointly controlled entity, entered into a LTSA. Under the LTSA, Subsidiaries conduct a portion of their coal sales through ICRL, acting as their international marketing agent, with the price determined from the fixed forward price agreed in the LTSA.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak sehubungan dengan transaksi pihak berelasi. Dikarenakan harga *fixed forward* per ton batubara dapat bergerak menjadi di bawah harga pasaran dunia dan di bawah harga jual ICRL kepada pelanggan akhir, adalah mungkin otoritas pajak dapat meningkatkan liabilitas pajak Entitas Anak dari masa lalu atau masa depan untuk setiap transaksi dengan ICRL sampai perubahan PPJP pada tanggal 21 Desember 2009 dimana harga pembelian batubara berubah dari harga *fixed forward* menjadi harga pasar yang berlaku.

bb. Undang-undang Mineral dan Batubara No. 4/2009

Pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Mineral dan Batubara No.4/2009. Berdasarkan Undang-undang, sistem Kontrak Karya yang digunakan oleh Kelompok Usaha tidak lagi berlaku untuk para penanam modal. Akan tetapi Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Kontrak Karya yang masih ada, sebagaimana yang dimiliki oleh Kelompok Usaha, akan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya, dimana pada saat yang bersamaan juga menyebutkan bahwa Kontrak Karya yang ada harus diperbaharui dalam kurun waktu satu (1) tahun agar sesuai dengan Undang-undang yang baru. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-undang melalui Peraturan Pemerintah No. 22/2010 dan No. 23/2010 di bulan Februari 2010, dan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No.7/2012 tanggal 6 Februari 2012. Pemegang Kontrak Karya diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan pengolahan bijih didalam negeri didalam rentang waktu lima (5) tahun sejak Undang-undang Minerba diterbitkan.

Namun demikian, berdasarkan pengkajian kembali terhadap peraturan pelaksanaan UU Minerba tersebut, Pemerintah telah mencabut serta membatalkan keberlakuan Peraturan Pelaksana, dan sebagai penggantinya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri serta Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu No. 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu No. 75/PMK/011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang mengatur tentang Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar atas Barang Ekspor Produk Mineral yang ditentukan secara progresif.

50. CONTINGENCIES (Continued)

Under Indonesia's taxation laws, the Directorate General of Tax is authorized to re-determine the amount of the taxable income of a taxpayer in relation to related party transactions. Since the fixed forward price per tonne of coal may, at times, be below world market prices and less than ICRL's selling price to its end customers, it is possible that the tax authorities may increase Subsidiaries tax liabilities for past or future years in respect to any transactions with ICRL until the amendment of the LTSA on December 21, 2009 where the coal purchase price is changed from a fixed forward price to that of applicable market price.

bb. Law on Mineral and Coal Mining No. 4/2009

On January 12, 2009, the Government of the Republic of Indonesia issued Law on Mineral and Coal Mining (the "Law") No.4/2009. Based on the Law, the CoW system under which the Group operates will no longer be available to investors. However, the Law indicates that existing CoWs, such as the Group's CoW, will be honored until their expiration, while at the same time stating that existing CoWs must be amended within one (1) year to conform with the provisions of the new Law. Furthermore, the Government of the Republic of Indonesia issued implementing Regulations No. 22/2010 and No. 23/2010 in February 2010, and the Regulation of the Ministry of Energy and Minerals Resources No.7/2012 dated February 6, 2012. Holders of existing CoWs are also required by the Law, to comply with the obligation to conduct onshore processing of ore within five (5) years of its enactment.

However, after reviewing said Mineral Act, the implementation of regulations have been revoked by the Government and, simultaneously, the Government, through the Ministry of Energy and Mineral Resources, has issued Regulation No. 1 Year 2014 concerning mineral value add enhancement through domestic smelting and refinery activity and the Ministry of Finance has issued Regulation No. 6/PMK.011/2014 concerning Second Amendment of Ministry of Finance Regulation No. 75/PMK/011/ 2012 concerning Declaration of Export Materials that are subject to Duty and Duty Tariff which regulates the progressive Duty and Duty Tariff of Export Mineral Products.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha masih mempertimbangkan dampak Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya terhadap kegiatan operasinya.

cc. Peraturan Kementerian Keuangan No. 6/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.6/PMK.011/2014 yang menetapkan batas minimum untuk pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Peraturan ini juga menyatakan bahwa konsentrasi mineral dapat diekspor jika batas minimum untuk pengolahan dan pemurnian yang ditetapkan telah tercapai, dan rekomendasi dari Pemerintah telah diperoleh. Ekspor tersebut akan dikenakan bea progresif yang diberlakukan oleh Pemerintah. Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak yang akan timbul dari peraturan tersebut.

dd. Pemeriksaan Pada Perusahaan

Pada tanggal 9 November 2012, Perusahaan menyampaikan rilis pers yang mengumumkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Komite Audit telah mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta penetapan melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 Undang-undang Perseroan Terbatas agar ditunjuk tim pemeriksa independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan sehubungan dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada publik oleh satu pemegang saham Perusahaan, Bumi plc, dan terkait berita-berita yang dimuat di berbagai media, baik di dalam dan luar negeri.

Rilis pers tersebut juga menyatakan bahwa pada tanggal 8 November 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Komite Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan, yang pada intinya penetapan pengadilan berbunyi, antara lain:

- (i) Menyatakan bahwa Pemohon (Komite Audit) adalah pemohon yang benar dan sah.
- (ii) Mengangkat para ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan.

50. CONTINGENCIES (Continued)

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Group is still considering the impact of the Law and its implementing regulations on its operations.

cc. Ministry of Finance Regulation No. 6/PMK.011/2014 on Export Goods Imposed Export Duties and Tariffs

On January 11, 2014, the Government issued Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regulation No.6/PMK.011/2014 for establishing minimum limit for domestic processing and refining of minerals. The regulation also stipulates that mineral concentrate could be exported if minimum limit for processing and refining so established has been reached, and recommendation of the Government has been obtained. Such export will be subject to progressive export duty as imposed by the Government. The Group is evaluating the impact that would arise from the regulation.

dd. Audits on the Company

On November 9, 2012, the Company issued a press release announcing that on October 15, 2012, the Audit Committee filed a petition with the District Court of South Jakarta for a court ruling to conduct an audit on the Company in accordance with provision of Article 138 of Indonesian Company Act for the appointment of an independent investigative team to conduct an audit on the Company in view of the public notifications by a shareholder, Bumi plc, and various reports, both in local and international media.

The press release also stated that on November 8, 2012, the District Court of South Jakarta has approved the petition filed by the Audit Committee to conduct an audit on the Company. Essentially, the court rules, among others:

- (i) To declare the petitioner (the Audit Committee) a true and lawful petitioner.*
- (ii) To appoint experts to conduct audit on the Company.*

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

- (iii) Memerintahkan Presiden Direktur Termohon (Perusahaan) dan segenap Direksi maupun karyawan Termohon untuk menyediakan seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, transaksi investasi dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan Termohon maupun entitas-entitas anak Termohon yang dikonsolidasikan, untuk tahun buku 2010, 2011 dan tahun buku 30 Juni 2012, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi-transaksi penempatan dana investasi Entitas Anak.

Tim ahli dalam laporan pemeriksaannya tahun 2013 berpendapat sebagai berikut:

- (i) Tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan keuangan dalam transaksi penempatan dana material non bank yaitu penempatan dana PT Bumi Resources Minerals Tbk pada UOB, penempatan dana Perusahaan pada Recapital dan piutang pinjaman Perusahaan kepada Bukit Mutiara.
- (ii) Tidak terdapat kerugian dalam transaksi penempatan danan material non bank yaitu penempatan dana BRMS pada UOB, penempatan dana Perusahaan pada Recapital dan piutang pinjaman Perusahaan kepada Bukit Mutiara.
- (iii) Tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 November 2012 serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) UUP yang dilakukan oleh Perusahaan terkait pengelolaan keuangan Perusahaan, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUPHPer sebagaimana telah diuraikan diatas.
- (iv) Tidak ditemukan adanya penyimpangan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah diadopsi oleh Perusahaan.
- (v) Naik turunnya harga saham Perusahaan di bursa tidak serta merta terkait dengan naik turunnya keuntungan atau kerugian Perusahaan.
- (vi) Penempatan dana pada investasi yang dilakukan oleh Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga dimana Perusahaan melakukan penempatan dana dan telah sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

50. CONTINGENCIES (Continued)

- (iii) To instruct the President Director of the petitionee (the Company) and the Board of Directors and employees of the Company to provide all necessary information and data for the purpose of the forensic audit particularly in relation to its financial activities, investment transactions and other financial transactions carried out by petitionee or its consolidated subsidiaries for financial years 2010, 2011, and financial year ended June 30, 2012, including but not limited to transactions in respect of Subsidiaries investments.

The expert in its examination report in 2013 has opinion as follows:

- (i) There are no material irregularities and financial misappropriation in non-bank placement transactions i.e. placement of PT Bumi Resources Minerals Tbk funds at UOB, placement of the Company's funds in Recapital and loan receivables of the Company in Bukit Mutiara.
- (ii) (ii) There are no material losses in non-bank placement transactions, i.e. placement BRMS funds at UOB, placement of the Company's funds in Recapital and loan receivables of the Company in Bukit Mutiara.
- (iii) No evidence of tort law as stated in the Stipulation Judge dated 6 November 2012, and the provisions of Article 138 paragraph (1) of Company Law made by the Company related to the financial management of the Company, due to non-fulfillment of the elements contained in Article 1365 of KUPHPer as described above.
- (iv) Did not reveal any irregularities or acts contrary to the principles of Good Corporate Governance that have been adopted by the Company.
- (v) Rise and fall of the Company's stock prices in the market are not necessarily associated with the rise and fall of profits or losses of the Company.
- (vi) Placements of funds on the investments made by the Company have been conducted in accordance with the provisions of the agreements made by the Company with third parties, whereby the Company's funds and placements in accordance with the data in the Company's financial statements.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

**ee. Penambangan Tanpa Izin dalam Wilayah
Pertambangan GM dan CPM**

Beberapa kelompok masyarakat telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) secara tradisional di wilayah Kontrak Karya GM dan CPM. Wilayah Kontrak Karya GM yang terdampak adalah di Blok I Tombulilato sedangkan wilayah Kontrak Karya CPM yang terdampak adalah di Blok I Poboya dan Blok IV Toli-Toli.

Secara ekonomi, tidak terdapat dampak signifikan atas kegiatan PETI tersebut karena mineral yang digali secara tradisional tidak mampu mencapai cadangan mineral yang menjadi target penambangan Entitas Anak. Namun demikian, kegiatan PETI tersebut telah mengakibatkan gangguan pada kegiatan pemboran di GM dan CPM dan dipastikan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena adanya penggunaan bahan beracun (merkuri dan sianida) dalam pengolahan bijih yang tergalai.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dampak kegiatan PETI terhadap wilayah Kontrak Karya GM dan CPM, GM dan CPM telah melakukan *baseline study* atas wilayah Kontrak Karya yang juga meliputi kajian atas dampak kegiatan PETI. Selain itu, saat ini GM dan CPM tengah melakukan kajian atas dampak sosial, kesehatan dan lingkungan atas kegiatan PETI tersebut.

Upaya persuasif maupun tindakan hukum telah dilakukan oleh kepolisian dan pejabat yang berwenang untuk menghentikan kegiatan PETI tersebut.

ff. Restrukturisasi Utang

Pada tanggal 24 November 2014, Perusahaan melalui Entitas Anaknya, yaitu:

- Bumi Capital Pte. Ltd., penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior berkupon 12% senilai USD300 juta,
- Bumi Investment Pte. Ltd., penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior berkupon 10,75% senilai USD700 juta, dan
- Enercoal Resources Pte. Ltd., penerbit Obligasi Konversi Bergaransi berkupon 9,25% senilai USD375 juta,

telah mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura untuk mengikuti proses peradilan formal sebagai bagian dari upaya untuk merestrukturisasi utang sesuai dengan *Section 210 (10)* dari *Companies Act*.

50. CONTINGENCIES (Continued)

**ee. Illegal Mining in GM and CPM's Mining
Concession**

There were groups of community who have carried out illegal mining activities, in conventional manner, in CoW areas of GM and CPM. The areas that were adversely affected were the Blok I Tombulilato in the CoW area of GM, and the Block I Poboya and Block IV Toli-Toli in the CoW area of CPM.

Economically, there was no significant impact caused by the illegal mining activities to the Subsidiaries since the conventionally mined minerals were not able to reach the prospect mineral reserves of the Subsidiaries. Nevertheless, the illegal mining activities brought disturbance to the mining activities of GM and CPM and, at most certain, will give rise to environmental damages caused by the use of toxic substances (mercury and cyanide) during the processing of the extracted ores.

In order to obtain comprehensive information related to the impact of illegal mining activities in GM and CPM's CoW areas, GM and CPM conducted a baseline study of the CoW areas that also encompasses a study on the impacts of illegal mining activities. In addition, GM and CPM are presently carrying out a study on the social, health and environmental impacts caused by such illegal mining activities.

Persuasive measures as well as legal actions have been taken by the police and the competent authority to put a halt to the illegal mining activities.

ff. Debt Restructuring

On November 24, 2014, the Company through its Subsidiaries, i.e.:

- *Bumi Capital Pte. Ltd., issuer of USD300 million 12% Guaranteed Senior Secured Notes,*
- *Bumi Investment Pte. Ltd., issuer of USD700 million 10.75% Guaranteed Senior Secured Notes, and*
- *Enercoal Resources Pte. Ltd., issuer of USD 375 million 9.25% Guaranteed Convertible Bond,*

have filed an application in Singapore High Court to have a formal judicial process as part of ongoing efforts to restructure the above debts pursuant to Section 210(10) of the Companies Act.

50. KONTINJENSI (Lanjutan)

Ketiga Entitas Anak tersebut telah berhasil memperoleh perlindungan utang untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) selama enam (6) bulan terhadap upaya hukum dan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh kreditur dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei 2015. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memfasilitasi pembicaraan dengan para pemegang surat utang (*noteholders*) dan pemegang obligasi (*bondholders*), dalam rangka melanjutkan upaya restrukturisasi.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Januari 2015, Perusahaan, melalui Entitas Anak yang sama, diberikan perintah sehubungan dengan proses *US Chapter 15* (Catatan 53l).

Pada tanggal 21 Mei 2015, Perusahaan, melalui Entitas Anak yang sama, diberikan perpanjangan perlindungan utang selama lima (5) bulan (Catatan 53n).

50. CONTINGENCIES (Continued)

The three Subsidiaries were successful in obtaining a moratorium to defer the debts payment obligation for the six (6) months against legal and enforcement actions may be taken by their creditors and will expire on May 24, 2015. This effort is to facilitate the discussions with note-holders and bondholders, in connection with the continuance of ongoing restructuring efforts.

Furthermore, on January 22, 2015, the Company, through the same Subsidiaries, was granted an order in connection with the US Chapter 15 proceedings (Note 53l).

On May 21, 2015, the Company, through same Subsidiaries, was granted a five (5)-month extension of the moratorium (Note 53n).

51. REKLASIFIKASI AKUN

Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 1 Januari 2013/31 Desember 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

51. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements as December 31, 2013 and January 1, 2013/December 31, 2012 and for the year ended December 31, 2013 have been reclassified to conform with the presentation of accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2014 for comparative purposes.

	31 Desember 2013 /December 31, 2013			
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As Reclassified	
Biaya dibayar muka	5.244.658	3.012.556	8.257.214	<i>Prepaid expenses</i>
Aset lancar lainnya	41.553.712	(3.012.556)	38.541.156	<i>Other current assets</i>
Aset tetap	1.704.685.743	(844.691.351)	859.994.392	<i>Fixed assets</i>
Properti pertambangan	-	844.691.351	844.691.351	<i>Mining properties</i>
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	128.401.528	99.110.611	29.290.917	<i>Cash Flows from Operating Activities</i>
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(180.614.774)	(40.617.374)	(139.997.400)	<i>Cash Flows from Financing Activities</i>
	1 Januari 2013/ 31 Desember 2012 / January 1, 2013/ December 31, 2012			
	Dilaporkan Sebelumnya/ As Previously Reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Direklasifikasi/ As Reclassified	
Biaya dibayar muka	5.114.193	3.816.856	8.931.049	<i>Prepaid expenses</i>
Aset lancar lainnya	34.433.923	(3.816.856)	30.617.067	<i>Other current assets</i>
Aset tetap	1.752.710.026	(864.710.441)	887.999.585	<i>Fixed assets</i>
Properti pertambangan	-	864.710.441	864.710.441	<i>Mining properties</i>

**PT BUMI RESOURCES Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali
dinyatakan lain)**

**PT BUMI RESOURCES Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise
stated)**

**52. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN ARUS
KAS**

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas terdiri dari:

**52. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS
INFORMATION**

Activities not affecting to cashflows consist of:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Pembayaran premi penebusan pinjaman jangka panjang yang masih harus dibayar melalui penjualan sebagian investasi pada entitas pengendalian bersama sesuai dengan <i>Master Deed</i> (Catatan 30 dan 49ff)	524.424.182	-	<i>Payment of long-term loan accrued redemption premium through partial sale of investment in a jointly controlled entity in line with the Master Deed (Notes 30 and 49ff)</i>
Penyelesaian wesel tagih melalui akuisisi KPC (Catatan 8)	254.026.670	-	<i>Settlement of notes receivable through KPC acquisition (Note 8)</i>
Pembayaran pinjaman jangka panjang melalui penjualan sebagian investasi pada entitas pengendalian bersama sesuai dengan <i>Master Deed</i> (Catatan 30 dan 49ff)	260.962.812	-	<i>Payment of long-term loan through partial sale of investment in a jointly controlled entity in line with the Master Deed (Notes 30 and 49ff)</i>
Penyelesaian utang lain-lain melalui perolehan pinjaman jangka panjang (Catatan 30)	195.000.000	-	<i>Settlement of other payable through obtaining a long-term loans (Note 30)</i>
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang melalui penjualan sebagian investasi pada entitas pengendalian bersama sesuai dengan <i>Master Deed</i> (Catatan 30 dan 49ff)	164.613.006	-	<i>Payment of long-term loan interest through partial sale of investment in a jointly controlled entity in line with the Master Deed (Notes 30 and 49ff)</i>
Pembayaran pinjaman jangka pendek melalui penerbitan saham (Catatan 30 dan 33)	150.000.000	-	<i>Payment of short-term loan through issuance of capital stock (Notes 30 and 33)</i>
Piutang terkait dengan penerbitan saham (Catatan 10)	150.000.000	-	<i>Receivable related to issuance of capital stock (Note 10)</i>
Kapitalisasi bunga pinjaman jangka panjang ke pokok saldo (Catatan 30)	95.549.438	7.032.166	<i>Capitalized interest on long-term loan to outstanding principal (Note 30)</i>
Perpindahan piutang usaha ke piutang lain-lain neto setelah konsolidasian proporsional (Catatan 10)	52.500.000	-	<i>Transferred trade receivable to other receivable, after effect of proportionate consolidation (Note 10)</i>
Pendapatan bunga atas piutang jangka panjang yang dikapitalisasi ke pokok saldo (Catatan 20)	49.823.212	49.823.212	<i>Interest income on long-term receivable capitalized to outstanding principal (Note 20)</i>
Pembayaran pinjaman jangka panjang melalui perolehan pinjaman jangka pendek (Catatan 22 dan 30)	40.849.473	-	<i>Payment of long-term loan through obtaining short-term loan (Notes 22 and 30)</i>
Kapitalisasi bunga pinjaman jangka pendek ke pokok saldo (Catatan 22)	36.203.142	-	<i>Capitalized interest on short-term loan to outstanding principal (Note 22)</i>

**52. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN ARUS
KAS (Lanjutan)**

**52. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS
INFORMATION (Continued)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan (Catatan 16 dan 27)	23.075.042	67.800.489	<i>Additions to fixed assets through incurrence of finance lease payables (Notes 16 and 27)</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman atas utang bank dan obligasi menjadi aset tetap (Catatan 16)	12.849.176	16.843.828	<i>Capitalized borrowing costs of bank loans and bonds to fixed assets (Note 16)</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman atas utang bank dan obligasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 18)	5.121.955	5.821.870	<i>Capitalized borrowing costs of bank loans and bonds to exploration and evaluation assets (Note 18)</i>
Saling hapus antara pendapatan bunga atas deposit royalti dan terhadap koreksi pajak penjualan	1.472.679	-	<i>Offsetting of interest income on royalty deposit against sales tax corrections</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman atas utang bank dan obligasi menjadi properti pertambangan (Catatan 17)	563.527	738.111	<i>Capitalized borrowing costs of bank loans and bonds to mining properties (Note 17)</i>
Jumlah neto non kas yang ditransfer dari akuisisi Entitas Anak (Catatan 4d)	-	327.832.143	<i>Net non-cash transferred for the acquisition of Subsidiaries (Note 4d)</i>
Reklasifikasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual ke wesel tagih (Catatan 7 dan 8)	-	254.026.670	<i>Reclassification from available-for-sale financial assets to notes receivable (Notes 7 and 8)</i>
Saling hapus antara wesel tagih dengan utang lain-lain (Catatan 8 dan 24)	-	30.000.000	<i>Offsetting of notes receivable to other payables (Notes 8 and 24)</i>
Penambahan aset tetap melalui perjanjian antara Thiess, IndoCoal Kalsel dan Arutmin (Catatan 16)	-	20.676.711	<i>Acquisition of fixed assets through Deed entered into by Thiess, IndoCoal Kalsel and Arutmin (Note 16)</i>
Piutang dari penjualan Entitas Anak BRMS	-	5.000.000	<i>Receivable from sale of BRMS Subsidiaries</i>

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Pada tanggal 13 Januari 2015, PT Kaltim Prima Coal (KPC) menerima Surat Pemberitahuan dari Kementerian Keuangan mengenai saling hapus Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia dan tagihan *reimbursement* PPN untuk periode 2001-2005 sebesar USD115.628.533. Selain itu, disebutkan bahwa biaya administrasi pengurusan piutang negara untuk periode 2001-2005 sebesar USD2.362.953. Selain itu, uang jaminan royalti yang sudah disetor digunakan sebagai berikut:

1. Biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar USD236.295;
2. Utang Royalti (DHPB) kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp52.694.119.764; dan
3. Pajak Pajak Penjualan (PPn) sebesar Rp113.084.273.961.

a. On January 13, 2015, PT Kaltim Prima Coal (KPC) received a Notification Letter from the Ministry of Finance regarding the set-off of the Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) and VAT reimbursement for the periods of 2001-2005, which amounted to USD115,628,533. In addition, it is stated that the administrative fees of state receivables for the periods of 2001-2005 amounted to USD2,362,953. Furthermore, the royalty deposit was already transferred utilized as follows:

1. Administration fees of state receivables amounting to USD236,295;
2. Due to GOI/Royalty (Coal Production Proceeds) amounting to Rp52,694,119,764; and
3. Sales Tax [Pajak Penjualan (PPn)] amounting to Rp113,084,273,961.

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- b. Pada tanggal 29 Januari dan 9 Februari 2015, KPC menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun fiskal 2010 masing-masing untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan SKPKB tersebut, terdapat kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar Rp943,34 juta dan Rp452,80 juta, dan kurang bayar Pajak Penghasilan Badan dengan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD32.499.356 dan USD15.599.691. Pada tanggal 6 Maret 2015, KPC telah menyetujui dan membayar sebesar USD3.214. KPC akan mengajukan surat keberatan dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang dalam proses mempersiapkan surat tersebut.
- c. Pada tahun 2015, KPC melakukan pembayaran tambahan dimuka atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan tertanggal 27 Agustus 2014 untuk tahun fiskal 2009 sebesar USD7,5 juta dan SKPKB Pajak Penghasilan Badan tertanggal 27 November 2014 untuk tahun fiskal 2012 sebesar USD6 juta.
- d. Pada tanggal 9 Februari 2015, KPC mengirim surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ke Kantor Pajak terkait dengan SKPKB tahun fiskal 2009 untuk Pajak Penghasilan Badan. Pada tanggal 10 Maret 2015, Kantor Pajak mengirim surat tanggapan yang meminta berbagai dokumen dan informasi yang harus disiapkan oleh KPC, yang sudah disediakan pada tanggal 31 Maret 2015. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, KPC sedang menunggu tanggapan dari Kantor Pajak.
- e. Pada tanggal 8 Januari 2015, CV Putra Parahyangan Mandiri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung (Catatan 50i).

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- b. On January 29 and February 9, 2015, KPC received Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) for the fiscal year 2010 for Income Tax Article 23 and Corporate Income Tax, respectively. Based on the SKPKBs, there were underpayment of Income tax Article 23 with principal and administration fines amounting to Rp943.34 million and Rp452.80 million, respectively, and 2010 Corporate Income Tax underpayment with principal and administration fines amounting to USD32,499,356 and USD15,599,691, respectively. On March 6, 2015, KPC agreed and paid the amount of USD3,214. KPC will send an objection letter and as of the completion date of the consolidated financial statements, KPC is in the process of preparing its response letter.
- c. In 2015, KPC made additional advance payments for the SKPKBs on Corporate Income Tax dated August 27, 2014 for the fiscal year 2009 in the total amounts of USD7.5 million and on Corporate Income Tax dated November 27, 2014 for the fiscal year 2012 in the total amounts of USD6 million.
- d. On February 9, 2015, KPC sent to the Tax Office an application for reduction or cancellation of an incorrect tax assessment relating to the SKPKB fiscal year 2009 for Corporate Income Tax. On March 10, 2015, the Tax Office sent a response letter requesting various documents and information to be provided by KPC, which was provided by management on March 31, 2015. As of the completion date of the consolidated financial statements, KPC is awaiting a response from the Tax Office.
- e. On January 8, 2015, CV Putra Parahyangan Mandiri filed cassation to the Supreme Court against the decision of the High Administrative Court of Jakarta. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting the decision of the Supreme Court (Note 50i).

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- f. Pada tanggal 14 Januari 2015, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) menerima surat dari Glencore sehubungan dengan klaim komisi sebesar USD25,88 juta dari penjualan batubara milik Arutmin kepada PT Jhonlin Group (Jhonlin), salah satu pelanggan Arutmin dari tahun 2012 sampai 2014. Glencore yakin penjualan batubara ke Jhonlin adalah penjualan ekspor, dimana Glencore berhak atas komisi karena Jhonlin menjual batubara di pasar ekspor dengan sepengetahuan Arutmin. Arutmin menyatakan bahwa penjualan tersebut untuk pasar domestik, sehingga klaim dari Glencore tidak sah. Pada 18 Februari 2015, Arutmin mengirim surat tanggapannya kepada Glencore. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin dalam proses diskusi dengan perwakilan Glencore berkenaan dengan masalah ini.
- g. Pada tanggal 19 Januari 2015 Arutmin mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke Mahkamah Agung. Namun, pada tanggal 10 Maret 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan lain mengurangi wilayah pertambangan Arutmin yang tersisa di DU 316/Kalsel sebesar 282 hektar atau untuk sepenuhnya melepaskan seluruh wilayah pertambangan DU 316/Kalsel. Sehubungan dengan dikeluarkan keputusan ini oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah Kontrak Karya tambang Arutmin di DU 316\Kalsel sebesar 10.892 hektar telah dikembalikan. Selain itu, pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin berencana untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (Catatan 50p).
- h. Pada tanggal 11 Maret 2015, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang mendukung Bupati Tanah Laut. Pada tanggal 30 April 2015, Arutmin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (Catatan 50r).
- i. Pada tanggal 25 Maret 2015, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan keputusan yang mendukung Bupati Tanah Laut. Pada tanggal 21 April 2015, Arutmin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (Catatan 50s).

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- f. On January 14, 2015, PT Arutmin Indonesia (Arutmin) received a letter from Glencore which relates to claims for a commission of USD25.88 million from Arutmin's coal sales to PT Jhonlin Group (Jhonlin), one of Arutmin's customers from years 2012 to 2014. Glencore believes the coal sales to Jhonlin are export sales, wherein Glencore is entitled to a commission since Jhonlin is selling the coal on the export market with the knowledge of Arutmin. Arutmin maintained that they are sales made to the domestic market, thus the claim from Glencore is not valid. On February, 18, 2015, Arutmin sent its response letter to Glencore. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is in discussion with Glencore's representatives with regard to this matter.
- g. On January 19, 2015 Arutmin filed a cassation against the decision of the High Administrative Court of Jakarta to the Supreme Court. However, on March 10, 2015, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued another decision reducing Arutmin's remaining mining area in DU 316/Kalsel to 282 hectares or to fully release the whole mining area of DU 316/Kalsel. Following these release decisions issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources, Arutmin's CCoW mine area at DU 316\Kalsel equivalent to 10,892 hectares have been reverted. Moreover, as of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is planning to revoke the cassation filed to the Supreme Court (Note 50p).
- h. On March 11, 2015, the High Administrative Court of Jakarta issued a decision in favor of Regent of Tanah Laut. On April 30, 2015, Arutmin filed cassation to the Supreme Court against the decision of the High Administrative Court of Jakarta. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting the decision of the Supreme Court (Note 50r).
- i. On March 25, 2015, the High Administrative Court of Jakarta issued a decision in favor of Regent of Tanah Laut. On April 21, 2015, Arutmin filed cassation to the Supreme Court against the decision of the High Administrative Court of Jakarta. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is awaiting the decision of the Supreme Court (Note 50s).

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- j. Pada tanggal 11 Februari 2015, Arutmin menerima SKPKB terkait dengan kurang bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2010 dengan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD19.717.579 dan USD9.464.438. Arutmin telah setuju dan telah mencadangkan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar USD579.131 dan USD277.983. Pada tanggal yang sama, Arutmin juga menerima beberapa SKPKB dan STP terkait dengan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai tahun 2010 dengan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar Rp19.770.192.849 (setara dengan USD1.589.244 pada tanggal 31 Desember 2014) dan Rp2.551.373.619 (setara dengan USD205.094 pada tanggal 31 Desember 2014). Arutmin telah setuju dan telah mencadangkan pokok dan denda administrasi masing-masing sebesar Rp601.370.316 (setara dengan USD48.342 tanggal 31 Desember 2014) dan Rp2.840.031.037 (setara dengan USD228.298 tanggal 31 Desember 2014). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Arutmin dalam proses mempersiapkan surat jawaban keberatan terkait dengan temuan Kantor Pajak atas kurang bayar pokok dan denda administrasi Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Pajak tahun 2010.
- k. Pada bulan Februari 2015, Arutmin menerima tiga (3) STP Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Oktober 2014 sampai Desember 2014 terkait dengan keterlambatan pembayaran pokok dan denda administrasi sejumlah USD2.173.969. Liabilitas ini telah dicadangkan dan dicatat dalam "Utang Pajak" pada tanggal 31 Desember 2014 (Catatan 17a).
- l. Pada tanggal 22 Januari 2015, Perusahaan, melalui Entitas Anaknya, Bumi Capital Pte. Ltd, Bumi Investment Pte. Ltd, dan Enercoal Resources Pte. Ltd, telah diberikan perintah sehubungan dengan proses *US Chapter 15*, yang menyatakan bahwa moratorium di Singapura dan semua perintah yang berhubungan dengan pengadilan Singapura akan berlaku sepenuhnya di Amerika Serikat pada tingkat yang sama seperti yang berlaku di Singapura. Perintah itu juga mencakup larangan terhadap pihak ketiga mulai dari proses eksekusi terhadap aset pemegang surat utang atau pemegang obligasi.

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- j. On February 11, 2015, Arutmin received SKPKB related to 2010 Corporate Income Tax underpayment of principal and administration fine amounting to USD19,717,579 and USD9,464,438, respectively. Arutmin has agreed and accrued principal and administration fines amounting to USD579,131 and USD277,983 respectively. On the same date, Arutmin also received SKPKBs and a STP related to 2010 Value-Added Tax underpayment of principal and administration fines amounting to Rp19,770,192,849 (equivalent to USD1,589,244 as of December 31, 2014) and Rp2,551,373,619 (equivalent to USD205,094 as of December 31, 2014), respectively. Arutmin has agreed and accrued principal and administration fine amounting to Rp601,370,316 (equivalent to USD48,342 as of December 31, 2014) and Rp2,840,031,037 (equivalent to USD228,298 as of December 31, 2014), respectively. As of the completion date of the consolidated financial statements, Arutmin is in the process of preparing response letter objecting to the findings of the Tax Office for the disagreed underpayment of principal and administration related to 2010 Corporate Income Tax and Value-Added Tax.
- k. In February 2015, Arutmin received three (3) STPs for Income Tax article 25 for the months from October 2014 to December 2014 related to late payment of principal and administration fines totaling to USD2,173,969. This liability was accrued and included under "Taxes Payable" as of December 31, 2014 (Note 17a).
- l. On January 22, 2015, the Company, through its Subsidiaries, Bumi Capital Pte. Ltd., Bumi Investment Pte. Ltd., and Enercoal Resources Pte. Ltd., was granted an order in connection with the US Chapter 15 proceedings, which provide that the Singapore moratorium and all related orders of the Singapore court will be given full force and effect in the United States to the same extent as they are given full force and effect in Singapore. The order also includes a prohibition against third parties commencing execution process against any of the note-holders' or bondholders' assets.

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- m. Pada tanggal 13 Maret 2015, BRI ("Pihak yang Mengalihkan") secara terpisah mengadakan Perjanjian Jual dan Beli Saham (PJBS) dengan Oceanpro Investment Limited (Oceanpro) ("Pihak yang Menerima Pengalihan") untuk menjual 16 sahamnya di Leap-forward Resources Ltd. (Leap-Forward), yang mewakili kepemilikan sebesar 3,0009%, dengan harga pembelian sebesar USD8.100.000. BRI tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan memberikan *put option* kepada Oceanpro untuk menjual kembali saham ke BRI setiap saat dalam waktu satu (1) tahun, dan jika Oceanpro tidak dapat menjual saham ke satu atau lebih investor strategis baru dalam waktu satu (1) tahun, BRI tidak dapat menarik kembali dan tanpa syarat menyanggupi untuk membeli kembali saham dari Oceanpro dengan harga beli tanpa pemotongan pajak atau pengurangan lainnya.

Pada tanggal yang sama, 16 saham dialihkan ke nama Oceanpro. Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2015, Perusahaan menerima dana atas pengalihan tersebut.

Pada tanggal 21 Mei 2015, BRI ("Penjual") menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBSB) dengan Oceanpro ("Pembeli"), dimana BRI akan menjual sisa 484 sahamnya di Leap-Forward yang merupakan kepemilikan sebesar 46,9991%. Harga beli akan ditentukan kemudian oleh para pihak. PJBSB ini tunduk pada penyelesaian kondisi tertentu yang harus dipenuhi pada atau sebelum Tanggal Penutupan yaitu paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

Sehubungan dengan PJBSB di atas, pada tanggal 26 Juni 2015, BRI ("Pihak yang Mengalihkan") secara terpisah menandatangani PJBS dengan Oceanpro ("Pihak yang Menerima Pengalihan") untuk menjual 62 sahamnya di Leap-Forward, yang mewakili kepemilikan sebesar 12,3837%, dengan harga pembelian sebesar USD24.750.000. BRI tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan memberikan *put option* kepada Oceanpro untuk menjual saham kembali ke BRI setiap saat dalam waktu satu (1) tahun, dan jika Oceanpro tidak dapat menjual saham kepada satu atau lebih investor strategis baru dalam waktu satu (1) tahun, BRI tidak dapat menarik kembali dan tanpa syarat menyanggupi untuk membeli kembali saham dari Oceanpro dengan harga pembelian tanpa pemotongan atau pengurangan lainnya.

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- m. On March 13, 2015, BRI (the "Transferor") separately entered into a Sale and Purchase of Shares Agreement (SPSA) with Oceanpro Investment Limited (Oceanpro) (the "Transferee") for the purpose of selling its 16 shares in Leap-Forward Resources Ltd. (Leap-Forward), representing 3.0009% ownership interest, at a purchase price of USD8,100,000. BRI unconditionally and irrevocably grants Oceanpro a *put option* to sell the shares back to BRI at any time within one (1) year, and if Oceanpro is unable to sell the shares to one or more new incoming strategic investor(s) within one (1) year, BRI irrevocably and unconditionally undertakes to repurchase the shares from Oceanpro at the purchase price without any set off, withholding or other deduction.

On the same date, the 16 shares were transferred under the name of Oceanpro. Furthermore, on March 16, 2015, the Company received the funds.

On May 21, 2015, BRI (the "Seller") entered into a Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement (CSPSA) with Oceanpro (the "Buyer"), wherein BRI will sell its remaining 484 shares in Leap-Forward representing 46.9991% ownership interest. The purchase price shall be determined later by the parties. This CSPSA is subject to completion of certain conditions that should be satisfied on or before the Closing Date which will be no later than August 31, 2015.

Following the above CSPSA, on June 26, 2015, BRI (the "Transferor") separately entered into a SPSA with Oceanpro (the "Transferee") for the purpose of selling its 62 shares in Leap-Forward, representing 12.3837% ownership interest, at a purchase price of USD24,750,000. BRI unconditionally and irrevocably grants Oceanpro a *put option* to sell the shares back to BRI at any time within one (1) year, and if Oceanpro is unable to sell the shares to one or more new incoming strategic investor(s) within one (1) year, BRI irrevocably and unconditionally undertakes to repurchase the shares from Oceanpro at the purchase price without any set off, withholding or other deduction.

53. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- n. Pada tanggal 21 Mei 2015, Perusahaan, melalui Entitas Anak, Bumi Capital Pte. Ltd, Bumi Investment Pte. Ltd, dan Enercoal Resources Pte. Ltd. mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Singapura untuk perpanjangan perlindungan utang yang diperoleh sebelumnya selama lima (5) bulan (Catatan 50ff). Pengadilan Tinggi Singapura mengabulkan permohonan dan perlindungan utang diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) bulan sejak tanggal berakhirnya sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ("Perpanjangan Perlindungan Utang"). Perpanjangan ini akan memfasilitasi upaya restrukturisasi utang Kelompok Usaha yang sedang berlangsung.
- o. Pada tanggal 1 April 2015, Gallo meminta kepada Kementerian Sumber Daya Minyak dan Mineral Republik Yaman untuk perpanjangan dua (2) tahun untuk Blok R2 dan dua (2) tahun untuk Blok 13, dimulai dari akhir perpanjangan terakhir kedua (2) blok tersebut untuk periode dimana Gallo menghentikan pekerjaan eksplorasi.

Pada tanggal 6 Juni 2015, Gallo diberikan perpanjangan tambahan dan akhir untuk tahap eksplorasi kedua dalam PBH untuk Blok R2 selama dua belas (12) bulan sejak tanggal 14 Februari 2015.

54. KELANGSUNGAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan jumlah liabilitas lancar konsolidasian telah melebihi jumlah aset lancar konsolidasian sebesar USD4.451.781.641. Disamping itu, Kelompok Usaha mengalami wanprestasi berdasarkan perjanjian pinjaman terkait dengan gagal bayar atas pokok pinjaman tertentu dan/atau bunganya pada saat jatuh tempo.

Kelompok Usaha saat ini sedang dalam proses finalisasi strategi reorganisasi modal dan restrukturisasi utang (Catatan 50ff, 53l dan 53n), termasuk potensi penjualan aset untuk memenuhi kewajibannya.

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tidak mencakup penyesuaian yang mungkin diperlukan jika Kelompok Usaha tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya. Manajemen yakin bahwa Kelompok Usaha akan mampu melanjutkan kelangsungan usahanya.

53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- n. On May 21, 2015, the Company, through its Subsidiaries, Bumi Capital Pte. Ltd., Bumi Investment Pte. Ltd., and Enercoal Resources Pte. Ltd. filed an application in Singapore High Court for a five (5)-month extension of the moratorium previously applied (Note 50ff). The Singapore High Court granted the orders and the moratorium shall be extended for a period of five (5) months from the date of the expiry of the moratorium up to October 24, 2015 (the "Extended Moratorium"). This extension will facilitate the ongoing debt restructuring efforts of the Group.

- o. On April 1, 2015, Gallo requested to the Ministry of Mineral Resources (MOMR) of Republic of Yemen for extension of two (2) years for Block R2 and two (2) years for Block 13 starting from the end of the last extension of the two (2) blocks for the period in which Gallo stopped the implementation of the exploration works.

On June 6, 2015, Gallo was granted an extra and final extension for the second exploration phase in the PSA for Block R2 for twelve (12) months from February 14, 2015.

54. GOING CONCERN

As of December 31, 2014, the Group has incurred capital deficiency attributable to the owners of the parent and the consolidated total current liabilities have exceeded its consolidated total current assets by USD4,451,781,641. In addition, the Group has incurred defaults under certain loan agreements due to non-payment of certain outstanding principal and/or interest amounts on due dates.

The Group is currently in the process of finalizing its capital reorganization and debt restructuring strategies (Notes 50ff, 53l and 53n), including potential assets disposal to meet its obligations.

The consolidated financial statements of the Group do not include the effect of any adjustments that may be required if the Group is unable to continue as a going concern. Management believes that the Group will continue as a going concern.

55. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU/REVISIAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

Standar dan interpretasi berikut ini berlaku untuk laporan keuangan untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013) - Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 4 (Revisi 2013) - Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK No. 15 (Revisi 2013) - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK No. 24 (Revisi 2013) - Imbalan Kerja
- PSAK No. 46 (Revisi 2014) - Pajak Penghasilan
- PSAK No. 48 (Revisi 2014) - Penurunan Nilai Aset

- PSAK No. 50 (Revisi 2014) - Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 55 (Revisi 2014) - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 60 (Revisi 2014) - Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 65 - Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK No. 66 - Pengaturan Bersama
- PSAK No. 67 - Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK No. 68 - Pengukuran Nilai Wajar
- ISAK No. 26 (Revisi 2014) - Penilaian Kembali Derivatif Melekat

Penerapan dini standar dan interpretasi di atas sebelum 1 Januari 2015 tidak diizinkan.

Pencabutan interpretasi berikut ini penerapannya disyaratkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015:

- ISAK No. 7 - Entitas Bertujuan Khusus
- ISAK No. 12 - Pengendalian Bersama Entitas - Kontribusi Aset Nonmoneter oleh Venturer

Kelompok Usaha belum selesai melakukan evaluasi dampak PSAK ini terhadap laporan keuangan konsolidasian. Namun saat ini, Kelompok Usaha mengharapkan bahwa PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", akan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

**55. REVISED/NEW ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENTS**

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued new and revised standards and interpretation of accounting standards which are not yet effective for the financial year beginning January 1, 2014.

The following standards and interpretation are effective for financial statements for the year commencing from on or after January 1, 2015:

- *PSAK No. 1 (Revised 2013) - Presentation of Financial Statements*
- *PSAK No. 4 (Revised 2013) - Separate Financial Statements*
- *PSAK No. 15 (Revised 2013) - Investments in Associates and Joint Ventures*
- *PSAK No. 24 (Revised 2013) - Employee Benefits*
- *PSAK No. 46 (Revised 2014) - Income Taxes*
- *PSAK No. 48 (Revised 2014) - Impairment of Assets*
- *PSAK No. 50 (Revised 2014) - Financial Instruments: Presentation*
- *PSAK No. 55 (Revised 2014) - Financial Instruments: Recognition and Measurement*
- *PSAK No. 60 (Revised 2014) - Financial Instruments: Disclosures*
- *PSAK No. 65 - Consolidated Financial Statements*
- *PSAK No. 66 - Joint Arrangements*
- *PSAK No. 67 - Disclosure of Interests in Other Entities*
- *PSAK No. 68 - Fair Value Measurement*
- *ISAK No. 26 (Revised 2014) - Reassessment of Embedded Derivatives*

Early adoption of these standards and interpretation prior to January 1, 2015 is not permitted.

Revocation of the following interpretations are mandatory for the financial year beginning January 1, 2015:

- *ISAK No. 7 - Special Purpose Entities*
- *ISAK No. 12 - Jointly Controlled Entities: Non-Monetary Contributions by Venturers*

The Group has not yet completed its assessment of the impact of these pronouncements on the consolidated financial statements. However, the Group currently expects that PSAK No. 66, "Joint Arrangements", will have the most significant impact on the Group's consolidated financial statements beginning on or after January 1, 2015.

55. STANDAR AKUNTANSI YANG BARU/REVISIAN
(Lanjutan)

PSAK No. 66 memberikan gambaran yang lebih realistis dari pengaturan bersama dengan berfokus pada hak dan kewajiban para pihak atas pengaturan daripada bentuk hukumnya. Ada dua (2) jenis pengaturan bersama: operasi bersama dan ventura bersama. Operasi bersama muncul dimana operator bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan dan karena itu mencatat aset, kewajiban, pendapatan dan beban terkait dengan kepentingannya. Ventura bersama muncul dimana venturer bersama memiliki hak atas pengaturan aset neto dan karena itu mengakui kepentingannya dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Metode konsolidasian proporsional yang saat ini diterapkan oleh Kelompok Usaha untuk kepentingannya dalam ventura bersama tidak diperbolehkan lagi. Saat ini, Kelompok Usaha mengharapkan bahwa PSAK No. 66 akan memiliki dampak material pada penyajian kepentingan Kelompok Usaha dalam ventura bersama karena investasi Kelompok Usaha adalah signifikan dalam ventura bersama seperti dijelaskan pada Catatan 49x. Manajemen Perusahaan bermaksud untuk mempersiapkan angka untuk pengungkapan di masa depan sebelum dan sesudah PSAK No. 66 untuk kejelasan dan kemudahan pemahaman kepada para pemangku kepentingan.

**55. REVISED/NEW ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENTS** *(Continued)*

PSAK No. 66 provides a more realistic reflection of joint arrangements by focusing on the rights and obligations of the parties to the arrangement rather than its legal form. There are two (2) types of joint arrangement: joint operations and joint ventures. Joint operations arise where a joint operator has rights to the assets and obligations relating to the arrangement and therefore accounts for its share of assets, liabilities, revenue and expenses. Joint ventures arise where a joint venturer has rights to the net assets of the arrangement and therefore accounts for its interest using the equity method in accordance with PSAK No. 15 (Revised 2013), "Investments in Associates and Joint Ventures". The proportionate consolidation method currently applied to the Group's interests in joint ventures is prohibited. The Group currently expects that PSAK No. 66 will have a material impact on the presentation of the Group's interests in its joint ventures owing to the Group's significant investments in joint ventures as discussed in Note 49x. It is the intention of the Company's management to prepare pre- and post-PSAK No. 66 numbers in future disclosures for clarity and ease of understanding to the stakeholders.